BUMN UNTUK INDONESIA

NINDYA

Ride The New Wave

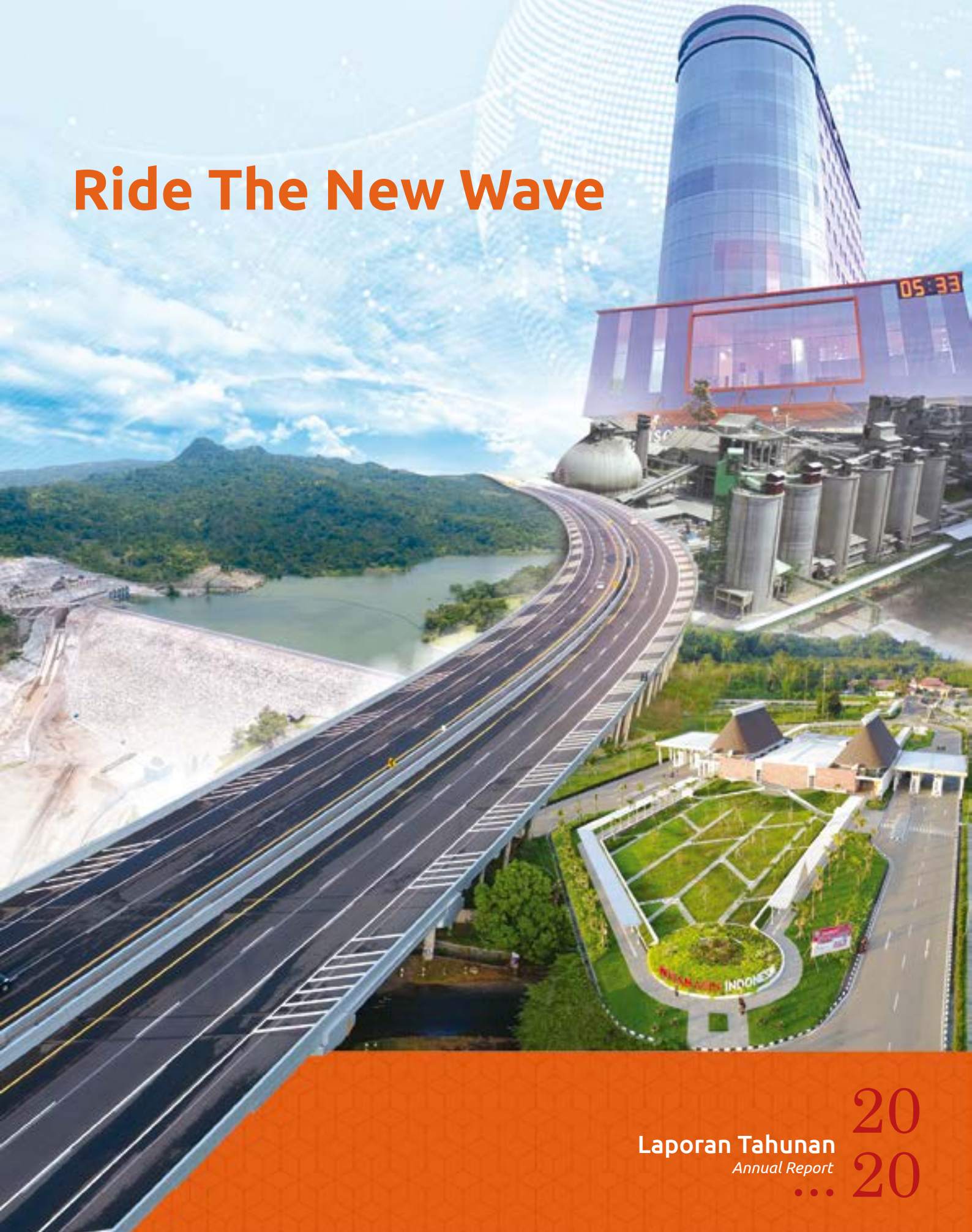

Laporan Tahunan
Annual Report

2020

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN

INFORMATION PRESENTED IN THE ANNUAL REPORT

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) 2020 dengan tema "Ride The New Wave" Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Nindya Karya (Persero) di sepanjang 2020 serta masa depan keberlanjutan bisnis PT Nindya Karya (Persero).

Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) 2020 diterbitkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Laporan tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam kriteria *Annual Report Award* (ARA) yang dikembangkan oleh 7 (tujuh) prinsipal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) 2020 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di *website* resmi PT Nindya Karya (Persero) Tbk yaitu www.nindyakarya.co.id.

PT Nindya Karya (Persero) juga menyampaikan beberapa aspek yang merupakan bagian dari pengembangan dan interpretasi atas isi Laporan Tahunan. Dengan demikian, PT Nindya Karya (Persero) mengharapkan Laporan Tahunan ini dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi yang wajar seiring dengan terpenuhinya aspek komposisi dan aspek substansi.

Welcome to the 2020 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) with the theme "Ride The New Wave" This theme was chosen based on an in-depth analysis and review on the facts and development of business of PT Nindya Karya (Persero) over the course of 2020 as well as its business sustainability in the future.

The 2020 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) is issued in accordance with the Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 29/POJK.04/2016 regarding Annual Report of Issuers or Public Companies, and Circular Letter of OJK No. 30/SEOJK.04/2016 regarding Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies.

The references and standards used in preparing this annual report are the standard parameters and criteria applicable in Indonesia where the Company conducts its business. This annual report also uses the standard criteria of Annual Report Award (ARA) developed by 7 (seven) principals in Indonesia, namely the Financial Services Authority, Ministry of SOE, Ministry of Finance, Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange, Institute of Indonesia Chartered Accountants, and National Committee on Governance Policy.

The mention of "Rupiah" or "Rp" in this report refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

The 2020 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) is presented bilingually, namely in Indonesian Language and English; uses easily read font type and size, and is printed in a good quality. The annual report can be viewed at and downloaded from the official website of PT Nindya Karya (Persero) www.nindyakarya.co.id.

PT Nindya Karya (Persero) also delivers a number of aspects as parts of development and interpretation of the annual report contents. Hence, PT Nindya Karya (Persero) expects that this report will be able to support the improvement of information disclosure in a fair manner in line with the fulfillment of the aspects of composition and substance.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan", "Nindya Karya", atau "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Nindya Karya (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha penyedia jasa konstruksi. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Nindya Karya (Persero) secara umum.

This annual report consists of statements of financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and goals and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements (prospective) implemented pursuant to the laws and regulations. These statements have the prospect of risk and uncertainty, and may result in actual development being materially different from that reported.

The prospective statements in this annual report are made based on various assumptions on the current state, as well as projections and future conditions related to the business environment in which the Company operates its business activities. PT Nindya Karya (Persero) does not guarantee results of the documents that have been deemed as valid will match the expectations.

This annual report contains the words "the Company" or "Nindya Karya" to define PT Nindya Karya (Persero) of which the main business is in the provision of construction services. The word "we" is also used on several occasions with the same function, namely for consideration of the ease of mention of PT Nindya Karya (Persero).

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

2 **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN**
Information Presented in the Annual Report

3 **SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB**
Disclaimer

4 **DAFTAR ISI**
Table of Contents

8 **TEMA**
Theme

10 **KESINAMBUNGAN TEMA**
Theme Continuity

12 **KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI MASA PANDEMI**
Policies and Changes in The Construction Services Sector During The pandemic

16 **KARYA-KARYA NINDYA**
Nindya's Projects

18 **JEJAK LANGKAH NINDYA KARYA**
Nindya Karya Milestones

20 **BERSAMA HADAPI PANDEMI COVID-19**
Together We Face the COVID-19 Pandemic

PERFORMA 2020

2020 PERFORMANCE

28 **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**
Key Financial Highlights

34 **IKHTISAR OPERASI**
Operation Highlights

35 **IKHTISAR SAHAM**
Share highlights

36 **INFORMASI TENTANG PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI**
Information on Issuance of Bonds, Sukuk or Convertible Bonds

36 **IKHTISAR PENDANAAN LAINNYA**
Other Funding Highlights

38 **PERISTIWA PENTING 2020**
2020 Significant Events

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

46 **LAPORAN DEWAN KOMISARIS**
The Board of Commisioner Report

58 **LAPORAN DIREKSI**
The Board of Director Report

67 **LEMBAR PENGESAHAN**
Responsibility Statement

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

70 **INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN**
General Information and Company Identity

71 **RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN**
Brief History of The Company

74 **BIDANG USAHA**
Line of Business

76 **STRUKTUR ORGANISASI**
Organization Structure

78 **VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN**
Vision, Mission and Corporate Values

80 **MAKNA LOGO PERUSAHAAN**
Maning of Corporate Logo

81 **PROFIL DEWAN KOMISARIS**
Board of Commisioners Profile

84 **PROFIL DIREKSI**
Profile of Board of Directors

88 **PEJABAT EKSEKUTIF**
Executive Officials

90 **DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA**
Employee Demographics and Highlights of Human Resources

95 **KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM**
Shareholders Composition

97 **DAFTAR ENTITAS ANAK, INVESTASI/ PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA, SERTA INFORMASI TENTANG ENTITAS ASOSIASI**
List of Subsidiaries, Investment/Equity Participant and Joint Ventures, as Well as Information on Associates

102 **STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN**
Nindya Karya's Group Structure

103 **INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM**
Information on Chronology of Issuance and Share Listing

103 **INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA**
Information on Chronology of Issuance and Other Securities Listing

103 **LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG**
Supporting Institutions and Professionals

104 **PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI**
Awards and Certification

108 **WILAYAH OPERASIONAL, JARINGAN USAHA, DAN ALAMAT ENTITAS ANAK SERTA INVESTASI/PENYERTAAN SAHAM**
Operational Areas, Business Network, and Address of Subsidiaries and Investment/ Equity Participation

109 **INFORMASI PADA SITUS WEB**
Information on Company Website

110 **PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN AUDIT INTERNAL**
Education and/or Training of The Board of Commisioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

114 **TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI**
Economic and Industry Review

115 **KEBIJAKAN STRATEGIS 2020**
2020 Strategic Policies

117 **TINJAUAN OPERASI PER SEGEMEN USAHA**
Operational Review Per Business Segment

133 **TINJAUAN KEUANGAN**
Financial Review

150 **STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL**
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

151 **INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL**
Material Information on Investment , Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Capital/Debt Restructuring

152 **IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL**
Material Commitments For Capital Goods Investment

152 **REALISASI INVETASI BARANG MODAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**
Realization of Capital Goods Investment

153 **PERBANDINGAN ANTARA TARGET ANGGARAN DENGAN REALISASI DAN PROYEKSI USAHA**
Comparison between targets budget within results and businesess projection

155 **INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**
Material Information and Fact Subsequent to Balance Sheet Date

155 **DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING**
Impact of Foreign Currency Exchange Rate

155 **PROSPEK USAHA DAN RENCANA PENGEMBANGAN BISNIS**
Business Outlook and Business Development Plan

157 **ASPEK PEMASARAN**
Marketing Aspect

158 **TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA**
Other Financial Review

159 **KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA**
Contribution To The State

160 **INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)**
Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

160 **INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**
Information On The Use of Proceed From Public Offering

160 **INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI**
Information on Material Transaction Containing Conflict of Interest and/ or Transactions with Affiliated/Related Parties

163 **INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI**
Financial Information Containing Rare and Extraordinary Events

163 **PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN**
Changes in Laws and Regulations with Significant Impacts on Company

164 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN**
Changes in Accounting Policies and The Impact on The Company

164 **INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA**
Business Continuity Information

167 **PETA JALAN USAHA: RENCANA JANGKA PANJANG**
Business Road Map : Long Term Plan

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT UNIT

170 **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Human Capital Development

187 **PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**
Information Technology Utilization

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

198 **PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK**
Statement of Commitment of Good Corporate Govenance Implementation

199 **DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**
Basis of Implementation of Good Corporate Governance

205 **PETA JALAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**
Road Map of Good Governance Development

223 **ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**
Corporate Governance Organ

313 **MANAJEMEN RESIKO**
Risk Management

328 **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**
Internal Control System

330 **SEKILAS TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**
Corporate Social Responsibility at a Glance

330 **PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM**
Litigaion and Legal Cases

331 **AKSES INFOMASI DAN DATA PERUSAHAAN: TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI**
Access to Information and Company Data: Governance of Information Disclosure

333 **KODE ETIK**
Code of Conduct

352 **PENGENDALIAN GRATIFIKASI**
Gratification Control

367 **KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
Policy On Goods and Services Procurement

370 **SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**
Whistleblowing System

378 **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**
State Officials Wealth Report (LHKPN)

381 **KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**
Diversity in The Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

382 **TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE**
Transparency of Bad Governance Practices

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

386 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
Corporate Social Responsibility and Sustainable Developtment

388 **KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL NINDYA KARYA**
Policy and Governance of Nindya Karya's CSR

394 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI**
Corporate Social Responsibility For The Fulfillment of Human Rights

395 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL**
Corporate Social Responsibility for Fair Operations

396 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN**
Corporate Social Responsibility for Environment

404 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**
Corporate Social Responsibility for Occupational Health and Occupacional Safety

420 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA**
Corporate Social Responsibility to Products/Services as Well as Consumers and Busines Partners

423 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**
Corporate Social Responsibility in Social and Community Development

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

TEMA THEME

RIDE THE NEW WAVE

Pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh penjuru dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sehingga menyebabkan terjadinya pelambatan bahkan resesi ekonomi dunia.

Dinamika ekonomi global tersebut, pun secara langsung berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Terlebih dengan semakin masifnya jumlah *suspect* serta penyebaran COVID-19 ke wilayah Indonesia.

Hal ini tentu mempengaruhi segala sektor industri, termasuk jasa konstruksi. Menyikapi hal ini PT Nindya Karya (Persero) memberikan respons cepat dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 dari segi bisnis dilakukan dengan mengeluarkan 4 (empat) langkah strategis yaitu menyusun Tim *Business Continuity Management* (BCM) dan Satgas COVID-19, menyusun *Survival Strategy* Korporasi dengan 3 (tiga) skenario, melakukan Akselerasi Transformasi Digital Nindya serta menyusun *Rebound Strategy* Pasca COVID-19.

Dengan langkah strategis yang disusun diharapkan Nindya Karya mampu menghadapi gelombang (*wave*) ekonomi serta menjadikan Perusahaan mampu menyatu dengan keadaan dengan tetap senantiasa memberikan kinerja positif.

New Wave disini diartikan sebagai Perseroan mampu menanggulangi keadaan di tengah pandemi dengan menjalankan strategi menghadapi adaptasi kebiasaan baru namun tetap mengupayakan yang terbaik demi keberlangsungan Perusahaan.

The COVID-19 pandemic that has spread throughout the world has had a significant impact on economic stability, causing a slowdown and even a recession of the global economy.

These dynamics also have direct implications for the stability of the national economy, especially with the increasingly massive number of suspects and the spread of COVID-19 to various regions in Indonesia.

Such condition certainly affects all industrial sectors, including construction services. From a business perspective, PT Nindya Karya (Persero) takes immediate response to tackle the impact of the pandemic by issuing 4 (four) strategic steps, namely preparing a Business Continuity Management (BCM) Team and COVID-19 Task Force, developing a Corporate Survival Strategy. with 3 (three) scenarios, accelerating Nindya's Digital Transformation, and compiling a Post-COVID-19 Rebound Strategy.

With the strategic steps that have been prepared, Nindya Karya expects to be able to ride the economic waves and integrate its operations with the future situation while consistently providing positive performance.

New Wave is defined as the Company being able to cope with the pandemic situation by carrying out strategies to deal with the adaptation of new normal but still striving for the best for the sustainability of the Company.

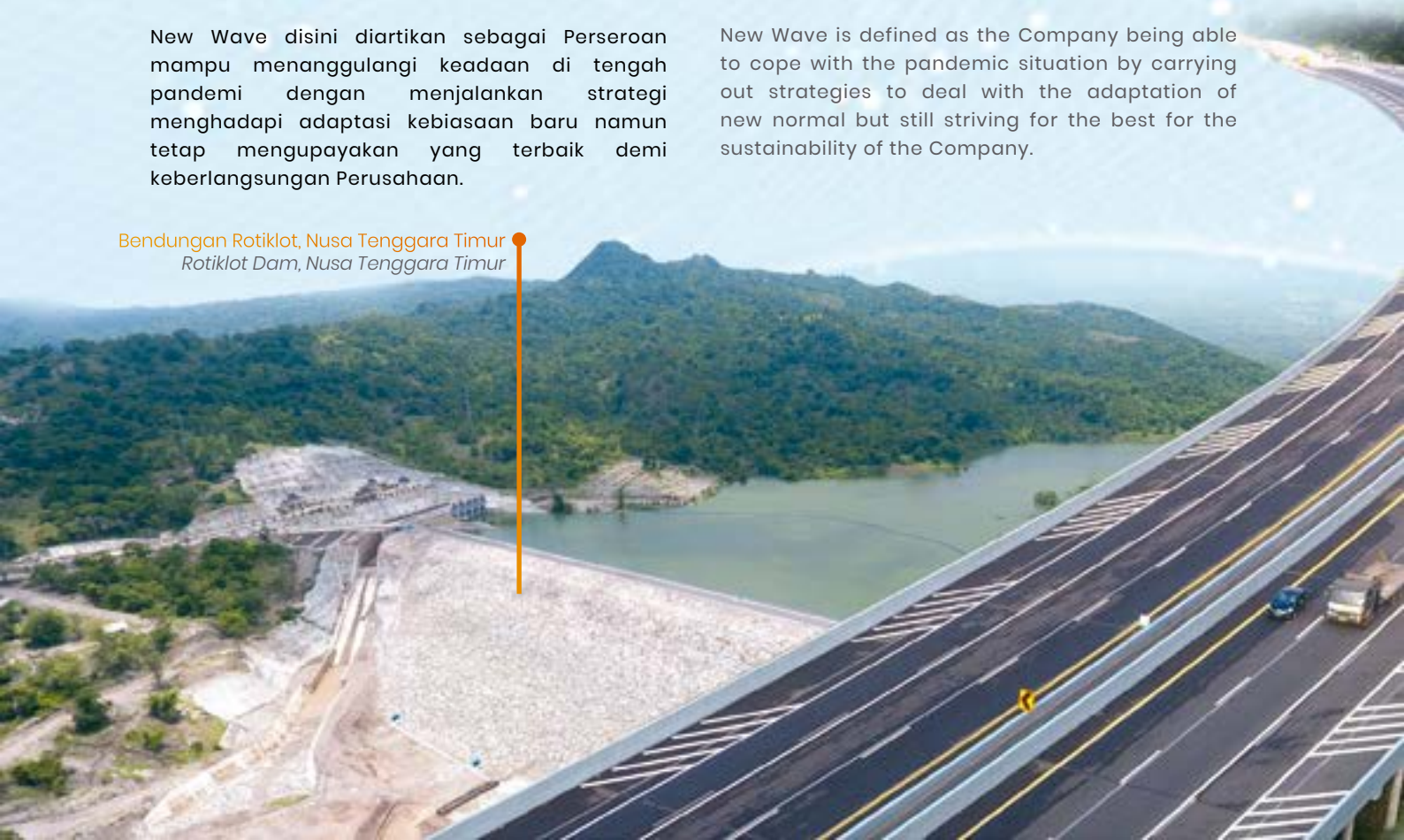

Bendungan Rotiklot, Nusa Tenggara Timur
Rotiklot Dam, Nusa Tenggara Timur

Hotel Horison - Nindya Semarang, Jawa Tengah
Horison - Nindya Hotel Semarang, Central Java

Jalan Tol Kertosono, Jawa Tengah
Kertosono Toll Road, Central Java

Pos Lintas Batas Negara Motamasin, Nusa Tenggara Timur
Cross-Border Post Motamasin, Nusa Tenggara Timur

KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY

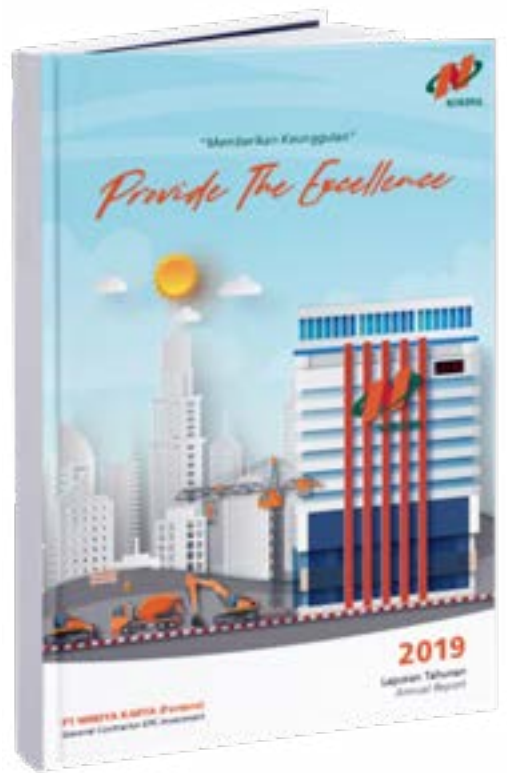

2019

PROVIDE THE EXCELLENCE

Dilandaskan profesionalisme, dedikasi dan inovasi, Nindya Karya senantiasa memberikan kinerja terbaiknya bagi pembangunan Indonesia. Dalam rangka menghadirkan produk-produk jasa konstruksi dan EPC yang berkualitas Nindya Karya siap menghadapi tantangan serta berupaya lebih dalam mewujudkan mimpi infrastruktur Indonesia yang berdaya saing dan melampaui jamannya. Dengan tema *"Provide The Excellence"* pada Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) 2019, kami merefleksikan kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam membawa Perusahaan pada kinerja terbaiknya serta menyiapkan diri untuk terus melangkah maju menjadi perusahaan jasa konstruksi dengan visi global yang berbudaya unggul.

Based on professionalism, dedication, and innovation, Nindya Karya always gives its best performance for Indonesia's development. In order to present quality construction services and EPC products, Nindya Karya is ready to face challenges and make more efforts in realizing the dream of Indonesia's infrastructure that is competitive and exceeds its era. With the theme "Provide The Excellence" in the 2019 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero), we reflect on the hard work and spirit of never giving up in bringing the Company to its best performance and prepare ourselves to continue to move forward to become a construction service company with a global vision with a superior culture.

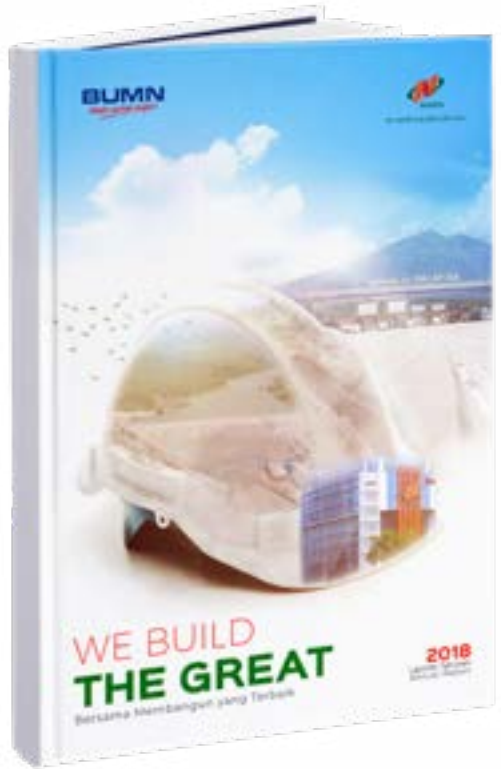

2018
WE BUILD THE GREAT

Pembenahan Nindya Karya yang telah dilakukan pada beberapa waktu terakhir terus membuahkan hasilnya. Sebagai BUMN di sektor Konstruksi, Nindya Karya berkontribusi atas akselerasi pertumbuhan perekonomian yang digagas Pemerintah Indonesia melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Mulai dari infrastruktur pengairan, jalan dan jembatan, pelabuhan dan bandara, hingga gedung dan bangunan; telah menjadi fokus pengembangan produk-produk Nindya Karya.

Untuk dapat memperkuat layanan, di tahun 2018 Nindya Karya menempatkan pengelolaan alat berat sebagai segmen bisnis tersendiri. Selain ekspansi bisnis, pengelolaan alat berat memberikan dampak positif terhadap kapitalisasi aset yang dimiliki. Strategi ekspansi bisnis tak lepas dari keberhasilan Nindya Karya di tahun 2017 melakukan perluasan bisnis melalui segmen properti.

"*We Build The Great*" atau "Bersama Membangun yang Terbaik" sebagai tema Laporan Tahunan 2018 mencoba memberikan gambaran besar tentang keterlibatan Nindya Karya dalam serangkaian pembangunan infrastruktur nasional yang telah selesai dibangun di tahun 2018. Mulai dari Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur, Jembatan Holtekamp dan Dermaga Pelabuhan Jayapura di Papua, hingga bangunan monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua; yang dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan infrastruktur dan pengembangan perekonomian.

Improvement efforts recently undertaken by Nindya Karya continue to bear fruit. As an SOE in the Construction sector, Nindya Karya contributes to the economic growth acceleration initiated by the Government of Indonesia through the acceleration of infrastructure development. The focus of Nindya Karya's product development ranges from irrigation infrastructure, road and bridge infrastructure, as well as port and airport infrastructure, to building infrastructure.

In the quest of enhancing its services, in 2018 Nindya Karya decided to place heavy equipment management as a separate business segment. This heavy equipment management is not only for business expansion, but also have a positive impact on asset capitalization. The business expansion strategy cannot be separated from the success of Nindya Karya in 2017 to expand its business through the property segment.

"We Build The Great" as the theme of this 2018 Annual Report is an attempt to give a big picture of Nindya Karya's involvement in a series of national infrastructure developments completed in 2018. This varies from Rotiklot Dam in East Nusa Tenggara, Holtekamp Bridge and Jayapura Port Jetty in Papua, to Time Capsule Monument in Merauke, Papua. These all are built to answer the needs of the Indonesian people for infrastructure and economic development.

KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI MASA PANDEMI

POLICIES AND CHANGES IN THE CONSTRUCTION SERVICES SECTOR DURING THE PANDEMIC

Sejak dampak pandemi Covid-19 mulai terasa hampir di seluruh negara di dunia, para eksekutif industri percaya bahwa beberapa sektor pasar – termasuk konstruksi - akan mengalami pemulihan yang lebih lama.

Kekhawatiran akan dampak munculnya Covid-19 dapat dilihat dari hasil survei Indeks Keyakinan Industri Konstruksi (*Construction Industry Confidence Index/CICI*) terbaru yang dilakukan oleh Engineering News-Record. Indeks yang sempat anjlok 20 poin menjadi peringkat 36 pada kuartal II-2020 ini hanya naik dua poin menjadi peringkat 38 pada kuartal III. Peringkat CICI saat ini sebanding dengan 2010, ketika industri sedang berjuang untuk pulih dari krisis keuangan tahun 2008.

Peringkat di atas 50 menunjukkan pasar yang berkembang. Ukuran tersebut didasarkan pada 303 tanggapan oleh eksekutif industri terhadap survei yang dikirim antara 14 Agustus dan 21 September 2020 kepada 6.000 perusahaan Amerika Serikat dalam daftar kontraktor umum, sub-kontraktor, dan perusahaan desain terkemuka. Pasar konstruksi merupakan indikator ekonomi yang tertinggal, sebagian besar responden percaya bahwa pemulihan industri akan lebih lambat.

Di sisi lain, banyak eksekutif industri percaya bahwa pasar akan kembali dalam mode pertumbuhan pada akhir tahun 2021. Dalam survei tersebut, 42% responden percaya bahwa pasar akan tumbuh dalam 12 hingga 18 bulan.

Pasar konstruksi terdiri dari penjualan jasa konstruksi dan barang-barang terkait oleh entitas (organisasi, pedagang tunggal dan kemitraan) yang membangun gedung atau proyek rekayasa (misalnya, jalan raya dan sistem utilitas), termasuk perusahaan yang menyiapkan lokasi untuk konstruksi baru dan yang membagi tanah untuk dijual sebagai lokasi pembangunan termasuk dalam pasar ini. Pasar konstruksi mencakup pekerjaan baru, penambahan, perubahan, pemeliharaan, dan perbaikan yang tersegmentasi menjadi konstruksi bangunan; konstruksi teknik berat dan sipil; kontraktor perdagangan khusus dan perencanaan dan pengembangan lahan.

Since the impact of the Covid-19 pandemic has been felt in almost all countries around the world, industry executives believe that some market sectors – including construction – will experience a longer recovery.

Concerns about the impact of the emergence of Covid-19 can be seen from the results of the most recent Construction Industry Confidence Index (CICI) survey conducted by Engineering News-Record. The index, which had fallen 20 points to rank 36 in the second quarter of 2020, only rose two points to rank 38 in the third quarter. CICI's current rating is comparable to 2010 when the industry was struggling to recover from the 2008 financial crisis.

A rank of above 50 indicates a growing market. The measure is based on 303 responses by industry executives to a survey sent between August 14 and September 21, 2020, to 6,000 U.S. companies on the list of leading general contractors, sub-contractors, and design firms. The construction market is a lagging economic indicator, in which most respondents believe that the industrial recovery will be slower.

On the other hand, many industry executives believe that the market will return to positive growth by the end of 2021. In the survey, 42% of respondents believe that the market will grow in 12 to 18 months.

The construction market consists of the sale of construction services and related goods by entities (organizations, sole traders, and partnerships) that construct buildings or carry out engineering projects (e.g., highways and utility systems). This market includes companies that prepare sites for new construction and that divide land for sale as a construction site. The construction market covers new jobs, additions, alterations, maintenance, and repairs, which are further segmented into building construction; heavy and civil engineering construction; specialized trading contractor, and land planning and development.

Asia Pasifik adalah wilayah terbesar di pasar konstruksi global, yang menyumbang 42% dari pasar pada tahun 2020. Amerika Utara adalah wilayah terbesar kedua yang menyumbang 26% dari pasar konstruksi global. Sementara Afrika adalah wilayah terkecil di pasar konstruksi global (data Research and Markets, 2020).

Pertumbuhan pasar konstruksi global didorong oleh peningkatan aktivitas konstruksi di pasar negara berkembang yang mencatat aktivitas konstruksi yang tinggi seperti di Tiongkok, Brasil, India, Arab Saudi, dan Indonesia. Salah satu contoh pertumbuhan pasar konstruksi yang kuat terjadi di Tiongkok yang tumbuh dari USD1.653 miliar pada tahun 2016 menjadi USD2.279 miliar pada tahun 2019. Pertumbuhan pesat dalam aktivitas konstruksi ini berkontribusi pada pertumbuhan pasar konstruksi secara global (data Research and Markets, 2020).

Setelah mengalami penurunan di tahun 2020, pasar konstruksi diharapkan untuk kembali tumbuh pada pertengahan tahun 2021 dengan pemulihan secara bertahap mulai kuartal ketiga 2021. Pasar yang sedang menuju pemulihan ekonomi mungkin akan melambat sampai masalah kesehatan teratasi.

Di tengah tekanan masyarakat dunia kepada pemerintah negaranya masing-masing dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tekanan masyarakat tersebut memerlukan titik kestabilan antara kesehatan dan ekonomi yang tentunya memiliki kadar formula berbeda pada tiap negara. Formula kebijakan dan penerapan yang dipicu oleh latar belakang budaya, aturan setempat, kepemimpinan, kemampuan sumber daya dan lingkungan, bergerak dinamis sejalan dengan temuan baru untuk menghadapi pandemi. Protokol kesehatan yang terjadi di tiap negara dimasa vaksin belum ditemukan nyaris serupa. *Physical distancing*, pemakaian masker, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan benar dan penggunaan sanitizer, adalah cara hidup baru yang dilakukan untuk menjaga diri dan komunitasnya. Penggunaan teknologi *video conference* dan sIstem aplikasi menjadi kebiasaan baru dalam bekerja dan bersekolah.

Akan tetapi, cara hidup baru ini memiliki konsekuensi tersendiri. Roda perekonomian melambat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran meningkat, terutama bagi yang bergerak di sektor informal. Industri penerbangan, ritel, hotel, restauran, bioskop, manufaktur terpukul. Inovasi di luar kebiasaan diperlukan untuk bertahan hidup. Dukungan fiskal untuk penanganan covid-19 digelontorkan. Data dari Kementerian Keuangan, total penanganan Covid-19 sebesar Rp686,2 Triliun

Asia Pacific is the largest region in the global construction market, accounting for 42% of the market in 2020, followed by North America as the second largest region accounting for 26% of the global construction market. Meanwhile, Africa is the smallest region in the global construction market (Research and Markets data, 2020).

The growth of the global construction market is driven by increased construction activity in emerging markets that record high construction activity, such as in China, Brazil, India, Saudi Arabia, and Indonesia. One example of strong construction market growth occurred in China which grows from USD 1,653 billion in 2016 to USD 2,279 billion in 2019. This rapid growth in construction activity contributes to the growth of the global construction market (Research and Markets data, 2020).

After experiencing a downturn in 2020, the construction market is expected to resume growth in mid-2021 with a gradual recovery starting in the third quarter of 2021. The market that is on the way to economic recovery may slow down until health concerns are resolved.

The world community puts pressure to the governments of their respective countries in addressing the Covid-19 pandemic. These public pressures require a point of stability between health and the economy, which of course has different levels of formula in each country. Policy formulas and implementations that are triggered by cultural backgrounds, local regulations, leadership, resource capabilities, and the environment, move dynamically in line with new findings to deal with the pandemic. Health protocols that are taken in each country during the vaccine period have not been found to be almost the same. Physical distancing, wearing masks, avoiding crowds, maintaining cleanliness, diligently washing hands properly, and using sanitizers, are new ways of life being done to protect personal self and the communities in general. The use of video conferencing technology and application systems has become a new habit in work and school.

However, this new way of life has its own consequences. The wheels of the economy slow down and the number of poverty and unemployment is increasing, especially for those in the informal sector. The aviation, retail, hotel, restaurant, cinema, and manufacturing industries experience turmoil, causing out-of-the-box innovation to be necessary for survival. Fiscal support for the handling of Covid-19 has been then disbursed. According to data from the Ministry of

untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dari total jumlah tersebut, Rp598,65 triliun merupakan biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Aktivitas ekonomi yang terus berkurang sejak keberadaan pandemi, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2020 turun menjadi 2,97%. Konstruksi yang memberi kontribusi sebesar 10,7% terhadap PDB, pertumbuhannya menurun menjadi 2,9% di kuartal 1 tahun 2020. Kebijakan prioritas Kementerian PUPR mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19. Setelahnya, terbit Instruksi Menteri PUPR No. 2 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tanggal 27 Maret 2020, dengan isi antara lain:

1. Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
2. Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
3. Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaaan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi.

Realokasi Program dan Anggaran TA 2020 Kementerian PUPR, berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2020 tersebut digunakan untuk Penanganan Covid-19:

1. Pembangunan fasilitas penampungan/ observasi karantina di Pulau Galang.
2. Rehabilitasi dan Renovasi (Operasionalisasi) Wisma Atlet Kemayoran untuk RS darurat.
3. Penyelesaian RS Akademisi UGM untuk RS Rujukan Penanganan Covid-19 di DIY.
4. Pembangunan Ruang Isolasi RS Lamongan dan Penanganan RS Biak Numfor.

Finance, the total spending for the handling of Covid-19 has reached Rp686.2 trillion for health, social protection, business incentives, MSMEs, corporate financing, sectoral Ministries/Agencies, and Regional Governments.

Of the total amount, Rp598.65 trillion is the cost of the National Economic Recovery (PEN). Economic activity has continued to decline since the emergence of the pandemic, resulting in Indonesia's economic growth in the first quarter of 2020 dropping to 2.97%. Construction, which contributed 10.7% to GDP, grew to 2.9% in the first quarter of 2020. The priority policies of the Ministry of PUPR have changed since the issuance of Presidential Instruction No. 4 of 2020 concerning Refocusing of Activities, Reallocation of Budgets, and Procurement of Goods and Services in the context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) to accelerate the preparation and development of infrastructure needed in the context of handling Covid-19. After that, the Minister of PUPR issued Instruction No. 2 of 2020 concerning the Protocol to Prevent the Spread of Covid-19 in the Implementation of Construction Services on March 27, 2020, with the contents, among others:

1. Covid-19 Prevention Protocol in the Implementation of Construction Services,
2. Follow-up on the Contract for the Implementation of Construction Services,
3. Covid-19 Prevention Protocol in the Implementation of the Procurement of Construction Services Goods.

The Ministry of PUPR's FY2020 Program and Budget Reallocation, based on Presidential Instruction No. 4 of 2020 is used for Handling Covid-19 as follows:

1. Construction of quarantine shelter/observation facilities on Galang Island.
2. Rehabilitation and Renovation (Operationalization) of the Kemayoran Athlete House for an emergency hospital.
3. Completion of the UGM Academic Hospital for the Covid-19 Handling Referral Hospital in DIY.
4. Construction of Isolation Room for Lamongan Hospital and Handling of Biak Numfor Hospital.

NATIONAL CONSTRUCTION STARTS 2019-2021F
VALUE IN RUPIAH

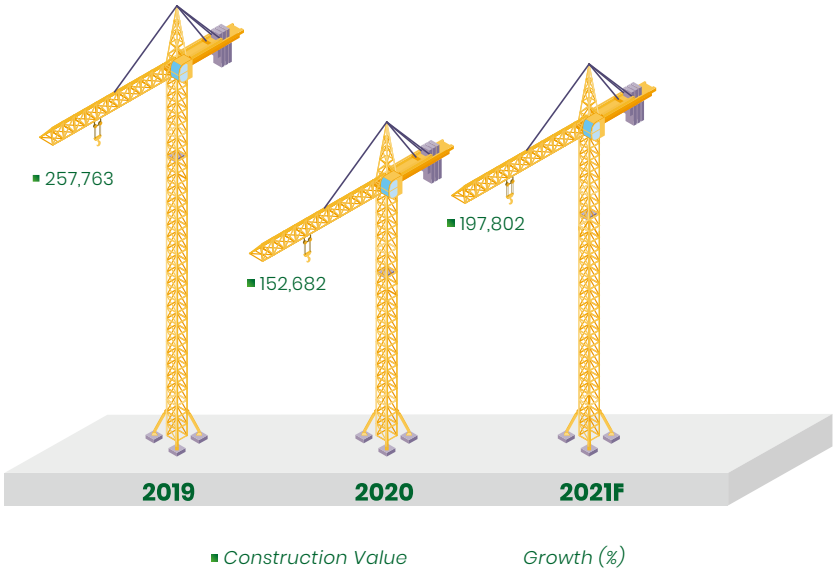

Sumber: BCI Indonesia Construction Market Outlook 2021 (diakses dari constructionplusasia.com)

Berdasarkan grafik tersebut, sektor industri juga cenderung meningkat karena didukung oleh langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang secara aktif dan proaktif mempersiapkan kawasan industri baru di berbagai wilayah Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi.

Adanya *refocusing* anggaran APBN terutama dari Kementerian PUPR dimana kebijakan pemerintah untuk fokus terhadap penyelesaian pandemi sehingga anggaran untuk konstruksi dialihkan ke segmen kesehatan. *Refocusing* anggaran ini tidak merubah jangka waktu pelaksanaan proyek, sehingga penyelesaian proyek tetap harus selesai tepat waktu, dan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap di lakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk performa Perusahaan.

Source: BCI Indonesia Construction Market Outlook 2021 (accessed from constructionplusasia.com)

Based on the graph, the industrial sector also tends to increase because it is supported by strategic steps taken by the government to actively and proactively prepare new industrial estates in various parts of Indonesia to attract more investments.

There is a refocusing of the State Budget, especially from the Ministry of PUPR where the government's policy is to focus on resolving the pandemic so that the budget for construction is diverted to the health segment. This budget refocusing does not change the project implementation period, so that project completion must still be completed on time, and for National Strategic Projects (PSN), they are still carried out to accelerate the implementation of work as a form of Company's performance.

KARYA-KARYA NINDYA

NINDYA'S PROJECTS

BENDUNGAN NAPUN GETE
NAPUN GETE DAM

Terletak di Provinsi NTT, Bendungan Napun Gete dengan kapasitas tampung 11,2 juta meter kubik ini berfungsi sebagai pengendali banjir saat musim penghujan dan solusi pengairan untuk memenuhi air baku sebesar 214liter per detik dan suplai irigasi seluas 300 hektare (ha) bagi lahan pertanian kering di Kabupaten Belu saat musim kemarau.

Located in NTT Province, the Napun Gete Dam has a capacity of 11.2 million cubic meters and serves as a flood control during the rainy season, an irrigation solution to meet the need for 214 liters of raw water per second, and an irrigation supply of 300 hectares for dry agricultural land in Belu Regency during the dry season.

POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) SOTA
CROSS-BORDER POST (PLBN) SOTA

PLBN Sota merupakan salah satu dari tiga PLBN yang dikerjakan Nindya di Papua. Terletak di Merauke, PLBN Sota dilengkapi dengan beragam sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina dan pertahanan dan keamanan seperti akses jalan, *check point*, klinik, gudang sita serta berdiri monumen garuda yang menjadi icon PLBN. Fungsi utama dari PLBN Sota ini adalah sebagai sarana prasarana pelayanan lintas negara yang terintegrasi sekaligus menjadi tempat karantina dan pertahanan dan keamanan di perbatasan Indonesia - Papua Nugini.

PLBN Sota is one of the three PLBN built by Nindya in Papua. Located in Merauke, PLBN Sota is equipped with various facilities and infrastructure to support customs, immigration, quarantine and defense and security activities such as access road, check point, clinic, and confiscated warehouse. The Garuda monument, which is the PLBN icon, can also be found here. The main function of PLBN Sota is to serve as an integrated cross-border service infrastructure and facility, as well as a place for quarantine and defense and security at the Indonesia - Papua New Guinea border.

JEMBATAN YOUTEFA
YOUTEFA BRIDGE

Jembatan Youtefa kini menjadi ikon baru Kota Jayapura, dengan panjang kurang lebih 1.800 meter dan lebar 17 meter ini selain menjadi solusi pertumbuhan perekonomian sekitarnya, juga menjadi sarana konektivitas yang efisien bagi masyarakat Jayapura, Papua yang menghubungkan Hamadi menuju Holtekamp. Keberadaannya dapat mempercepat perjalanan menuju PLBN Skouw di Distrik Muara Tami, semula waktu ditempuh 2,5 jam karena harus memutar teluk, kemudian jaraknya bisa dipangkas menjadi 33 kilometer, dengan waktu tempuh hanya 1,5 jam.

The Youtefa Bridge, which is the new icon of Jayapura City, has a length of approximately 1,800 meters and a width of 17 meters. Apart from being a solution for the surrounding economic growth, it is also an efficient means of connectivity for the people of Jayapura, Papua, as it connects Hamadi to Holtekamp. Its presence can speed up the journey to PLBN Skouw in Muara Tami District. Previously, it took 2.5 hours for the travel because people have to go around the bay, but now, the distance is reduced to 33 km with a travel time of only 1.5 hours.

Pos yang menjadi titik berbatasan langsung antara Indonesia dengan Papua Nugini ini dibangun di atas lahan seluas 10.112 m². Memiliki fasilitas Wisma Indonesia, *mess* karyawan, gedung serbaguna, restoran, pusat ATM, masjid, gereja, dan bangunan pos polisi, klinik, gudang sita, bangunan jembatan timbang, bangunan *x-ray* mobil pengangkut barang, bangunan pelayanan terpadu kedatangan mobil kargo, *check point*, bangunan utilitas. Adapun fungsi utama dari PLBN Skouw ini adalah sebagai sarana prasarana pelayanan kepabeanan dan imigrasi lintas negara yang terintegrasi, sekaligus menjadi tempat karantina dan pertahanan dan keamanan di perbatasan Indonesia - Papua Nugini.

This post serves as a direct border point between Indonesia and Papua New Guinea. It is built on an area of 10,112 m² and has various facilities, including Wisma Indonesia, employee mess, multipurpose building, restaurant, ATM center, mosque, church, polyclinic post, confiscation warehouse, weighbridge building, x-ray building for transporting cars, integrated service buildings for cargo cars arrivals, check point, and utility building. The main function of PLBN Skouw is to serve as an integrated cross-border customs and immigration service infrastructure and facility, as well as a place for quarantine and defense and security at the Indonesia - Papua New Guinea border.

POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) SKOUW

CROSS-BORDER POST (PLBN) SKOUW

JEMBATAN TELUK KENDARI

KENDARI BAY BRIDGE

Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kehadiran Jembatan Teluk Kendari akan memberikan manfaat bagi pengembangan bagian selatan Kota Kendari yakni daerah Poasia dan Pulau Bungkutoko yang akan dikembangkan menjadi kawasan permukiman, kawasan industri dan pelabuhan Kendari New Port. Di samping itu juga akan meningkatkan konektivitas jalan nasional dan jalan lingkar luar Kota Kendari, karena dengan kehadirannya dapat mempermudah akses masyarakat yang berada di kawasan Kota Lama dengan Poasia yang dipisahkan oleh teluk, yang semula harus ditempuh menyeberangi Teluk Kendari menggunakan kapal *ferry* atau memutari teluk sejauh 20 km dengan waktu tempuh 30-35 menit, kini dengan adanya Jembatan Teluk Kendari maka jarak semakin dekat dan waktu tempuh yang dibutuhkan akan menjadi sekitar 5 menit saja.

The Kendari Bay Bridge has a length of 1.34 km and is located in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The presence of the Kendari Bay Bridge will provide benefits for the development of the southern part of Kendari City, namely the Poasia area and Bungkutoko Island, which will be developed into a residential area, industrial area, and Kendari New Port. In addition, it will improve the connectivity of the national road and the outer ring road of Kendari City because it can facilitate access for people in Kota Lama area with Poasia which is separated by Kendari Bay. Previously, to reach the area, people have to take a ferry or go around the bay as far as 20 km with a travel time of 30-35 minutes; but, with the Kendari Bay Bridge, the distance becomes much closer and the travel time required is about 5 minutes.

JEJAK LANGKAH NINDYA KARYA

NINDYA KARYA'S MILESTONE

1877

Berdirinya PT Nindya Karya (Persero) berawal dari Perusahaan Konstruksi milik Belanda yaitu; NV Nederlands Aannemings Maatschappij (Nedam) V/H FA.H.F Boersma.

The establishment of PT Nindya Karya (Persero) is begun from a Construction Company owned by the Netherlands, namely: NV Nederlands Aannemings Maatschappij (Nedam) V/H FA.H.F Boersma.

1960

Setelah 2 (dua) dekade kemerdekaan Indonesia, Pemerintah melakukan nasionalisasi pada perusahaan-perusahaan strategis milik asing, salah satunya NEDAM menjadi Perusahaan Bangunan Negara "Nindya Karya".

After 2 (two) decades since the independence of Indonesia, the Government nationalized foreign strategic companies, one of which the NEDAM to Perusahaan Bangunan Negara "Nindya Karya".

1961

Peralihan bentuk Nindya Karya, dari Perusahaan Bangunan Negara menjadi Perusahaan Negara (PN).

Transformation of Nindya Karya from State Building Company or Perusahaan Bangunan Negara to State Company or Perusahaan Negara (PN).

1969

Nindya Karya kembali mengalami peralihan bentuk, dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Persero.

Nindya Karya again changed from a State Company (PN) to a Persero.

1973

Nindya Karya resmi menjadi PT Nindya Karya (Persero).

Nindya Karya officially became known as PT Nindya Karya (Persero)

2008

Nindya Karya melakukan Invetasi Penyertaan Saham pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) yang bergerak di bidang Pengusahaan Jalan Tol.

Nindya Karya made a share investment at PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) which is engaged in the field of toll road management.

2012

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 2012 Perseroan resmi direstrukturisasi berupa penambahan modal dasar Perseroan. seiring hal tersebut, Perseroan melakukan reformasi bisnis bersamaan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah no. 69 tahun 2012 dengan mengusung tema "Nindya Reborn". Reformasi bisnis yang dilakukan meliputi perubahan logo, visi dan misi, nilai dasar, budaya, bidang keuangan, organisasi, SDM serta sistem Perseroan.

Pursuant to Government Regulation (PP) No. 69 Year 2012, the Company officially underwent a restructuring through capital addition. Along with this, The Company reformed its business in line with the issuance of PP No. 69 Year 2012 by carrying the theme "Nindya Reborn". The reformation includes change in logo, vision and mission, basic value, culture, finance, organization, HR, and system of the Company.

2013

Nindya Karya mendirikan anak usaha, PT Nindya Beton, dalam rangka pengembangan bisnis di bidang Beton Pracetak dan *Ready Mix*.

Nindya Karya mendirikan anak usaha, PT Nindya Beton, dalam rangka pengembangan bisnis di bidang Beton Pracetak dan Ready Mix.

2017

- Pelebaran bisnis dengan melakukan investasi di sektor properti, melalui peluncuran proyek Hotel Horison Nindya di Semarang.
- Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) I Nindya Karya tahun 2017 dengan peringkat efek idBBB+ oleh PEFINDO.
- *Expansion of business by investing in the property sector through the launch of the Horison Nindya Hotel project in Semarang.*
- *Issuance of the Nindya Karya Medium Term Notes (MTN Year 2017.) In the context of MTN issuance, Nindya Karya was assigned credit rating idBBB+ by PEFINDO.*

Nindya Karya mengembangkan sektor bisnis baru yaitu pengembangan bisnis penyewaan alat berat, angkat dan angkut melalui Unit Penunjang Produksi serta pengembangan bisnis sektor properti, salah satunya *Soft Launching* Hotel Horison Nindya Semarang. Di tahun ini pula Nindya Karya pertama kali melaksanakan pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham.

Nindya Karya developed new business sectors, namely heavy, lifting, and transportation equipment rental business through the Production Support Unit and property business through the soft launching of Hotel Horison Nindya Semarang. In this year, Nindya Karya made payment of dividend to the shareholders for the first time.

2018

1. *Memorandum of Undertsanding* (MoU) Pembangunan RDMP Dumai antara NINDYA – PERTAMINA, DH Holding (Korea).
2. Pengembangan PLTA Maung – Banjarnegara anatara NINDYA, Indonesia Power, KOSPO.
3. *Memorandum of Undertsanding* (MoU) Pengembangan Air Limbah dan WTP Bali Selatan antara NINDYA, PDAM Provinsi Bali dan Samsung Engineering.
4. *Memorandum of Undertsanding* (MoU) Pengembangan Bali Integrated Transportation System antara NINDYA, KIND, KRNA, KRTC dan Byucksan Engineering.
5. *Go Live* ERP dan peluncuran beragam aplikasi dalam rangka akselerasi transformasi digital.
6. Peluncuran *Core Values* AKHLAK, Visi dan Misi serta Tagline "*Toward The Excellent*".

1. *Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) for the development of RDMP Dumai between NINDYA-PERTAMINA, DH Holding (Korea).*
2. *Development of Hydro Power Plant (PLTA) Maung-Banjarnegara between NINDYA, Indonesia Power, KOSPO.*
3. *Signing of a MoU for the development of Waste Water and Water Treatment Plant of South Bali between NINDYA, PDAM of Bali Province, and Samsung Engineering.*
4. *Signing of a MoU for the development of Bali Integrated Transportation System between NINDYA, KIND, KRNA, KRTC, and Byucksan Engineering.*
5. *Go-Live of ERP and launching of various applications for the acceleration of digital transformation.*
6. *Launching of AKHLAK core values, as well as the Company's vision and mission and tagline of "Toward the Excellent".*

2019

Mulai melakukan transformasi digital dengan mengembangkan *Enterprise Resource Planning* (ERP)

Began conducting digital transformation through the development of Enterprise Resource Planning (ERP).

2020

BERSAMA HADAPI COVID-19

TOGETHER WE FACE THE COVID-19 PANDEMIC

MEMAHAMI KRISIS SAAT INI

DAMPAK PANDEMI DI TAHUN 2020

- Pandemi COVID-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 sebesar (4,4%) dan berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 (2,07%) dengan inflasi sebesar 1,68% nilai tukar melemah 2,66% angka pengangguran meningkat sebesar 2,56 juta orang.
- Sedangkan di *Internal* Perusahaan, pada TW III Tahun 2020 Pencapaian Perolehan Kontrak hanya tercapai 25% dari RKAP Awal dan 67% dari RKAP Revisi.

Pandemi COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru memberikan dampak bagi kinerja di beberapa sektor namun di sisi lain adaptasi kebiasaan baru juga memberikan potensi pertumbuhan dan pengembangan kinerja di beberapa sektor.

UNDERSTANDING THE CURRENT CRISIS

IMPACT OF THE PANDEMIC IN 2020

- The COVID-19 pandemic resulted in global economic growth of (4.4%) in 2020. Meanwhile, based on data released by the Statistics Indonesia (BPS) domestic economic growth in 2020 reached (2.07%) with inflation rate of 1.68%, weakened exchange rate by 2.66%, and increased unemployment rate by 2.56 million people.
- Internally, in the Third Quarter of 2020, the achievement of contract acquisition of the Company was only 25% of the Initial RKAP and 67% of the Revised RKAP.

The COVID-19 pandemic, followed by the adaptation of new normal has an impact on the performance of several sectors. On the other hand, the adaptation of new normal also provides the potential for growth and development of performance in other sectors.

DECODING THE ECONOMIC OF COVID-19
POTENTIAL WINNERS AND LOSERS IN THE SHORT TERM

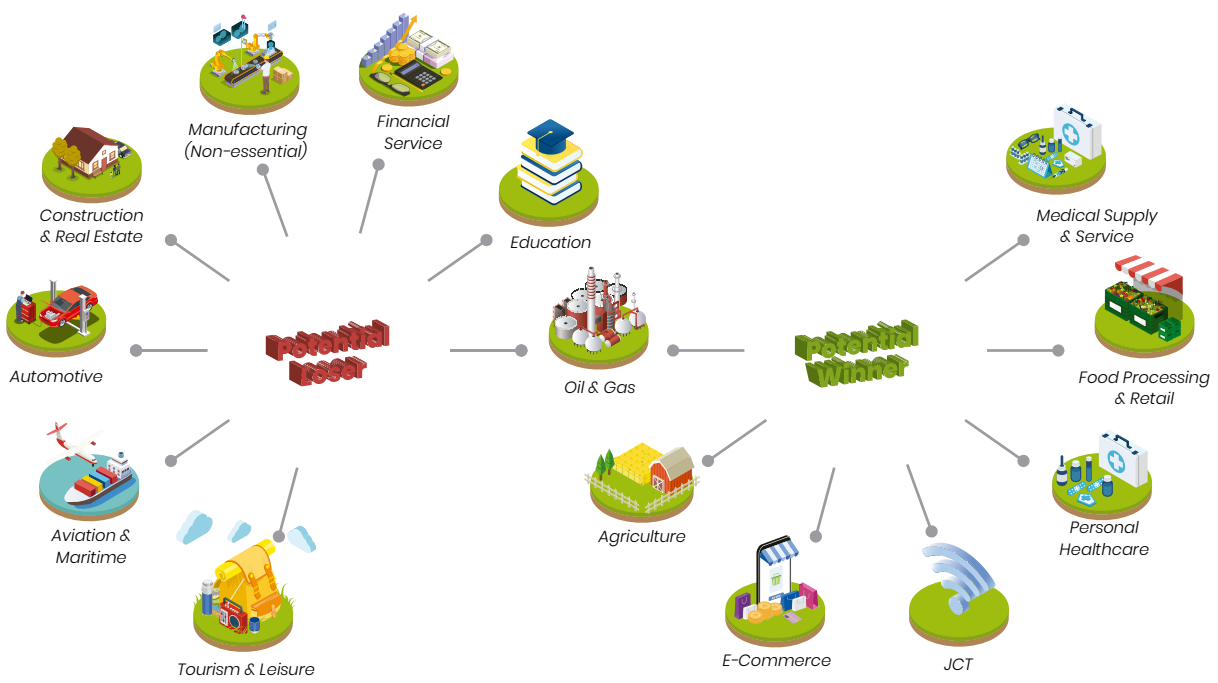

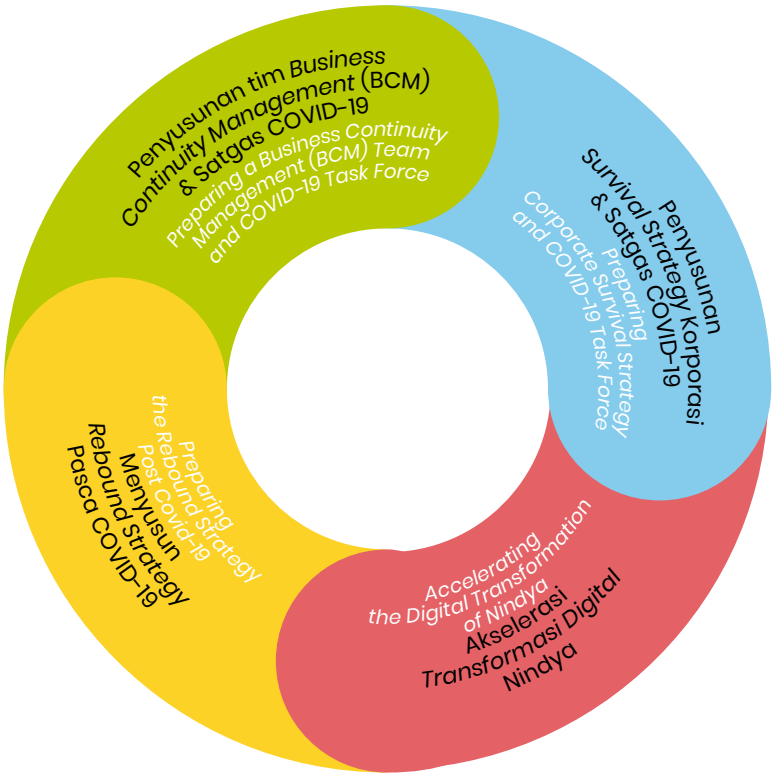

HASIL YANG DICAPAI DARI STRATEGI BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT TIM BCM KORPORASI

RESULTS OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT STRATEGY CORPORATE BCM TEAM

Survival Strategy dengan menyiapkan 3 skenario yaitu: Optimis, Moderat dan Pesimis.

Survival Strategy is prepared through 3 (three) scenarios, namely: Optimistic, Moderate, and Pessimistic.

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

ACCELERATION OF DIGITAL TRANSFORMATION

NINDYA – DIGITAL SMART CONSTRUCTION

DIGITALISASI PENGETAHUAN & KEAHLIAN *DIGITALIZATION OF KNOWLEDGE AND EXPERTISE*	DIGITALISASI AREA KONSTRUKSI *(SMART SITE) DIGITALIZATION OF CONSTRUCTION AREA (SMART SITE)*	DIGITALISASI KOLABORASI INTERNAL PERUSAHAAN *DIGITALIZATION OF THE COMPANY'S INTERNAL COLLABORATION*	DIGITALISASI BISNIS PROSES KONSTRUKSI *DIGITALIZATION OF CONSTRUCTION BUSINESS PROCESS*
• NLC & NOBEL • Big Data & KMS • *NLC & NOBEL* • *Big Data & KMS*	• BIM, VR + AR • Drone • IOT • RFID • Nindya Cloud • *Autonomous vehicle* • *Robotic* • *Advance materials* • *3Dt printing* • *BIM, VR + AR* • *Drone* • *IOT* • *RFID* • *Nindya Cloud* • *Autonomous vehicle* • *Robotic* • *Advance materials* • *3D printing*	• NINDYA *Digital workplace* • Nindya Cloud • (*connected job site*) • *NINDYA Digital workplace* • *Nindya Cloud* • *(connected job site)*	• ERP • Data *Analytics Predictive* • *Dashboard Intelligence* • BORN • *ERP* • *Predictive Data Analytics* • *Intelligence Dashboard* • *BORN*

VALUES DIGITAL TRANSFORMATION 2020

1. 100% proses tagihan rekanan termonitor 2. 100% kenaikan biaya produksi dapat diprediksi dengan baik 3. EWS & Dashboard ERP sebagai *Decision Support System* 1. *100% monitored partner billing process* 2. *100% increase in production costs can be well-predicted* 3. *EWS and ERP Dashboard as Decision Support System*	**ERP NINDYA**	**ININDYA**	1. Peningkatan tingkat keaktifan Karyawan dalam *corporate portal* > 90% 2. Peningkatan pemahaman SOP & Dokumen Kesisteman 3. 100% Tingkat availability Dokumen Persuratan 4. 100% Laporan Kendala IT ditindaklanjuti sesuai klasifikasi 1. *Increasing the level of activeness of employees in the corporate portal > 90%* 2. *Improving understanding of SOP and Systematic Document* 3. *100% Availability of Correspondence Documents* 4. *100% of IT Constraint Reports are followed-up according to classification*
1. Peningkatan *awareness* GCG 2. 100% Aduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 1. *Increasing GCG awareness* 2. *100% Complaints are followed up according to the provisions*	**WBS & UPG**	**BORN**	1. 100% Ketaatan pelaporan risiko 2. Peningkatan Identifikasi Risiko Korporasi & Proyek 300% 1. *100% Compliance with risk reporting* 2. *Improving Corporate & Project Risk Identification by 300%*
1. Memacu karyawan untuk meningkatkan produktivitas sebagai output dari kejelasan jenjang karir yang ditawarkan 2. Perusahaan memiliki bank data *talent* yang akurat 1. *Stimulating employees to increase productivity as an output of the clarity of career paths offered* 2. *The Company has an accurate talent database*	**NEXT**	**E-PROCUREMENT**	Peningkatan efisiensi pengadaan barang dan jasa di tahun 2020 *Procurement efficiency increase in 2020*

HASIL DARI AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

RESULTS OF ACCELERATION OF DIGITAL TRANSFORMATION

PERUBAHAN CORE VALUES DAN VISI & MISI

CHANGE IN CORE VALUES AND VISION AND MISSION

AKHLAK

DIGITAL SMART CONSTRUCTION

EKSELEN CULTURE

AKHLAK

EKSELEN BISNIS PROSES
Est. TW I – IV 2021

EKSELEN HUMAN CAPITAL

Integrated NINDYA Excellence System (INEX) : konsep terintegrasi untuk pencapaian Sasaran Strategis (RJPP & RKAP) dan VISI & MISI Perusahaan

An integrated concept to achieve Strategic Targets (RJPP and RKAP) and Company's VISION AND MISSION

1. DIGITALISASI PENGETAHUAN & KEAHLIAN

- NLC dan NOBEL
- *Big Data & Knowledge Management System*

1. DIGITALIZATION OF KNOWLEDGE AND EXPERTISE

- NLC dan NOBEL
- Big Data & Knowledge Management System

VALUE

Insan Nindya yang Adaptif dan Kompeten
Adaptive and Competent Personnel of Nindya

2. DIGITALISASI AREA KONSTRUKSI

2. DIGITALIZATION OF CONSTRUCTION AREA

TECHNOLOGY	*DESIGN & ENGINEERING*	*CONSTRUCTION*	*DELIVERY*
Engineering	BIM, VR, AR, Printer 3D, Drone	BIM, VR, AR, Drone	KMS
Cost	ERP	ERP	ERP
Planning	Ms. Project	ERP, Ms. Project	
Risk, Health & Safety	BORN (Risk), SIMQHSE	BORN (Risk), SIMQHSE, Thermo Gun, Helmet RFID, Wearable Device	
Quality	SIMQHSE	CCTV, Nindya Cloud, Cisco Jabber, BIM 360 & SIM9 HSE	SIMQHSE
Drawing	BIM	BIM	BIM
Communication	Cisco Jabber, Telkom CloudX & Zoom	Cisco Jabber, Telkom CloudX & Zoom	Cisco Jabber, Telkom CloudX & Zoom

VALUE

Smart work & High Quality Output

3. KOLABORASI INTERNAL PERUSAHAAN

1. NINDYA *Digital Workplace*

- Aplikasi *Corporate Portal* untuk sharing Informasi, Komunikasi, Kolaborasi, *Paperless*, Pengukuran Kinerja dan Pembelajaran

2. Nindya *Cloud*

- Memberikan fasilitas untuk bekerja dan berkolaborasi dengan aman
- Fasilitas Penyimpanan Data Nasional

3. BIM 360 Cloud

- Sistem *cloud* proyek - divisi - pusat
- Mempermudah koordinasi karena lebih ringan, dan Tidak perlu mempunyai *software*

3. COMPANY'S INTERNAL COLLABORATION

1. NINDYA Digital Workplace

- Corporate portal application for information sharing, communication, collaboration, paperless, performance Measurement, and Learning

2. Nindya Cloud

- Provide facilities and collaborate safely
- National Data Storage Facility

3. BIM 360 Cloud

- Cloud sistem project - division - center division
- Facilitate coordination as it is lighter and has no need for software

VALUE

Seamless Komunikasi & Kolaborasi
Seamless Communication and Collaboration

4. DIGITALIZATION OF CONSTRUCTION BUSINESS PROCESS

4. DIGITALIZATION OF CONSTRUCTION BUSINESS PROCESS

VALUE

Efektif dan efisiensi proses dan hasil kerja
Effective and efficient work processes and results

PERFORMA 2020

2020 PERFORMANCE

Tol Bawen-Salatiga, Jawa Tengah
Bawen-Salatiga Toll Road, Central Java

Jembatan Jalur Kereta Solo - Jebres, Jawa Tengah
Solo - Brebes Bridge Railway, Central Java

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

HIGHLIGHTS OF KEY FINANCIAL DATA

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Dalam Jutaan Rupiah) (in Rp million)

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	2018	2017	2016	YOY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Pendapatan Usaha *Revenues*	3.616.483	5.783.502	6.226.911	5.875.138	4.658.086	(37,47%)	(4,94%)
Beban Pokok Pendapatan *Cost of Revenues*	(3.299.318)	(5.158.970)	(5.534.321)	(5.203.412)	(4.145.503)	(36,05%)	(4,46%)
Laba Pekerjaan Sebelum Hasil (Laba/Rugi) *Job Profit Before Results (Gross Profit)*	317.165	624.533	692.590	671.726	512.583	(49,22%)	(9,15%)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan *Income Before Income Tax Burden*	50.101	220.087	273.388	244.331	184.842	(77,24%)	(22,98%)
Laba Bersih Tahun Berjalan *Net Income for the Year*	42.822	215.873	272.181	244.273	180.052	(80,16%)	(24,97%)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya *Total Other Comprehensive Income*	4.332	(5.984)	178	260.272	(2.630)	(172,39%)	(210,50%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSI TAHUN BERJALAN *TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR*	**47,155**	**209.889**	**272.358**	**504.546**	**177.422**	**(77,53%)**	**(23,28%)**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: *NET INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:*							
Pemilik Entitas Induk *Owner of Parent Entity*	50.896	223.784	271.522	264.749	173.841	(77,26%)	
Kepentingan Non Pengendali *Non-controlling Interest*	(8.074)	(7.911)	695	(20.476)	6.212	2,64%	
JUMLAH *TOTAL*	**42,822**	**215.873**	**272.181**	**244.273**	**180.052**	**(80,16%)**	
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: *COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:*							
Pemilik Entitas Induk *Owner of Parent Entity*	55.275	217.790	271.771	525.022	171.210	(74,62%)	
Kepentingan Non Pengendali *Non-controlling Interest*	(8.120)	(7.901)	587	(20.476)	6.212	(2,77%)	
JUMLAH *TOTAL*	**47.154**	**209.889**	**272.358**	**504.546**	**177.422**	**77,53%**	

JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMEN USAHA TERHADAP PENDAPATAN

AMOUNT AND CONTRIBUTION OF BUSINESS SEGMENTS TO REVENUES

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		HASIL PERBANDINGAN *COMPARISON RESULT*	
	JUMLAH (RUPIAH – JUTA) *TOTAL (RP MILLION)*	KONTRIBUSI (%) *CONTRIBUTION (%)*	JUMLAH (RUPIAH – JUTA) *TOTAL (RP MILLION)*	KONTRIBUSI (%) *CONTRIBUTION (%)*	JUMLAH (RUPIAH – JUTA) *TOTAL (RP MILLION)*	PERSENTASE (%) *PERCENTAGE (%)*
Konstruksi *Construction*	3.496.211	96,67	5.596.607	96,77	2.100.396	37,53%
Manufaktur *Manufacturing*	96.549	2,68	160.029	2,77	63.480	39,67%
Properti *Property*	17.487	0,48	17.975	0,31	488	2,72%
Sewa Alat *Equipment Rental*	6.237	0.17	8.891	0,15	2.654	29,85%
JUMLAH PENDAPATAN *TOTAL REVENUES*	**3.616.483**	**100**	**5.783.502**	**100,00**	**2.167.019**	**37,47%**

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

(Dalam Jutaan Rupiah)

(dalam jutaan Rupiah / in Rp million)

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	2018	2017	2016	YOY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
ASET *ASSETS*							
Aset Lancar *Current Assets*	4.221.245	610,976	610.550	594.234	291.472	(12,61%)	6,20%
Investasi pada Ventura Bersama *Investment in Joint Ventures*	242.398	206.733	206.137	201.486	192.786	17,25%	4,69%
Aset Tetap *Property, Plant, and Equipment*	561.071	6.076.322	5.091.001	4.729.879	3.755.973	(8,17%)	13,99%
Aset Tidak Lancar *Non-Current Assets*	462.103	428.233	356.401	155.287	147.136	(7,91%)	25,72%
JUMLAH ASET *TOTAL ASSETS*	**5.486.817**	**6.076.322**	**5.691.001**	**4.729.879**	**3.755.973**	**(9,70%)**	**7,87%**
LIABILITAS *LIABILITIES*							
Liabilitas Jangka Pendek *Current Liabilities*	3.203.168	4.023.379	3.667.131	2.926.055	2.738.671	(20,39%)	3,18%
Liabilitas Jangka Panjang *Non-Current Liabilities*	765.574	366.306	511.825	546.636	248.852	109,00%	25,20%
JUMLAH LIABILITAS *TOTAL LIABILITIES*	**3.968.742**	**4.389.685**	**4.178.956**	**3.472.691**	**2.987.523**	**(9,59%)**	**5,84%**
EKUITAS *EQUITY*							
JUMLAH EKUITAS *TOTAL EQUITY*	**1.518.074**	**1.686.637**	**1.512.046**	**1.257.187**	**768.451**	**(9,99%)**	**14,59%**
LIABILITAS DAN EKUITAS *LIABILITIES AND EQUITY*							
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS *TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*	**5.486.817**	**6.076.322**	**5.691.001**	**4.729.879**	**3.755.973**	**(9,70%)**	**7,8%**

ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED CASH FLOWS

(Dalam Jutaan Rupiah) (in Rp million)

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	2018	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi *Cash Flows from Operating Activities*	(583.270)	32.792	(235.153)	272.881	(460.878)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi *Cash Flows from Investing Activities*	36.624	(27.720)	(68.202)	(25.283)	199.082
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flows from Financing Activities*	284.462	(35.298)	(17.500)	317.549	(288.040)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas *Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents*	(262.184)	(30.226)	(320.854)	565.146	(549.836)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun *Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year*	508.064	538.290	859.144	291.997	843.834
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun *Cash and Cash Equivalents at End of the Year*	245.880	508.064	538.290	859.144	293.997

RASIO-RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIOS

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	2018	2017	2016
LIKUIDITAS *LIQUIDITY*					
Rasio Kas (%) *Cash Ratio (%)*	13,92	17,60	20,13	36,20	18,04
Rasio Lancar (Likuiditas) (%) *Current (Liquidity) Ratio (%)*	131,78	120,06	123,20	129,15	114,09
RENTABILITAS *RENTABILITY*					
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) (%) *Return on Equity (ROE) (%)*	2,90	14,68	22,10	24,12	30,02
Rasio Pengembalian atas Investasi (ROI) (%) *Return on Investment (ROI) (%)*	5,08	8,23	9,54	10,59	10,79
SOLVABILITAS *SOLVABILITY*					
Debt to Equity Ratio (DER)	0,68	0,44	0,49	0,59	0,56
TURNOVER					
Collection Period (Hari) *Collection Period (Days)*	14	18	18	23	29
Perputaran Persediaan (Hari) *Inventory Turnover (Days)*	15	11	7	9	9
AKTIVITAS *ACTIVITY*					
TOTAL ASET TURNOVER (TATO) (KALI) *TOTAL ASSET TURNOVER(TIMES)*	**0,69**	**0,98**	**1,34**	**1,24**	**1,24**

LAPORAN LABA (RUGI)
CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) REPORT

PENDAPATAN USAHA
Revenues

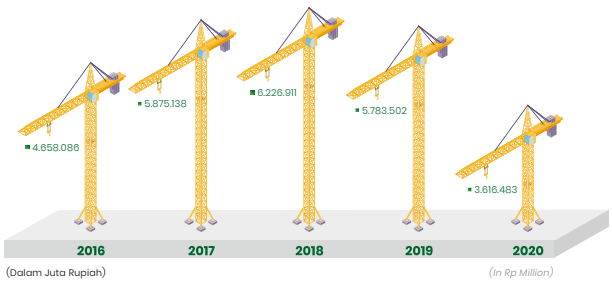

(Dalam Juta Rupiah) *(In Rp Million)*

LABA BRUTO
Gross Profit

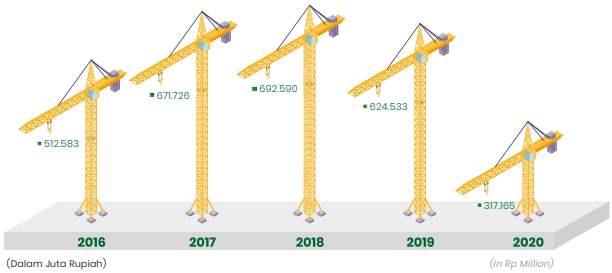

(Dalam Juta Rupiah) *(In Rp Million)*

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
Net Income for the Year

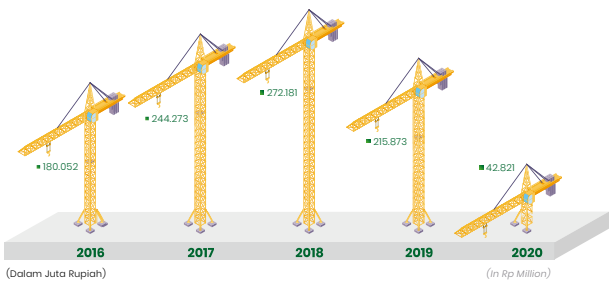

(Dalam Juta Rupiah) *(In Rp Million)*

ASET
Assets

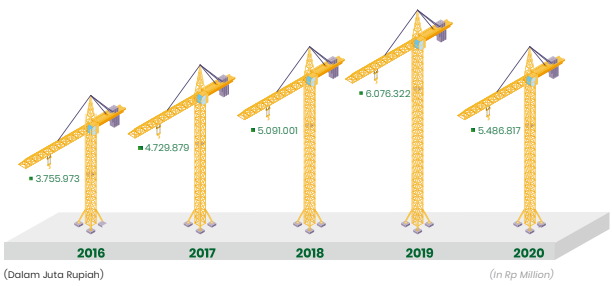

(Dalam Juta Rupiah) *(In Rp Million)*

LIABILITAS
Liabilities

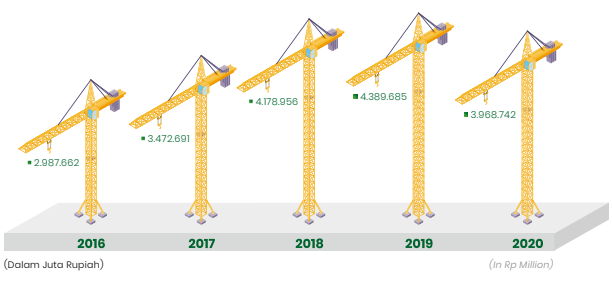

(Dalam Juta Rupiah) *(In Rp Million)*

EKUITAS
Equity

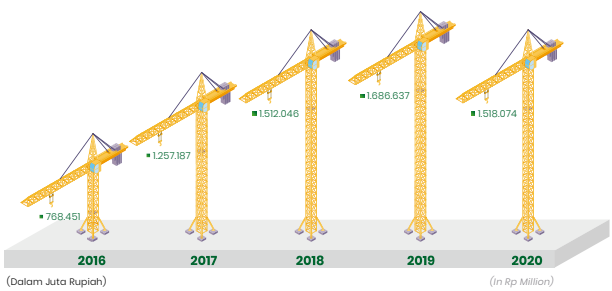

(Dalam Juta Rupiah) *(In Rp Million)*

ARUS KAS
Cash Flow

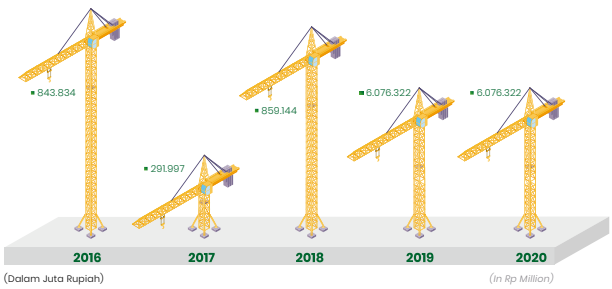

(Dalam Juta Rupiah) *(In Rp Million)*

RATIO

CASH FLOWS

RATIO KAS
Cash Ratio

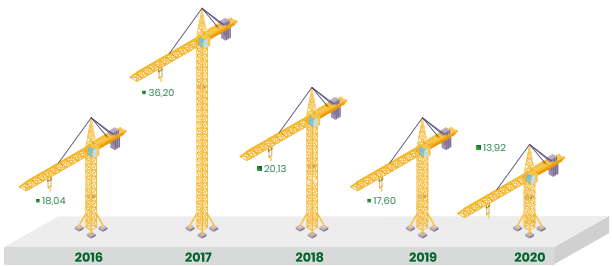

QUICK RATIO

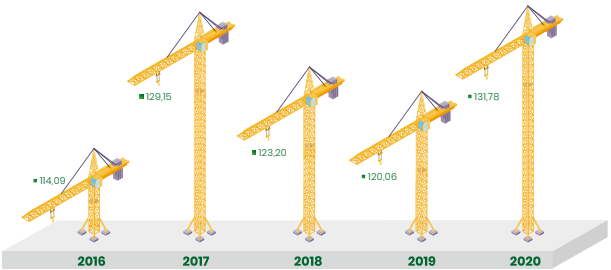

RASIO PENGEMBALIAN ATAS EKUITAS (ROE)
Return on Equity (ROE)

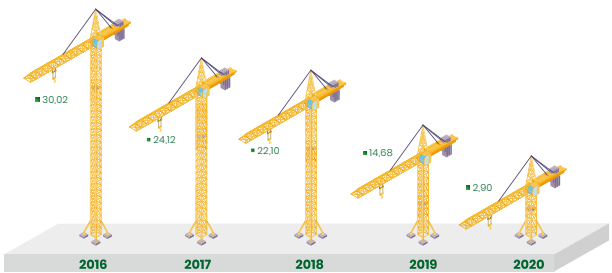

RASIO PENGEMBALIAN ATAS ASET(ROA)
Return on Assets (ROA)

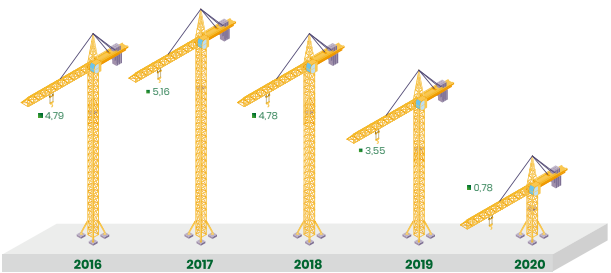

DEBT TO EQUITY RATIO (DER)

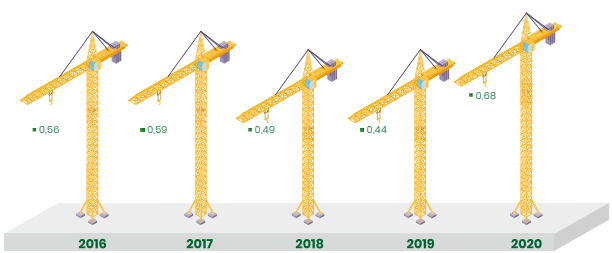

COLLECTION PERIOD

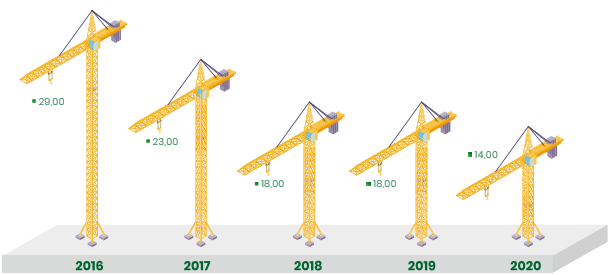

PERPUTARAN PERSEDIAAN
Inventory Turnover

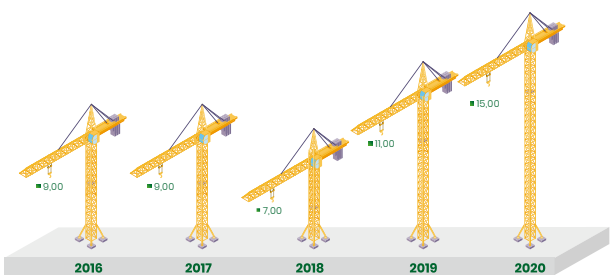

IKHTISAR OPERASI

HIGHLIGHTS OF OPERATIONS

IKHTISAR PENILAIAN ADMINISTRASI

HIGHLIGHTS OF ADMINISTRATION ASSESSMENT

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	2018	2017	2016
ASPEK ADMINISTRASI *ADMINISTRATION ASPECT*					
Laporan Tahunan (Hari) *Annual Report (Days)*	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
RKAP (Hari) *RKAP (Days)*	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Laporan Triwulan (Hari) *Quarterly Report (Days)*	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Efektivitas Penyaluran Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) (%) *Effectiveness of Fund Distribution for Small Enterprises and Cooperatives Development (PUKK) (%)*	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) (%) *Collectability Rate of Return of Fund for Small Enterprises and Cooperatives Development (PUKK) (%)*	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

PENILAIAN

ASSESSMENT

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	2018	2017	2016
HASIL PENILAIAN (ASPEK KEUANGAN, OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI) *ASSESSMENT RESULTS (FINANCIAL, OPERATIONAL, AND ADMINISTRATION ASPECTS)*					
Jumlah Skor *Total Score*	67,75	80,25	86,75	86,25	84,50
Tingkat Kesehatan *Health Index*	A	AA	AA	AA	AA
GCG DAN KPKU *GCG AND KPKU*					
***ASESSMENT* PENERAPAN GCG** *GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT*					
Skor *Score*	89,793	89,69	89,64	85,51	85,18
Klasifikasi *Classification*	Sangat Baik *Excellent*	Sangat Baik *Excellent*	Sangat Baik *Excellent*	Sangat Baik *Excellent*	Sangat Baik *Excellent*
KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) *EXCELLENT PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA (KPKU)*					
Skor *Score*	-	551	531,50	493,25	377,00
Klasifikasi *Classification*	-	*Good Performance*	*Good Performance*	*Good Performance*	*Early Improvement*
PEMERINGKATAN *RATING*					
Pemeringkatan untuk *Medium Term Notes* (MTN) oleh PEFINDO *Medium Term Notes (MTN) Rating by PEFINDO*	BBB+	BBB+	BBB+	BBB+	-

IKHTISAR SAHAM

STOCK HIGHLIGHTS

JUMLAH SAHAM

Jumlah saham PT Nindya Karya (Persero) sebanyak 5.950.000 lembar saham, dengan kepemilikan Negara Republik Indonesia sebanyak 59.500 saham Seri A Dwi Warna atau sebesar 1,00%, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebanyak 5.890.500 saham Seri B atau sebesar 99,00%.

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Hingga 31 Desember 2020, PT Nindya Karya (Persero) belum melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) sehingga tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik di bursa efek baik di dalam maupun luar nageri. Dengan demikian, laporan terkait:

1. Jumlah saham yang beredar
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:
   a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   b. Harga saham tertinggi, terendah dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:
   a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
   c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Belum tersaji di dalam laporan tahunan ini.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI SAHAM LAINNYA

Hingga 31 Desember 2020, tidak terdapat aksi korporasi yang dilakukan PT Nindya Karya (Persero) sehingga informasi terkait *Initial Public Offering*, pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, perubahan nominal saham dan aksi korporasi lainnya yang diperbolehkan oleh otoritas bursa belum disajikan dalam laporan tahunan ini.

TOTAL SHARES

Total number of shares of PT Nindya Karya (Persero) is 5,950,000 shares consisting of 59,500 Series A Dwi Warna Shares owned by the Republic of Indonesia, or amounting to 1.00%, and 5,890,500 Series B shares owned by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), or amounting to 99.00%.

INFORMATION ON SHARE TRADING AND SHARE OWNERSHIP BY THE PUBLIC

As of December 31, 2020, PT Nindya Karya (Persero) has not executed an Initial Public Offering (IPO); hence, the Company does not trade its shares to the public on stock exchanges, both inside and outside the country. Accordingly, the related reports on:

1. The number of outstanding shares;
2. Information in the form of a table containing:
   a. Market capitalization based on the price at the Stock Exchange on which the shares are listed;
   b. The highest, lowest and closing share prices based on the prices at the Stock Exchange on which the shares are listed;
   c. Share trading volume at the Stock Exchange on which the shares are listed;
3. Information in graphs containing, at least:
   a. The closing price based on the price at the Stock Exchange on which the shares are listed;
   b. Share trading volume at the Stock Exchange on which the shares are listed;
   c. Share trading volume at the Stock Exchange on which the shares are listed for each quarter within the last 2 (two) years;

cannot be presented in this annual report.

INFORMATION ON OTHER CORPORATE ACTION

As of December 31, 2020, PT Nindya Karya (Persero) has had no corporate action; hence, information related to Initial Public Offerings, stock split, reverse stock, bonus shares, changes in nominal value of share, and other corporate actions allowed by stock exchange authorities cannot be presented in this annual report.

DIVIDEN SAHAM

Sampai dengan 31 Desember 2020, tidak terdapat adanya pembagian dividen atas kinerja tahun 2019 yang disebabkan oleh kebijakan untuk pengendalian dampak Covid-19 terhadap kelangsungan bisnis perusahaan.

SHARE DIVIDEND

As of December 31, 2020, there was no dividend distribution for 2019 performance due to the policy for controlling Covid-19 impact on the Company's business continuity.

DIVIDEN SAHAM *SHARE DIVIDEND*	PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM TAHUN 2020 (UNTUK HASIL USAHA TAHUN BUKU 2019) *SHARE DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2020 (FOR FY2019 OPERATING RESULTS)*
Laba Bersih (Rp) *Net Income (Rp)*	Rp209,89 miliar *Rp209.89 billion*
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) *Cash Dividend Distributed (Rp)*	Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham *No dividend distribution to shareholders*
Rasio Pembayaran Dividen *Dividend Payment Ratio*	-
Cadangan Modal (Rp) *Capital Reserves (Rp)*	Rp209,89 miliar *Rp209.89 billion*
Tanggal Pengumuman *Announcement Date*	-
Tanggal Pembayaran *Payment Date*	-

INFORMASI TENTANG PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ON ISSUANCE OF BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS

Hingga akhir tahun 2020, PT Nindya Karya (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/ obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/ imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

Up to the end of 2020, PT Nindya Karya (Persero) has not issued bonds, sukuk, convertible bonds, and other securities. Hence, there is no information on total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/return rate, maturity date, and rating of bonds/sukuk.

IKHTISAR PENDANAAN LAINNYA

OTHER FUNDING HIGHLIGHTS

Adapun ikhtisar efek lainnya berupa Surat Hutang Jangka Menengah (*Medium Term Notes*/ MTN) hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A summary of other securities in the form of Medium Term Notes (MTN) until the end of 2020 is as follows:

NAMA EFEK *NAME OF SECURITIES*	NILAI (RP) *VALUE (RP)*	TINGKAT SUKU BUNGA *INTEREST RATE*	PENERBITAN *ISSUANCE*	JANGKA WAKTU *PERIOD*	TANGGAL JATUH TEMPO *MATURITY DATE*	PERINGKAT EFEK PERUSAHAAN *SECURITIES RATING*	STATUS(PER 31 DESEMBER 2020) *STATUS (AS OF DECEMBER 31, 2020)*
Surat Hutang Jangka Menengah *Medium Term Notes*	300.000.000.000	10,35% per tahun *10.35% per year*	28 Juli 2017 *July 28, 2017*	3 tahun *3 years*	28 Juli 2020 *July 28, 2020*	BBB+ (pefindo)	Lunas *Settled*

PERISTIWA PENTING 2020

2020 SIGNIFICANT EVENTS

TANGGAL *DATE*	PERISTIWA PENTING *SIGNIFICANT EVENTS*
JANUARI *JANUARY*	
1	NINDYA Salurkan Bantuan Kepada Korban Banjir Jakarta *NINDYA Distributed Aid to Jakarta Flood Victims*
9	NINDYA Bersama 13 BUMN kerahkan 250 Relawan, Bersih – Bersih Kampung Pasca Banjir *NINDYA Together with 13 SOEs Deployed 250 Volunteers to Clean the Village After the Flood*
13	NINDYA Gelar Pelatihan *Awareness* Sistem Manajemen Anti Penyuapan *NINDYA Held Anti-Bribery Management System Awareness Training*
15	NINDYA Kembali Gelar Pelatihan *Awareness* Sistem Manajemen Anti Penyuapan *NINDYA Held the 2nd Batch of Anti-Bribery Management System Awareness Training*
17	NINDYA Ikuti Upacara Peringatan Bulan K3 Nasional 2020 *NINDYA Joined the 2020 National OHS Month Commemoration Ceremony*
21	Sinergi Tanggap Darurat, NINDYA Bersama 13 BUMN Gandeng BNPB" *Emergency Response Synergy, NINDYA Together with 13 SOEs Collaborated with BNPB*
31	 Selenggarakan Pisah Sambut, NINDYA Kenalkan Formasi Direksi Baru *Held Farewell, NINDYA Introduced New Board of Directors Formation*
31	Perkuat Pencegahan Praktik Korupsi, NINDYA Undang KPK sebagai Pembicara di Rakernas 2020 *Strengthening Prevention of Corruption Practices, NINDYA Invited KPK as Speaker at the 2020 National Working Meeting*
FEBRUARI *FEBRUARY*	
5	NINDYA Ajak Warga Peduli Pencegahan HIV/AIDS dan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba *NINDYA Invited Citizens to Care about HIV/AIDS Prevention and the Dangers of Drug Abuse*
7	 Wamen PUPR Pantau Proyek NINDYA Guna Persiapan PON Papua XX *Deputy Minister of PUPR Monitored NINDYA Project to Prepare for PON XX Papua*
10	Terapkan Sertifikasi Manajemen Anti Suap, NINDYA Gelar *Workshop* Auditor *Internal* *Applying Anti-Bribery Management Certification, NINDYA Held Internal Auditor Workshop*
10	Tingkatkan Kompetensi *Leadership* bagi *Project Manager,* NINDYA Gelar Pelatihan "*Strategic Communication for Strategic Leader*" *Improving Leadership Competencies for Project Managers, NINDYA Held "Strategic Communication for Strategic Leaders" Training*
12	NINDYA Raih 9 Penghargaan di Bidang K3 dari Gubernur Sulawesi Selatan" *NINDYA Won 9 Awards in the Field of OHS from the Governor of South Sulawesi*
13	Kunjungi Papua, Menpora: Arena Cricket dan Lapangan *Hockey (Indoor* dan *Outdoor)* Segera Rampung *Papua Visit, Menpora: Cricket Arena and Hockey Field (Indoor and Outdoor) Soon to be Complete*
24	Tingkatkan Kemampuan Adaptasi dan Profesionalisme Kerja Karyawan Baru, Nindya Gelar Pelatihan Softskill "*Professionalism Training*"" *Improving Adaptability and Work Professionalism of New Employees, Nindya Held Soft Skill Training "Professionalism Training"*
24	Membangun Kinerja *Excellent*, NINDYA berkomitmen menjaga Standar Sistem Mutu, K3 dan Lingkungan" *Building Excellent Performance, NINDYA's Commitment to Maintaining Quality System Standards, OHS and Environment"*

TANGGAL *DATE*	PERISTIWA PENTING *SIGNIFICANT EVENTS*
26	NINDYA Gelar Pembukaan Kompetisi Olahraga dalam Rangkaian Peringatan HUT Ke-60" *NINDYA Held the Opening of Sports Competitions for the 60th Anniversary Celebration*
27	NINDYA Kembali Raih Penghargaan *Zero Accident Award* Bulan K3 Nasional 2020 dari Gubernur Banten" *NINDYA Won Another Zero Accident Award in the National OHS Month 2020 from the Governor of Banten*
MARET *MARCH*	
4	 HUT ke-60, NINDYA Gelar Khitanan Masal untuk Masyarakat *60th Anniversary Celebration, NINDYA Held Mass Circumcision for Society*
5	Waspada Corona, NINDYA Gelar Sosialisasi ke Seluruh Karyawan *Corona Alert, NINDYA Held Outreach to All Employees*
15	Cegah Penyebaran Covid-19, NINDYA Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan *Preventing the Spread of Covid-19, NINDYA Conducted Disinfectant Spraying*
22	Lawan Corona, NINDYA Beri Bantuan Ke Rumah Sakit di Makassar *Corona Fight, NINDYA Provided Assistance to Hospitals in Makassar*
23	Nindya Berkontribusi Menjadikan Wisma Atlet Menjadi Rumah Sakit Darurat Covid 19" *Nindya Contributed to Turning Wisma Atlet into a Covid-19 Emergency Hospital*
24	NINDYA Kembali Berikan Bantuan Bagi Tenaga Medis untuk Lawan Corona di Makassar dan Jakarta *NINDYA Provided 2nd Batch of Assistance for Medical Workers to Fight Corona in Makassar and Jakarta*
26	3 rumah sakit di Makassar mendapat sumbangan Disinfektan *Chamber* ciptaan NINDYA KARYA dan IKA TEKNIK UNHAS" *3 Hospitals in Makassar Received Donations of Disinfectant Chambers Created by NINDYA KARYA and IKA TEKNIK UNHAS*
31	Tidak Hanya di Kantor, NINDYA Juga Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Proyek *Not Only in the Office, NINDYA Conducted Disinfectant Spraying in the Projects*
31	Tanggulangi Bencana Covid-19, NINDYA Berikan Bantuan Alat Pencuci Tangan untuk Warga Jakarta" *Handling the Covid-19, NINDYA Provided Hand Wash Equipment for Jakarta Residents*
APRIL *APRIL*	
1	 Nindya Ikut Siapkan Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Darurat Covid 19 *Nindya Participates in Preparing Wisma Atlet Kemayoran to Become a Covid-19 Emergency Hospital*
7	Cegah Penyebaran Covid - 19 di Medan, NINDYA Serahkan Bantuan" *Preventing the Spread of Covid-19 in Medan, NINDYA PRovided Assistance and Aid*
9	NINDYA Siapkan Instalasi Listrik Tower IV Wisma Atlet Kemayoran untuk Tingkatkan Kapasitas RS Penanganan Covid -19" *NINDYA Prepared Electrical Installation of Tower IV Wisma Atlet Kemayoran to Increase the Capacity of the Covid-19 Handling Hospital*
9	Cegah Covid-19 di Jakarta Timur, NINDYA Beri Bantuan dan Ajak Warga Untuk Terapkan Program Cuci Tangan *Preventing Covid-19 in East Jakarta, NINDYA Provided Assistance and Invited Residents to Implement Hand Washing Program*
13	Lawan Covid 19, Nindya Mengutus Beberapa Relawan ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran" *Covid-19 Fight, Nindya Sent Several Volunteers to Wisma Atlet Kemayoran Emergency Hospital*
13	Semakin Nyata Hadir Untuk Indonesia, NINDYA KARYA Kali Ini Beri Bantuan Untuk Cegah Covid-19 di Kalimantan *Existing for Indonesia, NINDYA KARYA Provided Assistance to Prevent Covid-19 in Kalimantan*
15	Kembali Beraksi, NINDYA KARYA Kembali Beri Bantuan Untuk Cegah Covid-19 di Medan *Back in Action, NINDYA KARYA Again Provided Assistance to Prevent Covid-19 in Medan*

TANGGAL *DATE*	PERISTIWA PENTING *SIGNIFICANT EVENTS*
21	NINDYA *Renewal* dan *Surveillance* Sertifikasi ISO di Bidang Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja" *NINDYA Renewal and Surveillance ISO Certification in the Field of Quality Management Systems, Environment, and Occupational Health and Safety*
22	NINDYA KARYA Beri Bantuan Ke Beberapa Desa di Trenggalek *NINDYA KARYA Provided Assistance to Several Villages in Trenggalek*
24	Proyek NINDYA KARYA Proyek NINDYA KARYA Beri Bantuan ke Warga di Kalakar, Sulawesi Selatan *NINDYA KARYA Provided Assistance to Residents in Kalakar, South Sulawesi*
25	Proyek NINDYA KARYA Proyek NINDYA KARYA Beri Bantuan ke Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan *NINDYA KARYA Provided Assistance to the Government of Takalar Regency, South Sulawesi*
30	Peduli Bencana Covid-19, NINDYA KARYA Berikan Bantuan Untuk Masyarakat Sekitar Proyek" *Concerned about the Covid-19 Disaster, NINDYA KARYA Provided Assistance to Communities Around the Projects*
MEI *MAY*	
1	Turun Ke Jalan, Milenial NINDYA KARYA Bantu Ringankan Beban Warga Jakarta Timur" *Taking to the Streets, Millennials of NINDYA KARYA Helped Lighten the Burden of East Jakarta Residents*
1	Selain Bagikan Bantuan Di Jalan, Milenial NINDYA juga Sasar Perkampungan Warga, Karyawan dan Yayasan Yatim Piatu *Apart from Distributing Aid on the Road, Millennials of NINDYA were also Targeting Villages for Residents, Employees and Orphans Foundation*
7	Nindya Karya Bantu Panti Asuhan di Padang Yang Sempat Mengalami Kebakaran Ditengah Pandemi Covid-19 *Nindya Karya Helped an Orphanage in Padang That Had A Fire Disaster Amid the Covid-19 Pandemic*
9	Bekerjasama Dengan Komunitas Gowes Mersel 13cc, Milenial NINDYA serahkan Bantuan ke RS Rujukan Covid dan Warga Bantar Gebang *In Collaboration with the 13cc Mersel Gowes Community, NINDYA Millennials Provided Assistance to Covid Referral Hospitals and Bantar Gebang Residents*
11	Nindya Karya Beri Bantuan Untuk Lawan Covid-19 di Timur Indonesia *Nindya Karya Provided Assistance to Fight Covid-19 in Eastern Indonesia*
19	Nindya Karya Beri Santunan Anak Yatim di Tengah Pandemi COVID-19" *Nindya Karya Provided Compensation to Orphans Amid the COVID-19 Pandemic*
20	 Covid 19 tidak menghalangi MOU Investasi antara Nindya - Pertamina -DH Global Holding *Signing of Investment MoU between Nindya - Pertamina - DH Global Holding*
22	Di Penghujung Bulan Ramadhan, Nindya Karya Selenggarakan Bakti Sosial Serentak di beberapa Wilayah Indonesia *At the End of the Month of Ramadan, Nindya Karya Held Simultaneous Social Services in several Regions of Indonesia*
22	Tanggulangi Dampak Covid-19, Nindya Karya Buka Posko Masak Bersama Satgas DPR RI dan Satgas Bencana BUMN DKI *Dealing with the Impact of Covid-19, Nindya Karya Opened a Cooking Post with the House of Representatives Task Force and the DKI Jakarta SOE Disaster Task Force*
27	Di Tengah Pandemi, Nindya Karya Selenggarakan Halal Bi Halal Sekaligus Sosialisasi Penerapan *New Normal* *In the midst of a pandemic, Nindya Karya Organized Halal Bi Halal as well as Socialization on the Implementation of New Normal Era*
4	Nindya Karya Gelar Rapid Test Serentak Untuk Karyawan Pusat, Wilayah, Divisi dan Proyek *Nindya Karya Held Simultaneous Rapid Tests for Employees at the Head Office, Regional Offices, Divisions, and Projects*
5	Ditengah Pandemi, Nindya Karya Tetap Berupaya Meningkatkan Kompetensi Lewat NOBEL" *In the midst of the pandemic, Nindya Karya Continued to Strive to Improve Competence through NOBEL*
5	Dorong Pertumbuhan Ekonomi Di Papua, Nindya Karya Selesaikan Rehabilitasi Pasar Wouma" *Encouraging Economic Growth in Papua, Nindya Karya Completed Wouma Market Rehabilitation*
12	Dimasa Pandemi Covid-19, Nindya Karya Pastikan Proyek Pendukung PLBN di NTT Selesai Tahun Ini" *During the Covid-19 Pandemic, Nindya Karya Ensured the PLBN Supporting Project in NTT is Completed This Year*
17	New Normal, Nindya Karya Ajak Millenial Diskusi "Isu Strategis Bidang Produksi" Lewat NOBEL *New Normal, Nindya Karya Invited Millennials to Discuss "Strategic Issues in Production" Through NOBEL*

TANGGAL *DATE*	PERISTIWA PENTING *SIGNIFICANT EVENTS*
22	*Agility* Nindya *Learning Center* Dalam Merespon Pandemi Covid-19 *Agility Nindya Learning Center in Responding to the Covid-19 Pandemic*
25	Tingkatkan Kesejahteraan Anggota, Koperasi Karyawan Nindya Karya Tetapkan RAP 2020 Dengan Optimis" *Improving Member Welfare, Nindya Karya Employee Cooperative Set 2020 RAP in an Optimistic Manner*
JULI *JULY*	
2	Nindya *Digital Transformation* 2020 *Nindya Digital Transformation 2020*
6	Nindya Lakukan *Intern*alisasi *Core Values* AKHLAK dalam Rakornas Evaluasi TW 2 *Nindya Conducted an Internalization of AKHLAK Core Value in the National Coordination Meeting for Evaluation of TW 2*
8	Meningkatkan kewaspadaan penyebaran covid-19, nindya gelar ***rapid test*** di proyek" *Increasing Awareness of the Spread of Covid-19, Nindya Held Rapid Tests in the Project*
9	 Nindya Karya Raih Penghargaan Transformasi Organisasi BUMN Terbaik III Pada Ajang Anugerah BUMN 2020 *Nindya Karya Won the Best SOE Organization Transformation Award III at the 2020 BUMN Awards*
10	Diresmikan Pemerintah, NINDYA Berharap Pasar Wouma Dapat Pulihkan Sosial Ekonomi di Papua" *Inaugurated by the Government, NINDYA Hoped Wouma Market was Able to Restore Socio-Economic Aspect in Papua*
14	Melalui Nindya *Learning Center*, Nindya Karya Berikan Pelatihan "Dasar – Dasar Engineering EPC"" *Through the Nindya Learning Center, Nindya Karya Provided Training on "Basics of EPC Engineering"*
15	Lewat NOBEL, Nindya Menekankan Pentingnya ***Leadership in Crisis Era*** *Through NOBEL, Nindya Emphasized the Importance of Leadership in Crisis Era*
15	Nindya Berikan Penghargaan Kepada 4 Wakil Karyawan Inspiratif" *Nindya Provided Awards to 4 Inspirational Employee Representatives*
17	Lakukan Kunjungan, Dewan Komisaris Minta Proyek Nindya Tetap Jaga Kualitas Pekerjaan" *Project Visit, the Board of Commissioners Asked for the Nindya Projects to Maintain the Quality of Work*
19	Tanggap Covid-19, Nindya Karya Berikan 4000 Paket Sembako ke Beberapa Kota di Provinsi NTT *Responding to Covid-19, Nindya Karya Delivered 4,000 Food Packages to Several Cities in NTT Province*
23	Ikuti Innovation Bootcamp, Milenial Nindya Sukses Masuk 10 Besar kategori ***Social Innovation*** BUMN MIS 2020 *Joining the Innovation Bootcamp, Millennial Nindya Successfully Entered the Top 10 Rank for the Social Innovation Category of SOE MIS 2020*
23	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Nindya Sampaikan Paparan ***Rebound Strategy in New Normal*** dalam BCI Asia Project Lead Series #3 *Director of Marketing and Development of Nindya Presented a Rebound Strategy in the New Normal Era in BCI Asia Project Lead Series #3*
28	Nindya Karya BUMN Karya pertama yang memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Sucofindo *Nindya Karya is the first Construction SOE to obtain the Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification from Sucofindo*
29	Pembangunan Taxiway dan Apron Logistik Bandara Hang Nadim yang dibangun Nindya Karya resmi dimulai *The Construction of Hang Nadim Airport Taxiway and Logistics Apron by Nindya Karya Officially Begins*
AGUSTUS *AUGUST*	
4	Tingkatkan Kewaspadaan, Nindya Karya Kembali Gelar ***Rapid Tes*** Untuk Karyawan di Jakarta *Increasing Awareness, Nindya Karya Held Another Batch of Rapid Testing for Employees in Jakarta*
5	Menteri PUPR Tinjau Proyek Bendungan Napun Gete Yang Dikerjakan Nindya *Minister of PUPR Reviewed Nindya's Napun Gete Dam Project*
5	Nindya Karya Tandatangani MoU Rencana Kerja Sama Pengembangan LRT & Area Terpadu Bali dengan Perusahaan Daerah Provinsi Bali serta Korea National Railway *Nindya Karya Signed an MoU Plan for LRT and Integrated Area Development in Bali with Regional Companies of Bali Province and Korea National Railway*
4	Tingkatkan Kewaspadaan, Nindya Karya Kembali Gelar Rapid Tes Untuk Karyawan di Jakarta *Increasing Awareness, Nindya Karya Again Held Another Batch of Rapid Testing for Employees in Jakarta*

TANGGAL *DATE*	PERISTIWA PENTING *SIGNIFICANT EVENTS*
10	Nindya *Learning Center* adakan *Sharing Kno*wledge tentang *Supply Chain Management*" *Nindya Learning Center Held Knowledge Sharing on Supply Chain Management*
11	Nindya Karya Mengajak Saatnya Yang Muda Memimpin *Nindya Karya Invited Young People to Lead*
19	Nindya Karya Tingkatkan Kompetensi Karyawan Lewat Aplikasi NEXT *Nindya Karya Improved Employee Competence through the NEXT Application*
25	Tingkatkan Kualitas SDM, Nindya Karya ikuti Program Magister (S2) Super Spesialis Bersama Kementerian PUPR *Improving the Quality of Human Capital, Nindya Karya Joined the Super Specialist Master's Program (S2) with the Ministry of PUPR*
27	NINDYA Jadikan Audit *Intern*al Sebagai Momentum Perbaikan Perusahaan *NINDYA Made Internal Audit a Momentum for Company Improvement*
14	Tingkatkan Mutu Kearsipan, NINDYA KARYA Selanggarakan Pelatihan Tata Pengarsipan *Improving Archival Quality, NINDYA KARYA Held Archival Management Training*
22	Nindya Sosialisasikan *Core Values* AKHLAK dan Luncurkan Tagline Baru "*Toward The Excellent*" *Nindya Promoted AKHLAK Core Value and Launched New Tagline "Toward The Excellent*
SEPTEMBER *SEPTEMBER*	
2	Nindya Bersama 20 BUMN Klaster Pembangunan Infrastruktur *Launching Core Values* AKHLAK Secara Virtual *Nindya, Together with 20 SOEs in Infrastructure Development Cluster, Launched AKHLAK Core Value Virtually*
29	Peresmian Tol Manado-Bitung, Persembahan NINDYA Tingkatkan Ekonomi Sulawesi Utara *Manado-Bitung Toll Road Inauguration, NINDYA's Offer to Boost North Sulawesi Economy*
OKTOBER *OCTOBER*	
4	Masuki Tahap Akhir, Pembangunan Jembatan Teluk Kendari Dilakukan Uji Beban Dinamis & Statis *Entering the Final Stage, Kendari Bay Bridge Construction Performed Dynamic and Static Load Tests*
8	NINDYA Raih 13 Penghargaan di Bidang K3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI *NINDYA Won 13 Awards in the Field of OHS from the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia*
8	Dua Srikandi Nindya Terima Penghargaan Karyawan Berprestasi Tahun 2020 *Two Srikandi of Nindya Received Outstanding Employee Award 2020*
13	Milenial NINDYA Bergerak Salurkan Bantuan Bencana Banjir dan Longsor Di Jakarta *NINDYA Millennials Moved to Distribute Flood and Landslide Disaster Aid in Jakarta*
14	Nindya Karya Bersama Satgas BUMN DKI Jakarta bagikan Masker di 20 lokasi di Jakarta Timur *Nindya Karya with the DKI Jakarta SOE Task Force Distributed Masks in 20 Locations in East Jakarta*
16	Nindya Tanamkan Budaya AKHLAK Lebih Dalam Kepada Karyawan Di Kantor Pusat & Wilayah I *Nindya Instilled a Deeper Moral Culture to Employees at the Head Office and Regional Office I*
19	Nindya Karya Tanda Tangani Kontrak Pekerjaan Konstruksi Penataan Kawasan Pantai Malalayang dan Penataan *Ecotourism Village* Bunaken *Nindya Karya Signed a Construction Work Contract for Malalayang Beach Area Arrangement and Bunaken Village Ecotourism Arrangement*
21	Direktur Utama Nindya Karya Kunjungi Proyek Pembangunan Kantor Cabang Bank Indonesia di Kendari *President Director of Nindya Karya Visited Bank Indonesia Branch Office Development Project in Kendari*
22	 NINDYA Bersama Pemprov Bali, AP I dan KNRI Selenggarakan FGD Proyek LRT Bali Untuk Kelancaran Pelaksanaanya *NINDYA, Together with Bali Provincial Government, AP I, and KNRI, Held FGD Bali LRT Project for Smooth Implementation*
22	Proyek Konsorsium PTPP dan NINDYA Jembatan Teluk Kendari Diresmikan Presiden *PTPP and NINDYA Consortium Project Kendari Bay Bridge Inaugurated by President*
24	Gubernur Sulawesi Selatan Melaksanakan *Ground Breaking* Proyek Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar yang Dikerjakan Nindya *Governor of South Sulawesi Carried out Ground Breaking Ceremony for the Tanjung Bunga Makassar Pedestrian Road Project Developed by Nindya*

TANGGAL *DATE*	PERISTIWA PENTING *SIGNIFICANT EVENTS*
22	Direktur Nindya Hadiri Peresmian ***Venue*** PON Papua Ke-20 *Director of Nindya Attended the Inauguration of the Venue for PON XX Papua*
26	Kepala Departemen SDM NINDYA Diangkat Jadi Direktur PT Amarta Karya (Persero) oleh Kementerian BUMN *Head of NINDYA HR Department was Appointed as a Director of PT Amarta Karya (Persero) by the Ministry of SOEs*
28	Nindya Karya tergabung dalam Kolaborasi Milenial 7 BUMN Resmikan Kampung Milenial *Nindya Karya Joined in the Millenial Collaboration of 7 SOEs to Inaugurate Millennial Village*
NOVEMBER *NOVEMBER*	
5	NINDYA Raih Dua Penghargaan dalam Ajang BUMN ***Branding & Marketing Award*** 2020 *NINDYA Won Two Awards in the 2020 SOE Branding and Marketing Award*
6	Menyukseskan Perhelatan Piala Dunia U-20, Nindya Karya Dipercaya PUPR dan Kemenpora Untuk Merenovasi Beberapa Stadion di Indonesia *Participating in the Success of the U-20 World Cup, Nindya Karya was Trusted by PUPR and Kemenpora to Renovate Several Stadiums in Indonesia*
12	Serius Jalankan Visi Baru, NINDYA Gelar Nobel Dengan Tema Pengembangan Bisnis Konstruksi di Luar Negeri *Committing to Implementing the New Vision, NINDYA Held NOBEL With the Theme of Overseas Construction Business Development*
16	NINDYA Kerjakan Pembangunan Jembatan dan Jalan di Kabupaten Asmat Milik Ditjen Bina Marga *NINDYA Undertook Construction of Bridges and Roads in Asmat Regency Belonging to the Directorate General of Highways*
24	NINDYA Bersaing di 6 Besar Dalam ***The Assets Manager*** 2020 *NINDYA Competed in Top 6 in the Assets Manager 2020*
27	Uluran Tangan NINDYA Untuk Warga Sekitar Proyek *NINDYA Provided Assistance to Residents Nearby the Project Area*
30	Gubernur Bali Melaksanakan ***Ground Breaking*** Proyek Pengendalian Banjir Tukad Unda yang Dikerjakan oleh NINDYA *Governor of Bali Carried Out Ground Breaking Ceremony of the Tukad Unda Flood Control Project Developed by NINDYA*
DESEMBER *DECEMBER*	
3	NINDYA Terus Lakukan Deteksi Dini Penyebaran Covid-19 *NINDYA Continued to Implement Early Detection Activity of the Spread of Covid-19*
5	Nindya Bersama Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Tanam Pohon di Bendungan Tugu dalam Peringatan Hari Bhakti PUPR Ke-75 *Nindya, Together with the Brantas River Basin Center, to Plant Trees at the Tugu Dam in Commemoration of the 75th PUPR Service Day*
11	NINDYA Tandatangi Pekerjaan Preservasi Jalan Yetti - Senggi - Mamberamo II (MYC) *NINDYA Signed Yetti-Senggi-Mamberamo II Road Preservation Work (MYC)*
10	 Nindya Karya Raih Gold BUMN CSR Award Bali di Tahun ke-3 *Nindya Karya Won Gold SOE CSR Award Bali in 3rd Year*
18	Nindya Karya Terima Penghargaan dari Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia *Nindya Karya Received an Award from the Association of Indonesian Construction Occupational Safety and Health Experts*
20	NINDYA Bantu Selenggarakan Khitan Masal Anak Yatim & *Dhuafa* *NINDYA Helped Organize Mass Circumcision of Orphans and Dhuafa*

Silo Semen Padang Indarung, Padang
Cement Padang Silo Indarung, Padang

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

Jaringan Perpipaan, Banten
Piping, Banten

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SUGIYARTANTO

KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dinamika ekonomi global sepanjang 2020 terjadi karena merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh penjuru dunia. Akibatnya, terjadi pelambatan bahkan resesi ekonomi dunia yang berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi juga merasakan dampak yang sangat besar atas dinamika ini. Namun berkat respon manajemen yang cepat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan adanya sosialisasi mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru, Perseroan berhasil melewatinya dengan baik.

Perseroan selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi, EPC dan Investasi senantiasa berusaha dengan sebaik mungkin guna menjadi perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi berbasis *engineering* yang terpercaya, terkemuka, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami selaku Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, serta memberikan nasihat untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Dalam fungsinya sebagai pengawas, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang tertuang dalam Laporan Dewan Komisaris yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) 2020.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, baik Dewan Komisaris maupun Direksi mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

The outbreak of Covid-19 Pandemic was one of the main reasons for the volatile global economic conditions throughout 2020. Global economy slowed down and even entered into recession in some parts of the world, which impacted on the national economic stability.

As part of the economic players, the construction service sector also experienced a substantial impact due to this dynamic. Fortunately, due to the management's quick response in dealing with the Covid-19 pandemic as well as through the socialization regarding the New Normal Adaptation, the Company managed to get through it well.

The Company, as a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in construction services, always tries its best to become a global company in the field of construction and engineering-based investment that is trusted, reputable, and sustainable.

To address various challenges within the Company's industry, we, as the Board of Commissioners, always carry out supervisory activity on the Company's policies and management by the Board of Directors, and provide advice for the benefit of the Company in accordance with its vision and mission.

In accordance with our function as a supervisor, we would like to submit a report on our supervision of the Company's management conducted by the Board of Directors, as an integral part of the 2020 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero).

SUPERVISORY FUNCTION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND WORK RELATIONSHIP WITH BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and the Board of Directors have clear authority and responsibility in accordance with their respective functions, as mandated in the Articles of Association and laws and regulations. Nevertheless, both the Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for maintaining the Company's business sustainability. Hence, all of us must have the same perception of the Company's vision, mission, and values.

Sebagaimana tercantum dalam program kerja Dewan Komisaris, pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu level *Performance* dan level *Conformance*.

Dalam menjalankan tugasnya perihal pemberian nasihat kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme Rapat Gabungan (Ragab) Dewan Komisaris dengan Direksi. Dalam Ragab tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, telah dilaksanakan Ragab sebanyak 11 (sebelas) kali.

As stated in the work program of the Board of Commissioners, the supervisory and advisory activities to the Board of Directors consists of 2 (two) aspects, namely Performance and Conformance.

In providing advice to the Board of Directors, we use the mechanism of joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors. In the joint meeting, the Board of Commissioners provides recommendations to the Board of Directors in accordance with our duties, responsibilities, and authority that have been determined. In 2020, we held 11 (eleven) joint meetings with the Board of Directors.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Dewan Komisaris mengapresiasi kinera Perusahaan di tahun 2020 di mana meskipun tengah menghadapi tantangan pandemi COVID -19 Perusahaan masih tetap mampu mencatatkan laba diantara perusahaan-perusahaan sejenis yang mengalami kontraksi dari segi pendapatan dan profitabilitas

Dari segi pengelolaan Perusahaan, Direksi telah menetapkan langkah-langkah strategis yang sesuai pada kondisi industri jasa konstruksi dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

ASSESSMENT ON BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN MANAGING THE COMPANY

The Board of Commissioners would like to appreciate the Company's performance in 2020, whereby, despite facing the challenge of COVID-19 pandemic, we managed to continue record profits compared to other similar companies that experienced contraction in terms of revenue and profitability.

In terms of management of the Company, the Board of Directors has determined several strategic steps that are appropriate to the conditions of the construction service industry in facing the Covid-19 Pandemic.

ANALISIS PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Sejalan dengan memburuknya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 mengalami konstraksi, sebesar minus 2,07% secara *year on year (yoy)*.

Laju inflasi cukup terkendali dengan baik, berada pada level yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,68% (yoy), di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 3±1%. *Surplus* neraca perdagangan juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai USD21,74 miliar sepanjang tahun 2020. BPS mencatat *surplus* tahun lalu cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2018 yang masing-masing mengalami defisit USD3,59 miliar dan USD8,70 miliar.

Memburuknya perekonomian dunia dan nasional telah mempengaruhi hampir seluruh sektor bisnis, Namun di sisi bisnis jasa konstruksi masih terbantu karena Pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk

ANALYSIS ON ECONOMIC AND INDUSTRY CONDITIONS

In line with the weakening global economy, national economic growth in 2020 contracted by negative 2.07% (yoy).

However, inflation rate was well controlled at 1.68% (yoy), a relatively lower level compared to previous years and below the inflation target range for 2020 set by Bank Indonesia (BI) at 3±1%. The trade balance surplus also increased, reaching USD 21.74 billion in 2020. The Statistics Indonesia (BPS) recorded a fairly good value of surplus last year compared to 2019 and 2018, which experienced a deficit of USD 3.59 billion and USD 8.70 billion, respectively.

The downturn in global and national economies in the reporting year affected almost all business sectors. However, from business perspective, the construction service sector managed to retain its performance as the government maintained its

menggenjot pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menyediakan dukungan dana, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan memperlancar proses administrasi di proyek infrastruktur. Meski demikian dengan adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2020, ada beberapa target pembangunan infrastruktur yang terkoreksi, sehingga memengaruhi pencapaian target Perusahaan.

policy to prioritize infrastructure development to drive the growth and recovery of national economy. This was done by the government through the provision of financial support, creation of a favorable investment climate, and streamlining of administration process in infrastructure projects. However, due to budget refocusing in 2020, there were several infrastructure development projects that could not be completed which affected the Company's target achievement.

KINERJA OPERASIONAL DAN KEUANGAN

PT Nindya Karya (Persero) memiliki cakupan daerah operasi yang sangat luas, menjangkau seluruh provinsi, mulai dari bagian barat hingga bagian timur. Untuk mendukung hal tesebut, diperlukan struktur organisasi yang kompleks berisi SDM yang berkualitas. Selain itu, adanya penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) merupakan bentuk integrasi seluruh Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan seluruhnya. Sistem ini meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM) *Cost Control*, SIM Akuntansi, dan SIM SDM.

Perusahaan juga telah melakukan transformasi digital dengan mengaplikasikan Ms Project dan *Building Information Modeling* (BIM) yang harus diterapkan secara konsisten pada setiap level proyek. Perusahaan kemudian juga merumuskan dan mengidentifikasi Manajemen Risiko korporasi dengan mengacu pada ISO 31000:2018 dan tetap memperkuat sistem pengendalian *Interna*l di bidang pemasaran, SDM, dan keuangan dengan dukungan sistem teknologi infomasi yang andal.

Perseroan juga telah menerapkan manajemen risiko dan memperhatikan kepentingan perusahaan melalui koordinasi antar direktorat dalam melakukan perjanjian dan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi perusahaan.

Komitmen perusahaan yang fokus pada pelanggan, terimplementasi dengan keinginan yang kuat untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan diterima dengan baik oleh pelanggan, sehingga memeroleh referensi pekerjaan yang menciptakan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen perusahaan dalam mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan lama sekaligus menciptakan pelanggan baru.

Perusahaan telah banyak memiliki pengalaman dalam berbagai pekerjaan konstruksi maupun investasi termasuk pada pekerjaan *Electrical*, *Power Plant*, dan EPC, khususnya untuk pekerjaan perpipaan gas.

OPERATIONAL AND FINANCIAL PERFORMANCE

PT Nindya Karya (Persero) has a broad coverage area of operations, reaching all provinces in Indonesia, from the west to the east. To support this, a complex organizational structure with qualified Human Capital is required. In addition, it is necessary to implement Enterprise Resource Planning (ERP) as a form of integration of all Management Information Systems (MIS). This ERP system includes the Cost Control MIS, Accounting MIS, and Human Capital MIS.

The Company has also carried out digital transformation by applying Ms Project and Building Information Modeling (BIM) which must be applied consistently at every project level. Furthermore, the Company has formulated and identified corporate Risk Management with reference to ISO 31000:2018, and continues to strengthen its internal control system in the fields of marketing, Human Capital, and finance, with the support of a reliable information technology system.

The Company has implemented risk management and taken into account various interests through coordination between directorates, especially in entering into agreements and cooperation contracts with third parties, so as to provide legal certainty and benefits for the Company.

Our commitment to focus on customers is realized through a strong desire to provide quality products that are well received by customers, thus obtaining job references that can drive customers' trust in the Company. This also aims to maintain good relations with existing customers while continuously seeking for new customers.

The Company is well-versed in various construction and investment works which cover the Electrical, Power Plant, and EPC works, especially gas piping work.

Selain itu, Perseroan juga telah mengembangkan Divisi Peralatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Aset Tetap Peralatan yang meliputi pencatatan, pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian serta pemeliharaan Aset Tetap Peralatan.

In addition, the Company has established the Equipment Division which is responsible for the management of the Company's fixed assets of equipment, encompassing the documentation, operation, utilization, control, and maintenance of equipment fixed assets.

Pada 2020, Perseroan telah melakukan *soft Go Live* ERP(*Enterprice Resource Planning*) dan akan mulai diimplementasikan pada tahun 2021.

In 2020, the Company had carried out a soft Go-Live ERP (Enterprise Resource Planning) which will begin its implementation in 2021.

Pertumbuhan jasa konstruksi tahun 2020 masih tumbuh dengan terbatas. Persaingan semakin ketat akibat berkurangnya pasar di masa pandemi Covid-19, terutama di segmen sumber dana APBD. Tender-tender proyek juga masih terbatas. Dengan perolehan proyek baru yang hanya mencapai 20,74% dari tender yang diikuti, Perusahaan tetap berusaha memperoleh proyek sebanyak-banyaknya dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian.

The growth of construction services in 2020 was still limited. Competition was getting tougher due to the reduced market during the Covid-19 pandemic, especially in the segment of Regional Budget funding source. Project tenders were also still limited. With the acquisition of new projects that only reached 20.74% of the tenders participated in, the Company continuously made an effort to obtain as many projects as possible while still observing the principle of prudence.

Realisasi jumlah tender yang diikuti tahun 2020 mencapai sebesar Rp28,21 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp5,76 triliun atau senilai 125,66% dibandingkan periode yang sama pada realisasi tahun 2019 sebesar Rp22,45 triliun.

The realization of the number of tenders participated in over the course of 2020 reached Rp28.21 trillion, an increase of Rp5.76 trillion or 125.66% compared to the same period in 2019 which was realized at Rp22.45 trillion.

Dari realisasi tender yang diikuti tahun 2020 sebesar Rp28,21 triliun, jumlah perolehan proyek baru tahun 2020 sebesar Rp5,85 triliun atau senilai 20,74%. Jumlah proyek baru sebesar Rp5,85 triliun terdiri atas lelang yang dimenangkan tahun 2020 sebesar Rp5,51 triliun dan tanpa lelang tahun 2020 sebesar Rp335,84 miliar.

From the realization of the tender that was participated in 2020 amounting to Rp28.21 trillion, the total acquisition of new projects in 2020 was Rp5.85 trillion or 20.74%. The amount of new projects of Rp5.85 trillion in 2020 consisted of projects acquired through tenders amounting to Rp5.51 trillion and without tender amounting to Rp335.84 billion.

Realisasi pendapatan usaha tahun 2020 mencapai sebesar Rp3,62 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp2,17 triliun atau senilai 62.53% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5,78 triliun.

Our revenues in 2020 reached Rp3.62 trillion, a decrease of Rp2.17 trillion or 62.53% from Rp5.78 trillion recorded in 2019.

Sementara untuk laba Perusahaan setelah pajak tahun 2020 mencapai sebesar Rp42,82 miliar atau senilai 1,18% terhadap pendapatan usaha tahun 2020 sebesar Rp3,62 triliun.

Meanwhile, the Company's profit after tax in 2020 reached Rp42.82 billion or 1.18% of the revenues of Rp3.62 trillion.

Laba Perusahaan setelah pajak tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp173,05 miliar atau 19,84% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Rp215,87 miliar.

The Company's profit after tax in 2020 decreased by Rp173.05 billion or 19.84% compared to the realization in 2019 of Rp215.87 billion.

Penurunan kinerja operasional di 2020 telah berdampak pada penurunan aset Perseroan sebesar 9,70%, dari semula aset pada 31 Desember 2019 sebesar Rp6.076,32 miliar menjadi Rp5.486,82 miliar Pada 31 Desember 2020.

The decline in operational performance in 2020 has resulted in a 9.70% decrease in the Company's assets, from Rp6,076.32 billion recorded on December 31, 2019 to Rp5,486.82 billion recorded on December 31, 2020.

Adanya pandemi Covid-19 berdampak cukup besar bagi Perusahaan, di antaranya *cash flow* yang terganggu akibat adanya pemotongan anggaran; pencairan restitusi PPN yang tertunda akibat kebijakan *refocusing* anggaran oleh Pemerintah; penurunan dan pengurangan jumlah proyek

The Covid-19 pandemic had a significant impact on the Company, including disrupted cash flow due to budget cuts, delayed disbursement of VAT refunds due to the government's budget refocusing policy, a decrease and reduction in the number of projects being tendered, and a

yang ditenderkan serta pergeseran waktu tender yang berdampak pada *competitiveness* naik dan penurunan perolehan kontrak baru; kebijakan PSBB menghambat mobilisasi pekerja proyek dan berdampak pada pencapaian pendapatan usaha dan laba proyek; dan pengadaan serta pengiriman material dan mobilisasi tenaga kerja terganggu.

shift in the timing of tenders which impacted on the increase in competitiveness and decrease in the acquisition of new contracts. In addition, we were hindered by the PSBB policy, especially in the mobilization of project workers, which had an impact on the achievement of revenues and project profits, and in the disrupted procurement and delivery of materials.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Tingkat kesehatan Perseroan yang diukur berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 100/MBU/2002 menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi skor tingkat kesehatan Perseroan pada tahun 2020 sebesar 67,75 dengan kualifikasi A dan SEHAT. Pengukuran tersebut didasarkan pada kinerja Perseroan yang meliputi aspek operasional, keuangan, dan administrasi.

COMPANY HEALTH INDEX

The Company's health index in 2020, as measured based on the Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. 100/MBU/2002, showed that the overall realization of health level score at 67.75, with the qualification of A and HEALTHY category. The measurement was carried out on the Company's performance, which included the operational, financial, and administrative aspects.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan dilaksanakan dengan melakukan Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja secara periodik, yaitu 1 (satu) bulan sekali. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa strategi Perseroan telah dilaksanakan dengan baik.

SUPERVISION ON STRATEGY IMPLEMENTATION

During 2020, the Board of Commissioners has carried out supervisory activities on the Company's management conducted by the Board of Directors, and provided advice to the Board of Directors regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget, with due regard to the provisions of Articles of Association, GMS resolutions, as well as the prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company in accordance with its purposes and objectives.

Supervision of the implementation of Company's strategy is carried out by evaluating the Company's Operating Results and Performance Progress Reports periodically, i.e. once a month. This is done to ensure that the Company's strategy has been carried out properly.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris memberikan tanggapan positif atas prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi. Prospek usaha telah disusun berdasarkan asumsi yang tepat dan realistis. Berdasarkan Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, diperkirakan sektor konstruksi terkena dampak penundaan

VIEWS ON BUSINESS OUTLOOK PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners responds positively to the business outlook that has been prepared by the Board of Directors based on appropriate and realistic assumptions. Pursuant to Presidential Regulation No. 122 of 2020 regarding Update of the Government's Work Plan for 2021, it is estimated that the construction sector will be affected by

atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan yang diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,6%. Hal ini juga didukung oleh prediksi pertumbuhan ekonomi yang mencapai kisaran 4,3% hingga 5,5%. Namun dengan keunggulan Perseroan dan pengalaman yang dimiliki, Dewan Komisaris yakin bahwa prospek usaha, Perseroan terutama pasca pandemi Covid-19 akan sangat baik.

the delay or termination of various government infrastructure development projects, which will result in a slowdown in growth estimated to contract by 2.6%. This is also supported by the predictions of economic growth to be within the range of 4.3% to 5.5%. However, with the Company's advantages and experience, the Board of Commissioners believes that the Company's business outlook, especially after the Covid-19 pandemic, will remain bright.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris senantiasa mengevaluasi kemajuan praktik penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dikarenakan bahwa implementasi GCG merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil *assessment* Perwakilan BPKP DKI, yang telah dilakukan di tahun 2020. Pelaksanaan *assessment* GCG yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN menunjukkan hasil skor keseluruhan sebesar 89,79 yang berarti bahwa penerapan GCG Perseroan sangat baik.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan beberapa isu kunci dalam penerapan GCG seperti manajemen risiko, penerapan *whistleblowing system*, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut pandangan Dewan Komisaris terhadap penerapan tiga hal tersebut.

VIEWS ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners continuously evaluates the progress of implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices. This is because the implementation of GCG in the Company is a key requirement in achieving sustainable performance. The Board of Commissioners is of the opinion that GCG implementation within the Company has been carried out properly as shown in the results of the Jakarta BPKP Representative's assessment carried out in 2020. GCG assessment is carried out based on the Decision of Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding Indicators/Parameters of Assessment of Good Corporate Governance Implementation in SOEs, and in 2020, the Company obtained an overall score of 89.79, meaning that GCG implementation in the company was excellent.

We also pay attention to a number of essential issues in GCG implementation, such as risk management, whistleblowing system, and corporate social responsibility. The following is our view regarding these issues.

MANAJEMEN RISIKO

Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap efektivitas manajemen risiko dilakukan melalui pelaksanaan tugas Komite Audit yang salah satu tugasnya adalah melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Saat ini, manajemen risiko telah menggunakan kerangka kerja ISO 31000:2018 yang telah dilaksanakan secara efektif sejak tahun 2019.

Pada Profil Risiko Revisi RKAP tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) risiko utama yang dihadapi Perusahaan. Ditinjau dari kategori risiko, dapat

RISK MANAGEMENT

The Board of Commissioners' active supervision of the effectiveness of risk management is carried out through the implementation of Audit Committee's duties; one of which is to review the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors. Currently, the risk management at the Company has used the ISO 31000:2018 framework, which has been effectively implemented since 2019.

In the Risk Profile of the Revised 2020 RKAP, there are 10 (ten) main risks faced by the Company. Observing from the risk category, the risks that

diketahui risiko yang timbul menitik beratkan pada area Pemasaran, Produksi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia.

Identifikasi Risiko atas Pencapaian Revisi RKAP tahun 2020 terdiri dari:

a. Rencana Perolehan Kontrak Baru tidak tercapai
b. Gagal dalam tender
c. Rencana Pendapatan Usaha tidak tercapai
d. Biaya pelaksanaan Proyek tidak sesuai dengan Penetapan Pedoman Pelaksanan Proyek (PPP)
e. Kenaikan Beban Kontrak
f. Gagal Bayar *Medium Term Note* (MTN)
g. Perusahaan tidak mampu untuk menutup *cost of fund* MTN yang lebih tinggi dari bunga Bank

Dengan dilakukannya mitigasi yang tepat oleh *Risk Owner* serta mendapatkan perhatian yang baik dari *Top Management*, tingkat risiko yang tinggi tersebut dapat berubah menjadi tingkat risiko rendah atau risiko yang dapat diterima Perusahaan.

may arise focus on the areas of Marketing, Production, Finance, and Human Capital.

Risk Identification on Achievement of Revised 2020 RKAP 2020 consists of:

a. Non-achievement of new contract acquisition plan
b. Failure in acquiring tenders
c. Non-achievement of business income plan
d. Non-conformity of project implementation costs with the determined Project Implementation Guidelines
e. Increase in contract expenses
f. Failure in paying Medium Term Note (MTN)
g. Inability to cover the MTN cost of fund, which was higher than the bank interest

Due to proper mitigation effort by the Risk Owner and appropriate attention from the management, the high risk level was able to be converted into a low risk level acceptable to the Company.

PENERAPAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

NINDYA adalah Perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo (Persero) sebagai hasil yang didapatkan atas konsistensi dan komitmen NINDYA dalam menerapkan GCG.

Sertifikasi yang didapatkan ini merupakan wujud nyata dukungan Perusahaan terhadap upaya pencegahan korupsi, melalui pengelolaan BUMN yang Bersih dan penerapan GCG secara konsisten. Di samping itu didukung dengan Implementasi Anti Penyuapan dan Penanganan Benturan Kepentingan melalui Penguatan Pengendalian *Intern*.

ISO 37001:2016 merupakan sertifikasi yang dirancang untuk mengarahkan organisasi agar dapat membangun, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program kepatuhan anti penyuapan. Hal ini mencakup serangkaian tindakan dan pengendalian praktik anti penyuapan.

IMPLEMENTATION AND ROLE OF BOARD OF COMMISSIONERS IN WHISTLEBLOWING SYSTEM

NINDYA is the first company in Indonesia to achieve ISO 37001:2016 certification on the Anti-Bribery Management System (SMAP) issued by PT Sucofindo (Persero), as a result of NINDYA's consistency and commitment to GCG implementation.

This certification is a tangible manifestation of the Company's support for corruption prevention efforts through the clean management of SOEs and the consistent implementation of GCG. In addition, it is supported by the implementation of anti-bribery policy and proper management of conflicts of interest by strengthening internal controls.

ISO 37001:2016 is a certification designed to guide organizations to establish, implement, maintain, and improve anti-bribery compliance programs. This includes a series of anti-bribery practices and controls.

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Hal penting lainnya yang mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan CSR Perseroan telah sejalan dengan penerapan keuangan keberlanjutan, seperti yang diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Kegiatan CSR telah dilakukan secara komprehensif, tidak sekedar kegiatan *philantropi*, akan tetapi melekat pada setiap kegiatan operasional Perseroan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan CSR dengan efektif meliputi 7 (tujuh) sektor yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana umum, bencana alam, pelestarian alam, sarana ibadah, peningkatan kesehatan, sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan.

Perseroan juga telah mengukur dampak kuantitatif dari kegiatan CSR dengan baik, sehingga kegiatan CSR dapat senantiasa dievaluasi guna perbaikan secara berkelanjutan ke depannya.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

We also pay social attention to the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). The Company carries out its CSR activities in line with the implementation of sustainability finance as regulated in POJK Number 51/POJK.03/2020 of 2020 regarding of Sustainable Finance Implementation for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. CSR activities have been carried out comprehensively, not only as philanthropic activities, but inherently attached to every operational activity of the Company.

The Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors has carried out CSR activities effectively, covering 7 (seven) sectors that can have a direct impact on the lives of Indonesian people. This encompasses the sectors of education and training, public facilities and infrastructure, natural disaster, nature conservation, religious facilities, health improvement, and social community for poverty alleviation.

The Company has also measured the quantitative impact of CSR activities properly, so that CSR activities can always be evaluated for continuous improvement in the future.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Fungsi Nominasi & Remunerasi.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian *Intern*, manajemen risiko, *Intern*al audit, proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penelaahan atas informasi keuangan, penelaahan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko, penelaahan atas hasil audit Satuan Pengawasan *Intern* dan KAP atas Sistem Pengendalian *Intern*al.

ASSESSMENT ON COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has supporting committees that have duties and responsibilities to support the Board of Commissioners' performance. These committees have had clear work guidelines to support a directed and effective implementation of their duties. The committees under the Board of Commissioners are the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

The Audit Committee is responsible for supervising the effectiveness of internal control system, risk management, internal audit, and financial reporting process. During 2020, the Audit Committee has carried out its duties, among others, by providing recommendations to the Board of Commissioners based on reviews of financial information, risk management implementation activities, audit results of the Internal Audit Unit and KAP and the Internal Control System.

Sedangkan Komite Nominasi & Remunerasi merupakan organ pendukung yang dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi di NINDYA. Selama tahun 2020, Komite Nominasi & Remunerasi telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas nominasi dan remunerasi.

Dewan Komisaris secara periodik melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2020 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee is a supporting organ intended to assist the Board of Commissioners in the field of nomination and remuneration. During 2020, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties, among others, by providing recommendations to the Board of Commissioners on nomination and remuneration.

The Board of Commissioners periodically assesses the effectiveness of the performance of committees under the Board of Commissioners. We consider that, throughout 2020, the committees have carried out their duties and responsibilities effectively.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2020

Pada periode tahun 2020, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

PERIODE 1 JANUARI-13 SEPTEMBER 2020

Pada periode 1 Januari-13 September 2020, Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat NINDYA.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

There was a change in the number and composition of Board of Commissioners in 2020 as described below:

PERIOD OF JANUARY 1 TO SEPTEMBER 13, 2020

In the period of January 1 to September 13, 2020, the Company's Board of Commissioners consisted of 4 (four) people, i.e. 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioner. All members of the Board of Commissioners are domiciled within the Head Office work area.

PERIODE 1 JANUARI – 6 JANUARI 2020 *JANUARY 1 TO JANUARY 6, 2020*	PERIODE 6 JANUARI – 31 DESEMBER 2020 *JANUARY 6, 2020 TO DECEMBER 31, 2020*	PERIODE *PERIOD*	KETERANGAN *DESCRIPTION*
Sugiyartanto Komisaris Utama *President Commissioner*	**Sugiyartanto** Komisaris Utama *President Commissioner*	Pertama *First*	-
Andar Perdana Widiastono Komisaris *Commissioner*	**Andar Perdana Widiastono** Komisaris *Commissioner*	Pertama *First*	-
Iwanshah Wibisono Komisaris *Commissioner*	**Rika Kiswardani** Komisaris *Commissioner*	Pertama *First*	Keputusan para pemegang Saham PT NINDYA KARYA nomor: SK-6/MBU/01/2020 dan nomor: KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-6/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero)*
Zahirwan Marza Komisaris Independen *Independent Commissioner*	-	Pertama *First*	Masa jabatan berakhir *Term of office ends*

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	DASAR PENGANGKATAN *BASIS OF APPOINTMENT*
Sugiyartanto	Komisaris Utama *President Commissioner*	Keputusan para pemegang saham PT NINDYA KARYA nomor : SK-205/MBU/09/2019 dan nomor: KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 and No. KEP-PS 06/PPA/0919 dated September 13, 2019 regarding Dismissal and Appointment of President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero)*
Andar Perdana Widiastono	Komisaris *Commissioner*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-308/MBU/12/2018 dan Nomor: SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 and No. SK-78/PPA/1218 dated December 26, 2018 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero)*
Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*	Keputusan para pemegang Saham PT NINDYA KARYA nomor: SK-6/MBU/01/2020 dan nomor: KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-6/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero)*

PERIODE 13 SEPTEMBER-31 DESEMBER 2020

Sementara dalam periode 13 September-31 Desember 2020, Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris, dan seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat NINDYA.

PERIOD OF SEPTEMBER 13 TO DECEMBER 31, 2020

In the period of September 13 to December 31, 2020, the Company's Board of Commissioners consisted of 3 (three) people, i.e. 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Commissioners. All members of the Board of Commissioners are domiciled within the Head Office work area.

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*
Sugiyartanto	Komisaris Utama *President Commissioner*
Andar Perdana Widiastono	Komisaris *Commissioner*
Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*

PENUTUP

Sebagai penutup, izinkanlah saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan atas keberhasilan Manajemen dalam membawa Perseroan tetap tumbuh di tengah kondisi perekonomian yang mengalami pelambatan sepanjang 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kontribusi seluruh jajaran karyawan, baik Perusahaan Induk maupun Entitas Anak.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham Utama yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku kuasa Negara Republik Indonesia dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku Pemegang Saham Lainnya atas dukungan, kepercayaan serta aspirasi yang diberikan kepada Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun

CLOSING

To conclude the report, on behalf of the Board of Commissioners of the Company, I would like to extend an appreciation for the success of the management in ensuring that the Company continued to growth amid the unfavorable economic situation during 2020. We would also like to appreciate the hard work and contribution of all employees of the Company, both the parent company and the subsidiary.

We would like to express our gratitude to the Main Shareholder of the Company, namely the Ministry of State-Owned Enterprises as the proxy of the Republic of Indonesia, and to PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as another shareholder of the Company, for their support, trust, and aspiration in the Company during our business journey over the course of 2020. We are

2020. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik mitra usaha, konsumen dan seluruh lapisan masyarakat atas kerja sama yang terjalin.

Semoga kita bisa terus menjaga optimisme adanya pertumbuhan positif guna memelihara keberlanjutan usaha sekaligus menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang mampu memberikan nilai yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

also grateful for all of our stakeholders, business partners, consumers, and all levels of society for the cooperation maintained up to this day.

We sincerely hope that we can continue keeping the optimism for positive growth in the future to ensure business sustainability, while driving the Company forward to become a corporation that can sustainably provide added values for all stakeholders.

Jakarta, Oktober 2021
Jakarta, October 2021

Atas nama Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero)
On behalf of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero)

Sugiyartanto
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

HAEDAR A. KARIM

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat melalui berbagai tantangan dan dinamika bisnis sepanjang 2020.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 mengalami penurunan yang kemudian berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 tercatat sebesar (2,07%) dengan inflasi sebesar 1,68%. Sementara Bank Indonesia mencatat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang melemah 2,66% yang memengaruhi harga produk.

Berdasarkan kondisi yang penuh tantangan ini, izinkan kami selaku jajaran Direksi Perseroan menyampaikan laporan kinerja atas kegiatan usaha yang berlangsung dari 1 Januari-31 Desember 2020. Harapan kami, semoga laporan dapat memberikan gambaran kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait jalannya kegiatan usaha dan hasil yang dicapai.
LAPORAN KINERJA PERSEROAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Pertumbuhan jasa konstruksi tahun 2020 masih tumbuh dengan terbatas. Persaingan semakin ketat akibat berkurangnya pasar di masa pandemi Covid-19, terutama di segmen sumber dana APBD. Adaptasi Kebiasaan Baru memberikan dampak bagi kinerja pada sebagian sektor, namun di sisi lain juga memberikan potensi pertumbuhan dan pengembangan kinerja di beberapa sektor.

Dalam merespon dampak pandemi Covid-19 dan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru, Perseroan mengambil langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk Tim *Business Continuity Management* (Tim BCM)

   Bertugas untuk mengidentifikasi kondisi *Internal* dan eksternal perusahaan, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bisnis tetap dapat berjalan, baik selama masa pandemi maupun setelah selesai.

Dear Shareholders and Stakeholders,

On this momentous occasion, let us extend our praise and gratitude to God Almighty, because by His grace and guidance, we were able to address and overcome various challenges and business dynamics throughout 2020.

The Covid-19 pandemic resulted in a decline in global economic growth throughout 2020 which, in turn, impacted on the weakening national economic growth. Based on data released by the Statistics Indonesia (BPS), domestic economic growth in 2020 was recorded at (2.07%) with inflation at 1.68%. Meanwhile, Bank Indonesia recorded Rupiah exchange rate against the US Dollar to be weakened by 2.66%, which affected product prices.

Observing such conditions, allow us, the Company's Board of Directors, to describe the business activities of the Company undertaken during the period of January 1 to December 31, 2020. We hope that this report can provide an overview to the shareholders and stakeholders on the course of Company's business activities and the results achieved.Report of Company Performance

STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES

The growth of construction services in 2020 remained limited. Competition was getting tougher due to the reduced market during the Covid-19 pandemic, especially in the segment of Regional Budget funding sources. Adaptation to the New Normal impacted on the performance of several sectors; on the other hand, it also provided growth potential and performance development in others.

In responding to the impact of Covid-19 pandemic and the Adaptation to the New Normal, the Company implemented a number of strategic steps in 2020, as follows:

1. Establishment of Business Continuity Management Team (BCM Team)

   The main duties of the BCM Team are to identify the Company's internal and external conditions and to provide recommendations to ensure the business can continue to run, both during and after the pandemic.

Dengan tujuan menjaga pendapatan dan optimalisasi biaya, Tim BCM membuat langkah strategis agar operasional perusahaan tetap berjalan. Tim BCM juga memastikan Pekerja dan Keluarga Pekerja terhindar dari Covid-19 dengan merealisasikan Satgas Covid-19 yang mengawasi jalannya protokol kesehatan di seluruh wilayah kerja, serta membuat langkah strategis jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.

2. Menyiapkan tiga rencana *survival strategy*

   Perseroan secara berkesinambungan meningkatkan kinerjanya melalui rencana-rencana strategis, termasuk dalam aspek implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) maupun implementasi kinerja unggul.

3. Akselerasi Transformasi Digital

   Guna tercapainya *Integrated* NINDYA *Excellence System* (INEX) atau konsep terintegrasi untuk pencapaian Sasaran Strategis (RJPP & RKAP) serta visi dan misi Perseroan, Direksi membangun *Digital Smart Construction* melalui tiga cara, yaitu digitalisasi pengetahuan dan keahlian, digitalisasi area konstruksi, digitalisasi kolaborasi *Interna*l perusahaan, dan digitalisasi bisnis proses kontruksi.

4. *Rebound strategy* sebagai inisiatif strategis

   Dalam menghadapi fase Adaptasi Kebiasaaan Baru, Direksi menyusun sejumlah strategi di antaranya perubahan manajemen, restrukturisasi bisnis, mengindentifikasi tingkat keparahan situasi agar dapat mengendalikan kondisi dan menentukan *emergency action*, serta yang terkahir melembagakan perubahan budaya perusahaan untuk menekankan profitabilitas, ROI, dan pengembalian aset yang digunakan juga mencari peluang pertumbuhan.

Pada 2020, Direksi beserta jajaran manajemen Menyusun *Road Map* Nindya 2021-2025 dengan berfokus pada arah pengembangan usaha.

With the aim of maintaining revenue and optimizing costs, the BCM Team has taken strategic steps to keep the Company's operations running. The BCM team also ensures that the Company's workers and their families are protected from Covid-19 by forming a Covid-19 Task Force to oversee the implementation of health protocols in all work areas, as well as making short, medium, and long-term strategic steps for the company.

2. Preparation of three survival strategy plans

   The Company continuously improves its performance through strategic plans, including in the aspect of Good Corporate Governance (GCG) implementation and superior performance implementation.

3. Acceleration of Digital Transformation

   To achieve an Integrated NINDYA Excellence System (INEX) or an integrated concept for the achievement of Company's Strategic Goals (RJPP and RKAP) and vision and mission, the Board of Directors has developed Digital Smart Construction in three ways, namely digitizing knowledge and expertise, digitizing construction areas, digitizing internal company collaboration, and digitizing construction process business.

4. Rebound strategy as a strategic initiative

   In facing the Adaptation to New Normal phase, the Board of Directors has developed a number of strategies including management changes, business restructuring, identification of the severity of the situation in order to control conditions and determine emergency actions, and institutionalization of changes in corporate culture to emphasize profitability, ROI, and return on assets used while seeking for growth opportunities.

In 2020, the Board of Directors and the management of the Company drafted the Nindya's Road Map of 2021-2025 which focuses on the direction of business development.

PERBANDINGAN ANTARA HASIL DAN TARGET 2020

Perseroan berpedoman kepada buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun dengan memperhatikan perencanaan dan target dari masing-masing Wilayah/Divisi dan Kantor Pusat yang telah disetujui oleh manajemen dan disahkan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Penyusunan RKAP 2020 mengacu pada Surat Menteri BUMN No. S-487/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Keputusan Menteri BUMN No.

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND RESULTS IN 2020

The Company refers to its Work Plan and Budget (RKAP) which is prepared by taking into account the plans and targets of each Regional/Division Office and Head Office, and approved by the management and the Company's Shareholders.

The preparation of the 2020 RKAP refers to the SOE Minister's Letter No. S-487/MBU/08/2017 dated August 31, 2017 and Decision of Minister of SOEs No.

KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Cara Penyusunan RKAP BUMN dan Anggaran Dasar Perusahaan yang kemudian ditetapkan bersama-sama Pemegang Saham melalui mekanisme Persetujuan RUPS.

Pada 2020, terjadi revisi RKAP yang diputuskan dalam RUPS sesuai risalah rapat tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengesahan RKAP 2020.

RKAP 2020 memuat 2 (dua) aspek utama dalam menjalankan kegiatan usaha, yaitu target Pemasaran dan Bisnis serta Keuangan. Dari sisi pemasaran, realisasi jumlah tender yang diikuti tahun 2020 mencapai 125,46% dari revisi anggaran tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 125,66% dibandingkan periode yang sama pada realisasi tahun 2019. Dari realisasi tender yang diikuti tahun 2020 ini, jumlah perolehan proyek baru tercatat sebesar 20,74%. Sementara untuk realisasi nilai kontrak tersedia tahun 2020 mencapai sebesar 107,50% dari revisi anggaran tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 88,71% dibandingkan periode yang sama pada realisasi tahun 2019. Realisasi nilai kontrak tersedia ini terdiri dari sisa pekerjaan proyek lama yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 54,09% dan perolehan proyek baru pada tahun 2020 sebesar 45,91%.

Dari kinerja pemasaran dan operasional yang dicatatkan, Perseroan mencatatkan kinerja bisnis dengan perolehan pendapatan usaha sebesar 85,72%, laba usaha pokok sebesar 61,93%, laba kotor sebesar 106,10% dan perolehan laba bersih sebesar 100,23% dari revisi target RKAP 2020.

KEP-101/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding Procedures for the Preparation of SOEs' RKAP, and the Company's Articles of Association which are determined jointly with the Shareholders through the GMS Approval mechanism.

In 2020, there was a revision to the RKAP which was decided at the GMS according to the minutes of meeting dated January 22, 2020 regarding Approval for 2020 RKAP.

The 2020 RKAP contains 2 (two) main aspects in carrying out business activities, namely Marketing target and Business and Finance target. From the marketing perspective, the realization of the number of tenders participated in in 2020 reached 125.46% of the revised 2020 budget, an increase of 125.66% compared to the realization in the same period in 2019. From the realization of the tenders that were participated in 2020, the total project acquisitions were only recorded at 20.74%. Meanwhile, the realization of the available contract value in 2020 reached 107.50% of the 2020 budget revision, a decrease of 88.71% compared to the realization in the same period in 2019. The realization of the available contract value consisted of the remaining existing project work acquired in 2020 of 54.09% and the acquisition of new projects in 2020 of 45.91%.

From the recorded marketing and operational performance, the Company's business in 2020 booked revenues of 85.72%, basic operating profit of 61.93%, gross profit of 106.10%, and net profit of 100.23% of the revised target in the 2020 RKAP.

KENDALA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Kendala dan tantangan terbesar yang terjadi selama tahun 2020 adalah merebaknya pandemi Covid-19. Adapun kendala yang memengaruhi kinerja perusahaan, antara lain:

1. Adanya kebijakan *refocusing* anggaran oleh pemerintah untuk proyek–proyek infrastruktur yang berdampak pada arus kas perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, perseroan melakukan *survival strategy* dengan merumuskan Langkah-langkah strategis kelangsungan bisnis, seperti optimalisasi di bidang pemasaran dalam memeroleh proyek baru sesuai dengan target yang diharapkan, *market switching*, efisiensi Biaya Umum dan Administrasi (BUA), dan adaptasi kultur teknologi yang bersandar pada skenario optimis, moderat dan pesimis.
2. Adanya hambatan di bidang operasional khususnya dalam hal *supply material*, alat berat, dan mobilisasi keperluan proyek lainnya akibat adanya pembatasan sosial. Terkait hal ini, Perseroan melakukan *monitoring* berkala

OBSTACLES FACED BY THE COMPANY AND MITIGATION EFFORTS

The greatest obstacle and challenge that occurred during 2020 was the outbreak of Covid-19 pandemic. The obstacles that affected the Company's performance were as follows:

1. The policy of budget refocusing by the government for infrastructure projects, which impacted on the Company's cash flow. To overcome this, the Company carried out a survival strategy by formulating strategic steps for business continuity, such as optimization of marketing in order to obtain new projects in accordance with the expected target, implementation of market switching, efficiency of General and Administrative Expenses, and adaptation of technological culture that relies on optimistic, moderate, and pessimistic scenarios.
2. The obstacles in the operational sector, especially in terms of supply of materials, heavy equipment, and mobilization of other project needs due to social restrictions. In this regard, the Company conducted periodic

terkait dengan mobilisasi dan demobilisasi (mobdemob) material serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menanggulangi dampak yang lebih besar terhadap kegiatan proyek karena adanya perbedaan regulasi mobdemob di masing-masing daerah maupun impor.

3. Terdapat potensi penyebaran Covid-19 di Unit Kerja, Unit Bisnis dan Proyek yang dapat memberikan implikasi bagi kelangsungan usaha Perusahaan. Untuk menanggulangi hal ini, melalui Tim BCM Satgas Covid-19, Perseroan menerbitkan protokol *New Normal* dan kampanye NINDYA COVID Ranger.

monitoring related to the mobilization and demobilization of materials and coordinated with related parties to overcome the greater impact on importation and project activities due to differences in the mobilization and demobilization regulations in each region.

3. The potential for the spread of Covid-19 in Work Units, Business Units, and Projects that could have implications for the Company's business continuity. To overcome this, through the Covid-19 Task Force BCM Team, the Company issued the New Normal protocol and the NINDYA COVID Ranger campaign.

GAMBARAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan pada tahun 2021, dengan tetap berfokus pada upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Melalui kebijakan bisnis yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan asumsi makroekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, Perseroan memproyeksikan prospek usaha tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan fokus usaha utama pada bidang konstruksi, EPC, dan Investasi dengan segmen usaha unggulan di bidang jasa konstruksi, energi, dan properti.

2. Pangsa pasar utama Perusahaan tidak hanya belanja infrastruktur pemerintah, namun juga akan dikembangkan ke pasar investasi, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja Modal BUMN dan Rencana Pembangunan Infrastruktur di ASEAN.

Berdasarkan asumsi dan dasar perhitungan serta memperhatikan faktor-faktor yang ada, maka Perseroan diperkirakan akan mampu mencatatkan rasio pertumbuhan penjualan sebesar 30 hingga 43 persen, dengan target laba sebesar Rp1 triliun pada tahun 2025.

DESCRIPTION OF BUSINESS OUTLOOK

The momentum of ongoing economic improvement needs to be maintained and continued in 2021, while remained focused on efforts to deal with Covid-19 and economic recovery. Through the business policies contained in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the macroeconomic assumptions contained in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the 2021 State Budget (APBN), the Company projects its business outlook from 2021 to 2025 as follows:

1. Focusing main business on construction, EPC, and investment, with leading business segments in construction, energy, and property services.

2. Expanding main market share not only to government infrastructure spending, but also to the investment market, Public Private Partnership (PPP), SOE Capital Expenditures and Infrastructure Development Plans in ASEAN.

Based on the assumptions and calculation basis, and taking into account the existing factors, the Company estimates to be able to record a sales growth ratio of 30 to 43 percent, with a profit target of Rp1 trillion by 2025.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

*Intern*alisasi atas prinsip-prinsip GCG dilakukan dengan mengintegrasikannya pada peraturan yang berlaku guna menjadi acuan pedoman praktik terbaik (*best practice*) dalam pelaksanaannya.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The internalization of GCG principles is carried out by integrating the principles into applicable regulations to become a reference for best practice implementation guidelines by all personnel. As

Sebagai landasan legal-formal utama dalam menjalankan kegiatan tata kelola usaha, Perusahaan menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa BUMN wajib melaksanakan operasional Perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.

Berdasarkan analisis dan identifikasi yang dilakukan, Perseroan telah menetapkan langkah pengembangan GCG yang meliputi proses *benchmarking*, penyusunan *manual book*/panduan penerapan GCG, *Internalisasi* dengan objek utama manajemen dan Insan Nindya Karya secara menyeluruh, kemudian mengintegrasikannya dengan rencana strategis Perseroan dalam mengedepankan Teknologi Informasi (TI) dalam seluruh aktivitas bisnis, dan yang terakhir melakukan transformasi terhadap pengimplementasian GCG di lingkungan Perseroan yang dilakukan secara konsisten. Dalam tahapan ini, Perseroan telah menempatkan GCG sebagai budaya.

Perseroan melakukan *assessment* terhadap penerapan GCG secara periodik. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk dapat terus melakukan pemantauan terhadap penerapan GCG. Pengukuran penerapan GCG untuk tahun buku 2020 dilakukan melalui metode *Assessment* atau Penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, salah satu perangkat penilaian yang diterapkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang mandat dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham entitas usaha BUMN adalah penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Proses Evaluasi ini melalui 2 (dua) tahapan besar yaitu tahap "*On-desk Review*" yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU tahun sebelumnya dan informasi pendukung ADLI (*Approach, Deployment, Learning*, dan *Integration*). Tahap berikutnya adalah "*Site Visit*" untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta pejabat eksekutif lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi.

the primary legal-formal basis in carrying out business governance activities, the GCG aspect within the Company is supported by preparing applicable governance policies with reference to the Regulation of State Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 regarding Amendment to the Regulation of State Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding Implementation of Good Governance in SOEs, which state that SOEs are required to carry out operational activities by adhering to GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

Based on the analysis and identification carried out, the Company has determined a number of steps for developing GCG, which include the benchmarking process; preparation of a manual book/guideline for GCG implementation; internalization with the main object of management and Nindya Karya personnel as a whole to be then integrated with the Company's strategic plan in promoting Information Technology (IT) in all business activities; and application of a consistent transformation of GCG implementation within the Company. In this stage, the Company has placed GCG as its corporate culture.

The Company conducts periodic assessments on its GCG implementation which shows its commitment to continuously monitoring and developing GCG implementation within its operations. The assessment on GCG implementation for the 2020 fiscal year was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

In addition, the Company assesses the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) as one of the assessment tools implemented by the Ministry of SOEs as the holder of mandate from the Government of the Republic of Indonesia, as the shareholder of SOE business entities.

This assessment process goes through 2 (two) major stages, namely the "On-desk Review" and "Site Visit" stages. The On-desk Review stage is a paper-based assessment on the previous year's KPKU response and supporting information of ADLI (Approach, Deployment, Learning, and Integration). The Site Visit stage is carried out for interviews and clarification of KPKU's response to the Board of Directors and other executive officers appointed by the Company as well as verification of various data and information.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Seluruh program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Penerapan TJSL atau CSR di Perseroan menyasar pada 4 (empat) lingkup utama, yaitu Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Lingkup Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pemenuhan Tanggung Jawab terhadap Konsumen.

Dalam aspek lingkungan, Perseroan memenuhi komitmen dengan pemenuhan posedur manajemen lingkungan yang dipersyaratkan, menerbitkan kebijakan pendukung pelaksanaannya serta melakukan evaluasi secara mandiri maupun dengan menyertakan pihak independen untuk kemudian ditindaklanjuti.

Bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terwujud dengan adanya action plan yaitu target pencapaian *Severety Rate* (SR) < 250 dan *Frequecy Rate* (FR) < 2 disemua kegiatan unit bisnis.

Pada aspek Tanggung Jawab Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Perseroan sebagai salah satu BUMN yang berkiprah di bidang jasa Konstruksi sangat mendukung kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada usaha kecil khususnya dan memberdayakan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya.

Pemilihan Mitra Binaan baru untuk tahun 2020 lebih dititikberatkan kepada usaha kecil yang belum mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari sektor perbankan dikarenakan mitra binaan tersebut belum mampu menyajikan laporan keuangan dan aktivitas usahanya sesuai dengan standardisasi pengajuan pinjaman modal kerja. Kebijakan tersebut diambil agar modal kerja yang disalurkan kepada mitra binaan dapat mendongkrak hasil usaha dan akselerasi mitra binaan tersebut sehingga mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari sektor perbankan (*bankable*). Realisasi Program Kemitraan tersalurkan kepada 9 (sembilan) Mitra Binaan potensial di bidang Industri dan perdagangan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

All programs of Corporate Social Responsibility (CSR) carried out by the Company are its commitment to complying with the principle of responsibility in order to improve the quality of GCG implementation.

The CSR activities and programs of the Company target 4 (four) vital areas, namely Environment, Manpower and Occupational Health and Safety (OHS), Social and Community Empowerment, and Responsibility to Consumers.

In the environmental aspect, the Company manifests its commitments by fulfilling the required environmental management procedures, issuing policies supporting their implementation, and conducting independent evaluations or by involving independent parties for further follow-up.

The form of the Company's responsibility towards Manpower and Occupational Health and Safety (K3) aspect is with the action plan which is the achievement target Saveraty Rate (SR) <250 and Frequentcy Rate (FR) in all business unit activities

In terms of Social and Community Empowerment, the Company, as one of the SOEs engaged in construction services, strongly supports the Partnership and Community Development Program (PKBL). This program is a form of the Company's concern for small businesses in particular and empowers the community and the surrounding environment.

The selection of new Fostered Partners for 2020 was more focused on small businesses that had not received working capital loan facilities from the banking sector because the fostered partners had not been able to present financial reports and their business activities in accordance with the standardization of working capital loan applications. The policy was taken so that the working capital distributed to the fostered partners could boost the business results and accelerate the process of obtaining working capital loan facilities for the fostered partners from the banking sector (bankable). The realization of the Partnership Program was distributed to 9 (nine) potential fostered partners in industry and trade sectors.

Sementara untuk Program Bina Lingkungan selama tahun 2020 dilakukan tidak hanya sebatas berada di wilayah Jabodetabek semata, namun tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya lokasi yang berdekatan dengan proyek-proyek Perseroan.

Meanwhile, the Community Development Program during 2020 was carried out not only in the Greater Jakarta area, but spread throughout Indonesia, especially locations close to the Company's projects.

Pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) PKBL Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 98% dengan skor 5 *point* bagi KPI Perusahaan.

The achievement of the 2020 PKBL Key Performance Indicator (KPI) target until December 31, 2020 reached 98% with a score of 5 points for the Company's KPI.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Direksi PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-217/MBU/07/2018 dan KEP-PS 5/PPA/0718 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-282/MBU/10/2018 dan Nomor: SK-65/PPA/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) *juncto* Keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) N0. SK-67/KOM/09/19 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) tanggal 4 September 2019 *juncto* Keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-56/KOM/08/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) tanggal 5 Agustus 2019 *juncto* Salinan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020; Nomor: Kep-PS 03/PPA/0120, tanggal 22 Januari 2020, tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Nindya Karya tanggal 22 Januari 2020, sebagai berikut:

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The composition of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) based on the Resolutions of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-217/MBU/07/2018 and KEP-PS 5/PPA/0718 dated July 20, 2018 regarding Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero); juncto the Resolutions of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-282/MBU/10/2018 and SK-65/PPA/2018 dated October 31, 2018 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero), juncto the Decision of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-67/KOM/09/19 regarding Appointment of Acting President Director of PT Nindya Karya (Persero) dated September 4, 2019, juncto the Decision of Board of Commissioner of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-56/KOM/08/2019 concerning Appointment of Acting President Director of PT Nindya Karya (Persero) dated August 5, 2019; juncto Copy of Resolutions of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. Kep-PS 03/PPA/0120, dated January 22, 2020, regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) dated January 22, 2020, is as follows:

NAMA *NAME*	**JABATAN** *POSITION*
Haedar A. Karim	Direktur Utama *President Director*
Firmansyah	Direktur Produksi & QHSE *Director of Production and QHSE*
Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran & Pengembangan *Director of Marketing and Development*
Sri Haryanto	Direktur Keuangan & SDM *Director of Finance and Human Capital*

APRESIASI

Beberapa hal yang terjadi sepanjang 2020, semoga menjadi perhatian bersama agar bisa menjadi bekal guna menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang.

Atas hasil yang diperoleh pada tahun 2020, Direksi memberikan penghargaan kepada seluruh Insan Nindya Karya yang berdedikasi dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya di tengah tantangan dan dinamika perekonomian global. Kami juga menyampaikan terima kasih atas arahan, nasihat, dan pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Perseroan sepanjang 2020. Kepada seluruh pemangku kepentingan, mitra bisnis, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, Direksi menyampaikan terima kasih atas kerja sama, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua.

APPRECIATION

In our opinion, it is necessary to view all the challenges occurred in 2020 as the driver for growth and factor that encourages us to be prepared to face changes in the future.

For the achievements recorded by the Company in 2020, we would like to extend our appreciation to all personnel of Nindya Karya who had demonstrated their dedication and maximized their potential amid the challenges and dynamics of global economy. We are also grateful for the advice, direction, and supervision from the Board of Commissioners with respect to the Company's performance over the course of the year. Lastly, we would like to thank all of the Company's stakeholders, business partners, and consumers for their cooperation, trust, and support up to this day.

We pray that God Almighty always grants His blessings and protects us all.

Jakarta, Oktober 2021
Jakarta, October 2021

Atas nama Direksi PT Nindya Karya (Persero)
On behalf of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero)

Haedar A. Karim
Direktur Utama
President Director

LEMBAR PENGESAHAN

RESPONSIBILITY STATEMENT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Nindya Karya (Persero) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information disclosed in the 2020 Annual Report of PT Nindya Karya (Persero) is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

SUGIYARTANTO
Komisaris Utama
President Commissioner

RIKA KISWARDANI
Komisaris
Commissioner

ANDAR PERDANA WIDIASTONO
Komisaris
Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

HAEDAR A.KARIM
Direktur Utama
President Director

MOEHARMEIN ZEIN CHANIAGO
Direktur Pemasaran dan Pengembangan
Marketing and Development Director

FIRMANSYAH
Direktur Produksi dan QHSE
Production and QHSE Director

SRI HARYANTO
Direktur Keuangan dan SDM
Finance and Human Capital Director

15:13
NINDYA

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Gedung Nindya Karya, Jakarta
Nindya Karya Building, Jakarta

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY

NAMA PERUSAHAAN
NAME OF COMPANY

PT NINDYA KARYA (PERSERO)

SEBUTAN
NICKNAME

NINDYA
NINDYA

TANGGAL PENDIRIAN
DATE OF ESTABLISHMENT

11 MARET 1960
MARCH 11, 1960

RUANG LINGKUP USAHA
BUSINESS SCOPE

JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICE

JUMLAH KARYAWAN
NUMBER OF EMPLOYEE

666 ORANG
666 EMPLOYEES

ALAMAT KANTOR PUSAT
ADDRESS OF HEAD OFFICE

JL. LETJEND MT. HARYONO, KAV.22
JAKARTA TIMUR 13630 DKI JAKARTA, INDONESIA

KONTAK
CONTACT

TELEPON	**+62 21 809 3276 (*HUNTING*)**
FAX	**+62 21 809 3105**
EMAIL	**NINDYAKARYA@NINDYAKARYA.**
WEBSITE	**WWW.NINDYAKARYA.CO.ID**

KONTAK PERUSAHAAN
COMPANY CONTACT

SEKRETARIS PERUSAHAAN *CORPORATE SECRETARY*	**ARISTA FEBRI ERIYAWAN**
TELP.	**+62 21 8093276**
FAX.	**+6221 8093105**
EMAIL	**NINDYAKARYA@NINDYAKARYA.**

MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN
SOCIAL MEDIA OF THE COMPANY

NINDYAKARYA

@NINDYAKARYA

@NINDYAKARYA

NINDYA KARYA

JARINGAN USAHA DAN ENTITAS ANAK
BUSINESS NETWORK AND SUBSIDIARIES

5 (lima) wilayah, 2 (dua) Divisi, 1 (satu) Unit Penunjang Produksi

Entitas anak : PT. Nindya Beton

5 (five) areas, 2 (two) Divisions, 1 (one) Production Support

Subsidiary: PT Nindya Beton

KEPEMILIKAN SAHAM
SHARE OWNERSHIP

Negara Repubik Indonesia 1,00%

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 99,00%

Republic of Indonesia 1.00%

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 99.00%

MODAL DASAR
AUTHORIZED CAPITAL

Rp874.615.000.000

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH
ISSUED AND FULLY PAID CAPITAL

Rp559.497.421.000

JUMLAH SAHAM DAN PORTEPEL
TOTAL SHARES IN PORTFOLIO

Jumlah Saham Portepel: 1.788.000 saham

Jumlah Nilai Saham Portepel: Rp315.117.579.000

Total Shares in Portfolio: 1,788,000 shares

Total Values of Shares in Portfolio: Rp315,117,579.000

DASAR PENDIRIAN
BASIS OF ESTABLISHMENT

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pemborongan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi Jo. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 5 tanggal 11 Maret 1960.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Nindya Karya"

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1972, *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 tentang penetapan modal PT Nindya Karya (Persero) tanggal 3 Maret 1973.

Akta Pendirian No. 76 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Moeljadi S.H., Notaris di Jakarta.

Government Regulation No. 2 of 1960 dated March 11, 1960 on Stipulation of Nationalization of Dutch-owned Contractor Companies Jo. Decree of the Minister of Public Works and Labor No. 5 dated March 11, 1960.

Government Regulation No. 59 of 1961 dated March 29, 1961 about Establishment of Perusahaan Negara "Nindya Karya".

Government Regulation No. 11 of 1972 in conjunction with the Decision of Finance Minister of the Republic of Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 on Stipulation of PT Nindya Karya (Persero)'s Capital dated March 3, 1973.

Deed of Establishment No. 76 dated March 15, 1973 drawn up before Kartini Moeljadi S.H., Notary, in Jakarta.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

PT Nindya Karya (Persero) atau juga disebut sebagai "NINDYA", merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang jasa konstruksi, *Engineering Procurement Construction* (EPC) dan Investasi. Rangkaian sejarah Perseroan diawali dengan dinasionalisasikannya perusahaan konstruksi Hindia Belanda N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA yang telah berdiri sejak tahun 1877 pada tahun 1960.

Latar belakang nasionalisasi NEDAM menjadi NINDYA diawali pada periode akhir 1950 setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, muncul keinginan yang kuat dari pemerintah untuk merealisasikan amanat Undang–Undang Dasar 1945 di mana sumber daya negara dikelola dan dikuasain negara untuk kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia. Keinginan tersebut, diimplementasikan dalam bentuk nasionalisasi perusahaan–perusahaan milik Hindia Belanda yang masih tersisa di wilayah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 1958.

Langkah konkret pemerintah dalam menasionalisasi NEDAM menjadi NINDYA dilakukan melalui penerbitan PP No.2 tahun 1960 *juncto* Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 11 Maret 1960 yang menasionalisasi 9 (Sembilan) Perusahaan Pemborongan Hindia Belanda termasuk N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA. Peristiwa ini yang kemudian menjadi dasar penetapan tanggal berdirinya Perseroan.

Tindak lanjut atas nasionalisasi NEDAM menjadi NINDYA dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan No.5 Tahun 1960 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dimana dilakukan perubahan nama N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA menjadi Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya. Penyesuaian nama dan nomenklatur Perseroan kemudian terjadi beberapa kali yaitu pada 29 Maret 1961 melalui penerbitan PP No.59 tahun 1961 dari Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Negara (PN) Nindya Karya serta pada 15 Maret 1973 yang ditetapkan dalam akta No.76 menindaklanjuti diterbitkannya PP No.12 Tahun 1969 mengenai perubahan Perusahaan Negara menjadi Persero, PP No.11 Tahun 1972 dan Keputusan Menteri Keuangan No.91/MK/IV/3/1973 PN Nindya Karya berubah nama menjadi PT Nindya Karya (Persero) yang terus bertahan hingga saat ini.

PT Nindya Karya (Persero), or also known as "NINDYA", is a construction State-Owned Enterprise (SOE) that carries out its main business activities in the fields of construction services, Engineering Procurement Construction (EPC), and Investment. The series of the Company's history begins with the nationalization of the Dutch East Indies construction company N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA which has been established since 1877 in 1960.

The background for the nationalization of NEDAM to become NINDYA began in the late 50's after Indonesia's independence in 1945. At that time, there was a strong desire from the government to realize the mandate of the 1945 Constitution in which state resources were managed and controlled by the state for the benefit of life of the people of Indonesia. This desire was implemented in the form of nationalization of the remaining companies belonging to the Dutch East Indies in Indonesian territory through Government Regulation (PP) No. 23 of 1958.

The government's concrete steps in nationalizing NEDAM into NINDYA were carried out through the issuance of PP No. 2 of 1960 in conjunction with the Decree of the Minister of Public Works and Labor on March 11, 1960 which nationalized 9 (nine) Dutch Indies Contracting Companies including NV Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA. This event later became the basis for determining the date of the establishment of the Company.

The follow-up to the nationalization of NEDAM to become NINDYA was carried out by issuing Decision No. 5 of 1960 by the Minister of Public Works and Energy where the name of N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA became the Nindya Karya State Building Company. Adjustments to the name and nomenclature of the Company then occurred several times, namely on March 29, 1961 through the issuance of PP No. 59 of 1961 from the State Building Company Nindya Karya to the State Company (PN) Nindya Karya and on March 15, 1973 stipulated in deed No.76 following up the issuance PP No. 12 of 1969 concerning the change of a State Company to Persero, PP No. 11 of 1972 and the Decision of Minister of Finance No. 91/MK/IV/3/1973 PN Nindya Karya changed its name to PT Nindya Karya (Persero) which has continued to survive until currently.

Seiring berjalannya waktu, keberadaaan NINDYA sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Konstruksi terus mewarnai kegiatan pembangunan di Indonesia termasuk beberapa langkah strategis yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas bisnis Perseroan.

Bentuk langkah strategis tersebut antara lain pada akhir Desember 2t08, Perseroan melakukan penyertaan saham pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JMKC) sebagai bentuk kegiatan investasi di luar jasa konstruksi pada salah satu pilar bisnis di segmen Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Di tahun 2012, guna memperkuat visi bisnis dan daya saing Perseroan yang mengarah pada perusahaan cerdas berbasis teknologi serta tindak lanjut atas penerbitan PP No.69 Tahun 2012 terkait program restrukturisasi, Perseroan mencanangkan program "*Nindya Reborn*". Dalam program tersebut, Perseroan melakukan beberapa transformasi seperti perubahan logo, visi dan misi, nilai budaya perusahaan, organisasi serta sistem pada kegiatan utama dan pendukung.

Program tersebut nyatanya mampu mendorong pertumbuhan kinerja bisnis Perseroan dengan tetap melakukan pengembangan bisnis yang masih berkaitan dengan *core business*-nya. Keberhasilan program *Nindya Reborn* tercermin dari beberapa peristiwa penting yang berhasil dicatatkan seperti pada tahun 2018 untuk pertama kalinya sejak program restrukturisasi dimulai Perseroan membayarkan deviden kepada pemegang saham. Di tahun yang sama, Perseroan juga meresmikan Hotel di bawah Divisi Properti sebagai bentuk pemanfaatan aset tidak produktif menjadi lebih produktif dalam bentuk *recurring income* bagi Perseroan.

Seiring dengan perkembangan industri dan kesiapan baik Nindya Karya maupun di lingkungan Kementerian BUMN, di tahun 2020 Nindya melakukan beberapa langkah penting diantaranya melakukan perubahan nilai utama Perusahaan menjadi *Core Values* AKHLAK yang bertujuan sebagai identitas dan perekat budaya kerja BUMN yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain melakukan perubahan terhadap nilai utama Perusahaan, Nindya juga melakukan perubahan Visi dan Misi Perusahaan serta *Tagline* Perusahaan sebagai bentuk respon Perusahaan terhadap kondisi perekonomian dan industri serta pengimplementasian *Road Map* Bisnis Nindya 2021-2025.

Over time, the existence of NINDYA as a Construction State-Owned Enterprise (BUMN) continues to bolster development activities in Indonesia, including several strategic steps taken in the context of developing and increasing the Company's business capacity.

Forms of this strategic move included, at the end of December 2008, the Company invested in PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JMKC) as a form of investment activity outside construction services in one of the business pillars in the Toll Road Business Entity (BUJT) segment.

In 2012, in order to strengthen the Company's business vision and competitiveness that lead to smart technology-based companies as well as a follow-up to the issuance of PP No. 69 of 2012 related to the restructuring program, the Company launched the "Nindya Reborn" program. In this program, the Company carried out several transformations such as changes to the logo, vision and mission, corporate culture values, organization and systems in its main and supporting activities.

In fact, this program has been able to drive the growth of the Company's business performance while continuing to develop business related to its core business. The success of the Nindya Reborn program is reflected in several important events that were successfully recorded, such as in 2018 for the first time since the restructuring program began, the Company paid dividends to shareholders. In the same year, the Company also inaugurated a Hotel under the Property Division as a form of more productive utilization of non-productive assets in the form of recurring income for the Company.

In line with the development of the industry and the readiness of both Nindya Karya and the Ministry of SOEs, in 2020 Nindya took a number of momentous steps, including changing the Company's main values into the Core Values of AKHLAK which aims to strengthen the identity and solidity of SOE work culture that supports continuous performance improvement. In addition to making changes to corporate values, Nindya changed its Vision and Mission as well as Tagline as a form of the Company's response to economic and industrial conditions and the implementation of the 2021-2025 Nindya's Business Road Map.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM

Perubahan nama dan status badan hukum Perseroan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

INFORMATION ON NAME CHANGE AND LEGAL ENTITY STATUS

Changes in the name and status of the Company's legal entity are described in the table below:

Sebelum 1960 *Before 1960*	1960	1961	1973 - sekarang *1973 - preent*
Perusahaan Belanda dengan nama **N.V. Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) w/h Fa.H.Boersma** *Dutch company with the name of N.V. Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) w/h Fa.H.Boersma*	Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya	Perusahaan Bangunan Nindya Karya	PT Nindya Karya (Persero)

NAMA *NAME*	TAHUN *YEAR*	DASAR HUKUM *LEGAL BASIS*	STATUS
N.V Nederlands Aannemings Maastchappy (NEDAM) v/h Fa.H. BOERSMA	1877	-	Perusahaan Swasta Hindia Belanda *Private Company of the Netherlands*
Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya	1960	• PP No.2 tahun 1960 ***juncto*** Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 11 Maret 1960 • Surat Keputusan No.5 Tahun 1960 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga • *PP No. 2 of 1960 in conjunction with the Minister of Public Works and Labor Decision dated March 11, 1960* • *Decision No. 5 of 1960 by the Minister of Public Works and Labor*	Perusahaan Negara *State Company*
Perusahaan Negara Nindya Karya	1961	PP No.59 tahun 1961 *PP No. 59 of 1961*	Perusahaan Negara *State Company*
PT Nindya Karya (Persero)	1973	• PP No.11 Tahun 1972 dan Keputusan Menteri Keuangan No.91/MK/IV/3/1973 • Akta No.76 15 Maret 1973 • *PP No. 11 of 1972 and Decision of Minister of Finance No. 91/MK/IV/3/1973* • *Deed No. 76 dated March 15, 1973*	Persero

BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan terakhir yang disahkan melalui Akta No. 39 tanggal 14 September 2012, yang dibuat dihadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan berusaha dalam bidang Pelaksanaan Konstruksi, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Hingga 31 Desember 2020, bidang–bidang usaha yang telah dijalankan Perseroan dan telah disesuaikan segmentasinya pada pengungkapan laporan keuangan Perseroan meliputi:

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, which was validated through the Deed No. 39 dated September 14, 2002, drawn up before Khairina S.H., Notary in Jakarta, the Company is engaged in the construction business pursuant to the provisions under the prevailing laws and regulations, by implementing the principles of Limited Liability Companies.

Up to December 31, 2020, the business fields carried out by the Company have been adjusted for its segmentation in the Company's financial statements disclosure, as follows:

ENERGI/ENERGY

Pemanfaatan Energi terbarukan untuk pembangkit listrik, seperti pembangunan PLTM, PLTH.

Utilization of renewable energy for power plant, such as PLTM and PLTH.

PROPERTY & REALTY/PROPERTY & REALTY

Mengembangkan usaha *property/realty* termasuk di antaranya Perhotelan dan Sentra Bisnis

Development of property/realty business, including hotel business and business centers.

MANUFAKTUR/ MANUFACTURE

Melakukan usaha di bidang:

- Industri (Beton Pracetak *Readymix*)
- Pabrikasi (Beton Pracetak, Bahan & Komponen Bangunan, Komponen & Peralatan Kontruksi)

Carrying out activities in the following fields:

- *Industry (ready-mix precast concrete).*
- *Manufacture (precast concrete, building material and components, construction equipment and components).*

KONTRUKSI (CIVIL & EPC) /CONSTRUCTION (CIVIL & EPC)

- Gedung, Bandara, Jalan raya, Jembatan, rel Kereta Api, Pelabuhan, Irigasi.
- Proyek EPC, Piping, Pabrik, SPBG, mekanikal Elektrikal, Power Plants.
- *Buildings, airports, roads, bridges, railways, seaports, irrigation channels.*
- *EPC projects, piping, plants, SBPG, mechanical-electrical, power plants.*

BADAN USAHA JALAN TOL/ TOLL ROAD BUSINESS

Membangun dan mengoperasikan jalan tol

Developing and operating toll roads.

Hotel Horison - Nindya Semarang, Jawa Tengah
Horison Hotel - Nindya Semarang, Central Java
Silo Semen Padang - Indarung, Sumatra Barat
Cilo Semen Padang - Indarung, West Sumatra
Jembatan Youtefa - Jayapura, Papua
Youtefa Bridge - Jayapura, Papua
Pos Lintas Batas Negara Motamasin, Nusa Tenggara Timur
Motamasin Cross Border Post, Nusa Tenggara Timur

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATION STRUCTURE

Mengacu pada Keputusan Direksi No.2988/DIRUT/KPTS/KDS/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan PT Nindya Karya (Persero), Struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Referring to the Decision of Board of Directors No. 2988/DIRUT/KPTS/KDS/08/2020 dated August 14, 2020 regarding Determination of Organization Structure of PT Nindya Karya (Persero), the Company's organization structure as of December 31, 2020 is as follows:

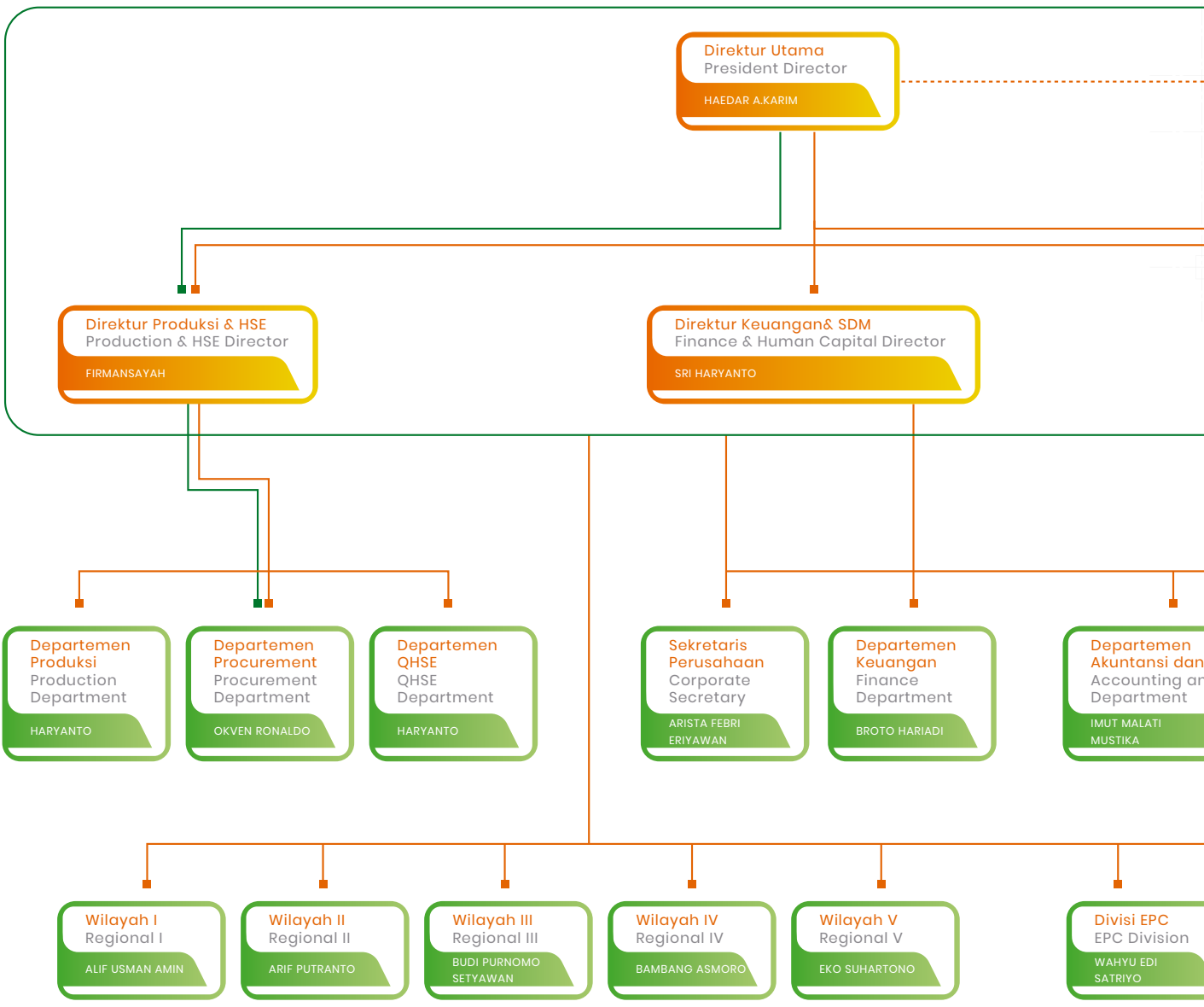

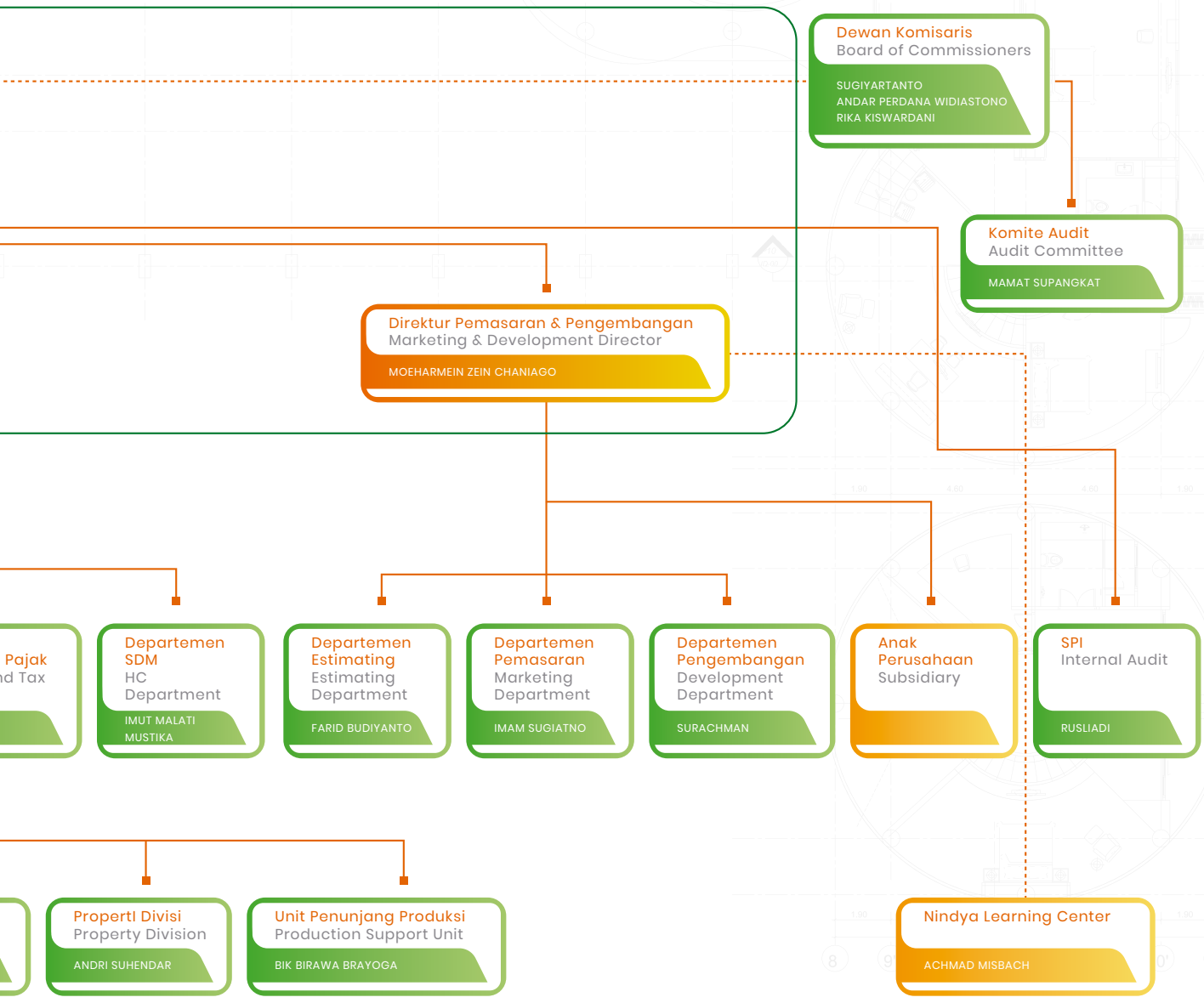
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
SUGIYARTANTO
ANDAR PERDANA WIDIASTONO
RIKA KISWARDANI
Komite Audit
Audit Committee
MAMAT SUPANGKAT
Direktur Pemasaran & Pengembangan
Marketing & Development Director
MOEHARMEIN ZEIN CHANIAGO
Pajak
nd Tax
Departemen
SDM
HC
Department
IMUT MALATI
MUSTIKA
Departemen
Estimating
Estimating
Department
FARID BUDIYANTO
Departemen
Pemasaran
Marketing
Department
IMAM SUGIATNO
Departemen
Pengembangan
Development
Department
SURACHMAN
Anak
Perusahaan
Subsidiary
SPI
Internal Audit
RUSLIADI
Properti Divisi
Property Division
ANDRI SUHENDAR
Unit Penunjang Produksi
Production Support Unit
BIK BIRAWA BRAYOGA
Nindya Learning Center
ACHMAD MISBACH

VISI, MISI, DAN NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUE

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) Nomor: 0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 Tentang Visi, Misi PT Nindya Karya (Persero) tanggal 9 November 2020 Perusahaan menetapkan dan memberlakukan Visi dan Misi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Based on the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 regarding Vision and Mission of PT Nindya Karya (Persero) dated November 9, 2020, the Company has determined its vision and mission as follows:

VISI Vision

"Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan *Investasi* berbasis Engineering yang Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan"

"To be a Global Company in Engineering-Based Construction and Investment, Reliable, Excellent, and Sustainable"

MISI Mission

Meningkatkan nilai tambah bagi (*Stakeholders*) secara berkelanjutan berbasis *Excellence Engineering* dengan inovasi serta *Human Capital* yang unggul dan berakhlak.

Increasing added value for stakeholders in a sustainable manner based on engineering excellence with innovation and superior and moral human capital.

Mengembangkan industri konstruksi dan investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan yang berekelanjutan.

Developing a construction and investment industry with global standards and high competitiveness by prioritizing customer satisfaction, occupational health and safety, and environmental sustainability.

TAGLINE

Toward The Excellent

Visi dan Misi Perusahaan dirumuskan melalui kajian–kajian di *Interna*l Perusahaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan tim perumusan yang berasal dari Tim *Business Continuity Management* (BCM) PT Nindya Karya (Persero).

The Company's vision and mission are formulated through internal reviews of the Company by involving all stakeholders and preparation team from the Business Continuity Management Team of PT Nindya Karya (Persero).

NILAI-NILAI UTAMA BUDAYA PERUSAHAAN

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) Nomor: 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 Tentang Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) PT Nindya Karya (Persero) tanggal 15 September 2020 Perusahaan menetapkan dan memberlakukan *Core Values* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

CORE VALUES AND CORPORATE CULTURE

Based on the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 regarding Corporate Culture of PT Nindya Karya (Persero) dated September 15, 2020, the Company has determined and enforced the Core Values as described below:

AKHLAK

A
AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given

Panduan Perilaku :
- Memenuhi janji dan komitmen
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika

Behavior Guidelines:
- *Keep promises and commitments*
- *Be responsible for tasks, decisions, and actions taken*
- *Stick to moral and ethical values*

K
KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continuously learning and developing capabilities

Panduan Perilaku :
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

Behavior Guidelines:
- *Increase self-competence to respond to ever-changing challenges*
- *Help others learn*
- *Complete tasks of the highest quality*

H
HARMONIS
Saling peduli dan menghargai perbedaan
Care for each other and value differences

Panduan Perilaku :
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Behavior guidelines:
- *Respect everyone regardless of their background*
- *Be willing to help others*
- *Build a conducive work environment*

L
LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Have dedication and prioritize the interests of the nation and the state

Panduan Perilaku :
- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika

Behavior Guidelines:
- *Maintain the good name of fellow employees, leaders, BUMN, and the state*
- *Be willing to sacrifice to achieve a greater goal*
- *Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics*

A
ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change

Panduan Perilaku :
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

Behavior Guidelines:
- *Quickly adjust to be better*
- *Continuously make improvement following technological development*
- *Be proactive*

K
KOLABORATIF
Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic cooperation

Panduan Perilaku :
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Behavior Guidelines:
- *Provide opportunities for various parties to contribute*
- *Be open in working together to generate added value*
- *Mobilize the use of various resources for common goals*

MAKNA LOGO PERUSAHAAN

MEANING OF CORPORATE LOGO

Logo Nindya Karya telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN No. S-454/ MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Logo PT Nindya Karya (Persero), dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000433254 dengan jangka waktu 3 Oktober 2012-3 Oktober 2022 yang dapat diperpanjang kembali.

The logo of Nindya Karya has been validated through the Decision of Ministry of SOE No. S-454/ MBU/2012 dated August 23, 2012 regarding Approval for Logo Change of PT Nindya Karya (Persero) and the Decision of Ministry of Law and Human Rights regarding Brand Certification with Registration Number IDM000433254 for the period of October 3, 2012 to October 3, 2022 which may be extended for another period.

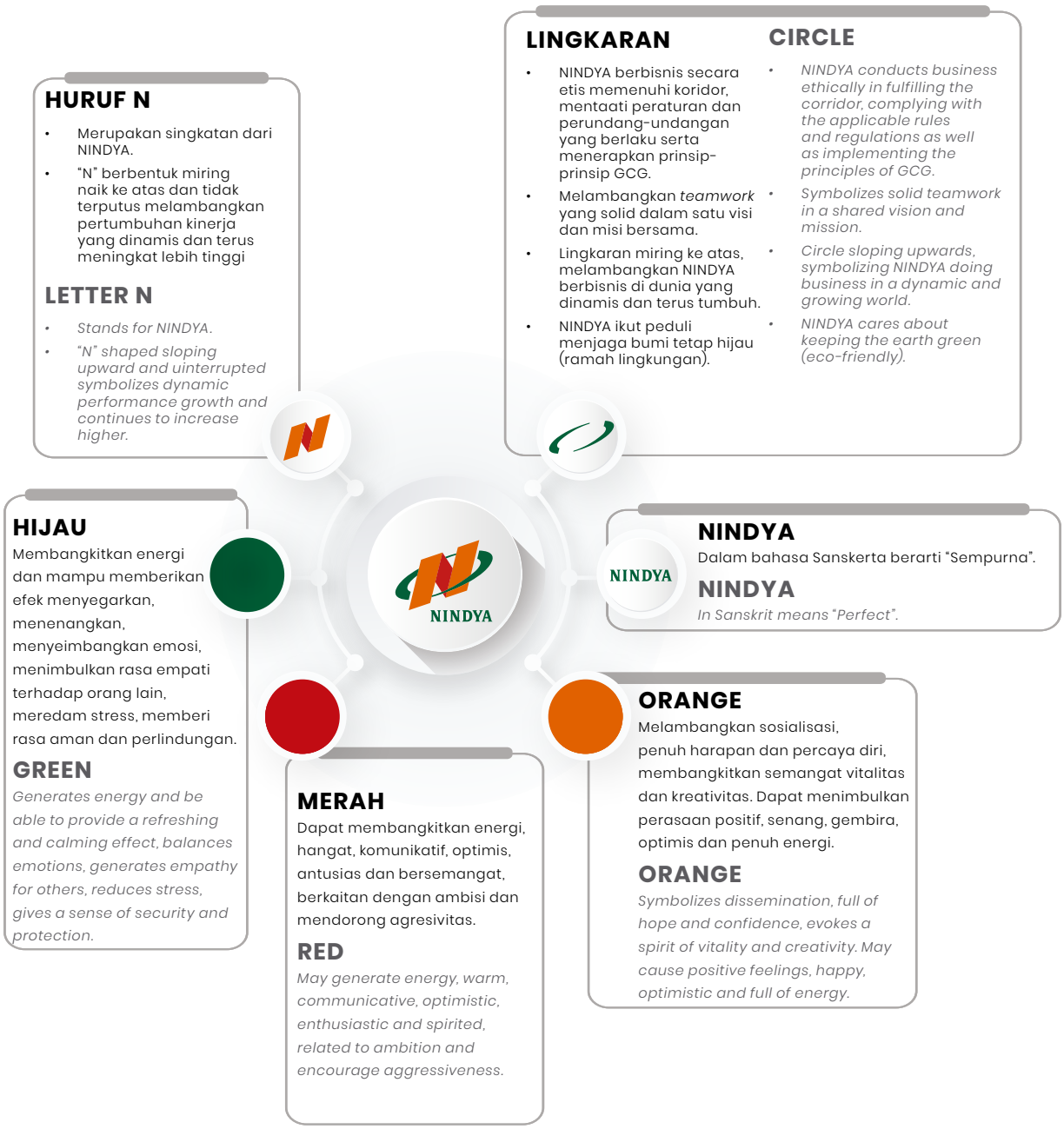

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SUGIYARTANTO

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner

PERIODE JABATAN
Term of Office
6 Januari - 31 Desember 2020
January 6 to December 31, 2020

DATA PRIBADI
Personal Data

Warga Negara *Citizenship*	Indonesia *Indonesian*
Usia *Age*	59 tahun *59 years old*
Kelahiran *Birth Place, Date*	Surakarta, 1961 *Surakarta, 1961*
Domisili *Domicile*	DKI Jakarta *DKI Jakarta*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-205/MBU/09/2019 dan Nomor: KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero).

Appointment History

Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 and No. KEP-PS 06/PPA/0919 dated 13 September 2019 regarding Dismissal and Appointment of President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero).

PENDIDIKAN

Menempuh Pendidikan Formal: S1/D4 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Tahun 1987 dan S2 Master of Sciences Bidang Transportation Universitas Gadjah Mada Tahun 2001.

Education

Bachelor's degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University (1987) and Master of Science degree in Transportation from Gadjah Mada University (2001).

BIDANG KEAHLIAN

Teknik Sipil dan Transportasi

Expertise

Civil Engineering and Transportation

PENGALAMAN KERJA

Pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR.

Career History

He once served as the Head of Banjarmasin National Road Implementation Center XI of the Directorate General of Highways, Ministry of PUPR and Director of Freeway, Urban, and Regional Road Facilitation of the Directorate General of Highways, Ministry of PUPR.

JABATAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN

Tidak Ada

Position as a Commissioner and Director outside the Company

None

RANGKAP JABATAN

Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Concurrent Position

Concurrently, he serves as the Head of Human Resources Development Agency of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR).

HUBUNGAN AFILIASI

Sugiyartanto memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian PUPR Republik Indonesia yang memiliki hubungan berelasi dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Sugiyartanto sebagai Komisaris Utama Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Sugiyartanto tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Affiliation

Sugiyartanto has an affiliation with the Main/Controlling Shareholder through his position at the Ministry of PUPR of the Republic of Indonesia which is related to the Republic of Indonesia as the ultimate owner of the Company. He has passed the fit-and-proper test for his appointment as the Company's President Commissioner. He has no financial and familial affiliations with the other members of Boards of Commissioners or Board of Directors.

KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.

Shareholding in the Company

The Company does not have Share Ownership Program for the management and does not trade its shares to the Public. Hence there is no member of Board of Commissioners holding the Company's shares.

RIKA KISWARDANI

KOMISARIS
Commissioner

PERIODE JABATAN
Term of Office
6 Januari - 31 Desember 2020
January 6 to December 31, 2020

DATA PRIBADI
Personal Data

Warga Negara *Citizenship*	Indonesia *Indonesian*
Usia *Age*	52 tahun *52 years old*
Kelahiran *Birth Place, Date*	Yogyakarta, 9 Desember 1958 *Yogyakarta, December 9, 1958*
Domisili *Domicile*	DKI Jakarta *DKI Jakarta*

RIWAYAT PENUNJUKAN — Appointment History

Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-06/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero).

Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-06/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated 6 January 2020 regarding Dismissal and Appointment of President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero).

PENDIDIKAN — Education

Memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada di Tahun 1993, dan memperoleh gelar S2 tahun 2000, Policy and Administration, Flinders University of South Australia.

Bachelor's degree in State Administration Science from the Faculty of Social and Political Science of Gadjah Mada University (1993) and Master's degree in Policy and Administration from Flinders University of South Australia (2000).

BIDANG KEAHLIAN — Expertise

Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Publik

State Administration and Public Policy

PENGALAMAN KERJA — Career History

Pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2012-2018. Saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, sejak tahun 2018 hingga sekarang.

She once served as the Head of Foreign Technical Cooperation Bureau at the State Secretariat in 2012-2018. Since 2018, she has concurrently served as a Deputy for Palace Administration and Management, Presidential Secretariat, Ministry of State Secretariat.

JABATAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN — Position as a Commissioner and Director outside the Company

Tidak Ada

None

RANGKAP JABATAN — Concurrent Position

Saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

Concurrently, she serves as the Deputy for Palace Administration and Management, Presidential Secretariat, Ministry of State Secretariat.

HUBUNGAN AFILIASI — Affiliation

Rika Kiswardani memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Sekretariat Presiden RI yang memiliki hubungan berelasi dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Rika Kiswardani sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Rika Kiswardani tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Rika Kiswardani has an affiliation with the Main/Controlling Shareholder through her position at the Secretariat of the President of the Republic of Indonesia which is related to the Republic of Indonesia as the ultimate owner of the Company. She has passed the fit-and-proper test for his appointment as the Company's Commissioner. She has no financial and familial affiliations with the other members of Boards of Commissioners or Board of Directors.

KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN — Shareholding in the Company

Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.

The Company does not have Share Ownership Program for the management and does not trade its shares to the Public. Hence there is no member of Board of Commissioners holding the Company's shares.

ANDAR PERDANA WIDIASTONO

KOMISARIS
Commissioner

PERIODE JABATAN
Term of Office
6 Januari - 31 Desember 2020
January 6 to December 31, 2020

DATA PRIBADI
Personal Data

Warga Negara *Citizenship*	Indonesia *Indonesian*
Usia *Age*	62 tahun *62 years old*
Kelahiran *Birth Place, Date*	Banyuwangi, 28 Oktober 1958 *Banyuwangi, October 28, 1958*
Domisili *Domicile*	DKI Jakarta *DKI Jakarta*

RIWAYAT PENUNJUKAN
Appointment History

Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-308/MBU/12/2018 dan Nomor: SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Nindya Karya (Persero).

Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 and No. SK-78/PPA/1218 dated 26 December 2018 regarding Dismissal and Appointment of President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero),

PENDIDIKAN
Education

Sarjana (S1) Hukum (1987) dan Magister (S2) (2003) Hukum keduanya dari Universitas Merdeka Malang.

Bachelor's degree in Law (1987) and Master's degree in Law (2003), both which are from Universitas Merdeka Malang.

BIDANG KEAHLIAN
Expertise

Hukum Pidana Umum, Intelejen dan Ideologi.

General Criminal Law, Intelligence and Ideology.

PENGALAMAN KERJA
Career History

Berkarier di Kejaksaan Republik Indonesia sejak tahun 1985. Terakhir menjabat sebagai Direktur Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen (JAMINTEL) sejak November 2017.

He began his career in the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia in 1985 with the last position as the Director of Ideology, Politics, Defense, and Security Directorate for the Attorney General's Office of Intelligence (JAMINTEL) in November 2017.

JABATAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN
Position as a Commissioner and Director outside the Company

Tidak Ada

None

RANGKAP JABATAN
Concurrent Position

Direktur Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelejen (30 November 2017-sekarang).

Concurrently, he serves as the Director of Ideology, Politics, Defense, and Security Directorate for the Attorney General's Office of Intelligence (JAMINTEL) (November 30, 2017 up to present).

HUBUNGAN AFILIASI
Affiliation

Andar Perdana Widiastono memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki hubungan berelasi dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir Perusahaan. Jabatan Andar Perdana Widiastono sebagai Komisaris Perusahaan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Andar Perdana Widiastono tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Andar Perdana Widiastono has an affiliation with the Main/Controlling Shareholder through his position at the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia which is related to the Republic of Indonesia as the ultimate owner of the Company. He has passed the fit-and-proper test for his appointment as the Company's Commissioner. He has no financial and familial affiliations with the other members of Boards of Commissioners or Board of Directors.

KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN
Shareholding in the Company

Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan.

The Company does not have Share Ownership Program for the management and does not trade its shares to the Public. Hence there is no member of Board of Commissioners holding the Company's shares.

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

HAEDAR A. KARIM

DIREKTUR UTAMA
President Director

PERIODE JABATAN
Term of Office
22 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 22, 2020 to December 31, 2020

DATA PRIBADI
Personal Data

Warga Negara *Citizen*	Indonesia *Indonesian*
Usia *Age*	61 tahun *61 years old*
Kelahiran *Birth Place, Date*	Ujung Pandang, 15 November 1959 *Ujung Pandang, November 15. 1959*
Domisili *Domicile*	Bekasi *Bekasi*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota.

Appointment History

Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).

PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1985) .

Education

Bachelor of Engineering, majoring in Civil Engineering from Universitas Hasanuddin, Makassar (1985).

BIDANG KEAHLIAN

Konstruksi, Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Expertise

Construction, Marketing, and Business Development.

PENGALAMAN KERJA

Berkarier di Nindya Karya. Pernah menjabat sebagai General Manager Teknik dan Pemasaran (2009-2013), Kepala Biro Teknik dan Pemasaran (2008-2009), Kepala Divisi Konstruksi dan Properti selama 6 tahun setelah memegang jabatan sebagai Kepala Proyek dan Manajer Teknik & Pemasaran (1986-2001).

Career History

His career began at Nindya Karya where he once served as the General Manager of Engineering and Marketing (2009-2013), Head of Engineering and Marketing Bureau (2008-2009), Head of Construction and Property Division for 6 years after serving as Project Head and Engineering and Marketing Manager (1986-2001).

JABATAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN

Tidak Ada

Position as a Commissioner and Director outside the Company

None

RANGKAP JABATAN

Tidak Ada

Concurrent Position

None

HUBUNGAN AFILIASI

Haedar A. Karim tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Affiliation

Haedar A. Karim has no financial and familial relationship with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Main/Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

Shareholding in the Company

The Company does not have Share Ownership Program for the management and does not trade its shares to the Public. Hence there is no member of Board of Directors holding the Company's shares.

MOEHARMEIN ZEIN CHANIAGO

DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN
Marketing and Development Director

PERIODE JABATAN
Term of Office
22 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 22, 2020 to December 31, 2020

DATA PRIBADI

Warga Negara
Citizen
Indonesia
Indonesian

Usia
Age
55 tahun
55 years old

Kelahiran
Birth Place, Date
Palembang, 1 Mei 1965
Palembang, May 1, 1965

Domisili
Domicile
DKI Jakarta
DKI Jakarta

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero).

Appointment History

Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).

PENDIDIKAN

Meraih gelar Insinyur pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996) dan *Master of Construction and Engineering Management* dari Griffith University Australia (2004).

Education

Bachelor's degree in Engineering from Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996) and Master's degree in Construction and Engineering Management from Griffith University Australia (2004).

BIDANG KEAHLIAN

Teknik Sipil

Expertise

Civil Engineering

PENGALAMAN KERJA

Memulai karir di PT PP (Persero) diawali sebagai Project Manager (1995-2006), kemudian diangkat sebagai Wakil Kepala Cabang Jakarta, PT PP (Persero), Tbk (2006-2009), kemudian dipercaya sebagai Kepala Cabang Luar Negeri, PT PP (Persero), Tbk (2009-2011). Diangkat sebagai Direktur Utama Anak Perusahaan PT SDP & PT MDP (2011-2012), lanjut menjadi Kepala Cabang II, Sumatera bagian Selatan & Banten PT PP (Persero), Tbk. (2012-2016), kemudian tunjuk sebagai Kepala Divisi Operasi Indonesia Timur PT PP (Persero), Tbk (2016-2017), dan diangkat menjadi *Senior Vice President*, Head of Infrastructure Division PT PP (Persero), Tbk. (2017-2020). Ditetapkan menjadi Direktur Pemasaran & Pengembangan PT Nindya Karya (Persero) (2020 sampai dengan sekarang).

Career History

He began his career at PT PP (Persero) as a Project Manager (1995-2006) before being appointed as the Deputy Head of Jakarta Branch of PT PP (Persero) Tbk (2006-2009). He was then trusted as the Head of Overseas Branch of PT PP (Persero) Tbk (2009-2011). He also served as the President Director of PT SDP and PT MDP (2011-2012), Head of Branch II of South Sumatra and Banten of PT PP (Persero) Tbk. (2012-2016), Head of East Indonesia Operations Division of PT PP (Persero) Tbk (2016-2017), Senior Vice President, Head of Infrastructure Division of PT PP (Persero) Tbk (2017-2020). Since 2020, he has served as the Director of Marketing and Development of PT Nindya Karya (Persero).

JABATAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN

Tidak Ada

Position as a Commissioner and Director outside the Company

None

RANGKAP JABATAN

Tidak Ada

Concurrent Position

None

HUBUNGAN AFILIASI

Moeharmein Zein Chaniago tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/ Pengendali.

Affiliation

Moeharmein Zein Chaniago has no financial and familial relationship with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Main/Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

Shareholding in the Company

The Company does not have Share Ownership Program for the management and does not trade its shares to the Public. Hence there is no member of Board of Directors holding the Company's shares.

FIRMANSYAH

DIREKTUR PRODUKSI DAN HSE
Production and HSE Director

PERIODE JABATAN
Term of Office
22 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 22, 2020 to December 31, 2020

DATA PRIBADI
Personal Data

Warga Negara *Citizen*	Indonesia *Indonesian*
Usia *Age*	52 tahun *52 years old*
Kelahiran *Birth Place, Date*	Yogyakarta, 13 November 1967 *Yogyakarta, November 13, 1967*
Domisili *Domicile*	Bekasi *Bekasi*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero).

Appointment History

Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Amir Hamzah, Medan (2003).

Education

Bachelor of Engineering, majoring in Civil Engineering from Universitas Amir Hamzah, Medan (2003).

BIDANG KEAHLIAN

Konstruksi, Engineering dan QHSE

Expertise

Construction, Engineering, and QHSE

PENGALAMAN KERJA

Berkarier di Nindya Karya sejak tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah dipercaya adalah Manager Manajer Teknik Pemasaran (2011-2012), Manager Manajer Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Term. Multipurpose Teluk Lamong Surabaya (2012-2013), dan General Manager Wilayah V (2013-2018).

Career History

He has been working with Nindya Karya since 2001. Previously, he served as the Manager of Marketing Engineering (2011-2012), Manager of Lamong Bay Multipurpose Terminal Connection Bridge Construction Project, Surabaya (2012-2013), and General Manager of Region V (2013-2018).

JABATAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN

Tidak Ada

Position as a Commissioner and Director outside the Company

None

RANGKAP JABATAN

Tidak Ada

Concurrent Position

None

HUBUNGAN AFILIASI

Firmansyah tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/ Pengendali.

Affiliation

Firmansyah has no financial and familial relationship with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Main/Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

Shareholding in the Company

The Company does not have Share Ownership Program for the management and does not trade its shares to the Public. Hence there is no member of Board of Directors holding the Company's shares.

SRI HARYANTO

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM
Finance and Human Capital Director

PERIODE JABATAN
Term of Office
22 Januari 2020 - 31 Desember 2020
January 22, 2020 to December 31, 2020

DATA PRIBADI
Personal Data

Warga Negara *Citizen*	Indonesia *Indonesian*
Usia *Age*	48 tahun *48 years old*
Kelahiran *Birth Place, Date*	Jakarta, 7 Mei 1971 *Jakarta, May 7, 1971*
Domisili *Domicile*	Bekasi *Bekasi*

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero).

Appointment History

Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).

PENDIDIKAN

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia, Depok (1998), dan Pasca Sarjana (S2) Manajemen Strategi dari Universitas Prasetiya Prasetya Mulya, Jakarta (2015).

Education

Bachelor of Economics, majoring in Financial Management from the University of Indonesia, Depok (1998), and Master's degree in Strategic Management from Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta (2015).

BIDANG KEAHLIAN

Keuangan dan Manajemen Strategi.

Expertise

Finance and Strategic Management

PENGALAMAN KERJA

Berkarier di Nindya Karya sejak 1993. Beberapa jabatan yang pernah dipercaya adalah Kepala Departemen Keuangan (2009-2016), Kepala Satuan Pengawasan *Intern* (2016-2017), dan Kepala Departemen Pengembangan (2017-2018).

Career History

He has been working with Nindya Karya since 1993. Previously, he was trusted to hold the position of Head of Finance Department (2009-2016), Head of Internal Audit Unit (2016-2017), and Head of Development Department (2017-2018).

JABATAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN

Tidak Ada

Position as a Commissioner and Director outside the Company

None

RANGKAP JABATAN

Tidak Ada

Concurrent Position

None

HUBUNGAN AFILIASI

Sri Haryanto tidak memiliki hubungan afiliasi keuangan dan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham Utama/ Pengendali.

Affiliation

Sri Haryanto has no financial and familial relationship with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Main/Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

Shareholding in the Company

The Company does not have Share Ownership Program for the management and does not trade its shares to the Public. Hence there is no member of Board of Directors holding the Company's shares.

PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICIALS

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*
SEKRETARIS PERUSAHAAN, KEPALA SATUAN, DAN KEPALA DEPARTEMEN *CORPORATE SECRETARY, HEAD OF UNITS, AND HEAD OF DEPARTMENTS*	
Rusliadi	Kepala Satuan Pengawasan *Intern* *Head of Internal Audit Unit*
Arista Febri Eriyawan	Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*
Imam Sugiatno	Kepala Departemen Pemasaran *Head of Marketing Department*
Farid Budiyanto	Kepala Departemen *Estimating* *Head of Estimating Department*
Haryanto	Plt. Kepala Departemen Produksi *Act. Head of Production Department*
	Kepala Departemen QHSE *Head of QHSE Department*
Broto Hariadi	Kepala Departemen Keuangan *Head of Finance Department*
Imut Malati Mustika Putri	Kepala Departemen Akuntansi dan Pajak *Head of Accounting and Tax Department*
	Plt. Kepala Departemen SDM *Act. Head of Human Capital Department*
Surachman	Kepala Departemen Pengembangan dan Sistem *Head of Development and System Department*
Okven Ronaldo	Kepala Departemen Procurement *Head of Procurement Department*
GENERAL MANAGER DIVISI, WILAYAH, DAN UNIT BISNIS *GENERAL MANAGER OF DIVISIONS, REGIONS, AND BUSINESS UNITS*	
Alif Usman Amin	General Manager Wilayah I *General Manager of Region I*
Arif Putranto	General Manager Wilayah II *General Manager of Region II*
Budi Purnomo Setiawan	General Manager Wilayah III *General Manager of Region III*
Bambang Asmoro	General Manager Wilayah IV *General Manager of Region IV*
Eko Suhartono	General Manager Wilayah V *General Manager of Region V*
Wahyu Edi Satriya	General Manager Divisi EPC *General Manager of EPC Division*
Andri Suhendar	General Manager Divisi Properti *General Manager of Property Division*
Bik Bhirawa Brayoga	Kepala Unit Penunjang Produksi *Head of Production Support Unit*

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND HIGHLIGHTS OF HUMAN CAPITAL

Hingga 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan berjumlah 666 orang, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah karyawan di akhir tahun 2019 yang sebanyak 979 orang.

As of December 31, 2020, the number of employees of the Company reached 666 employees, a decrease compared to the number of employees at the end of 2019 recorded at 979 employees.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

The Company's employee demographics are summarized below:

KETERANGAN DESCRIPTION	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Karyawan 5 tahun terakhir *Total employees in the last 5 years*	666	979	996	935	841

Di bawah ini disajikan demografi dan komposisi karyawan berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, penempatan, kompetensi, kategori rentang usia, masa kerja, serta jenis kelamin.

The following tables describe the employee demographics and composition based on organization level, education level, employment status, placement, competence, age group, work period, and gender.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI/JABATAN
EMPLOYEE COMPOSITION BY ORGANIZATION LEVEL/POSITION

LEVEL ORGANISASI/JABATAN *ORGANIZATION LEVEL/ POSITION*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
General Manager	16	1	17	3%	20	0	20	2,04
Manager	128	6	134	20%	103	8	111	11,34
Koordinator *Coordinator*	117	22	139	21%	28	12	40	4,09
Staf *Staff*	270	106	376	56%	623	185	808	82,53
JUMLAH ***TOTAL***	**531**	**135**	**666**	**100%**	**774**	**205**	**979**	**100,00**

Sebagian besar karyawan Perusahaan merupakan staf, dengan komposisi mencapai 56% terhadap jumlah keseluruhan karyawan. terjadi penambahan signifikan pada level staf sebagai dampak dari dikonsolidasikannya entitas anak, PT Nindya Beton, ke dalam SDM Perusahaan.

Most of the Company's employees are at staff level, namely 56% against the total number of employees of the Company. There has been a significant increase in the staff level due to the consolidation of subsidiary, PT Nindya Beton, into the Company's Human Capital.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION

TINGKAT PENDIDIKAN *EDUCATION*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
Strata-3 (S3) & Strata-2 (S2) *Doctorate and Master Degrees*	25	4	29	4%	28	2	30	3,06
Strata-1 (S1) & Diploma 4 (D4) *Bachelor and Diploma IV Degrees*	386	101	487	73%	516	152	668	68,23

TINGKAT PENDIDIKAN *EDUCATION*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
Diploma 3, 2, & 1 (D3, D2, D1) *Diploma III, II, and I Degrees*	72	17	89	13%	102	30	132	13,48
SLTA/SLTP *Senior or Junior High Schools*	48	13	61	9%	130	19	149	15,22
JUMLAH *TOTAL*	**531**	**135**	**666**	**100%**	**776**	**203**	**979**	**100,00**

Sebanyak 73% karyawan Perusahaan di tahun 2020 memiliki latar belakang Strata-1 (S1)/Diploma 4 (D4), tidak jauh berbeda dengan komposisi tahun 2019. Dikonsolidasikannya SDM entitas anak, PT Nindya Beton, memberikan dampak pada penambahan karyawan berlatar belakang Strata-1 (S1)/Diploma 4 (D4) dan SLTA/SLTP.

As many as 73% of Company's employees in 2020 have bachelor's degree, relatively the same as the composition of the previous year. The consolidation of Human Capital of PT Nindya Beton has an impact on the addition to the employees with Bachelor's degree and high school education levels.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
EMPLOYEE COMPOSITION BY EMPLOYMENT STATUS

STATUS KEPEGAWAIAN *EMPLOYMENT STATUS*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
Tetap *Permanent*	320	45	365	55%	339	48	387	39,53
Tidak Tetap *Temporary*	211	90	301	45%	435	157	592	60,47
JUMLAH *TOTAL*	**531**	**135**	**666**	**100%**	**774**	**205**	**979**	**100,00**

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan Perseroan terdiri atas karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap adalah karyawan yang bekerja secara tetap untuk jangka waktu tidak tertentu sedangkan karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tertentu sesuai pada kebutuhan pada unit kerja/proyek terkait dimana para pihak menandatangani surat perjanjian kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja untuK Waktu Tertentu (PKWT). Di tahun 2020, jumlah karyawan tetap sebesar 55% dan karyawan tidak tetap sebesar 45%.

Based on employment status, the Company's employees are composed of permanent employees and temporary employees. Permanent employees are employees working permanently for an indefinite period while non-permanent employees are employees working for a specified period of time according to the needs of the relevant work unit/project, where both parties sign a letter of employment agreement in the form of a Work Agreement for a Specified Time (PKWT). In 2020, the number of permanent employees was 55% while the number of non-permanent employees was 45%

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PENEMPATAN
EMPLOYEE COMPOSITION BY PLACEMENT

PENEMPATAN *PLACEMENT*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
Kantor Pusat *Head Office*	111	48	159	24%	123	46	171	17,47
Wilayah I *Region I*	48	6	54	8%	126	26	152	15,53
Wilayah II *Region II*	71	18	89	13%	129	36	165	16,85
Wilayah III *Region III*	49	4	53	8%	66	11	77	7,87

PENEMPATAN *PLACEMENT*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
Wilayah IV *Region IV*	71	8	79	12%	96	17	113	11,54
Wilayah V *Region V*	60	14	74	11%	90	21	111	11,34
Divisi EPC *EPC Division*	59	16	75	11%	61	20	81	8,27
Divisi Properti *Property Division*	14	8	22	3%	17	11	28	2,86
Unit Penunjang Produksi *Production Support Unit*	11	4	15	2%	14	6	20	2,04
Entitas Anak (PT Nindya Beton) *Subsidiary (PT Nindya Beton)*	37	9	46	7%	52	9	61	6,23
JUMLAH *TOTAL*	**531**	**135**	**666**	**100%**	**774**	**197**	**996**	**100,00**

L = laki-laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

*) Di tahun 2020 Perusahaan membagi wilayah menjadi 5 (lima). Wilayah Palembang digabungkan kepada Wilayah medan menjadi Wilayah I, dan Wilayah Surabaya digabungkan ke dalam Wilayah Jakarta menjadi Wilayah II.

*) *In 2020, the Company divided its areas into 5 (five) areas/regions. Palembang was joined with Medan region into Region I while Surabaya was joined with Jakarta region into Region II.*

**) Data SDM Entitas Anak, PT Nindya Beton tidak tercatat sebagai SDM Perusahaan.

**) *The Human Capital data of subsidiary, PT Nindya Beton, is not recorded as the Company's Human Capital*

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN KOMPETENSI

EMPLOYEE COMPOSITION BY COMPETENCE

KOMPETENSI *COMPETENCE*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
Teknik *Technical*	378	56	434	65,16%	539	89	628	63,05%
Non Teknik *Non-Technical*	153	79	232	34,84%	539	116	351	35,25%
JUMLAH *TOTAL*	**531**	**135**	**666**	**100%**	**539**	**205**	**996**	**100%**

Sebanyak 65.16% karyawan Perusahaan di tahun 2020 merupakan karyawan teknik, sedangkan 34.84% lainnya merupakan karyawan Non teknik yang bekerja pada berbagai fungsi pendukung dan/atau manajerial.

As many as 65,16% of the Company's employees in 2020 are technical employees while 34,84% are non-technical employees who work for the Company's supporting and/or managerial functions.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE (PEOPLE)

USIA *AGE*	2020				2019			
	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*	L *M*	P *F*	JUMLAH *TOTAL*	KOMPOSISI (%) *COMPOSITION (%)*
51 tahun > *51 years old and above*	45	4	49	7%	80	2	82	8,38
41 - 50 tahun *41-50 years old*	83	10	93	14%	115	18	133	13,59
31 - 40 tahun *31-40 years old*	185	36	221	33%	246	53	299	30,54
21 -30 tahun *21-30 years old*	218	85	303	45%	333	132	465	47,50
JUMLAH *TOTAL*	**531**	**135**	**666**	**100%**			**979**	**100,00**

Seperti yang terlihat pada grafik di atas, karyawan Perusahaan didominasi oleh mereka yang berusia 21- 30 tahun, sebanyak 45% di tahun 2020 dari jumlah keseluruhan karyawan. Hal ini menunjukkan potensi Perusahaan untuk dapat tumbuh secara dinamis, yang ditopang oleh SDM dengan usia yang produktif.

As described above, the Company's employees were dominated by the age group of 21-30 years old in 2020, reaching 45% of the total employees. This shows the Company's potential to grow dynamically supported by Human Capital at a productive age.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN
EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

GENDER/JENIS KELAMIN *GENDER*	2020		2019	
	JUMLAH *TOTAL*	PERSENTASE (%) *PERCENTAGE (%)*	JUMLAH *TOTAL*	PERSENTASE (%) *PERCENTAGE (%)*
Laki-laki *Male*	531	80%	774	79,06
Perempuan *Female*	135	20%	205	20,94
JUMLAH *TOTAL*	**666**	**100%**	**979**	**100,00**

SEKILAS TENTANG PENGELOLAAN SDM DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perseroan memiliki kebijakan pengembangan SDM yang ditetapkan manajemen, di mana kebijakan ini selaras dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan.

BRIEF INFORMATION ON HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company has a Human Capital development policy set by the management which has been in line with the Company's business development plan.

ASPEK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM YANG SELARAS DENGAN ARAH ORGANISASI NINDYA KARYA
ASPECT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE DIRECTION OF NINDYA KARYA'S ORGANIZATION

Promosi dan Mutasi
Promotion and Transfer

Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training

Pengembangan Organisasi
Organization Development

Rekrutmen
Recruitment

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN DAN KESETARAAN GENDER TAHUN 2020
COMPETENCE DEVELOPMENT BY POSITION LEVEL AND GENDER EQUALITY IN 2020

LEVEL JABATAN *POSITION LEVEL*	JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *TYPE OF EDUCATION AND TRAINING*	TUJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *OBJECTIVE OF EDUCATION AND TRAINING*	JUMLAH PESERTA TAHUN 2020 *TOTAL PARTICIPANTS IN 2020*	
			JUMLAH *TOTAL*	PERSENTASE(%) *PERCENTAGE(%)*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Commmissioner & Directorship	Expand Leadership Program	3	0,09%
Direksi *Board of Directors*	Softskills Company	Softskills "Final Sprint 2020-Reach the Impossible and Finish Strong"	5	0,14%
BOD-1	Pengembangan Bisnis Company *Company's Business Development*	1. NOBEL - Pengembangan Bisnis Konstruksi di Luar Negeri 2. NOBEL - Peranan Pasar Modal untuk Pendanaan *1. NOBEL - Development of Construction Business Abroad* *2. NOBEL - Role of Capital Market for Funding*	134	3,83%

LEVEL JABATAN *POSITION LEVEL*	JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *TYPE OF EDUCATION AND TRAINING*	TUJUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *OBJECTIVE OF EDUCATION AND TRAINING*	JUMLAH PESERTA TAHUN 2020 *TOTAL PARTICIPANTS IN 2020*	
			JUMLAH *TOTAL*	PERSENTASE(%) *PERCENTAGE(%)*
BOD-2	General Training & Technical Training Tk. Advance	1. Sharing Session Proses Bisnis dan Investasi 2. Problem Solving & Decision Making 3. Sosialisasi New Core Value & Perubahan Tagline Nindya Karya 4. Konstruksi RCC untuk Bendungan Indonesia (KNIBB) *1. Sharing Session on Business Process and Investment* *2. Problem Solving and Decision Making* *3. Socialization of New Core Value and Change of Nindya Karya's Tagline* *4. RCC Construction for Dams in Indonesia (KNIBB)*	426	12,17%
Staf *staff*	General Training & Technical Training	1. Digital Marketing & Unlock Success 2. New Normal di Extra Ordinary 3. Pengelolaan Proyek Waktu Pendek 4. Online Training BPJS Kesehatan 5. Leadership in Crisis Era 6. NOBEL - Saatnya Muda Memimpin 7. NOBEL PRODUKSI - Tidak Ada Hasil Yang Menghianati Prosesnya 8. Pelatihan Project Manajemen Karyawan OJT *1. Digital Marketing and Unlocking Success* *2. New Normal in the Extraordinary* *3. Short-Term Project Management* *4. Online Training of BPJS Healthcare* *5. Leadership in Crisis Era* *6. NOBEL - Time for Youths to Lead* *7. NOBEL PRODUKSI - Hard Work Pays Off* *8. Project Management Training for OJT Employees*	2932	83,77%
JUMLAH *TOTAL*			**3500**	**100%**

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

FEE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT

	REALISASI 2020 (RP JUTA) *2020 REALIZATION (RP MILLION)*	TARGET/RKAP 2020 (RP JUTA) *2020 TARGET/RKAP (RP MILLION)*	REALISASI 2020 TERHADAP TARGET RKAP (% PERSEN) *2020 REALIZATION TO TARGET RKAP (% PERCENT)*	REALISASI 2019 (RP JUTA) *2019 REALIZATION (RP MILLION)*	REALISASI 2020 TERHADAP REALISASI 2019 (% PERSEN) *2020 REALIZATION TO 2019 REALIZATION (% PERCENT)*
	(1)	(2)	(1:2)	(3)	(1:3)
Pendidikan dan Pelatihan *Education and Training*	1117	3877	29%	2056	54%

Lebih lanjut tentang deskripsi lengkap dan data pengelolaan SDM dan pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini."

Detailed explanations and management data of Human Capital of the Company as well as employee competency development are available in the chapter of Business Support Function of this annual report.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM NINDYA KARYA

Informasi tentang Modal Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP OF NINDYA KARYA

Information on Share Capital and Share Ownership of the Company is described below:

MODAL SAHAM
SHARE CAPITAL

PERIHAL *DESCRIPTION*	JUMLAH (RP) *TOTAL (RP)*
Modal Dasar *Authorized Capital*	874.615.000.000
Modal Saham Dalam Portepel *Share Capital in Portfolio*	(315.117.579.000)
JUMLAH MODAL SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH *TOTAL SHARE CAPITAL ISSUED AND FULLY PAID*	**559.497.421.000**

KEPEMILIKAN SAHAM NINDYA KARYA PER 31 DESEMBER 2020
SHARE OWNERSHIP OF NINDYA KARYA AS OF DECEMBER 31, 2020

PEMEGANG SAHAM *SHAREHOLDER*	JUMLAH SAHAM (LEMBAR) *TOTAL SHARES (SHARES)*	NILAI SAHAM PER LEMBAR (RP/LEMBAR) *VALUE PER SHARE (RP/SHARE)*	MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH *ISSUED AND FULLY PAID CAPITAL*	PERSENTASE KEPEMILIKAN *OWNERSHIP PERCENTAGE*
SERI A DWI WARNA *DWI WARNA SERIES A*				
Negara Republik Indonesia *Republic of Indonesia*	59.500	1.000.000	59.500.000.000	1.00%
SERI B BIASA *ORDINARY SERIES B*				
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	5.890.500	84.882	499.997.421.000	99,00%
JUMLAH *TOTAL*	**5.950.000**		**559.497.421.000**	**100,00%**

Hingga akhir tahun 2020, Nindya Karya tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh publik, dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun.

Up to the end of 2020, Nindya Karya has neither issued any shares to the public nor traded its shares on any stock exchanges.

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN KUNCI

Hingga 31 Desember 2020, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak tercatat memiliki saham Perseroan.

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP OF THE KEY MANAGEMENT

As of December 31, 2020, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has not owned any shares of the Company.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*	2020	2019
DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*		
Sugiyartanto (Komisaris Utama) *Sugiyartanto (President Commissioner)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*	2020	2019
Andar Perdana Widiastono (Komisaris) *Andar Perdana Widiastono (Commissioner)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Rika Kiswardani (Komisaris) *Rika Kiswardani (Commissioner)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Zahirwan Marza (Komisaris Independen) *Zahirwan Marza (Independent Commissioner)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*		
Haedar A. Karim (Direktur Utama) *Haedar A. Karim (President Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Moeharmein Zein Chaniago (Direktur Pemasaran dan Pengembangan) *Moeharmein Zein Chaniago (Marketing and Development Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Firmansyah (Direktur Produksi dan QHSE) *Firmansyah (Production and QHSE Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Sri Haryanto (Direktur Keuangan dan SDM) *Sri Haryanto (Finance and Human Capital Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

Hingga akhir tahun 2020 Perseroan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham baik oleh manajemen (MSOP) maupun karyawan (ESOP).

Up to the end of 2020, the Company has not established Stock Ownership Program, both for the management (MSOP) and employees (ESOP).

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

Nindya Karya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1,00% (Seri A Dwi Warna) dan 99,00% Saham Seri B Biasa oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Pemilik Akhir Nindya Karya.

INFORMATION ON MAIN/ CONTROLLING SHAREHOLDER UP TO THE ULTIMATE OWNER

Nindya Karya is owned by the Republic of Indonesia with share ownership of 1.00% (Series A Dwi Warna) and the Company's 99.00% Ordinary Series B Shares are owned by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA is fully owned by the Republic of Indonesia. Thus, the State of the Republic of Indonesia is the major/controlling shareholder as well as the ultimate owner of Nindya Karya.

SEKILAS TENTANG PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ("PPA") didirikan pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 sebagai sebuah perusahaan yang mengemban tugas utama untuk mengelola aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"), baik aset kredit, saham maupun properti. Melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah Indonesia memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas baru menjadi sebagai berikut: pengelolaan aset eks BPPN; restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN; kegiatan investasi; serta kegiatan pengelolaan aset BUMN.

PPA resmi menjadi Pemegang Saham Perseroan sejak 14 September 2012 berdasarkan Akta No. 39 tanggal 14 September 2012 yang dibuat di hadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta.

OVERVIEW OF PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) was established on February 27, 2004 by virtue of Government Regulation No. 10 of 2004 as a company assuming the main duty of managing the assets of the former Indonesian Banking Restructuring Agency (IBRA), both assets of credit, shares, and property. Through Government Regulation of No. 61 of 2008 dated September 4, 2008, the Indonesian government expanded the purpose and objective of PPA by adding new scope of duties to become: management of ex-IBRA asset; SOEs restructuring and/or revitalization; investment activities; and SOEs asset management activities.

PPA has officially became the Company's shareholder since September 14, 2012 based on the Deed No. 39 dated September 14, 2012 drawn up before Khairina S.H., Notary in Jakarta.

DAFTAR ENTITAS ANAK, INVESTASI/PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA, SERTA INFORMASI TENTANG ENTITAS ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARIES, INVESTMENT/EQUITY PARTICIPATION AND JOINT VENTURES, AS WELL AS INFORMATION ON ASSOCIATES

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARY

PT NINDYA BETON

NAMA PERUSAHAAN *NAME OF COMPANY*	
BIDANG USAHA *LINE OF BUSINESS*	Industri beton pracetak, industri *readymix*, dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dan dengan pabrikasi *Precast concrete industry, ready-mix concrete industry, and other businesses related to plants*
DOMISILI *DOMICILE*	Jakarta Timur (DKI Jakarta) *East Jakarta (DKI Jakarta)*
TAHUN BERDIRI *YEAR OF ESTABLISHMENT*	2013
TAHUN BEROPERASI KOMERSIAL *YEAR OF COMMERCIAL OPERATIONS*	2013
TAHUN PENYERTAAN MODAL *YEAR OF INVESTMENT*	2013

KEPEMILIKAN OLEH NINDYA KARYA *OWNERSHIP BY NINDYA KARYA*	**2020**	**2019**
	51,00%	51,00%

JUMLAH ASET *TOTAL ASSETS*	**2020**	**2019**
	140,486	111,794

STATUS OPERASI *OPERATING STATUS*	Beroperasi *Operating*

PT NINDYA BETON

PT Nindya Beton ("PT NB") didirikan sebagai bagian dari kebutuhan Nindya Karya untuk memberikan layanan terintegrasi bagi konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen-komponen pendukung, khususnya terkait kebutuhan perkembangan teknologi di sektor konstruksi, efisiensi waktu serta peningkatan kualitas. Pendirian PTNB berdasarkan Akta No. 33 tanggal 19 Februari 2013 dibuat di hadapan Khairina, S.H,, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-10206.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.

Kegiatan Utama PTNB meliputi:

- Industri, yaitu beton pracetak, *readymix*, dan usaha- usaha lainnya yang berkaitan.
- Pabrikasi, yaitu beton pracetak, pabrikasi bahan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik.
- Usaha lainnya yang berkaitan.

PT NINDYA BETON

PT Nindya Beton is established as part of Nindya Karya's need to provide integrated services for consumers in order to meet their needs for supporting components, especially related to the technological developments in the construction sector, time efficiency, and quality improvement. The establishment of PT Nindya Beton was based on the Deed No. 33 dated February 19, 2013 drawn up before Khairina, S.H., Notary in Jakarta, which had been validated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-10206.AH.01.01 year 2013 dated March 4, 2013.

PT Nindya Beton primarily engages in the following businesses:

- Industry, namely precast concrete, ready-mix, and other related businesses.
- Manufacturing, namely precast concrete, manufacturing of building component materials, manufacturing of components and construction equipment, manufacturing of metal, wood, rubber, and plastic goods.
- Other related businesses.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM NINDYA BETON PER 31 DESEMBER 2020

COMPOSITION OF SHAREHOLDER OF NINDYA BETON AS OF DECEMBER 31, 2020

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM NINDYA BETON PER 31 DESEMBER 2020 *COMPOSITION OF SHAREHOLDER OF NINDYA BETON AS OF DECEMBER 31, 2020*	PERSENTASE JUMLAH SAHAM *PERCENTAGE OF TOTAL SHARES*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	49,00%
PT Nindya Karya (Persero)	51,00%

VISI DAN MISI NINDYA BETON

Visi:

"Menjadikan PT Nindya Beton sebagai Perusahaan Industri Beton Pracetak dan *Readymix* serta Jasa Konstruksi terpercaya di Indonesia".

Misi:

- Menjadi Perusahaan Terpercaya bagi Pelanggan
- Tumbuh dan Berkembang serta Memberi Nilai Tambah yang Tinggi bagi *Shareholder*
- Menghasilkan Produk yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
- Ikut Memelihara Lingkungan dan Pelestarian.

Implementasi Visi dan Misi:

- Sistem Manajemen Mutu secara Konsisten untuk meningkatkan Kepuasan Pelanggan

VISION AND MISSION OF NINDYA BETON

Vision:

"To make PT Nindya Beton a trusted company in Precast and Ready-Mix Concrete industry as well as in Construction Service in Indonesia."

Mission:

- Become a trusted company for customers
- Grow and develop while providing high added value for shareholders
- Generate high quality and competitive products
- Participate in protecting the environment and nature conservation

Implementation of Vision and Mission:

- Consistent quality management system to improve customer satisfaction

- Sistem Manajemen Operasi yang efisien, efektif dan andal
- Sistem Manajemen Risiko dalam pencapaian hasil usaha
- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk mencegah dan menurunkan tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- Sistem Manajemen Lingkungan, untuk mengupayakan perlindungan lingkungan dengan mencegah dan menurunkan tingkat dampak pencemaran lingkungan hidup dari akibat adanya kegiatan usaha/produksi Perseroan
- Sistem Manajemen Perlindungan Informasi, untuk menjaga kerahasiaan dan menyediakan informasi yang andal
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan berdasarkan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketaatan dalam memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait.

- Efficient, effective and reliable operations management system
- Risk management system in achieving business results
- Occupational Health and Safety Management System (OHS Management System) to prevent and reduce the rate of accidents and occupational diseases
- Environmental management system, to seek environmental protection by preventing and reducing the level of environmental pollution impacts resulting from the Company's business/production activities
- Information protection management system, to maintain confidentiality and provide reliable information
- Corporate Governance Guidelines based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) and compliance with the laws and regulations and other related requirements.

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA KINI

CERTIFICATION VALID UP TO PRESENT

NAMA SERTIFIKASI *CERTIFICATE TITLE*	PIHAK YANG MELAKUKAN SERTIFIKASI *CERTIFIED BY*
SNI ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety. Berlaku 16 April 2021 - 15 April 2024. *SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety. Valid from April 16, 2021 to April 15, 2024*	Sucofindo
SNI ISO 14001:2015 Environmental Management Systems, berlaku 16 April 2021 - 15 April 2024 *SNI ISO 14001:2015 Environmental Management Systems. Valid from April 16, 2021 to April 15, 2024*	Sucofindo
SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems, berlaku 16 April 2021 - 15 April 2024 *SNI ISO 9001:2015 Quality Management System. Valid from April 16, 2021 to April 15, 2024*	Sucofindo
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) *Occupational Health and Safety Management System (OHS Management System)*	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia *Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia*

PABRIKASI

PLANTS

UNIT PRODUKSI *PRODUCTION UNIT*	ALAMAT *ADDRESS*	NOMOR KONTAK *CONTACT NUMBER*	PRODUK *PRODUCT*
Plant Salatiga	Jl. Raya Salatiga, Km.6 Kecamatan Tengaran, Semarang	Telepon/Phone : 0813 2773 1939 E-mail: nidnyabeton_slg@yahoo.com	*Readymix & Precast*
Plant Indramayu	Jl. Raya Losarang, Desa Kiajaran Wetan, Kecamatan Lohbener-Indramayu	Telepon/Phone: 0811 1397 9812 E-mail: nindyabeton_idm@gmail.com	*Readymix & Precast*
Plant Kupang	Jl. Timor Raya Km.19 Kecamatan Kupang Tengah, NTT	Telepon/Phone: 0823 3720 8799 E-mail: nindyabeton.kpg@gmail.com	*Precast*

UNIT PRODUKSI *PRODUCTION UNIT*	ALAMAT *ADDRESS*	NOMOR KONTAK *CONTACT NUMBER*	PRODUK *PRODUCT*
Plant Kendari	Jl. Maleo, Desa Petoaha, Kecamatan Abeli - Kendari	Telepon/Phone : 0852 4175 9330	*Readymix & Precast*
Plant Palembang	Jl. Lettu Karim Kadir (eks-Pasar Gandus), Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang	Telepon/Phone : 0812 7174 8433	*Readymix & Precast*
Plant Cikarang	Jl. Industri Kp. Buni Asih, RT. 02 RW. 06, ds. Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi	E-mail: nindyabeton.ckr@gmail.com	*Readymix*

IKHTISAR KEUANGAN NINDYA BETON (RP-JUTA)

FINANCIAL HIGHLIGHTS OF NINDYA BETON (RP MILLION)

KETERANGAN *DESCRIPTION*	2020	2019
Pendapatan Usaha *Revenues*	155.796	223.895
Beban Pokok Pendapatan *Cost of Revenues*	154.472	223.557
Laba Usaha *Operating Profit*	(11.138)	(11.597)
Laba/Rugi Bersih *Net Profit/Loss*	(16.477)	(16.145)
Aset *Assets*	194.717	185.795
Liabilitas *Liabilities*	172.373	131.094
Ekuitas *Equity*	22.344	54.701

MANAJEMEN KUNCI NINDYA BETON

KEY MANAGEMENT OF NINDYA BETON

DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*	Komisaris Utama *President Commissioner*	Bambang Sutrisno
	Komisaris *Commissioner*	Qadrisna
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*	Direktur Utama *President Director*	I Nengah Agus Suhada
	Direktur Keuangan *Finance Director*	Budi Djatmiko

PT JASA MARGA KUNCIRAN CENGKARENG

NAMA PERUSAHAAN *NAME OF COMPANY*	
BIDANG USAHA *LINE OF BUSINESS*	Pengusahaan, konstruksi dan pengelolaan ruas tol Cengkareng- -Batu Ceper – -Kunciran *Operation, construction, and management of Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran toll road*
DOMISILI *DOMICILE*	Tangerang, Banten
TAHUN BERDIRI *YEAR OF ESTABLISHMENT*	2008
TAHUN PENYERTAAN MODAL *YEAR OF INVESTMENT*	2008
KEPEMILIKAN OLEH NINDYA KARYA *OWNERSHIP BY NINDYA KARYA*	**2020** 0,28% / **2019** 0,28%
STATUS OPERASI *OPERATING STATUS*	Belum Beroperasi *Standby*

PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng ("JKC") merupakan anak usaha patungan yang didirikan pada tahun 2008 dan bergerak di bidang pengusahaan jalan tol, konstruksi dan pemeliharaannya. JKC diberikan hak konsesi untuk membangun dan mengelola ruas tol Kunciran-Cengkareng selama 35 tahun berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian antara JKC dengan Badan Pengatur Jalan tol (BPJT).

Hingga akhir tahun 2020 Nindya Karya memiliki 0,28% saham JKC dengan total penyertaan sebesar Rp3,822,800,800.

PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) is a joint venture subsidiary established in 2008, and is engaged in toll road operation, construction, and maintenance. JKC has been granted a concession right to develop and manage the Kunciran-Cengkareng toll road for 35 years, effective from the signing of the agreement between JKC and the Toll Road Regulatory Agency (BPJT).

Until the end of 2020, Nindya Karya owns 0,28% of JKC's shares with a total investment of Rp3822.800.800.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG PER 31 DESEMBER 2020

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS OF PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG AS OF DECEMBER 31, 2020

ASPEK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM YANG SELARAS DENGAN ARAH ORGANISASI NINDYA KARYA
ASPECT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE DIRECTION OF NINDYA KARYA'S ORGANIZATION

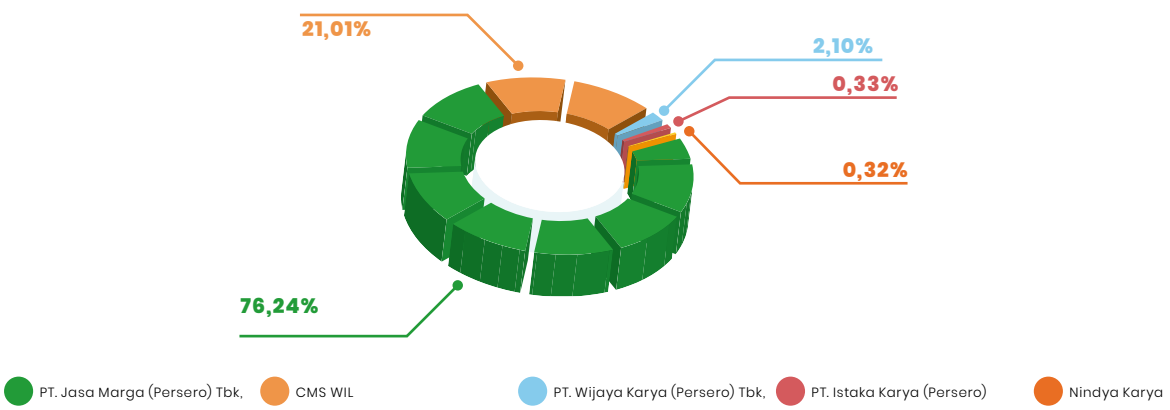

VENTURA BERSAMA

Perseroan memiliki sejumlah Ventura Bersama pengembangan proyek dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Per 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki 22 KSO, baik kerja sama sinergi dengan BUMN lainnya maupun kerja sama dengan swasta.

JOINT VENTURE

The Company has a number of Joint Ventures for project development in the form of Joint Operations (JO). As of December 31, 2020, the Company has 22 KSOs, both in synergy with other SOEs and in collaboration with the private sector.

INFORMASI TENTANG ENTITAS ASOSIASI

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki entitas asosiasi.

INFORMATION ON ASSOCIATED ENTITIES

Until the end of 2020, the Company does not have any associated entities.

STRUKTUR GRUP NINDYA KARYA

NINDYA KARYA'S GROUP STRUCTURE

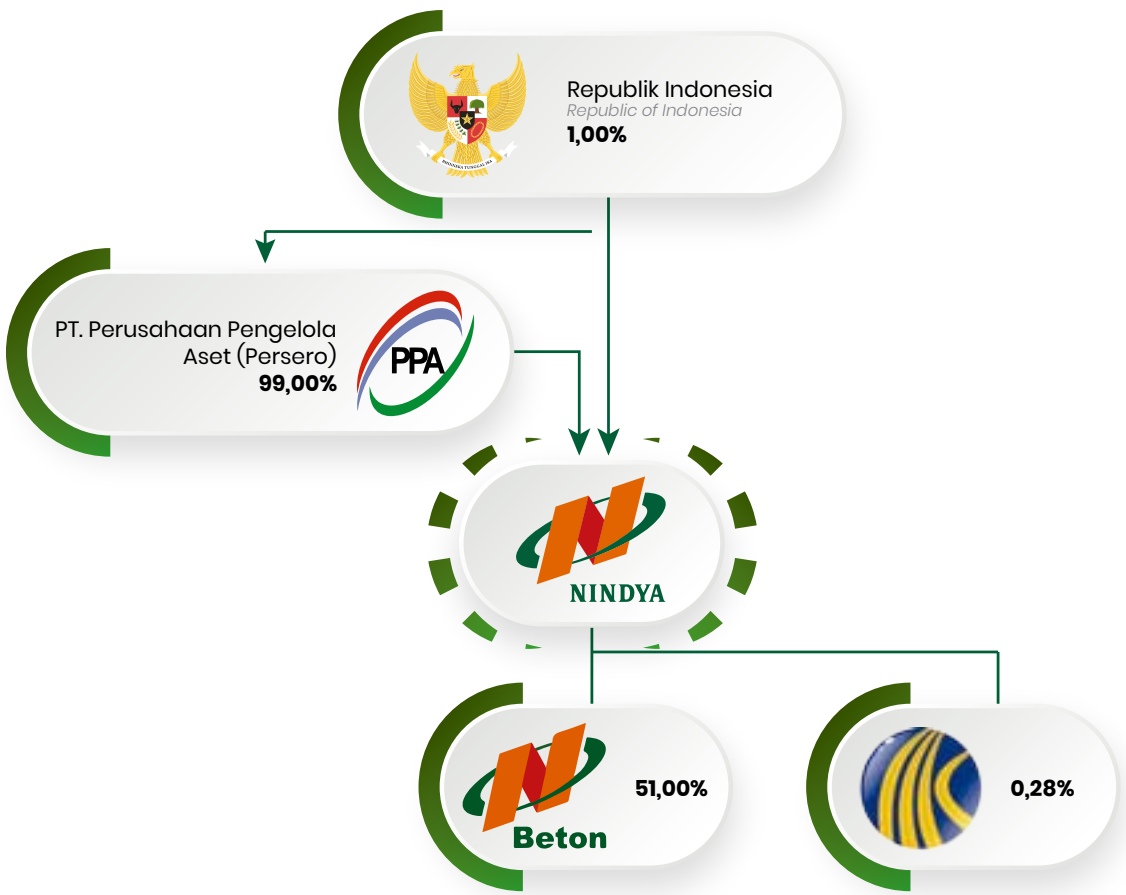

	Pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas akhir *Major controlling shareholder and ultimate owner*
	Entitas anak *Subsidiary*
	Investasi/penyertaan saham *Investment/equity participation*

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

INFORMATION ON CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait aksi korporasi yang berhubungan dengan perubahan Kepemilikan Saham dan Pencatatan Saham di Bursa Efek manapun.

Up to the end of 2020, the Company does not issue shares to be owned by the public. Thus, there is no information regarding corporate actions relating to changes in share ownership and share listing on any stock exchange.

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

INFORMATION ON CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan tidak menerbitkan Efek dalam bentuk apapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

As of December 31, 2020, the Company does not issue Securities in any form. Thus, there is no information about other securities names, year of issuance, interest rates/benefits, maturity dates, offering values, names of stock exchange where other securities are listed and rated.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG TAHUN 2020
LIST OF SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS IN 2020

NAMA DAN ALAMAT *NAME AND ADDRESS*	JENIS & BENTUK JASA *TYPE AND FORM OF SERVICE*	PERIODE PENUGASAN *ASSIGNMENT PERIOD*
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan *Public Accountant*	Plaza ASIA, Level 10 Jl.Sudirman Kav. 59 Jakarta	Tahun buku 2020 *2020 Fiscal Year*
Pemeringkat PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) *Rating Agency*	Equity Tower Lt. 30. Sudirman Central Business District, Lot.9	Tahun buku 2020 *2020 Fiscal Year*
Notaris Khairina S.H *Notary*	Jakarta	Tahun buku 2020 *2020 Fiscal Year*
Konsultan Hukum Toni Hendarto S.H., M.H., M.M & Rekan *Legal Consultant*	Jakarta	Tahun buku 2020 *2020 Fiscal Year*

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR 2015-2020
LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS IN THE LAST 6 (SIX) YEARS 2015-2020

TAHUN *YEAR*	AKUNTAN *ACCOUNTANT*	KANTOR AKUNTAN PUBLIK *PUBLIC ACCOUNTING FIRM*	RUANG LINGKUP JASA *SCOPE OF SERVICE*	OPINI *OPINION*
2020 2019 2018	Benny Andria	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)	Peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian *Intern*al berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. *Certain laws and regulations and internal control based on the State's Financial Auditing Standards issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia and Statement of Auditing Standards No. 62 (Section 801) determined by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants*	Wajar dalam semua hal yang material *Fair in all material respects*
2017 2016 2015	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf (RSM)	Peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian *Intern*al berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. *Certain laws and regulations and internal control based on the State's Financial Auditing Standards issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia and Statement of Auditing Standards No. 62 (Section 801) determined by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants*	Wajar dalam semua hal yang material *Fair in all material respects*

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN DI TAHUN 2020
2020 AWARDS

NO	TANGGAL *DATE*	PENGHARGAAN *TITLE OF AWARD*	DIBERIKAN OLEH *CONFERRED BY*
1	9 Juli 2020 *July 9, 2020*	Terbaik III Kategori Transformasi Organisasi, BUMN Award 2020 *Best III in the Category of Organization Transformation, BUMN Award 2020*	BUMN Track
2	5 November 2020 *November 5, 2021*	BUMN Marketing & Branding Award 2020 Kategori Brand Strategy *BUMN Marketing & Branding Award 2020 in the Category of Brand Strategy*	BUMN Track
3	5 November 2020 *November 5, 2021*	BUMN Marketing & Branding Award 2020 Kategori Best CMO Marketing Teamwork *BUMN Marketing & Branding Award 2020 in the Category of Best CMO Marketing Teamwork*	BUMN Track
4	10 Desember 2020 *December 10, 2021*	Gold Award, BUMN CSR Award ke-III Provinsi Bali tahun 2020 *Gold Award, 3rd BUMN CSR Award 2020 in Bali Province*	Pemerintah Provinsi Bali *Bali Provincial Government*
5	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Kantor Pusat *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Head Office*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
6	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Wilayah I *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Region I*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
7	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Wilayah II *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Region II*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
8	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Wilayah IV *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Region IV*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
9	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Wilayah V *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Region V*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*

NO	TANGGAL *DATE*	PENGHARGAAN *TITLE OF AWARD*	DIBERIKAN OLEH *CONFERRED BY*
10	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Divisi EPC *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) EPC Division*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
11	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Kantor Cabang Kupang *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Kupang Branch Office*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
12	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Proyek Airport Learning Academy *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Airport Learning Academy Project*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
13	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Proyek UIN Raden Fatah Palembang *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) UIN Raden Fatah Palembang Project*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
14	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Proyek RSUD Wates *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) RSUD Wates Project*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
15	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Proyek Bendungan Karalloe Paket 2 *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Karalloe Dam Project Package 2*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
16	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Proyek Bendungan Kuwil Paket 3 *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Kuwil Dam Project Package 3*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
17	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Beton Indramayu *Zero Accident Award for PT Nindya Beton Indramayu*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*
18	22 April 2021 *April 22, 2021*	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) PT Nindya Karya (Persero) Proyek Total Rehab Sekolah Paket 5 Jakarta Timur II *Zero Accident Award for PT Nindya Karya (Persero) Total School Rehabilitation Project Package 5 East Jakarta II*	Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi *Ministry of Manpower and Transmigration*

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2020

VALID CERTIFICATIONS IN 2020

NO	JENIS SERTIFIKASI *TYPE OF CERTIFICATION*	TANGGAL DIKELUARKAN SERTIFIKASI *DATE OF ISSUANCE*	MASA BERLAKU HINGGA *VALIDITY PERIOD*	DIKELUARKAN OLEH *ISSUED BY*
1	SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu *Quality Management System*	20 April 2020 *April 20, 2021*	19 April 2023 *April 19, 2021*	Sucofindo
2	SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan *Environmental Management System*	20 April 2020 *April 20, 2021*	19 April 2023 *April 19, 2021*	Sucofindo
3	ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja *Occupational Health and Safety Management System*	1. Dikeluarkan 6 Mei 2019 2. Diamandemen 7 April 2020 1. *Issued on May 6, 2019* 2. *Amended April 7, 2020*	5 mei 2022 *May 5, 2021*	Sucofindo
4	ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) *Anti-Bribery Management System*	24 Juli 2020 *July 24, 2021*	23 Juli 2023 *July 23, 2021*	Sucofindo
5	Sertifikasi SMK3 PP NO.50 TAHUN 2012 *OHS Management System Certification* *PP No. 50 of 2012*	14 Juli 2017 *July 14, 2021*	-	Sucofindo

Piagam Penghargaan
PENGHARGAAN KESELAMATAN KERJA
PIAGAM PENGHARGAAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIAGAM PENGHARGAAN

WILAYAH OPERASIONAL, JARINGAN USAHA, DAN ALAMAT ENTITAS ANAK SERTA INVESTASI/ PENYERTAAN SAHAM

OPERATIONAL AREAS, BUSINESS NETWORK, AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES AND INVESTMENT/EQUITY PARTICIPATION

WILAYAH I *REGIONAL I*	Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung **(Medan)** *Aceh, North Sumatra, Riau, Riau Islands, West Sumatra, Jambi, Bengkulu, South Sumatra, Bangka Belitung Islands, Lampung **(Medan)***
WILAYAH II *REGIONAL II*	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat **(DKI Jakarta)** *Central Java, DI Yogyakarta, East Java, DKI Jakarta, Banten, West Java **(DKI Jakarta)***
WILAYAH III *REGIONAL III*	Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur **(Balikpapan)** *West Kalimantan, North Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan **(Balikpapan)***
WILAYAH IV *REGIONAL IV*	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Luar Negeri-Timor Leste **(Denpasar)** *Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, and Overseas-Timor Leste **(Denpasar)***
WILAYAH V *REGIONAL V*	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Selawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat **(Makassar)** *North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, West Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Maluku, North Maluku, Papua, West Papua **(Makassar)***
DIVISI EPC *EPC DIVISION*	*Engineering Procurement Construction* (EPC) **(DKI Jakarta)**
DIVISI PROPERTY *PROPERTY DIVISION*	Properti **(DKI Jakarta)** *Property **(DKI Jakarta)***

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK
ADDRESS OF SUBSIDIARY

PT NINDYA BETON	
GEDUNG NINDYA **JL. LETJEND. MT. HARYONO KAV. 22 JAKARTA TIMUR 13630** **DKI JAKARTA, INDONESIA**	
TELP. *PHONE*	+62 21 800 9070
FAKS. *FAX*	+62 21 800 9073
SUREL *EMAIL*	info.nindyabeton@gmail.com
SITUS *WEB* *WEBSITE*	www.nindyabeton.co.id

DAFTAR ALAMAT INVESTASI/PENYERTAAN SAHAM
ADDRESS OF CAPITAL INVESTMENT

PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG	
BUSINESS PARK TANGERANG CITY BLOK A NO. 19 **JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1 CIKOKOL, KOTA TANGERANG 15117** **BANTEN, INDONESIA**	
TELP. *PHONE*	+62 21 5578 2453
FAKS. *FAX*	+62 21 5578 2456
SUREL *EMAIL*	jkc@jkc.co.id
SITUS *WEB* *WEBSITE*	www.jkc.co.id

INFORMASI PADA SITUS WEB

INFORMATION ON WEBSITE

Perseroan memiliki situs *web* sebagai sumber informasi mengenai kinerja yang disajikan secara transparan bagi investor serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Situs *web* Perusahaan dapat diakses melalui www. nindyakarya.co.id. Pada situs *web* tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:

- **Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Terakhir Individu.**
  Informasi mengenai Pemegang Saham Perusahaan dapat diakses di situs *web* Perusahaan pada kategori Keterbukaan Informasi yang tersaji di dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

- **Isi Kode Etik**
  Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan dapat diakses di situs *web* Perusahaan pada kategori "GCG".

- **Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**
  Informasi mengenai RUPS dapat diakses di situs *web* Perusahaan pada kategori "INFORMASI PUBLIK" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.

- **Laporan Keuangan Tahunan Terpisah.**
  Informasi mengenai Laporan Keuangan Tahunan Terpisah dapat diakses di situs *web* Perusahaan pada kategori "INFORMASI PUBLIK" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data. Data yang dilampirkan dalam informasi Laporan Keuangan selalu diperbaharui setiap per 3 (tiga) bulan dengan menyediakan sarana pengunduhan yang dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam memperoleh data tersebut.

- **Profil Dewan Komisaris dan Direksi.**
  Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi secara lengkap beserta legalitas pengangkatannya dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "PROFIL".

- **Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Audit *Internal*.**
  Informasi mengenai piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Audit *Internal* dapat diakses di situs *web* Perusahaan pada kategori "GCG".

Situs *web* Perusahaan menjadi portal digital resmi korporasi yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The Company has a website as a source of information on its performance, presented in a transparent manner for investors as well as other stakeholders. The Company's website can be accessed through www.nindyakarya.co.id. On that website, all stakeholders may obtain information on:

- **Shareholders up to Individual Ultimate Owner**

  Information on the Company's Shareholders can be accessed in the Company's website on the Information Disclosure category under the Annual Report of the Company.

- **Contents of Code of Conduct**
  Information on the Company's Code of Conduct can be accessed in the Company's website on the "GCG" Category.

- **Information on General Meeting of Shareholders (GMS)**
  Information on General Meeting of Shareholders (GMS) can be accessed in the Company's website on the "PUBLIC INFORMATION" category by registering to submit for data request.

- **Separate Annual Financial Statements**
  Information on Separate Annual Financial Statements can be accessed in the Company's website on the "PUBLIC INFORMATION" Category by registering to submit for data request. We always update the data included in the Financial Statements information every three months (quarterly) by providing download facility that may facilitate the stakeholders in acquiring the data.

- **Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors**
  Information on the complete profiles of Board of Commissioners and Board of Directors as well as the legality of appointment can be accessed in the Company's website on the "PROFILE" Category.

- **Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit**
  Information on the charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit can be accessed in the Company's website on the "GCG" category.

The Company's website is the official corporate digital portal that can be accessed openly, with the aim of providing comprehensive information on the Company to a broader audience.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN AUDIT INTERNAL

EDUCATION AND/OR TRAINING ACTIVITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT

NAMA DAN JABATAN *NAME AND POSITION*	MODUL PEMBINAAN *DEVELOPMENT MODULE*	PENYELENGGARA *ORGANIZER*	WAKTU *DATE*	HARI *DAY*
KOMISARIS *COMMISSIONERS*				
Rika Kiswardani Komisaris *Commissioner*	EXPAND Leadership Program	999 YPK BUMN & CLDI	26–29 Februari 2020 *February 26-29, 2020*	4 Hari *4 Days*
Rika Kiswardani Komisaris *Commissioner*	Expand Leadership Program	999 YPK BUMN & CLDI	27-28 Februari 2020 *February 27-28, 2020*	2 Hari *2 Days*
Andar Perdana Widiastono Komisaris *Commissioner*	Expand Leadership Program	999 YPK BUMN & CLDI	27-28 Februari 2020 *February 27-28, 2020*	2 Hari *2 Days*
DIREKSI *DIRECTORS*				
Haedar A. Karim Direktur Utama *President Director*	Pelatihan Softskills "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong" *Soft Skill Training "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong"*	PT Nindya Karya (Persero)	9 Oktober 2020 *October 9, 2020*	1 Hari *1 Day*
Firmansyah Direktur Produksi dan HSE *Production and HSE Director*	Pelatihan Softskills "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong" *Soft Skill Training "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong"*	PT Nindya Karya (Persero)	9 Oktober 2020 *October 9, 2020*	1 Hari *1 Day*
Sri Haryanto Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	Pelatihan Softskills "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong" *Soft Skill Training "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong"*	PT Nindya Karya (Persero)	9 Oktober 2020 *October 9, 2020*	1 Hari *1 Day*
Moharmein Zein Chaniago Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	Pelatihan Softskills "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong" *Soft Skill Training "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong"*	PT Nindya Karya (Persero)	9 Oktober 2020 *October 9, 2020*	1 Hari *1 Day*
Moharmein Zein Chaniago Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	Sharing Session Proyek EPC PT. PP (Persero)	PT Nindya Karya (Persero)	19 Maret 2020 *March 19, 2020*	1 Hari *1 Day*
KOMITE *COMMITTEE*				
Mamat Supangkat Komite Audit *Audit Committee*	Pelatihan dan Sertifikasi ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko ERM Fundamental *Training and Certification of ISO 31000 International Standards in Risk Management for ERM Fundamental*	CRMS INDONESIA	1-11 Desember 2020 *December 1-11, 2020*	4 Hari *4 Days*
Mamat Supangkat Komite Audit *Audit Committee*	ISO 31000 Series 1: ERM Fundamental	Center for Risk Management Studies Indonesia	1-3 Desember 2020 *December 1-3, 2020*	3 Hari *3 Days*

NAMA DAN JABATAN *NAME AND POSITION*	MODUL PEMBINAAN *DEVELOPMENT MODULE*	PENYELENGGARA *ORGANIZER*	WAKTU *DATE*	HARI *DAY*
Mamat Supangkat Komite Audit *Audit Committee*	Certification EKAM of ERMAP - ERMCP	Center for Risk Management Studies Indonesia	11 Desember 2020 *December 11, 2020*	1 Hari *1 Day*
KEPALA SPI *HEAD OF INTERNAL AUDIT*				
Rusliadi	Workshop Audit Internal ISO 37001:2016	Intersys	10-11 Februari 2020 *February 10-11, 2020*	2 Hari *2 Days*
Rusliadi	Contract Strategy	NLC	8 Mei 2020 *May 8, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	Digital Marketing & Unlock Success	Nindya Karya	26 Mei 2020 *May 26, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	LAUNCHING NLC - Problem Solving & Decision Making	NLC	22 Juni 2020 *June 22, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	New Normal di Era Extraordinary *New Normal in Extraordinary Era*	NLC	2 Juli 2020 *July 2, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	Leadership In Crisis Era	NLC	16 Juli 2020 *July 16, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	Menangkap Peluang di Masa Sulit *Seizing Opportunity in Difficult Period*	NLC	22 Juli 2020 *July 22, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	Refresh Business Plan of Property Company	Reinco Strategy	23-24 Juli 2020 *July 23-24, 2020*	2 Hari *2 Days*
Rusliadi	Supply Chain Management	NLC	10 Agustus 2020 *August 10, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	Sosialisasi New Core Value & Perubahan Tagline Nindya *Dissemination of New Core Value and Change in Nindya's Tagline*	NLC	21 September 2020 *September 21, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	Pelatihan Softskills "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong" *Soft Skill Training "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong"*	PT Nindya Karya	9 Oktober 2020 *October 9, 2020*	1 Hari *1 Day*
Rusliadi	Online Course Digital Business Transformation Advance Level - Business Analytic for Leaders	FEB BUMN	19-29 November 2020 *November 19-29, 2020*	12 Hari *12 Days*
SEKRETARIS PERUSAHAAN *CORPORATE SECRETARY*				
Arista Febri Eriyawan	Leadership In Crisis Era	NLC	16 Juli 2020 *July 16, 2020*	1 Hari *1 Day*
Arista Febri Eriyawan	LAUNCHING NLC - Problem Solving & Decision Making	NLC	22 Juni 2020 *June 22, 2020*	1 Hari *1 Day*
Arista Febri Eriyawan	Sosialisasi New Core Value & Perubahan Tagline Nindya *Dissemination of New Core Value and Change in Nindya's Tagline*	NLC	21 September 2020 *September 21, 2020*	1 Hari *1 Day*
Arista Febri Eriyawan	Pelatihan Softskills "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong" *Soft Skill Training "Final Sprint 2020 - Reach the Impossible and Finish Strong"*	PT Nindya Karya (Persero)	9 Oktober 2020 *October 9, 2020*	1 Hari *1 Day*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Bendungan Logung, Jawa Tengah
Logung Dam, Central Java

Bendungan Mila, NTB
Mila Dam, NTB

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN PERSPEKTIF PEREKONOMIAN NASIONAL 2020

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Sepanjang 2020, dinamika ekonomi global terjadi karena merebaknya pandemi Covid-19 dengan sangat cepat ke-178 negara. Akibatnya, terjadi pelambatan bahkan resesi ekonomi dunia yang berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester I. Hal ini terjadi karena dampak perlambatan ekonomi global akibat Covid-19 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran pandemi.

Kebijakan ini berpengaruh pada berkurangnya mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Akibatnya sejumlah kegiatan konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi mengalami penurunan signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi nasional turut menurun.

Pada semester II 2020, adanya sinergi kebijakan antar otoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap dengan stabilitas yang terjaga. Kontraksi PDB berkurang pada triwulan III, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diprakirakan berada di kisaran -2% hingga -1%.

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan membaik pada 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antar otoritas. Adanya kemajuan penanganan Covid-19, termasuk penggunaan vaksin, pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan-kebijakan makro ekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan mendukung optimisime penguatan ekonomi.

Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju.

GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS AND NATIONAL ECONOMIC PERSPECTIVES IN 2020

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on many aspects of life, not only health and humanity, but also the world economy. Throughout 2020, the dynamics of the global economy occurred due to the rapid spread of the Covid-19 pandemic to 178 countries. As a result, there has been a slowdown and even a world economic recession which has implications for national economic stability.

Indonesia's economic growth in 2020 came under quite strong pressure, especially in the first semester. This was contributed by the impact of the global economic slowdown due to Covid-19 and the large-scale social restriction (PSBB) policy to mitigate the spread of the pandemic.

This policy had an effect on reducing the mobility of people and the activities of goods and services. As a result, a number of activities, including consumption, investment, transportation, tourism, and production, as well as the confidence of business actors experienced a significant decline, which, in turn, also drove the decline in national economic growth.

In the second semester of 2020, the existence of policy synergy between authorities through various immediate and extraordinary strengthening measures to overcome the impact of Covid-19 was able to encourage gradual economic improvement with maintained stability. GDP contraction eased in the third quarter so that the overall national economic growth in 2020 was predicted to be in the range of -2% to -1%.

The outlook for the Indonesian economy is predicted to improve in 2021, driven by continued policy synergy between authorities. Progress in handling Covid-19, including the use of vaccines, global economic recovery, stimulus for macroeconomic policies, as well as various efforts to sharpen policy strategies support optimism for economic strengthening.

This optimism for economic recovery is also supported by various efforts to accelerate structural transformation, including economic acceleration and digital finance, money market reform, and strengthening MSMEs, in supporting efforts towards an Advanced Indonesia.

TINJAUAN INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA DAN PERUSAHAAN 2020

Guna memitigasi risiko penularan Covid-19, Pemerintah di hampir seluruh negara memberlakukan penguncian (*lockdown*). Hal ini berdampak pada kinerja banyak industri, termasuk industri konstruksi global dan nasional. Sejumlah proyek konstruksi di beberapa wilayah ditunda dan membuat *output* konstruksi 2020 lebih lambat dari perkiraan semula.

Menurut GlobalData, sebelum maraknya pandemi Covid-19, industri konstruksi Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan cepat karena pemerintah memiliki rencana untuk memajukan pembangunan infrastruktur dengan skala besar. Namun mencermati perkembangan situasi, pandemi Covid-19 memberikan dampak pada industri konstruksi sejak kuartal pertama tahun 2020.

Untuk mengurai dampak destruktif krisis Covid-19, pada semester II 2020, Pemerintah mulai melonggarkan kebijakan PSBB di beberapa daerah. Langkah ini ditempuh untuk menghidupkan kembali perekonomian yang melambat. Adanya penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru membuat para pelaku bisnis melakukan penyesuaian terhadap kegiatan bisnisnya.

Pasar konstruksi diharapkan kembali tumbuh dengan pemulihan secara bertahap mulai kuartal ketiga 2021. Pemulihan sektor konstruksi ini berlangsung secara bertahap, mengikuti tahapan pengendalian penyebaran virus.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan industri konstruksi nasional pada 2021 akan tumbuh 5,2-6,7%. Dengan demikian, Pemerintah dan para pelaku bisnis bidang konstruksi harus bersiap mengejar proyek-proyek yang terbengkalai maupun yang ditunda selama pandemi.

OVERVIEW OF NATIONAL CONSTRUCTION INDUSTRY IN 2020

In order to mitigate the risk of Covid-19 transmission, governments in almost all countries imposed the lockdown policy. This impacted the performance of many industries, including the global and national construction industries. A number of construction projects in several regions were postponed and made 2020 construction output slower than originally estimated.

According to GlobalData, prior to the outbreak of the Covid-19 pandemic, the Indonesian construction industry was expected to continue to grow rapidly as the government had plans to advance infrastructure development on a large scale. However, observing the development of the situation, the Covid-19 pandemic had impact adversely on the construction industry since the first quarter of 2020.

To unravel the destructive impact of the Covid-19 crisis, in the second semester of 2020, the Government began to relax the PSBB policy in several regions. This step was taken to revive the slowing economy in addition to the implementation of the Adaptation of New Normal policy which made business players adjust their business activities.

The construction market is expected to return to growth with a gradual recovery starting in the third quarter of 2021. The recovery in the construction sector will follow the stage of controlling the spread of the virus.

The Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency (PPN/Bappenas) estimates that the national construction industry in 2021 will grow by 5.2-6.7%. Thus, the government and business players in the construction sector must be prepared to pursue projects that were abandoned or postponed during the pandemic.

KEBIJAKAN STRATEGIS 2020

2020 STRATEGIC POLICIES

Pertumbuhan jasa konstruksi tahun 2020 masih tumbuh dengan terbatas. Persaingan semakin ketat akibat berkurangnya pasar di masa pandemi Covid-19, terutama di segmen sumber dana APBD. Adaptasi Kebiasaan Baru memberikan dampak bagi kinerja pada sebagian sektor, namun di sisi lain juga memberikan potensi pertumbuhan dan pengembangan kinerja di beberapa sektor.

The growth of construction services in 2020 remained limited. Competition was getting tougher due to the reduced market during the Covid-19 pandemic, especially in the segment of Regional Budget funding sources. Adaptation to the New Normal impacted on the performance of several sectors; on the other hand, it also provided growth potential and performance development in others.

Dalam merespon dampak pandemi Covid-19 dan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru, Perseroan mengambil langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk Tim *Business Continuity Management* (Tim BCM)

   Bertugas untuk mengidentifikasi kondisi *Internal* dan eksternal perusahaan, serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bisnis tetap dapat berjalan, baik selama masa pandemi maupun setelah selesai. Dengan tujuan menjaga pendapatan dan optimalisasi biaya, Tim BCM membuat langkah strategis agar operasional perusahaan tetap berjalan. Tim BCM juga memastikan Pekerja dan Keluarga Pekerja terhindar dari Covid-19 dengan merealisasikan Satgas Covid-19 yang mengawasi jalannya protokol kesehatan di seluruh wilayah kerja, serta membuat langkah strategis jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.

2. Menyiapkan tiga rencana *survival strategy*

   Perseroan secara berkesinambungan meningkatkan kinerjanya melalui rencana-rencana strategis, termasuk dalam aspek implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) maupun implementasi kinerja unggul.

3. Akselerasi Transformasi Digital

   Guna tercapainya *Integrated* NINDYA *Excellence System* (INEX) atau konsep terintegrasi untuk pencapaian Sasaran Strategis (RJPP & RKAP) serta visi dan misi Perseroan, Direksi membangun Digital *Smart Construction* melalui tiga cara, yaitu digitalisasi pengetahuan dan keahlian, digitalisasi area konstruksi, digitallisasi; kolaborasi *Internal* perusahaan, dan digitalisasi bisnis proses kontruksi.

4. *Rebound strategy* sebagai inisiatif strategis

   Dalam menghadapi fase Adaptasi Kebiasaaan Baru, Direksi menyusun sejumlah strategi di antaranya perubahan manajemen, restrukturisasi bisnis, mengindentifikasi tingkat keparahan situasi agar dapat mengendalikan kondisi dan menentukan *emergency action*, serta yang terkahir melembagakan perubahan budaya perusahaan untuk menekankan profitabilitas, ROI, dan pengembalian aset yang digunakan juga mencari peluang pertumbuhan.

In responding to the impact of Covid-19 pandemic and the Adaptation to the New Normal, the Company implemented a number of strategic steps in 2020, as follows:

1. Establishment of Business Continuity Management Team (BCM Team)

   The main duties of the BCM Team are to identify the Company's internal and external conditions and to provide recommendations to ensure the business can continue to run, both during and after the pandemic. With the aim of maintaining revenue and optimizing costs, the BCM Team has taken strategic steps to keep the Company's operations running. The BCM team also ensures that the Company's workers and their families are protected from Covid-19 by forming a Covid-19 Task Force to oversee the implementation of health protocols in all work areas, as well as making short, medium, and long-term strategic steps for the company.

2. Preparation of three survival strategy plans

   The Company continuously improves its performance through strategic plans, including in the aspect of Good Corporate Governance (GCG) implementation and superior performance implementation.

3. Acceleration of Digital Transformation

   To achieve an Integrated NINDYA Excellence System (INEX) or an integrated concept for the achievement of Company's Strategic Goals (RJPP and RKAP) and vision and mission, the Board of Directors has developed Digital Smart Construction in three ways, namely digitizing knowledge and expertise, digitizing construction areas, digitizing internal company collaboration, and digitizing construction process business.

4. Rebound strategy as a strategic initiative

   In facing the Adaptation to New Normal phase, the Board of Directors has developed a number of strategies including management changes, business restructuring, identification of the severity of the situation in order to control conditions and determine emergency actions, and institutionalization of changes in corporate culture to emphasize profitability, ROI, and return on assets used while seeking for growth opportunities.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama (*core business*) yang dijalankan yaitu di bidang jasa konstruksi. Seiring dengan perkembangannya, Perseroan melakukan pengembangan bisnis yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha utama yaitu manufaktur dengan pendirian anak perusahaan PT Nindya Beton, properti dengan mendirikan Divisi Properti serta sewa alat dengan mendirikan Unit Bisnis Unit Penunjang Produksi.

Secara umum, kinerja operasional Perseroan terlihat dari nilai pekerjaan yang tersedia yang terdiri dari nilai pekerjaan dari sisa proyek lama dan nilai pekerjaan dari proyek baru, seperti yang terlihat dari tabel di bawah ini.

Based on its Articles of Association, the Company's core business activity is to carry out construction service. Along with its development, the Company continues to develop its business while still carrying out its core business activities, including the manufacturing sector through the establishment of PT Nindya Beton, a subsidiary; the property sector by establishing a Property Division; and the equipment rental sector by establishing a Production Support Business Unit.

In general, the Company's operational performance can be seen from the value of available work, consisting of the value of work from the remaining projects and the value of work from the new project, as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN TERSEDIA

VALUE OF AVAILABLE WORK

	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH (RP-JUTA) *TOTAL (RP MILLION)*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH (RP-JUTA) *TOTAL (RP MILLION)*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	6.894.324	54,09%	9.505.261	66,16%	(2.443.923)	(35,78%)
Proyek Baru *New Projects*	5.850.681	45,91%	4.861.035	33,84%	989.646	20,36%
Nilai Pekerjaan *Value of Work*	12.745.005	100,00%	14.366.296	100,00%	(2.041.878)	(19,84%)

KOMPOSISI NILAI PEKERJAAN TERSEDIA

COMPOSITION OF VALUE OF AVAILABLE WORK

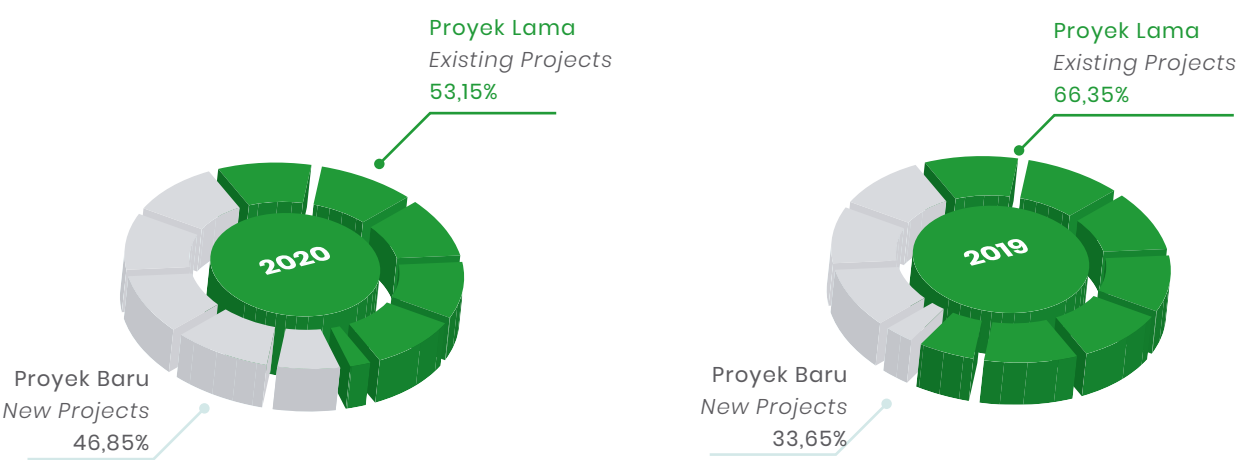

Jumlah nilai pekerjaan tersedia tahun 2020 mencapai sebesar Rp8,25 triliun, mengalami penurunan 19,84% atau setara dengan Rp2.04 triliun dibandingkan tahun 2019 yang senilai Rp10,29 triliun. Jumlah nilai pekerjaan tersedia tahun 2020 terdiri dari sisa pekerjaan proyek lama yang diperoleh tahun 2020 sebesar Rp4,38 triliun

The total value of available work in 2020 reached Rp8.25 trillion, a decrease of 19.84% or Rp2.04 trillion compared to that of 2019 which was recorded at Rp10.29 trillion. The total value of available work in 2020 consisted of the remaining work on existing projects obtained in 2020 amounting to Rp4.38 trillion with a composition of 53.15%, and the

dengan komposisi 53,15%, dan perolehan proyek baru tahun 2020 sebesar Rp3,86 triliun atau 46,85% dari total nilai pekerjaan tersedia.

Dalam laporan keuangan *audited* 2020, pengembangan bisnis yang dilakukan turut membentuk struktur pendapatan usaha Perseroan yang membagi kegiatan bisnis Perseroan ke dalam 4 (empat) segmen yaitu Konstruksi, Manufaktur, Properti dan Sewa Alat.

acquisition of new projects in 2020 amounting to Rp3.86 trillion or 46.85% of the total value of available work.

In the 2020 audited financial report, the business development carried out also forms the structure of the Company's revenue which divides the business activities into 4 (four) segments, namely Construction, Manufacturing, Property, and Equipment Rental.

SEGMEN USAHA NINDYA KARYA BERDSARKAN KEGIATAN USAHA
NINDYA KARYA'S BUSINESS SEGMENT BASED ON BUSINESS ACTIVITIES

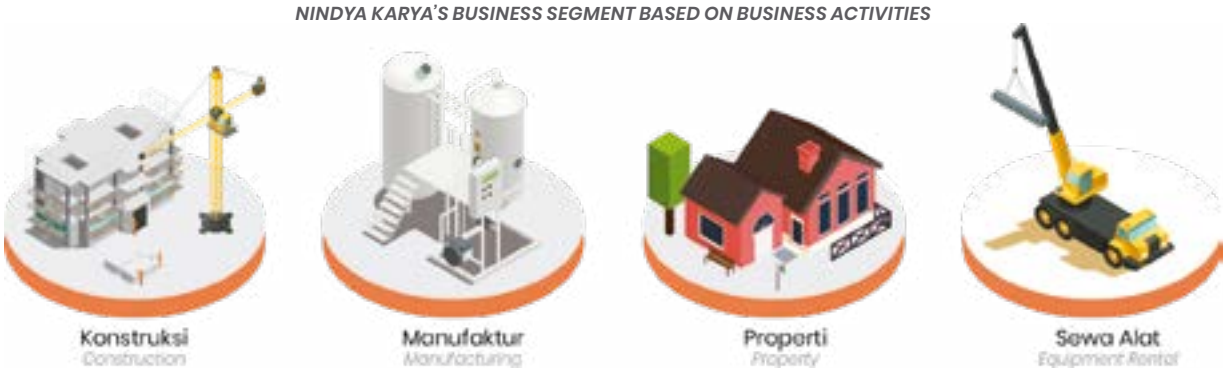

Sekilas tentang kontribusi setiap segmen usaha terhadap Pendapatan Perseroan dapat dilihat di bawah ini.

Description on the contribution of each business segment to the Company's revenues is presented in the following table.

JUMLAH DAN KONTRIBUSI SEGMEN USAHA TERHADAP PENDAPATAN
AMOUNT AND CONTRIBUTION OF BUSINESS SEGMENT TO REVENUES

SEGMEN USAHA	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Kontruksi *Construction*	3.496.211	96,67%	5.596.607	96,77%	(2.100.396)	(38%)
Manufaktur *Manufacturing*	96.549	2,67%	160.029	2,77%	(63.480)	(40%)
Properti *Property*	17.487	0,48%	17.975	0,31%	(488)	(3%)
Sewa Alat *Equipment Rental*	6.237	0,17%	8.891	0,15%	(2.654)	(30%)
Jumlah Pendapatan *Total Revenues*	3.616.484	100,00%	5.783.502	100,00%	(2.167.018)	(37%)

KOMPOSISI KONTRIBUSI SEGMEN USAHA TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN
COMPOSITION OF BUSINESS SEGMENT CONTRIBUTION TO REVENUES

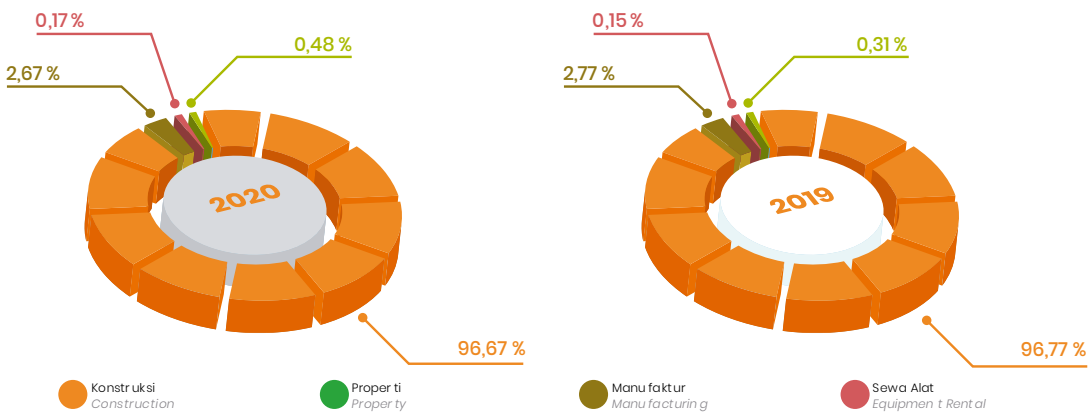

Terlihat dari komposisi pada bagan di atas, segmen usaha Konstruksi merupakan kompetensi inti Perseroan, dengan kontribusi mencapai 96,67% terhadap pendapatan konsolidasian tahun 2020. Di tahun 2020, terdapat kegiatan sewa alat yang baru dicatatkan dalam struktur pendapatan Perseroan, sebagai bagian dari kebijakan direksi pada Tahun 2020 tentang pengelolaan aktiva tetap peralatan kepada unit Penunjang Produksi sesuai Keputusan direksi No.0363/DIRUT.KPTS/SEKPER/06/2018 tanggal 05 Juli 2018, di mana unit Penunjang Produksi bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap Peralatan yang meliputi pencatatan, pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian serta pemeliharaan aktiva tetap Peralatan.

As seen from the composition in the chart above, the Construction business segment is the Company's core competency with a contribution of 96.67% to the 2020 consolidated revenue. In 2020, there were new equipment rental activities listed in the Company's Revenue structure as part of the Board of Directors' policy regarding the management of equipment fixed assets to Production Support units in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 0363/DIRUT.KPTS/SEKPER/06/2018 dated July 05 2018, where the Production Support unit is responsible for the management of equipment fixed assets, which includes recording, operation, utilization, control, and maintenance of equipment fixed assets.

Uraian tentang masing-masing segmen usaha dapat dilihat di bawah ini.

A description of each business segment can be seen below.

KONSTRUKSI

Segmen usaha Konstruksi didapatkan dari kegiatan usaha utama Perseroan yaitu jasa konstruksi dan *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), yang mencakup 5 (lima) produk dan jasa konstruksi yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan.

CONSTRUCTION

The Construction business segment is derived from the Company's core business activities, namely construction and Engineering, Procurement, and Construction (EPC) services, which include 5 (five) construction products and services provided by the Company to customers.

PRODUK DAN JASA SEGMEN USAHA KONSTRUKSI
PRODUCTS AND SERVICES OF CONSTRUCTION BUSINESS SEGMENT

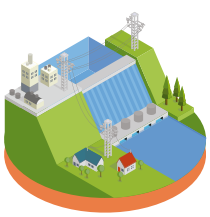

Irigasi/Pengairan
Irrigation

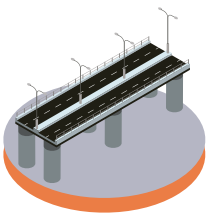

Jalan dan Jembatan
Roads and Bridges

Bangunan/Gedung
Building

Pelabuhan/Bandara
Ports/Airports

EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) dan Lain-lain
EPC (Engineering, Procurement, and Construction) and Others

Uraian penjelasan dan kinerja produk dan jasa dijabarkan

The explanation and performance of each product and service are described below.

A. Irigasi dan Pengairan

Salah satu jasa konstruksi Perusahaan adalah pembangunan irigasi atau pengairan, meliputi pekerjaan irigasi, bendung, embung, pengaman pantai, pemipaan air minum atau air limbah, normalisasi sungai, danau, rawa.

Produktivitas jasa konstruksi Perusahaan melalui pembangunan Irigasi/Pengairan terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

A. Irrigation

One of the Company's construction services is the construction of irrigation, including irrigation works, dams, reservoirs, coastal protection, piped drinking water or waste water, and normalization of rivers, lakes, swamps.

The productivity of the Company's construction services through irrigation development can be seen from the increase in the value of work, as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN PROYEK IRIGASI/PENGAIRAN

VALUE OF WORK OF IRRIGATION PROJECTS

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	2.439.726	78,14%	4.036.718	96,71%	(1.596.992)	(39,56%)
Proyek Baru *New Projects*	682.491	21,86%	137.149	3,29%	545.342	397,63%
Nilai Pekerjaan *Value of Work*	3.122.216	100,00%	4.173.867	100,00%	(1.051.651)	(25,20%)

Di tahun 2020, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Irigasi/Pengairan sebesar Rp0,68 triliun, meningkat 397,63% atau setara dengan Rp0,54 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp0,13 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan pangsa pasar di bidang irigasi/Pengairan di tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kompetensi Perseroan di bidang Irigasi/Pengairan juga mengalami Penurunan. Penurunan ini kemudian mempengaruhi kontribusi besar terhadap jumlah Nilai Pekerjaan dari proyek irigasi/Pengairan tahun 2020 sebesar Rp3,12 triliun yang menurun hingga 25,20% atau setara dengan Rp1,05 triliun terhadap jumlah Nilai Pekerjaan dari proyek irigasi/Pengairan tahun 2019 sebesar Rp4,17 triliun.

In 2020, the Company recorded the value of New Projects from Irrigation projects of Rp0.68 trillion, an increase of 397.63% or Rp0.54 trillion compared to 2019 of Rp0.13 trillion. This increase was mainly due to an increase in market share in the field of Irrigation in 2020 compared to the previous year. Meanwhile, the Company's competence in the field of Irrigation also experienced a decline. This decrease then affected a large contribution to the total Work Value of Irrigation projects in 2020 amounting to Rp3.12 trillion, which decreased to 25.20% or Rp1.05 trillion compared with the total Work Value of Irrigation projects in 2019 of Rp4.17 trillion.

Dengan menurunnya Nilai Pekerjaan dari proyek irigasi/Pengairan, jumlah Pendapatan usaha dari Irigasi/Pengairan di tahun 2020 mengalami penurunan signifikan hingga 30,92% dibandingkan tahun 2019, penurunan ini disebabkan oleh:

1. Terhambatnya mobilitas pekerja proyek dikarenakan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat dampak COVID-19
2. Pengurangan waktu kerja proyek sehingga menghambat pengadaan dan pengiriman barang import yang sesuai dengan spesifikasi *owner*
3. Adanya kebijakan pemerintah atas pengalihan sumber dana dari Kementerian PUPR ke Kementerian kesehatan

With the decrease in the Work Value of the Irrigation project, the total revenues from Irrigation sector in 2020 experienced a significant decrease of up to 30.92% compared to 2019, this decrease was due to:

1. The mobility of project workers is hampered due to the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy due to the impact of COVID-19.
2. Reduction of project work time which hindered the procurement and delivery of imported goods in accordance with the owner's specifications.
3. There is a government policy on the transfer of funding sources from the Ministry of PUPR to the Ministry of Health.

Profitabilitas proyek Irigasi/Pengairan yang terlihat dari pendapatan usaha dari proyek Irigasi/Pengairan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The profitability of Irrigation project as seen from the revenues of Irrigation project can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA DARI PROYEK IRIGASI/PENGAIRAN

REVENUES FROM IRRIGATION PROJECTS

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Jumlah Nilai Pekerjaan Proyek Irigasi dan Pengairan *Total Value of Work of Irrigation Projects*	1.229.443	1.779.624	(550.181)	(30,92%)

Pendapatan Usaha Proyek Irigasi/Pengairan tahun 2020 dapat dilihat dari Proyek Irigasi/Pengairan Tahun 2020.

The revenues of Irrigation projects can be seen from the Irrigation Projects of 2020 described below.

PENDAPATAN USAHA PER PROYEK IRIGASI/PENGAIRAN TAHUN 2020
REVENUES PER IRRIGATION PROJECT IN 2020

PROYEK IRIGASI/PENGAIRAN *IRRIGATION PROJECTS*	PENDAPATAN PROYEK (RP JUTA) *PROJECT REVENUE (RP MILLION)*
VB	480.805
Non VB	1.229.443

B. Jalan dan Jembatan

Perseroan memberikan jasa pembangunan untuk proyek di bidang Jalan dan Jembatan meliputi pekerjaan jalan (peningkatan dan baru), pekerjaan jembatan, pekerjaan *fly over*, pekerjaan *under pass*, dan pekerjaan rel kereta api.

Produktivitas jasa konstruksi Perseroan melalui pembangunan Jalan dan Jembatan terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

B. Road and Bridge

The Company provides construction services for projects in the field of Roads and Bridges, including road works (upgrading and new), bridge work, fly over work, underpass work, and railroad work.

The productivity of the Company's construction services through the construction of Roads and Bridges can be seen from the development in the value of work, as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN PROYEK JALAN DAN JEMBATAN
VALUE OF WORK OF ROAD AND BRIDGE PROJECTS

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	280.061	22,99%	246.259	32,25%	33.802	13,73%
Proyek Baru *New Projects*	938.329	77,01%	517.219	67,75%	421.110	81,42%
Nilai Pekerjaan Proyek Jalan dan Jembatan *Value of Work of Road and Bridge Projects*	1.218.389	100,00%	763.550	100,00%	454.839	59,57%

Di tahun 2020, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Jalan dan Jembatan sebesar Rp0,94 triliun, naik 81,42% atau setara dengan Rp421,11 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp0,52 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena pangsa pasar di bidang Jalan dan Jembatan di tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah keseluruhan Nilai Pekerjaan dari proyek Jalan dan Jembatan tahun 2020 sebesar Rp1,22 triliun, naik 59,57% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp0,76 triliun.

Kenaikan Nilai Pekerjaan dari proyek Jalan dan Jembatan tersebut tidak seiring dengan penurunan Pendapatan usaha dari Jalan dan Jembatan tahun 2020 sebesar 63,63% dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan ini disebabkan oleh:

1. Kenaikan harga material akibat Covid-19 sehingga proyek terlambat dan mengakibatkan denda keterlambatan

In 2020, the Company recorded the value of New Projects from Road and Bridge projects amounting to Rp0.94 trillion, an increase of 81.42% or Rp421.11 billion compared to that of 2019 recorded at Rp0.52 trillion. This increase was due to an increase in market share in the Road and Bridge sector in 2020 compared to the previous year. The total value of work from Road and Bridge projects in 2020 was Rp1.22 trillion, an increase of 59.57% compared to 2019 of Rp0.76 trillion.

The increase in the Value of Work from the Road and Bridge project was not in line with the decrease in revenues from Road and Bridge sector in 2020 by 63.63% compared to the previous year. This decrease was due to:

1. The increase in material prices due to Covid-19; causing a delay in the project and resulting in late fees.

2. Terhambatnya mobilitas pekerja proyek dikarenakan adanya kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB) akibat dampak COVID-19

2. The mobility of project workers is hampered due to the large-scale social restriction (PSBB) policy due to the impact of COVID-19.

3. Pengurangan waktu kerja proyek sehingga menghambat pengadaan dan pengiriman barang *import* yang sesuai dengan spesifikasi *owner*

3. Reduction of project work time which hindered the procurement and delivery of imported goods in accordance with the owner's specifications.

Profitabilitas proyek Jalan dan Jembatan yang terlihat dari pendapatan usaha dari proyek Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The profitability of Road and Bridge project as seen from the revenues of Road and Bridge project can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA DARI PROYEK JALAN DAN JEMBATAN
REVENUES FROM ROAD AND BRIDGE PROJECTS

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha Jalan dan Jembatan *Revenues from Road and Bridge Projects*	166.031	456.526	(290.495)	(63,63%)

Pendapatan usaha per proyek Jalan dan Jembatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The revenues for each Road and Bridge project in 2020 can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA PER PROYEK JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2020
REVENUES PER ROAD AND BRIDGE PROJECT IN 2020

PROYEK JALAN DAN JEMBATAN *ROAD AND BRIDGE PROJECTS*	PENDAPATAN PROYEK (RP JUTA) *PROJECT REVENUE (RP MILLION)*
VB	222.922
Non VB	166.031

C. Bangunan/Gedung

Perusahaan memberikan jasa konstruksi pada proyek Bangunan/Gedung meliputi pekerjaan gedung, pembangunan pabrik, pembangunan silo, pembangunan gudang dan pembangunan kawasan.

Produktivitas jasa konstruksi Perusahaan melalui pembangunan Bangunan/Gedung terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

C. Building

The Company provides construction services in Building projects, including building works, factory construction, silo construction, warehouse construction, and area development.

The productivity of the Company's construction services through Building construction can be seen from the development in the value of work, as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN PROYEK BANGUNAN/GEDUNG
VALUE OF WORK OF BUILDING PROJECTS

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	897.061	45,52%	1.754.234	50,52%	(857.173)	(48,86%)
Proyek Baru *New Projects*	1.073.676	54,48%	1.717.971	49,48%	(644.295)	(37,50%)
Nilai Pekerjaan Proyek Bangunan/Gedung *Value of Work of Building Projects*	1.970.737	100,00%	3.472.206	100,00%	(1.501.469)	(43,24%)

Di tahun 2020, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Bangunan/Gedung sebesar Rp1,07 triliun, menurun 37,50% atau setara dengan Rp644 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,72 triliun. penurunan ini disebabkan pangsa pasar di bidang Bangunan/Gedung menurun di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di samping itu kompetensi Perseroan di bidang Bangunan/Gedung juga terus mengalami perbaikan. Penurunan Pekerjaan dari proyek Bangunan/Gedung tahun 2020 sebesar Rp1,97 triliun yang meningkat 43,24% atau setara dengan Rp1,50 triliun terhadap jumlah Nilai Pekerjaan dari proyek Bangunan/Gedung tahun 2019 sebesar Rp3,47 triliun.

In 2020, the Company recorded the value of New Projects from Building projects of Rp1.07 trillion, a decrease of 37.50% or Rp644 billion compared to that of 2019 of Rp1.72 trillion. This decline was due to the declining market share in the Building sector in 2020 compared to the previous year. However, the Company's competence in the field of Building continues to improve. The decrease in Work from Building projects in 2020 was Rp1.97 trillion, an increase of 43.24% or Rp1.50 trillion compared to the total Work Value from Building projects in 2019 of Rp3.47 trillion.

Penurunan Nilai Pekerjaan dari proyek Bangunan/Gedung dibarengi dengan kinerja Pendapatan usaha dari Bangunan/Gedung. Kinerja Pendapatan usaha dari Bangunan/Gedung di tahun 2020 mengalami penurunan 53,33% dibandingkan tahun sebelumnya, Hal disebabkan oleh:

The decline in the value of work from the Building project was accompanied by the performance of revenue from the Building sector. Revenue from Building sector in 2020 decreased by 53.33% compared to the previous year. This was due to:

1. Tidak tercapainya *financial close* karena ketidakpastian kondisi pasar atau struktur modal proyek yang tidak optimal.
2. Tidak memperoleh pendanaan dari Lembaga keuangan
3. Mitra/partner tidak memperoleh modal yang cukup
4. Pekerja proyek tertular Covid-19 sehingga menyebabkan banyak proyek tertunda

1. Failure to achieve financial close due to uncertainty in market conditions or non-optimal project capital structure.
2. Failure to obtain funding from financial institutions.
3. Partners do not obtain sufficient capital.
4. Project workers suffer from Covid-19, causing many projects to be delayed.

Profitabilitas proyek Bangunan/Gedung yang terlihat dari pendapatan usaha dari proyek Bangunan/Gedung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The profitability of Building project as seen from the revenues of Building project can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA DARI PROYEK BANGUNAN/GEDUNG
REVENUES FROM BUILDING PROJECTS

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha Pekerjaan Proyek Bangunan/Gedung *Revenues from Building Projects*	1.204.336	2.580.288	(1.375.952	(53,33%)

Pendapatan usaha per proyek Bangunan/Gedung tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The revenues for each Building project in 2020 can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA PER PROYEK BANGUNAN/GEDUNG TAHUN 2020
REVENUES PER BUILDING PROJECT IN 2020

PROYEK BANGUNAN/GEDUNG *BUILDING PROJECT*	PENDAPATAN PROYEK (RP JUTA) *PROJECT REVENUE (RP MILLION)*
VB	20.694
Non VB	1.204.336

D. Pelabuhan/Bandara

Perseroan memberikan jasa konstruksi untuk proyek pembangunan Pelabuhan/Bandara meliputi pembangunan pelabuhan, pembangunan *runway* bandara, pembangunan *apron* bandara dan pembangunan dermaga.

Produktivitas jasa konstruksi Perusahaan melalui pembangunan Pelabuhan/Bandara terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

D. Port and Airport

The Company provides construction services for Port/Airport construction projects, including port construction, airport runway construction, airport apron construction, and pier construction.

The productivity of the Company's construction services through the construction of Ports/Airports can be seen from the development of the value of work as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN PROYEK PELABUHAN/BANDARA
VALUE OF WORK OF PORT/AIRPORT PROJECTS

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	83.576	9,06%	646.861	74,61%	(563.285)	(87,08%)
Proyek Baru *New Projects*	838.462	90,94%	220.180	25,39%	618.282	280,81%
Nilai Pekerjaan Proyek Pelabuhan/Bandara *Value of Work of Port/Airport Projects*	922.038	100,00%	867.641	100,00%	54.397	6,27%

Di tahun 2020, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari proyek Pelabuhan/Bandara sebesar Rp0,84 triliun, meningkat 280,81% atau setara dengan Rp618,28 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp0,22 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan pangsa pasar di bidang Pelabuhan/Bandara di tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. selain itu kompetensi Perseroan di bidang Pelabuhan/Bandara juga mengalami perbaikan. Kenaikan ini memberikan kontribusi terhadap jumlah Nilai Pekerjaan dari proyek Pelabuhan/Bandara tahun 2020 sebesar Rp0,92 triliun yang meningkat 6,27% atau setara dengan Rp54,39 miliar terhadap jumlah Nilai Pekerjaan dari proyek Pelabuhan/Bandara tahun 2019 sebesar Rp0,86 triliun. dengan meningkatnya Nilai Pekerjaan dari proyek Pelabuhan/Bandara, tidak diiringi dengan jumlah Pendapatan usaha dari Pelabuhan/Bandara di tahun 2020 mengalami penurunan signifikan hingga 16,54% dibandingkan tahun 2019.

In 2020, the Company recorded the value of New Projects from Port/Airport projects of Rp0.84 trillion, an increase of 280.81% or Rp618.28 billion compared to that of 2019 of Rp0.22 trillion. This increase was mainly due to an increase in market share in the Port/Airport sector in 2020 compared to the previous year. The Company's competence in the Port/Airport sector has also improved. This increase contributed to the total Work Value of the Port/Airport projects in 2020 of Rp0.92 trillion, an increase of 6.27% or Rp54.39 billion compared to the total Work Value of the Port/Airport project in 2019 of Rp0.86 trillion. Despite the increase in the Work Value of the Port/Airport project, it was not accompanied by the amount of Revenue from the Port/Airport in 2020 which decreased significantly to 16.54% compared to 2019.

Profitabilitas proyek Pelabuhan/Bandara yang terlihat dari pendapatan usaha dari proyek Pelabuhan/Bandara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The profitability of Port/Airport project as seen from the revenues of Port/Airport project can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA DARI PROYEK PELABUHAN/BANDARA
REVENUES FROM PORT/AIRPORT PROJECTS

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha Pekerjaan Proyek Pelabuhan/Bandara *Revenues from Port/Airport Projects*	600.769	719.825	(119.056)	(16,54%)

Pendapatan usaha per proyek Pelabuhan/Bandara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The revenues for each Port/Airport project in 2020 can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA PER PROYEK PELABUHAN/BANDARA TAHUN 2020

REVENUES PER PORT/AIRPORT PROJECT IN 2020

PROYEK PELABUHAN/BANDARA *PORT/AIRPORT PROJECTS*	PENDAPATAN PROYEK (RP JUTA) *PROJECT REVENUE (RP MILLION)*
VB	90.027
Non VB	600.727

E. EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) dan Lain-Lain

Perseroan juga memberikan layanan EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) yang berfokus pada lini bisnis energi, *power* dan *water*, seperti tanki penyimpanan LPG, jaringan pemipaan gas dan minyak serta pengelolaan air bersih dan limbah.

Produktivitas jasa konstruksi Perseroan melalui pembangunan EPC dan lain-lain terlihat dari perkembangan nilai pekerjaan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini .

E. EPC (Engineering, Procurement, and Construction) and Others

The Company also provides EPC (Engineering, Procurement, and Construction) services that focus on energy, power, and water business lines such as LPG storage tanks, gas and oil piping networks, and clean water and waste management.

The productivity of the Company's construction services through EPC development and others can be seen from the development of the value of work, as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN EPC

VALUE OF WORK OF EPC PROJECTS

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	643.246	73,69%	145.711	14,33%	497.535	341,45%
Proyek Baru *New Projects*	229.622	26,31%	871.129	85,67%	(641.507)	(73,64%)
Nilai Pekerjaan EPC dan Lain-lain *Value of Work of EPC and Others*	872.868	100,00%	1.016.840	100,00%	(143.972)	(14,16%)

Di tahun 2020, Perseroan membukukan nilai Proyek Baru dari EPC dan lain-lain sebesar Rp229,62 miliar, turun 73,64% atau setara dengan Rp641,51 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp871,12 miliar. Penurunan ini disebabkan lelang proyek EPC membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan lelang proyek pada umumnya, sehingga banyak lelang yang kontraknya mundur ke tahun 2021. Selain itu pengalaman Perusahaan di bidang EPC masih kurang sehingga harus mencari rekanan untuk bekerja sama (*Join Operation*) untuk mengikuti lelang. Jumlah keseluruhan Nilai Pekerjaan dari proyek EPC dan lain-lain tahun 2020 sebesar Rp872,86 miliar, turun 14,16% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,01 triliun.

Penurunan Nilai Pekerjaan dari proyek EPC dan lain-lain tersebut tidak diiringi terhadap peningkatan Pendapatan usaha dari EPC dan lain-lain tahun 2020 yang meningkat sebesar 68,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Profitabilitas proyek EPC dan

In 2020, the Company recorded the value of New Projects from EPC and others sector amounting to Rp229.62 billion, a decrease of 73.64% or Rp641.51 billion compared to that of 2019 of Rp871.12 billion. This decrease was due to the fact that EPC project tenders took a longer time than general project tenders; hence, many tenders had contracts postponed to 2021. In addition, the Company's experience in the EPC field was still lacking; thus, it had to find partners to work together (Joint Operations) to participate in the tenders. The total value of work from EPC and other projects in 2020 was Rp872.86 billion, a decrease of 14.16% compared to that of 2019 of Rp1.01 trillion.

The decrease in Work Value from EPC and other projects was not accompanied by an increase in revenues from EPC and other sector in 2020 which increased by 68.22% compared to the previous

lain-lain yang terlihat dari pendapatan usaha dari proyek EPC dan lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

year. The profitability of EPC and other projects as seen from the revenues of EPC and other project can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA DARI PROYEK EPC DAN LAIN-LAIN

REVENUES FROM EPC AND OTHER PROJECTS

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha Pekerjaan Proyek EPC dan Lain-lain *Revenues from EPC and Other Projects*	415.905	247.240	168.665	68,22%

Pendapatan usaha per proyek EPC dan Lain-lain tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The revenues for each EPC and other project in 2020 can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA PER PROYEK EPC DAN LAIN-LAIN TAHUN 2020

REVENUES PER EPC AND OTHER PROJECT IN 2020

PROYEK EPC DAN LAIN-LAIN *EPC AND OTHER PROJECTS*	PENDAPATAN PROYEK (RP JUTA) *PROJECT REVENUE (RP MILLION)*
PROYEK LAIN-LAIN *OTHERS PROJECTS*	
VB	79
Non VB	35.409
PROYEK EPC *EPC PROJECTS*	
VB	137.607
Non VB	380.538

PROFITABILITAS SEGMEN USAHA KONSTRUKSI

Nilai Pekerjaan dari keseluruhan segmen Konstruksi tahun 2020 sebesar Rp12,74 triliun, menurun 11,29% atau setara dengan Rp1,62 triliun dari Nilai Pekerjaan segmen Konstruksi tahun 2019 sebesar Rp14,37 triliun. Dari total Nilai Pekerjaan tahun 2020, 45,91% di antaranya merupakan proyek baru, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

PROFITABILITY OF CONSTRUCTION BUSINESS SEGMENT

The value of work of the entire Construction segment in 2020 was Rp12.74 trillion, a decrease of 11.29% or Rp1.62 trillion from the value of work of the Construction segment in 2019 which was recorded at Rp14.37 trillion. Of the total Work Values in 2020, 45.91% of them were new projects as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN SEGMEN KONSTRUKSI

VALUE OF WORK OF CONSTRUCTION SEGMENT

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	6.894.324	54,09%	0.505.261	66,16%	(2.610.937)	(24,47%)
Proyek Baru *New Projects*	5.850.681	45,91%	4.861.035	33,845%	989.646	20,36%
Nilai Pekerjaan dari Segmen Konstruksi *Value of Work of Construction Segment*	12.745.005	100,00%	14.366.296	100,00%	(1.621.291)	(11,29%)

Berdasarkan produk dan jasa pada segmen Konstruksi, komposisi kontribusi masing-masing produk dan jasa terhadap Nilai Pekerjaan segmen usaha Konstruksi dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Based on the products and services in the Construction segment, the composition of contribution of each product and service to the Work Value of Construction business segment can be seen in the table and graph below.

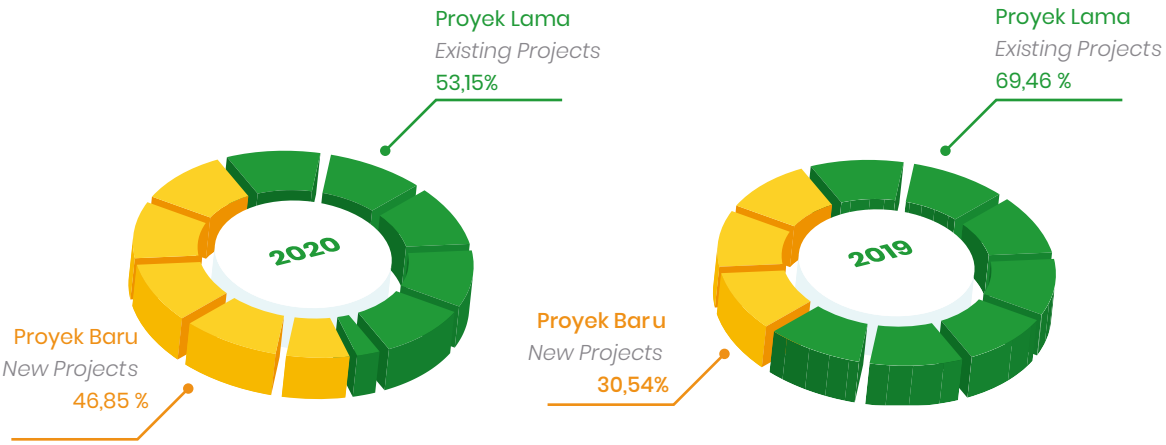

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa irigasi/Pengairan dan Bangunan/Jembatan memberikan kontribusi hingga lebih dari 50% atas jumlah nilai pekerjaan dari segmen Konstruksi. Terdapat penurunan nilai pekerjaan pada Jalan dan Jembatan serta EPC, sementara 3 (tiga) lainnya mengalami kenaikan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

From the table and graphs above, it can be seen that Irrigation and Building/Bridge sectors contributed more than 50% of the total value of work of the Construction segment. There was a decrease in the value of work of Roads and Bridges as well as EPC, while the other 3 (three) experienced an increase, as previously explained.

Pendapatan usaha dari segmen Konstruksi tahun 2020 sebesar Rp3,61 triliun, menurun 37,47% atau setara dengan Rp2,16 triliun dibandingkan pendapatan usaha segmen Konstruksi tahun 2019 sebesar Rp5,78 triliun. Komposisi kontribusi masing-masing produk dan jasa terhadap pendapatan usaha segmen Konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Revenues from the Construction segment in 2020 amounted to Rp3.61 trillion, a decrease of 37.47% or Rp2.16 trillion compared to the revenues of Construction segment in 2019 which amounted to Rp5.78 trillion. The composition of contribution of each product and service to the Construction segment's revenue can be seen in the table below.

PENDAPATAN USAHA SEGMEN KONSTRUKSI

REVENUES OF CONSTRUCTION SEGMENT

NAMA PROYEK *PROJECTS NAME*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pihak Berelasi *Related Parties*	843.547	24,13%	1.190.216	21,27%	(346.669)	(29,13%)
Pihak Ketiga *Third Parties*	2.623.664	75,04%	4.405.005	78,71%	(1.781.341)	(40,44%)
Eskalasi/Klaim *Escalation/Claim*	28.999	0,83%	1.384	0,002%	27.615	1995,30%
Jumlah Pendapatan Usaha dari Segmen Konstruksi *Total Revenues from COnstruction Segment*	3.496.210	100,00%	5.596.605	100,00%	-2.100.395	(37,53%)

KOMPOSISI KONTRIBUSI SEGMEN USAHA TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN

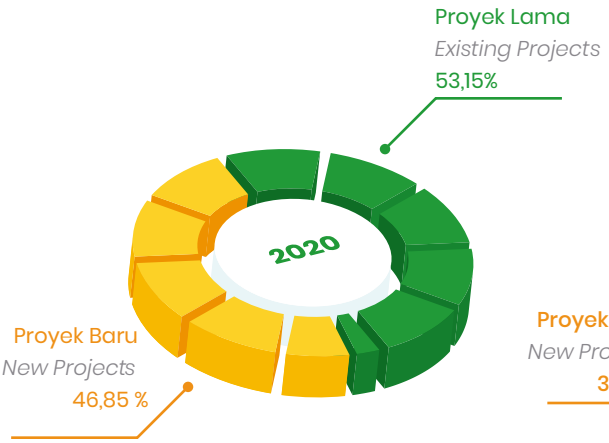

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan di tahun 2020 pada Pendapatan usaha dari Irigasi/Pengairan dan Bangunan/Jembatan dibandingkan tahun 2019.

COMPOSITION OF CONTRIBUTION OF BUSINESS SEGMENT TO COMPANY'S REVENUES

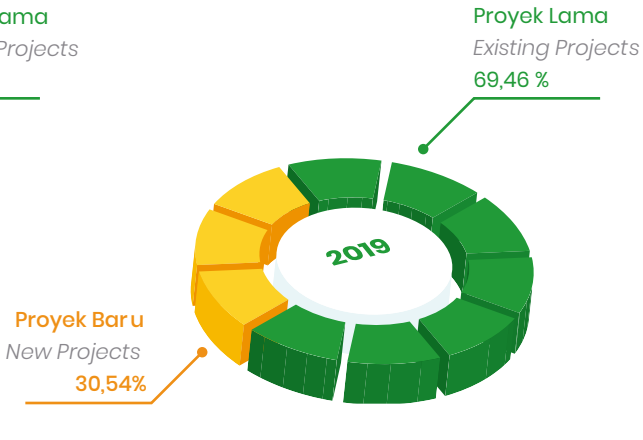

From the table and graph above, it can be seen that there was a significant growth in 2020 in revenues from Irrigation and Building/Bridge sectors compared to 2019.

MANUFAKTUR

PRODUK DAN JASA SERTA KEGIATAN OPERASI SEGMEN USAHA MANUFAKTUR

Segmen usaha manufaktur didapatkan dari pencatatan atas kegiatan manufaktur produk beton dari entitas anak, PT Nindya Beton ("PT NB"). PT NB didirikan sebagai bagian dari pengembangan bisnis Perseroan di bidang beton pracetak. PT NB bergerak pada industri dan pabrikasi Beton Pracetak, *Readymix*, serta usaha berkaitan lainnya. Pendirian PT NB diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Perseroan, serta dapat mendukung kebutuhan beton pada proyek-proyek Perusahaan. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan memiliki pengendalian atas PT NB dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51,00%.

Ruang lingkup bidang usaha PT NB meliputi industri Beton Pracetak, *Readymix* dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dan Pabrikasi, yaitu:

1. Sistem pabrikasi beton pracetak.
2. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan.
3. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
4. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik.
5. Usaha lainnya yang berkaitan.

MANUFACTURING

PRODUCTS, SERVICES, AND OPERATING ACTIVITIES OF MANUFACTURING BUSINESS SEGMENT

The manufacturing business segment is derived from the recording of concrete product manufacturing activities of PT Nindya Beton ("PT NB"), subsidiary. PT NB was established as part of the Company's business development in the precast concrete sector. PT NB is engaged in the industry and manufacturing of precast concrete, ready-mix, and other related businesses. The establishment of PT NB is expected to increase the Company's added value and competitiveness, as well as to support the need for concrete in the Company's projects. Until the end of 2020, the Company is the controlling shareholder of PT NB with a share ownership of 51.00%.

The scope of PT NB's business includes precast concrete, ready-mix, and other related businesses and manufacturing, namely:

1. Precast concrete manufacturing system.
2. Manufacturing of building materials and components.
3. Manufacturing of construction components and equipment.
4. Manufacturing of metal, wood, rubber, and plastic goods.
5. Other related businesses.

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA MANUFAKTUR

Nilai Pekerjaan dari keseluruhan segmen manufaktur tahun 2020 sebesar Rp401,55 miliar. dari total Nilai Pekerjaan tahun 2020, 69,69% di antaranya merupakan proyek baru, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

FINANCIAL PERFORMANCE AND PROFITABILITY OF MANUFACTURING BUSINESS SEGMENT

The value of work of the entire manufacturing segment in 2020 amounted to Rp401.55 billion. Of the total Work Values in 2020, 69.69% of them were new projects, as shown in the table below.

NILAI PEKERJAAN SEGMEN MANUFAKTUR

VALUE OF WORK OF MANUFACTURING SEGMENT

SEGMEN USAHA *BUSINESS SEGMENT*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	JUMLAH *TOTAL*	KONTRIBUSI *CONTRIBUTION*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Sisa Proyek Lama *Remaining Projects*	121.712	30,31%	171.886	27,53%	(50.174)	(29,19%)
Proyek Baru *New Projects*	279.843	69,69%	452.452	72,47%	(172.609)	(38,15%)
Nilai Pekerjaan dari Segmen Manufaktur *Value of Work of Manufacturing Segment*	401.555	100,00%	624.338	100,00%	(222.783)	(35,68%)

Berdasarkan pencapaian di sepanjang tahun 2020, berikut disampaikan profitabilitas segmen usaha manufaktur.

The profitability of the Manufacturing business segment in 2020 is described in the following table:

PROFITABILITAS SEGMEN USAHA MANUFAKTUR

PROFITABILITY OF MANUFACTURING BUSINESS SEGMENT

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha dari Segmen Manufaktur *Revenues from Manufacturing Segment*	96.548	160.029	(63.481)	(39,67%)

Pendapatan dari segmen usaha manufaktur tahun 2020 sebesar Rp96,54 miliar, menurun 39,67% atau setara Rp63,48 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp160,029 miliar. Kenaikan ini disebabkan peningkatan kontrak yang dieproleh pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Di samping itu, terdapat perolehan kontrak di luar rencana RKAP.

Revenues from the manufacturing business segment in 2020 was Rp96.54 billion, a decrease of 39.67% or Rp63.48 billion compared to that of 2019 of Rp160.029 billion. This was due to the increase in contracts obtained in 2020 compared to 2019. In addition, there were contract acquisitions outside the RKAP plan.

Perbandingan realisasi pendapatan usaha segmen manufaktur tahun 2020 terhadap target RKAP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The comparison of the realization of Manufacturing segment's revenues in 2020 against the 2020 RKAP target can be seen in the table below.

URAIAN *DESCRIPTION*	REALISASI 2020 (RP-JUTA) *REALIZATION 2020 (RP MILLION)*	TARGET 2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	PENCAPAIAN (%) *ACHIEVEMENT (%)*
Pendapatan Usaha dari Segmen Manufaktur *Revenues from Manufacturing Segment*	96.548	466.206	20,71

Pencapaian realisasi pendapatan usaha segmen manufaktur tahun 2020 sebesar 20,71% terhadap target RKAP tahun 2020 disebabkan jadwal pelaksanaan proyek yang mundur/bergeser ke tahun berikutnya.

The realization of Manufacturing segment's revenues in 2020 of 20.71% of the 2020 RKAP target was due to the project implementation schedule being pushed back/shifting to the following year.

PROPERTI

PRODUK DAN JASA SERTA KEGIATAN OPERASI SEGMEN USAHA PROPERTI

Di samping jasa konstruksi, Perseroan juga melakukan pengembangan usaha pada sektor properti. Di sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melakukan penyiapan perencanaan, perizinan dan memulai pengerjaan dalam rangka pengembangan Properti pada 4 (empat) lokasi, di antaranya sebagai berikut:

1. Perumahan Badak Semarang
2. Perumahan Gowa, Sulawesi Selatan
3. Sewa Aset
4. Hotel Nindya Horison, Semarang

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA PROPERTI

Berdasarkan pencapaian di sepanjang tahun 2020, berikut disampaikan profitabilitas segmen usaha Properti.

PROFITABILITAS SEGMEN USAHA PROPERTI
PROFITABILITY OF PROPERTY BUSINESS SEGMENT

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha dari Segmen Properti *Revenues from Property segment*	17.486	17.975	(489)	(13,00%)

Pendapatan dari segmen usaha Properti tahun 2020 sebesar Rp17,48 miliar, turun 13% atau setara Rp489 juta dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp17,97 miliar. Penurunan ini disebabkan kondisi *market* properti pada area pengembangan properti Perseroan mengalami pelemahan, terutama untuk tipe perumahan yang sedang dibangun.

Kurang bergairahnya kondisi *market* properti berdampak pada pencapaian target segmen usaha Properti.

Perbandingan realisasi pendapatan usaha segmen Properti tahun 2020 terhadap target RKAP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PROPERTY

PRODUCTS, SERVICES, AND OPERATING ACTIVITIES OF PROPERTY BUSINESS SEGMENT

In addition to construction services, the Company expands its business to the property sector. Throughout 2020, the Company has prepared plan, requested for permits, and started work in the context of developing properties at 4 (four) locations, including the following:

1. Badak Residence Semarang
2. Gowa Residence, South Sulawesi
3. Asset Rent
4. Hotel Nindya Horison, Semarang

FINANCIAL PERFORMANCE AND PROFITABILITY OF PROPERTY BUSINESS SEGMENT

The profitability of the Property business segment in 2020 is described in the following table:

Revenue from the Property business segment in 2020 amounted to Rp17.48 billion, decreased by 13% or Rp489 million compared to that of 2019 of Rp17.97 billion. This decline was due to the weakening of the property market conditions in the Company's property development areas, especially for the type of housing being built.

The lack of enthusiasm in the property market had an impact on the achievement of property business segment's target.

The comparison of the realization of Property segment's revenues in 2020 against the 2020 RKAP target can be seen in the table below.

URAIAN *DESCRIPTION*	REALISASI 2020 (RP-JUTA) *REALIZATION 2020 (RP MILLION)*	TARGET 2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	PENCAPAIAN (%) *ACHIEVEMENT (%)*
Pendapatan Usaha dari Segmen Properti *Revenues from Property segment*	17.486	38.872	44,98%

SEWA ALAT

Produk dan Jasa serta Kegiatan Operasi Segmen Usaha Sewa Alat

Sejak Juli 2018, Direksi telah mengesahkan Pengelolaan aktiva tetap Peralatan kepada unit Penunjang Produksi (UPP) sesuai Keputusan direksi No. 0363/DIRUT/KPTS/SEKPER/06/2018 tanggal 5 Juli 2018, di mana UPP bertanggung jawab atas Pengelolaan Aktiva Tetap Peralatan yang meliputi pencatatan, pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian serta pemeliharaan aktiva tetap Peralatan.

Tahapan yang telah dilakukan Unit Penunjang Produksi di tahun 2020 atas Aset Alat Aktiva Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan peralatan *bitumen decanter* berjumlah 1 unit yang digunakan untuk memproduksi aspal polimer yang digunakan pada project *overlay* permukaan *runway* Bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Membentuk tim kerja proyek pada pekerjaan *cut and fill.*
2. Monitoring alat menggunakan inova *track* untuk mengetahui jam kerja alat serta posisi alat secara *real time*.
3. Memperkuat sumber daya peralatan dengan melakukan pekerjaan *jacking pipe* pada proyek *sewerage* ipal pekanbaru dan juga pekerjaan *dredging* bekerja sama dengan Nindya Beton.
4. Membentuk tim kerja proyek pada pekerjaan jasa hampar padat beton *readymix* pada proyek pembangunan *taxiway* dan apron Bandar Udara Hang Nadim Batam.
5. Rencana lanjutan pekerjaan upah produksi beton dan rencana pekerjaan jasa produksi pengupasan aspal yang terdapat pada proyek preservasi Jalan Gusig.
6. Rencana pembangunan *workshop* dan *office* yang terdapat di karawang dan krian sebagai pusat kegiatan produksi dan maintenance peralatan.

KINERJA KEUANGAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA SEWA ALAT

Berdasarkan pencapaian di sepanjang tahun 2020, berikut disampaikan profitabilitas segmen usaha sewa alat.

EQUIPMENT RENTAL

Products, Services, and Operating Activities of Equipment Rental Business Segment

Since July 2018, the Board of Directors has validated the management of equipment fixed assets to the Production Support Unit in accordance with the Decision of Board of Directors No. 0363/DIRUT/KPTS/SEKPER/06/2018 dated July 5, 2018, in which the Production Support Unit is responsible for the management of fixed assets of equipment including the recording, operation, utilization, control, and maintenance of equipment.

Activities carried out by the Production Support Unit in 2020 in relation to the Company's equipment assets are as follows:

1. Addition of 1 unit of bitumen decanter equipment used to produce polymer asphalt for the runway surface overlay project at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport, and establishment of a project work team on cut and fill works.
2. Monitoring of equipment using inova track to understand the equipment hours of use as well as the position in real time.
3. Strengthening of equipment resources by carrying out jacking pipe work at Pekanbaru WTP sewerage project as well as dredging work in collaboration with Nindya Beton.
4. Establishment of a project work team on ready-mix concrete overlay services on the taxiway and apron construction project at Hang Nadim Airport Batam.
5. Continuation plan for concrete production and asphalt stripping production service work plans at the Gusig Road preservation project.
6. Plans for the construction of workshops and offices in Karawang and Krian as centers for production and equipment maintenance activities.

FINANCIAL PERFORMANCE AND PROFITABILITY OF EQUIPMENT RENTAL BUSINESS SEGMENT

The profitability of the Equipment Rental business segment in 2020 is described in the following table:

PROFITABILITAS SEGMEN USAHA SEWA ALAT

PROFITABILITY OF EQUIPMENT RENTAL BUSINESS SEGMENT

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha dari Segmen Sewa Alat *Revenues from Equipment Rental Segment*	6.236	8.891	(2.655)	6,88%

Pendapatan dari segmen usaha sewa alat baru dicatatkan di tahun 2020, sebesar Rp6,23 miliar, sejalan dengan kebijakan manajemen untuk melakukan pengelolaan aktiva tetap peralatan kepada unit tersendiri, yaitu UPP.

Perseroan tidak menganggarkan pendapatan usaha dari sewa alat pada RKAP tahun 2020, dengan demikian tidak terdapat perbandingan pendapatan usaha dari segmen sewa alat terhadap target tahun 2020.

Revenues from the new equipment rental business segment in 2020 was recorded at Rp6.23 billion, in line with the management's policy to manage equipment fixed assets through a separate unit, namely the Production Support Unit.

The Company did not allocate a target for revenue from Equipment Rental segment in the 2020 RKAP; thus, there is no comparison of realized revenues of equipment rental segment to the 2020 target.

RENCANA PENGEMBANGAN

Pembentukan UPP diharapkan mampu memberikan perluasan bisnis yang memiliki prospek yang baik bagi Perseroan. Ke depan, UPP akan memberikan layanan pekerjaan *Foundation* dan *Drainage*, serta Pengerukan yang akan memberikan kontribusi positif bagi jasa konstruksi yang diberikan Perseroan.

DEVELOPMENT PLAN

The establishment of Production Support Unit is expected to be able to provide business expansion that has good prospects for the Company. In the future, the Production Support Unit will provide Foundation and Drainage works as well as Dredging service to bring positive contribution to the construction services provided by the Company.

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan indonesia.

INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND CONFORMITY WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refers to the financial statements for the years ended on December 31, 2020 and December 31, 2019, which have been audited by Public accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. The presentation and disclosure of the Company's financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which includes the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
ASET *ASSETS*				
Aset Lancar *Current Assets*	4.221.246	4.830.380	(609.134)	(12,61%)
Aset Tidak Lancar *Non-Current Assets*	1.265.572	1.245.942	19.630	1,58%
JUMLAH ASET *TOTAL ASSETS*	**5.486.818**	**6.076.322**	**(589.504)**	**(9,70%)**
LIABILITAS DAN EKUITAS *LIABILITIES AND EQUITY*				
Liabilitas Jangka Pendek *Current Liabilities*	3.203.168	4.023.379	(820.211)	(20,39%)
Liabilitas Jangka Panjang *Non-Current Liabilities*	765.575	366.306	399.269	109,00%
JUMLAH LIABILITAS *TOTAL LIABILITIES*	**3.968.743**	**4.389.685**	**(420.942)**	**(9,59%)**
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	1.518.075	1.686.637	(168.562)	(9,99%)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS *TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*	**5.486.818**	**6.076.322**	**(589.504)**	**(9,70%)**

ASET

"Jumlah aset Perseroan tercatat mengalami penurunan 9,70% seiring dengan meningkatnya tagihan Bruto pada aset lancar, serta kenaikan Properti investasi, aset tetap dan aset lain-lain pada aset tidak lancar."

ASSETS

"The Company's total assets decreased by 9.70% in line with the increase in gross amount due in current assets, as well as the increase in investment properties; property, plant, and equipment; and other assets in non-current assets."

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
ASET LANCAR *CURRENT ASSETS*				
Kas dan Setara Kas *Cash and Cash Equivalents*	245.873	508.064	(262.191)	(51,61%)
Investasi Jangka Pendek *Short-Term Investment*	200.000	200.000	-	-
PIUTANG USAHA *ACCOUNTS RECEIVABLE*				
Pihak Berelasi *Related Parties*	111.354	99.491	11.863	11,92%
Pihak Ketiga *Third Parties*	23.231	178.885	(155.654)	(87,01%)
PIUTANG RETENSI *RETENTION RECEIVABLES*				
Pihak Berelasi *Related Parties*	42.186	68.983	(26.797)	(38,85%)
Pihak Ketiga *Third Parties*	108.826	101.138	7.688	7,60%
Piutang Ventura Bersama Konstruksi *Joint Venture Receivables*	306.082	296.623	9.459	3,19%
Piutang Lain-lain *Other Receivables*	30.252	22.254	7.998	35,94%
TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA *GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS*				
Pihak Berelasi *Related Parties*	530.686	394.037	136.649	34,68%
Pihak Ketiga *Third Parties*	1.800.538	2.024.069	(223.531)	(11,04%)
Persediaan *Inventories*	146.770	167.785	(21.015)	(12,52%)
Pajak Dibayar di Muka *Prepaid Taxes*	571.480	696.420	(124.940)	(17,94%)
Uang Muka *Advances*	67.564	58.688	8.876	15,12%
Beban Dibayar di Muka *Prepaid Expenses*	27.756	11.715	16.041	136,93%
Beban Ditangguhkan *Deferred Expenses*	8.647	2.228	6.419	288,11%
JUMLAH ASET LANCAR *TOTAL CURRENT ASSETS*	**4.221.245**	**4.830.380**	**(609.135)**	**(12,61%)**

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
ASET TIDAK LANCAR *NON-CURRENT ASSETS*				
Investasi pada Ventura Bersama *Investment in Joint Ventures*	242.398	206.733	35.665	17,25%
Investasi Jangka Panjang Lainnya *Other Long-Term Investment*	4.028	1.592	2.436	153,02%
Properti Investasi *Investment Properties*	432.231	383.322	48.909	12,76%
Aset Pajak Ditangguhkan *Deferred Tax Assets*	3.737	1.647	2.090	126,90%
Aset Tetap *Property, Plant and Equipment*	561.072	610.976	(49.904)	(8,17%)
Aset Tak Berwujud *Intangible Assets*	84	202	(118)	(58,42%)
Proyek Dalam Pelaksanaan *Project on Progress*	2.952	6.304	(3.352)	(53,17%)
Aset Lain-lain *Other Assets*	19.070	35.168	(16.098)	(46%)
Jumlah Aset Tidak Lancar *Total Non-Current Assets*	1.265.572	1.245.942	19.630	2%
JUMLAH ASET *TOTAL ASSETS*	**5.486.818**	**6.076.322**	**(589.504)**	**(10%)**

Per 31 Desember 2020, jumlah Aset Perseroan tercatat sebesar Rp5,49 triliun yang terdiri dari 76,93% Aset Lancar dan 23,07% Aset Tidak Lancar. Nilai jumlah Aset ini menurun Rp589,50 miliar atau 9,70% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6,08 triliun. Penurunan aset tersebut berasal dari penurunan pada Aset Lancar sebesar Rp609,13,19 miliar atau 12,61%.

As of December 31, 2020, the Company's total assets reached Rp5.49 trillion, consisting of current assets of 76.93% and non-current assets of 23.07%. This amount decreased by Rp589.50 billion or 10% from Rp6.08 trillion recorded in 2019, due to a decrease in current assets of Rp609.13.19 billion or 12.61%.

ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar di akhir tahun 2020 sebesar Rp4,22 triliun, mengalami penurunan 12,61% atau setara Rp609,13 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,83 triliun, yang terutama disebabkan menurunnya tagihan bruto. rincian pos akun yang memengaruhi aset lancar adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Kas dan setara Kas sebesar 51,61% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh meningkatnya pembayaran hutang ke rekanan pada akhir tahun.
2. Piutang usaha mengalami penurunan secara keseluruhan, namun pada Pihak Berelasi mengalami kenaikan sebesar 11,92% dan Pihak Ketiga menurun sebesar 87,01% dibandingkan tahun 2019, yang disebabkan oleh berkurangnya piutang usaha dengan jangka waktu pembayaran kurang dari 12 bulan dan meningkatnya nilai penyisihan kerugian piutang.

CURRENT ASSETS

Total current assets of the Company at the end of 2020 amounted to Rp4.22 trillion, a decrease of 12.61% or Rp609.13 billion from Rp4.83 trillion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in gross amount due. Details of account items affecting current assets are as follows:

1. Cash and cash equivalents decreased by 51.61% from the previous year due to an increase in debt payments to partners at the end of the year.
2. Trade receivables of third parties decreased by 87.01% while trade receivables of related parties increased by 11.92% compared to 2019. This was due to a decrease in trade receivables with the payment period of less than 12 months and an increase in the allowance for losses on receivables.

3. Penurunan Piutang retensi, pada Pihak Berelasi turun sebesar 38,85% dan namun Pihak Ketiga naik sebesar 7,60% dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh berkurangnya piutang retensi yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan dan meningkatnya nilai penyisihan kerugian piutang.

4. Kenaikan pada Piutang ventura Bersama Konstruksi sebesar 3,19% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh meningkatnya piutang Kerja sama oleh PT. PP, Adhi Karya, Sacna dan Sarana

5. Kenaikann Piutang lain-lain sebesar 35,94% yang disebabkan oleh bertambahnya piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp16,45 miliar

6. Kenaikan tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, pada Pihak Berelasi meningkat 34,68% yang disebabkan bertambahnya tagihan bruto kepada pihak berelasi sebesar Rp136,65 miliar dari tahun 2019, namun tagihan bruto Pihak Ketiga turun 11% dibandingkan tahun 2019, yang disebabkan oleh percepatan pekerjaan proyek

7. Penurunan Persediaan 12,52% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi dalam mengendalikan persediaan.

8. Penurunan Pajak Dibayar di muka 17,94% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 18,83%

9. Kenaikan Uang Muka sebesar 15,12% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh bertambahnya beban proyek dari pemasok.

10. Kenaikan Beban Dibayar di muka sebesar 136,93% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh bertambahnya biaya pelaksanaan proyek.

11. Kenaikan pada Beban Ditangguhkan sebesar 288,11% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh bertambahnya beban ditangguhkan dari proyek Pantai Malalayang.

ASET TIDAK LANCAR

Jumlah Aset Tidak Lancar di akhir tahun 2020 sebesar Rp1,26 triliun, mengalami kenaikan 1,58% atau setara Rp19,63 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,24 triliun, yang terutama disebabkan kenaikan Investasi Ventura Bersama, Investasi Jangka Panjang Lainnya, properti investasi, dan aset pajak ditangguhkan. Rincian pos akun yang memengaruhi Aset Tidak Lancar adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan investasi pada ventura Bersama sebesar 17,25% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh menurunnya laba Ventura Bersama.

3. Retention receivables of related parties decreased by 38.85% while retention receivables of third parties increased by 7.60% compared to the previous year. This was due to a decrease in retention receivables with maturities of less than 12 months and an increase in the allowance for losses on receivables.

4. Joint venture receivables increased by 3.19% from that of 2019 due to the increase in joint receivables with PT PP, Adhi Karya, Sacna, and Sarana.

5. Other receivables increased by 35.94% due to the increase in other receivables from related parties amounting to Rp16.45 billion.

6. Gross amount due from customers – related parties increased by 34.68% due to an increase in gross amount due amounting to Rp136.65 billion from that of 2019; while gross amount due from customers – third parties decreased by 11% compared to that of 2019 due to the acceleration of project work .

7. Inventories decreased by 12.52% compared to that of 2019 due to efficiency policies in controlling inventories.

8. Prepaid Taxed decreased by 17.94% compared to that of 2019 due to a decrease in Value Added Tax (VAT) of 18.83%.

9. Advances increased by 15.12% compared to that of 2019 due to an increase in project costs from suppliers.

10. Prepaid expenses increased by 136.93% compared to that of 2019 due to an increase in project implementation costs.

11. Deferred expenses increased by 288.11% compared to that of 2019 due to an increase in deferred expenses from the Malalayang Beach project.

NON-CURRENT ASSETS

Total non-current assets of the Company at the end of 2020 amounted to Rp1.26 trillion, an increase of 1.58% or Rp19.63 billion from Rp1.24 trillion recorded in 2019. This was mainly due to an increase in investment in joint ventures, other long-term investment, investment properties, and deferred tax assets. Details of account items affecting non-current assets are as follows:

1. Investment in joint ventures increased by 17.25% compared to that of 2019 due to a decrease in profits from joint ventures.

2. Kenaikan Investasi Jangka Panjang lainnya sebesar 153,02% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh penambahan investasi pada entitas asosiasi, PT Jasamarga Kunciran Cengkareng.

3. Kenaikan Properti Investasi sebesar 12,76% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh penambahan akumulasi perubahan nilai wajar sebesar Rp30,43 miliar.

4. Kenaikan Aset Pajak Tangguhan sebesar 126,90% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh penerapan PSAK 71 sebesar Rp3,94 miliar.

5. Penurunan Aset Tetap sebesar 8,17% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh reklasifikasi asset tanah sebesar Rp29,15 miliar.

6. Penurunan pada Aset Tak Berwujud sebesar 58,42% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh tidak adanya penambahan aset tak berwujud dan bertambahnya akumulasi amortisasi dari *software* sebesar Rp119 juta.

7. Penurunan aset lain-lain sebesar 45,77% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya Aset yang diambil alih yaitu berupa asset yang diperoleh atas pelunasan kewajiban pihak ketiga yaitu PT. Fatimah Azzahra dan PT. Sadang Terminal Square

8. Terdapat penambahan akun Proyek Dalam pelaksanaan milik entitas anak yaitu VB Nindya-Adhi Karya, Retail Beton Kendari dan Retail Beton Indramayu.

2. Other long-term investments increased by 153,02% compared to that of 2019 due to additional investments in PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, an associate entity.

3. Investment properties increased by 12.76% compared to that of 2019 due to the addition of accumulated changes in fair value of Rp30.43 billion.

4. Deferred tax assets increased by 126.90% compared to that of 2019 due to the implementation of PSAK 71 of Rp3.94 billion.

5. Property, plant, and equipment decreased by 8.17% compared to that of 2019 due to the reclassification of land assets of Rp29.15 billion.

6. Intangible assets decreased by 58.42% compared to that of 2019 due to the absence of additional intangible assets and an increase in accumulated amortization of software by Rp119 million.

7. Other assets decreased by 45.77% compared to that of 2019 due to the takeover of assets, i.e. those obtained for the settlement of third party obligations, namely PT Fatimah Azzahra and PT Sadang Terminal Square.

8. There were additional project on progress accounts belonging to Company's subsidiary, namely VB Nindya-Adhi Karya, Retail Beton Kendari, and Retail Beton Indramayu.

LIABILITAS

"Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan 9,59% yang disebabkan adanya penurunan hutang usaha dan hutang bruto untuk modal kerja seiring meningkatnya produksi pada tahun 2020."

LIABILITIES

"The Company's total liabilities decreased by 9.59% due to due to the decline in accounts payable and gross amount payables for working capital in line with the growth of production in 2020."

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
LIABILITAS JANGKA PENDEK *CURRENT LIABILITIES*				
PINJAMAN BANK DAN NON-BANK *BANK AND NON - BANK LOANS*				
Pihak Berelasi *Related Parties*	369.686	125.000	244.686	195,75%
Pihak Ketiga *Third Parties*	217.400	145.000	72.400	49,93%
HUTANG USAHA *ACCOUNTS PAYABLE*				
Pihak Berelasi *Related Parties*	18.282	36.343	(18.061)	(49,70%)
Pihak Ketiga *Third Parties*	1.440.403	1.707.893	(267.490)	(15,66%)

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
UANG MUKA PEMBERI KERJA *ADVANCES FROM CUSTOMERS*				
Liabilitas Sewa *Lease Liabilities*	162	-	162	-
Pihak Berelasi *Related Parties*	13.588	10.372	3.216	31,01%
Pihak Ketiga *Third Parties*	151.524	253.758	(102.234)	(40,29%)
Surat Hutang Jangka Menengah *Medium Term Notes*	-	300.000	(300.000)	(100,00%)
Hutang Pajak *Taxes Payable*	13.208	42.510	(29.302)	(68,93%)
Hutang Ventura Bersama *Joint Venture Payables*	20.173	18.445	1.728	9,37%
Pendapatan Diterima di Muka *Unearned Revenues*	6.342	8.080	(1.738)	(21,51%)
Hutang Bruto *Gross Amount Payables*	929.472	1.342.936	(413.464)	(30,79%)
Beban Akrual *Accruals*	17.906	26.290	(8.834)	(31,89%)
Hutang Lain-lain *Other Payables*	5.023	6.751	(1.728)	(25,60%)
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK *TOTAL CURRENT LIABILITIES*	**3.203.168**	**4.023.379**	**(820.211)**	**(20,39%)**
LIABILITAS JANGKA PANJANG *NON-CURRENT LIABILITIES*				
Pinjaman Bank dan Non Bank – Pihak Berelasi *Bank and Non-Bank Loans – Related Parties*	442.376	175.000	267.376	152,79%
UANG MUKA KONTRAK JANGKA PANJANG *LONG-TERM CONTRACT ADVANCES*				
Pihak Berelasi *Related Parties*	23.300	35.965	(12.665)	(35,21%)
Pihak Ketiga *Third Parties*	289.308	140.063	149.245	106,56%
Surat Hutang Jangka Menengah *Medium Term Notes*	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja *Post-Employment Benefit Liabilities*	10.591	15.278	(4.687)	(30,68%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang *Total Non-Current Liabilities*	765.575	366.306	399.269	109,00%
JUMLAH LIABILITAS *TOTAL LIABILITIES*	**3.968.743**	**4.389.685**	**(420.942)**	**(9,59%)**

Per 31 Desember 2020, Perseroan berhasil mencatatkan jumlah Liabilitas sebesar Rp3.96 triliun, turun Rp420,94 miliar atau 10% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp4,39 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp820,21 miliar atau 20,39%. Penurunan total liabilitas disebabkan adanya penurunan hutang Perseroan yaitu pelunasan Surat Hutang Jangka Menengah sebesar Rp300 miliar.

As of December 31, 2020, the Company's total liabilities reached Rp3.96 trillion, decreased by Rp420.94 billion or 10% from Rp4.39 trillion recorded in 2019. The decrease was mainly due to a decrease in current liabilities by Rp820.21 billion or 20.39%. The decrease in total liabilities was due to a decrease in the Company's payables, namely the settlement of Medium Term Notes amounting to Rp300 billion.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek di akhir tahun 2020 sebesar Rp3,20 triliun, mengalami penurunan sebesar 20,39% atau setara Rp820,21 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,02 triliun, yang terutama berasal dari penurunan hutang usaha sebesar Rp285,55 miliar atau 16,37%. Di samping itu, hutang uang muka, hutang pajak, hutang jangka menengah, hutang bruto, dan beban akrual juga turut menurun di tahun 2020. Rincian pos akun yang memengaruhi Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan Pinjaman Bank dan Non Bank disebabkan oleh peningkatan pinjaman baik dari pihak berelasi dan pihak ketiga, masing-masing mengalami kenaikan 195,75% dan 49,93% dari tahun 2019.

2. Penurunan hutang usaha, pada Pihak Berelasi 49,70% dan Pihak Ketiga 15,66% dibandingkan tahun 2019, yang disebabkan adanya pembayaran pada hutang pemasok sebesar Rp165,03 miliar atau 18,90% dan hutang subkon sebesar Rp120,52 miliar atau 13,84%.

3. Uang muka Pemberi Kerja, penurunan pada Pihak ketiga turun 40,29% dan peningkatan pada Pihak berelasi 31,01% dibandingkan tahun 2019, penurunan pihak berelasi yang disebabkan adanya pembayaran pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan dan Umum, Bank Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, kenaikan Uang Muka Pemberi Kerja dari Pihak Ketiga disebabkan adanya kenaikan proyek pekerjaan dari PT Pelindo II.

4. *Medium term notes* sebesar Rp300 Miliar menjadi liabilitas lancar dikarenakan jatuh tempo kurang dari 12 bulan, sedangkan pada tahun 2019 tidak ada MTN yang akan jatuh tempo.

5. Penurunan pada Hutang Pajak sebesar 68,93% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh penurunan PPN, PPh 21, 23, dan 29.

6. Kenaikan Hutang Ventura Bersama sebesar 9,37% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh penambahan Hutang Ventura Bersama Nindya-Pembangunan Perumahan, Karya Sarana dan Sejahtera.

7. Penurunan pada Pendapatan Diterima di muka sebesar 21,51% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh telah dibayarnya progress pekerjaan s.d selesai Proyek jaringan gas Depok-Bekasi, Gedung Poltek Pariwisata Tahap III dan PT. Telekomunikasi Selular Tbk.

CURRENT LIABILITIES

Total current liabilities of the Company at the end of 2020 amounted to Rp3.20 trillion, a decrease of 20.39% or Rp820.21 billion from Rp4.02 trillion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in accounts payable of Rp285.55 billion or 16.37%. In addition, advances payable, taxes payable, Medium Term Notes, gross amount payables, and accruals showed a downturn trend in 2020. Details of account items affecting current liabilities are as follows:

1. Bank and non-bank loans increased due to an increase in loans from related parties and third parties, which increased by 195.75% and 49.93%, respectively, compared to that of 2019.

2. Trade payables – related parties decreased by 49.70% while trade payables – third parties decrased by 15.66% compared to that of 2019, due to payment of debts to suppliers' of Rp165.03 billion or 18.90% and to subcontract of Rp120.52 billion or 13.84%.

3. Advances from customers – third parties decreased by 40.29% while advances from customers – related parties increased by 31.01% compared to that of 2019. The decrease in advances from customers – related parties was due to payment for work from the Ministry of PUPR, Bank Indonesia and the Ministry of Youth and Sports; meanwhile, the increase in advances from customers – third parties was due to an increase in work projects from PT Pelindo II.

4. Medium Term Notes of Rp 300 billion constituted the current liabilities due to the maturity of less than 12 months, while in 2019 there was no MTN that would mature.

5. Taxes payable decreased by 68,93% compared to that of 2019 due to a decrease in VAT and Income Tax Art. 21, 23, and 29.

6. Joint venture payables increased by 9.37% compared to that of 2019 due to the addition of payables for joint ventures of Nindya-Pembangunan Perumahan, Karya Sarana, and Sejahtera.

7. Unearned revenues decreased by 2151% compared to that of 2019 due to the payment of work progress until the completion of the Depok-Bekasi gas network project, Phase III Tourism Polytechnic Building and PT Telekomunikasi Selular Tbk.

8. Penurunan Hutang Bruto sebesar 30,79% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya pembayaran kepada pihak ketiga pada wilayah II, IV dan V.

9. Penurunan Beban Akrual sebesar 31,89% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh penurunan beban akrual jasa produksi dan tantiem.

10. Penurunan pada hutang lain-lain sebesar 25,60% dari tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya pembayaran hutang proyek divisi dan jaminan sewa Gedung.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang di akhir tahun 2020 sebesar Rp765,57 miliar, mengalami kenaikan 109,00% atau setara Rp399,26 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp366,31 miliar, yang terutama disebabkan berkurangnya MTN pada liabilitas jangka pendek ke liabilitas jangka panjang karena jatuh tempo MTN tersebut sudah kurang dari 12 bulan. Rincian pos akun yang memengaruhi Liabilitas Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman Bank dan Non Bank – Pihak Berelasi sebesar Rp442,37 miliar. Sedangkan tahun 2019 sebesar Rp175,00 miliar disebabkan oleh penambahan fasilitas kredit pinjaman dari Bank BNI dan tambahan limit fasilitas Non *Cash Loan* dari Bank Mandiri.

2. Penurunan uang muka kontrak Pihak Berelasi sebesar 35,21% disebabkan telah berkurangnya uang muka kontrak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Kenaikan uang muka kontrak pihak ketiga sebesar 106,56% disebabkan oleh naiknya uang muka kontrak dari Kementerian PUPR.

3. Penurunan pada Liabilitas Imbalan Pasca kerja sebesar 30,68% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh pembayaran imbalan kerja.

EKUITAS

"Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 9,99% dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan menurunnya saldo laba sebagai dampak dari penurunan Laba Tahun Berjalan."

8. Gross amount payables decreased by 30.79% compared to that of 2019 due to payments to third parties in regions II, IV and V.

9. Accruals decreased by 31.89% compared to that of 2019 due to a decrease in accrued expenses for production services and tantiem.

10. Other payables decreased by 25.60% compared to that of 2019 due to payment of division project debt and building rental guarantees.

NON-CURRENT LIABILITIES

Total non-current liabilities of the Company at the end of 2020 amounted to Rp765.57 billion, an increase of 109.00% or Rp399.26 billion from Rp366.31 billion recorded in 2019. This was mainly due to a decrease in MTN from current liabilities to non-current liabilities because the maturity of the MTN became less than 12 months. Details of account items affecting non-current liabilities are as follows:

1. Bank and non-bank loans – related parties were recorded at Rp442.37 billion while in 2019 the amount was Rp175.00 billion. This was due to the addition of a loan credit facility from Bank BNI and an additional limit for non-cash loan facility from Bank Mandiri.

2. Contract advances – related parties decreased by 35.21% due to a decrease in contract advances of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Meanwhile, contract advances – third parties increased by 106.56% due to an increase in contract advances from the Ministry of PUPR.

3. Post-employment benefits liabilities decreased by 3068% compared to that of 2019 due to the payment of employment benefits.

EQUITY

"The Company's equity decreased by 9.99% compared to that of the previous year in line with the decrease in retained earnings as a result of the decline in profit for the year."

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Modal Saham *Share Capital*	559.497	559.497	-	0,00%
SALDO LABA *RETAINED EARNINGS*				
Ditentukan Penggunaannya *Appropriated*	337.393	113.609	223.393	196,98%

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Belum Ditentukan Penggunaannya *Unappropriated*	273.550	630.584	(357.034)	(56,62%)
Surplus Revaluasi Aset Tetap *Property, Plant and Equipment Surplus Revaluation*	336.686	356.143	(19.457)	(5,46%)
JUMLAH EKUITAS YANG DIATRIBUSUKAN KEPADA : *TOTAL EQUITY ATTRIBUTABLE TO:*				
Pemilik Entitas Induk *Owners of the Parent*	1.507.126	1.659.833	(152.707)	(9,20%)
Kepentingan Non-Pengendali *Non-Controlling Interest*	10.949	26.803	(15.854)	(59,15%)
JUMLAH EKUITAS *TOTAL EQUITY*	**1.518.075**	**1.686.637**	**(168.562)**	**(9,99%)**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 tercapai Rp1,52 triliun, menurun 9,99% atau setara Rp168,56 miliar bila dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,68 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya sebesar Rp357,03 miliar atau 21,13% bila dibandingkan saldo laba tahun 2019 sebesar Rp630,58 miliar. Untuk Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penambahan cadangan wajib sebesar Rp223,39 miliar.

Total equity of the Company as of December 31, 2020 amounted to Rp1.52 trillion, a decrease of 9.99% of Rp168.56 billion from Rp1.68 trillion recorded at the end of 2019. This decrease was mainly due to a decrease in retained earnings – unappropriated by Rp357.03 billion or 21.13% compared to the retained earnings in 2019 of Rp630.58 billion. Meanwhile, there was an increase in retained earnings – appropriated due to the addition of mandatory reserves of Rp223.39 billion.

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Pendapatan Usaha *Revenues*	3.616.483	5.783.502	(2.167.019)	(37,47%)
Beban Pokok Pendapatan *Cost of Revenues*	(3.299.319)	(5.158.970)	(1.859.651)	(36,05%)
Laba Bruto *Gross Profits*	317.164	624.533	(307.369)	(49,22%)
Beban Pemasaran *Marketing Expenses*	(11.009)	(14.239)	(3.230)	(22,68%)
Beban Administrasi dan Umum *General and Administrative Expenses*	(192.814)	(204.945)	(12.131)	(5,92%)
Kerugian Penurunan Nilai *Impairment Losses*	(15.809)	(36.425)	(20.616)	(56,60%)
Beban Pajak Penghasilan Final *Final Income Tax Expenses*	(101.709)	(159.199)	(57.490)	(36,11%)
Beban Keuangan *Finance Charges*	(89.112)	(86.032)	3.080	3,58%
Bagian Laba Ventura Bersama *Share in Profit of Joint Ventures*	91.341	64.777	26.564	41,01%
Pendapatan (Beban) Lainnya *Other Income (Expenses)*	52.049	31.617	20.432	64,62%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan *Profit Before Income Tax Expenses*	50.101	220.087	(169.986)	(77,24%)

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan *Income Tax Expenses (Gain)*	7.279	4.214	3.065	72,73%
Laba Bersih Tahun Berjalan *Profit for the Year*	42.822	215.873	(173.051)	(80,16%)
Penghasilan Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income*	-	-	-	-
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI *ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS*				
Keuntungan (Kerugian) Akturial atas Liabilitas Imbalan Pasti) *Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities*	4.333	(5.984)	10.317	172,41%
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN *TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR*	**47.155**	**209.889**	**(162.734)**	**(77,53%)**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA *PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO*				
Pemilik Entitas Induk *Owners of the Parent*	50.896	223.784	(172.888)	(77,26%)
Kepentingan Non-Pengendali *Non-Controlling Interest*	(8.074)	(7.911)	(163)	2,06%
JUMLAH *TOTAL*	**42.822**	**215.873**	**(173.051)**	**(80%)**
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA *COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO*				
Pemilik Entitas Induk *Owners of the Parent*	55.275	217.790	(162.515)	(74,62%)
Kepentingan Non-Pengendali *Non-Controlling Interest*	(8.121)	(7.901)	220	2,78%
JUMLAH *TOTAL*	**47.155**	**209.889**	**(162.734)**	**(77,53%)**

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Usaha di tahun 2020 tercatat sebesar Rp3,62 triliun, mengalami penurunan 37,47% atau setara Rp2,17 triliun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5,78 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh masalah lahan dan terbatasnya kontrak baru yang tersedia dari pemberi kerja karena menurunnya nilai pekerjaan yang tersedia pada tahun 2020.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban Pokok Pendapatan mengalami penurunan sebesar 36,05% atau setara Rp1,86 triliun, dari Rp5,16 triliun di tahun 2019 menjadi Rp3,29 triliun di tahun 2020. Penurunan beban usaha sebesar 6,79% terhadap Pendapatan Usaha dikarenakan adanya kenaikan Beban Konstruksi Proyek dan Entitas Anak, yaitu kenaikan beban kontrak dikarenakan kenaikan harga *hotmix*, pekerjaan perkerasan beton semen (bahu jalan *rigid*) yang semula direncanakan menggunakan *carmix* karena jarak lokasi pekerjaan yang jauh sehingga diubah

REVENUES

The Company's revenues in 2020 were recorded at Rp3.62 trillion, a decrease of 37.47% or Rp2.17 trillion from Rp5.78 trillion recorded at the end of 2019. This decrease was due to land issues and the limited number of new contracts available from employers because of the declining value of work available in 2020.

COST OF REVENUES

In 2020, the Company recorded a decrease in cost of revenues amounting to Rp1.86 trillion or 36.05%, from Rp5.16 trillion booked in 2019 to Rp3.29 trillion. The decrease in operating expenses by 6.79% to revenues was due to an increase in project construction expenses and subsidiaries, namely an increase in contract expenses due to an increase in hot-mix prices, cement concrete pavement work (rigid road section), which was originally planned to use car-mix due to the long distance of the work location, so it was changed

dengan pembelian *readymix*. Selain itu kenaikan beban kontrak juga dikarenakan kenaikan harga aspal, semen curah, besi beton dan *overhead*.

with the purchase of ready-mix. In addition, the increase in contract expenses was also due to the increase in the price of asphalt, bulk cement, iron and concrete, and overhead costs.

URAIAN *DESCRIPTION*	2020		2019		KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
	JUMLAH (RP-JUTA) *TOTAL (RP MILLION)*	KONTRIBUSI (%) *CONTRIBUTION (%)*	JUMLAH (RP-JUTA) *TOTAL (RP MILLION)*	KONTRIBUSI (%) *CONTRIBUTION (%)*	SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Beban Pokok Penjualan Kontruksi *Cost of Goods Sold - Construction*	3.147.366	95,39%	4.961.046	96,16%	(1,813.680)	(36,56%)
Beban Pokok Penjulan Manufaktur *Cost of Goods Sold - Manufacturing*	113.476	3,44%	162.914	3,16%	(49.438)	(30,35%)
Beban Pokok Penjualan Properti *Cost of Goods Sold - Property*	22.284	0,68%	13.984	0,27%	8.300	59,35%
Beban Pokok Penjualan Sewa Alat *Cost of Goods Sold - Equipment Rental*	16.192	0,49%	21.025	0,41%	(4.833)	(22,99%)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN *TOTAL COST OF GOODS SOLD*	**3.299.318**	**100,00%**	**5.158.970**	**100,00%**	**(1.859.652)**	**(36,05)**

KOMPOSISI KONTRIBUSI SEGMEN USAHA TERHADAP BEBAN POKOK PENDAPATAN PERUSAHAAN
COMPOSITION OF CONTRIBUTION OF BUSINESS SEGMENT TO COST OF REVENUES

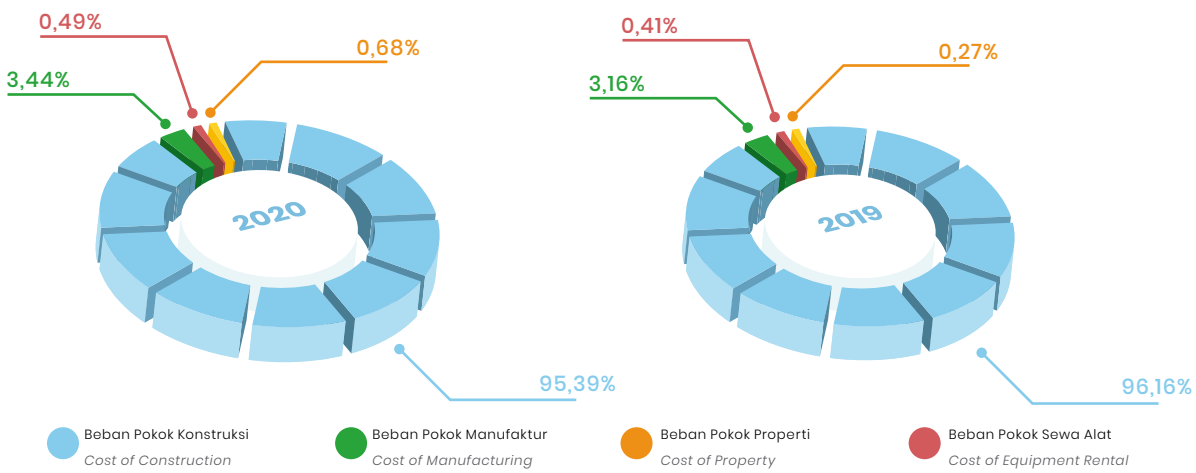

Seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di atas, seluruh segmen usaha mengalami penurunan Beban Pokok Pendapatan. Sedangkan pada segmen usaha sewa alat baru dibukukan pada tahun 2020.

As shown in the table and charts above, all business segments experienced a decrease in cost of revenues. Meanwhile, the new equipment rental business segment was only recorded in 2020.

Rincian Beban Pokok Pendapatan berdasarkan jenis beban dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Details of cost of revenues by type of expense can be seen in the table below.

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Bahan Baku *Raw Materials*	1.207.243	2.304.535	(1.097.292)	(47,61%)
Subkontraktor *Subcontractor*	1.129.402	1.263.696	(134.294)	(10,63%)
Upah *Wages*	339.059	614.832	(275.773)	(44,85%)

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Peralatan *Equipment*	229.240	475.372	(246.132)	(51,78%)
Overhead Proyek *Project Overhead*	346.308	446.679	(100.371)	(22,47%)
Biaya Pinjaman *Financial Charges*	19.661	27.494	(7.833)	(28,49%)
Penyusutan Aset Tetap *Property and Equipment Depreciation*	25.847	23.731	2.116	8,92%
Pemeliharaan Listrik dan Air *Electricity and Water Maintenance*	2.558	2.631	(73)	(2,77%)
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN *TOTAL COST OF REVENUES*	**3.299.318**	**5.158.970**	**(1.859.652)**	**(36,05%)**

Dengan nilai kenaikan Pendapatan Usaha yang lebih besar dibandingkan nilai kenaikan Beban Pokok Pendapatan yang mencatat persentase 36,05%, Laba Bruto mengalami penurunan 49% dibandingkan tahun sebelumnya.

The increase in revenues was greater than the increase in cost of revenues, which recorded a percentage of 36.05%, causing the gross profits to decrease by 49% compared to the previous year.

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan tahun 2020 tercatat sebesar Rp50,10 miliar, turun sebesar 77% atau setara Rp169,98 miliar dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp220,09 miliar. Hal-hal yang memengaruhi kenaikan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Beban Pemasaran mengalami penurunan sebesar 23% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan adanya kebijakan efisiensi.
2. Beban Administrasi dan Umum mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi sebagai dampak dari Covid-19.
3. Kerugian Penurunan Nilai mengalami penurunan sebesar 57% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan mengalami penurunan yang disebabkan mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai asersi dari manajemen.
4. Beban Pajak Penghasilan Final mengalami penurunan sebesar 36% dibandingkan tahun 2019 yang sejalan dengan penurunan pendapatan usaha.
5. Beban Keuangan mengalami kenaikan sebesar 4% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh bertambahnya pinjaman bank dan non bank jangka panjang.
6. Bagian Laba Ventura Bersama mengalami kenaikan sebesar 41% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan bertambahnya beberapa proyek ventura bersama sebesar Rp26,56 miliar.

PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES

Profit before income tax expense in 2020 was recorded at Rp50.10 billion, decreased by 77% or Rp169.98 billion from Rp220.09 billion recorded in 2019. Factors affecting the increase in profit before income tax expenses are as follows:

1. Marketing expenses decreased by 23% compared to that of 2019 due to efficiency policies.
2. Administrative and general expenses decreased by 6% compared to that of 2019 mainly due to efficiency policies as a result of Covid-19.
3. Impairment losses decreased by 57% compared to that of 2019 due to a decrease following the applicable rules and according to the assertions of management.
4. Final income tax expenses decreased by 36% compared to that of 2019, which was in line with the decrease in revenues.
5. Financial expenses increased by 4% compared to that of 2019 due to an increase in long-term bank and non-bank loans.
6. Share in profit of joint ventures increased by 41% compared to that of 2019 due to an increase in several joint venture projects of Rp26.56 billion.

7. Pendapatan (Beban) Lainnya mengalami kenaikan sebesar 65% dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh penerimaan atas proyek selesai dan keuntungan penjualan aset.

7. Other income (expenses) increased by 65% compared to that of 2019 due to receipts from completed projects and gains from sales of assets.

ARUS KAS

"Kas dan setara Kas pada akhir tahun 2020 mengalami penurunan 51,61% dibandingkan Kas dan setara Kas pada awal tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan Penerimaan Kas dari Pelanggan pada arus Kas dari aktivitas operasi, pembayaran Pinjaman Bank dan Non Bank pada arus Kas dari aktivitas Pendanaan."

CASH FLOWS

"Cash and cash equivalents at the end of 2020 decreased by 51.61% compared to the amount of cash and cash equivalents at the beginning of 2020. This decrease was mainly due to a decrease in cash received from customers in cash flows from operating activities, and in cash payments for bank and non-bank loans in cash flows from financing activities."

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi *Cash Flows from Operating Activities*	(583.271)	32.792	(616.063)	(1878,70%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi *Cash Flows from Investing Activities*	36.624	(27.720)	64.344	232,12%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flows from Financing Activities*	284.462	(35.298)	319.760	905,89%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas *Net Increase (Decrease) on Cash and Cash Equivalents*	(262.462)	(30.226)	232.236	768,33%
Dampak Selisih Kurs atas Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun *Impact from Difference in Foreign Exchange for Cash and Cash Equivalents at End of Year*	-	-	-	-
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun *Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year*	508.064	538.290	(30.226)	(5,62%)
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun *Cash and Cash Equivalents at End of Year*	245.873	508.064	(262.191)	(51,61%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Penerimaan Kas dari Pelanggan *Cash Received from Customers*	4.177.293	5.530.223	(1.352.930)	(24,46%)
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Pihak Ketiga *Cash Paid to Suppliers and Third Parties*	(4.376.990)	(5.008.314)	(631.324)	(12,61%)
Pembayaran Kas kepada Karyawan *Cash Paid to Employees*	(199.924)	(242.806)	(42.882)	(17,66%)
Penerimaan Bunga Giro dan Deposito *Cash Received from Interest and Time Deposits*	14.227	6.607	7.260	115,33%
Pembayaran Beban Bunga Pinjaman *Payments for Financial Charges*	(93.778)	(87.116)	(6.662)	7,65%
Pembayaran Pajak Penghasilan *Income Tax Payments*	(104.100)	(165.802)	(61.702)	(37,21%)
Kas Bersih Diperoleh dair dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi *Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities*	(583.271)	32.792	(616.063)	(1878,70%)

Arus Kas dari aktivitas operasi tahun 2020 tercatat negatif Rp583,27 miliar, turun 1878,70% atau setara Rp616,06 miliar bila dibandingkan dengan 2019 sebesar positif Rp32,792 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan Penerimaan Kas dari Pelanggan yang turun 24,46% atau setara Rp1,35 triliun sehingga menjadi Rp4,17 triliun di akhir tahun 2020. Penurunan Penerimaan Kas dari Pelanggan sejalan dengan adanya proyek-proyek percepatan yang dilakukan pada tahun 2020.

Cash flows provided by operating activities in 2020 was recorded as negative Rp583.27 billion, down 1878.70% or Rp616.06 billion compared to the amount recorded in 2019 at positive Rp32.79 billion. This was due to a decrease in cash received from customers by 24.46% or Rp1.35 trillion so that it became Rp4.17 trillion at the end of 2020. The decline in cash received from customers was in line with the acceleration projects carried out in 2020.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Penjualan Aset Tetap *Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment*	-	1.289	(1.289)	100,00%
Pembelian Aset Tetap *Acquisition of Property, Plant, and Equipment*	(208)	(33.600)	(33.392)	(99,38%)
Penambahan Properti Investasi *Acquisition of Investment Properties*	-	(2.484)	2.484	100,00%
Penerimaan Pencairan Laba Ventura Bersama *Cash Received from Share of the Profit of Joint Venture*	55.677	8.659	47.018	543,00%
Penambahan Aset dalam Penyelesaian *Acquisition of Assets in Progress*	(16.407)	(1.124)	15.283	1359,70%
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya *Additional of Other Long-Term Investment*	(2.436)	(369)	2.067	560,16%
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi *Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities*	36.624	(27.720)	64.344	232,12%

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi tahun 2020 tercatat sebesar positif Rp36,62 miliar, naik 232,12% atau setara Rp64,34 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar negatif Rp27,72 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan pencairan laba ventura Bersama sebesar Rp47,02 miliar.

Cash flows used in investing activities in 2020 was recorded at positive Rp36.62 billion, up 232.12% or Rp64.34 billion compared to that of 2019 recorded at negative Rp27.72 billion. This was due to cash received from share of the profit of joint venture of Rp47.02 billion.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Penerimaan Surat Hutang Jangka Menengah *Cash Payments for Medium Term Notes*	(300.000)	-	300.000	
Penerimaan Pinjaman Bank dan Non Bank *Cash Receipts from Bank and Non-Bank Loans*	4.791.658	8.671.669	3.880.011	(44,74%)
Pembayaran Pinjaman Bank dan Non Bank *Cash Payments for Bank and Non-Bank Loans*	(4.207.196)	(8.671.669)	(4.464.473)	(51,48%)
Pembayaran Dividen Tunai *Cash Dividend Payments*	-	(35.298)	-	
Kas Bersih Diperoleh dari (DIgunakan untuk) Aktivitas Pendanaan *Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities*	284.462	(35.298)	319.760	905,89%

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2020 tercatat sebesar positif Rp284,46 miliar, naik 905,89% atau setara Rp319,76 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar negatif Rp35,30 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman MTN sebesar Rp3,88 triliun.

Cash Flows provided by financing activities in 2020 was recorded at positive Rp284.46 billion, increased by 905.89% or Rp319.76 billion compared to that of 2019 which was recorded at negative Rp35.30 billion. This was mainly due to the receipt of an MTN loan of Rp3.88 trillion.

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Untuk memberikan gambaran tentang kemampuan membayar hutangnya, Perseroan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

SOLVENCY

To provide an overview of the Company's capability to pay its debts, the Company uses liquidity ratio, solvability ratio, and profitability ratio, as shown in the table below.

	2020	2019
RASIO RENTABILITAS *RENTABILITY RATIO*		
MARJIN EBITDA *EBITDA MARGIN*	8,14%	8,62%
RASIO LABA TERHADAP EKUITAS *RETURN ON EQUITY*	2,90%	14,68%
RASIO LABA TERHADAP INVESTASI *RETURN ON INVESTMENT*	5,08%	8,23%
MARJIN LABA KOTOR *GROSS PROFIT MARGIN*	8,77%	10,80%
MARJIN LABA BERSIH *NET PROFIT MARGIN*	1,18%	3,73%
RASIO LIKUIDITAS *LIQUIDITY RATIO*		
RASIO LANCAR *CURRENT RATIO*	131,78%	120,06%
RASIO CEPAT *QUICK RATIO*	33,34%	36,67%
RASIO KAS *CASH RATIO*	13,92%	17,60%
RASIO RENTABILITAS *RENTABILITY RATIO*		
RASIO LIABILITAS TERHADAP ASET *DEBT TO ASSET RATIO*	72,23%	72,24%
RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS *DEBT TO EQUITY RATIO*	0,68 kali *0,68 times*	0,44 kali *0,44 times*

RASIO LIKUIDITAS

Dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar hutang usahanya, Perseroan menggunakan Rasio Likuiditas yang terdiri dari Rasio Lancar, Rasio Cepat dan Rasio Kas. Besaran Rasio Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya.

LIQUIDITY RATIO

In measuring the ability to pay debts, the Company uses the liquidity ratio which consists of current ratio, quick ratio, and cash ratio. The liquidity ratio can be used to measure the company's ability to meet its obligations or pay its short-term debts.

Pada tahun 2020, Rasio Lancar tercatat sebesar 131,78% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 120,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset yang tersedia sedikit menurun di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Walaupun rasio lancar Perseroan menunjukkan persentase yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan tercapai lebih dari 100%, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya.

In 2020, the current ratio of the Company was recorded at 131.78%, higher than the current ratio of 2019 which was recorded at 120.06%. This shows that the Company's ability to settle its current liabilities using available assets decreased slightly in 2020 compared to in 2019. Although the Company's current ratio showed a lower percentage than the previous year and reached more than 100%, it can be concluded that the Company has a good ability to settle its liabilities.

Hal yang senada juga dicerminkan oleh Rasio Cepat yang sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 33,34% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 36,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya sedikit menurun di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Rasio Kas Perseroan di tahun 2020 sebesar 13,92% juga tercatat lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 17,60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas sedikit menurun di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Namun Manajemen beranggapan bahwa penurunan tersebut masih berada pada batas wajar.

The Company's quick ratio also showed similar performance in 2020 as the percentage recorded at the end of the year was 33.34%, lower than that of 2019 which was recorded at 36.67%. This shows that the Company's ability to settle its current liabilities slightly decreased in 2020 compared to in 2019. The Company's cash ratio in 2020 was recorded at 13.92% which was also lower than the cash ratio percentage in 2019 recorded at 17.60%. This shows that the Company's ability to settle its current liabilities using cash and cash equivalents decreased slightly in 2020 compared to in 2019. However, the Management believes that the decline is still within a reasonable limit.

RASIO SOLVABILITAS

Perseroan juga memakai Rasio Solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio Solvabilitas yang dipakai adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR).

Rasio *Debt to Equity Ratio - Interest Bearing Debt* (DER-IBD) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 0,68 kali meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,44 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya Ekuitas yang dibiayai oleh hutang di tahun 2020 telah meningkat. Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) tahun 2020 tercatat sebesar 72,23% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 72,24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa porsi Aset yang dibiayai oleh hutang di tahun 2020 belum ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019.

SOLVABILITY RATIO

The Company also uses the solvability ratio to measure the amount of assets financed by debt. The solvability ratio used is the Ratio of Debt to Equity (DER) and the Ratio of Debt to Total Assets (DAR).

The Debt to Equity Ratio – Interest Bearing Debt (DER-IBD) until the end of 2020 was recorded at 0.68 times, an increase compared to 2019 which was recorded at 0.44 times. This shows that the amount of equity financed by debt in 2020 had increased. The Debt to Total Assets Ratio (DAR) in 2020 was recorded at 72.23%, an increase compared to 2019 which was recorded at 72.24%. This shows that the portion of assets financed by debt in 2020 had not changed significantly compared to 2019.

RASIO RENTABILITAS

Kemampuan Perseroan dalam mencetak laba dapat diukur dari besaran Rasio Rentabilitas-nya. Rasio Rentabilitas adalah perbandingan yang dihitung untuk mengetahui kemampuan Perseroan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu.

RENTABILITY RATIO

The Company's ability to generate profits can be measured by the amount of its rentability ratio/profitability ratio. The rentability ratio is a comparison calculated to determine the Company's ability to earn profit from revenue related to sales, assets, and equity, based on certain measurements.

Di tahun 2020 Rasio Marjin EBITDA tercatat 8,14% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 8,62%. Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi penurunan sedikit lebih rendah atas harga pokok penjualan dan beban usaha dalam menghasilkan penjualan.

In 2020, the EBITDA margin ratio of the Company was recorded at 8.14%, lower than 8.62% recorded in 2019. This shows that there was a slightly lower decline in the cost of goods sold and operating expenses in generating sales.

Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 2,90% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 14,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk menggunakan Ekuitas yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan menurun di tahun 2020. Sedangkan Laba terhadap Investas (ROI) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 5,08% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 8,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan untuk menggunakan nilai Investasi yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan sedikit berkurang di tahun 2020. Namun Manajemen beranggapan bahwa penurunan tersebut masih berada pada batas wajar.

The Company's Return on Equity (ROE) until the end of 2020 was recorded at 2.90%, lower than 14.68% recorded in 2019. This shows that the Company's ability to use available equity to generate profits declined in 2020. Meanwhile, the Company's Return on Investment (ROI) until the end of 2020 was recorded at 5.08%, lower than 8.23% recorded in 2019. This shows that the Company's ability to use available investment value to generate profits was slightly reduced in 2020. However, the Management believes that the decline is still within a reasonable limit.

Marjin Laba Bruto (*Gross Profit Margin*) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 8,77% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 10,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam meminimalkan Beban Pokok Penjualan untuk menghasilkan Laba Bruto sedikit menurun di tahun 2020.

As of the end of 2020, the Company's gross profit margin was recorded at 8.77%, lower than that of 2019 which was recorded at 10.80%. This shows that the Company's ability to minimize cost of goods sold to generate gross profits decreased slightly in 2020.

Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar 1,18% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 3,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Manajemen telah berhasil tingkat profitabilitas Perseroan di tahun 2020.

Meanwhile, the net profit margin of the Company at the end of 2020 was recorded at 1.18%, lower than that of 2019 which was recorded at 3.73%. This shows that the Management succeeded in maintaining the profitability level of the Company in 2020.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam mengukur tingkat kolektibilitas piutang, Perseroan menggunakan indikator *Collection Period*. Indikator ini digunakan untuk mengukur periode rata rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

In measuring the collectability rate of receivables, the Company uses the collection period indicator. This indicator aims to measure the average period required to collect receivables (in days). This indicator can be used to measure the Company's ability to collect receivables within a certain period of time.

URAIAN *DESCRIPTION*	2020	2019
Collection Period (Hari) *Collection Period (Days)*	14 hari *14 days*	18 hari *18 days*

Kemampuan kolektibilitas piutang Perusahaan tahun 2020 sebesar 14 hari, terdapat penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan tahun 2020 telah meningkat. Perusahaan mampu menagih dengan cepat setiap piutang usaha pada pelanggan.

The collectability rate of the Company's receivables in 2020 was 14 days, a decrease compared to that of 2019. This shows that the collectability rate of the Company's receivables in 2020 has increased. The Company is able to quickly collect any accounts receivable from customers.

Perseroan telah menerapkan langkah-langkah strategi untuk mempercepat kolektibilitas piutang, antara lain: memperoleh proyek dengan sumber pendanaan yang jelas & lancar (sumber APBD/ APBN dan BUMN), percepatan proses penagihan ke pemberi kerja dan memproses secara hukum jika ada piutang terlambat/macet.

The Company has implemented several strategic steps to accelerate its collectability rate of receivables, including: obtaining projects with clear and good funding sources (sources from Regional Budget (APBD)/State Budget (APBN) and from SOEs), accelerating the collection process to employers, and carrying out legal process in the event of a delay in receivables collectability.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR MODAL PERSEROAN

Struktur modal Perseroan tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019 yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas adalah sebagai berikut.

CAPITAL STRUCTURE

The Company's capital structure in 2020 and its comparison with 2019, consisting of interest-based debt and equity, is as follows:

STRUKTUR MODAL *CAPITAL STRUCTURE*	2020	2019
	JUMLAH *TOTAL*	JUMLAH *TOTAL*
Jumlah Utang *Total Debts*	3.968.742	4.389.685
Dikurangi Kas dan Setara Kas *Less Cash and Cash Equivalents*	245.880	508.064
Utang Neto *Net Debt*	3.722.862	3.881.621
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	1.518.075	1.686.637
Jumlah Struktur Permodalan *Total Capital Structure*	5.240.937	5.568.258
Rasio Utang terhadap Modal *Debt to Equity Ratio*	0,68	0,44

KOMPOSISI STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE COMPOSITION

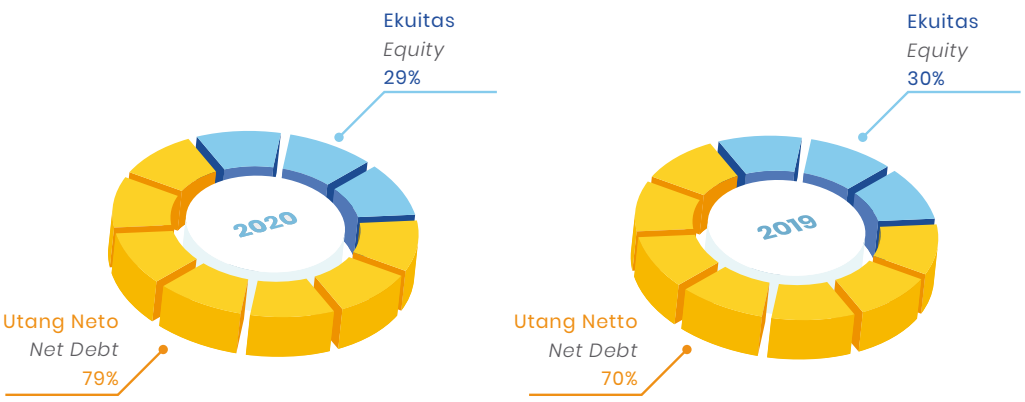

KOMPOSISI STRUKTUR MODAL *CAPITAL STRUCTURE COMPOSITION*	2020	2019
Ekuitas *Equity*	28,97%	30,29%
Utang Neto *Net Debt*	71,03%	69,71%

Seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di atas, struktur modal Perseroan tahun 2020 tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan tahun 2019.

As shown in the table and charts above, there was no significant change in the Company's capital structure in 2020 from the previous year.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Tujuan dari Perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perseroan memonitor dengan dasar rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dari utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. selama tahun 2020 strategi Perseroan adalah mempertahankan rasio utang terhadap modal pada batas bawah dari kisaran 2,00 sampai dengan 5,50.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Company's objective in managing capital is to protect its ability to maintain business continuity, so that it can continue to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders. The Company also aims to provide adequate returns to all shareholders by determining the prices of products and services that are in line with the risk level.

The Company determines a certain amount of capital in proportion to risk, manages the capital structure, and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets. Consistent with other companies in the industry, the Company monitors its capital on a debt-to-equity ratio basis. This ratio is calculated from net debt divided by adjusted capital. Net debt is the total debts (as stated in the statements of financial position) less cash and cash equivalents. During 2020 the Company's strategy has been to maintain the debt to equity ratio at the lower limit within the range of 2.00 to 5.50.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI

Di tahun 2020, Perseroan beberapa kali melakukan investasi melalui penambahan kepemilikan saham pada entitas penyertaan saham, PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, dengan rincian sebagai berikut:

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT

In 2020, the Company made several investments by increasing share ownership at PT Jasamarga Kunciran Cengkareng, the Company's investment company, with the following details:

PERIODE *PERIOD*	JUMLAH INVESTASI *TOTAL INVESTMENTS*		
	SEBELUM PENYERTAAN *PRIOR TO INVESTMENT*	PENYERTAAN *INVESTMENT*	SETELAH PENYERTAAN *POST-INVESTMENT*
SD TRIWULAN IV *UP TO 4TH QUARTER*			

PERIODE *PERIOD*	JUMLAH INVESTASI *TOTAL INVESTMENTS*		
	SEBELUM PENYERTAAN *PRIOR TO INVESTMENT*	PENYERTAAN *INVESTMENT*	SETELAH PENYERTAAN *POST-INVESTMENT*
Lembar Saham *Number of Shares*	100.518.141	5.393.134	105.911.275
Nominal	914,72 miliar/*billion*	13,49 miliar/*billion*	265,06 miliar/*billion*

INFORMASI MATERIAL LAINNYA TERKAIT EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Di sepanjang tahun 2020 tidak terdapat adanya informasi material terkait ekspansi bisnis, divestasi saham, penggabungan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang/modal.

OTHER MATERIAL INFORMATION ON EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR CAPITAL/DEBT RESTRUCTURING

There was no business expansion, divestment, merger, acquisition, and/or capital/debt restructuring carried out in 2020. Hence, information on this issue is not available.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Perseroan memiliki beberapa ikatan material untuk investasi barang modal yang berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan, khususnya di masa depan. Berikut disampaikan ikatan material tersebut, di mana Pihak 1 merupakan pemberi kerja dan Pihak 2 adalah Perseroan

The Company has several material commitments for capital goods investments that affect the Company's income, especially in the future. The following table presents the Company's material commitments, in which the 1st Party is the employer and the 2nd Party is the Company.

PIHAK 1 *1ST PARTY*	PIHAK 2 *2ND PARTY*	TUJUAN IKATAN *PURPOSE OF COMMITMENT*	SUMBER DANA *SOURCE OF FUNDS*	MATA UANG *CURRENCY*	PROTEKSI RISIKO MATA UANG *PROTECTION AGAINST CURRENCY RISK*
PT PPA (Persero)	PT. Nindya Karya	Modal Kerja	Kredit Pembiayaan *Financing Credit*	Rupiah	Tidak Ada *None*

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Realisasi investasi barang modal di sepanjang tahun 2020 adalah aset dalam Penyelesaian sebesar Rp12.879 juta

The realization of capital goods investment over the course of 2020 was for assets in progress amounting to Rp12,879 million.

Perbandingan nilai investasi barang modal tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Comparison of values of capital goods investment between 2020 and 2019 is described in the following table:

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Realisasi Barang Modal *Realization of Capital Goods*	12.879	71.264	(58.385)	81,93%

PERBANDINGAN ANTARA TARGET ANGGARAN DENGAN REALISASI, DAN PROYEKSI USAHA

COMPARISON BETWEEN TARGETS BUDGET WITHIN RESULTS AND BUSINESS PROJECTION

URAIAN *DESCRIPTION*	REALISASI 2020 *REALIZATION IN 2020*	TARGET 2020	PENCAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET 2020 *ACHIEVEMENT OF REALIZATION TO TARGET 2020*	PROYEKSI 2021 *PROJECTION FOR 2021*	PROYEKSI 2021 TERHADAP REALISASI 2020 *PROJECTION FOR 2021 TO REALIZATION IN 2020*	PROYEKSI 2021 TERHADAP TARGET 2020 *PROJECTION FOR 2021 TO TARGET 2020*
KONTRAK PEKERJAAN TERSEDIA *WORK ON HAND*						
Kontrak Lama *Existing Contract*	6.894.324	6.745.641	102,20	6.199.508	89,92	91,90
Kontrak Baru *New Contract*	5.850.681	5.110.510	114,48	7.746.606	132,41	151,58
JUMLAH *TOTAL*	**12.745.005**	**11.856.151**	**107,50**	**13.946.114**	**109,42**	**117,63**
LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN *CONSOLIDATED PROFIT(LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*						
Pendapatan Usaha *Revenues*	3.616.483	4.218.993	85,72	5.377.790	148,70	127,47
Beban Pokok Pendapatan *Cost of Revenues*	3.299.319	3.813.709	86,51	4.798.213	145,43	125,81
Laba Bruto *Gross Profits*	317.164	405.284	78,26	579.577	182,74	143,01
Beban Usaha *Operating Expenses*	203,823	222.256	91,71	265.865	130,44	119,62
Laba Usaha *Operating Profits*	113.341	183.028	61,93	313.712	276,79	171,40
Jumlah Pendapatan (Beban) *Total Income (Expenses)*	63.240	135.806	47	253.301	400,54	186,52
Laba Sebelum Pajak *Profit Before Tax*	50.101	47.222	106,10	60.411	120,58	127,93
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan *Income Tax Expenses (Gain)*	7.279	4.500	161,76	5.311	72,96	118,02
Laba Bersih Tahun Berjalan *Profit for the Year*	42.822	42.722	100,23	55.100	128,67	128,97
MARGIN LABA BERSIH (%) *NET PROFIT MARGIN (%)*	**1,18%**	**1,01%**	**0,17**	**1,02**	**86,44**	**100,99**
POSISI KEUANGAN *FINANCIAL POSITION*						
Aset Lancar *Current Assets*	4.221.245	3.930.839	107,39	4.081.461	96,69	103,83
Aset Tidak Lancar *Non-Current Assets*	1.265.572	1.461.538	86,59	2.133.930	168,61	146,01
JUMLAH ASET *TOTAL ASSETS*	**5.486.818**	**5.392.376**	**101,75**	**6.215.391**	**113,28**	**115,26**
LIABILITAS DAN EKUITAS *LIABILITIES AND EQUITY*						
Liabilitas Jangka Pendek *Current Liabilities*	3.203.168	2.790.249	114,80	3.050.021	95,22	109,31

URAIAN *DESCRIPTION*	REALISASI 2020 *REALIZATION IN 2020*	TARGET 2020	PENCAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET 2020 *ACHIEVEMENT OF REALIZATION TO TARGET 2020*	PROYEKSI 2021 *PROJECTION FOR 2021*	PROYEKSI 2021 TERHADAP REALISASI 2020 *PROJECTION FOR 2021 TO REALIZATION IN 2020*	PROYEKSI 2021 TERHADAP TARGET 2020 *PROJECTION FOR 2021 TO TARGET 2020*
Liabilitas Jangka Panjang *Non-Current Liabilities*	765.575	1.166.777	65,61	1.678.559	219,25	143,86
JUMLAH LIABILITAS *TOTAL LIABILITIES*	**3.968.743**	**3.957.026**	**100,30**	**4.728.580**	**119,15**	**119,50**
SALDO LABA *RETAINED EARNINGS*						
Ditentukan Penggunaannya *Appropriated*	337.392	113.609	296,98	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya *Unappropriated*	273.550	378.582	72,26	-	-	-
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	1.518.074	1.435.351	105,76	1.486.810	97,94	103,59
JUMLAH LIABLITAS DAN EKUITAS *TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*	**5.486.817**	**5.392.376**	**101,75**	**6.215.291**	**113,28**	**115,26**

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI TAHUN 2020 DENGAN TARGET 2020

Jika dibandingkan target pada RKAP tahun 2020, realisasi Pendapatan Usaha tahun 2020 mencatat pencapaian 85,72%. Pencapaian ini tercermin dari realisasi operasi terhadap target RKAP 2020, di mana realisasi perolehan proyek baru tahun 2020 membukukan pencapaian 114,48% terhadap target tahun 2020, dan Kontrak Pekerjaan Tersedia mencapai 107,50% terhadap target tahun 2020. Beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah:

FAKTOR EKSTERNAL

1. Tertundanya tender-tender yang diharapkan di tahun 2020 yang disebabkan adanya kebijakan penundaan oleh pemberi kerja.
2. Kendala progres penyelesain proyek yang disebabkan oleh beberapa hal salah satunya seperti pembebasan lahan.

FAKTOR INTERNAL

Tidak terdapat adanya faktor *Internal* yang signifikan yang mempengaruhi pencapaian kinerja 2020.

PROYEKSI TAHUN 2021

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 sesuai dengan asumsi dasar RAPBN tahun 2021 adalah sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND RESULTS IN 2020

The realization of revenues in 2020 reached 85.72% of the target set in the 2020 RKAP. This achievement is reflected in the realization of operations compared to the 2020 RKAP target, in which the realization of tender participated in 2020 reached 114.48% of the 2020 targets, and the available work contracts reached 107.50% of the 2020 targets. Several factors leading to this achievement are as follows:

EXTERNAL FACTORS

1. The delay of expected tenders in 2020 due to the implementation of 'delay policy' by the employer.
2. Obstacles in the progress of project completion due to several issues; one of which is land acquisition.

INTERNAL FACTORS

There were no significant internal factors that affected the Company's performance in 2020.

PROJECTION FOR 2021

The Company has prepared its Work Plan and Budget (RKAP) for 2021 by referring to the basic assumptions in the 2021 State Budget Draft as follows:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah 5,0%.
2. Nilai tukar Rupiah adalah Rp14.600 per dollar Amerika Serikat.
3. Inflasi sebesar 3,0%.
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar 7,29%.
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 45 per barel.
6. *Lifting* minyak 705 ribu barel per hari dan *Lifting* Gas 1.007.

1. Economic growth of 5.0%.
2. Rupiah exchange rate of Rp14,600 per US dollar.
3. Inflation rate of 3.0%.
4. Interest rate of State Treasury Bills (SPN) of 7.29%.
5. Price of Indonesian crude oil (ICP) reaches USD 45 per barrel.
6. Oil lifting of 705 thousand barrels per day while gas lifting reaches 1,007.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACT SUBSEQUENT TO BALANCE SHEET DATE

Tidak terdapat adanya informasi fakta yang bersifat material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan pada 20 Februari 2021.

There was no material information and fact that occurred subsequent to balance sheet date (20 February 2021).

DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

IMPACT OF FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATE

Tidak terdapat dampak nilai tukar yang secara langsung dapat diidentifikasi ke dalam *instrument* keuangan Perseroan, kecuali yang diakibatkan risiko sistematik adalah utang bank yang dipercepat pelunasannya. Jika ada, maka instrumen keuangan yang berpotensi mempunyai risiko ini adalah piutang usaha, piutang ventura bersama, piutang retensi, tagihan bruto. Perseroan mengelola risiko ini dengan memindahkan risiko tersebut ke subkontraktor.

There was no impact from exchange rate that can be directly identified on the Company's financial instruments, except those caused by systematic risks, i.e., accelerated repayment of bank loans. If any, the financial instruments with the potential to have this risk are accounts receivable, joint venture receivables, retention receivables, and gross amount due from customers. The Company manages this risk by transferring the risk to subcontractors.

PROSPEK USAHA DAN RENCANA PENGEMBANGAN BISNIS

BUSINESS OUTLOOK AND BUSINESS DEVELOPMENT PLAN

Prospek usaha Perseroan yang cukup baik terlihat dari program percepatan perekonomian oleh Pemerintah Indonesia, yang tercermin dari pembangunan infrastruktur berupa alokasi belanja negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

The Company's business outlook remains bright as seen from the economic acceleration program by the Indonesian government, which is reflected in infrastructure development in the form of state expenditure allocations of the Ministry of Public Works and Public Housing.

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2021
ALLOCATION FOR 2021 STATE BUDGET

URAIAN *DESCRIPTION*	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2021 *ALLOCATION FOR 2021 STATE BUDGET*
Total Alokasi 2021 di Bidang Infrastruktur *Total Allocation of 2021 in Infrastructure Sector*	Rp417,4 triliun/*trillion*

URAIAN *DESCRIPTION*	ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2021 *ALLOCATION FOR 2021 STATE BUDGET*
DAK Fisik *DAK Physical*	Rp65,25 triliun/*trillion*
Investasi Pemerintah (PMN & LMAN) *Government Investment (PMN & LMAN)*	Rp187,18 triliun/*trillion*
Kementerian PURP *Ministry of PUPR*	Rp149,81 triliun/*trillion*
Kementerian HUB *Ministry of Transportation*	Rp45,6 triliun/*trillion*

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Source: Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Alokasi belanja negara atas infrastruktur di atas tak lepas dari target dan sasaran pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan hingga bendungan.

The allocation of state spending on infrastructure above cannot be separated from the targets of infrastructure development, covering road construction up to dam construction.

RENCANA PENCAPAIAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR

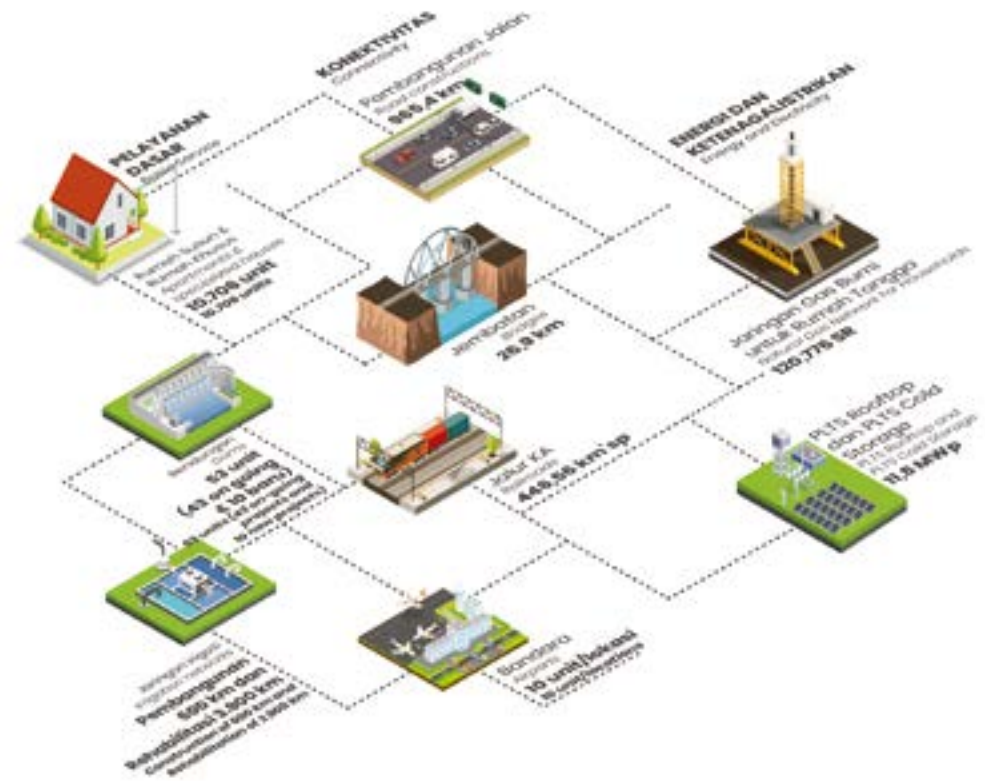

Sebagai BUMN dengan jasa konstruksi yang meliputi cakupan target dan sasaran di atas, Perseroan memandang optimis tahun 2021 untuk dapat menumbuhkan bisnisnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan menyusun RKAP tahun 2021 dengan menggunakan asumsi dasar RAPBN tahun 2021 yang mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0%; nilai tukar Rupiah Rp14.600 per Dolar AS, inflasi sebesar 3,0%, suku bunga surat Perbendaharaan Negara sebesar 7,29%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD/barel, serta *Lifting* minyak 705 ribu barel per hari dan *Lifting* gas 1.007 ribu barel setara minyak per hari.

As an SOE engaging in construction services for the above targets, the Company is optimistic that its business will continue to grow in 2021. As previously explained, the Company prepares the 2021 RKAP using the basic assumptions of the 2021 State Budget Draft, which includes economic growth of 5.0%, Rupiah exchange rate of Rp14,600 per US dollar, inflation rate of 3.0%, Interest rate of State Treasury Bills (SPN) of 7.29%, price of Indonesian crude oil (ICP) reaches USD 45 per barrel, and oil lifting of 705 thousand barrels per day while gas lifting reaches 1,007 thousand barrels of oil equivalent per day.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas dan dasar perhitungan serta identifikasi *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* (SWOT) yang dimiliki, Perseroan memroyeksikan lelang yang diikuti sebesar Rp27,55 triliun. dari jumlah tersebut diharapkan dapat dimenangkan sebesar Rp7,56 triliun atau senilai 101,57% dan tanpa lelang sebesar Rp182,18 miliar. Proyeksi perolehan kontrak baru pada tahun 2021 sebesar Rp7,74 triliun, lebih besar dibandingkan dengan realisasi perolehan proyek baru tahun 2020 sebesar Rp5,85 triliun.

Agar dapat mencapai target tersebut, manajemen berupaya untuk menerapkan strategi dan terobosan baru untuk merespons peluang pasar industri konstruksi. Hal ini selaras dengan target yang akan dicapai dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017-2021, di mana Perusahaan dalam tahap "Pertumbuhan".

In line with the assumptions above and the basis for calculating and identifying Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), the Company projects the value of tenders to be participated at Rp27.55 trillion. Of this amount, the Company expects to win tendered projects with total values of Rp7.56 trillion or 101.57% and non-tendered projects with total values of Rp182.18 billion. The projected acquisition of new contracts in 2021 is Rp7.74 trillion, higher than the realization of acquisition of new projects in 2020 of Rp5.85 trillion.

In order to achieve this target, the management seeks to implement new strategies and breakthroughs to respond to market opportunities in the construction industry. This is in line with the targets to be achieved in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2017-2021, where the Company is in the "Growth" stage.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

PANGSA PASAR

Pangsa pasar Perseroan adalah proyek-proyek infrastruktur nasional di bidang pengairan dan irigasi, jalan dan jembatan, bangunan dan gedung, pelabuhan dan bandara, EPC yang berasal dari Kementerian PUPR (Pemerintah Pusat), Pemerintah daerah, BUMN dan Swasta.

Perseroan juga memetakan pangsa pasar berdasarkan tender yang diikuti dan dimenangkan oleh Perseroan. Pertumbuhan bisnis konstruksi pada tahun 2020 masih tumbuh dengan terbatas, yang tercermin dari tender-tender proyek yang masih terbatas. Dengan perolehan proyek baru yang hanya mencapai 30% dari tender yang diikuti, Perseroan tetap berusaha memperoleh proyek sebanyak-banyaknya dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian.

MARKET SHARE

The Company's market share is the national infrastructure projects in the fields of irrigation, roads and bridges, buildings, ports and airports, and EPC originating from the Ministry of PUPR (Central Government), regional governments, SOEs, and private sector.

The Company has also mapped its market share based on the tenders in which the Company participated in and won. The growth of construction business in 2020 was still limited as reflected in the limited number of project tenders. With the acquisition of new projects that only reached 30% of the tenders participated in, the Company will continue to make efforts to obtain as many projects as possible while continuously taking into account the principle of prudence.

URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	2019 (RP-JUTA) *(RP MILLION)*	KENAIKAN (PENURUNAN) *INCREASE (DECREASE)*	
			SELISIH *DIFFERENCE*	PERSENTASE *PERCENTAGE*
Nilai Tender Diikuti *Value of Tendered Projects Participated in*	28.211.167	22.449.983	5.761.184	25,66%
Nilai Tender Dimenangkan *Value of Tendered Projects Won*	5.514.843	4.850.881	663.962	13,69%
Nilai Tanpa Lelang *Value of Non-Tendered Projects*	335.838	259.629	76.209	29,35%

Jumlah nilai tender yang diikuti tahun 2020 mencapai sebesar Rp28,21 triliun, meningkat Rp5,76 triliun atau 26% dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah nilai tender sebesar Rp22,44

The total value of tenders participated in 2020 reached Rp28.21 trillion, an increase of Rp5.76 trillion or 25.66% from Rp22.44 trillion recorded in 2019. Of the value of tender participated in, the

triliun. Dari nilai tender yang diikuti tersebut, nilai tender yang dimenangkan tahun 2020 sebesar Rp5,5 triliun atau 14% terhadap jumlah nilai tender yang diikuti di tahun 2020. Komposisi ini relatif tidak meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan komposisi sebesar 14%.

Jumlah nilai proyek baru tahun 2020 sebesar Rp5,85 triliun terdiri atas lelang yang dimenangkan tahun 2020 sebesar Rp5,51 triliun dan tanpa lelang tahun 2020 sebesar Rp335,83 miliar. Jumlah nilai tender yang dimenangkan mengalami peningkatan Rp663,96 miliar atau 14%, dari Rp4,85 triliun di tahun 2019 menjadi Rp5,51 triliun di tahun 2020.

STRATEGI PEMASARAN

Kegiatan pengembangan pemasaran atas layanan Perseroan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan produk dalam rangka diversifikasi usaha melalui investasi di bidang energi, elektrifikasi, properti dan infrastruktur perhubungan.
2. Penetrasi pasar pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
3. Penetrasi pasar swasta dan proyek *turnkey* secara selektif.

value of tender won in 2020 was Rp5.5 trillion or 13.69%. This composition relatively remained the same compared to 2019 which recorded a composition of 14%.

The total value of new projects in 2020 was Rp5.85 trillion consisting of tendered projects won in 2020 amounting to Rp5.51 trillion and non-tendered projects won in 2020 amounting to Rp335.83 billion. The total value of tenders won increased by Rp663.96 billion or 13.69%, from Rp4.85 trillion in 2019 to Rp5.51 trillion in 2020.

MARKETING STRATEGY

The marketing development activities for the Company's services in 2020 were as follows:

1. Product development in the context of business diversification through investment in energy, electrification, property, and transportation infrastructure.
2. Market penetration into Public Private Partnership (PPP) Projects.
3. Selective penetration into private markets and turnkey projects.

TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA

OTHER FINANCIAL REVIEW

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN INFORMASI TENTANG PEMBAGIANNYA

DASAR KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Sebagai badan usaha yang bertujuan untuk menciptakan nilai bagi seluruh Pemegang saham, Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan hak seluruh Pemegang saham dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham, pengambilan keputusan besaran dividen senantiasa mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu besaran laba bersih Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, serta kebutuhan modal dalam rangka pengembangan usaha.

Dasar pembagian dividen kepada pemegang saham diatur dalam anggaran dasar Perusahaan, terakhir disahkan melalui akta No. 39 tahun 2013 yang dibuat di hadapan Khairina SH., notaris di

DIVIDEND POLICY AND INFORMATION ABOUT DISTRIBUTION

BASIS OF DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

As a business entity aiming to create added values for all shareholders, the Company has a policy to provide rights to all shareholders in the form of cash, at least once a year. Without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders, the decision-making process on the amount of dividends always considers several aspects, namely the Company's total net profit, financial condition, and capital requirements for business development.

The basis for dividend distribution to the shareholders is regulated in the Company's articles of association, which was most recently approved through Deed No. 39 of 2013 drawn up

Jakarta, jo. akta No. 68 tahun 2020 yang dibuat di hadapan notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa di Jakarta.

before Khairina SH., a notary in Jakarta, jo. Deed No. 1 of 2008 drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, a otary in Jakarta.

PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN 2020 DAN KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIVIDEN

Hingga 31 Desember 2020 PT Nindya Karya (Persero) menetapkan untuk tidak melakukan pembagian dividen. Sehinga tidak terdapat informasi mengenai deviden kas yang dibagikan, rasio yang dibagikan, tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran.

Kronologis pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2014 untuk hasil usaha tahun 2013, hingga tahun 2020 untuk hasil usaha tahun 2019 adalah sebagai berikut;

DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2020 AND CHRONOLOGY OF DIVIDEND DISTRIBUTION

Up to December 31, 2020, PT Nindya Karya (Persero) has determined to not distribute dividends. Hence, there is no information on cash dividends distributed, ratio of distribution, announcement date, and payment date.

The chronology of dividend distributions from 2014 (for the results of operations in 2013) to 2020 (for the results of operations in 2019) is as follows:

TAHUN PEMBAGIAN *YEAR OF DISTRIBUTION*	TAHUN DIVIDEND *DIVIDEND YEAR*	TANGGAL PENGUMUMAN *ANNOUNCEMENT DATE*	TANGGAL PEMBAYARAN *DISTRIBUTION DATE*	DIVIDEN KAS YANG DIBAGIKAN (RP JUTA) *CASH DIVIDEND DISTRIBUTED (RP MILLION)*	RASIO PEMBAGIAN DIVIDEN (%) *DIVIDEND DISTRIBUTION RATIO (%)*
2020	2019	-	-	-	-
2019	2018	27 Mei 2019 *May 27, 2019*	26 Juli 2019 (Negara) *July 26, 2019 (State)* 20 Juli 2019 (PPA Tahap I) *July 20, 2019 (PPA Stage I)* 27 Agustus 2019 (PPA Tahap II) *August 27, 2019 (PPA Stage II)* 1 Oktobe Oktober 2019 (PPA Tahap III) *October 1, 2019 (PPA Stage III)*	Rp35.650 miliar/*billion*	12,97%
2018	2017	15 Mei 2018 *May 15, 2018*	5 Juni 2018 *June 5, 2018*	17.500	15%
2017	2016	Sesuai keputusan para Pemegang Saham yang tertuang dalam RUPS, Perseroan tidak membagikan dividen karna saldo laba ditahan yang terbukukan negatif. *In accordance with the Shareholders' resolution as stated in the GMS, the Company did not distribute dividends because the retained earnings balance recorded was negative.*			
2016	2015				
2015	2014				
2014	2013				

KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

CONTRIBUTION TO THE STATE

Sebagai entitas usaha yang bergerak di wilayah indonesia, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk perpajakan. Komitmen perpajakan yang dilakukan Perseroan juga menjadi bagian dari kontribusi Perseroan terhadap negara. Berikut disampaikan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan Perusahaan di tahun 2019 dan 2020.

As a business entity operating in the territory of Indonesia, the Company is committed to complying with all applicable regulations, including taxation. The tax commitment made by the Company is also part of its contribution to the country. The following is a summary of the fulfillment of tax obligations carried out by the Company in 2019 and 2020.

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	REALISASI TAHUN 2019 *REALIZATION IN 2019*	REALISASI TAHUN 2020 *REALIZATION IN 2020*	PERBANDINGAN (%) *COMPARISON (%)*
1	Pajak *Tax*	965.353	633.407	65,61

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PLAN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau manajemen (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait ESOP/MSOP yang dilakukan Perseroan.

Up to the end of 2020, the Company has not established any Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP). Hence, information related to this matter is not available.

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION ON THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Sejak berdirinya hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga tidak menerbitkan obligasi yang mewajibkan Perseroan melaporkan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Since its incorporation up to December 31, 2020, the Company has not executed an Initial Public Offering. Furthermore, the Company has not issued any obligations requiring it to report the use of proceeds from public offering of obligations. Hence, information related to the use of proceeds from public offering is not available.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait didefinisikan sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
   - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan.

POLICIES ON RELATED PARTIES

The Company carries out transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 on "Disclosure of Related Parties". Related parties are a person or entity that is related to the reporting entity/ Company as defined below:

a. A person or close member of the person's family is related to the Company if that person:
   - Has control or joint control over the reporting entity;

- Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan.
- Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:

- Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
- Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
- Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun *Internasional*. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang

- Has significant influence over the reporting entity; or
- Is a member of the key management personnel of the Company or of a parent entity of the Company.

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:

- The entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
- Both entities are joint ventures from the same third party;
- One entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company, or an entity related to the Company. If the Company in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the Company;
- The entity was controlled or jointly controlled by a person identified in point (a) ; or
- A person identified in 1 has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international. Government-related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by

dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE Ministry as a shareholder's representative.

NAMA PIHAK BERTRANSAKSI, SIFAT HUBUNGAN AFILIASI, SIFAT TRANSAKSI SERTA ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi untuk transaksi Perusahaan di sepanjang tahun 2020.

NAME OF COUNTERPARTIES, NATURE OF AFFILIATIONS, NATURE OF TRANSACTIONS, AND REASONS FOR TRANSACTIONS

The following table states the name of counterparties, as well as the nature of affiliations for the Company's transactions during 2020:

PIHAK YANG BERELASI *RELATED PARTY*	SIFAT HUBUNGAN *NATURE OF RELATIONSHIP*	SIFAT TRANSAKSI *NATURE OF TRANSACTION*
PT Pertamina	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Bhanda Ghara Reksa	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Hakaaston	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Angkasa Pura II	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Krakatua Steel	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Pertamina Eksplorasi	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT DOK dan Perkapalan	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Pupuk Kalimantan Timur	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Hutama Karya	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*
PT Waskita Karya	Berelasi *Related*	Pengadaan Wajar *Fair Procurement*

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan, baik dengan Pihak Berelasi maupun dengan Pihak Ketiga dilakukan melalui proses dan mekanisme pengadaan yang wajar, sesuai dengan yang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

EXPLANATION OF THE FAIRNESS OF TRANSACTIONS

All transactions of the Company, both with related parties and with third parties, are carried out through a fair procurement process and mechanism in accordance with the prevailing laws and regulations.

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Sama seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga maupun transaksi lainnya, transaksi pihak berelasi dilakukan dalam rangka pengelolaan operasional dan bisnis Perseroan; termasuk di antaranya pendapatan serta pinjaman bank maupun penempatan dana di bank.

REASONS FOR TRANSACTIONS

Similar to transactions with third parties and other transactions, related party transactions are carried out in the context of managing the Company's operations and business; including income and bank loans as well as placement of funds in banks.

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI TAHUN 2020

Berikut saldo dan realisasi transaksi pihak berelasi per 31 Desember 2020.

REALIZATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN 2020

The following is the balance and realization of related party transactions as of December 31, 2020.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses *review* dan *audit* oleh pihak auditor *Interna*l dan eksternal. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

COMPANY'S POLICY REGARDING TRANSACTION REVIEW MECHANISM

The fairness of transactions and compliance with regulations on related party transactions have gone through a review and audit process by internal and external auditors. The Company conducts transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 on Disclosure of Related Parties.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

FULFILLMENT OF RELEVANT REGULATIONS AND CONDITIONS

Fulfillment of relevant regulations and provisions, namely Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, is carried out through the disclosure of PSAK 7 on "Disclosure of Related Parties" in the Company's 2019 financial statements, which have been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING RARE AND EXTRAORDINARY EVENTS

Perseroan tidak mendapatkan adanya informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2020.

There were no rare and extraordinary events that occurred over the course of 2020. Hence, the financial information regarding this matter is not available.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACTS ON THE COMPANY

Tidak terdapat perubahan atas peraturan dan perundang-undangan di tahun 2020 yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan.

There were no changes in the laws and regulations in 2020, which have significant impacts on the Company.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THE IMPACT ON THE COMPANY

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN DITERAPKAN DI TAHUN 2020 *CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES IMPLEMENTED IN 2020*	DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN *IMPACT ON THE COMPANY*
PSAK 22 (Penyesuaian 2018): " Kombinasi Bisnis" *PSAK 22 (Improvement 2018): "Business Combination"*	Tidak memiliki dampak signifikan bagi laporan keuangan. *No significant impact on financial statements.*
PSAK 24 (Amandemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program" *PSAK 24 (Amendment 2018):"Employee Benefit regarding Plan Amendment, curtailment or Settlement"*	
PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman" *PSAK 26 (Improvement 2018): "Borrowing Cost"*	
PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan" *PSAK 46 (Improvement 2018): "Income Taxes"*	
PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama" *PSAK 66 (Improvement 2018): "Joint Arrangement"*	
ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka" *ISAK 33 "Foreign Currency Transaction and Advance Consideration"*	
ISAK 34 "Ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan" *ISAK 34 "Uncertainly Over Income Tax Treatments"*	

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Dalam mengukur kelangsungan usaha, Perseroan menggunakan surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian tingkat Kesehatan BUMN. Kebijakan Kementerian BUMN ini memberikan perangkat dan metode untuk mengukur tingkat kesehatan Perseroan yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Melalui pengukuran dan penilaian tingkat kesehatan tersebut, manajemen mendapatkan rekomendasi tentang hal-hal potensial yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan pada tahun buku yang diukur.

Laporan Kinerja Perusahaan tahun buku 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Audit tersebut meliputi evaluasi kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta perbandingan antara realisasi tahun 2020 dan target anggaran yang tertuang dalam RKAP 2020. Dalam Laporan Kinerja Perusahan, data keuangan telah termasuk nilai penyertaan dan/atau pendapatan (kerugian) dari penyertaan di entitas anak yang diperhitungkan atas dasar metode ekuitas yang telah diaudit, dan

COMPANY HEALTH INDEX

In measuring business continuity, the Company uses the Decision of Minister of SOEs No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding Assessment on the Health Index of SOEs. This policy of the Ministry of SOEs provides a tool and method to measure the health level of the Company, which includes the financial aspects, operational aspects, and administrative aspects. Through the measurement and assessment of the health level, the management can obtain recommendations on potential matters that may affect the Company's business continuity in the relevant fiscal year.

The Company's Performance Report for the 2020 fiscal year has been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. The audit includes a performance evaluation, the Company's Work Plan and Budget (RKAP), as well as a comparison between the 2020 realization and the budget target as stated in the 2020 RKAP. In the Company Performance Report, financial data includes the value of investments and/or income (losses) from investments in subsidiaries, calculated on the

penyertaan di Kerja Sama Operasi (KSO) dengan memperhitungkan bagian laba KSO berdasarkan persentase investasi atas dasar metode ekuitas.

Hasil evaluasi atas tingkat kesehatan Perusahaan menunjukkan kinerja dalam tahun 2020 tergolong dalam kondisi "SEHAT" kategori "A" dengan skor "67,75". Skor ini sama dengan pencapaian dan realisasi tahun 2019. Berikut disampaikan tabel tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun buku 2020.

basis of the audited equity method, as well as investment in Joint Operations (JO) by calculating the share of JO profits based on the percentage of investment on the basis of the equity method.

The results of the assessment on the Company's health level show that performance in 2020 is classified as "HEALTHY" in the "AA" category with a score of "67.75". This score is the same as the achievements and realizations in 2019. The following table shows the Company's Health level for the 2020 fiscal year.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN (BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO. KEP-100/MBU/2002)
COMPANY'S HEALTH INDEX (BASED ON THE DECISION LETTER OF MINISTER OF SOES NO. KEP-100/MBU/2002)

URAIAN *DESCRIPTION*	**RKAP**		**REALISASI** *REALIZATION*		**REALISASI** *REALIZATION*	
	2020		**2019**		**2020**	
	BOBOT *VALUE*	**SKOR** *SCORE*	**BOBOT** *VALUE*	**SKOR** *SCORE*	**BOBOT** *VALUE*	**SKOR** *SCORE*
ASPEK KEUANGAN *FINANCIAL ASPECT*						
Return on Equity (ROE)	3,07%	5,50	14,68%	18,00	2,90%	5,50
ROI	5,63%	5,00	8,23%	6,00	5,08%	5,00
Cash Ratio	25,02%	4,00	17,60%	3,00	13,92%	2,00
Current Ratio	140,88%	5,00	120,06%	4,00	131,78%	5,00
Collection Period	22	5,00	18	5,00	14	5,00
Perputaran Persediaan *Inventory Turnvover*	13	5,00	11	5,00	15	5,00
Total Asset Turnover	0,82	3,50	0,98	4,00	0,69	3,00
Rasio Modal terhadap total asset *Capital to total asset ratio*	25,83	7,25	24,20%	7,25	26,89%	7,25
ASPEK OPERASIONAL *OPERATIONAL ASPECT*						
Peningkatan Penguasaan Teknologi *Technology Mastery Improvement*	90,00%	5,00	90,00%	5,00	93,88%	5,00
Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal *Implementation of Formal and Informal Education*	90,00%	5,00	76,89%	3,00	93,74%	5,00
Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan *Timeliness in Completing Work*	95,00%	5,00	96,33%	5,00	95,70%	5,00
ASPEK ADMINISTRASI *ADMINISTRATION ASPECT*						
Laporan Tahunan *Annual Report*	<150 hari / *days*	3,00	<150 hari / *days*	3,00	<150 hari / *days*	3,00
RKAP	<60 hari / *days*	3,00	<60 hari / *days*	3,00	<60 hari / *days*	3,00
Laporan Triwulan *Quarterly Report*	<60 hari / *days*	3,00	<60 hari / *days*	3,00	<60 hari / *days*	3,00

URAIAN *DESCRIPTION*	RKAP		REALISASI *REALIZATION*		REALISASI *REALIZATION*	
	2020		2019		2020	
	BOBOT *VALUE*	SKOR *SCORE*	BOBOT *VALUE*	SKOR *SCORE*	BOBOT *VALUE*	SKOR *SCORE*
Efektivitas Penyaluran Dana PUKK *Effectiveness of PUKK Fund Distribution*	99,53%	3,00	91,89%	3,00	97,94%	3,00
Tingkat Kolektibilitas *Collectability Rate*	85,49%	3,00	72,83%	3,00	71,98%	3,00
TOTAL	**JUMLAH SKOR TINGKAT SEHAT**	**70,25 SEHAT A**		**80,25 SEHAT A**		**67,75 SEHAT A**

KRITERIA TINGKAT KESEHATAN

HEALTH INDEX CRITERIA

NO	TINGKAT KESEHATAN *HEALTH INDEX*	KATEGORI *CATEGORY*	TOTAL SKOR (TS) *TOTAL SCORE (TS)*
1	Sehat *Healthy*	AAA	TS> 95
		AA	80 < ts <= 95
		A	65 < ts <= 80
2	Kurang Sehat *Average*	BBB	50 < ts <= 65
		BB	40 < ts <= 50
		B	30 < ts <= 40
3	Tidak Sehat *Unhealthy*	CCC	20 < ts <= 30
		CC	10 < ts <= 20
		C	ts <= 10

PETA JALAN USAHA: RENCANA JANGKA PANJANG

BUSINESS ROAD MAP: LONG-TERM

Perseroan memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 2021-2025 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan melalui Surat No. 0771/DIRUT/KDAKT/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2021-2025

The Company has prepared a Long-Term Plan (RJPP) for the period of 2021-2025, which has been approved through the Company's Letter to the Ministry of SOEs No. 0771/DIRUT/KDAKT/12/2020 dated December 22, 2017 regarding the Long Term Plan of PT Nindya Karya (Persero) for 2021-2025.

Road Map PT Nindya Karya (Persero) digambarkan sebagai berikut:

The road map of PT Nindya Karya (Persero) is described as follows:

GROWTH 2021

- Peningkatan Kompetensi SDM unggul yang didukung oleh Nindya *Learning Center*
- Penguatan kesisteman berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi
- Meningkatkan Daya Saing melalui penguasaan pasar, teknologi & Manajemen Konstruksi serta Sinergi BUMN/ Mitra Potensial
- Investasi (Diversifikasi) di SPAM, WTP, Energi dengan pengembangan unit bisnis baru (SPC)
- Investasi Properti dan ***Airport Transportation System*** dengan pengembangan unit bisnis baru (SPC).
- Peningkatan Kapasitas Keuangan melalui MTN atau Obligasi
- *Improving Competency of superior Human Capital supported by Nindya Learning Center*
- *Strengthening the integrated Information Technology-based systems*
- *Increasing competitiveness through market control, technology and Construction Management, and Synergy with SOEs/Potential Partners*
- *Making investment (diversification) in SPAM, WTP, Energy, Property, and MHP*
- *Building financial capacity through MTN or bonds*

EXPANSION 2022-2023

- Melakukan *Market Penetration* dan *Market Developtment* di ASEAN
- Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas melalui pengembangan Produk untuk Diversifikasi *Backward* Integration (industri material konstruksi).
- Investasi (Diversifikasi) di PLTMH, PLTA dan PLTS, dengan pengembangan unit bisnis baru (SPC).
- Peningkatan Kapasitas Keuangan melalui IPO.
- *Conducting market penetration and market development in Southeast Asia (Timor Leste and the Philippines)*
- *Increasing efficiency and productivity through product development for Backward Integration Diversification (construction material industry)*
- *Making investment (diversification) in Airport Transportation System, PLTA and PLTS.*
- *Building financial capacity through IPO*

RAPID GROWTH 2024-2025

- Fokus pada pengembangan diversifikasi usaha melalui peningkatan kapabilitas *engineering* sebagai kontraktor maupun investor
- Melakukan *Market Penetration* dan *Market Development* di Kawasn Asia
- *Focusing on developing business diversification by improving engineering capabilities as contractors and investors.*
- *Conducting market penetration and market development in Asia*

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

OVERVIEW ON BUSINESS SUPPORT

PLBN SKOUW, Papua
Border post of Republic of Indonesia SKOUW, Papua

Hotel Horison - Nindya, Semarang
Horison - Nindya Hotel, Semarang

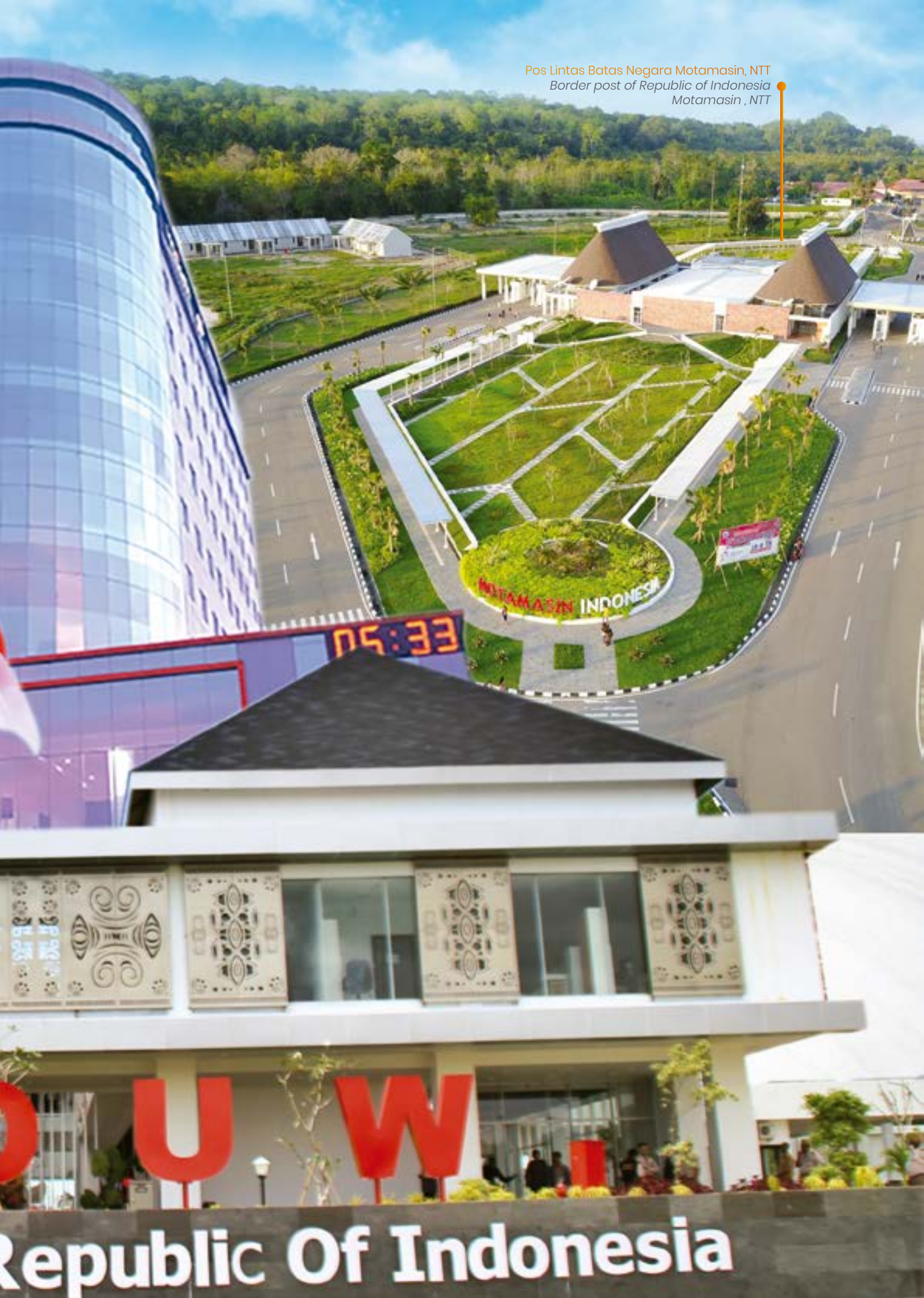

Pos Lintas Batas Negara Motamasin, NTT
Border post of Republic of Indonesia Motamasin , NTT

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Dalam menghadapi era globalisasi juga situasi pandemi yang belum berakhir, semua kegiatan bisnis akan dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam mewujudkan eksistensinya. Fluktuasi ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada semakin beratnya tantangan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang atau keuntungan yang berkelanjutan. Menghadapi kondisi tersebut, Perseroan dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif melalui transformasi perusahaan. Salah satu pendukung proses transformasi Perseroan adalah sumber daya manusia yang kompetitif.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam sebuah perusahaan. Keberadaannya diperlukan di berbagai lini perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengintegrasian fungsi karyawan dengan strategi bisnis perusahaan. Di samping manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi, Perseroan memiliki tata cara, kebiasaan, dan aturan dalam mencapai visi dan misinya. Tata cara, kebiasaan, dan aturan tersebut tercermin dalam nilai-nilai Perusahaan yang diterapkan secara terus menerus, mulai dari level pimpinan hingga staf Perseroan, yang kemudian menjadi budaya perusahaan. Kinerja perusahaan yang tinggi tentunya tidak terlepas dari budaya perusahaan yang baik dan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab yang dimiliki karyawannya.

In facing the globalization era as well as the pandemic situation that has not ended, all business activities will encounter challenges in realizing and ensuring their existence. Economic fluctuations and rapid technological developments also have an impact on the increasingly severe challenges of a company in achieving long-term goals or sustainable profits. Addressing such conditions, the Company is required to adapt to changes in the competitive business environment through corporate transformation. One of the supporters of the Company's transformation process is competitive human capital.

Human Capital is a central factor in the Company as its existence is required in various lines of activities of the Company. To that end, it is necessary to integrate employee functions with the Company's business strategy. In addition to integrated human capital management, the Company has procedures, habits, and rules so as to be able to achieve its vision and mission. These procedures, habits, and rules are reflected in the Company's values, which are applied continuously starting from the staff level to the Company's leadership in order to become the corporate culture. High performance of the Company is certainly inseparable from positive corporate culture and responsible leadership spirit of its employees.

Perseroan percaya bahwa SDM adalah bagian dari aset penting yang memberikan kontribusi besar dalam persaingan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan manajemen sumber daya manusia yang baik melalui serangkaian proses, diantaranya perekrutan karyawan, penilaian kinerja, pemberian remunerasi, pelaksanaan program pelatihan, dan pengembangan karier.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan senantiasa mengacu pada pedoman ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dasar aturan di *Intern*al Perseroan dan beberapa referensi lainnya sebagai sebuah landasan yang telah disesuaikan pada dimensi-dimensi pengelolaan SDM yang dibutuhkan. Selain sebagai landasan legal-formal, pemenuhan ketentuan regulasi di bidang SDM dilakukan dalam rangka menetapkan acuan dasar strategi pengelolaan SDM baik dalam konteks Rencana kerja perusahaan maupun inisiatif stategis yang dibutuhkan selama berjalannya aktivitas usaha.

Landasan kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di perusahaan meliputi:pengelolaan SDM Mengacu pada undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1. Referensi legal-formal utama dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan yaitu dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan, regulasi tersebut telah mengatur banyak aspek yang diperlukan seperti:
   a. Kesetaraan dan pemenuhan Hak asasi Manusia;
   b. Perencanaan dan informasi tenaga kerja;
   c. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
   d. Penempatan tenaga kerja;
   e. Hubungan kerja;
   f. Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;
   g. Hubungan industrial; dan
   h. Pemutusan hubungan kerja.
2. Pengelolaan SDM Mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan. Dalam tahapan selanjutnya, dasar kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan perusahaan juga mengacu pada Anggaran Dasar dan

The Company believes that Human Capital is a vital asset that makes a major contribution to the Company's business competitiveness. Therefore, the Company continuously develops good human resource management through a series of processes, including employee recruitment, performance evaluation, remuneration, training program implementation, and career development.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY

Human Capital management policies within the Company always refer to the provisions of laws that prevail in Indonesia, as well as the basic rules of the Company, and various other references, as the foundation adjusted to the required dimensions of Human Capital management. Aside from being a legal-formal basis, compliance with regulatory provisions in terms of human capital is carried out in order to establish a basic reference for Human Capital management strategies, both in the context of the Company's work plan and the strategic initiatives needed during the course of business activities.

The basis of Human Capital management policies that apply in the company include the human capital management referring to Law No. 13 of 2003 regarding Manpower.

1. The primary legal-formal reference in the formulation of Human Capital management policies within the Company is by referring to the provisions contained in Law No. 13 of 2013 regarding Manpower. In determining the necessary policies, these regulations have governed many necessary aspects, such as:
   a. Equality and fulfillment of Human Rights;
   b. Manpower planning and information;
   c. Implementation of job training;
   d. Placement of workers;
   e. Work relationship;
   f. Protection, remuneration, and welfare of workers;
   g. Industrial relations; and
   h. Work termination.
2. Human Capital management refers to the Company's Articles of Association and Bylaws. In the next stage, the basic policy of Human Capital management within the Company also refers to the Articles of Association and Bylaws

Rumah Tangga (AD/ART) yang muatannya telah merujuk pada undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan telah dilakukan pengembangan dan penyesuaian kembali dengan kondisi usaha di lingkungan perusahaan. Adapun aspek yang terkandung dalam AD/ART terkait pengelolaan SDM meliputi:

a. Kepegawaian perusahaan termasuk penetapan Gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat umum pemegang Saham.

b. Pengangkatan dan pemberhentian pekerja perusahaan.

3. Pengelolaan SDM mengacu pada rencana kerja perusahaan. Guna mensinergikan arah pengembangan usaha Perseroan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan, Perseroan melalui Direktorat SDM melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan dengan rencana kerja perusahaan yang ditetapkan. Penyesuaian terhadap Rencana kerja perusahaan diperlukan agar pilar SDM dapat dimaksimalkan untuk mendukung secara penuh atas rencana yang ditetapkan. Penyesuaian kebijakan SDM yang dilakukan perusahaan terkait Rencana kerja perusahaan yang tertuang dalam:

a. Rencana jangka panjang perusahaan 2017-2021

b. Rencana kerja dan anggaran Perusahaan 2020

c. *Road Map* pengembangan SDM Departemen SDM

4. Pengelolaan SDM mengacu pada referensi lainnya. Selain melakukan pemenuhan dasar kebijakan utama dalam melakukan pengelolaan SDM di lingkungan perusahaan, perusahaan juga mengadopsi beberapa strategi pengelolaan SDM berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak eksternal, baik yang bersifat umum maupun kajian yang dikhususkan kepada perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM di lingkungan perusahaan menjadi lebih tepat dan sesuai pada kebutuhan. Selain itu, pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan juga semakin dekat dengan fenomena-fenomena pengelolaan SDM yang terjadi dewasa ini.

(AD/ART) whose contents have referred to the Law No. 13 of 2003 and has been developed and readjusted to the business conditions in the Company's environment. The aspects contained in the Articles of Association and Bylaws related to Human Capital management, include:

a. Company's employment, covering the determination of salary, pension, or old-age security plan, and other income for workers who exceed their work obligations as stipulated by law, which must obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders.

b. Appointment and dismissal of Company's employees.

3. Human Capital management refers to the Company's Work Plan. In order to synergize the direction of the Company's business development with the policies and strategies of Human Capital management in the Company's environment, the Company, through the Human Capital Directorate, makes necessary adjustments to the established Company's Work Plan. This is needed so that the Human Capital pillar can be optimized to fully support the plans that have been prepared. Human Capital policy adjustments made by the Company related to the Work Plan are contained in:

a. Company's Long-Term Plan of 2017-2021

b. Company's Work Plan and Budget of 2020

c. Human Capital Development Road map of the Human Capital Department

4. Human Capital management observes Other References. In addition to fulfilling the basic policies for managing Human Capital within the Company, several Human Capital management strategies based on the studies conducted by external parties are also adopted, both of the general nature and the studies that are specific to the Company. This is done so that decisions related to Human Capital management within the Company become more precise and in accordance with its needs. Human Capital management in the Company's environment will also be closer to the phenomena of Human Capital management that occurs nowadays.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan SDM Perseroan dilakukan oleh Departemen SDM yang bertanggung jawab secara penuh kepada Direktur produksi dan SDM. Departemen SDM perusahaan membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Operasional SDM, Bagian Perencanaan SDM dan Bagian Pengembangan SDM.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ORGANIZATION STRUCTURE

The management of the Company's Human Capital is carried out by the Human Capital Department, which is fully responsible to the Director of Production and Human Capital. The Company's Human Capital Department is in charge of 3 (three) sections, namely the Human Capital Operations Section, Human Capital Planning Section, and Human Capital Development Section.

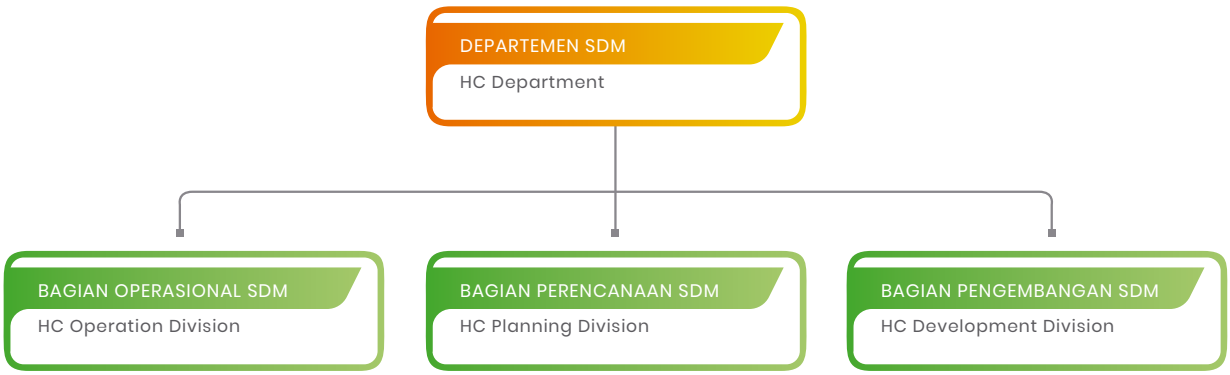

Mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan, ruang lingkup tugas Departemen SDM yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan SDM di bidang operasional kepersonaliaan.
2. Melakukan pemetaan SDM baik di Kantor pusat, Wilayah dan Divisi Usaha serta membuat rencana pemenuhan SDM berdasarkan kebutuhan.
3. Melaksanakan proses rekrutmen karyawan.
4. Melakukan pengurusan administrasi terkait aspek kepegawaian.
5. Merancang serta menjalankan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan.

Referring to the Company's Articles of Association and Bylaws, the scope of duties of Human Capital Department are:

1. To implement Human Capital management in the field of personnel operations.
2. To map the Human Capital at the Head Office, Regional Offices, and Business Divisions, as well as making plans for fulfilling the needs of Human Capital.
3. To implement the employee recruitment process.
4. To carry out administrative management related to personnel aspects.
5. To design and carry out employee training and development activities.

ROAD MAP PENGEMBANGAN SDM

Sebagai langkah strategis, Perseroan telah menyusun *Road Map* atas rencana pengembangan SDM yang telah disinergikan dengan rencana pengembangan Perseroan secara menyeluruh di masa depan. *Road Map* ini memuat sasaran-sasaran program yang terdiri dari penyiapan infrastruktur maupun *soft structure* yang dibutuhkan. Uraian atas *Road Map* pengembangan SDM Perseroan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ROAD MAP

As a strategic step, the Company has prepared a Road Map of Human Capital Development that has been synergized with the Company's overall development plan in the future. This Road Map contains program targets consisting of the preparation of the required infrastructure and soft structures. The description of the Company's Human Capital development road map is presented in the table below:

2016

- Melakukan rekrutmen aktif lebih selektif
- Pembenahan kesisteman SDM (audit SDM, *job evaluation*, *job description*, *job grading*, sistem remunerasi)
- Peningkatan kompetensi SDM (*project Management*, *product Knowledge*, *engineering Design*, *value engineering*, *negotiation/lobby skill & Supply Chain*).
- *More selective in conducting active recruitment*
- *Management of Human Capital system (audit on Human Capital, job evaluation, job description, job grading, and remuneration system)*
- *Improvement of Human Capital competence (project management, product knowledge, engineering design, value engineering, negotiation/lobbying skill, and supply chain)*

2017

- *Leadership Human Capital*
- Melipatgandakan jumlah personil Tenaga Pemasaran
- Menerapkan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk unit Kerja Operasi wilayah dan kantor pusat
- Menyiapkan Tenaga Ahli Toll, PLTA, dan energi lainnya.
- *Leadership Human Capital*
- *Doubling up the number of Marketing personnel*
- *Implementation of Key Performance Indicator (KPI) for Operational work unit in the regions and head office*
- *Preparation of experts in the fields of toll road, hydro power plant, and other forms of energy*

2018

- Merekrut tenaga profesional ahli PBC (PM, SM, engineering, HSE, *programmer*)
- Penerapan Sistem *Learning Center* secara mandiri dan terbakukan
- Membangun Nindya *Learning Center* (NIC).
- *Recruitment of professionals in PBC (PM, SM, engineering, HSE, programmer)*
- *Implementation of an independent and standardized Learning Center System*
- *Development of Nindya Learning Center (NIC)*

2019

- Merekrut tenaga profesional degan *unique skill*
- Merekrut Tenaga Pemasaran dan penyelesaian sengketa dengan skill negosiasi dan *lobbying* yang *professional*
- *E-Learning Nindya*
- *Recruitment of professional with unique skills*
- *Recruitment of Marketing personnel and settlement of dispute through professional negotiation and lobbying skills*
- *E-Learning Nindya*

2020

- *E-Learning Nindya Knowledge Management System*

REKRUTMEN DAN PERPUTARAN KARYAWAN

Salah satu fungsi pengelolaan SDM adalah melakukan kegiatan perekrutan pegawai dalam rangka mempertahankan proposionalitas tenaga kerja di tiap-tiap bidang yang memiliki tujuan agar jalannya kegiatan usaha Perseroan dapat terselenggara dengan baik dan efektif. Perseroan berpandangan rekrutmen pegawai tidak hanya sebatas melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja saja namun lebih lanjut sebagai bagian usaha Perseroan dalam membangun mekanisme regenerasi kepemimpinan yang baik dan berkesinambungan guna mempertahankan atau bahkan meningkatkan *operational excellence* yang telah dicapai.

Departemen SDM selaku organ yang diberi tanggung jawab oleh Perseroan dalam mengelola Sumber Daya Manusia, pada 2019 telah Mengoordinasi pelaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan baru. Pada periode tahun 2020, terdapat penambahan/pengurangan karyawan sebagai berikut:

EMPLOYEE RECRUITMENT AND TURNOVER

One of the Human Capital management functions is to carry out employee recruitment activities in order to maintain the proportion of the workforce in each field, with the aim that the Company's business activities can be carried out properly and effectively. The Company views that employee recruitment is not only limited to fulfilling the needs of the workforce, but more than that, as part of the Company's efforts in building a good and sustainable leadership regeneration mechanism in order to maintain or even improve the operational excellence that has been achieved.

The Human Capital Department, as an organ that is given the responsibility by the Company in managing Human Capital, has coordinated the recruitment and selection of new employees. In 2020, there were additional/deduction of the number of employees as follows:

URAIAN *DESCRIPTION*	PT NINDYA KARYA (PERSERO)	PT NINDYA BETON (ENTITAS ANAK) *(SUBSIDIARY)*	KONSOLIDASIAN *CONSOLIDATED*
Jumlah Karyawan Awal Tahun 2020 *Total Employees at the Beginning of 2020*	918	61	979
Karyawan Baru *New Employees*	153	3	156
Karyawan yang Berakhir Hubungan Kerjanya/Mengundurkan Diri/ Memasuki Masa Pensiun *End of Contract/Resignation/Retirement*	451	15	466
Total Karyawan Akhir Tahun 2020 *Total Employees at the End of 2020*	620	46	666
Tingkat Perputaran Karyawan *Turnover Rate*	58,65%	28,04%	56,66%

Total karyawan PT Nindya Karya (Persero) secara konsolidasian per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 666 orang, berkurang 313 orang dari total karyawan pada 2019 sebanyak 979 karyawan. Di sepanjang tahun 2020 terdapat rekrutmen karyawan baru sebanyak 156 orang dan pengurangan sebanyak 466 karyawan. Adanya penurunan jumlah karyawan antara tahun 2019 dan 2020 disebabkan untuk memenuhi proposionalitas SDM Nindya Karya dan entitas anak terhadap perkembangan bisnis Perseroan.

Perputaran karyawan (*turnover*) umum terjadi sebagai dampak dari adanya masa pensiun kerja dan pengunduran diri. Perusahaan terus berupaya menjaga agar komposisi karyawan tetap proporsional sesuai pada kebutuhannya melalui proses rekrutmen dan pengawasan performa kerja.

The number of employees of PT Nindya Karya (Persero), on a consolidated basis, as of December 31, 2020 is 666 employees, a decrease of 313 employees from the total employees in 2019 of 979 employees. Throughout 2020, there were as many as 156 people recruited as new employees and deduction of 466 employees. The decrease in the number of employees between 2019 and 2020 is to meet the proportionality of the Human Capital of Nindya Karya and its subsidiaries for the sake of business development.

Employee turnover generally occurs as a result of retirement and resignation. The Company continuously strives to keep the composition of its employees to be proportional according to their needs, through the recruitment process and monitoring of work performance.

PENGELOLAAN KARIER

Dalam rangka pengelolaan karier, Perseroan memiliki Program Promosi dan Jabatan berupa promosi, rotasi dan mutasi yang dilakukan bertujuan untuk membentuk karakter kerja yang dinamis bagi setiap pegawai. Tujuan dari program tersebut untuk memberikan kesempatan serta pengalaman bagi masing-masing pegawai menghadapi situasi dan kondisi kerja yang baru. Dengan demikian, setiap pegawai akan dapat meningkatkan kemampuan kerjanya baik dalam hal teknis maupun non-teknis serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam rangka pengambilan keputusan.

Adapun uraian atas tujuan dari masing-masing Program Promosi dan Jabatan adalah:

1. Promosi merupakan alih tugas karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi kelas jabatannya baik dalam satu lingkungan unit kerja/ cabang, maupun antar unit kerja/ cabang atau afiliasi perusahaan atau anak perusahaan.
2. Rotasi merupakan alih tugas karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tanggung jawab dan beban tugas relatif sama/ setara dan tidak berdampak pada perubahan kelas jabatan, baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/ cabang atau afiliasi perusahaan atau anak perusahaan.
3. Demosi merupakan alih tugas karyawan dari satu posisi tugas ke posisi tugas lain yang mempunyai tanggung jawab dan beban tugas lebih rendah dan berdampak pada penurunan, kelas jabatan baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/ cabang atau afiliasi perusahaan atau anak perusahaan.

Berikut adalah uraian mengenai jumlah promosi, rotasi dan demosi karyawan sepanjang 2020:

CAREER MANAGEMENT

In terms of career management, the Company has established a Promotion and Designation Program in the form of promotions, rotations, and transfers, aimed at forming a dynamic work character for each employee. The purpose of the program is to provide opportunities and experiences for each employee to face new work situations and conditions. Thus, each employee will be able to improve their work ability, both in technical and non-technical terms, and have better capabilities in making decisions.

The objectives of each Promotion Program and Position are as follows:

1. Promotion is the transfer of employee's duties from one position to another, with a higher class position, either within one work unit/branch or between work units/branches or Company's affiliates or subsidiaries.
2. Rotation is the transfer of employee's duties from one position to another, which has relatively same/equal responsibilities and workload, and does not have an impact on changes in job class, either within one work unit/branch environment, or between work units/branches or Company's affiliates or subsidiaries.
3. Demotion is the transfer of employee's duties from one task position to another that has lower responsibility and task load, and has an impact on the decline in class position, either within one work unit/branch environment or between work units/branches or Company's affiliates or subsidiaries.

The following table describes the number of employee promotions, rotations, and demotions throughout 2020:

KETERANGAN *DESCRIPTION*	JUMLAH *TOTAL*
Promosi *Promotion*	3
Rotasi dan Mutasi *Rotation and Transfer*	272
Demosi *Demotion*	1

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Terpenuhinya kebutuhan atas SDM yang berkompeten dan berdaya saing tentunya menjadi harapan bagi Perseroan. Signifikansinya bagi Perseroan antara lain sebagai salah satu indikator penting dalam memenangkan persaingan bisnis khususnya di sektor konstruksi yang semakin kompetitif dewasa ini. Melalui SDM yang unggul dalam hal *hard skill* dan *soft skill*, diharapkan ke depannya akan membawa dampak pada terpenuhinya pelayanan usaha yang berorientasi *operational excellence*. Hal ini tentunya kan memberikan implikasi yang besar bagi Perseroan seperti peningkatan reputasi di hadapan konsumen serta terbukanya peluang dalam melakukan penetrasi pasar yang lebih luas.

Program pengembangan SDM dilakukan berdasarkan pemenuhan *competency gap*, kebutuhan bisnis dan target kinerja yang dibutuhkan oleh Perseroan. Dalam implementasinya, program pengembangan yang dilakukan adalah dalam bentuk program-program pelatihan dan pelaksanaan mutasi (promosi dan rotasi).

Menyadari pentingnya hal tersebut, Departemen SDM sesuai pada fungsi dan kewenangannya telah menyusun program pengembangan yang berlaku bagi seluruh pegawai di jajaran struktural dan fungsional. program yang disusun meliputi 4 (empat) program inti sebagai acuan utama dalam meng*Intern*alisasi program-program pelatihan yang lebih spesifik. Keempat program tersebut meliputi:

1. Program Beasiswa Pendidikan Formal

   Program Beasiswa pendidikan Formal ini merupakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan melalui jalur pendidikan formal di Perguruan Tinggi agar karyawan memiliki cara pandang yang global dengan wawasan bisnis dan pengetahuan teknologi yang terkini.

2. Program Standardisasi Tim Inti proyek

   Sebagai Korporasi yang menjadikan proyek konstruksi sebagai bisnis utamanya, Manajemen Nindya Karya perlu memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki setiap tim proyek telah memenuhi standar yang ada. untuk itu, program ini disusun dengan memadukan kegiatan pelatihan dan penugasan yang menunjang untuk meningkatkan dan menstandarkan pengetahuan, kemampuan dan *attitude* tim inti proyek.

HUMAN CAPITAL COMPETENCE DEVELOPMENT

The fulfillment of the need for competent and competitive Human Capital is certainly a vision for the Company to be realized. Its significance for the Company, among others, is as one of the key indicators in winning business competition, especially in the increasingly competitive construction sector at present. Through superior Human Capital in terms of hard skills and soft skills, it is hoped that, in the future, it will have an impact on the fulfillment of business services that are oriented to operational excellence. This will undoubtedly have major implications for the Company, such as increasing reputation in the eyes of the consumers as well as opening up opportunities to penetrate a wider market.

The Human Capital development program is carried out based on the fulfillment of the competency gap, business needs, and performance targets of the Company. In its implementation, the development programs carried out are in the form of training programs and transfers (promotions and rotations).

As the Company understands the essence of this aspect, the Human Capital Department, in accordance with its functions and authority, has compiled a development program that applies to all employees in the structural and functional levels. The programs compiled include 4 (four) core programs as the main reference in internalizing more specific training programs. The four programs include:

1. Formal Education Scholarship Program

   The Formal Education Scholarship Program is an activity to raise employee's competence through formal education at universities so that employees can have a global perspective with business insights and the latest technological knowledge.

2. Project Core Team Standardization Program

   As a company engaged with construction projects as its main business, Nindya Karya and its Management need to ensure that the competencies possessed by each project team meet the prevailing standards. For this reason, this program is prepared by combining training activities and supporting assignments to improve and standardize the knowledge, abilities, and attitudes of the core project team.

3. Program Sertifikasi Tenaga ahli / Terampil

   Program ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja Nindya Karya baik tenaga ahli maupun terampil. program Sertifikasi ini dilakukan dengan mengadopsi Standart yang berlaku secara Nasional maupun *Intern*asional. Adapun beberapa turunan program ini adalah sebagai berikut:

   a. Sertifikasi ahli Management proyek;
   b. Sertifikasi ahli K3 (Umum, Konstruksi, Migas);
   c. Sertifikasi profesi Insinyur (pII);
   d. CBM (*Certified Business Management*); dan
   e. Sertifikasi Tenaga Terampil (Mandor, Tukang, Pelaksana).

4. Program Kepemimpinan Berjenjang

   Program ini adalah serangkaian kegiatan dan penugasan untuk membekali dan mengembangkan karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Sehingga Nindya Karya memiliki kader- kader pemimpin yang siap di masa yang akan datang. adapun turunan program ini adalah sebagai berikut:

   a. *Self leadership development program* (level Staf);
   b. PM *leadership development program* (level tim inti proyek);
   c. *Senior manager development program* (level Manager); dan
   d. E*xecutive development program* (level Kadep / GM).

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan sehingga tugas dan tanggung jawab yang telah diembankan perusahaan kepadanya mampu dilaksanakan dengan baik dan memuaskan.

Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan karyawan yang terealisasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3. Expert/Skilled Certification Program

   This program is an activity carried out to provide recognition of the competencies owned by Nindya Karya's employees, both experts and skilled. This certification program is carried out by adopting standards that apply nationally and internationally. Some derivatives of this program are as follows:

   a. Project Management expert certification;
   b. OHS expert certification (General, Construction, Oil and Gas);
   c. Engineer professional certification (pII);
   d. CBM (Certified Business Management); and
   e. Certification of Skilled Personnel (Foreman, Builder, Executor).

4. Tiered Leadership Program

   This program is a series of activities and assignments to equip and develop the leadership character possessed by each employee. This aims to prepare a new generation of leaders of Nindya Karya who are ready for the future. The derivatives of this program are as follows:

   a. Self-leadership development program (Staff level);
   b. PM leadership development program (core project team level);
   c. Senior manager development program (Manager level); and
   d. Executive development program (Dept. Head/GM level).

EDUCATION AND TRAINING ACTIVITIES

Throughout 2020, the Company has carried out several educational and training activities aimed at improving the capabilities of its employees so that the duties and responsibilities assigned to them can be carried out properly and satisfactorily.

Several education and training activities related to employee development that have been realized during 2020 are as follows:

Triwulan: IV/Tahun 2020
Triwulan: IV/Tahun 2020

(Juta)
(million)

JENIS PENDIDKAN/PELATIHAN *TYPE OF EDUCATION/TRAINING*	RKAP TAHUN 2020 *2020 RKAP*		S/D TW IV (LAST)	
	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*
DIREKSI/DEWAN KOMISARIS *BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF COMMISSIONERS*				
Workshop IKAI untuk Komite Audit	2	40	-	-
Professional Director Program	4	100	2	40,00
Human Capital Tk. Advance	4	60	-	-
Program Berjenjang Kepemimpinan BUMN *Level-Based SOE Leadership Program*	-	-	-	-
SUB TOTAL DIREKSI/ DEWAN KOMISARIS *SUB TOTAL BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF COMMISSIONERS*	**10**	**200**	**2**	**40,00**
GENERAL TRAINING				
Leadership untuk Manager *Leadership for Manager*	50	80	139	30,00
Leadership untuk Staff *Leadership for Staff*	100	110	438	25,00
Management Strategic untuk General Manager *Strategic Management for General Manager*	25	200	-	-
Motivasi dan Pengembangan Diri untuk Karyawan Baru *Self-Development and Motivation for New Employees*	50	80	-	-
Manajemen Sistem Terintegrasi (ISO)	15	30	69	32,20
Manajemen Risiko & Pengendalian *Interna*l Terpadu *Risk Management and Integrated Internal Control*	15	70	-	-
Pelatihan Kedisiplinan Berbasis Milter *Military-Based Disciplinary Training*	25	20	28	-
Training of Trainer	25	70	46	218,85
KPKU BUMN *KPKU for SOE*	25	45	6	0,90
Public Speaking & Negotiate Skill	3	30	26	18,50
Mini MBA in Property	333	735	752	325,45
SUB TOTAL GENERAL TRAINING	**10**	**200**		
K3 *OHSE*				
Ahli Muda K3 Konstruksi *Construction OHS Expert–Low Level*	15	85	-	-
Ahli Madya K3 Konstruksi *Construction OHS Expert–Middle Level*	15	100	-	-
Ahli Utama K3 Konstruksi *Construction OHS Expert–Expert Level*	5	50	-	-
K3 *Scalffolding* *Scaffolding OHS*	-	-	-	-
K3 *Scalffolding* *Scaffolding OHS*	-	-	-	-
K3 *Listrik* *Electricity OHS*	-	-	-	-
Ahli Kebakaran *Fire Expert*	-	-	-	-

JENIS PENDIDKAN/PELATIHAN *TYPE OF EDUCATION/TRAINING*	RKAP TAHUN 2020 *2020 RKAP*		S/D TW IV (LAST)	
	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*
Ahli K3 Umum *General OHS Expert*	5	20	-	-
Auditor *Internal* SM-MK3L Internal Audit OHSE Management System	25	100	17	53,81
Pengendali Dokumen *Document Controller*	-	-	-	-
Pelatihan K3L Proyek *OHSE Training at Project*	20	40	-	-
P3K Kemenaker RI *First Aid of the Ministry of Manpower of Indonesia*	25	50	-	-
Accident Investigation	-	-	-	-
Safety Awareness (SMK3) PUPR	15	20	-	-
K3L Lain-lain *OHSE–Other*	15	40	233	55,80
SUB TOTAL K3 *SUB TOTAL OHSE*	**140**	**505**	**250**	**109,61**
TECHNICAL TRANINING				
Pelaksana Gedung / Jalan *Building/Road Staff*	25	55	3	0,15
Manajemen Konstruksi Gedung *Building Construction Management*	20	60	56	-
Pelatihan Estimating *Estimating Training*	30	50	40	6,25
Pelatihan Pemasaran *Marketing Training*	35	84	123	48,50
Value Engineering	5	16	64	-
LDK Manager Proyek *LDK Project Manager*	25	228	26	20,98
LDK SEM/SOM/SAM	80	150	15	39,28
Manajemen Kontrak *Contract Management*	20	40	117	4,00
Sertifikasi Teknik *Engineering Certification*	40	110	12	64,80
Welding Inspector	-	-	-	-
Pengukuran *Measurement*	-	-	-	-
EPC	25	65	205	1,01
FINON	45	100	-	-
Teknik lain-lain *Engineering–Other*	10	37	223	5,90
Pembekalan Teknis (Bidang Teknik) *Technical Guidance (Engineering)*	100	53	169	1,40
Seminar Keteknikan *Engineering Seminar*	-	-	11	0,90
Metode Kerja / Girder *Work Method / Girder*	-	-	-	-

JENIS PENDIDKAN/PELATIHAN *TYPE OF EDUCATION/TRAINING*	RKAP TAHUN 2020 *2020 RKAP*		S/D TW IV (LAST)	
	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*
MS Poject	15	26	-	-
ERP Nindya	110	55	199	0,67
SUB TOTAL TECHNICAL TRAINING	**585**	**1.129**	**1.263**	**193,83**
MANAJEMEN SDM *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT*				
Manajemen SDM *Human Capital Management*	15	100	517	7,75
Remunerasi/Sistem Penggajian *Remuneration/Salary System*	3	32	4	0,40
SDM lain-lain *Human Capital-Other*	100	100	8	2,40
SUB TOTAL MANAJEMEN SDM *SUB TOTALHUMAN CAPITAL MANAGEMENT*	**118**	**232**	**529**	**10,55**
MANAJEMEN KEUANGAN *FINANCIAL MANAGEMENT*				
Perpajakan *Taxation*	15	60	9	1,70
Brevet	5	20	4	19,04
Perpajakan lain-lain *Taxation-Others*	-	-	5	28,40
LDK Administrasi Keuangan	70	80	-	-
Tata Keuangan *Financial Administration*	-	-	-	-
Akuntansi (PSAK) *Accounting (PSAK)*	-	-	1	1,75
Manajemen Keuangan lain-lain *Financial Management-Others*	-	-	-	-
Professional Financial Modeller	2	10	-	-
Audit Keuangan *Financial Audit*	2	10	-	-
Financial Process	5	25	6	20,40
Cash Budgeting	1	5	2	2,08
Cash Flow	1	6	1	1,75
SUB TOTAL MANAJEMEN KEUANGAN *SUB TOTAL FINANCIAL MANAGEMENT*	**101**	**216**	**28**	**75,11**
PERALATAN *EQUIPMENT*				
Mekanikal Alat Berat *Heavy Equipment Mechanics*	7	15	-	-
SUB TOTAL PERALATAN *SUB TOTAL EQUIPMENT*	**7**	**15**	**-**	**-**
SEKRETARIAT DAN ADMINISTRASI *SECRETARIAT AND ADMINISTRATION*				
Kearsipan / administrasi perkantoran *Archiving/office administration*	-	-	98	-

JENIS PENDIDKAN/PELATIHAN *TYPE OF EDUCATION/TRAINING*	RKAP TAHUN 2020 *2020 RKAP*		S/D TW IV (LAST)	
	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*
Sekretaris Profesional *Professional Secretary*	4	13	1	1,50
Humas *Public Relations*	8	17	2	1,10
General Affair Adm.	7	30	-	-
Bimtek Kontrak P1618	-	-	-	-
SUB TOTAL SEKRETARIAT DAN ADMINISTRASI *SUB TOTAL SECRETARIAT AND ADMINISTRATION*	**19**	**60**	**101**	**2,60**
SATUAN PENGAWASAN INTERN *INTERNAL AUDIT UNIT*				
Audit Operasional *Operational Audit*	1	10	1	12,70
Pengelolaan tugas-tugas Audit *Audit Duty Management*	1	12	4	-
Dasar-dasar Audit *Audit Basics*	1	10	2	12,00
Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif *Effective Audit Result Report Writing*	3	12	2	10,00
Komunikasi & Psikologi Audit *Communication and Audit Psychology*	1	10	-	-
Audit Kecurangan *Fraud Audit*	1	15	-	-
Seminar dan Pengukuhan PIA *PIA Seminar and Confirmation*	1	15	1	6,60
Ujian CIA *CIA Examination*	1	12	1	3,40
CRMP	2	23	-	-
SUB TOTAL SATUAN PENGAWASAN INTERN *SUB TOTAL INTERNAL AUDIT UNIT*	**14**	**141**	**11**	**44,70**
TEKNOLOGI INFORMASI *INFORMATION TECHNOLOGY*				
iOS	2	8	-	-
Multimedia	1	3	-	-
Linux Advance	1	3	-	-
IT Risk	-	-	-	-
IT Lain lain *IT–Others*	-	-	2	3,00
Certified ITIL	1	8	-	-
COBIT	-	-	-	-
Drone Pilot	5	30	-	-
Hadoop - Big Data	2	10	1	-
UI/UX Mobile Programming	1	8	2	1,80
PostgreSQL Advanced	-	-	-	-
Security Programming	2	20	11	-
IT Service Desk	1	12	-	-
CEH	1	20	-	-
BIM Advanced - Rendering & Animation	40	80	51	21,12

JENIS PENDIDKAN/PELATIHAN *TYPE OF EDUCATION/TRAINING*	RKAP TAHUN 2020 *2020 RKAP*		S/D TW IV (LAST)	
	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*	PESERTA (ORANG) *PARTICIPANT (PEOPLE)*	BIAYA (RP) *COST (RP)*
Fortinet advanced (Nasional)	-	-	-	-
SUB TOTAL TEKNOLOGI INFORMASI *SUB TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY*	**57**	**202**	**67**	**25,92**
MANAJEMEN RESIKO TERPADU *INTEGRATED RISK MANAGEMENT*				
ERM Fundamentals : Series 1	1	9	1	10,50
Risk Assessment Techniques : Series 2	-	-	-	-
Risk Management Implementation : Series 3	-	-	-	-
Auditing Risk Management : Series 4	1	8	-	-
Simulation Based workshop of KRI	-	-	-	-
Cyber Risk Management	-	-	-	-
Project Risk Management	-	-	36	-
RCSA (Risk Control Self Assessment)	-	-	1	3,30
Legal and Compliance Risk Management	-	-	-	-
Workshop, Risk Based Budgeting	2	16	-	-
Anti-Bribery Management System	-	-	-	-
Risk Management Officer	4	24	4	23,50
Sosialisasi dan Workshop Implementasi Aplikasi Manajemen Risiko Berbasis TI *Dissemination and Workshop on the Implementation of IT-base Risk Management Application*	25	15	-	-
SUB TOTAL MANAJEMEN RESIKO TERPADU *SUB TOTAL INTEGRATED RISK MANAGEMENT*	**33**	**72**	**42**	**37,30**
PENDIDIKAN *EDUCATION*				
Program Beasiswa Pendidikan *Education Scholarship Program*	4	150	5	176,36
Program Bantuan Dana Pendidikan *Education Fund Aid Program*	25	120	-	-
SUB TOTAL PENDIDIKAN *SUB TOTAL EDUCATION*	**29**	**270**	**5**	**176**
LAIN-LAIN *OTHERS*				
Seminar-seminar dan Lokakarya umum *Seminars and general workshops*	40	60	442	71,44
Bahasa Inggris *English*	-	-	-	-
Pelatihan Komputer *Computer Training*	-	-	-	-
Seminar Hukum *Legal Seminar*	10	40	8	4,00
SUB TOTAL LAIN-LAIN *SUB TOTAL OTHERS*	**50**	**100**	**450**	**75,44**
JUMLAH KESELURUHAN *GRAND TOTAL*	**1.496**	**3.877**	**3.500**	**1.117**
PROSENTASE (%) TERHADAP RKAP 2020 *PERCENTAGE (%) TO RKAP 2020*	**100%**	**100%**	**234%**	**29%**

BIAYA PENGEMBANGAN KARYAWAN

Setiap tahunnya Perseroan mengalokasikan anggaran pengembangan SDM di dalam RKAP. Pengalokasian anggaran pelatihan dan pengembangan SDM ditetapkan dengan mengacu pada rencana pelatihan yang telah disusun oleh Departemen SDM atas masukan dari departemen-departemen yang terkait. Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah merealisasikan anggaran pelatihan dan pengembangan SDM sebesar Rp3,877 miliar dengan jumlah kepesertaan karyawan atas program pelatihan dan pengembangan SDM mencapai 1.496 orang. Tabel di bawah ini memberikan gambaran perbandingan jumlah kepesertaan dan biaya pelatihan dan pengembangan SDM Perseroan.

COST FOR EMPLOYEE DEVELOPMENT

Every year, the Company allocates Human Capital development budget in the RKAP. The allocation of budget for Human Capital training and development is determined by referring to the training plan prepared by the Human Capital Department, with input from the relevant departments. Throughout 2020, the Company has realized a budget for Human Capital training and development activities of Rp3.877 billion with the number of employee participation in the training and development program reaching 1.496 people. The table below presents the comparison of the number of participants and the costs of training and development of the Company's Human Capital.

	RKAP 2020	REALISASI 2020 *REALIZATION IN 2020*	REALISASI 2019 *REALIZATION IN 2019*	PENCAPAIAN 2020 TERHADAP TARGET *2020 ACHIEVEMENT TO TARGET*	YOY 2019–2020
Jumlah Perserta (Orang) *Total Participants (People)*	1496	3500	2027	234%	173%
Biaya Pengembangan Karyawan (Rp Juta) *Employee Development Cost (Rp million)*	3877	1117	2056	29%	54%

PERLAKUAN ADIL DAN SETARA

Salah satu pemenuhan prinsip *fairness* dalam GCG terkait dengan aktivitas pengelolaan SDM adalah dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pegawai di lingkungan Perseroan tanpa membedakan aspek-aspek yang bersifat non profesional seperti suku, agama, ras, kepercayaan dan gender. Perusahaan dengan kompetensinya dalam bidang pengelolaan SDM telah memiliki mekanisme yang relevan dalam hal pengukuran kompetensi kerja bagi tiap-tiap pegawai yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara profesional. Dengan mekanisme tersebut, Perseroan memberikan jaminan terkait dengan perlakuan yang adil dan setara terutama dalam hal memperoleh kesempatan bekerja di Perusahaan.

Dalam peningkatan jenjang karier, Perseroan akan menilai dan mengukur setiap karyawan berdasarkan *competitive based* masing-masing karyawan atau unit kerja. Setiap karyawan berhak atas dilakukannya *assessment* untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu sesuai struktur organisasi termasuk promosi, mutasi dan rotasi. langkah ini diharapkan mampu memotivasi setiap karyawan untuk bekerja secara maksimal dan kompetitif dalam upaya memberikan yang terbaik bagi Perseroan.

FAIR AND EQUAL TREATMENT

One of the ways to fulfill the principles of fairness in GCG related to Human Capital management activities is to provide fair and equal treatment to all employees of the Company without prejudice to the non-professional aspects, such as ethnicity, religion, race, belief, and gender. With its competence in the field of Human Capital management, the Company has established a relevant mechanism to measure work competence for each employee, of which the results can be accounted for professionally. With this mechanism, the Company provides assurance in respect of fair and equal treatment, especially in terms of opportunity to work with the Company.

Regarding career path improvement, the Company assesses and measures each employee based on the competitiveness aspect of each employee or work unit. Every employee is entitled to an assessment to fill certain positions according to the organizational structure, including promotions, transfers, and rotations. This step is expected to motivate every employee to work optimally and competitively in an effort to deliver the best for the Company.

Selain itu, Perseroan juga menyediakan pemenuhan hak lainnya secara adil kepada semua karyawan berdasarkan jabatannya masing-masing, seperti gaji pokok, tunjangan, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan perlakuan adil dan setara kepada setiap karyawan. Perseroan juga ingin membuktikan tidak terjadinya praktik diskriminasi di lingkungan perusahaan sehingga tercipta perlakuan yang adil, jujur dan transparan, sehingga dengannya setiap karyawan dapat bekerja secara maksimal dan harmonis.

REMUNERASI

Sebagai bagian dari pemenuhan hak pegawai, Perseroan melalui Departemen SDM memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap mekanisme remunerasi pegawai. Pengelolaan remunerasi Perseroan senantiasa berpedoman pada strategi yang ditetapkan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pemenuhan regulasi minimum penggajian di tingkat daerah dan nasional, besaran yang kompetitif di industri konstruksi serta pemenuhan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan Serikat Pekerja.

Pada dasarnya sistem remunerasi yang diadopsi perusahaan menggunakan prinsip *pay for performance*. Sistem ini memungkinkan Perseroan untuk memberikan remunerasi bagi pegawai secara kompetitif dibandingkan dengan standar hidup layak dan standar *market price* yang berlaku di industri konstruksi. *Pay for performance* merupakan sistem remunerasi yang dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja pegawai.

Hasil penilaian kinerja berdasarkan KPI pada setiap akhir tahun akan memengaruhi tingkat *grade* yang diterimanya pada tahun berikutnya. Sedangkan tingkat *grade* pegawai dengan berbagai macam faktor pengali yang lain akan memengaruhi remunerasi yang akan diterimanya. Pegawai yang berkinerja baik akan menerima remunerasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang berkinerja kurang baik.

Kualitas dan kepuasan yang diberikan kepada pelanggan juga menjadi poin penting yang harus dicapai. Perseroan menjalankan *reward and punishment*, guna memberikan apresiasi atas kinerja pegawai yang mampu meraih kepuasan pelanggan.

Selain penghargaan berupa uang, pemberian *reward* juga diberikan secara non uang (pemberian penghargaan, hadiah atau peningkatan *grade*) kepada pegawai yang berkinerja baik. Sedangkan, pemberian *punishment* dimaksudkan untuk menegakkan disiplin dan aturan main yang berlaku

In addition, the Company strives to ensure the fulfillment of other rights of all employees in a fair manner, based on their respective positions, such as, basic salary, benefits, health insurance, and so on. This is a manifestation of the Company's commitment to providing fair and equal treatment to every employee. The Company also wants to demonstrate that there is no discriminatory practice within the Company's environment so as to create fair, honest, and transparent treatment; hence, all employees can work properly and optimally.

REMUNERATION

As part of the fulfillment of employee's rights, the Company, through the Human Capital Department, has a role in managing the employee remuneration mechanism. The management of remuneration by the Company is always guided by the strategy determined by taking into account several aspects, such as compliance with minimum wage regulations at the regional and national levels, competitive rates in the construction industry, as well as compliance with Collective Labor Agreements (PKB) between the Company and the labor union.

Fundamentally, the remuneration system adopted by the Company uses the principle of pay-for-performance. This system allows the Company to provide remuneration for employees competitively compared to a decent standard of living and standard market prices prevailing in the construction industry. Pay-for-performance is a remuneration system that is linked to the results of employee performance appraisals.

The results of the performance appraisal based on KPI at the end of each year will affect the grade level received in the following year. Meanwhile, the grade level of the employee, with various other multiplier factors, will affect the remuneration to be received. Employees who perform well will receive better remuneration than those who perform poorly.

The quality and satisfaction provided to customers are also key points that must be achieved. The Company carries out a reward-and-punishment procedure in order to give appreciation for the performance of employees who are able to realize customer satisfaction.

In addition to monetary rewards, non-monetary rewards (in the form of awards, prizes, or grade upgrades) are given to employees who perform well. Meanwhile, punishment is intended to enforce discipline and regulations applicable in the Company. Punishment given is in the form

di perusahaan. *Punishment* yang diberikan berupa penurunan *grade*, pemberhentian sementara dalam jabatan struktural, fungsional atau operasional atau bahkan pemberhentian sebagai pegawai bagi yang berkinerja di bawah standar yang ditetapkan dan melanggar peraturan perusahaan atau peraturan yang berlaku secara nasional.

Perseroan terus mengembangkan dan melakukan perbaikan terhadap sistem remunerasi guna mencapai hasil maksimal yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan.

Remunerasi setiap tahunnya akan dievaluasi guna penyesuaian dengan keadaan pasar dan ekonomi perusahaan. adapun komponen remunerasi karyawan yang disediakan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Gaji.
2. Tunjangan Jabatan.
3. Tunjangan Hari Raya (THR).
4. Tunjangan Cuti.
5. *Reward* Prestasi.
6. Fasilitas Kesehatan, asuransi dan Jaminan Sosial lainnya.

of grade reduction or temporary dismissal in structural, functional, or operational positions. It can also be in the form of employment contract termination for those who perform below the established standards and violate the Company's regulations or nationally applicable regulations.

The Company continues to develop and make improvements to the remuneration system in order to achieve maximum results, so as to be able to provide satisfaction to customers on an ongoing basis.

The remuneration is evaluated annually in order to adjust to market conditions and the Company's economic condition. The components of employee remuneration provided by the Company are as follows:

1. Salary.
2. Position Allowance.
3. Holiday Allowance (THR).
4. Leave Allowance.
5. Achievement Reward.
6. Health facilities, insurance, and other social security.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Kebebasan Berserikat merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat, telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. untuk memenuhi hal tersebut, Perseroan memberikan keleluasaan bagi segenap pegawai perusahaan untuk mendirikan serikat pekerja yang berfungsi sebagai sarana *check and balance* tata hubungan ketenagakerjaan secara timbal-balik antara pegawai dengan perusahaan ataupun pihak terkait lainnya. Perseroan memiliki Serikat Pekerja yang merupakan satu-satunya Serikat Pekerja di perusahaan. Serikat Pekerja tingkat pusat berkedudukan di Kantor pusat Jl. Letjend. MT Haryono, Kav. 22, Cawang, Jakarta 13630.

FREEDOM OF ASSOCIATION

Freedom of Association is a basic right for every individual. The freedom to hold an association, to assemble, and to express opinion has been regulated in the laws and regulations in force in Indonesia. To fulfill this, the Company grants freedom for all of its employees to establish a labor union that functions as a check-and-balance facility for reciprocal employment relations between employees and the Company or other related parties. The Company's only Labor Union at the central level is domiciled at its Head Office, i.e. Jl. Letjen. MT Haryono, Kav. 22, Cawang, Jakarta 13630.

PROGRAM PENSIUN

Perseroan memiliki regulasi yang menetapkan batas usia produktif pegawai sampai dengan usia 55 tahun. Batas usia tersebut merupakan usia masa kontrak kerja pegawai sejak awal masuk baik sebagai pegawai tidak tetap maupun pegawai tetap sampai dengan memasuki usia Masa persiapan pensiun. Masa persiapan pensiun

RETIREMENT PROGRAM

The Company has set regulations stipulating the productive age limit of employees up to the age of 55 years old. The age limit is the age of the employee's employment contract since the beginning of entering both as a temporary employee and permanent employee, until entering the age of the retirement preparation period.

merupakan masa untuk tidak masuk bekerja selama jangka waktu tertentu setelah masa usia aktif pegawai berakhir.

Masa Persiapan pensiun diisi dengan beberapa pembekalan yang meliputi pembekalan tentang aspek fisik, psikis, spiritual dan keuangan untuk dapat mempersiapkan diri. pada aspek keuangan, pegawai dibekali dengan kemampuan membangun kewirausahaan dan berbagai kegiatan pendampingan lainnya.

The retirement preparation period is a period of not going to work for a certain period after the employee's active age period ends.

The retirement preparation period is filled with several briefings, which include briefings on physical, psychological, spiritual, and financial aspects so that the employees can prepare themselves. In the financial aspect, employees are equipped with the ability of entrepreneurship and provided with various other mentoring activities.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION

Penerapan Teknologi Informasi (TI) saat ini diperlukan dalam dunia bisnis sebagai salah satu komponen dalam upaya memenangkan persaingan. Pengembangan TI perusahaan dilakukan secara bertahap sebelum sebuah sistem holistik atau menyeluruh selesai dibangun. Dalam penerapannya, rencana strategis TI senantiasa diselaraskan dengan rencana bisnis perusahaan agar setiap penerapan TI dapat memberikan nilai bagi perusahaan.

Perseroan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing. Perseroan meyakini bahwa perusahaan konstruksi terbaik yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan wajib mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis yang ada. Hal tersebut dicapai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal pada lintas fungsi dan divisi bisnis perusahaan.

Agar pengelolaan TI di lingkup perusahaan dapat berjalan secara optimal, efektif dan sesuai tujuan, perusahaan membentuk unit pengelola TI dengan fungsi-fungsi yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The implementation of Information Technology (IT) is highly required in the current business climate as one of the key components to win the competition. The Company's IT development is carried out in stages before a holistic or comprehensive system is built. In its implementation, the IT strategic plan is always aligned with the Company's business plan so that each IT implementation can provide value to the Company.

The Company utilizes information technology to increase competitiveness as it believes that the best construction company that provides added value for all stakeholders must integrate all existing business activities. This is achieved by maximizing the use of information technology across all of its functions and business divisions.

To ensure that IT management of the Company runs optimally and effectively and in accordance with its objectives, the Company has established an IT management unit with functions showed in the chart below.

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI & SISTEM TERINTEGRASI

NINDYA KARYA IT MANAGEMENT UNIT

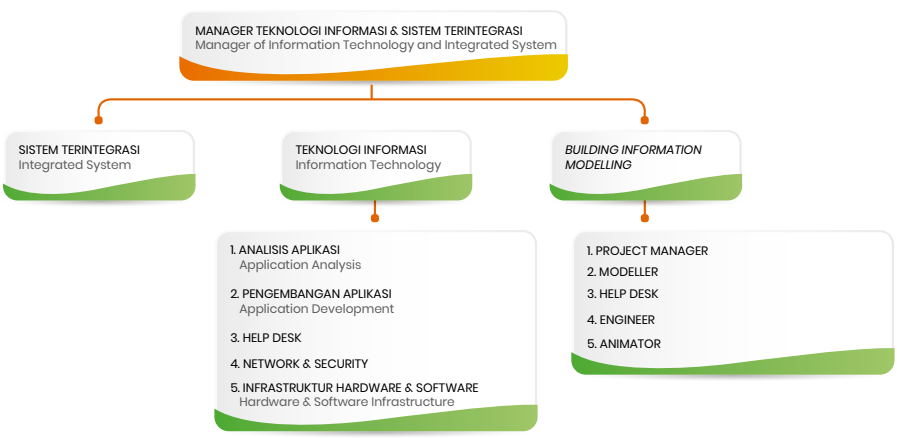

Berdasarkan bagan di atas masing-masing posisi atau Fungsi memiliki deskripsi tugas yang lebih detail. Adapun posisi analis pengembangan aplikasi dan *Officer* Infrastruktur dan Keamanan memiliki tanggung jawab langsung ke Manager bagian TI. Analis aplikasi mengoordinir pekerjaan dari seluruh *Programmer*, sedangkan *Officer* Infrastruktur dan Keamanan memiliki tugas utama untuk mengoordinir program kerja infrastruktur TI beserta proses pengadaan Barang dan jasa terkait TI.

Based on the chart above, each position or function has a more detailed description of duties. The positions of Application Development Analyst and Infrastructure and Security Officer are directly responsible to the IT Section Manager. Application analysts coordinate the work of all Programmers, while the Infrastructure and Security Officer has a main duty of coordinating IT infrastructure work programs and the procurement process for IT-related goods and services.

VISI, MISI DAN ARAHAN STRATEGIS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Arahan strategis jangka panjang dalam penerapan dan pengembangan TI perusahaan adalah sebagai berikut:

VISION, MISSION, AND STRATEGIC DIRECTION IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S INFORMATION TECHNOLOGY

The long-term strategic directions in the implementation and development of the Company's IT are as follows:

NO	ARAHAN STRATEGIS *STRATEGIC DIRECTION*	DESKRIPSI *DESCRIPTION*
1	**STRATEGI DI BIDANG TEKNOLOGI** *STRATEGI DI BIDANG TEKNOLOGI*	
a	Strategi di bidang teknologi *Technology strategy*	1. Pengembangan dan Pengadaan Teknologi harus mengacu kepada Tujuan Strategis Perusahaan dalam RJPP. 2. Pemilihan teknologi dilakukan berdasarkan Value yang dapat mendukung Pencapaian Tujuan Perusahaan *1. Pengembangan dan Pengadaan Teknologi harus mengacu kepada Tujuan Strategis Perusahaan dalam RJPP.* *2. Pemilihan teknologi dilakukan berdasarkan Value yang dapat mendukung Pencapaian Tujuan Perusahaan*
b	Strategi dalam Aplikasi	1. Pengintegrasian ERP mampu mendukung semua kegiatan perusahaan. 2. Mengembangkan Digital Workplace untuk mendukung mobilitas perusahaan. 3. Mengembangkan kesatuan UI/UX melalui Single Sign On (SSO). 4. Merapikan data sekaligus mengumpulkan guna mendukung kebutuhan Big Data. *1. Pengintegrasian ERP mampu mendukung semua kegiatan perusahaan.* *2. Mengembangkan Digital Workplace untuk mendukung mobilitas perusahaan.* *3. Mengembangkan kesatuan UI/UX melalui Single Sign On (SSO).* *4. Merapikan data sekaligus mengumpulkan guna mendukung kebutuhan Big Data.*
c	Strategi dalam Infrastruktur	1. Penyempurnaan infrastruktur dari sisi keamanan informasi. 2. Penyempurnaan availabilitas jaringan komunikasi data yang handal secara nasional. 3. Mengembangkan infrastruktur berbasis Cloud. 4. Penyempurnaan sistem backup dan restore, guna mendukung teknologi Cloud. 5. Meningkatkan keamanan informasi melalui implementasi VDI. *1. Penyempurnaan infrastruktur dari sisi keamanan informasi.* *2. Penyempurnaan availabilitas jaringan komunikasi data yang handal secara nasional.* *3. Mengembangkan infrastruktur berbasis Cloud.* *4. Penyempurnaan sistem backup dan restore, guna mendukung teknologi Cloud.* *5. Meningkatkan keamanan informasi melalui implementasi VDI.*
2	**STRATEGI DI BIDANG PROSES PENGELOLAAN TI** *STRATEGI DI BIDANG PROSES PENGELOLAAN TI*	
a	Strategi Pelayanan *Service Strategy*	Implementasi Helpdesk (ticketing system), guna mendukung operasional TI yang lebih baik. *Implementasi Helpdesk (ticketing system), guna mendukung operasional TI yang lebih baik.*

b	Strategi Pengelolaan Aset TI	Mengembangkan SOP dan Pedoman Pengelolaan Aset (Register, Peminjaman, Pengembalian, dan Disposal) sebagai bagian Tata Kelola TI *Mengembangkan SOP dan Pedoman Pengelolaan Aset (Register, Peminjaman, Pengembalian, dan Disposal) sebagai bagian Tata Kelola TI*
3	**STRATEGI DI BIDANG SDM DAN ORGANISASI TI** *STRATEGI DI BIDANG SDM DAN ORGANISASI TI*	
a	Strategi Organisasi TI *Technology strategy*	1. Penyesuaian Struktur Organisasi TI dalam rangka mendukung Tujuan Strategis Perusahaan dalam RJPP. 2. Pemisahan tanggungjawab dan kewenangan. 3. Mengembangkan organisasi TI sebagai persiapan kompetisi perusahaan di masa depan. *1. Penyesuaian Struktur Organisasi TI dalam rangka mendukung Tujuan Strategis Perusahaan dalam RJPP.* *2. Pemisahan tanggungjawab dan kewenangan.* *3. Mengembangkan organisasi TI sebagai persiapan kompetisi perusahaan di masa depan.*
b	Strategi SDM TI	1. Pemenuhan kebutuhan SDM TI untuk memenuhi beban kerja (workload) yang diperlukan untuk Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur. 2. Peningkatan skill SDM TI sebagai persiapan pengelolaan Big Data dan kegiatan Data Analytic. *1. Pemenuhan kebutuhan SDM TI untuk memenuhi beban kerja (workload) yang diperlukan untuk Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur.* *2. Peningkatan skill SDM TI sebagai persiapan pengelolaan Big Data dan kegiatan Data Analytic.*
4	**STRATEGI DI BIDANG DATA DAN INFORMASI** *STRATEGI DI BIDANG DATA DAN INFORMASI*	
a	Strategi Data *Strategi Data*	1. Re-Engineering Master Data dan Data Kompleks sebagai persiapan mulainya Big Data Journey. 2. Pengumpulan Data, structured maupun unstructured. 3. Pengembangan DMS dan e-Office sebagai media pengumpulan dan perapian data sebagai persiapan Digital Workplace. 4. Peningkatan jumlah data-data structured untuk Data Analytic. *1. Re-Engineering Master Data dan Data Kompleks sebagai persiapan mulainya Big Data Journey.* *2. Pengumpulan Data, structured maupun unstructured.* *3. Pengembangan DMS dan e-Office sebagai media pengumpulan dan perapian data sebagai persiapan Digital Workplace.* *4. Peningkatan jumlah data-data structured untuk Data Analytic.*
b	Strategi terkait Informasi	1. Pengembangan media global sentral untuk Digital Workplace di Cloud. 2. Mempermudah kerja unit kerja dengan Webcrawler guna memperoleh informasi First on Hand. *1. Pengembangan media global sentral untuk Digital Workplace di Cloud.* *2. Mempermudah kerja unit kerja dengan Webcrawler guna memperoleh informasi First on Hand.*

PLATFORM DAN ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah mempertimbangkan kompleksitas akan kebutuhan aplikasi ke depan, sehingga pemilihan *platform* aplikasi yang tepat harus dilakukan, Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan *platform* adalah *platform* yang dapat memudahkan *development*, pemeliharaan dan integrasi. Terkait hal tersebut seluruh pengembangan aplikasi di perusahaan mengimplementasikan platform utama berbasis Web dan/atau *Mobile* pada *Layer Interface*.

INFORMATION TECHNOLOGY PLATFORM AND ARCHITECTURE

The Company has considered the complexity of application requirements in the future; hence, the selection of the right application platform must be carried out. One of the considerations for choosing a platform is to ensure that the platform chosen can facilitate development, maintenance, and integration. In this regard, all application development in the Company has implemented the main platform based on Web and/or Mobile device at the Interface Layer.

STRATEGI INFRASTRUKTUR

Untuk mendukung strategi infrastruktur TI, komponen-komponen infrastruktur TI telah disesuaikan dengan strategi infrastruktur PT Nindya Karya (Persero), yaitu untuk menerapkan infrastruktur yang dapat meningkatkan kecepatan/ *performa* dan keamanan aplikasi serta informasi. Adapun komponen infrastruktur TI yang diusulkan antara lain seperti yang terlihat di bawah ini.

INFRASTRUCTURE STRATEGY

To support the IT infrastructure strategy, IT infrastructure components have been adapted to the infrastructure strategy of PT Nindya Karya (Persero), namely to implement infrastructure that can increase the speed/performance and security of applications and information. The components of the proposed IT infrastructure are as shown below.

STRATEGI INFRASTRUKTUR TI DAN KOMPONEN TARGET

IT INFRASTRUCTURE STRATEGY AND TARGET COMPONENTS

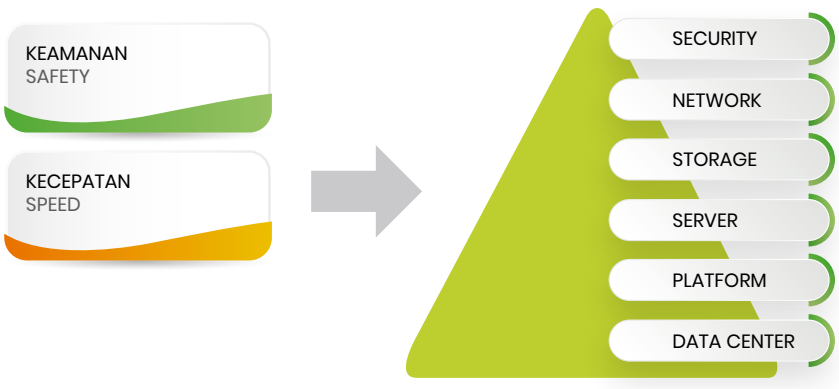

DATA CENTER

PT Nindya Karya (Persero) mengadopsi *requirements Tier*-1 data center berdasarkan standar TIa-942: *Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers* dengan komponen-komponen *data center* sesuai standar Tier-1 TIa-942, digambarkan melalui gambar di bawah ini:

DATA CENTER

PT Nindya Karya (Persero) has adopted the Tier-1 data center requirements based on the TIa-942 standard: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers, with data center components according to the Tier-1 TIa-942 standard illustrated in the figure below:

KOMPONEN DATA CENTER BERDASARKAN STANDAR TIA-942

DATA CENTER COMPONENTS BY TIA-942 STANDARDS

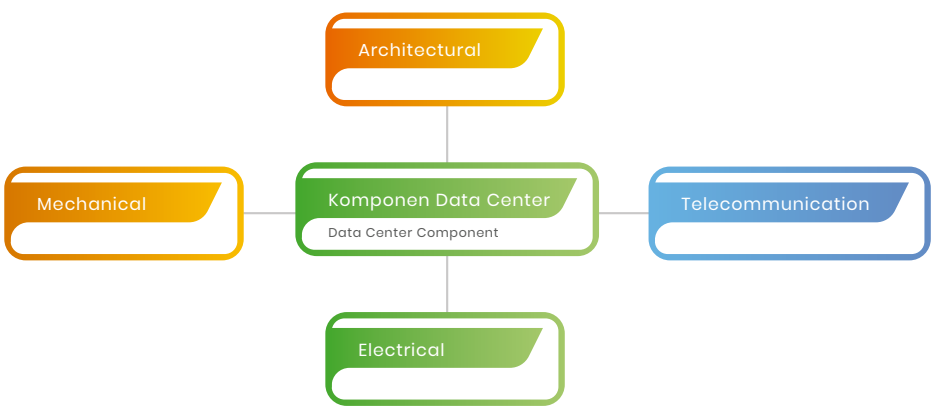

Implementasi *Data Center requirements Tier*-1 terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, secara garis besar, antara lain:

1. Tahap 1 – *Cabling, Network,* perampingan *Server* dan virtualisasi

The implementation of Tier-1 Data Center requirements is divided into 3 (three) stages, namely:

1. Stage 1 – Cabling, Network, Server Streamlining and Virtualization

2. Tahap 2 – HvaC dan *Raised floor*
3. Tahap 3 – *Electrical* dan *Utilities*

PLATFORM

PT Nindya Karya mengimplementasikan *platform* virtualisasi. adapun ilustrasi *platform* virtualisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

PLATFORM VIRTUALISASI

VIRTUAL PLATFORM

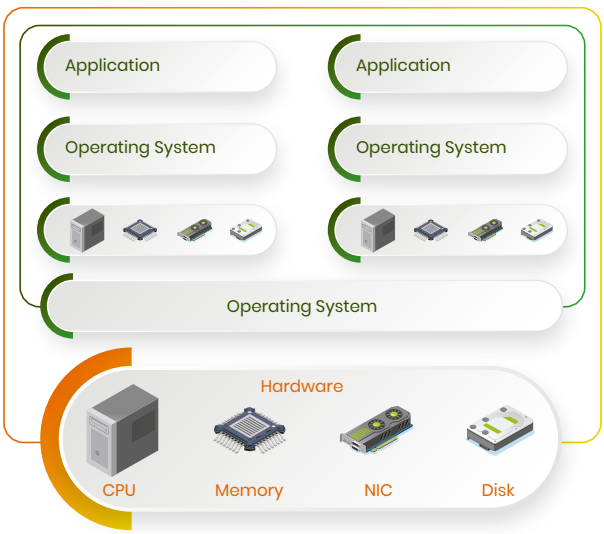

Dengan adanya virtualisasi, 1 (satu) *server* dapat menampung beberapa sistem operasi yang berbeda-beda, masing-masing perangkat *hardware* virtual *server*-nya juga dapat dikonfigurasikan sesuai kebutuhan, Adapun kelebihan dari virtualisasi antara lain:

1. Mengurangi biaya investasi perangkat *server*.
2. Kemudahan *backup & recovery* menggunakan *snapshot*.
3. Kemudahan *deployment*.
4. Kemudahan konfigurasi dan *maintenance* (konfigurasi dilakukan secara terpusat).
5. Skalabilitas tinggi.

NETWORK

PT Nindya Karya mengimplementasikan *Wireless LAN Controller* yang memiliki kelebihan dan fitur-fitur, antara lain:

1. *Interference Mitigation:* Dapat mengurangi interferensi antar *Access Point* (AP) satu dengan yang lainnya dengan mengatur luas jangkauan AP.

2. Stage 2 – HvaC and Raised floor
3. Stage 3 – Electrical and Utilities

PLATFORM

PT Nindya Karya implements a virtualization platform as illustrated in the following image:

With virtualization, 1 (one) server can accommodate several different operating systems in which each virtual server hardware device can also be configured as needed. The advantages of virtualization include:

1. Reduction of investment cost of server equipment.
2. Ease of backup and recovery using snapshots.
3. Ease of deployment.
4. Ease of configuration and maintenance (configuration is done centrally).
5. High scalability.

NETWORK

PT Nindya Karya implements a Wireless LAN Controller which has a number of advantages and features, including:

1. Interference Mitigation: Can reduce the interference between Access Point (AP) with each other by adjusting the AP coverage area.

2. *Load balancing:* Dapat secara otomatis memindahkan *load* pada AP lain untuk menyeimbangkan *load* antara AP satu dengan yang lainnya.
3. *Failover:* Apabila salah satu AP tidak dapat digunakan, maka secara otomatis *user* yang terkoneksi dengan AP tersebut akan dipindahkan ke AP yang terdekat.
4. *QoS:* Dapat memprioritaskan koneksi agar lebih cepat dan stabil, misal: koneksi *video conference.*
5. *Bandwidth Restriction:* Dapat mengelola atau membatasi *bandwidth* sesuai kebutuhan.

SECURITY

Peningkatan *security* antara lain dengan implementasi:

1. Unified Threat Management

   PT Nindya Karya mengimplementasikan *Unified Threat Management* (UTM), sebagai solusi menyeluruh keamanan TI. adapun kapabilitas dari UTM secara umum, antara lain:

   a. VPN.
   b. *Firewall.*
   c. *Anti virus.*
   d. *Anti spam.*
   e. *Content filtering.*
   f. *Intrusion Prevention System (IPS).*
   g. *Anti Spyware.*

   Dengan implementasi UTM, jaringan PT Nindya Karya (Persero) terlindungi dari ancaman-ancaman serangan *hacker*, virus, maupun ancaman lainnya.

2. Web *Application Firewall*

   PT Nindya Karya mengimplementasikan *web application firewall* untuk melindungi *web server* dengan fungsi sebagai berikut:

   a. Proteksi terhadap oWaSp top 10 serangan aplikasi termasuk *cross site script dan sql injection.*
   b. *Ddos protection, antivirus*, dlp.
   c. Mendeteksi improper http rfc.
   d. *Scan* dan *indentify port* yang terbuka.
   e. Mendeteksi *password* yang lemah.

2. Load balancing: Can automatically shift the load on other APs to balance the load between APs with each other.
3. Failover: If one AP cannot be used, the user connected to the AP will automatically be moved to the nearest AP.
4. QoS: Can prioritize connections to be faster and more stable, for example: video conference connections.
5. Bandwidth Restriction: Can manage or limit bandwidth as needed.

SECURITY

Security improvements include the implementation of:

1. Unified Threat Management

   PT Nindya Karya implements the Unified Threat Management (UTM) as a comprehensive IT security solution. In general, the capabilities of UTM include:

   a. VPN.
   b. Firewall.
   c. Anti-virus.
   d. Anti-spam.
   e. Content filtering.
   f. Intrusion Prevention System (IPS).
   g. Anti-Spyware.

   With the implementation of UTM, the network of PT Nindya Karya (Persero) is protected from the threats of hacker attacks, viruses, and other threats.

2. Web Application Firewall

   PT Nindya Karya (Persero) implements a web application firewall to protect the web server, with the following functions:

   a. Protection against oWaSp top 10 application attacks, including cross site script and sql injection.
   b. Ddos protection, antivirus, etc.
   c. Detection of improper http rfc.
   d. Scan and identification of open ports.
   e. Detection of weak passwords.

f. Mendeteksi sistem *vulnerability* yang memiliki kemungkinan untuk diserang.

g. *Behavior validation.*

DISASTER RECOVERY CENTER

Untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan aplikasi-aplikasi, PT Nindya Karya menggunakan layanan *cloud Disaster Recovery as a Service* yang dapat memberikan suatu solusi *disaster recovery* pada *Datacenter* dengan cara mereplikasi data beserta konfigurasi dari secara otomatis dan terjadwal. Saat terjadi bencana, server dan aplikasi anda dapat segera berjalan di *cloud* dengan meminimalisir data yang hilang serta waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan *Datacenter* yang down.

f. Detection of system vulnerabilities that have the possibility to be attacked.

g. Behavior validation.

DISASTER RECOVERY CENTER

To improve the security and availability of applications, PT Nindya Karya (Persero) uses the cloud Disaster Recovery Center as a service that can provide a solution for disaster recovery at the data center by replicating data and configuration automatically and in schedule. In the event of disaster, server and application can run at cloud by minimizing lost data and time required to return the data center that is currently down.

DISASTER RECOVERY CENTER PT NINDYA KARYA
PT NINDYA KARYA'S DISASTER RECOVERY CENTER

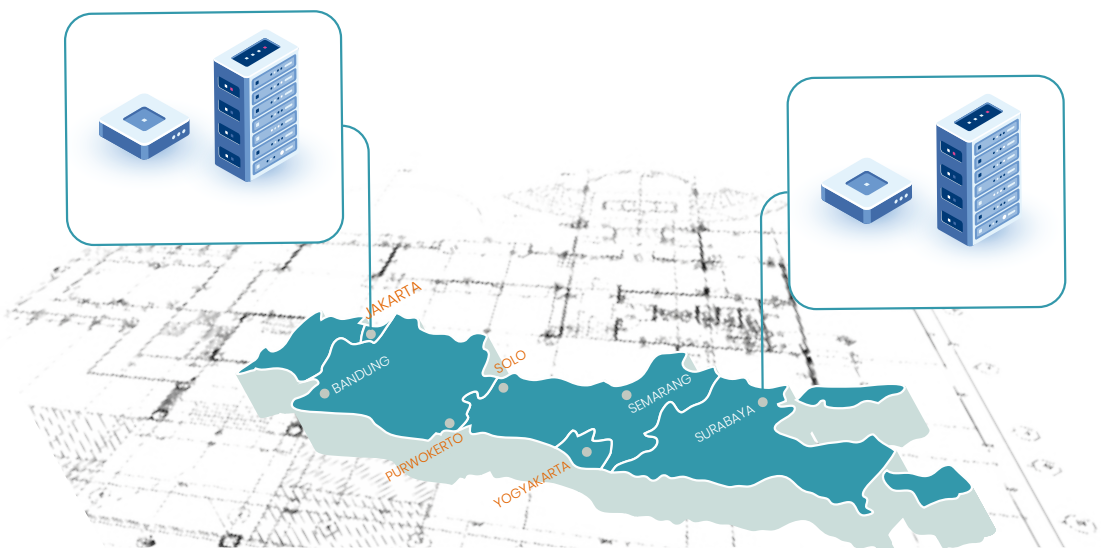

UNIFIED COMMUNICATION

Untuk mendukung mobilitas karyawan, PT Nindya Karya (Persero) memiliki kebutuhan untuk mengimplementasikan *Unified Communications*, Teknologi yang menggabungkan komunikasi via telepon dan komputer sehingga tercipta media komunikasi *all-in-one* (gambar-suara-*text*).

Keuntungan *Unified Communications*:

1. Mengubah cara komunikasi dan kerja dengan *virtual meeting*.
2. Mengeliminasi jarak dan lokasi.
3. Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu.
4. Membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

UNIFIED COMMUNICATION

To support employee's mobility, PT Nindya Karya (Persero) needs to implement a Unified Communication, a technology that combines communication via telephone and computer to create an all-in-one communication medium (image-sound-text).

Advantages of Unified Communications:

1. Change the way of communication and work with virtual meetings.
2. Eliminate distance and location.
3. Improve cost and time efficiency.
4. Assist in making decisions quickly and accurately.

Adapun fasilitas yang diperoleh dari implementasi *Unified Communications*, antara lain:

1. Audio & video *Call*.
2. Audio & video *Conferencing*.
3. *Instant Messaging*.
4. *Document Sharing*.

The facilities obtained from the implementation of Unified Communications are, among others:

1. Audio and video call.
2. Audio and video conferencing.
3. Instant Messaging.
4. Document Sharing.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Kebijakan TI tercantum pada Kebijakan Sistem Manajemen Nindya Karya poin 5, yaitu: Sistem Manajemen perlindungan Informasi, untuk menjaga kerahasiaan dan menyediakan informasi yang andal, pendokumentasian Kebijakan, Standar, prosedur, dan pedoman TI berperan dalam mendukung tingkat kematangan *Good Corporate Governance* PT Nindya Karya (Persero). pendokumentasian Kebijakan, Standar, prosedur, dan pedoman TI merupakan salah satu upaya peningkatan tata kelola TI sesuai Permen BUMN No. PER-021/1VIBU/2013 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN. Standar dan Kerangka Kerja Global yang digunakan dalam mengembangkan kebijakan, pedoman, standar, prosedur TI Nindya Karya adalah COBIT v 5.0.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

The IT policy is stated in the Nindya Karya Management System Policy point 5, namely: Information protection management system, to maintain confidentiality and provide reliable information. Documentation of IT policies, standards, procedures, and guidelines plays a role in supporting the maturity level of Good Corporate Governance of PT Nindya Karya (Persero). Documentation of IT policies, standards, procedures, and guidelines is one of the efforts to improve IT governance in accordance with SOE Minister Regulation No. PER-021/1VIBU/2013 regarding Information Technology Management of SOEs. The Global Standards and Framework used in developing Nindya Karya's IT policies, guidelines, standards, and procedures is COBIT v 5.0.

KEBIJAKAN *POLICY*	Kebijakan Sistem Manajemen PT Nindya Karya (Persero)	*Management System Policy at PT Nindya Karya (Persero)*
STANDAR *STANDARD*	1. Standar Teknologi Informasi 2. Standar Keamanan Informasi	1. *Information Technology Standard* 2. *Information Protection Management System Standard*
PEDOMAN *GUIDELINE*	1. Pedoman Sistem Manajemen Teknologi Informasi 2. Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1. *Management System Guideline at PT Nindya Karya (Persero)* 2. *Chapter VIII of Information Technology Guideline*
PROSEDUR *PROCEDURE*	Prosedur Bidang Teknologi Informasi	*Procedure in Information Technology Field*
INSTRUKSI KERJA *WORK INSTRUCTION*	IK Bidang Teknologi Informasi	*Information Technology Work Instruction*
FORM, TEMPLATE, **DAN** *CHECKLIST FORM, TEMPLATE, AND CHECKLIST*	***Form, Template*** dan ***Checklist*** untuk laporan log kerja dan dokumentasi kegiatan TI	*Form, Template, and Checklist for work log report and IT activity documentation*

Kebijakan TI perusahaan tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan sistem komunikasi terpadu sebagai sistem komunikasi yang efektif dan mampu meningkatkan produktivitas dalam menjalankan tugas dan kegiatan operasional secara menyeluruh sesuai Standar Teknologi Informasi poin 2.3, Kepada karyawan yang telah diberikan hak akses sistem komunikasi terpadu untuk selalu:

1. Menghidupkan aplikasi komunikasi Jabber tidak terbatas pada waktu jam kerja bagi karyawan yang telah diberikan hak akses aplikasi Jabber.

The Company's IT policy in 2020 was carried out to optimize the use of integrated communication system to serve as an effective communication system and be able to increase productivity in carrying out duties and operational activities in general, in accordance with the Information Technology Standard point 2.3. Employees have been given access rights to the integrated communication system to always:

1. Turn on the Jabber communication application with no limitation of working hours for employees who have been granted access rights to the Jabber application.

2. Menggunakan perangkat komunikasi terpadu baik *desktop phone* maupun aplikasi Jabber untuk semua komunikasi audio visual secara *Intern*al.
3. Meminimalisasi perjalanan dinas antar Wilayah–Pusat-Proyek yang dapat digantikan oleh *video conference.*
4. Mengomunikasikan kepada Departemen Pengembangan jika ada kendala terkait sistem komunikasi terpadu.

BIM (*BUILDING INFORMATION MODELING*)

Building Information Modeling, atau disebut "BIM", merupakan suatu proses untuk membuat virtualisasi 3 (tiga) dimensi secara digital dari suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat informasi mengenai volume, biaya, waktu pelaksanaan, material serta energi dari konstruksi tersebut yang dalam pembuatannya didukung oleh beberapa perangkat lunak. Di tahun 2020, Perseroan menerapkan konsep atau teknologi BIM pada seluruh proyek yang dikerjakan Nindya.

Manfaat BIM, antara lain:

- Meningkatkan efisiensi dalam desain.
- Mengurangi kemungkinan terjadinya *rework*.
- Memberikan gambaran akan hasil akhir konstruksi.
- Dengan satu kegiatan pembuatan model akan mendapatkan denah, potongan, tampak serta volumenya.
- Mempermudah visualisasi kemajuan fisik konstruksi pada *schedule* pekerjaan.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, Perseroan terus bergerak melakukan inovasi sesuai permintaan industri konstruksi dan bisnis investasi infrastruktur.

Untuk mendukung pengembangan bisnis di tahun 2020, Perseroan telah merancang dan menetapkan pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang akan direalisasikan di tahun 2021 nantinya. Selain itu, Perseroan juga akan melanjutkan program pengembangan perangkat Teknologi Informasi tahun 2020 yang tertunda atau belum sempat direalisasikan sepenuhnya.

2. Use integrated communication devices, both desktop phones and Jabber applications, for all internal audio-visual communications.
3. Minimize business trips between Regions-Centers-Projects that can be replaced by video conferencing.
4. Communicate to the Development Department if there are problems related to the integrated communication system.

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

Building Information Modeling, or BIM, is a process to create a digital 3 (three) dimensional virtualization of a construction, whereby there is information about the volume, cost, execution time, material, and energy of the construction, which is supported by a number of software. In 2020, the Company implemented BIM technology/concept through all Nindya's projects.

The benefits of BIM are, among others:

- Improving efficiency in design.
- Reducing the possibility of rework.
- Providing an overview of the final construction results.
- Obtaining the floor plan, cut, appearance, and volume with one modeling activity.
- Facilitating the visualization of the physical progress of construction on the work schedule.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN

As a company engaged in construction services, Nindya Karya continues to make innovation in accordance with the demands of the construction industry and the infrastructure investment business.

To support business development, the Company has designed and determined the development of Information Technology (IT) that will be realized in 2021. In addition, the Company will continue the Information Technology devices development program which has been delayed or has not been fully realized.

Runway Bandara Rembelle, Aceh
Rembelle Airport Runway, Aceh

TATA KELOLA PERUSAHAN

CORPORATE GOVERNANCE

Dermaga Kendari, Sulawesi Tenggara
Kendari Jetty, Southeast Sulawesi

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP NINDYA KARYA

DEVELOPMENT OF IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN NINDYA KARYA

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

STATEMENT OF COMMITMENT TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi perangkat khusus bagi PT Nindya Karya (Persero) dalam menjalankan usahanya. GCG membuat usaha Perseroan menjadi berkelanjutan dan berjalan sistematis.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan salah satu kunci dalam membangun keberlanjutan bisnis. Untuk itu, Perseroan selalu berupaya meningkatkan kualitas GCG. Penerapan GCG yang dilakukan Perseroan berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta *best practice* di industri keuangan. Manajemen, berdasarkan masukan dan saran dari Dewan Komisaris, terus melakukan penyempurnaan dalam organisasi sehingga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan. Komitmen tersebut didukung dengan adanya:

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan yang jelas dan realistis yang dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pedoman GCG Perusahaan;
3. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-komite;
4. Penetapan kode etik yang dilaksanakan secara konsisten dan membudaya;
5. Sistem pengendalian *Internal* yang kuat;
6. Implementasi mekanisme *check and balances* yang proporsional;
7. Pedoman transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi afiliasi, dan transaksi dengan pihak terkait lainnya;
8. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran;
9. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

For PT Nindya Karya (Persero), Good Corporate Governance (GCG) is an essential factor in carrying out its business. GCG promotes systematical implementation and sustainability of business of the Company.

The proper implementation of Good Corporate Governance (GCG) is one of the keys to ensure business continuity. To that end, the Company always strives to improve the quality of its GCG implementation. In carrying out the GCG within its operations, the Company refers to applicable regulations and best practices in the financial industry. The management, based on input and advice from the Board of Commissioners, continues to make improvements in the organization so that it is in accordance with the provisions and laws and regulations.

The Company is committed to implementing GCG in a sustainable manner. This commitment is supported by:

1. A clear and realistic vision, mission, and corporate values that are evaluated periodically by the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Company GCG Guidelines;
3. Guidelines and work procedures for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees;
4. Determination of a code of ethics that is carried out consistently and culturally;
5. Strong internal control system;
6. Implementation of proportional check-and-balance mechanism;
7. Guidelines for transactions containing conflicts of interest, affiliated transactions, and transactions with other related parties;
8. Implementation of a violation reporting system;
9. Sustainable social and environmental responsibility program.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BASIS OF IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan yang Baik didasarkan pada prinsip metode pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel, yang kemudian berelasi langsung terhadap pengelolaan organisasi yang berkelanjutan dan iklim investasi. GCG merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan sebagai upaya mengatur hubungan antar organ perusahaan; baik hubungan *Intern*al maupun eksternal yang berlandaskan pada peraturan, perundang-undangan dan etika berusaha.

Implementasi GCG di lingkup Perusahaan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi perusahaan; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan *Intern*al dan eksternal, di mana aspek-aspek tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Implementasi GCG di Perseroan bertujuan untuk:

- Mengoptimalkan daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun *Intern*asional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
- Mendorong pengelolaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perseroan;
- Mendorong Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
- Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional; serta
- Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

*Intern*alisasi atas prinsip-prinsip GCG dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG yang ada serta diintegrasikan pada peraturan yang berlaku guna menjadi acuan pedoman praktik

Good Corporate Governance is based on the principles of accountable decision-making methods and management of business entity activities, which are then directly related to sustainable organizational management and the investment climate. GCG is a mechanism created as an effort to regulate relations between company organs; both internal and external relations based on regulations, legislation and business ethics.

The implementation of GCG within the Company refers to several laws and regulations, especially Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This law provides a comprehensive foundation for the management aspects of the company's organization; starting from the rights and obligations of shareholders, duties and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the Company's relationship with internal and external stakeholders, where these aspects are also regulated in the Company's Articles of Association.

The implementation of GCG in the Company aims to:

- Optimize strong competitiveness, both nationally and internationally, so as to be able to maintain its existence and live sustainably to achieve the goals and objectives of the Company;
- Encourage professional, efficient, and effective management, as well as empowering functions and increasing the independence of the Company;
- Encourage the Company in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
- Increase the Company's contribution to the national economy; as well as
- Improve a conducive climate for the development of national investment.

Internalization of GCG principles is carried out by taking into account the existing GCG principles and is integrated into applicable regulations to become a reference for best practice guidelines

terbaik (*best practice*) yang dilaksanakan. Sebagai landasan legal-formal utama dalam menjalankan kegiatan tata kelola usaha, Perusahaan menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara *Juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional Perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*."

that are implemented. As the main legal-formal basis in carrying out business governance activities, the Company establishes applicable governance policies by referring to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. (Good Corporate Governance) in State-Owned Enterprises jo. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Governance) in State-Owned Enterprises, which states that "BUMN is obliged to carry out Company operations by adhering to GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness."

ASAS-ASAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Transparansi
Transparency

Akuntabilitas
Accountability

Responsibilitas
Responsibility

Independensi
Independency

Fairness atau Kesetaraan/ Kewajaran
Fairness or Equality

Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perusahaan adalah sebagai berikut:

The following table describes the principles mentioned above and their general implementation within the Company:

PRINSIP DASAR *PRINCIPLE*	PENJELASAN *DESCRIPTION*	PENERAPAN DI LINGKUP NINDYA KARYA *IMPLEMENTATION WITHIN NINDYA KARYA*
Keterbukaan *Transparency*	Transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai pengelolaan aspek operasional dan usaha. *Transparency is the openness in carrying out the decision-making process and openness in presenting material and relevant information regarding the management of operational and business aspects.*	Perseroan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh Pemangku Kepentingan. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dengan baik dan tepat akan menghindari terjadinya benturan kepentingan ***(conflict of interest)*** dengan berbagai pihak. hal ini dibuktikan dengan publikasi informasi keuangan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Peseroan. Seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi penting tersebut termasuk informasi lainnya dengan mengakses ***website*** Perseroan di www.nindyakarya.co.id atau beberapa laporan yang diterbitkan secara berkala baik dalam bentuk fisik, digital atau siaran pers. *The Company always provides correct, accurate, and timely information to all Stakeholders. The Company believes that the implementation of the principle of transparency properly and appropriately will avoid conflicts of interest with various parties. this is evidenced by the publication of financial information that has a significant impact on the Company's performance. All stakeholders can access this important information including other information by accessing the Company's website at www.nindyakarya.co.id or several reports that are published regularly in physical, digital or press releases.*

PRINSIP DASAR *PRINCIPLE*	PENJELASAN *DESCRIPTION*	PENERAPAN DI LINGKUP NINDYA KARYA *IMPLEMENTATION WITHIN NINDYA KARYA*
Akuntabilitas *Accountability*	Akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. *Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of corporate organs so that the management of the Company is carried out effectively.*	Seluruh organ tata kelola Perusahaan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta pertanggung jawaban yang sistematis. hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perseroan yang memisahkan tugas dan Tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola. *All organs of corporate governance have the principle of accountability with clear functions, structures, systems, and systematic accountability. this can be seen through the management of the Company which separates duties and responsibilities and clearly describes the functions, rights, obligations, and authorities of each governance organ.*
Pertanggungjawaban *Responsibility*	Responsibilitas atau tanggungjawab sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan aktivitas usaha terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Responsibility is the conformity in the management of business activities to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.*	Bentuk pertanggungjawaban Perusahaan dibuktikan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pembayaran pajak, pelaksanaan hubungan industrial, melindungi segenap pegawai dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan ***(Corporate Social Responsibility)*** yang berkelanjutan. *The form of corporate responsibility is evidenced by compliance with applicable regulations, such as paying taxes, implementing industrial relations, protecting all employees by implementing occupational health and safety, as well as protecting the environment through sustainable corporate social responsibility programs.*
Kemandirian *Independency*	Kemandirian sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Independency is a condition in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with prevailing laws and regulations as well as sound corporate principles.*	Pengelolaan Perseroan dilakukan dengan profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. *The management of the Company is carried out professionally without conflict of interest and influence from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.*
Kesetaraan dan Kewajaran *Fairness and Equality*	***Fairness*** atau kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak ***stakeholder*** yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. *Fairness is the justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and prevailing laws and regulations.*	Perusahaan memberikan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. melalui prinsip ini, Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap seluruh aset dengan baik dan ***prudent*** sehingga memunculkan perlindungan kepentingan Pemegang Saham secara jujur dan adil. Bagi Perusahaan, prinsip ***fairness*** menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam Perusahaan. *The Company provides fair and equal treatment in fulfilling the rights of all Stakeholders based on the prevailing laws and regulations. Through this principle, the Company manages all assets properly and prudently so as to create an honest and fair protection of the interests of Shareholders. For the Company, the principle of fairness is the soul to monitor and ensure fair treatment among the various interests in the Company.*

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perseroan mengacu kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Undang-Undang republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal.
   b. Undang-Undang republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
   c. Undang-Undang republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
   d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
   f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
   g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
   h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
   i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
   j. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.
   k. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
   l. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
   m. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

LEGAL BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG within the Company refers to several laws and regulations, namely:

1. Laws of the Republic of Indonesia
   a. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 concerning the Capital Market.
   b. Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
   c. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
   d. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.
   e. Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower.
   f. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN).
   g. Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investment.
   h. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
   i. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016.
   j. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure.
   k. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.
   l. Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2017 concerning Construction Services.
   m. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

2. Peraturan Pemerintah

   a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021.

3. Peraturan Presiden

   a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

   a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PER-09/MBU/2012.

   b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020.

   c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

   d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman

2. Government Regulations

   a. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.

   b. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 40 of 2009 concerning Amendments to Government Regulation no. 51 of 2008 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business.

   c. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2020 concerning Implementing Regulations of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services as amended by Government Regulation No. 14 Year 2021.

3. Presidential Regulations

   a. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in the Provision of Infrastructure.

   b. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services as last amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021.

4. Minister of State-Owned Enterprises Regulations

   a. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as last amended by PER-09/MBU/2012.

   b. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/06/2020.

   c. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

   d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-01/MBU/05/2019 concerning the fourth amendment to the Regulation of State-Owned Enterprises Number PER-

Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pegnangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021.

5. Keputusan Menteri

a. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of Owned Enterprises Country.

e. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-10/MBU/10/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Board State Owned Enterprise Supervisor.

f. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises R.I. Number PER-12/MBU/11/2020 concerning the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

g. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-01/MBU/03/2021 concerning Guidelines for Proposing, Reporting, Monitoring, and Changes in the Use of Additional State Equity Participation to State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

h. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-06/MBU/04/2021.

5. Ministerial Decrees

a. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

b. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. Kep-100/MBU/2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises.

c. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. Kep-101/MBU/2002 concerning Preparation of Work Plans and Budgets for State-Owned Enterprises.

d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.

6. Peraturan lainnya

a. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Anggaran Dasar Perusahaan yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir berdasarkan Akta No. 68 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Khairina, SH, Notaris di Jakarta.

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam risalah RUPS.

Di samping itu, penerapan prinsip dan praktik GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu kepada Pedoman umum GCG Indonesia tahun 2006 yang dirilis oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

d. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. Kep-102/MBU/2002 concerning Preparation of Long-Term Plans for State-Owned Enterprises.

6. Other regulations

a. The Company's Articles of Association adjusted to the Law No. 40 of 2007 concerning Articles of Association, which have been amended several times most recently by Deed No. 68 dated January 31, 2020, drawn up before Khairina, SH, Notary in Jakarta.

b. Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) listed in the minutes of the GMS.

In addition, the implementation of GCG principles and practices within the Company also refers to the 2006 Indonesian GCG General Guidelines released by the National Committee for Governance Policy (KNKG).

PETA JALAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ROAD MAP OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT

Guna melaksanakan pengembangan GCG yang sistematis serta tanggap terhadap segala bentuk dinamika yang terjadi baik di *Intern*al maupun di eksternal, Perusahaan telah merancang *Road Map* implementasi GCG. Dalam *Road Map* tersebut, Perusahaan telah melakukan analisis serta identifikasi tantangan penerapan GCG yang ada guna mencapai visi GCG sebagai budaya di lingkungan Perseroan.

Berdasarkan analisis dan identifikasi yang dilakukan, Perseroan telah menetapkan langkah pengembangan GCG yang meliputi proses *bench marking* sebagai acuan kerja dan penetapan persepsi visi penerapan GCG yang dilakukan secara spesifik. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan *manual book*/panduan penerapan GCG yang disarikan dari berbagai referensi dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola atau optimalisasi fungsi organ tata kelola baik utama maupun pendukung. Setelah menguatkan fundamental GCG dan penyediaan infrastruktur GCG yang dibutuhkan, Perseroan melakukan upaya *Intern*alisasi dengan objek utama manajemen dan Insan Nindya Karya secara menyeluruh. *Intern*alisasi ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran setiap pemangku kepentingan akan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip GCG yang ada dan terpadu dalam petunjuk pelaksanaan penerapan *(board manual)*.

In order to carry out systematic GCG development and be responsive to all forms of dynamics that occur both internally and externally, the Company has designed a GCG implementation road map. In the Road Map, the Company has analyzed and identified the challenges of implementing existing GCG in order to achieve the GCG vision as a culture within the Company.

Based on the analysis and identification carried out, the Company has determined the steps for developing GCG which include the bench marking process as a work reference and determining the perception of the vision for the implementation of GCG that is carried out specifically. Next is the stage of compiling a manual book/guideline for the implementation of GCG which is abstracted from various references and laws and regulations governing governance or optimizing the functions of governance organs, both main and supporting. After strengthening GCG fundamentals and providing the required GCG infrastructure, the Company made internalization efforts with the main object of management and Nindya Karya personnel as a whole. This internalization was carried out in order to increase the awareness of each stakeholder on the importance of implementing the existing GCG principles and being integrated in the implementation guidelines

Selanjutnya, terintegrasi dengan rencana strategis Perseroan dalam mengedepankan Teknologi Informasi (TI) dalam seluruh aktivitas bisnis, Perseroan juga melakukan pengembangan mekanisme GCG yang berbasiskan IT. Dan yang terakhir, adalah melakukan transformasi terhadap pengimplementasian GCG di lingkungan Perseroan yang dilakukan secara konsisten. Dalam tahapan ini, Perseroan telah menempatkan GCG sebagai budaya.

(board manual). Furthermore, integrated with the Company's strategic plan in promoting Information Technology (IT) in all business activities, the Company also develops IT-based GCG mechanisms. And lastly, is to carry out a consistent transformation of the implementation of GCG within the Company. In this stage, the Company has placed GCG as a culture.

ROAD MAP GCG NINDYA KARYA

NINDYA KARYA'S GCG ROAD MAP

STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND PROCESS

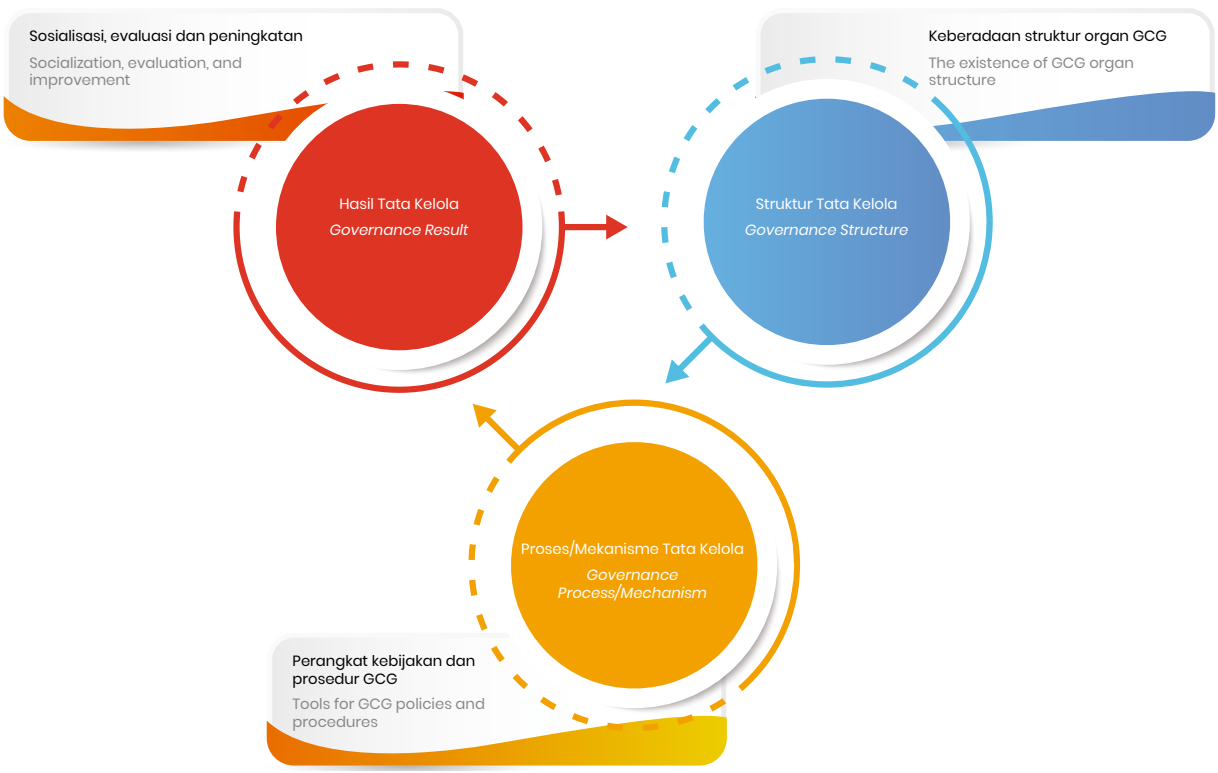

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur umum tata kelola perusahaan terdiri dari rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang berkedudukan sebagai organ manajemen Puncak dalam melakukan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses *check and balances* kegiatan usaha agar dapat dikelola dan pertanggung jawabkan secara sehat.

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE ORGANS

Referring to the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the general structure of corporate governance consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, which are the top management organs in carrying out the tasks of controlling and supervising business activities. All of these main organs play a role in carrying out the check and balances process for business activities so that they can be managed and accounted for in a healthy manner.

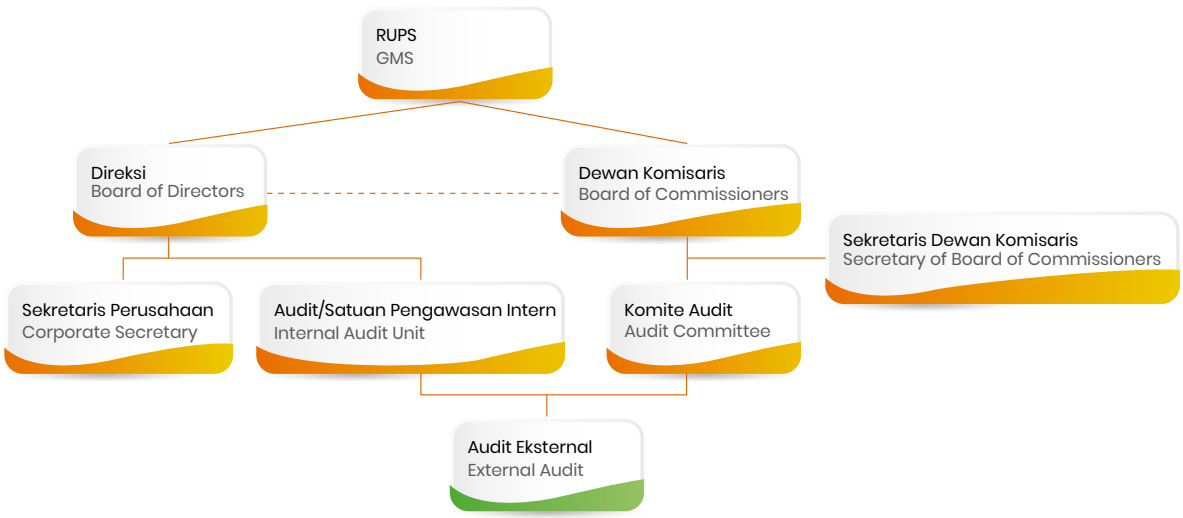

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, organ Perusahaan terdiri dari rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Pursuant to Law No. 40 of 2007 Chapter I concerning General Provisions Article 1 number 2, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which has authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, ketiga organ Perusahaan tersebut memiliki kewenangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lainnya berikut independensi dalam melaksanakan fungsi untuk kepentingan Perseroan. RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang- undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara Direksi memiliki Sekretaris Perusahaan dan audit *Intern*al yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan *Intern* (SPI). Perseroan juga melaksanakan proses audit eksternal atas laporan keuangan Perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Penunjukan KAP dilaksanakan melalui forum RUPS.

PROSES DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Mekanisme tata kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur tata kelola, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. mekanisme tata kelola dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 & 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) *Juncto* 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (*soft-structure* GCG) agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi Perseroan.

the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

In carrying out their duties, the three organs of the Company have the authority that has been regulated in accordance with the provisions of the legislation, the Company's Articles of Association, and other provisions as well as independence in carrying out functions for the benefit of the Company. The GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other's duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Secretary to the Board of Commissioners. Meanwhile, the Board of Directors has a Corporate Secretary and internal audit is carried out by the Internal Audit Unit (SPI). The Company also carries out an external audit process on the Company's financial statements, in accordance with applicable regulations, which is carried out by the Public Accounting Firm (KAP). The appointment of KAP is carried out through the GMS forum.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PROCESS AND MECHANISM

The governance mechanism is a GCG implementation mechanism which is reflected in a strong system. The implementation of GCG is not enough just to rely on the pillars of the governance structure, but it requires clear rules of the game in the form of a mechanism. Governance mechanism can be defined as the rules of the game, procedures, and a clear relationship between the party making the decision and the party exercising control (supervision) of the decision.

Decision of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated September 15, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero) continues to improve its GCG policy (soft-structure GCG) so that in line with the needs of business processes and the provisions for the implementation of GCG for the Company.

Perseroan telah menyusun, mengesahkan, menerapkan dan memperbaharui *soft structure* GCG yang terdiri dari berbagai pedoman di tahun 2020, sebagai berikut:

The Company has compiled, approved, implemented, and updated the GCG soft structure which consists of various guidelines in 2020, as follows:

PERANGKAT KEBIJAKAN *POLICY TOOLS*	PENETAPAN DAN PEMBARUAN *DETERMINATION AND RENEWAL*
Visi dan Misi *Vision and Mission*	Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 tanggal 09 November 2020 tentang Visi, Misi PT Nindya Karya (Persero). Visi : Menjadi Perusahaan Global di bidang Konstruksi dan Investasi berbasis Engineering yang terpercaya, terkemuka dan berkelanjutan. Misi: • Meningkatkan Nilai tambah bagi Stakeholders secara berkelanjutan berbasis *Excellence Engineering* dengan Inovasi serta *Human Capital* yang Unggul dan berakhlak • Mengembangkan Industri Konstruksi dan Investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan *Decision of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0492/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dated November 9, 2020 regarding the Vision and Mission of PT Nindya Karya (Persero)* *Vision: To be a Global Company in Engineering-Based Construction and Investment, Reliable, Excellent and Sustainable* *Mission:* • *Increasing added value for stakeholders in a sustainable manner based on engineering excellence with innovation and superior and moral human capital* • *Developing a construction and investment industry with global standards and high competitiveness by prioritizing customer satisfaction, occupational health and safety, and environmental sustainability*
Budaya Perusahaan *Corporate Culture*	Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Budaya Perusahaan (***Corporate** Culture*) PT Nindya Karya (Persero) 1. Nilai-nilai utama (*core values*) Sumber Daya manusia PT Nindya Karya (Persero) terdiri dari: • Amanah • Kompeten • Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif 2. Slogan: *Toward The Excellent* *Stipulated through the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 2999/DIRUT/KPTS/KDS/09/2020 dated September 15, 2020 concerning Corporate Culture of PT Nindya Karya (Persero).* *1. The core values of Human Capital of PT Nindya Karya (Persero) are:* • *Amanah* • *Kompeten* • *Harmonis* • *Loyal* • *Adaptif* • *Kolaboratif* *2. Slogan: Toward the Excellent*
Implementasi *Good **Corporate** Governance* (GCG) dan Kode Etika Perilaku (*Code of Conduct*) *Implementation of GCG and Code of Conduct*	Surat Edaran Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0010/DIRUT/SE/SEKPER/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Implementasi *Good **Corporate** Governance* (GCG) dan Kode Etika Perilaku (*Code of Conduct*) *Circular of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0010/DIRUT/SE/SEKPER/01/2020 dated January 6, 2020 regarding the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the Code of Conduct*
Pedoman *Good **Corporate** Governance* (GCG) *GCG Guidelines* Pedoman Prilaku Etika *Code of Conduct Guidelines*	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) Nomor: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dan Nomor: 107/Kom/11/2020 tentang Pedoman Penerapan *Good **Corporate** Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) tanggal 16 November 2020. *Joint Decision of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and No. 107/Kom/11/2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) dated November 16, 2020.*
Whistleblowing System	Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 & 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good **Corporate** Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) Juncto 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good **Corporate** Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero).

PERANGKAT KEBIJAKAN *POLICY TOOLS*	PENETAPAN DAN PEMBARUAN *DETERMINATION AND RENEWAL*
Pedoman Pengendalian Gratifikasi *Gratification Control Guidelines*	• Memberlakukan buku-buku pedoman *Good **Corporate** Governance* (GCG) Perusahaan yang terdiri dari: 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of **Corporate** Governance*) Revisi 0.4 2. *Board Manual* Revisi 0.3 3. Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) Revisi 0.7 4. Pedoman Pelanggaran *Whitle Blowing System* Revisi 0.2 5. Pedoman Penanganan Gratifikasi Revisi 0.2 6. Pedoman Benturan Kepentingan Revisi 0.2 Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 & 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good **Corporate** Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero), mengesahkan
Tim Pengendalian Gratifikasi *Gratification Control Team*	Pedoman *Good **Corporate** Governance* (GCG) atas perubahan Visi Misi PT Nindya Karya (Persero) yaitu: 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of **Corporate** Governance*) revisi 0.5 2. Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) Revisi 0.8. *Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) no. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated 15 September 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero).*
Pedoman Benturan Kepentingan *Conflict of Interest Guidelines*	• *Enforce the Company's Good Corporate Governance (GCG) guidebooks, which consist of:* 1. *Code of Corporate Governance Revised 0.4* 2. *Board Manual Revision 0.3* 3. *Code of Conduct Revised 0.7* 4. *Guidelines for Violation of the Whitle Blowing System Revision 0.2* 5. *Guidelines for Handling Gratification Revision 0.2* 6. *Conflict of Interest Guidelines Revision 0.2* *Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero), validating the Good Corporate Governance (GCG) guidelines for changes in the Vision and Mission of PT Nindya Karya (Persero), namely:* 1. *Code of Corporate Governance revision 0.5* 2. *Code of Conduct Revised 0.8*
Pedoman Tata Kelola Perusahaan *Code of Corporate Governance*	
Pemantauan Pelaksanaan GCG *Monitoring of GCG Implementation*	Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0574/DIRUT/KPTS/SEKPER/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan *Good **Corporate** Governance* (Tim GCG) PT Nindya Karya (Persero) *Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0574/DIRUT/KPTS/SEKPER/06/2019 dated June 28, 2019 regarding the Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Team) of PT Nindya Karya (Persero)*
Board Manual	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) Nomor: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan Nomor: 87/Kom/09/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Good **Corporate** Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) *Joint Decision of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and No. 87/Kom/09/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero)*

Adapun hirarki kebijakan GCG adalah sebagai berikut:

The hierarchy of GCG policies in the Company is as follows:

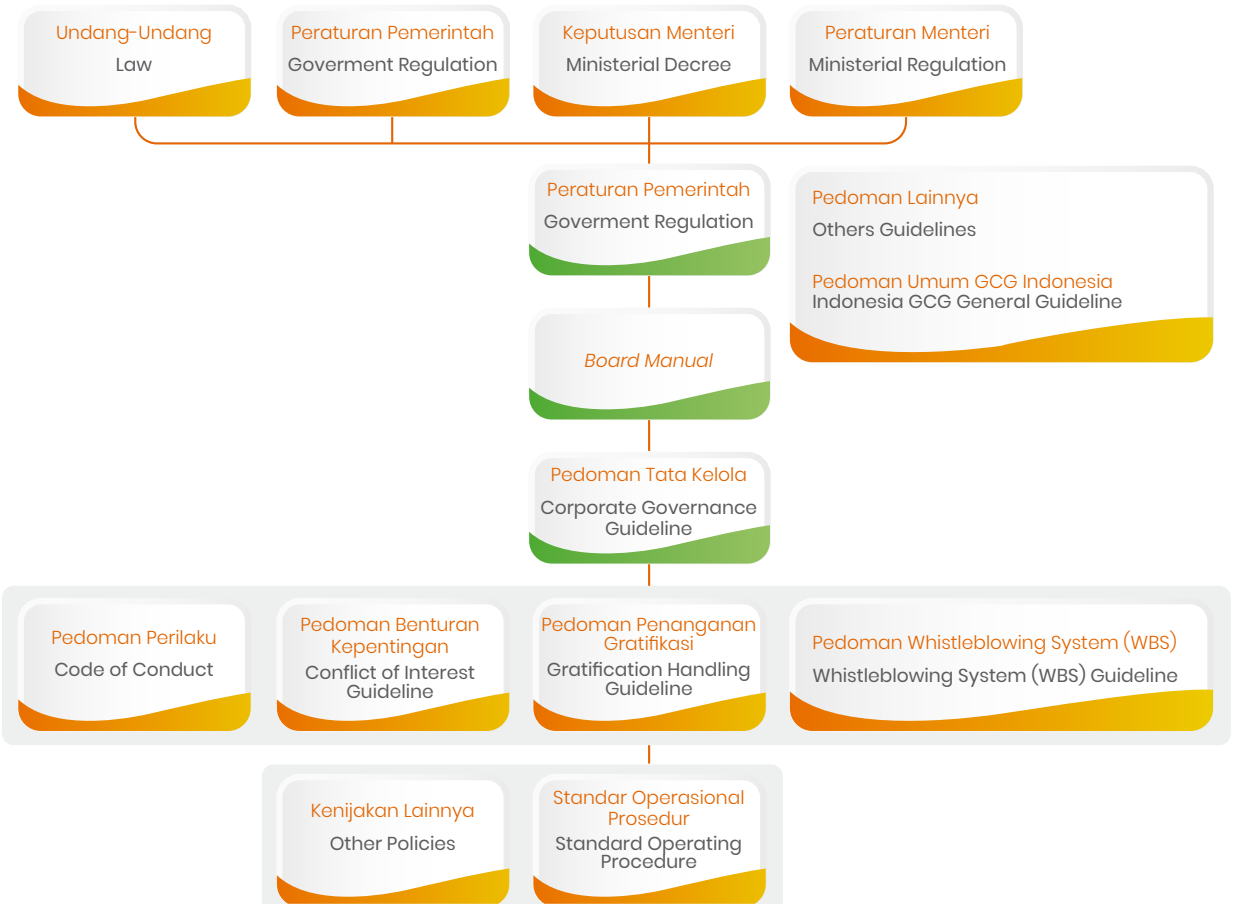

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Agar pelaksanaan GCG Perseroan dapat menyentuh seluruh level jabatan Perseroan baik yang berada pada Unit Kerja ataupun Bisnis, Perseroan memiliki kebijakan yang melibatkan seluruh Kepala Departemen Kantor Pusat serta Direktur Keuangan dan SDM sebagai Penanggung Jawab Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait upaya sosialisasi GCG di lingkungan Perseroan. Bertanggung jawab langsung atas penerapan GCG di Perseroan khususnya pada unit bisnis masing-masing sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 Tentang Perubahan Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Tim GCG) PT Nindya Karya (Persero). Kegiatan sosialisasi atas penerapan GCG dilakukan dengan membedakan ruang lingkup tugas yang ada yaitu sosialisasi dan *Internalisasi* pada Unit Kerja dan Unit Bisnis.

DISSEMINATION AND INTERNALIZATION OF GCG POLICIES

In order for the implementation of the Company's GCG to touch all levels of the Company's positions, both those in the Work Unit and Business Unit, the Company has a policy that involves all Heads of Head Office Departments as well as the Director of Finance and Human Resources as the Person in Charge of the Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) related to GCG socialization efforts within the Company. Directly responsible for the implementation of GCG in the Company, especially in their respective business units as stipulated in the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0008/DIRUT/KPTS/SEKPER/01/2021 dated January 29, 2021 concerning Changes in the Monitoring Team for Implementation of Good Corporate Governance (GCG Team) of PT Nindya Karya (Persero). Socialization activities on the implementation of GCG are carried out by distinguishing the scope of existing tasks, namely socialization and internalization in Work Units and Business Units.

Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan unsur Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) terdiri dari :

In the decision letter, the elements of the Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) consist of:

NO.	NAMA JABATAN *POSITION IN THE COMPANY*	JABATAN DALAM TIM *POSITION IN THE TEAM*
1.	Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	Penanggung Jawab *Person-in-Charge*
2.	Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*	Ketua *Team Leader*
3	Senior Vice President *Human Capital* *Senior Vice President Human Capital*	Sekretaris *Secretary*
4.	Kepala Satuan Pengawas *Intern* *Head of Internal Audit Unit*	Anggota *Member*
5.	*Senior Vice President* Perencanaan Strategis & Manajemen Risiko *Senior Vice President Strategic Planning and Risk Management*	Anggota *Member*
6.	*Senior Vice President* Pemasaran *Senior Vice President Marketing*	Anggota *Member*
7.	*Senior Vice President Estimating*	Anggota *Member*
8.	*Senior Vice President* Supply Shain Management	Anggota *Member*
9.	*Senior Vice President* QHSSE	Anggota *Member*
10.	*Senior Vice President* Keuangan *Senior Vice President Finance*	Anggota *Member*
11.	*Senior Vice President* Akuntasi & Perpajakan *Senior Vice President Accounting and Taxation*	Anggota *Member*
12.	*Senior Vice President* Sistem & Teknologi Informasi *Senior Vice President Information System and Technology*	Anggota *Member*

Sosialisasi GCG dilakukan kepada karyawan melalui penandatanganan Pernyataan Kepatuhan dalam buku Pedoman Perilaku Etika yang merupakan buku pedoman bagi Etika Kerja dan Etika Bisnis yang berlaku di Perusahaan.

GCG socialization is carried out to employees by signing the Compliance Statement in the Code of Conduct Guideline which is a guidebook for Work Ethics and Business Ethics applicable in the Company.

ASSESSMENT: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ASSESSMENT, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION

DASAR PENILAIAN DAN METODE

Sesuai Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern*al Pemerintah, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PER-09/MBU/2012, Perseroan sebagai BUMN wajib untuk melakukan pengukuran terhadap

BASIS AND METHOD OF ASSESSMENT

Pursuant to Presidential Regulation No. 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), Government Regulation (PP) No. 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 Regarding the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as last amended by PER-09/MBU/2012, the Company as a BUMN is required to measure the implementation of GCG which is carried out through an assessment

penerapan GCG yang dilakukan melalui penilaian (*assessment*). Perseroan melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Tujuan penilaian penerapan GCG adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG Perseroan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perseroan dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perseroan serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perusahaan.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG Perseroan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *Corporate governance* Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara:

BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

1. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaiamna dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perseroan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

(assessment). The Company evaluates the implementation of GCG consistently every year to determine the level of adequacy of GCG implementation within the Company.

The objectives of assessing the implementation of GCG are:

1. Measuring the quality of the Company's GCG implementation by assessing the level of fulfillment of GCG criteria with real conditions applied to the Company by giving a score/value for the implementation of GCG and the category of the quality of its implementation.
2. Identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation and propose recommendations for improvement to reduce the gap between the GCG criteria and their application to the Company.
3. Monitor the consistency of the Company's GCG implementation and obtain input for the improvement and development of the Company's corporate governance policies.

Based on Article 44 paragraph 1 of the Regulation of State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises:

SOEs are required to measure the implementation of GCG in the form of:

1. Assessment, which is a program to identify the implementation of GCG in SOEs through measuring the implementation and implementation of GCG in SOEs which is carried out periodically every 2 (two) years;
2. Review, which is a program to describe the follow-up to the implementation and implementation of GCG in SOEs carried out in the following year after the assessment as referred to in letter a, which includes evaluation of the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

The method of measuring the implementation of GCG within the Company refers to the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. This assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012.

6 Aspek *Assessment* GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)

Six Aspects of GCG Assessment (Decision of the Secretary of Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012)

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Capital Owner*	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas *Board of Commissioners/ Supervisory Board*	Direksi *Board of Directors*	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Disclosure of Information and Transparency*	Aspek Lainnya *Other Aspects*

MEKANISME DAN CAPAIAN *ASSESSMENT* GCG

MECHANISM AND RESULT OF GCG ASSESSMENT

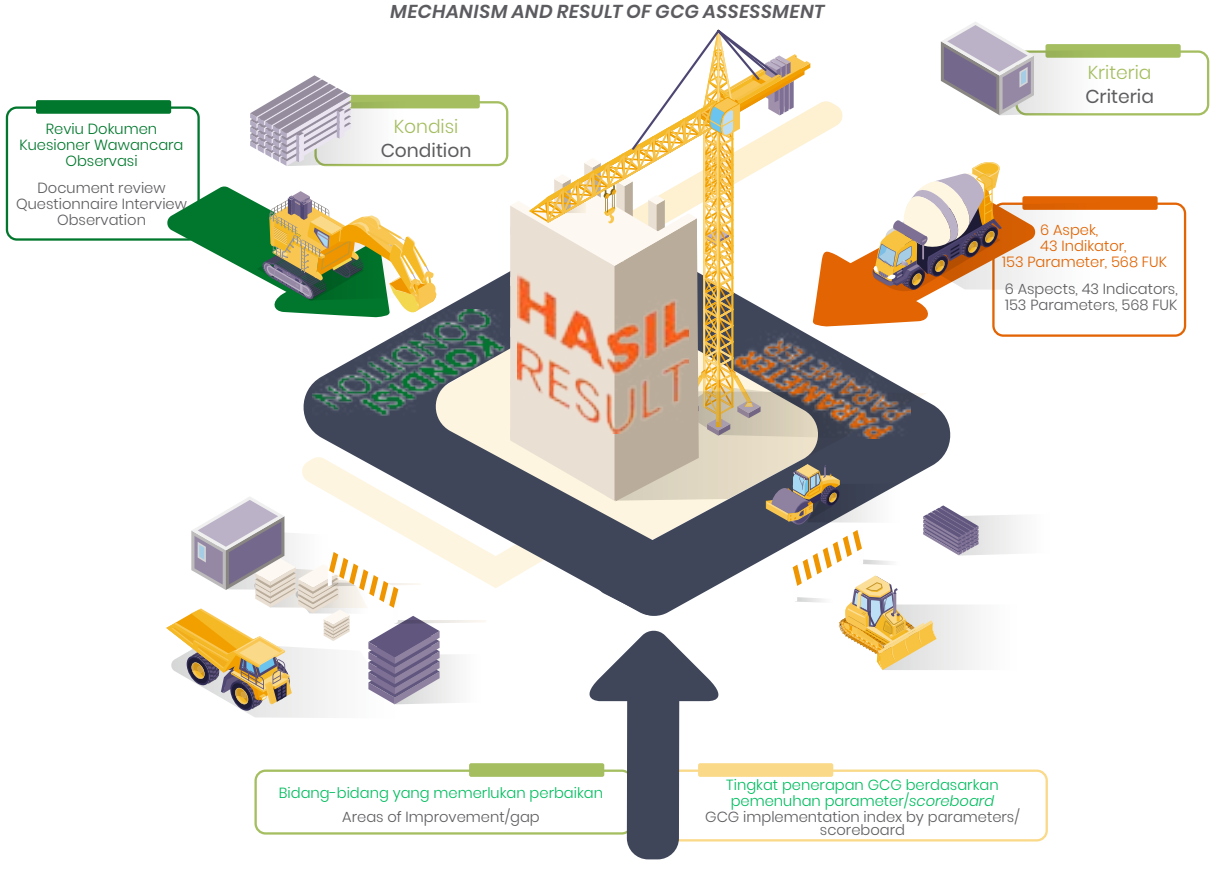

ASSESSMENT PENERAPAN GCG TAHUN BUKU 2019: HASIL, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA DI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan penilaian atau *self-assessment* penerapan GCG tahun buku 2019 yang dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten di *Internal* Perseroan dengan membentuk satuan kerja khusus yang bersifat temporer dan penunjukannya disahkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu memperoleh pandangan dari Dewan Komisaris.

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION IN THE 2019 FISCAL YEAR: RESULTS, RECOMMENDATION, AND FOLLOW-UP ACTIONS IN 2020

In 2020, the Company has carried out an assessment or self-assessment of the implementation of GCG for the 2019 fiscal year which was carried out by competent HR within the Company by forming a special temporary work unit and its appointment was approved by the Board of Directors by first obtaining the views of the Board of Commissioners.

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	*Self Assessment* (Evaluasi)
Assessor/Penilai	:	Tim internal Internal Team
Periode Pengukuran Period	:	1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 January 1, 2019 to December 31, 2019
Waktu Pengukuran Date	:	7 Januari – 18 Maret 2020 January 7 to March 18, 2019
Tempat Place	:	Gedung Nindya Nindya Building
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Date	:	18 Maret 2020 March 18, 2020

Berdasarkan hasil *Self Assessmen* tyang dilakukan oleh tim *Interna*l, kondisi penerapan GCG pada lingkup Perseroan mencapai predikat kategori "Sangat Baik" dengan skor 89,696 Capaian skor untuk masing-masing aspek *governance* terinci sebagai berikut

Based on the results of the Self-Assessment conducted by the internal team, the condition of the implementation of GCG in the scope of the Company reached the category "Excellent" with a score of 89.696.

ASPEK PENGUJIAN *ASSESSMENT ASPECT*	BOBOT *VALUE*	HASIL EVALUASI GCG TAHUN BUKU 2019 *GCG ASSESSMENT RESULTS IN 2019 FISCAL YEAR*		
		NILAI *SCORE*	PENCAPAIAN *ACHIEVEMENT*	PREDIKAT KUALITAS PENERAPAN GCG *PREDICATE FOR GCG IMPLEMENTATION QUALITY*
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	7,000	6,816	97,371	Sangat Baik *Excellent*
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Capital Owner*	9,000	7,750	86,108	Sangat Baik *Excellent*
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners*	35,000	31,668	90,479	Sangat Baik *Excellent*
Direksi *Board of Directors*	35,000	33,205	94,871	Sangat Baik *Excellent*
Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Disclosure of Information and Transparency*	9,000	7,757	86,194	Sangat Baik *Excellent*
Aspek Lainnya *Other Aspects*	5,000	2,500	50,000	-
SKOR KESELURUHAN *OVERALL SCORE*	**100,00**	**89,696**		**SANGAT BAIK** *EXCELLENT*
Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik *Description: 0-50: Very Poor | 50-60: Poor | 60-75: Average | 75-85: Good | 85-100: Very Good/Excellent*				

ASSESSMENT PENERAPAN GCG TAHUN BUKU 2020

Berdasarkan surat tugas nomor : ST-42/PW09/4.1/2021 tanggal 19 Januari 2021 dengan penugasan dilaksanakan selama 35 (tiga puluh lima) hari kerja dalam rentang waktu mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021.

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION IN THE 2020 FISCAL YEAR

Based on assignment letter no. ST-42/PW09/4.1/2021 dated January 19, 2021, the assignment was carried out for 35 (thirty five) working days in the time span from January 21, 2021 to March 26, 2021.

Kemudian berdasarkan surat dari PT Nindya Karya (Persero) nomor : 0020/DKS/SEKPER/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Perpanjangan Jangka Waktu *Assessment* GCG Tahun 2020 PT Nindya Karya (Persero), pelaksanaan waktu pengukuran diperpanjang mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 16 April 2021 mengacu pada surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta nomor: S-339/PW09/4.1/2021 tanggal 25 Maret 2021 Hal *Assessment* GCG pada PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2020.

Then based on a letter from PT Nindya Karya (Persero) No. 0020/DKS/SEKPER/03/2021 dated March 22, 2021 regarding the Extension of the 2020 GCG Assessment Period for PT Nindya Karya (Persero), the implementation of the measurement period was extended from January 21, 2021 until April 16, 2021 referring to the letter from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta Province No. S-339/PW09/4.1/2021 dated March 25, 2021 regarding GCG Assessment at PT Nindya Karya (Persero) for 2020.

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	*Assessment* (Penilaian)
Assessor/Penilai	:	BPKP
Periode Pengukuran Period	:	1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 January 1, 2020 to December 31, 2020
Waktu Pengukuran Date	:	21 Januari 2021 s.d 16 April 2021 January 21 to April 16, 2021
Tempat Place	:	Gedung Nindya Nindya Building
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Date	:	Berita Acara Exit Meeting atas Penerapan GCG PT Nindya Karya (Persero) tanggal 15 April 2021 Minutes of Exit Meeting on PT Nindya Karya (Persero) GCG Implementation dated April 15, 2021

Berdasarkan hasil *Assessment* atau Penilaian tersebut, kondisi penerapan GCG pada lingkup Perseroan mencapai predikat kategori "Sangat Baik" dengan skor 89,793. Capaian skor untuk masing-masing aspek *governance* terinci sebagai berikut:

Based on the results of the assessment, the condition of the implementation of GCG within the Company in 2020 reached the category of "Excellent" with a score of 89,793. The scores for each governance aspect are detailed as follows:

ASPEK PENGUJIAN *ASSESSMENT ASPECT*	BOBOT *VALUE*	HASIL EVALUASI GCG TAHUN BUKU 2019 *GCG ASSESSMENT RESULTS IN 2019 FISCAL YEAR*		
		NILAI *SCORE*	PENCAPAIAN (%) *ACHIEVEMENT (%)*	PREDIKAT KUALITAS PENERAPAN GCG *PREDICATE FOR GCG IMPLEMENTATION QUALITY*
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	7,000	6,740	96,286	Sangat Baik *Excellent*
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal *Shareholders and GMS/Capital Owner*	9,000	7,494	83,267	Baik *Good*
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners*	35,000	31,564	90,183	Sangat Baik *Excellent*
Direksi *Board of Directors*	35,000	33,032	94,377	Sangat Baik *Excellent*
Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Disclosure of Information and Transparency*	9,000	8,463	94,033	Sangat Baik *Excellent*
Aspek Lainnya *Other Aspects*	5,000	2,500	50,000	Sangat Baik *Excellent*
SKOR KESELURUHAN *OVERALL SCORE*	**100,00**	**89,793**	**89,793**	**SANGAT BAIK** *EXCELLENT*

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Description: 0-50: Very Poor | 50-60: Poor | 60-75: Average | 75-85: Good | 85-100: Very Good/Excellent

PERKEMBANGAN *ASSESSMENT* PENERAPAN GCG

Perseroan melakukan *assessment* terhadap penerapan GCG secara periodik. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk dapat terus melakukan pemantauan terhadap penerapan GCG. Berikut disampaikan perkembangan *assessment* penerapan GCG selama 5 (lima) tahun terakhir:

DEVELOPMENT OF GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

The Company conducts periodic assessments of the implementation of GCG. This shows the Company's commitment to be able to continue to monitor the implementation of GCG. The following is the progress of the GCG implementation assessment for the last 5 (five) years:

JENIS PENGUKURAN *TYPE OF ASSESSMENT*	TAHUN UKUR *YEAR*	*ACCESSOR*	SKOR (%) *SCORE (%)*							PREDIKAT *PREDICATE*
			ASPEK I *ASPECT I*	ASPEK II *ASPECT II*	ASPEK III *ASPECT III*	ASPEK IV *ASPECT IV*	ASPEK V *ASPECT V*	ASPEK IV *ASPECT IV*	JUMLAH TOTAL	
Assessment	2016	BPKP	6,068	8,080	31,635	32,234	7,169		85,186	Sangat Baik *Excellent*
Self Assessment	2017	Tim Self Assessment Nindya Karya *Self-Assessment Team of Nindya Karya*	6,385	7,649	31,422	32,125	7,930		85,510	Sangat baik *Excellent*
Assessment	2018	BPKP	6,367	7,734	31,413	33,039	7,963	3,125	89,641	Sangat baik *Excellent*
Self Assessment	2019	Tim Self Assessment Nindya Karya *Self-Assessment Team of Nindya Karya*	6,816	7,750	31,668	33,205	7,757	2,500	89,696	Sangat Baik *Excellent*
Assessment	2020	BPKP	6,740	7,494	31,564	33,032	8,463	2,500	89,793	Sangat Baik *Excellent*

Keterangan :

Aspek I *Aspect I*	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*
Aspek II *Aspect II*	Pemegang Saham/RUPS *Shareholders / GMS*
Aspek III *Aspect III*	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners*
Aspek IV *Aspect IV*	Direksi *Board of Directors*
Aspek v *Aspect V*	Pengungkapan Informasi dan Transparansi *Disclosure of Information and Transparency*
Aspek vI *Aspect VI*	Aspek lainnya *Other Aspects*

PERKEMBANGAN SKOR *ASSESSMENT* GCG 2016-2020

DEVELOPMENT OF GCG ASSESSMENT SCORE IN 2016-2020

TAHUN *YEAR*	SKOR *SCORE*	KETERANGAN *DESCRIPTION*
2016	85,18	Sangat Baik *Excellent*
2017	85,51	Sangat Baik *Excellent*
2018	89,64	Sangat Baik *Excellent*
2019	89,696	Sangat baik *Excellent*
2020	89,79	Sangat Baik *Excellent*

PERKEMBANGAN SKOR ASSESSMENT GCG 2016–2020

PENILAIAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

TENTANG KPKU: FUNGSI DAN METODE PENILAIAN

Salah satu perangkat penilaian yang diterapkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang mandat dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham entitas usaha BUMN adalah penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Penilaian KPKU berdasarkan surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S08/D7.MBU/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Evaluasi Implementasi KPKU Tahun 2015 yang menyatakan bahwa evaluasi BUMN menggunakan kriteria KPKU versi Tahun 2015 serta mengacu pada dokumen KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang mengadopsi dan mengadaptasi "*Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence*.

Pelaksanaaan penilaian atas implementasi KPKU oleh tim evaluator mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S272/S.MBU/09/2014 tanggal 18 September 2014 yang menyebutkan bahwa tim evaluator minimal terdiri dari 5 (lima) orang Evaluator yang telah memiliki sertifikat Evaluator KPKU serta dapat terdiri dari seluruhnya berasal dari eksternal BUMN atau kombinasi dengan melibatkan minimal 1(satu) orang dari *Internal* BUMN.

Proses Evaluasi ini melalui 2 (dua) tahapan besar yaitu tahap "*Ondesk Review*" yaitu penilaian di atas kertas berbasis pada respon KPKU tahun sebelumnya dan informasi pendukung ADLI (*Approach, Deployment, Learning*, dan *Integration*). Tahap berikutnya adalah "*Site Visit*" untuk wawancara dan klarifikasi atas respon KPKU terhadap Direksi serta pejabat eksekutif lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan serta verifikasi berbagai data dan informasi.

Laporan atas pemenuhan persyaratan pada suatu subkategori dinilai dengan mempertimbangkan:

EXCELLENT PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA (KPKU)

ABOUT KPKU: FUNCTIONS AND ASSESSMENT METHODS

One of the assessment tools implemented by the SOE Ministry as the mandate holder of the Government of the Republic of Indonesia, as the shareholder of SOEs, is the Performance Excellence Assessment (KPKU). KPKU was based on the letter of SOE Ministry's Secretary No. S08/D7.MBU/08/2015 dated August 13, 2015 on 2015 KPKU Implementation, stating that the evaluation of SOEs uses the 2015 version of KPKU criteria and refers to the KPKU document as deter-mined by the SOE Ministry through the letter of SOE Ministry's Secretary No. S-153/ S.MBU/ 2012 dated July 19, 2012 which adopted and adapted the "Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence.

The implementation of KPKU by the evaluator team refers to the letter of SOE Ministry's Secretary No. S272/ S.MBU/ 09/2014 dated September 18, 2014 which stated that the assessor team consisted of at least 5 (five) Evaluators who already had the KPKU assessor certificate and could consist entirely of external SOEs or combinations involving a minimum of 1 (one) assessor from the internal SOEs.

The evaluation process is through 2 (two) major stages, namely the "On-desk Review", that is the assessment on paper based on the previous year's KPKU response and ADLI supporting information (Approach, Deployment, Learning, and Integration). The next stage is "Site Visit" for interviews and clarification of the KPKU's response to the Board of Directors and other executive officials appointed by the company and verification of various data and information.

Reports on requirements fulfillment on a subcategory are assessed by considering:

1. Persyaratan subkategori tersebut.
2. Faktor-faktor bisnis utama yang dilaporkan dalam profil perusahaan.
3. Kesempurnaan sistem yang diterapkan di perusahaan.
4. Keluasan cakupan penerapan sistem.
5. Konsistensi peningkatan kualitas proses dan kinerja sebagaimana diatur dalam sistem pemberian skor.

1. Requirements of the sub-categories.
2. Main business factors reported in the company profile.
3. Perfection of system implemented in the company.
4. Extension of scope on the system implementation.
5. Consistency in improving the process quality and performance as regulated in the scoring system.

DASAR FAKTOR PENILAIAN KPKU

BASIS FOR KPKU ASSESSMENT FACTORS

Proses
Process

Hasil
Result

FAKTOR PENILAIAN PROSES

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Metode/Sistem (*Approach*) adalah metode/ sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi perusahaan; efektifitas dari penggunaan metode/ sistem tersebut, dan sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematik).
2. Penerapan (*Deployment*) mengacu pada sejauh mana metode/sistem diterapkan sesuai dengan desainnya, metode/sistem diterapkan secara konsisten, dan metode/ sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya.
3. Pembelajaran (*Learning*) mengacu pada penyempurnaan metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan, inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan, dan berbagi hasil penyempurnaan

ASSESSMENT FACTOR: PROCESS

The factors used to assess the process are Approach, Deployment, Learning, and Integration (ADLI), which are described as follows:

1. Approach is a method/ system designed to carry out work. Assessment refers to the suitability of the method/ system with the requirements in the SOEs' KPKU and the company's operations; the effectiveness of the use of method/ system, and the ex-tent to which methods/ systems are carried out repeatedly and are based on reliable data and information (for example, structured and systematic).
2. Deployment refers to which extent the methods/systems are applied in accordance with their designs, applied consistently, and implemented by all relevant functions/ work units in accordance with their designs.
3. Learning refers to the improvement of methods/ systems through a cycle of evaluation and improvement, innovation methods/ systems to encourage break-through changes, and share

dan inovasi terhadap metode/sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam perusahaan.

4. Integrasi (*Integration*) mengacu pada keselarasan metode/sistem dengan kebutuhan perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya; ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses; dan program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran Perseroan.

Subkategori pada faktor Proses yang terdiri dari ADLI tersebut dilakukan klarifikasi, saling dihubungkan untuk menekankan bahwa deskripsi *Approach* harus selalu menunjukkan penerapan yang konsisten dengan persyaratan spesifik suatu subkategori dan Perusahaan. Seiring dengan semakin matangnya proses, maka deskripsinya juga harus menunjukkan bagaimana siklus pembelajaran (termasuk inovasi) dan juga integrasi dengan proses kerja lainnya dan dengan unit kerja lainnya.

FAKTOR PENILAIAN HASIL

Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LETCI), yang dijabarkan sebagai berikut:

1. *Level* mengacu pada tingkat pencapaian kinerja saat ini.

2. *Trend* mengacu pada tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan keluasan tingkat penerapan dari hasil-hasil kinerja.

3. *Comparison* mengacu pada pembandingan kinerja perusahaan relatif terhadap pembanding yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis, dan pembandingan kinerja perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia.

4. *Integration* mengacu pada ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam profil perusahaan dan sub kategori serta hasil- hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang kemudian hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran perusahaan.

the results of improvements and innovations with methods/ systems, to other work units and other relevant process owners in the company.

4. Integration refers to the alignment of methods/ systems with the company's needs described in the Company Profile and in other process subcategories; size, information and improvement systems have complemented each other across work units and across processes; and work programs, processes, results, analysis, learning and actions, harmonized across processes and across work units to sup-port the achievement of corporate goals.

The subcategory of the Process factor which consists of ADLI is clarified, linked to each other to emphasize that the Approach description must always show the implementation that is consistent with the specific requirements of a subcategory and company. Along with the maturity of the process, the description must also show how the learning cycle (including innovation) and also integration with other work processes and work units.

ASSESSMENT FACTOR: RESULTS

The factors used to evaluate company results are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI), which are described as follows:

1. Level refers to the current level of performance achievement.

2. Trend refers to the level of performance improvement or the ability to maintain a minimum good performance in the last 3 (three) years and the extent of the level of implementation on performance results.

3. Comparison refers to comparing the company performance relative to the appropriate comparison, for example, competitors or companies in similar industries, and comparing company performance relative to industry benchmarks or leaders, or with world-class companies.

4. Integration refers to the measurement of results related to customer performance requirements, products, markets, processes, and main work programs, which are described in company profiles and sub categories and results that include valid indicators of future performance then results that harmonized the cross process and cross units to support company goals.

Subkategori pada faktor hasil tersebut diklarifikasi dengan data yang menunjukkan level kinerja, *trend* dan pembandingan yang relevan untuk ukuran dan indikator utama kinerja Perseroan serta terintegrasi dengan persyaratan utama perusahaan. Subkategori pada faktor hasil juga diklarifikasi dengan data tentang luasnya cakupan hasil kinerja yang dilaporkan. Secara langsung hal ini terkait dengan penerapan dan pembelajaran perusahaan; jika proses perbaikan disebarkan secara luas maka harusnya ada hasilnya yang sesuai.

The sub categories of the outcome factors are clarified with data that shows the level of performance, trends and relevant comparisons for the key indicators and the company's performance and is integrated with the company's main requirements. The subcategories of outcome factors are also clarified with data on the extent of the reported performance results. This is directly related to the implementation and the company's learning; if the repair process is widely distributed, the results should be appropriate.

Selain kedua faktor penting dalam evaluasi dan umpan balik yaitu proses dan hasil, terdapat pertimbangan yang kritikal dan sangat penting dalam evaluasi dan umpan balik yang dilaporkan yaitu faktor-faktor bisnis utama yang harus diidentifikasi dalam profil perusahaan, persyaratan pelanggan utama, lingkungan kompetitif, kebutuhan tenaga kerja, tujuan strategis utama dan program kerja.

In addition to the two important factors in evaluation and feedback, namely process and results, there are critical and very important considerations in evaluation and reported feedback, namely the main business factors that must be identified in the company profile, key customer requirements, competitive environment, human capital needs, key strategic objectives and work programs.

PENETAPAN SKOR

Penetapan skor secara umum dilakukan berdasarkan agregat pandangan holistik dari ke-4 faktor dimensi penilaian ADLI untuk "Proses" atau LETCI untuk "hasil". Dalam menetapkan asumsi kisaran rentang nilai awal disarankan untuk tidak memudahkan dengan cara membandingkan atau merata-ratakan hasil penilaian dari masing-masing dimensi penilaian A,D,I pada penilaian PROSES dan I atau le, T, C dan I pada penilaian HASIL.

SCORE DETERMINATION

Determination of scores is generally done based on an aggregate holistic view of ADLI for "Process" or LETCI for "Results". In determining the assumption of the initial values range it is recommended not to facilitate by comparing or averaging the results of the assessment of each dimension of assessment A, D, L on the assessment of PRO CESS and I or Le, T, C and I on the RESULTS.

PROSES *PROCESS*	HASIL *RESULT*
Skor 50%: mencerminkan adanya cara/metode/sistem yang menjawab seluruh pertanyaan pada kriteria persyaratan umum (*Overal Requirement*), telah dijalankan secara konsisten cara tersebut pada sebagian besar unit kerja yang harus menerapkannya, telah dilakukan beberapa kali proses perbaikan dan pembelajaran yang mengarah kepada kebutuhan utama perusahaan. *Score of 50%: Reflecting the way/method/system that answers all questions on the Overall Requirement, it has been carried out consistently for most work units, several processes of improvement and learning that have led to the company's main needs.*	Skor 50%: mencerminkan adanya pencapaian tingkat kinerja yang baik, *trend* yang positif, dibandingkan dengan pembanding (*benchmark*) yang sesuai untuk setiap indikator kinerja sesuai persyaratan di setiap item kategori yang keberadaannya penting bagi bisnis atau misi organisasi. *Score of 50%: Reflects the achievement of a good level of performance, a positive trend, compared to a benchmark that is suitable for each performance indicator according to the requirements in each category item whose existence is important for the business or the organization's mission.*
Skor >50%: harus dapat ditunjukkan proses yang berkualitas tinggi, ditunjukkan penerapannya yang lebih baik dan tidak ditemukan kendala dalam penerapan, terjadi pembelajaran organisasi yang signifikan dan terintegrasi dengan proses-proses lainnya dan mengarah pada keberhasilan kinerja. *Score> 50%: Must be able to show a high-quality process, demonstrated better implementation and found no obstacles in implementation, there is significant organizational learning and integrated with other processes and leads to successful performance.*	Skor >50%: Skor lebih dari 50% harus dapat ditunjukkan tingkat pecapaian kinerja yang lebih baik juga *trend* yang lebih tinggi, dibandingkan kinerjanya dengan kinerja pembanding yang lebih kuat maknanya bagi perusahaan dan memiliki jangkauan lebih luas dan integrasi dengan persyaratan atau misi organisasi. *Score> 50%: A score of more than 50% must be able to show the level of achievement of better performance as well as a higher trend, compared to its performance with comparative performance that has stronger meaning for the company and has a wider range and integration with organizational requirements or missions.*

HASIL EVALUASI DAN PENILAIAN KPKU

Adapun laporan hasil KPKU Nindya dari Tim Evaluator dijelaskan pada tabel di bawah.

RESULTS OF KPKU ASSESSMENT

As for the result of KPKU Nindya from evaluator team describe on this table

HASIL RESUME SKOR KPKU

RESULTS OF KPKU SCORE RESUME

NO		KATEGORI/SUB KATEGORI *CATEGORY/SUB-CATEGORY*	SKOR MAKSIMAL *MAXIMUM SCORE*	SKOR PENCAPAIAN *ACHIEVEMENT*			
				2019	2018	2017	2016
1		**KEPEMIMPINAN** *LEADERSHIP*					
	1.1	Kepemimpinan Skor *Leadership Score*	70	38,50	38,50	38,50	35,00
	1.2	Tata Kelola dan Tanggung Jawab *Governance and Responsibility*	50	30,00	27,50	25,00	22,50
2		**PERENCANAAN STRATEGIS** *STRATEGIC PLANNING*					
	2.1	Pengembangan Strategis *Strategic Development*	45	27,00	24,75	22,00	20,00
	2.2	Implementasi Strategis *Strategic Implementation*	40	22,00	22,00	22,50	20,25
3		**FOKUS PELANGGAN** *CUSTOMER FOCUS*					
	3.1	Suara Pelanggan *Voice of the Customers*	40	22,00	22,00	22,50	22,50
	3.2	Ketertarikan Pelanggan *Customer Attachment*	45	27,00	22,50	18,00	20,00
4		**PENGUKURAN, ANALISIS, DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN** *MEASUREMENT, ANALYSIS AND KNOWLEDGE MANAGEMENT*					
	4.1	Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan Kinerja Perusahaan *Measurement, Analysis and Performance Improvement*	45	24,75	24,75	22,50	20,25
	4.2	Pengelolaan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi Informasi *Management of Information, Knowledge and Information Technology*	45	22,50	22,50	20,25	20,25
5		**FOKUS TENAGA KERJA** *WORKFORCE FOCUS*					
	5.1	Lingkungan Tenaga Kerja *Workforce Environment*	40	24,00	22,00	20,00	20,00
	5.2	Keterikatan Tenaga Kerja *Labor Attachment*	45	24,75	22,50	20,25	20,25
6		**FOKUS OPERASI** *OPERATION FOCUS*					
	6.1	Sistem Kerja *Work System*	45	27,00	27,00	24,75	22,50
	6.2	Proses Kerja *Work Process*	40	22,00	22,00	20,00	20,00
SKOR PROSES *PROCESS SCORING*							
7		**HASIL-HASIL** *RESULTS*					
	7.1	Hasil-hasil Produk dan Proses *Process and Product Result*	120	66,00	60,00	55,00	55,00
	7.2	Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan *Customer Focus Results/Performance*	80	40,00	40,00	40,50	38,25
	7.3	Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja *Workforce Focus Results/Performance*	80	44,00	40,00	38,25	38,25
	7.4	Hasil-hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola *Leadership and Governance Results*	80	40,00	44,00	38,25	32,00
	7.5	Hasil-hasil Keuangan dan Pasar *Financial Results and Market*	90	49,50	49,50	49,50	40,50

NO	KATEGORI/SUB KATEGORI *CATEGORY/SUB-CATEGORY*	SKOR MAKSIMAL *MAXIMUM SCORE*	SKOR PENCAPAIAN *ACHIEVEMENT*			
			2019	2018	2017	2016
SKOR HASIL *RESULT SCORE*						
JUMLAH *TOTAL*		1.000	551	531,5	493,25	467,50

HASIL EVALUASI DAN PENILAIAN KPKU 2016-2020

RESULTS OF 2016-2020 KPKU ASSESSMENT

SKOR PROSES DAN HASIL

PROCESS SCORE AND RESULT

SKOR PROSES DAN HASIL *PROCESS SCORE AND RESULT*	2016	2017	2018	2019	2020
Proses *Process*	263,50	276,25	298,00	311.5	-
Hasil *Result*	204,00	217,00	233,50	239.5	-

SKOR KESELURUHAN

OVERALL SCORE

SKOR KESELURUHAN *OVERALL SCORE*	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah *Total*	467,50	493,25	531,50	551	-

ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE ORGANS

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan dan tidak dapat melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Saham Perseroan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Saham Seri B yang dimiliki oleh umum dan juga dapat dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Per 31 Desember 2020, sebanyak 1,00% saham Perseroan Seri A Dwi Warna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Indonesia. Sisanya sebanyak 99,00% saham Seri B biasa dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities that legally hold Company shares and cannot intervene in the functions, duties and authority of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Company Shares consist of 2 (two) types, namely Series A Dwiwarna Shares owned by the Government of the Republic of Indonesia, and Series B Shares which are owned by the public and may also be owned by the Government of the Republic of Indonesia.

As of December 31, 2020, a total of 1.00% of the Company's Series A Dwi Warna shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. The remaining 99.00% of Series B common shares are owned by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM NINDYA KARYA PER 31 DESEMBER 2020

NINDYA KARYA'S SHAREHOLDERS COMPOSITION AS OF DECEMBER 31, 2020

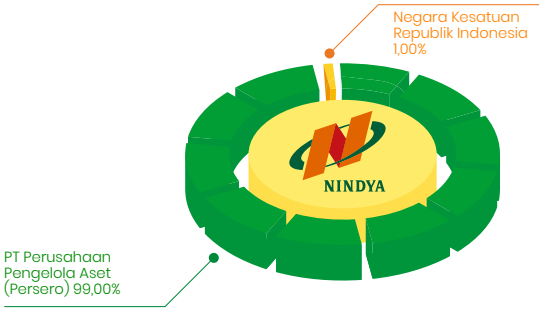

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, RUPS memiliki kewenangan selain daripada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar kepada Direksi dan Komisaris. Pada BUMN berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara, RUPS diwakili oleh Menteri. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan merupakan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan, karena aset/ kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Pursuant to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, GMS is a corporate organ that has an authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Act and/ or the Company's Articles of Association. The decisions taken at the GMS must be based on the Company's long-term business interests.

By observing the provisions of the articles of association and the applicable laws and regulations, the GMS is a forum for Shareholders to make important decisions relating to capital invested in the Company.

The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authority of the Board of Directors and Board of Commissioners by not reducing the authority of GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and legislation, including to replace or dismiss the Board of Commissioners and/or Board of Directors' members.

Based on Article 75 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, GMS holds the authority other than the authority granted by the Law and Articles of Association to the Board of Directors and Board of Commissioners. In SOEs based on Article 14 of Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises, GMS is represented by the Minister. Based on Article 6 paragraph 1 and 2 of Law No. 17 Year 2003 on State Finance, the President as the Head of Government is holding the power of State financial management as part of Government power, because SOEs' are separated state assets, therefore the power is authorized to the Finance Minister. Nevertheless, based on the Regulation of the Government No. 41 year 2003 regarding the Transfer of Position, Duty and Authority of the Finance Minister to a Company (Persero), Public Company (Perum) and Agency (perjan) to the SOE Minister. Some of the authority on SOE supervising

Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan Menteri Keuangan bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Dengan kewajiban Menteri BUMN untuk melaporkan kepada Menteri Keuangan dalam hal- hal sebagai berikut:

1. Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP.
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan antara lain untuk:
   a. Dividen kepada Pemegang Saham.
   b. Cadangan.
   c. Program Kemitraan dan Bina lingkungan.
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun individu atas Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan.
7. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait denganDewan Komisaris.
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris.
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.
11. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
12. Membubarkan atau melikuidasi Perusahaan.

Ruang lingkup hak dan tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdiri dari:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baikdari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan.

and monitoring owned by the Finance Minister is transferred to the SOE Minister. As such, the SOE Minister is responsible for reporting the following matters to the Finance Minister:

1. Approving or rejecting RJPP and RKAP.
2. Stipulating the calculation of corporate earnings allocation, among others, for:
   a. Dividend to Shareholders.
   b. Reserve
   c. Partnership and community development program.
3. Appointing and dismissing Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Stipulating performance targets for each Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Conducting a collective and individual performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Determining an external auditor to audit the Company's financial statements.
7. Stipulating the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners.
8. Stipulating policy on possible conflicts of interest related to the Board of Commissioners.
9. Stipulating the maximum number of BOC positions that may be concurrently held by a Commissioner.
10. Stipulating the maximum number of BOC positions that may be concurrently held by the Board of Directors in the Subsidiary.
11. Delegating the Board of Commissioners the distribution of the Board of Directors' members' duties and authority
12. Dismissing or liquidating the Company

The scope of rights and responsibility of the Company's Shareholder is stated in Law No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprise. The scopes are as follows:

1. Attending GMS and voting in GMS.
2. Obtaining material information (including the right to inquire) from both the Board of Commissioners and Board of Directors regarding financial matters or other matters related to the Company.

3. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen).
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Mengalihkan kepemilikan saham Perusahaan

3. Obtaining dividend.
4. Holding a GMS in the event the Board of Directors and/or Board of Commissioners neglects to hold an Annual GMS, and, at any given time, proposing to hold an Extraordinary GMS if deemed necessary according to the Articles of Association.
5. Transferring the Company's share ownership.

JENIS, WEWENANG DAN BATASAN RUPS

TYPES, AUTHORITY, AND LIMITATIONS OF GMS

JENIS-JENIS PELAKSANAAN RUPS

TYPES OF GMS IMPLEMENTATION

RUPS TAHUNAN *ANNUAL GMS*	RUPS LAINNYA *EXTRAORDINARY GMS*
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi: 1. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Laporan Tahunan; 2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan *The Annual General Meeting of Shareholders is held every year, including:* *1. General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Annual Report;* *2. General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget*	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan *The Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held at any time based on the need for the benefit of the Company*

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan;
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan unutk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

1. The Annual General Meeting of Shareholders to approve the Annual Report is held no later than June after the closing of the relevant fiscal year;
2. The Annual General Meeting of Shareholders to approve the Company's Work Plan and Budget is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the budget year of the Company's Work Plan and Budget).

The Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held at any time based on the need for the benefit of the Company

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, mekanisme dan tahapan penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persiapan rapat:
    a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

MECHANISM AND STAGES TO CONVENE GMS

Based on the Company's Articles of Association, the mechanism and stages of convening the GMS are as follows:

1. Meeting preparation:
    a. The summons for the General Meeting of Shareholders shall be made no later than 14 (fourteen) days prior to the date the General Meeting of Shareholders is convened, excluding the date of the summons and the date of the General Meeting of Shareholders.

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

c. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalm Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

d. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di Wilayah Negara Republik Indonesia.

e. Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS Luar Biasa jika semua peserta RUPSLB sudah mengetahui menyetujui dan menyatakan dapat hadir.

2. Pelaksanaan rapat:

a. RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemegang Saham.

b. RUPS diawali dengan pembacaan tata tertib RUPS.

c. RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS.

d. Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

3. Pengambilan keputusan:

a. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil.

b. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah.

4. Pendokumentasian hasil RUPS:

a. Sekretaris Perusahaan atau Notaris membuat risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS.

b. Summons to the General Meeting of Shareholders are made by registered mail and/or by advertising in newspapers.

c. The summons for the General Meeting of Shareholders shall include the date, time, place and agenda of the meeting along with a notification that the materials to be discussed in the General Meeting of Shareholders are available at the Company's office from the date of the summons for the General Meeting of Shareholders until the date the General Meeting of Shareholders is held.

d. All General Meetings of Shareholders are held at the domicile of the Company or where the Company conducts its main business activities located in the Territory of the Republic of Indonesia.

e. There is no need to make a written summons for the Extraordinary GMS if all participants in the EGMS are aware that they have agreed and stated that they can attend.

2. GMS Convention:

a. GMS is chaired by the Shareholder or authorized with substitution rights by the Shareholder.

b. GMS begins with the reading of the GMS rules.

c. GMS discusses the issues set forth in the GMS agenda.

d. The additional agenda of the GMS may be discussed if approved by the GMS.

3. Decision-Making Process:

a. The decision-making process in the GMS is conducted through transparent and fair procedures.

b. The resolutions of GMS are made based on deliberations to reach consensus in accordance with prevailing laws and regulations.

c. In the case of a resolution based on deliberations to reach a consensus is not achieved, resolutions are made on the basis of the majority of the votes cast.

4. Documentation of GMS resolutions:

a. Minutes of GMS are drafted by the Corporate Secretary or Notary.

b. Risalah RUPS harus ditandatangani Ketua rapat dan Pemegang Saham.

c. Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.

d. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

5. RUPS Sirkuler:

a. Pemegang Saham dapat melaksanakan RUPS secara sirkuler.

b. Syarat dan ketentuan pelaksanaan RUPS sirkuler ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Dikarenakan status Perusahaan sebagai BUMN yang bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, dalam melaksanakan agenda kegiatan RUPS Perusahaan memiliki ketentuan kuorum sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau di diwakili, kecuali peraturan perundang-undangn dan/ atau anggaran dasar menentukan lain

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua

3. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum

4. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumalh seluruh dahan dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain

5. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada angka 4 ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga

6. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum,

b. Minutes of GMS must be signed by the Chairman of Meeting and Shareholders.

c. Minutes of GMS signing is not required if the minutes are drafted through Notary Minutes.

d. Minutes of GMS should be documented and kept by the Corporate Secretary.

5. Circular GMS:

a. Shareholder may hold circular GMS.

b. Requirements for holding the circular GMS shall be determined by the Shareholder.

Due to the Company's status as an SOE which is responsible to Shareholders, in implementing the GMS agenda, the Company has quorum requirement as follows:

1. The General Meeting of Shareholders may be held if at the General Meeting of Shareholders at least 51% (fifty one percent) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the laws and regulations and/or articles of association provide otherwise.

2. In the event that the quorum as referred to in number 1 is not reached, a second General Meeting of Shareholders may be summoned.

3. In calling for the second General Meeting of Shareholders, it must be stated that the first General Meeting of Shareholders has been held and has not reached a quorum.

4. The second General Meeting of Shareholders as referred to in number 3 is valid and has the right to make decisions if at the General Meeting of Shareholders at least 50% (fifty percent) of the total number of branches with voting rights are present or represented, unless the Articles of Association provide otherwise.

5. In the event that the quorum for the second General Meeting of Shareholders as referred to in point 4 is not reached, the Company may request the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the domicile of the Company at the request of the Company to establish a quorum for the third General Meeting of Shareholders.

6. In the summons for the third General Meeting of Shareholders it must be stated that the second General Meeting of Shareholders has been held and does not reach a quorum, and the third

serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

7. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan

8. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling capat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan Perseroan melaksanakan kegiatan RUPS LB. Dengan mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (1), Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPS LB dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPS LB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. Pemegang Saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permintaan tersebut diajukan oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Tembusan dari surat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam agenda RUPS yang dijalankan, Perseroan memiliki mekanisme pemungutan suara untuk mencapai sebuah keputusan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.

PENYELENGGARAAN RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2020

Di tahun 2020, Perseroan melakukan 2 (dua) kali RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 yang dilaksanakan pada 22 Januari 2020, di Kantor Kementerian BUMN, untuk Pengesahan RKAP tahun 2020.

2. RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan (*Audited*) tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2020 di Kantor Kementerian BUMN, untuk pengesahan Laporan Keuangan (*Audited*) tahun buku 2019.

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai manajemen Puncak Perusahaan hadir dalam kedua RUPS tersebut.

General Meeting of Shareholders will be held with a quorum that has been determined by the Chairman of the District Court.

7. Invitation to the second and third General Meeting of Shareholders shall be made no later than 7 (seven) days before the second or third General Meeting of Shareholders is held.

8. The second and third General Meeting of Shareholders shall be held within a maximum period of 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the date of the preceding General Meeting of Shareholders.

In carrying out its business activities, it is possible for the Company to carry out the LB AGM activities. With reference to Law No. 40 of 2007 Article 79 paragraph (1), the Board of Directors has the function and authority to hold an LB GMS with the prior calling of the GMS. However, the LB GMS can also be held at the request of the Shareholders or the Board of Commissioners. The intended Shareholders can consist of 1 (one) or more people who together represent 1/10 of the total shares with voting rights. The request was submitted by the Shareholders or the Board of Commissioners to the Directors with a registered letter along with the reasons. Copies of the letter were submitted to the Board of Commissioners.

The mechanism for making decisions at the GMS is conducted by deliberation to reach consensus. In the AGM agenda, the Company has a voting mechanism to reach a decision in accordance with the Company's Articles of Association.

GMS CONVENTION IN 2020

In 2020, the Company convened 2 (two) General Meetings of Shareholders, namely:

1. Annual GMS to discuss the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which was held on January 22, 2020, at the Ministry of SOEs Office, for the Ratification of the 2020 RKAP.

2. The Annual GMS for the Ratification of the Financial Statements (Audited) for the 2019 fiscal year which was held on July 2, 2020 at the Ministry of SOEs Office, for the ratification of the Financial Statements (Audited) for the 2019 fiscal year.

All members of Board of Commissioners and Board of Directors as the Company's Top management attended the two GMS.

Hasil keputusan RUPS di tahun 2020 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

1. RUPS Pengesahan RKAP 2020

The GMS resolutions in 2020 and the follow-up actions by the management are as follows:

1. GMS for the Ratification of 2020 RKAP

DAFTAR KEHADIRAN MANAJEMEN PERUSAHAAN DALAM RUPS RKAP 2020

LIST OF COMPANY MANAGEMENT ATTENDANCE AT THE 2020 RKAP GMS

NO.	NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	KEHADIRAN *ATTANDENCE*	
			HADIR *YES*	TIDAK *NO*
DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*				
1.	Sugiyartanto	Komisaris Utama *President Commissioner*	v	x
2.	Andar Perdana Widiastono	Komisaris *Commissioner*	v	x
3.	Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*	v	x
4.	Zahirwan Marza	Komisaris *Commissioner*	v	x
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*				
1.	Haedar A. Karim	Direktur Utama *President Director*	v	x
2.	Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	v	x
3.	Sri Haryanto	Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	v	x
4.	Firmansyah	Direktur Produksi dan HSE *Production and HSE Director*	v	x

AGENDA DAN TINDAK LANJUT RUPS RKAP

AGENDA AND FOLLOW-UP OF RKAP GMS

RUPS TAHUNAN 2020 PENGESAHAN RKAP AKTA NO. 25 TANGGAL 22 JANUARI 2020 AGENDA DAN HASIL KEPUTUSAN *2020 ANNUAL GMS FOR RATIFYING THE RKPA DEED NO. 25 DATED 22 JANUARY 2020 AGENDA AND RESOLUTIONS*	SUDAH/BELUM TERLAKSANA *HAS/HAS NOT BEEN IMPLEMENTED*	TINDAK LANJUT OLEH MANAJEMEN ATAS KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2020 HINGGA AKHIR TAHUN 2020 *MANAGEMENT'S FOLLOW-UP ON GMS RESOLUTIONS OF 2020 UNTIL THE END OF THE YEAR*
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 *Ratification of the 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP)*	Terlaksana *Implemented*	Menyetujui RKAP Tahun 2020 sebagai pedoman kerja Tahun 2020. *Approved the 2020 RKAP as the 2020 work guideline.*
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2020 *Ratification of the Work Plan and Budget for the 2020 Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL)*	Terlaksana *Implemented*	Menyetujui RKA-PKBL tahun 2020. *Approved the 2020 RKA-PKBL.*
Pengesahan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Tahun 2020 *Approval of Operational Aspect Indicators for the assessment of the Company's 2020 soundness level*	Terlaksana *Implemented*	Mengesahkan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020. *Approved the Operational Aspect Indicators for the 2020 Company Health level assessment.*
Penetapan Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020 *Determination of the 2020 Management Contract between the Proxy of the Shareholders with the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners for 2020*	Terlaksana *Implemented*	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020. *Established the 2020 Management Contract between the Proxies of the Shareholders with the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners for 2020.*

2. RUPS Pengesahan Laporan Keuangan (*Audited*) tahun buku 2019

2. GMS for the Ratification of 2020 Financial Statements (Audited)

DAFTAR KEHADIRAN MANAJEMEN PERUSAHAAN DALAM RUPS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) TAHUN BUKU 2019

LIST OF COMPANY MANAGEMENT ATTENDANCE AT THE 2020 FINANCIAL STATEMENTS (AUDITED) GMS

NO.	NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	KEHADIRAN *ATTANDENCE*	
			HADIR *YES*	TIDAK *NO*
DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*				
1.	Sugiyartanto	Komisaris Utama *President Commissioner*	v	x
2.	Andar Perdana Widiastono	Komisaris *Commissioner*	v	x
3.	Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*	v	x
4.	Zahirwan Marza	Komisaris *Commissioner*	v	x
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*				
1.	Haedar A. Karim	Direktur Utama *President Director*	v	x
2.	Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	v	x
3.	Sri Haryanto	Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	v	x
4.	Firmansyah	Direktur Produksi dan HSE *Production and HSE Director*	v	x

RUPS TAHUNAN 2020 PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2020 AKTA NO. 06 TANGGAL 02 JULI 2020 AGENDA DAN HASIL KEPUTUSAN *2020 ANNUAL GMS FOR RATIFYING THE 2020 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS* *DEED NO. 6 DATED 2 JULY 2020* *AGENDA AND RESOLUTIONS*	SUDAH/BELUM TERLAKSANA *HAS/HAS NOT BEEN IMPLEMENTED*	TINDAK LANJUT OLEH MANAJEMEN ATAS KEPUTUSAN RUPS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) TAHUN BUKU 2019 *MANAGEMENT'S FOLLOW-UP ON RESOLUTIONS OF 2020 FINANCIAL STATEMENTS (AUDITED) OF FY2019*
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 *Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements as well as the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2019 fiscal year, as well as granting full discharge and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Management and Supervision Actions that have been carried out during the 2019 fiscal year*	Terlaksana *Implemented*	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor 00047/2.1030/AU.1/03/0181-2/III/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(Volledig acquit et de charge)* kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan dan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang Tahun Buku 2019 sejauh Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 *Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report carried out by the Board of Commissioners for the 2019 Fiscal Year and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan, as contained in their report number 00047/2.1030/AU.1/03/0181-2/III/2020 dated February 10, 2020 with the opinion "reasonable, in all material respects" and provide full settlement and release of responsibility*

RUPS TAHUNAN 2020 PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2020 AKTA NO. 06 TANGGAL 02 JULI 2020 AGENDA DAN HASIL KEPUTUSAN *2020 ANNUAL GMS FOR RATIFYING THE 2020 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS* *DEED NO. 6 DATED 2 JULY 2020* *AGENDA AND RESOLUTIONS*	SUDAH/BELUM TERLAKSANA *HAS/HAS NOT BEEN IMPLEMENTED*	TINDAK LANJUT OLEH MANAJEMEN ATAS KEPUTUSAN RUPS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) TAHUN BUKU 2019 *MANAGEMENT'S FOLLOW-UP ON RESOLUTIONS OF 2020 FINANCIAL STATEMENTS (AUDITED) OF FY2019*
		(volledig acquit et de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for the actions and supervision that have been carried out throughout the 2019 Fiscal Year to the extent that these actions are not criminal acts and these actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de charge*) kepada Dierksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Program Kemintraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 *Approval of the Annual Report including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the 2019 Fiscal Year, as well as the Granting of Full Settlement and Release of Liability (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Management and Supervision of the Partnership and Community Development Program that has been carried out for 2019 fiscal year*	Terlaksana *Implemented*	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan sesuai Laporan Nomor 00052/2.1030/AU.2/12/0181.-2/1/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ***(Volledig acquit et de charge)*** kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan PKBL Tahun Buku 2019. *Approved and ratified the 2019 PKBL Implementation Annual Report which was audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan in accordance with Report Number 00052/2.1030/AU.2/12/0181.-2/1/II/2020 dated February 20, 2020 with the opinion "fair in all material respects" and giving full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of Board of Directors and m Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2019 fiscal year, to the extent that these actions are not criminal act and reflected in the 2019 PKBL Report.*
Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019 *Determination of the use of net profit for the 2019 fiscal year*	Terlaksana *Implemented*	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp223.784.182.449 yang seluruhnya ditetapkan sebagai cadangan. *Determined the use of Net Profit Attribution of Owners of the Company's Parent Fiscal Year 2019 amounting to Rp223,784,182,449, all of which were designated as reserves*
Penetapan pemberian tantiem/insentif kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2019, dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 *Determination of the provision of performance bonuses/incentives to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the performance of the 2019 fiscal year, and the determination of the 2019 remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners*	Terlaksana *Implemented*	Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2019. *Granted authority to Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for 2020 Fiscal Year and Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for Performance for 2019 Fiscal Year.*
Penetapan kantor akuntan public untuk mengaudit Laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 dan laporan keuangan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan perseroan tahun buku 2020 *Determination of a public accounting firm to audit the company's financial statements for the 2020 fiscal year and the financial statements for the implementation of the partnership and community development program for the 2020 fiscal year*	Terlaksana *Implemented*	Menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun buku 2020 *Appointed and assigned a Public Accounting FIrm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year and the Financial Statements for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the 2020 Fiscal Year.*

DEWAN KOMISARIS

Peran Dewan Komisaris dalam struktur tata kelola perusahaan berfungsi sebagai organ yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik GCG yang diterapkan perusahaan. Dengan kata lain, penekanan peran Dewan Komisaris adalah untuk menghidupkan proses *check and balances* pengelolaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris memiliki acuan yang tertuang dalam *Board Manual* yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero), dengan memberlakukan buku-buku pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan yang terdiri dari:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Revisi 0.4
- *Board Manual* revisi 0.3
- Pedoman Perilaku etika (*Code of Conduct*) Revisi 0.7
- Pedoman Pelanggaran *Whistle Blowing System* Revisi 0.2
- Pedoman Penanganan Gratifikasi Revisi 0.2
- Pedoman Benturan Kepentingan Revisi 0.2

BOARD OF COMMISSIONERS

In the structure of corporate governance, the Board of Commissioners functions as an organ with the authority to conduct general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and to advise the Board of Directors in executing the Company's management activities. The Board of Commissioners also has a duty to supervise the effectiveness of GCG practices applied by the Company. The emphasis of Board of Commissioners' role is to invigorate the process of check-and-balances of management that is carried out by the Company.

The Board of Commissioners is collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors and ensuring that the Company conducts GCG at all organization levels. The position of each member of Board of Commissioners, including the President Commissioner, is equivalent. In order to support the implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee.

BOARD MANUAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners has a reference contained in the Board manual which has been ratified through the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/ 09/2020 dated 15 September 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero), by enforcing the Company's Good Corporate Governance (GCG) guidebooks which consist of:

- Code of Corporate Governance Revision 0.4
- Board Manual Revision 0.3
- Code of Conduct Guidelines Revision 0.7
- Whistle Blowing System Violation Guidelines Revision 0.2
- Guidelines for Handling Gratification Revision 0.2
- Guidelines for Conflict of Interest Revision 0.2

KUALIFIKASI DAN KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor PER-10/MBU/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, seseorang/pribadi dapat menjadi Dewan Komisaris Perusahaan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu persyaratan formal, persyaratan materiil, dan persyaratan lainnya.

1. Persyaratan formal
   a. Orang perseorangan;
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan/perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
   e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Persyaratan material
   a. Integritas;
   b. Dedikasi;
   c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero/perum di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
   e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Persyaratan PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

QUALIFICATIONS AND CRITERIA FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-10/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning Amendments to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, a person/individual can become the Board of Commissioners of the Company if they meet 3 (three) requirements, namely formal requirements, material requirements, and other requirements.

1. Formal requirements
   a. Individual;
   b. Legally competent;
   c. Have never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination;
   d. Has never been a member of the board of directors or a member of the board of commissioners/supervisory board that was found guilty of causing a limited liability company/general company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination; and
   e. Has never been convicted of a criminal offense that has caused financial loss to the state and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to the nomination.
2. Material requirements
   a. Integrity;
   b. Dedication;
   c. Understand company management problems related to one of the management functions;
   d. Have adequate knowledge in the business sector of the a limited liability company/general company where the person is nominated; and
   e. Be able provide sufficient time to carry out duties.
3. Regulation No. PER-10/MBU/10/2020 concerning Amendment to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises stipulate other requirements as follows:

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;

b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau kepal/Wakil Kepala Daerah;

c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;

d. Sehat Jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;

e. Bagi Bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan

f. Bagi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

Sumber bakal calon dewan komisaris/dewan pengawas BUMN berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah;
4. Sumber lain.

Kementerian BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Negara Republik Indonesia melakukan penjaringan, penilaian, dan pengangkatan Dewan Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat

Other requirements for members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board, namely:

a. Not an administrator of Political Parties and/ or candidate for members of the legislature, and/or member of the legislature. Candidates for legislative members or legislative members consist of candidates/ members of DPR, DPD, Level I DPRD, and Level II DPRD;

b. Not a candidate for the head/deputy head of the region and/or the head/deputy head of the region;

c. Not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the relevant SOE for 2 (two) consecutive periods;

d. Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board), as evidenced by a health certificate from a doctor;

e. For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, it must be based on a proposal letter from the relevant agency; and

f. For prospective members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who come from state administrators, they must report the State Administrators Wealth Report (LHKPN) for the last 2 (two) years as evidenced by the LHKPN Report Evidence to the authorized institution.

Candidates for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs come from:

1. Former Directors of SOEs;
2. Board of Commissioners / Supervisory Board of SOEs;
3. Government's Structural Officials and Functional Officers;
4. Other Sources.

The SOE Ministry as the proxy of the State shareholders of the Republic of Indonesia conducts selection, assessment and appointment of the Board of Commissioners.

TERM OF OFFICE OF BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office for members of the Board of Commissioners is set for 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Members

diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.

Pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- Terlibat dalam Tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
- Melakukan Tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara
- Dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- Mengundurkan diri
- Masa jabatan yang bersangkutan berakhir.
- Yang bersangkutan berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena pengunduran diri atau meninggal dunia atau diberhentikan oleh RUPS atau tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the decision of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons.

The dismissal of a member of the Board of Commissioners is carried out if, based on the facts, the concerned member of Board of Commissioners:

- Is unable to carry out their duties properly;
- Does not implement the provisions of the legislation and/or the provisions of the Articles of Association;
- Engages in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
- Takes actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as the Board of Commissioners of state-owned enterprises;
- Is found guilty by a Court Decision that has permanent legal force;
- Resigns;
- The term of office in question ends;
- The person concerned resigns before the term of office ends due to resignation or death or is dismissed by the GMS or no longer meets the requirements of the prevailing laws and regulations.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Sesuai keputusan Pemegang Saham, di tahun 2020 tidak terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris. Kronologi susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

In accordance with shareholders' resolution, there was no change in the Board of Commissioners' composition in 2020. The chronology of the Board of Commissioners' composition throughout 2020 and the Board of Commissioners' composition as of December 31, 2020 are as follows:

KRONOLOGIS SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2020

CHRONOLOGY OF COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

PERIODE 1 JANUARI – 6 JANUARI 2020 *JANUARY 1 TO JANUARY 6, 2020*	**PERIODE 6 JANUARI – 31 DESEMBER 2020** *JANUARY 6, 2020 TO DECEMBER 31, 2020*	**PERIODE** *PERIOD*	**KETERANGAN** *DESCRIPTION*
Sugiyartanto Komisaris Utama *President Commissioner*	**Sugiyartanto** Komisaris Utama *President Commissioner*	Pertama *First*	-
Andar Perdana Widiastono Komisaris *Commissioner*	**Andar Perdana Widiastono** Komisaris *Commissioner*	Pertama *First*	-
Iwanshah Wibisono Komisaris *Commissioner*	**Rika Kiswardani** Komisaris *Commissioner*	Pertama *First*	Keputusan para pemegang Saham PT NINDYA KARYA nomor: SK-6/MBU/01/2020 dan nomor: KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-6/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero)*

PERIODE 1 JANUARI – 6 JANUARI 2020 *JANUARY 1 TO JANUARY 6, 2020*	PERIODE 6 JANUARI – 31 DESEMBER 2020 *JANUARY 6, 2020 TO DECEMBER 31, 2020*	PERIODE *PERIOD*	KETERANGAN *DESCRIPTION*
Zahirwan Marza Komisaris Independen *Commissioner*	-	Pertama *First*	Masa jabatan berakhir *Term of office ends*

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2020

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AS OF DECEMBER 31, 2020

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	DASAR PENGANGKATAN *BASIS OF APPOINTMENT*
Sugiyartanto	Komisaris Utama *President Commissioner*	Keputusan para pemegang saham PT NINDYA KARYA nomor : SK-205/MBU/09/2019 dan nomor: KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-205/MBU/09/2019 and No. KEP-PS 06/PPA/0919 dated September 13, 2019 regarding Dismissal and Appointment of President Commissioner of PT Nindya Karya (Persero)*
Andar Perdana Widiastono	Komisaris *Commissioner*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-308/MBU/12/2018 dan Nomor: SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-308/MBU/12/2018 and No. SK-78/PPA/1218 dated December 26, 2018 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero)*
Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*	Keputusan para pemegang Saham PT NINDYA KARYA nomor: SK-6/MBU/01/2020 dan nomor: KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT NINDYA KARYA *Resolution of shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-6/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 01/PPA/0120 dated January 6, 2020 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero)*

Profil masing-masing Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The profile of each member of Board of Commissioners of the Company is available under the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile Chapter in this annual report.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Level *Performance*

Pengawasan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Pemegang Saham

Performing supervision through the provision of directives and guidance to the Board of Directors, as well as input to the Shareholders

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

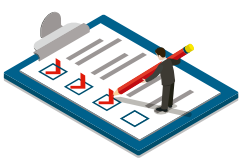

Level *Conformance*

Memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar

Ensuring that the advice has been implemented and the provisions of the Laws and Regulations as well as the Articles of Association have been fulfilled and complied with

TUGAS DAN KEWAJIBAN UMUM

1. Selalu tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan RUPS.
2. Beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

GENERAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Always comply with the laws and regulations and/ or the Company's Articles of Association and GMS resolutions.
2. Have good intention and be responsible for carrying out the duties for the interest and business of the Company.

3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi termasuk mengenai rencana Jangka Panjang Perusahaan, rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham, perjanjian dengan pihak-pihak ketiga/terkait meliputi dengan pihak Bank, JO, JV, leveransir, suplier dan vendor termasuk peraturan perundang-undangan.

4. Mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

5. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP dan menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

6. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

7. Memantau dan memastikan evektifitas praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan Perusahan secara efektif dan berkelanjutan.

8. Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan usaha Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh RUPS.

TERKAIT DENGAN RUPS

Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:

1. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan aktivitas kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS.

2. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana Pengembangan Perusahaan, rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta perubahan dan tambahannya.

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.

5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

3. Conduct supervisory duties on the Board of Directors' policy, including the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, and the implementation of provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders' Resolutions, agreements with related/third parties, including with: Bank, JO, JV, suppliers, and vendors, as well as the laws and regulations.

4. Review and provide opinions on RJPP and RKAP prepared by the Board of Directors before being signed together.

5. Prepare annual work plan and budget which is an inseparable part from RKAP and submitting report on supervisory duties which have been conducted during the previous fiscal year to GMS.

6. Provide advice to the Board of Directors in implementing management of the Company for the Company's interest and in accordance with purpose and objective of the Company and does not intended for the interest of certain group or party.

7. Monitor and ensure the effectiveness of GCG practice carried out by the Company in an efficient and sustainable manner.

8. Act at any time for the business interest of PT Nindya Karya (Persero) and be responsible to PT Nindya Karya (Persero) of which in this case is represented by GMS.

RELATED TO GMS

Related to GMS, the Board of Commissioners is assigned and obliged to:

1. Report and be responsible for performance of the board of commissioners to GMS.

2. Report the performance of the Board of Directors to GMS.

3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Development Plan, Annual Work Plan and Budget as well as changes and additions.

4. Monitor the development of the Company's activities, provide opinion and suggestion to GMS on every problem considered important for the Company's management.

5. Report immediately to GMS if there is any indication of declining performance of the Company.

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan Tahunan. Dalam hal anggota Komisaris tidak menandatangani laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
7. Merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal kepada RUPS.

TERKAIT DENGAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan dapat memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Perusahaan.

TERKAIT DENGAN ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

Anggota Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

TERKAIT DENGAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* DAN KETEPATAN LAPORAN

Komisaris mempunyai kewajiban untuk:

1. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian *Intern*, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Satuan Pengawasan *Intern*.
2. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal.
3. Memastikan Auditor *Intern*al, Auditor Eksternal memilki akses terhadap infomasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
4. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan Keuangan dan Non-Keuangan Tahunan serta laporan Tahunan.

KERAHASIAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

1. Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan.

6. Analyze and review the periodic report and annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report. In the event of members of the Board of Commissioners do not sign the annual report, explanation should be provided.
7. Recommend the appointment of External Auditor to GMS.

RELATED TO RISK MANAGEMENT

The Board of Commissioners is obliged to conduct assessment regularly and able to provide recommendation on risk and the implementation of Risk Management in the Company.

RELATED TO BUSINESS ETHICS AND ANTI-CORRUPTION

Members of the Board of Commissioners are prohibited from accepting, providing, or offering valuables, both directly and indirectly, to other parties to influence or as rewards on what he/she has done and other actions in accordance with the laws and regulations.

RELATED TO INTERNAL CONTROL SYSTEM AND REPORT ACCURACY

The Board of Commissioners is obliged to:

1. Review the effectiveness of internal control system by assessing the competence and total resources, scope of duty and authority, and independence of the Internal Audit Unit.
2. Review the effectiveness of External Auditor's duties implementation of by assessing the competence, independence, and scope of External Auditor duties.
3. Ensure that Internal Auditor and External Auditor have access to information on the Company required to implement its duties
4. Assess the accuracy of information prepared to other parties, particularly in Annual Non0Financial and Financial Statements and Annual Report.

CONFIDENTIALITY AND INFORMATION DISCLOSURE

1. The Board of Commissioners is responsible for maintaining the Company's confidentiality.

2. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
3. Komisaris mengawasi agar Perseroan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai Peraturan Perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
4. Komisaris memastikan agar Perseroan mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan.

2. Confidential information obtained when serving as member of the Board of Commissioners should be kept confidential in accordance with the laws and regulations and/or the Company's regulations.
3. The Board of Commissioners supervises the company to disclose important information in Annual Report and Financial Statements to other parties in accordance with the laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner.
4. The Board of Commissioners ensures the company to disclose the implementation of Good Corporate Governance principles in Annual Report.

TERKAIT DENGAN REMUNERASI DAN EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
2. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja Dewan dan individu Komisaris dan Direksi kepada RUPS.

RELATED TO REMUNERATION AND EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

1. Propose a proper remuneration system for members of the Board of Commissioners and Board of Directors to GMS.
2. Propose an evaluation system of the Board of Commissioners and Board of Directors' performance both collegially and individually to GMS.

TERKAIT DENGAN NOMINASI DAN SELEKSI DIREKSI

1. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Direksi dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan.
2. Menetapkan kebijkaan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi
3. Melakukan telaah dan/atau penelitian/ pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi sebelum disampaikan ke Pemegang Saham
4. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon anggota Direksi dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan
5. Mengusulkan atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Rapat Umum Pemegang Saham
6. Mengusulkan agar terdapat rencana suksesi bagi Direksi.

RELATED TO NOMINATION AND SELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Propose a nomination and selection system for prospective members of the Board of Directors and submit it to the GMS for approval.
2. Establish policies and selection criteria for candidates for the Board of Directors
3. Conduct a review and/or research/examination of the candidates for the Board of Directors proposed by the Board of Directors prior to submission to the Shareholders
4. Propose a nomination and selection system for prospective members of the Board of Directors and submit it to the GMS for approval
5. Propose new candidates for members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders
6. Propose the establishment of a succession plan for the Board of Directors.

TERKAIT DENGAN ANAK PERUSAHAAN

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan, meliputi: pengawasan dan pemberian nasihat, pembahasan

RELATED TO SUBSIDIARIES

1. Supervise the implementation of subsidiary/ joint venture management policies, including: supervision and providing advice, discussion of subsidiary/joint venture management

mengenai kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya, mengevaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan.

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan, meliputi: pengawasan dan pemberian nasihat, pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya, mengevaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan dan berperan dalam penilaian dan persetujuan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patungan.

policies and their implementation, evaluating the direction of subsidiary management and subsidiary performance related to the company's business development vision.

2. Supervise the implementation of subsidiary/ joint venture management policies, including: supervision and providing advice, discussion of subsidiary/joint venture management policies and their implementation, evaluating the direction of subsidiary management and subsidiary performance related to the company's business development vision.

3. Supervise the implementation of policies on the management of subsidiaries/joint ventures and play a role in the assessment and approval of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures.

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT NINDYA KARYA Nomor: SK-05/Kom/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pembagian Tugas Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT NINDYA KARYA tentang Pembagian Tugas Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya, terdapat 4 (empat) bidang tugas Dewan Komisaris, yaitu bidang Tata Kelola Perusahaan; bidang Pemasaran dan Pengembangan Bisnis; bidang Produksi dan Sumber Daya manusia (SDM); serta bidang Keuangan, risiko dan Sistem. Pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

DIVISION OF DUTIES AND AUTHORITY AMONG THE MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Decision of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-05/Kom/01/2020 dated January 6, 2020 regarding Division of Duties of Members of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero), there are 4 (four) duties of the Board of Commissioners, covering the fields of Corporate Governance; Marketing and Business Development; Production and Human Capital; as well as Finance, Risk, and System. The division of duties among the members of Board of Commissioners is as follows.

SUGIYARTANTO

KOMISARIS UTAMA

Bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang meliputi:

1. Memberikan masukan, arahan, dan mengintegrasikan masukan dari keempat bidang tugas, dalam rangka melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan, melakukan tugas secara khusus menurut Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

SUGIYARTANTO

PRESIDENT COMMISSIONER

Leading and coordinating the implementation of the Board of Commissioners' duties which includes:

1. Providing input, direction, and integrating input from the four task areas, in order to supervise management policies and providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities, performing duties specifically according to the Company's Articles of Association, applicable Legislations and/ or based on the General Meeting of Shareholders' resolutions, as well as acting for

dan/atau berdasarkan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham, serta bertindak untuk kepentingan dan usaha Perusahaan serta bertanggung jawab kepada rapat Umum Pemegang Saham.

2. Menangani tugas bidang Tata Kelola Perusahaan yaitu memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* secara terencana dan berkelanjutan.

the interests and business of the Company as well as responsible to the General Meeting of Shareholders.

2. Dealing with duties of Corporate Governance, namely providing input, direction, and recommendations in the context of managing the Company carried out by implementing planned and sustainable principles of Good Corporate Governance.

RIKA KISWARDANI
KOMISARIS

Menangani tugas bidang keuangan, Risiko dan Sistem yang meliputi:

1. Memberi masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka menetapkan kebijuakan dan strategi pengelolaan, rekayasan dan perkuatan struktur keuangan perusahaan ,serta dalam rangka memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek Jasa Konstruksi, EPC, Properti, Realti dan Investasi Infrastruktur;

2. Memberi Masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka penyusunan rencana perusahaan dan struktur keuangan yang mendukung pertumbuhan non organic, pembahasan laporan keuangan perusahaan tahunan dan triwulanan;

3. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka pengembangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi keuangan ,pengenalian pinjaman serta pemanfaatan tekbologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dan transaksi keuangan;

4. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka *review*/evaluasi atas upaya pencegahan risiko sistemik dan non sistemik atas aktivitas investasi;

5. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka:

    a. Rencana strategis TI yang mencakup Visi dan Misi TI, sasaran jangka pendek, *critical success factor*, dan *Key Performance Indicators*;

    b. Penyusunan kebijakan, standar, dan prosedur pengembangan TI dan SDM TI yang diterapkan di unit kerja

RIKA KISWARDANI
COMMISSIONER

Handling financial, risk and system tasks that include:

1. Providing input, direction, and recommendations in order to establish policies and strategies for managing, engineering, and strengthening the company's financial structure, as well as in order to obtain the funds needed to finance construction services, EPC, property projects, Infrastructure Realities and Investments;

2. Providing input, direction and recommendations in the framework of preparing corporate plans and financial structures that support nonorganic growth, discussing annual and quarterly company financial statements;

3. Providing input, direction and recommendations in the context of developing, increasing efficiency and effectiveness in managing financial administration, controlling loans and utilizing information technology in preparing financial statements and financial transactions;

4. Providing input, direction and recommendations in the context of a review / evaluation of efforts to prevent systemic and non-systemic risks for investment activities;

5. Providing input, direction and recommendations in order to:

    a. IT Strategic Plan that includes IT Vision and Mission, short-term goals, critical success factors, and Key Performance Indicators;

    b. Compilation of IT policies, standards and procedures for the development of IT and HR that are applied in work units.

ANDAR PERDANA WIDIASTONO
KOMISARIS

Menangani tugas bidang Produksi dan Sumber Daya Manusia (SDM) disamping juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit yang meliputi:

1. Memberikan masukan, arahan, dan rekomendasi dalam rangka penyiapan penetapan dan penyesuaian struktur organisasi perusahaan secara keseluruhan di tingkat Pusat dan Wilayah;
2. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi atas kebijakan pemenuhan kebutuhan penyediaan SDM yang berkompetensi, professional dan produktif, dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas serta pemberdayaan SDM yang kompetitif dan berorientasi pada pasar;
3. Bersama Anggota Komisaris lainnya, memberikan masukan, arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan calon Direksi Perusahaan dan atas usulan calon Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, kepada Menteri BUMN RI dan direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) serta rekomendasi atas pengangkatan Kepala SPI dan Pejabat struktural inti (strategik) satu tingkat di bawah Direksi;
4. Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka melakukan *review*, penelaah, dan evaluasi konsep kebijakan manajamen risiko yang disiapkan Direksi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) sebelum kebijakan dijalankan;
5. Memberi masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka melakukan *review*, penelaah, dan ebaluasi penetapan area risiko bisnis perseroan yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama disepakati dengan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero);

Tugas sebagai ketua Komite Audit dalam melaksanakan tugas meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian *Intern* dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan *Intern*al auditor;
2. Menilai Pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawsan *Intern*al maupun Auditor eksternal;

ANDAR PERDANA WIDIASTONO
KOMISARIS

Dealing with duties of Production and Human Capital (HC) which include:

1. Providing input, direction, and recommendations in the context of preparing the determination and adjustment of the overall organizational structure of the company at the Central and Regional levels;
2. Providing input, direction, and recommendations on policies to meet the needs of competent, professional and productive human capital supply, in the context of increasing efficiency and effectiveness as well as empowering human capital that is competitive and market-oriented;
3. Together with other Commissioners, provide input, directives and recommendations of the Board of Commissioners on the proposed candidates for the Directors of the Company and on the proposed candidates for Commissioners and Directors of Subsidiaries, to the Minister of SOEs and Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) as the Shareholder of PT Nindya Karya (Persero) as well as recommendations on the appointment of the Head of Internal Audit and one level structural (strategic) Officer below the Board of Directors;
4. Provide input, direction and recommendations in order to conduct a review, review, and evaluation of the concept of risk management policy prepared by the Directors and provide input to the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) before the policy is implemented;
5. Providing input, direction and recommendations in order to conduct a review, review, and evaluation of the determination of the company's business risk area conducted by the Directors together agreed with the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero);

Duties as the Head of Audit Committee include:

1. Assisting the Board of Commissioners/ Supervisory Board to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties;
2. Assessing the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Control Unit and the External Auditor;

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

Dewan Komisaris/Dewan pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:

1. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan,serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, dan Informasi lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
3. Lain-lain yang berkaitan dengan tugas Komite Audit

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN

Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan kegiatan pengenalan Perusahaan kepada Anggota Komisaris yang baru menjabat. Di tahun 2020, program pengenalan Perusahaan dilakukan kepada anggota Komisaris Rika Kiswardani melalui Surat Undangan Bernomor: 0153/DKS-I/SEKPER/01/2020 perihal Undangan Pengenalan Perusahaan yang pelaksanaannya diuraikan pada tabel berikut:

3. Providing recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation;
4. Ensuring that there is a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the company;
5. Providing recommendations regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners/Supervisory Board to be submitted to the GMS;
6. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners/Supervisory Board and other duties of the Board of Commissioners/ Supervisory Board.

The Board of Commissioners/Supervisory Board may also give other assignments to the Audit Committee in the form of:

1. Review of information regarding the Company, as well as Long-Term Plans, Work Plans and Company Budgets, Management Reports, and other information;
2. Review of complaints related to the Company;
3. Other duties related to the Audit Committee

COMPANY ORIENTATION PROGRAM

The company has a policy to carry out orientation activities for new Commissioners. In 2020, the Company orientation program was carried out to Rika Kiswardani, a new Commissioner of the Company, through Invitation Letter No. 0153/DKS-I/SEKPER/01/2020 regarding Invitation to the Company Orientation Program, the implementation of which is described in the following table:

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	WAKTU PELAKSANAAN *DATE*	*AGENDA*	PIHAK YANG HADIR *ATTENDANCE*
Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*	Kamis, 23 Januari 2020 *Thursday January 23, 2020*	Pengenalan Perusahaan meliputi: 1. Profil Perusahaan 2. Laporan Kinerja Bisnis 3. Laporan Kinerja Produksi 4. Laporan Kinerja Keuangan 5. Laporan Kinerja SDM 6. Kinerja Perusahaan 7. *Key Performance Indicator* Perusahaan 8. Rencana strategis Perusahaan 9. Laporan kinerja GCG Perusahaan *Company orientation includes:* *1. Company Profile* *2. Business Performance Report* *3. Production Performance Report* *4. Financial Performance Report* *5. HR Performance Report* *6. Company Performance* *7. Key Performance Indicators of the Company* *8. Company strategic plan* *9. Company GCG performance report*	1. Dewan Komisaris 2. Sekretaris Dewan Komisaris 3. Komite Audit 4. Direksi 5. Kepala Departemen/Satuan dan Sekretaris Perusahaan 6. General Manager Wilayah II 7. General Manager Divisi EPC dan Properti 8. Kepala Unit Penunjang Produksi 9. Direksi anak Perusahaan *1. Board of Commissioners* *2. Secretary to the Board of Commissioners* *3. Audit Committee* *4. Board of Directors* *5. Head of Department/Units and Corporate Secretary* *6. General Manager Region II* *7. General Manager of EPC and Property Division* *8. Head of Production Support Unit* *9. Directors of subsidiaries*

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Agar Dewan Komisaris terus memperbaharui pengetahuannya akan industri konstruksi dan bisnis Nindya Karya, Perseroan memberikan program peningkatan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lainnya. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

To encourage the Board of Commissioners to always update their knowledge on the construction industry and the business of Nindya Karya, the Company provides competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities. The Competence Development Program attended by the Board of Commissioners throughout 2020, is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik menyangkut Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat, kritik dan saran kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Nindya Karya dengan uraian sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengawasan dan pemberian arahan:

BRIEF REPORT ON BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2020

The Board of Commissioners has carried out supervision of management policies, the course of management in general, both concerning the Company and the Company's efforts carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners has provided advice, criticism, and suggestions to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP, and provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions, as well as the prevailing laws and regulations, for the benefit of Nindya Karya, with the following description:

1. In the context of monitoring and providing direction:

a. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola perusahaan sesuai dengan RJPP, RKAP, ketentuan AD dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang- undangan. Selain itu, Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan saran serta arahan yang dituangkan di dalam Tanggapan Dewan Komisaris atas RJPP maupun Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP.

a. Carry out supervisory duties on the policies of the Board of Directors in managing the company in accordance with the RJPP, RKAP, AD provisions and GMS decisions, as well as laws and regulations. In addition, the Board of Commissioners has provided opinions and suggestions as well as directions as outlined in the Response of the Board of Commissioners to the RJPP and the Response of the Board of Commissioners to the RKAP.

b. Menelaah serta me-*review* laporan Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi baik laporan Triwulanan maupun laporan Tahunan. hasil telaahan serta *review* atas laporan tersebut dituangkan di dalam risalah rapat *Intern*al Dewan Komisaris maupun rapat Gabungan bersama Direksi. Sedangkan hasil telaahan serta *review* atas laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Kantor Akuntan Publik, maka Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan atas laporan Tahunan *Audited* dan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan Persetujuan sebagai berikut:

b. Review the Company's reports submitted by the Board of Directors, both Quarterly reports and Annual reports. The results of the review and review of the report are contained in the minutes of the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors. While the results of the review and review of the Annual Report that has been audited by the Auditor of the Public Accounting Firm, the Board of Commissioners has responded to the Audited Annual Report and proposed to the GMS to give approval as follows:

i. Laporan Tahunan dan Pengesahan laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019.

i. Annual report and ratification of the Company's financial statements for the 2019 fiscal year as well as granting full settlement and release of responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners during the 2019 fiscal year.

ii. Pengesahan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) tahun buku 2020.

ii. Ratification of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2020 fiscal year.

iii. Penetapan penggunaan laba.

iii. Determination of the use of profits.

iv. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.

iv. Determination of bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

v. Menetapkan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris tahun 2020.

v. Determination of salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners in 2020.

vi. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Keuangan Perusahaan dan laporan PKBL Tahun Buku 2020.

vi. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial statements and PKBL reports for the 2020 Fiscal Year.

c. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan pengagunan aset Perseroan berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, riau, Palembang, lampung, Denpasar, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat, dalam rangka mendapatkan pinjaman/ kredit dan penyelesaian perpanjangan

c. The Board of Commissioners has approved the collateral for the Company's assets in the form of land and buildings located in DKI Jakarta, Central Java, East Java, West Java, North Sumatra, Riau, Palembang, Lampung, Denpasar, Banten, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, Papua and West Papua, in the context of obtaining loans/credits and completing the extension of bank loan facilities. In addition, the

fasilitas utang perbankan. Selain itu, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tentang akuisisi (penambahan/pengurangan) permodalan, *Joint Operation*, serta perjanjian-perjanjian.

Board of Commissioners has approved the acquisition (addition/reduction) of capital, Joint Operations, and agreements.

d. Melakukan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris serta memantau efektivitas praktik GCG Perusahaan, serta memperhatikan dan mengadakan perbaikan sesuai rekomendasi atas hasil *assessment* penerapan GCG pada Perusahaan tahun 2020.

d. Conduct a self-assessment on the performance of the Board of Commissioners and monitor the effectiveness of the Company's GCG practices, as well as pay attention to and make improvements according to the recommendations on the results of the assessment on the implementation of GCG in the Company in 2020.

e. Melakukan telaah serta *review* dan memberikan rekomendasi atas penerapan Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Mutu, Tata Kelola Perusahaan serta keluhan para pemangku kepentingan.

e. Conduct reviews and provide recommendations on the implementation of Risk Management, Information Technology, Human Resources, Procurement, Quality, Corporate Governance as well as complaints from stakeholders.

f. Meneliti dan menelaah atas laporan komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris sebagai masukan atas tugas-tugas yang diberikan, yaitu memantau tindak lanjut atas hasil/temuan baik audit *Internal* yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan *Internal* (SPI) maupun audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik.

f. Research and review the reports of the committees under the Board of Commissioners as input for the tasks given, namely monitoring the follow-up on the results/findings of both internal audits conducted by the Internal Audit Unit (SPI) and external audits by the Office Public Accountant.

g. Memberikan arahan bukan saja dilakukan di dalam rapat-rapat bersama Direksi, namun juga diberikan saat dilakukan kunjungan ke wilayah maupun kunjungan lapangan, dan pada kondisi tertentu memberikan arahan, nasihat maupun pemeriksaan saat diperlukan.

g. Provide direction, which is not only done in meetings with the Board of Directors, but also during regional visits and field visits, and under certain conditions providing direction, advice or inspection when needed.

2. Aspek Keuangan dan Audit:

2. Financial and audit aspects:

a. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan arahan kepada Direksi dalam pelaksanaan RJPP serta RKAP serta setiap masalah yang dianggap penting bagi Perseroan yang dilakukan setiap saat maupun bersamaan dengan rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi minimal sekali dalam setiap bulan.

a. The Board of Commissioners has provided opinions and directions to the Board of Directors in the implementation of the RJPP and RKAP as well as any issues deemed important to the Company which are carried out at any time or in conjunction with the Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors at least once a month.

b. Dewan Komisaris telah memberikan petunjuk kepada Komite Audit dalam menjalankan tugas sebagaimana telah ditetapkan di dalam Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan Direksi.

b. The Board of Commissioners has given instructions to the Audit Committee in carrying out its duties as stipulated in the Audit Committee Charter which has been signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

c. Melalui Komite Audit, melaksanakan kajian pelaksanaan tugas auditor eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup tugas auditor eksternal.

c. Through the Audit Committee, carry out a review of the performance of the external auditor's duties, by assessing the competence, independence and scope of the external auditor's duties.

d. Memberikan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam rangka laporan Keuangan dan laporan Tahunan Perusahaan.

3. Aspek Manajemen risiko dan hukum:

a. Menjalankan fungsi pengawasan, termasuk dalam penerapan manajemen risiko di Perusahaan.

b. Memberikan pendapat dan persetujuan kepada Direksi untuk hal-hal berikut:

i. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi, kontrak manajemen.

ii. Mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) siklus akuntansi.

c. Pengawasan dan menyampaikan pendapat kepada RUPS atas rencana Direksi dalam mengembangkan usaha.

d. Memastikan agar perusahaan mengungkapkan pelaksanaan GCG dalam RUPS maupun dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

e. Melakukan rapat-rapat dengan jajaran Direksi, maupun melalui Komite Audit dengan *General Manager* baik di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah, Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan yang berkaitan dengan Audit *Interna*l, Manajemen Risiko dan pelaksanaan GCG.

EVALUASI DAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

1. Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang berfungsi melakukan pengawasan secara menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan hingga ke proyek, entitas anak, KSO dan JO. Secara kualitatif, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kuantitatif dan kualitatif atas kinerja Komite Audit, mencakup keaktifan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya, kehadiran dalam rapat, proses dokumentasi, dan rekomendasi yang diberikan.

Kinerja Komite Audit dan masing-masing Anggota Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan secara *self assessment* dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

d. Provide an assessment of the accuracy of the information prepared for other parties, especially in the context of the Financial Statements and the Company's Annual reports.

3. Risk management and legal aspects:

a. Carry out the supervisory function, including the implementation of risk management in the Company.

b. Provide opinion and approval to the Board of Directors on the following matters:

i. Cooperating with business entities or other parties in the form of joint operations, management contracts.

ii. Entering into other agreements that have a financial impact on the Company for a period of more than 1 (one) year or more than 1 (one) accounting cycle.

c. Supervise and submit opinions to the GMS on the Board of Directors' plans to develop the business.

d. Ensure that the company discloses the implementation of GCG in the GMS and in the Company's Annual Report.

e. Conduct meetings with the Board of Directors, as well as through the Audit Committee with the General Manager both at the Head Office and Regional Offices, the Head of SPI and the Corporate Secretary relating to Internal Audit, Risk Management and GCG implementation.

ASSESSMENT ON PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Audit Committee

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee whose function is to carry out overall supervision, including supervising projects, subsidiaries, KSOs and JOs. Qualitatively, the Board of Commissioners has conducted quantitative and qualitative assessments of the performance of the Audit Committee, including the activeness of the Audit Committee in carrying out its duties, attendance at meetings, documentation processes, and recommendations given.

The performance of the Audit Committee and each member of the Audit Committee is evaluated by the Board of Commissioners. The performance assessment of the Audit Committee is carried out by self-assessment using the assessment method

berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam program kinerja, yang mencakup 5 (lima) aspek penilaian, yaitu peningkatan tugas Auditor *Interna*l; pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; pemantauan penerapan *Enterprises Risk Management* (ERM); *monitoring* Tindak lanjut Temuan; serta tugas lain dari Dewan Komisaris.

Secara khusus Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas masukan yang telah diberikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris. Masukan tersebut menjadi bahan bagi Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi tugas utama Dewan Komisaris.

Rekap kehadiran rapat tahun 2020 Komite Audit yaitu:

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) KEP-24/KOM/04/2020 pada bulan April 2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT NINDYA KARYA KARYA (Persero) *Juncto* nomor: KEP-16/KOM/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nindya Karya (Persero).

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua : Sugiyartanto

Sekretaris : Rika Kiswardani

Anggota : Andar Perdana Widiastono

Rekap kehadiran rapat tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu:

KOMISARIS INDEPENDEN

Organ Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan dalam ranah pengawasan dan pemberian saran dituntut untuk selalu bersikap independen dan dapat menempatkan tujuan- tujuan GCG di atas kepentingan yang ada. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan *(conflict of interest)* di tubuh Dewan Komisaris maka Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mewajibkan perusahaan untuk menghadirkan Komisaris Independen di dalam susunan organ tersebut.

Susunan anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan 1 (satu) anggota sebagai Komisaris Independen. Komposisi Komisaris Independen di Perusahaan telah

determined by the Board of Commissioners based on the performance targets set in the performance program, which includes 5 (five) assessment aspects, namely increasing the duties of the Internal Auditors; monitoring the implementation of Good Corporate Governance; monitoring the implementation of Enterprises Risk Management (ERM); Monitoring Follow-up Findings; as well as other duties of the Board of Commissioners.

In particular, the Board of Commissioners expresses its appreciation and gratitude for the input provided by the Audit Committee to the Board of Commissioners. This input becomes material for the Board of Commissioners to carry out the supervisory function which is the main duty of the Board of Commissioners.

The recapitulation of the 2020 Audit Committee meeting attendance is as follows:

2. Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is setablished based on the Decision of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 dated April 2020 regarding the Nomination and Remuneration Committee of PT NINDYA KARYA KARYA (Persero) juncto. No. KEP-16/KOM/03/2021 dated March 1, 2021 regarding the Dismissal and Appointment of Members of Nomination and Remuneration Committee of PT Nindya Karya (Persero).

The membership structure of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

Chairman : Sugiyartanto

Secretary : Rika Kiswardani

Member : Andar Perdana Widiastono

The recapitulation of the 2020 Nomination and Remuneration Committee meeting attendance is as follows:

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner is a member of Board of Commissioners with the authority over supervision and advising, and is required to remain independent and uphold the GCG objectives above the existing interests. In order to prevent the occurrence of conflict of interest within the Board of Commissioners, the prevailing laws and regulations require the Company to present Independent Commissioners within the organ composition.

The composition of the Board of Commissioners consists of 3 (three) members with 1 (one) member as an Independent Commissioner. The composition of the Independent Commissioners in the Company

memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN yang menerangkan bahwa 20% komposisi Dewan Komisaris berasal dari independen.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan menerapkan kriteria Anggota Komisaris Independen sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi.
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di Departemen lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya.
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara di lingkup BUMN.

PERSYARATAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Ketentuan mengenai independensi terbagi atas dua hal. Pertama adalah independensi yang dinyatakan dalam hal-hal yang bersifat administratif dan kepatuhan serta independensi

has fulfilled the provisions of Regulation of State Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning GCG Implementation at SOEs which requires 20% of the composition of Board of Commissioners is served by Independent Commissioners.

CRITERIA FOR THE DETERMINATION OF INDEPENDENT COMMISSIONER

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Company. The Independent Commissioner is appointed in a transparent and independent manner, has adequate integrity and competence, free of influence related to personal or other interests, and can act objectively and Independent by referring to GCG principles.

The existence of an Independent Commissioner in the Company always ensures that the supervisory mechanism runs effectively and in compliance with the laws and regulations. The Company applies the criteria for Independent Commissioners in accordance with Article 13 of the Regulation of State Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning GCG Implementation at SOEs:

1. Not serving as a Director in an affiliated company.
2. Not working with the Government, including in any Department, agency and the military within the last three years.
3. Not working in the relevant SOEs or its affiliates within the last three years.
4. Not having financial relationship, either directly or indirectly, with the relevant SOEs or the company providing the services and products to the SOEs and its affiliates:
5. Being free from other interests and activities or relationships that may impair or interfere the ability of Independent Commissioner from outside of the SOEs to act or to think within the scope of the SOEs.

INDEPENDENCY REQUIREMENTS OF INDEPENDENT COMMISSIONER

The provisions on independence are divided into two types. The first is the independence which is stated in the administrative matters, the compliance and independence expressed in the actual conditions

yang dinyatakan pada kondisi sesungguhnya atas pribadi Calon Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam persyaratan pengangkatan Komisaris Independen.

Secara administratif, Calon Komisaris Independen diharuskan telah menyelenggarakan Daftar Khusus, menandatangani Pakta Integritas, dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagai bentuk komitmen menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Untuk Independensi Non Administratif, Calon Komisaris Independen dipastikan tidak memiliki hubungan darah ataupun ikatan perkawinan dengan satu sama lain hingga derajat ketiga baik secara vertikal maupun horizontal. Komisaris Independen tidak mempunyai benturan kepentingan secara pribadi terhadap hal-hal yang termaktub dalam RKAP 2020, dan Komisaris Independen berkomitmen tidak akan memanfaatkan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi.

of the Independent Commissioner Candidates as stated in the requirements for the appointment of the Independent Commissioner.

Administratively, Independent Commissioner Candidates are required to have Special register, sign Integrity Pact and submit State official Property report (LHKPN) and Private Taxes report (IP2P) as a commitment to avoid transactions containing conflict of interest. For Non-Administrative Independence, Independent Candidate Candidates are ascertained to have neither blood relations nor marital ties with each other up to the third degree either vertically or horizontally. The Independent Commissioner has no personal conflict of interest with respect to matters set out in the RKAP 2020, and the Independent Commissioner is committed to not utilize the Company, either directly or indirectly, for personal gain.

KOMISARIS INDEPENDEN PERUSAHAAN TAHUN 2020

INDEPENDENT COMMISSIONER IN 2020

KOMISARIS INDEPENDEN PER 31 DESEMBER 2020

INDEPENDENT COMMISSIONER AS OF DECEMBER 31, 2020

KOMISARIS INDEPENDEN *INDEPENDENT COMMISSIONER*	DASAR PENGANGKATAN *BASIS OF APPOINTMENT*	MASA JABATAN *TERM OF OFFICE*	PERIODE *PERIOD*
Zahirwan Marza	Surat Keputusan Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-137/MBU/08/2015 dan KEP-PS 05/PPA/0815 *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-137/MBU/08/2015 and KEP-PS 05/PPA/0815*	S.d Tahun 2020 *Up to 2020*	Pertama *First*

KRITERIA INDEPENDENSI *INDEPENDENCY CRITERIA*	KETERANGAN *DESCRIPTION*
Menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi. *Serve as a Director in an affiliated company.*	Tidak *No*
Bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. *Work in a relevant SOE or its affiliates within the last three years.*	Tidak *No*
Mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya. *Have a financial relationship, either directly or indirectly with the relevant SOE or the company providing the services and products to the SOE and its affiliates.*	Tidak *No*
Terikat melalui kepentingan dan aktivitas atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara di lingkup BUMN. *Bound to other interests and activities or relationships that may impair or interfere the ability of Independent Commissioner from outside of the SOE to act or to think within the scope of the SOE.*	Tidak *No*

DIREKSI

Direksi adalah organ tata kelola Perusahaan yang bertanggung jawab secara kolegial atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company's governance organ with collegial responsibility on the management for the Company's interest and purpose, serves as leader in the management and represents the Company before and after the court. The Board of Directors' composition is adjusted based on the Company's needs, with the

paling sedikit dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi memiliki acuan yang tertuang dalam *Board Manual* yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 & 87/Kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Peodman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero), memberlakukan buku-buku Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan antara lain *Board Manual* Revisi 0.3.

Board Manual yang dimiliki Perseroan memberikan acuan terkait beberapa hal mendasar bagi Direksi, yaitu:

1. Komposisi dan persyaratan Direksi
2. Tugas, wewenang, tanggung serta hak direksi
3. Penetapan kebijakan pengurusan perusahaan oleh direksi
4. Pendelegasian wewenang diantara anggota direksi perusahaan
5. Pembagian tugas direksi
6. Rapat direksi
7. Tim di bawah direksi
8. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
9. Satuan pengawasan *Intern*
10. Penggunaan sarana professional

Di samping itu, *Board Manual* juga mengatur beberapa hal yang membatasi kewenangan Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.

KUALIFIKASI DAN KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

PERSYARATAN FORMAL

Persyaratan forman merupakaan persyaratan konkrit yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan yang meliputi:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum

requirement of at least 2 Directors, in which one of the Directors is appointed as President Director in accordance with the prevailing regulations.

BOARD MANUAL OF BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties and functions, the Board of Directors has a reference set out in the Board Manual which has been ratified through the Joint Decision of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 dated September 15, 2020 regarding the Guidelines for Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero), enacted the Company's Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, including Board Manual Revision 0.3.

The Board Manual of the Company provides references regarding several basic matters for the Board of Directors, namely:

1. Composition and requirements of the Board of Directors
2. Duties, powers, responsibilities and rights of the board of directors
3. Determination of company management policies by the board of directors
4. Delegation of authority among members of the company's board of directors
5. Division of duties of the board of directors
6. Board of Directors meeting
7. Team under the board of directors
8. Corporate Secretary
9. Internal control unit
10. Use of professional facilities

In addition, the Board Manual also regulates several matters that limit the authority of the Board of Directors in managing the Company.

QUALIFICATIONS AND CRITERIA FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

FORMAL REQUIREMENTS

Formal requirements are concrete requirements that must be met by individuals which include:

1. Being able to carry out legal actions

2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN ,Perusahaan Anak, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
4. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garus lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris
5. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
6. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
7. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Para anggota direksi dilarang melakukan Tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung amupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan selain penghasilan yang sah.

2. Having never been declared bankrupt or become a member of the board of directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination
3. Having never been punished for committing a criminal act that is detrimental to the finances of the State, SOEs, Subsidiaries, Companies, and/or related to the financial sector
4. Having no family relationship up to the third degree, either according to a vertical line or a horizontal line, or a marriage relationship with other members of Board of Directors and/or members of Board of Commissioners.
5. Not concurrently holding other positions as a member of the board of directors in BUMN, BUMD and Private Owned Enterprises or other positions that may cause a conflict of interest
6. Not concurrently holding other positions as officials in structural and functional positions in central and/or regional government agencies/ agencies
7. Not concurrently holding positions that may cause a direct or indirect conflict of interest with the company and/or that are contrary to the provisions of the applicable laws and regulations.
8. Members of the board of directors are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal benefits, either directly or indirectly from decision-making and company activities other than legitimate income.

PERSAYARATAN MATERIIL

Persyaratan Material merupakan persyaratan abstrak yaitu kualitas orang perseorangan yang sesuai dengan kebutuhan PT Nindya Karya (Persero), meliputi:

a. Mempunyai akhlak yang baik, yaitu:

- Tidak melakukan perbuatan rekayasan dan praktek-praktek menyimpang dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
- Tidak melakukan perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerka dan/atau pemegang saham

MATERIAL REQUIREMENTS

Material requirements are abstract requirements, namely the quality of individuals in accordance with the needs of PT Nindya Karya (Persero), including:

a. Having good morals, namely:

- Not carrying out engineering actions and deviant practices in the company where the person concerned works.
- Not committing acts of default which can be categorized as not fulfilling the commitments that have been agreed with the company where the person concerned works and/or shareholders.

- Tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
- Tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentunan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat

b. Kompetentsi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:

- Pengetahuan yang memadai di bidang usaha PT Nindya Karya (Persero)
- Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan PT Nindya Karya (Persero)
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT Nindya Karya (Persero)
- Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yan berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
- Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya

c. Psikologi bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensia dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero)

d. Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan

- Not committing actions that can be categorized as being able to provide personal benefits to prospective members of the Board of Directors, employees of the company where the person concerned works.
- Not committing actions that can be categorized as a violation of provisions relating to the principles of healthy company management

b. Technical competence/skills, in which the person concerned has:

- Adequate knowledge in the business field of PT Nindya Karya (Persero)
- Experience and expertise in the management of PT Nindya Karya (Persero)
- Ability to carry out strategic management in the context of developing PT Nindya Karya (Persero)
- Understanding of the Company's management issues related to one of the management functions
- Dedication and full time to do his job

c. Psychology that the person concerned has an adequate level of intelligence and emotional level to carry out his duties as a member of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero)

d. Strong capability and high dedication to advance and develop the Company

MASA JABATAN DIREKSI

Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:

- Masa jabatan berakhir.
- Berhenti sebelum masa jabatan berakhir karena pengunduran diri atau meninggal dunia atau diberhentikan dari RUPS atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan

TERM OF OFFICE OF BOARD OF DIRECTORS

The term of office for members of the Board of Directors is set at 5 (five) years and can be reappointed for the next 1 (one) term of office. The position for members of the Board of Directors ends if:

- Term of office has ended.
- Term of office ends due to resignation or demise or being dismissed by the GMS or no longer fulfilling the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the articles of association and legislation.

Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners if they act in contravention of the Articles of Association or there are indications

kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

of causing Company losses or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2020

Kronologi susunan Direksi di sepanjang tahun 2020 dan susunan Direksi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS IN 2020

Chronology of the Board of Directors' composition throughout 2020 and the composition of the Board of Directors as of December 31, 2020 are as follows.

KRONOLOGIS SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2020

CHRONOLOGY OF COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS IN 2020

PERIODE 1 JANUARI – 22 JANUARI 2020 *JANUARY 1 TO JANUARY 22, 2020*	PERIODE 22 JANUARI 2020 – 31 DESEMBER 2020 *JANUARY 22, 2020 TO DECEMBER 31, 2020*	PERIODE *PERIOD*	KETERANGAN *DESCRIPTION*
Haedar A. Karim Plt. Direktur Utama *Act. President Director*	**Haedar A. Karim** Direktur Utama *President Director*	Pertama *First*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero)*
Haedar A. Karim Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	**Moeharmein Zein Chaniago** Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	Pertama *First*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero)*
Firmansyah Direktur Produksi dan HSE *Production and HSE Director*	**Firmansyah** Direktur Produksi dan HSE *Production and HSE Director*	Pertama *First*	Keputusan Para Pemegang Saham PT NINDYA KARYA Nomor: SK-217/MBU/07/2018 dan nomor: KEP-PS 5/PPA/0718 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT NINDYA KARYA *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-217/MBU/07/2018 and No. KEP-PS 5/PPA/0718 dated July 20, 2018 regarding Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero)*
Sri Haryanto Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	**Sri Haryanto** Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	Pertama *First*	Keputusan Para Pemegang Saham PT NINDYA KARYA Nomor : SK-282/MBU/10/2018 dan nomor: SK-65/PPA/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT NINDYA KARYA *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-282/MBU/10/2018 and No. SK-65/PPA/2018 dated October 31, 2018 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero)*

SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2020

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AS OF DECEMBER 31, 2020

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	DASAR PENGANGKATAN *BASIS OF APPOINTMENT*
Haedar A. Karim	Direktur Utama *President Director*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) tanggal 22 Januari 2020 *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) dated January 22, 2020*

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	DASAR PENGANGKATAN *BASIS OF APPOINTMENT*
Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Nomor: KEP-PS 03/PPA/0120 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) tanggal 22 Januari 2020 *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-26/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 03/PPA/0120 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) dated January 22, 2020*
Firmansyah	Direktur Produksi dan HSE *Production and HSE Director*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-217/MBU/07/2018 dan Nomor: KEP-PS 05/PPA/0718 tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) tanggal 20 Juli 2018 *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-217/MBU/07/2018 and No. KEP-PS 05/PPA/0718 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) dated July 20, 2018*
Sri Haryanto	Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor: SK-282/MBU/10/2018 dan Nomor: SK-65/PPA/2018 tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi PT Nindya Karya (Persero) tanggal 31 Oktober 2018 *Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-282/MBU/10/2018 and No. SK-65/PPA/2018 regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) dated October 31, 2018*

Profil masing-masing Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perusahaan telah mengintepretasikan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk kemudian disesuaikan dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh Perusahaan sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan meliputi:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan.

The profile of each member of Board of Directors of the Company is available under the Board of Commissioners Profile section of the Company Profile Chapter in this annual report.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

The Company has interpreted duties and responsibilities of the Board of Directors in general as stated in Law No. 40 year 2007 on limited liability Company to be later adjusted to the scope of business conducted by the Company as stated in the Company's Articles of Association. The Board of Directors' duties and responsibilities include:

1. Board of Directors shall be responsible for carrying out all actions relating to the Company's management for the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives and to represent the Company both inside and outside the Court on all matters and events with limitations regulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS resolutions.
2. Each member of the Board of Directors shall in good faith and with full responsibility in performing the duties for the Company's interests and business in accordance with the applicable laws and regulations.
3. In performing its duties, members of the Board of Directors shall devote full effort, thought and attention to the tasks, obligations and achievements of the Company's objectives.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keputusan Direksi.

5. Direksi wajib membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan tindak lanjut atas hasil temuan SPI.

6. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/ atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat *Intern*al maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan dan anak Perusahaan/ Perusahaan patungan untuk dimuat dalam Laporan Tahunan.

7. Direksi wajib membuat, memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta menyimpannya di tempat kedudukan perusahaan.

8. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan *Intern* dengan membentuk Satuan Pengawasan *Intern* serta menyampaikan laporan pelaksanaan fungsinya kepada Dewan Komisaris secara periodik.

9. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

10. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan, Pengawas *Intern* dan Tata Kelola Teknologi Informasi di Perusahaan.

11. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Masing-masing Direksi Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diselenggarakan Perusahaan. Pembagian tugas tersebut dilakukan dengan melihat besarnya kapasitas dan kompleksitas usaha yang dijalankan oleh Perusahaan dikarenakan banyaknya aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

4. Each member of the Board of Directors shall be fully responsible in private if the person concerned is guilty or negligent in performing his duties and is jointly responsible for the decision of the Board of Directors.

5. Board of Directors shall assist and provide full support to the SPI in carrying out its duties, and follow up the findings of the SPI.

6. Board of Directors shall convey information on its identity, principal works, positions of the Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings held within one fiscal year (internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners) and salaries, facilities and/or other allowances received from the Company and its Subsidiaries/Joint venture to be published in the Annual report.

7. Board of Directors shall establish, maintain Shareholders list, Special list, minutes of the GMS, minutes of the Board of Directors meetings, Annual report and financial Documents of the Company and keep them at the Company's domicile.

8. Board of Directors shall conduct internal control by establishing the Internal Supervisory Unit and submit the report on the implementation of its functions to the Board of Commissioners periodically.

9. Board of Directors shall perform the functions of the Corporate Secretary.

10. Board of Directors shall maintain and evaluate the quality of the functions of Corporate Secretary, Internal Controller and Information Technology Governance in the Company.

11. A member of the Board of Directors shall be appointed by the Board of Directors' meeting as responsible for the implementation and monitoring of GCG in the relevant SOE.

DIVISION OF DUTIES OF BOARD OF DIRECTORS

Each member of the Company's Board of Directors has different duties and responsibilities in accordance with the business needs of the Company. The division of duties is conducted by observing the capacity and complexity of the business run by the Company due to the many aspects that need to be considered in the Company's management.

Di tahun 2020, Pemegang Saham melalui RUPS tanggal 20 Juli 2018 memutuskan untuk membagi nomenklatur jabatan Direksi ke dalam 4 (empat) direktorat. Pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. **Direktur Utama:**

   Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran Perseroan secara keseluruhan. Peran Direktur Utama adalah:

- Memimpin penyusunan peraturan dan kebijakan Perseroan.
- Memimpin dan menjalankan Perseroan.
- Menyetujui anggaran tahunan Perseroan dan melaporkan laporan pada Pemegang Saham.
- Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi Perseroan.
- Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan Perseroan.
- Memimpin dan mengoordinasikan terkait pelaksanaan perencanaan dan pengadaan SDM.

Wewenang Direktur Utama adalah:

- Mengangkat dan memberhentikan karyawan tetap Perseroan.
- Menetapkan RKAP.
- Menyetujui pengeluaran uang untuk kepentingan Perseroan.
- Mengesahkan RJPP.

2. **Direktur Produksi dan HSE:**

   Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional produksi, pencapaian perolehan kontrak dan target produksi secara keseluruhan. Peran Direktur Produksi dan HSE adalah:

- Memimpin dan mengoordinasikan terkait pencapaian perolehan kontrak.
- Memimpin dan mengoordinasikan terkait kegiatan operasional produksi, meliputi:
  a. Pengendalian produksi
  b. Administrasi
  c. Logistik
  d. Melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai target produksi.

In 2020, the Shareholders resolved to divide the nomenclature of Board of Directors' positions into 4 (four) directorates based on the GMS dated July 20, 2018. The division of duties among the Company's Directors is as follows:

1. **President Director:**

   Leading, directing, and controlling the Company's operational activities in order to achieve the Company's overall goals. The roles of President Director are:

- Leading the preparation of Company regulations and policies.
- Leading and running the Company.
- Approving the Company's annual budget and submitting reports to shareholders.
- Establishing strategies to achieve the Company's vision and mission.
- Planning and developing the Company's sources of income and expenditure.
- Leading and coordinating the implementation of human Capital's planning and procurement.

The authority of the President Director is as follows:

- Appointing and dismissing permanent employees of the Company.
- Establishing RKAP.
- Approving expenditure for the Company's benefit.
- Validating RJPP.

2. **Production and HSE Director:**

   Leading, directing, and controlling production operations, achievement of contract acquisition and overall production targets. The roles of Production and HSE Director are:

- Leading and coordinating the achievement of contract acquisition.
- Leading and coordinating related production operations, including:
  a. Production control;
  b. Administration;
  c. Logistics;
  d. Conducting efforts to achieve production targets;

e. Memimpin dan memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.

Wewenang Direktur Produksi dan HSE adalah:

- Mengesahkan rencana anggaran proyek
- Menetapkan prioritas penanganan masalah dalam bidang produksi
- Menilai hasil proses pelaksanaan produksi
- Mengambil tindakan yang diperlukan jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi

3. Direktur Keuangan dan SDM:

Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya keuangan dan operasional sumber daya manusia (karyawan) guna mendukung tercapainya sasaran operasi Perseroan pada umumnya. Peran Direktur Keuangan dan SDM adalah:

- Memimpin, mengarahkan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pengadaan dan pengalokasian dana Perseroan.
- Memimpin, mengarahkan dan mengoordinasikan kegiatan akuntansi Perseroan berserta analisis dan pelaporannya.
- Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penempatan SDM.

Wewenang Direktur Keuangan dan SDM adalah:

- Menyetujui rencana Anggaran Perusahaan

4. Direktur Pemasaran dan Pengembangan:

Bertugas memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pengembangan bisnis guna pencapaian visi dan sasaran strategis Perseroan. Peran Direktur Pemasaran dan Pengembangan adalah:

- Memimpin dan mengoordinasikan terkait kegiatan pemasaran.
- Memimpin dan mengoordinasikan terkait kegiatan pengembangan Perseroan.
- Memimpin dan mengoordinasikan terkait penerapan SM Mutu/K3/OHSAS/Lingkungan dan Manajemen Risiko di unit kerja.

e. Leading and ensuring the implementation of ISO 9001:2015 Quality management System, ISO 45001:2018 OHS management System and ISO 14001:2015 Environmental management System.

The authority of the Production and HSE Director is as follows:

- Validating the project budget plan
- Establishing priorities for handling problems in production
- Assessing the results of production process
- Taking necessary actions if there are irregularities in the implementation of production process

3. Finance and Human Capital Director:

Leading, directing, and controlling the management of financial resources and operations of human capital (employees) to support the achievement of the Company's operational objectives in general. The roles of Finance and Human Capital Director are:

- Leading, directing, and coordinating activities for planning, procuring and allocating Company funds.
- Leading, directing, and coordinating the Company's accounting activities along with their analysis and reporting.
- Leading, directing, and coordinating the implementation of Human Capital placement activities

The authority of the Finance and Human Capital Director is as follows:

- Approving the Company's Budget Plan

4. Marketing and Development Director:

Leading, directing, and controlling marketing activities and business development in order to achieve the Company's vision and strategic goals. The roles of Marketing and Development Director are:

- Leading and coordinating marketing activities.
- Leading and coordinating the Company development activities.
- Leading and coordinating the application of Quality/OHS/OHSAS/Environment and risk management in work units.

Wewenang Direktur Pemasaran dan Pengembangan adalah:

- Mengakses seluruh data/informasi dari seluruh Departemen/Satuan/Unit Kerja dalam rangka kegiatan pengembangan Perseroan.
- Mengunjungi wilayah/ proyek tertentu dalam rangka mengidentifikasi teknologi yang digunakan.
- Melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan untuk keperluan pengembangan usaha dan teknologi serta pemasaran proyek tertentu.

The authority of the Marketing and Development Director is as follows:

- Accessing all data/information from all Departments/Units / Work Units in the framework of the Company development activities.
- Visiting certain areas/projects to identify the technology used.
- Conducting preventative activities for the purposes of business and technology development as well as the marketing of certain projects

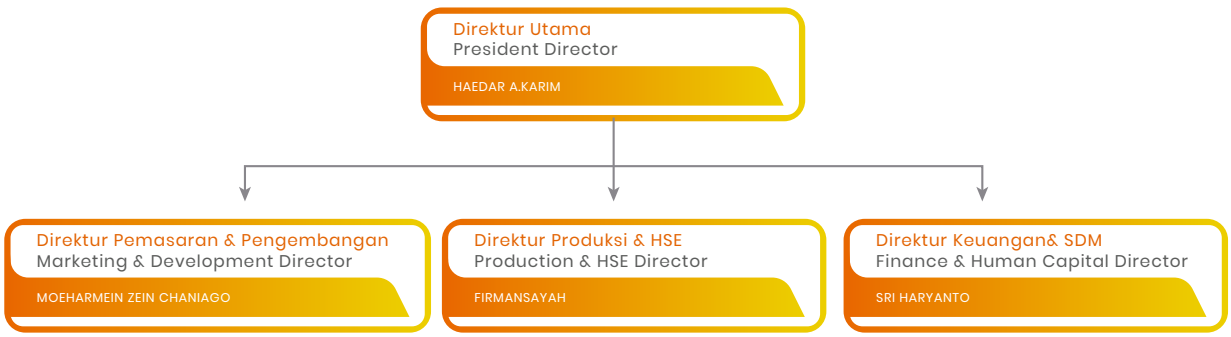

PROGRAM ORIENTASI PERUSAHAAN BAGI DIREKSI BARU

Program orientasi bagi Direksi dibutuhkan dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana usaha ke depan, panduan kerja dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi. Program pengenalan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dengan melakukan kajian dokumen Agenda dan Publikasi Rencana Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Dokumen Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, *Corporate Governance Policy* (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Direksi dan *Charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Nindya Karya.

Di tahun 2020, program pengenalan Perusahaan dilakukan kepada anggota Direksi baru, yaitu kepada Moeharmein Zein Chaniago dengan penjelasan kegiatan diuraikan pada tabel di bawah ini:

COMPANY ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

An orientation program for the Board of Directors is required to provide an overview of business activities, future business plans, work guidance and others that are the responsibility of the Board of Directors. The introduction program is prepared by the Corporate Secretary by reviewing the documents of the Agenda and the Publication of the Board of Commissioners' meeting Plan. The Plan consists of Annual report, Work Plan and Budget (RKAP), long Term Corporate Plan (RJPP), Company's Articles of Association, Corporate Governance Policy (CGP), Corporate Ethics Standards, Work Program of the Board of Commissioners and Supporting Committees of the Board of Commissioners, Board of Commissioners Charter, Board of Directors Charter and Supporting Committees of the Board of Commissioners Charter, as well as the regulations related to Nindya Karya's business process.

In 2020, the Company orientation program was carried out to Moeharmein Zein Chaniago, a new Director of the Company, with description of activities shown below:

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	WAKTU PELAKSANAAN *DATE*	AGENDA	PIHAK YANG HADIR *ATTENDANCE*
Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	Kamis, 23 Januari 2020 *Thursday, 23 January 2020*	Pengenalan Perusahaan meliputi: 1. Profil Perusahaan 2. Laporan Kinerja Bisnis 3. Laporan Kinerja Produksi 4. Laporan Kinerja Keuangan 5. Laporan Kinerja SDM 6. Kinerja Perusahaan 7. *Key Performance Indicator* Perusahaan 8. Rencana strategis Perusahaan 9. Laporan kinerja GCG Perusahaan *Company orientation includes:* 1. *Company Profile* 2. *Business Performance Report* 3. *Production Performance Report* 4. *Financial Performance Report* 5. *HR Performance Report* 6. *Company Performance* 7. *Key Performance Indicators of the Company* 8. *Company strategic plan* 9. *Company GCG performance report*	1. Dewan Komisaris 2. Sekretaris Dewan Komisaris 3. Komite Audit 4. Direksi 5. Kepala Departemen/Satuan dan Sekretaris Perusahaan 6. General Manager Wilayah II 7. General Manager Divisi EPC dan Properti 8. Kepala Unit Penunjang Produksi 9. Direksi anak Perusahaan 1. *Board of Commissioners* 2. *Secretary to the Board of Commissioners* 3. *Audit Committee* 4. *Board of Directors* 5. *Head of Department/Units and Corporate Secretary* 6. *General Manager Region II* 7. *General Manager of EPC and Property Division* 8. *Head of Production Support Unit* 9. *Directors of subsidiaries*

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Agar Direksi terus memperbaharui pengetahuannya akan industri konstruksi dan bisnis Nindya Karya, Perseroan memberikan program peningkatan kompetensi berupa seminar, *workshop*, atau kegiatan lainnya.

Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

To encourage the Board of Directors to always update their knowledge on the construction industry and the business of Nindya Karya, the Company provides competency development programs in the form of seminars, workshops, or other activities.

The Competence Development Program attended by the Board of Directors throughout 2020, is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TRANSPARENCY OF INFORMATION ON BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

ASSESSMENT PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran penting dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar tinggi sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ASPECTS

As the main organ in the Company, the Board of Commissioners and Board of Directors have an important role in the Company's growth. The assessment of these two organs is a necessity, especially the Company is an SOE that is directed to apply the principles of GCG to high standards and to assess its implementation.

Seperti yang telah diuraikan di awal bab ini, *assessment* terhadap penerapan GCG mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

An assessment of the GCG implementation refers to the copy of Decree of the SOE Ministry Secretary SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in SOEs. The method of assessment and evaluation is carried out by using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with the weight determined as stipulated in the Decision Copy above.

Sejalan dengan *assessment* yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses *assessment* Berdasarkan hasil *Assessment* penerapan prakti-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2020 pada PT Nindya Karya (Persero) yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kondisi penerapan mencapai skor 89,793 dari skor maksimum 100 dengan predikat "Sangat Baik".

In line with the assessment which aims to provide evaluations and recommendations, the Company's management is expected to follow up on the recommendations that arise from the assessment process. Based on the results of the 2020 Good Corporate Governance (GCG) implementation assessment at PT Nindya Karya (Persero) conducted by an external party, namely the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the application conditions reached a score of 89.793 out of a maximum score of 100 with the predicate "Excellent".

Khusus untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing meraih skor 31,564 dari skor maksimal 100 atau 90,183% dan 33,032 atau

Specifically for the Aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors, each achieved a score of 31.564 out of a maximum score of 100 or 90.183% and 33.032 or

Jenis Penilaian Type of Assessment	:	*Assessment* GCG tahun 2020 2020 GCG Assessment
Assessor/Penilai Assessor	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of DKI Jakarta Representative
Periode Pengukuran Period	:	1 Januari 2020 sampai dengan 18 Juni 2020 January 1, 2020 to June 18, 2020
Waktu Pengukuran Date	:	21 Januari 2021 sampai dengan 16 April 2021 January 21 to April 16, 2019
Tempat Place	:	Gedung Nindya Nindya Building

Hasil *Assessment* Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020 (metode Penilaian Berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012).

GCG Implementation Assessment Results of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2019 Fiscal Year (Assessment Method Based on the Copy of Decree of the SOE Ministry Secretary No. SK-16/ S.MBU/ 2012).

ASPEK PENGUJIAN *ASSESSMENT ASPECT*	BOBOT *VALUE*	HASIL EVALUASI GCG TAHUN BUKU 2020 *GCG ASSESSMENT RESULTS IN 2019 FISCAL YEAR*		
		NILAI *SCORE*	PENCAPAIAN *% ACHIEVEMENT*	PREDIKAT KUALITAS PENERAPAN GCG *PREDICATE FOR GCG IMPLEMENTATION QUALITY*
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/ Supervisory Board*	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *Board of Commissioners/ Supervisory Board*	35,000	31,564	90,183

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Description: 0-50: Very Poor | 50-60: Poor | 60-75: Average | 75-85: Good | 85-100: Very Good/Excellent

Rekomendasi hasil *assessment* penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2019 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh

Recommendations on the results of the GCG implementation assessment for aspects of the Board of Commissioners and Board of Directors for

Perseroan hingga akhir tahun 2020 dapat dilihat pada bagian Penilaian *Assessment* GCG yang telah diulas di awal bab ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR EVALUASI DAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggung jawabkan hasil pengawasan dan penasihatan serta pengurusan pengelolaan Perusahaan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian terhadap anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala berdasarkan target pencapaian (*goal setting*) dan KPI (*Key Performance Indicator*) yang sudah disepakati bersama pada saat awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak manajemen, maka setiap BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicator* (KPI) manajemen yang dijadikan Kontrak manajemen antara Pemegang Saham dengan Direksi BUMN tersebut. Di lingkup Perusahaan, Pemegang Saham menilai kinerja Perusahaan (termasuk *Key Performance Indicators*), Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan melalui rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, maka disusun KPI Dewan Komisaris tahun 2020 yang merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. Aspek yang dinilai dan nilai pembobotan dalam KPI Dewan Komisaris tahun 2020 adalah sebagai berikut:

the 2017 fiscal year and follow-up actions taken by the Company until the end of 2020 are presented in the GCG Assessment section that was reviewed at the beginning of this chapter.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PROCEDURE OF PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the assessment results on the supervision and advisory as well as the Company's management in the GMS in accordance with the applicable laws and regulations.

The assessment on members of the Board of Directors is implemented by the Board of Commissioners periodically based on goal setting and Key Performance Indicator jointly agreed at the beginning of the year in accordance with duties and responsibilities of each member of the Board of Directors.

ASSESSOR

In accordance with the letter of the Ministry of SOEs No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 concerning Management Contracts, each SOE is required to make a management Key Performance Indicator (KPI) which is used as a management contract between the Shareholders and the Board of Directors of the SOEs. Within the Company, Shareholders assess the performance of the Company (including Key Performance Indicators), Commissioners and Directors through the GMS mechanism.

CRITERIA USED IN THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on the work program of the Board of Commissioners that has been prepared and determined through the Work plan and Budget of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners' KPI for 2020 is prepared which is a measure of the assessment of the successful implementation of the duties and responsibilities of supervision and providing advice by the Board of Commissioners. Aspects assessed and weighted values in the KPI of the Board of Commissioners in 2020 are as follows:

ASPEK PENILAIAN *ASSESSMENT ASPECT*		BOBOT *VALUE*	TARGET
I	**ASPEK PENGAWASAN DAN PENGARAHAN** *SUPERVISION AND DIRECTION ASPECT*		
1	Jumlah Pelaksanaan Rapat *Number of Meetings Held*		
a.	Rapat *Internal* *Internal meeting*	10	12
b	Rapat Gabungan *Joint meeting*	10	12
2.	Tingkat Kehadiran dalam Rapat *Level of attendance at meetings*	10	100%
3.	Memberi Nasihat/Saran kepada Direksi *Provision of advice/suggestions to the Board of Directors*	20	8
4.	Monitoring Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit *Internal*/Eksternal *Monitoring of follow-up results/ internal/ external audit friends*	15	2
II	**ASPEK PELAPORAN** *REPORTING ASPECT*		
1.	Menyusun dan Menyampaikan Program Kerja Tahunan *Preparation and submission of annual work programs*	5	1
2.	Menyampaikan Laporan/Pendapat/ Saran kepada Pemegang Saham *Delivery of reports/opinions/suggestions to shareholders*	20	4
3.	Menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan *Submission of supervisory duty reports*	5	1
III	**ASPEK DINAMIS** *DYNAMICS ASPECT*		
1	Peningkatan Kompetensi *Competency Development*	5	2

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi selain berdasarkan target pencapaian dan KPI juga didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pengurusan perusahaan dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
3. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan dan komitmen kepada Pemegang Saham.
5. Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat, terbaru dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Pemangku kepentingan lainnya.

Criteria used in assessing performance of Board of Directors are based on not only the target achievements and KPI but also the following matters:

1. The implementation of the Company's Management is in accordance to authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and prevailing Regulation.
2. The implementation of the Company's Management is conducted on behalf of the Company's interest and in accordance to intentions and the Company's objectives.
3. Principles of corporate governance are implemented in every Company business activity on its level or organizational hierarchy.
4. Compliance toward regulation and commitment toward shareholders.
5. The provision of complete, accurate, and up-to-date data and information in a timely manner to the Board of Commissioners and other Stakeholders.

Berdasarkan RKAP Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, berikut disampaikan KPI Direksi untuk tahun buku 2020 serta realisasi sebagai pencapaiannnya

Based on the 2020 RKAP that has been approved by the shareholders, the following is the Board of Directors' KPI for the 2020 fiscal year and realization as its achievement.

Hasil Evaluasi *Key Performance Indicators* tahun 2020

Results of Evaluation of Key Performance Indicators in 2020:

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) PT NINDYA KARYA (PERSERO) AUDITED 2020

(Dihitung Berdasarkan Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020, Tanggal 23 November 2020)

(Calculated based on the Regulation of Minister of SOE of the Republic of Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020, dated November 23, 2020)

INDIKATOR *INDICATOR*	FORMULA	REVISI RKAP 2020 *REVISION OF 2020 RKAP*		AUDITED 2020	
		TARGET	SKOR *SCORE*	REALISASI *REALIZATION*	SKOR *SCORE*
NILAI EKONOMI UNTUK INDONESIA			**25,00**		**24,22**
New Contract Growth	Kontrak Baru Tahun (n) / Kontrak Baru Tahun (n-1) *New Contract in (n) / New Contract in (n-1)*	5,13%	5	20,36%	5,50
Return on Equity (ROE)	Laba Setelah Pajak / Modal Sendiri *Profit After Tax / Equity*	3,07%	5	2,90%	4,73
EBITDA Margin	EBITDA / Pendapatan Usaha *EBITDA / Revenues*	8,67%	5	7,70%	4,44
Leverage Ability	(Liabilitas jangka pendek + panjang) / (ekuitas - laba setelah pajak) *(Current Liabilities + Non-Current Liabilities) / (Equity - Profit After Tax)*	284,14%	5	269,02%	5,50
Order Book Burn Rate to Revenue	Pendapatan Usaha VB + Non VB / Kontrak Tersedia *Revenues VB + Non VB / Available Contract*	48,72%	5	39,43%	4,05
NILAI SOSIAL UNTUK INDONESIA *SOCIAL VALUE FOR INDONESIA*			**5,00**		**5,08**
Program PKBL: *PKBL Program*					
1. Target Pencapaian PKBL *1. PKBL Achievement Target* • Efektivitas PK • *Partnership Program Effectiveness*	(Jumlah Dana PK yang disalurkan / Jumlah Dana PK yang tersedia) x 100% *(Total Funds for Partnership Program disbursed / Total Available Funds for Partnership Program) x 100%*	100%	1	92,12%	0,92
• Efektivitas BL • *Community Development Program Effectiveness*	(Jumlah Dana BL yang disalurkan / Jumlah Dana BL yang tersedia) x 100% *(Total Funds for Community Development Program disbursed / Total Available Funds for Community Development Program) x 100%*	100%	1	99,97%	1,00
2. Kolektablitas Dana PK *2. Collectability of Partnership Program Funds*	(Rata-rata tertimbang kolektabilitas pengembangan pinjaman / Jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman)) x 100% *(Weighted Average of Collectability of Loan Development / Total Loans Disbursed (Loan Balance)) x 100%*	75%	1	71,98%	0,96
3. Pembinaan Mitra Binaan Naik Kelas *3. Development of Upgraded Fostered Partners*	(Jumlah MB yang naik kelas / Jumlah Total MB tahun berjalan) x 100% *(Total Upgraded Fostered Partners / Total Upgraded Fostered Partners of the Current Year) x 100%*	10%	1	16,00%	1,10

INDIKATOR *INDICATOR*	FORMULA	REVISI RKAP 2020 *REVISION OF 2020 RKAP*		AUDITED 2020	
		TARGET	SKOR *SCORE*	REALISASI REALIZATION	SKOR *SCORE*
4. Program BL yang berkelanjutan *4. Sustainable Community Development Program*	Realisasi dana untuk program BL yang berkelanjutan / Dana BL yang tersedia) x 100% *(Realization of Funds for Sustainable Community Development Program / Available Funds for Community Development Program) x 100%*	40%	1	50,00%	1,10
INNOVASI MODEL BISNIS ***BUSINESS MODEL INNOVATION***			**26,00**		**26,34**
Kepuasan Pelanggan *Customer Satisfaction*	Jumlah Referensi (kuesioner Kepuasan Pelanggan yang Positif) / Jumlah Proyek *Number of References (Questionnaire on Customer Satisfaction with Positive Results)*	90%	5	89,85%	4,99
Repeat Order	Jumlah Klien yang menjadi Klien di masa yang akan datang *Number of Clients that Become Future Clients*	5 Klien	7	5 Klien	7,00
Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan *Timeliness of Project Completion*	Jumlah Proyek yang Progresnya Lebih dari atau "=" 95% dari Kurva S / Seluruh Jumlah Proyek yang Dikerjakan *Number of Projects whose Progress is More Than or Equal to 95% in the S-Curve / Total Projects Undertaken*	95%	5	95,70%	5,50
Hilirisasi dan Kandungan Lokal *Downstream Business and Local Contents*	Kandungan lokal minimal 40% dari salah satu nilai *project capital expenditure* *Local content minimum 40% from one of the values of capital expenditure projects*	42%	6	66,00%	6,60
Penyelesaian PP 69 *Completion of PP 69*	Surat Persetujuan dari Menteri Keuangan *Approval from the Minister of Finance*	Des, 2020 *Dec, 2020*	3	75,00%	2,25
KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI ***LEADING TECHNOLOGY***			**17,00**		**17,60**
SMK3L OHSE Management System	*Zero Accident*	100%	5	100%	5,00
Pengisian Portal BUMN *Completion of SOE Portal*	Satu Bulan Setelah Tanggal Pelaporan *One Month after the Reporting Date*	100%	6	100%	6,00
Penerapan ERP *ERP Implementation*	(Realisasi Penerapan ERP / Target Penerapan ERP) x 100% *(Realization of ERP Implementation / Target of ERP Implementation) x 100%*	25%	3	28,81%	3,30
Penerapan BIM *BIM Implementation*	(Realisasi Penerapan BIM / Target Penerapan BIM) x 100% *(Realization of BIM Implementation / Target of BIM Implementation) x 100%*	25%	3	155,00%	3,30
PENGEMBANGAN INVESTASI ***INVESTMENT DEVELOPMENT***			**11,00**		**11,80**
Sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN dan atau perusahaan terafiliasi BUMN *Synergy among SOEs, Subsidiaries of SOEs, and/or Affiliates of SOEs*	Realisasi sinergi berupa kerjasama BUMN, anak perusahaan BUMN dan atau perusahaan terafiliasi BUMN > 5% modal disetor *Realization of Synergy in the Form of Cooperation among SOEs, Subsidiaries of SOEs, and/or Affiliates of SOEs > 5% of Paid-in Capital*	1 Kerjasama *1 Cooperation*	3	9 Kerjasama *9 Cooperation*	3,30
Tata Kelola Perusahaan (GCG) *Good Corporate Governance (GCG)*	Penilaian Aspek GCG dari Hasil *Assessment* *Aspect from the Result of Assessment*	89,70 Skor *89,70 Score*	3	89,79%	3,00

INDIKATOR *INDICATOR*	FORMULA	REVISI RKAP 2020 *REVISION OF 2020 RKAP*		AUDITED 2020	
		TARGET	SKOR *SCORE*	REALISASI *REALIZATION*	SKOR *SCORE*
Kerja sama/Investasi dengan perusahaan Luar Negeri *Cooperation/Investment with Overseas Companies*	Ditandatanganinya MoU Kerjasama dengan Perusahaan Luar Negeri *Signing of MoU with Overseas Companies*	1 MoU	5	3 MoU	5,50
PENGEMBANGAN TALENTA *TALENT DEVELOPMENT*			**16,00**		**11,26**
Pengesahan Pembentukan Klaster/ Subklaster BUMN *Institute* *Approval for Establishment of Cluster/ Sub-Cluster of SOE Institute*	Ketepatan waktu pembentukan (*End Product:* Konsep/Kajian, MoU dan Launching untuk Lingkup Klaster/ Subklaster) *Timeliness in the Establishment (End Product: Concept/Review, Mou, and Launching of Cluster/Sub-Cluster)*	Nov, 2020 Waktu	5	50%	2,50
Persetujuan Kementrian BUMN untuk Program Pengembangan Talenta lingkup Klaster/Subklaster, termasuk didalamnya program suksesi Direksi dan pengebangan *top talent* muda (≤40 tahun) *Approval of the Ministry of SOE for Talent Development Program of Cluster/Sub-Cluster, including Board of Directors succession program and young top-talent development (<40 years old)*	Surat Wakil Menteri BUMN II a.n. Menteri BUMN tentang Persetujuan atas Program Pengembangan Talenta lingkup Klaster/ Subklaster *Letter of the Deputy Minister of SOE II on behalf of the Minister of SOE regarding Approval for Talent Development Program of Cluster/Sub-Cluster*	Des, 2020 Waktu	5	50%	2,50
Sertifikasi SDM 1. Tenaga Ahli 2. Tenaga Terampil *HC Certification* *1. Experts* *2. Skilled Workers*	Jumlah Penambahan Orang yang Memperoleh Sertifikasi Keahlian atau Keterampilan Tahun Ini *Increase in the Number of Employees Obtaining Expertise or Skill Certification This Year*	200 Orang *200 People*	3	263 Orang *263 People*	3,30
Employee Engagement	*Skor* Hasil Survey *Score of Survey Result*	3,85 Skor *3,85 Score*	3	3,80 Skor *3.80 Score*	2,96
TOTAL			**100,00**		**96,31**

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang perubahan kelima atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik

REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PROCEDURES TO PROPOSE AND DETERMINE REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The procedures to determine remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company refers to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 concerning the fifth amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income

Negara. Prosedur pengusulan hingga penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The procedures to propose and determine the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the chart below.

TAHAPAN PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

STAGES OF SUBMISSION TO DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

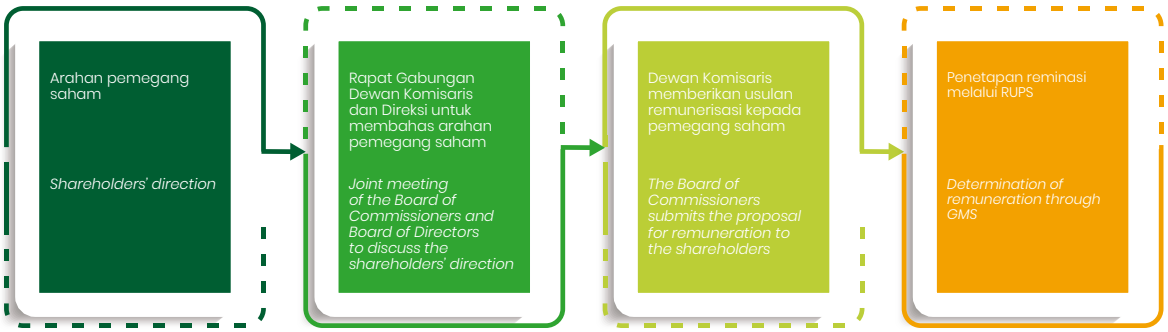

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan kelima atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Gaji/ Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/Insentif Kinerja

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

REMUNERATION STRUCTURE

Based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 concerning the fifth amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the components of remuneration for the Board of Commissioners consist of:

1. Salary/ Honorarium
2. Benefits
3. Facilities
4. Tantiem/ Performance Incentives

The remuneration structure and components for the Board of Commissioners and Board of Directors can be described as follows:

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS *REMUNERATION STRUCTURE FOR BOARD OF COMMISSIONERS*	STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI *REMUNERATION STRUCTURE FOR BOARD OF DIRECTORS*
Honorarium Dewan Komisaris*	**Gaji Direksi***
Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama • Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama	Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman *Internal* yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. • Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama, sesuai BAB II. Huruf B. angka 1.b. 2). Peraturan Menteri BUMN RI nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan kelima atas peraturan Menteri badan usaha milik negara nomor PER-04/MBU/2014 tetnang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. • Dalam hal terdapat jabatan lain selain Direktur Utama dan Direktur, besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri BUMN. • RUPS/Menteri BUMN dapat menetapkan Faktor Besaran Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan Perusahaan.
Honorarium for Board of Commissioners *Fixed income in the form of money received every month due to their position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following conditions:* • *The calculation of the salary of the President Commissioner is 45% of the salary of the President Director* • *The calculation of the salary of the Commissioner is 90% of the salary of the President Commissioner*	

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS *REMUNERATION STRUCTURE FOR BOARD OF COMMISSIONERS*	STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI *REMUNERATION STRUCTURE FOR BOARD OF DIRECTORS*
	Salary for Board of Directors *Fixed income in the form of money received every month due to their position as a member of the Company's Board of Directors, with the following conditions:* • *The salary of the President Director is determined using the internal guidelines set by the Minister of SOEs.* • *The salary of other members of the Board of Directors is determined with the composition of the Position Factor of 85% of the Salary of the President Director, according to Chapter II. Letter B. number 1.b. 2). Regulation of the Minister of SOE RI number PER-12/MBU/11/2020 concerning the fifth amendment to the regulation of the Minister of state-owned enterprises number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.* • *In the event that there are other positions other than the President Director and Director, the amount of the Position Factor is determined by the GMS/Minister of SOEs.* • *The GMS/Minister of SOEs may determine the Position Size Factor that is different from the provisions referred to if it is deemed more able to reflect fairness and fairness in carrying out the responsibilities of each member of the Board of Directors and the Company's capabilities.*
Tunjangan Dewan komisaris Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain honorarium, yang dapat berupa: 1. Tunjangan hari raya 2. Tunjangan transportasi; dan 3. Asuransi purna jabatan Berdasarkan Per-04/MBU/2014. **Allowance for Board of Commissioners** *Income in the form of money or can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Commissioners other than honorarium, which can be in the form of:* *1. Holiday allowance;* *2. Transportation allowance; and* *3. Post-employment insurance,* *based on Per-04/MBU/2014.*	**Tunjangan Direksi** Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa: 1. Tunjangan hari raya 2. Tunjangan transportasi; dan 3. Asuransi purna jabatan Berdasarkan Per-04/MBU/2014. **Allowance for Board of Directors** *Income in the form of money or can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Directors other than salary, which can be in the form of:* *1. Holiday allowance;* *2. Housing allowance; and* *3. Post-employment insurance,* *based on Per-04/MBU/2014.*
Fasilitas Dewan Komisaris Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/ atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas Kesehatan • Fasilitas Bantuan hukum **Facilities for Board of Commissioners** *Income in the form of facilities and/or benefits and/ or guarantees used/used by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:* • *Medical facility* • *Legal Aid Facility*	**Fasilitas Direksi** Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: • Fasilitas Kendaraan • Fasilitas Kesehatan • Fasilitas Bantuan hukum **Facilities for Board of Directors** *Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/ used by members of the Board of Directors in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:* • *Transportation facility* • *Medical Facility* • *Legal Aid Facility*
Tantiem/insentif Kinerja Dewan Komisaris • Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Berdasarkan PER-04/MBU/2014 -Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris BUMN apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masuk mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.	**Tantiem Direksi** Tantiem diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*/ITI) • Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. • Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. • Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Direksi mengikuti faktor Jabatan, yaitu Anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS *REMUNERATION STRUCTURE FOR BOARD OF COMMISSIONERS*	STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI *REMUNERATION STRUCTURE FOR BOARD OF DIRECTORS*
Tantiem/performance incentive for Board of Commissioners • *Tantiem is income in the form of award given to members of the Board of Commissioners if they make a profit and do not experience accumulated losses.* • *Based on PER-04/MBU/2014, performance incentives are income in the form of award given to members of the Board of Commissioners of SOEs if there is an increase in performance even though they experience losses or accumulated losses.*	**Tantiem/performance incentive for Board of Directors** *Tantiem is given in addition to the Long-Term Incentive (LTI)* • *Tantiem is income in the form of award given to members of the Board of Directors of SOEs if they earn profits and do not experience accumulated losses.* • *Performance Incentives are income in the form of award given to members of the Board of Directors if there is an increase in performance even though they experience losses or accumulated losses.* • *The composition of the amount of Tantiem/Performance Incentives for members of the Board of Directors is based on the position factor, which is 90% of the amount for the President Director is for the members of Board of Directors.*
Santunan Purna Jabatan *Post-Employment Benefits*	Santunan Purna Jabatan *Post-Employment Benefits*

Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham Perusahaan oleh manajemen. Dengan demikian, tidak terdapat opsi saham sebagai bagian dari kebijakan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

The Company does not have a policy regarding the ownership of the Company's shares by management. Thus, there are no stock options as part of the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

INDIKATOR BESARAN GAJI BAGI DIREKTUR UTAMA, DAN PENGESAHAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020

Untuk memperhitungkan besaran gaji bagi Direktur Utama dan bonus kinerja, Perseroan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor: SR-26/Wk2.MBU.B/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Hal: Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2020, besaran gaji bagi Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp150.000.000. Saran gaji Direksi ini akan menjadi perhitungan dasar bagi gaji Direksi lainnya dan honorarium bagi Dewan Komisaris.

SALARY INDICATOR FOR PRESIDENT DIRECTOR, AND VALIDATION OF REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2020

To calculate the total salary for the President Director and performance bonuses, the Company considers several factors below:

1. Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs,as amended several times most recently by the Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU05/2019 dated 31 May 2019 concerning Fourth Amendment to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.

2. Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/11/2020 concerning Fifth Amendment to Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.

Based on the Letter of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-26/Wk2.MBU.B/08/2020 dated August 4, 2020 concerning Determination of Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) in 2020, the amount of salary for the President Director was set at Rp150,000,000. This recommendation on the salary

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan di tahun 2020 sebagai berikut:

1. Gaji dan honorarium
   - Gaji Direktur Utama sebesar Rp150.000.000.
   - Gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
   - Honorarium Komisaris Utama dihitung sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
   - Honorarium Anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
2. Tantiem/Insentif Kinerja
   - Total Tantiem/IK untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 ditetapkan sebesar Rp6.903.000.000,- dengan ketentuan :
   - Tantiem/IK Direktur Utama, Direktur yang membidangi SDM, Anggota Direksi lainnya, Komisaris Utama masing-masing sebesar 100%, 90%, 85%, dan 45% dari Tantiem/IK Direktur Utama, tantiem/IK Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem/IK Komisaris Utama. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun buku 2019
   - Tantiem Direktur Utama menjadi acuan utama.
   - Tantiem Direksi lainnya sebesar 90% dari tantiem Direktur Utama.
   - Tantiem Komisaris Utama dihitung sebesar 45% dari tantiem Direktur Utama.
   - Tantiem Anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama.

of the Board of Directors will be the basis for calculating the salaries of other Directors and the honorarium for the Board of Commissioners.

REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2020

The remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in 2020 was as follows:

1. Salary and honorarium
   - President Director's salary is Rp150,000,000.
   - The salary of the Director in charge of Human Resources is 90% of the salary of the President Director and other members of the Board of Directors are 85% of the salary of the President Director.
   - The President Commissioner's honorarium is calculated at 45% of the President Director's salary.
   - Honorarium for other members of the Board of Commissioners is 90% of the honorarium for the President Commissioner.
2. Tantiem/Performance Incentives
   - Total Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2019 Fiscal Year is set at Rp6,903,000,000,- with the following conditions:
   - Tantiem for President Director, Director in charge of Human Capital, other members of Board of Directors, President Commissioner each 100%, 90%, 85%, and 45% of Tantiem of President Director, while tantiem for Board of Commissioners is 90% of tantiem of President Commissioner. The amount of tantiem is calculated proportionally according to the term of office of each Board of Directors and Board of Commissioners in the 2019 fiscal year
   - The President Director's Tantiem is the main reference.
   - Other Directors' bonuses are 90% of the President Director's tantiem.
   - The President Commissioner's tantiem is calculated at 45% of the President Director's tantiem.
   - Tantiem of other members of the Board of Commissioners is 90% of the tantiem of the President Commissioner.

RASIO GAJI

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perseroan adalah sebagai berikut:

SALARY RATIO

Information regarding the salary ratio of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company is as follows:

PERBANDINGAN *COMPARISON*	2020	2019
Direktur Utama terhadap Direktur *President Director to other Directors*	1:0,85	1:0,85
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris *President Commissioner to other Commissioners*	1:0,90	1:0,90
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama *President Director to President Commissioner*	1:0,45	1:0,45
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi *President Director to the highest salary for employees*	1:0,24	1:0,24
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah *President Director to the lowest salary for employees*	1:0,04	1:0,04
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah *Highest employee salary to lowest employee salary*	1:0,17	1:0,40
Karyawan Terendah terhadap UMP *Lowest employee salary to minimum regional wage*	1:0,65	1:0,72

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Departemen sementara karyawan terendah adalah Staf.

What is meant by the highest employee salary in the table above is for the Head of Department position while the lowest employee salary is the Staff position.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat *Internal* Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal sekali dalam setiap bulan.

Rapat Internal Dewan Komisaris merupakan rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Dewan Komisaris. Rapat Internal Dewan Komisaris dapat diselenggarakan atas permintaan Komisaris Utama, salah seorang Anggota Dewan Komisaris, atau permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. rapat Internal Dewan Komisaris dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditugaskan Komisaris Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Meetings of the Board of Commissioners consist of Internal Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors. Meetings of the Board of Commissioners are held at least once a month.

The Internal Meeting of the Board of Commissioners is a meeting held and attended by the Board of Commissioners. Internal meetings of the Board of Commissioners may be held at the request of the President Commissioner, a member of the Board of Commissioners, or a written request from the Shareholders stating the matters to be discussed. Internal meetings of the Board of Commissioners are attended by Members of the Board of Commissioners, Secretary to the Board of Commissioners or other officials assigned by the President Commissioner, except for special meetings which may only be attended by Members of the Board of Commissioners.

Meetings of the Board of Commissioners are valid and can make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (half) of the

(satu per dua) dari jumlah Angggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Dewan Komisaris, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris atau dalam bentuk keputusan yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapatnya; termasuk pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili harus menyampaikan keberatannya dan atau usul perbaikannya, bila ada, atas risalah rapat tersebut.

Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan 11 kali rapat Internal. Berikut risalah rapat Dewan Komisaris dan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat.

total members of the Board of Commissioners. All decisions in the meeting of the Board of Commissioners are taken by deliberation for consensus. If an agreement is not reached through deliberation, the decision is taken by majority vote.

Binding decisions can also be taken without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that the decision is approved in writing and signed by all members of the Board of Commissioners.

Decisions concerning strategic aspects must be made through the mechanism of the Board of Commissioners meeting or in the form of a decision that is approved in writing and signed by all members of the Board of Commissioners. These strategic aspects include, among others, all actions of the Board of Directors which must obtain the approval of the GMS after obtaining a written recommendation from the Board of Commissioners as well as all actions of the Board of Directors which must obtain written approval from the Board of Commissioners.

At every meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting must be made; including a statement of objection to the meeting decision if there is no unanimity of opinion. Each member of the Board of Commissioners who is present and/or represented must submit his/her objections and/or suggestions for improvement, if any, to the minutes of the meeting.

Throughout 2020, the Board of Commissioners has held 11 internal meetings. The following are the minutes of the Board of Commissioners' meeting and the attendance of the Board of Commissioners at the meeting.

RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN DI TAHUN 2020

MINUTES OF INTERNAL MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

RECAPITULATION OF ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS IN THE INTERNAL MEETINGS 2020

DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*	JABATAN *POSITION*	JUMLAH WAJIB RAPAT *TOTAL MEETINGS*	JUMLAH KEHADIRAN *TOTAL ATTENDANCE*	JUMLAH TIDAK HADIR *TOTAL ABSENCE*	% KEHADIRAN *% ATTENDANCE*
Sugiyartanto	Komisaris Utama *President Commissioner*	11	10	1	90,91%
Andar Perdana Widiastono	Komisaris *Commissioner*	11	10	1	90,91%
Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*	11	10	1	90,91%

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Di samping rapat *Internal*, Dewan Komisaris memiliki forum Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Secara umum agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja Keuangan dan operasional Perseroan (triwulan, semester dan tahunan).
2. Pembahasan dan Penetapan RKAP.
3. Evaluasi dan rekomendasi Komite-Komite di Bawah Direksi.
4. Persiapan pelaksanaan RUPS.
5. Agenda lain yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Gabungan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditugaskan atau diundang oleh Komisaris Utama/ Direktur Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak- pihak yang menjadi peserta rapat.

Guna membentuk perencanaan yang disiplin, di awal tahun 2020, Perseroan telah menyusun rencana awal pelaksanaan rapat gabungan tersebut yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan (*calendar event*). Informasinya rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti SPI dan Wilayah/ Divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Di sepanjang tahun 2020, rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sebanyak 10 kali. Berikut risalah rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat.

JOINT MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners has a Joint Meeting forum by inviting the Board of Directors. In general, the agenda for the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors discusses:

1. Evaluation of the Company's financial and operational performance (quarterly, semester and yearly).
2. Discussion and determination of RKAP.
3. Evaluation and recommendation of the Committees under the Board of Directors.
4. Preparation for the implementation of the GMS.
5. Other agendas under the authority of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Joint Meetings are attended by Members of the Board of Commissioners, Directors, Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary or other officials assigned or invited by the President Commissioner/President Director, except for special meetings which may only be attended by Members of the Board of Commissioners and Directors.

Information regarding the planned implementation of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be made no later than 7 (seven) days prior to the scheduled implementation. In the publication, it is informed about the date and time of the meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting and the parties who are the meeting participants.

In order to form a disciplined plan, in early 2020, the Company has prepared an initial plan for the implementation of the joint meeting which is contained in the Company's Annual Schedule (calendar event). Information on the meeting plan has also been widely distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other organs such as SPI and existing Regions/Divisions. In the event of an incidental meeting proposal, the publication can be carried out as effectively and efficiently as possible but still following the applicable documentation procedures (making minutes).

In 2020, the Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held as many as 10 times. The following are the minutes of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the meeting.

RISALAH RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI TAHUN 2020

MINUTES OF JOINT MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2020

REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DI RAPAT GABUNGAN TAHUN 2020

RECAPITULATION OF ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN THE JOINTS MEETINGS 2020

TANGGAL RAPAT *MEETING DATE*	AGENDA RAPAT *MEETING AGENDA*	PESERTA *PARTICIPANTS*
RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS *MINUTES OF MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS*		
28 Januari 2020 *January 28, 2020*	Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Draft Revisi RKAP *The Board of Commissioners' response to the RKAP Revised Draft*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
4 Februari 2020 *February 4, 2020*	Pembahasan persetujuan permohonan kepada Dewan Komisaris *Discussion on approval for request to the Board of Commissioners*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
30 Maret 2020 *March 30, 2020*	Pembahanan Laporan *Audited* Tahun Buku 2020 *Discussion on Audited Report of the 2020 Fiscal Year*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
27 April 2020 *April 27, 2020*	Pembahasan persetujuan permohonan kepada Dewan Komisaris *Discussion on Audit Committee's Review*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
20 Mei 2020 *May 20, 2020*	Pembahasan persetujuan permohonan kepada Dewan Komisaris *Discussion on approval for request to the Board of Commissioners*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
30 Juni 2020 *June 30, 2020*	Pembahasan Kajian Komite Audit *Discussion on Audit Committee's Review*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
23 Juli 2020 *July 23, 2020*	Pembahasan Revisi RKAP 2020 *Discussion on Revised RKAP 2020*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
28 Agustus 2020 *August 28, 2020*	Pembahasan Kinerja Perusahaan *Discussion on Company's Performance*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
21 September 2020 *September 21, 2020*	Pembahasan persetujuan permohonan kepada Dewan Komisaris *Discussion on approval for request to the Board of Commissioners*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*

TANGGAL RAPAT *MEETING DATE*	AGENDA RAPAT *MEETING AGENDA*	PESERTA *PARTICIPANTS*
2 October 2020 *October 2, 2020*	Penunjukan KAP *Appointment of KAP*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • *Board of Commissioners* • *Secretary of Board of Commissioners* • *Audit Committee*
RISALAH RAPAT GABUNGAN *MINUTES OF JOINT MEETING*		
29 Januari 2020 *January 29, 2020*	Pembahasan persetujuan permohonan kepada Dewan Komisaris *Discussion on approval for request to the Board of Commissioners*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
31 Maret 2020 *March 31, 2020*	• Laporan *Audited* Tahun Buku 2019 • *Masterplan* IT Nindya Karya • *Audited Report of the 2019 Fiscal Year* • *IT Master Plan of Nindya Karya*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
29 April 2020 *April 29, 2020*	Kinerja Perusahaan sampai dengan 31 Maret 2020 *Company performance up to March 31, 2020*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
26 Mei 2020 *May 26, 2020*	Kinerja Perusahaan sampai dengan 30 April 2020 *Company's Performance up to April 30, 2020*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
29 Juni 2020 *June 29, 2020*	Kinerja Perusahaan sampai dengan 31 Mei 2020 *Company's Performance up to May 31, 2020*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
23 Juli 2020 *July 23, 2020*	Kinerja Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2020 *Company's Performance up to June 30, 2020*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*

TANGGAL RAPAT *MEETING DATE*	AGENDA RAPAT *MEETING AGENDA*	PESERTA *PARTICIPANTS*
28 Agustus 2020 *August 28, 2020*	• Kinerja Perusahaan sampai dengan 31 Juli 2020 • Revisi RKAP 2020 • *Company's Performance up to July 31, 2020* • *Revised RKAP 2020*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
30 September 2020 *September 30, 2020*	• Kinerja Perusahaan sampai dengan 31 Agustus 2020 • Tindak lanjut rapat sebelumnya • *Company's Performance up to August 31, 2020* • *Follow-up on previous meeting*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
26 Oktober 2020 *October 26, 2020*	• Kinerja Perusahaan sampai dengan 30 September 2020 • Tindak lanjut rapat sebelumnya • *Company's Performance up to September 30, 2020* • *Follow-up on previous meeting*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*
26 November 2020 *November 26, 2020*	• Kinerja Perusahaan sampai dengan 31 Oktober 2020 • Tindak lanjut rapat sebelumnya • Usulan RKAP 2021 • *Company's Performance up to October 31, 2020* • *Follow-up on previous meeting* • *Proposal for RKAP 2021*	• Dewan Komisaris • Sekretaris Dewan Komisaris • Komite Audit • Direksi Perusahaan • Kepala-Kepala Departemen • *Board of Commissioners* • *Board of Commissioners Secretary* • *Audit Committee* • *Board of Directors* • *Head of Departments*

RAPAT DIREKSI

Secara umum Agenda rapat yang diselenggarakan Direksi membahas tentang:

1. Laporan Manajemen mengenai Kinerja Keuangan dan Operasional Perusahaan.
2. Pembahasan persiapan RUPS.
3. Pembahasan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan & RKAP.
4. Menindaklanjuti temuan SPI.
5. Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan organ Direksi.

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Direksi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

In general, the agenda of meetings held by the Board of Directors discusses:

1. Management Report on the Company's Financial and Operational Performance.
2. Discussion on the preparation of the GMS.
3. Discussion on the preparation of the Company's Long Term Plan & RKAP.
4. Following up on SPI findings.
5. Other agendas that are still under the authority of the Board of Directors.

Information regarding the planned implementation of the Board of Directors meeting is carried out no later than 7 (seven) days prior to the scheduled implementation. In the publication, it is informed about the date and time of the meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting and the parties who are the meeting participants.

Guna membentuk perencanaan yang disiplin, di awal tahun 2020, Perseroan juga telah menyusun rencana awal pelaksanaan rapat Direksi sebagaimana penyusunan rencana rapat Dewan Komisaris yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan (*calendar event*). Informasinya rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti SPI dan Wilayah/Divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

In order to form a disciplined plan, in early 2020, the Company has also prepared an initial plan for the implementation of the Board of Directors meeting as well as the preparation of the Board of Commissioners meeting plan as stated in the Company's Annual Schedule (calendar event). Information on the meeting plan has also been widely distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other organs such as SPI and existing Regions/Divisions. In the event of an incidental meeting proposal, the publication can be carried out as effectively and efficiently as possible but still following the applicable documentation procedures (making minutes).

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Direksi) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*desenting opinion*) serta keputusan yang ditetapkan. dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

In ensuring the implementation of the principles of transparency and accountability, the minutes of the meeting (in this case the Board of Directors meeting) are well documented which includes discussions on the meeting agenda, dissenting opinions and decisions made. The meeting documentation is then signed by the leadership and all meeting participants present and distributed according to its designation.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang mengacu kepada *board manual* sebagai pedoman. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat *Interna*l dan rapat dengan mengundang Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

The decision-making mechanism in the Board of Directors meeting is taken based on deliberation for consensus which refers to the board manual as a guideline. In the event that a consensus deliberation decision is not reached, the decision is taken based on majority voting. Board of Commissioners meetings consist of internal meetings and meetings inviting the Board of Commissioners to discuss various aspects of the Company's operations and financial management.

Dalam hal Direksi Perseroan yang saat ini berjumlah genap, ketentuan kuorum dalam rapat adalah 50%+1 dihitung dari suara Direktur Utama.

In the event that the current number of Directors of the Company is even, the quorum provision in the meeting is 50%+1 calculated from the votes of the President Director.

REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI DI RAPAT DIREKSI TAHUN 2020

MINUTES OF MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS IN 2020

DEWAN DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*	**JABATAN** *POSITION*	**JUMLAH WAJIB RAPAT** *TOTAL MEETINGS*	**JUMLAH KEHADIRAN** *TOTAL ATTENDANCE*	**JUMLAH TIDAK HADIR** *TOTAL ABSENCE*	**% KEHADIRAN** *% ATTENDANCE*
Haedar A. Karim	Direktur Utama *President Director*	120	119	1	99,17%
Moeharmein Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	120	120	0	100%
Firmansyah	Direktur Produksi dan QHSE *Production and QHSE Director*	120	115	5	95,83%
Sri Haryanto	Direktur Keuangan dan SDM *Finance and Human Capital Director*	120	120	0	100%

Selain itu, rapat Direksi juga dilakukan melalui media *Video Conference*. Di sepanjang tahun 2020, rapat Direksi melalui *Video Conference*

In addition, the Board of Directors meeting is also conducted through Video Conference media. Throughout 2020, the Board of Directors meetings through Video Conference

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Per 31 Desember 2018, sebanyak 1,00% saham Perusahaan Seri A Dwi Warna dimiliki oleh Negara republik Indonesia melalui Pemerintah Indonesia. Sisanya sebanyak 99,00% saham Seri B biasa dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA sepenuhnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia. Dengan demikian, Perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia melalui Pemerintah republik Indonesia.

TRANSPARANSI HUBUNGAN USAHA DAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda. hubungan afiliasi juga muncul karena adanya jabatan dalam kelompok usaha atau struktur kelompok yang sama.

hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DISCLOSURE OF AFFILIATIONS BETWEEN BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDERS, CONTROLLING SHAREHOLDERS, UP TO THE NAME OF ULTIMATE OWNER

Shareholders are individuals or legal entities that legally own the Company's shares. As of December 31, 2018, 1.00% of the Company's Series A Dwi Warna shares have been owned by the Republic of Indonesia through the Government of Indonesia. The remaining 99.00% of Series B shares have been owned by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). PPA is wholly owned by the Republic of Indonesia. Thus, the Company is wholly owned by the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia.

TRANSPARENCY OF BUSINESS RELATIONS AND AFFILIATIONS BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

The Controlling Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other in the implementation of their respective duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors have guidelines and work procedures that include, among other things, their respective responsibilities, obligations, authorities and rights.

Between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, it is not allowed to have blood family relations up to the third degree, either vertically or horizontally, or by marriage. Affiliate relationships also arise because of positions in the same business group or group structure.

The affiliation between members of the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and Major/Controlling Shareholders can be seen in the table below.

TRANSPARANSI HUBUNGAN AFILIASI

AFFILIATE RELATIONSHIP TRANSPARENCY

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*	HUBUNGAN AFILIASI *AFFILIATION*		
	DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*	DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI) *GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA (MAIN/ CONTROLLING SHAREHOLDER)*
DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*			
Sugiyartanto (Komisaris Utama) *Sugiyartanto (President Commissioner)*	X	X	X
Andar Perdana Widiastono (Komisaris) *Andar Perdana Widiastono (Commissioner)*	X	X	X
Rika Kiswardani (Komisaris) *Rika Kiswardani (Commissioner)*	X	X	X
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*			
Haedar A. Karim (Direktur Utama) *Haedar A. Karim (President Director)*	X	X	X
Moeharmein Zein Chaniago (Direktur Pemasaran dan Pengembangan) *Moeharmein Zein Chaniago (Marketing and Development Director)*	X	X	X
Firmansyah (Direktur Produksi dan QHSE) *Firmansyah (Production and QHSE Director)*	X	X	X
Sri Haryanto (Direktur Keuangan dan SDM) *Sri Haryanto (Finance and Human Capital Director)*	X	X	X
V=ada x=tidak ada			*V = affiliated X = unaffiliated*

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain dan/atau institusi lain di luar Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan adalah sebagai berikut:

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The relationship between the management of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in other companies and/ or other institutions outside the Company which may cause a conflict of interest either directly or indirectly with the interests of the Company is as follows:

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*	KEPENGURUSAN PADA PERUSAHAAN/LEMBAGA LAIN *MANAGEMENT POSITION AT OTHER COMPANIES/INSTITUTIONS*		
	SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS *AS A MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS*	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI *AS A MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS*	JABATAN LAINNYA *OTHER POSITIONS*
DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*			
Sugiyartanto (Komisaris Utama) *Sugiyartanto (President Commissioner)*	X	X	Kepala Biro SDM Kementrian PUPR *Head of HR Bureau of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR)*
Andar Perdana Widiastono (Komisaris) *Andar Perdana Widiastono (Commissioner)*	X	X	Jaksa Muda Intelejen Kejaksaan Agung Attorney General's Office of Intelligence

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*	KEPENGURUSAN PADA PERUSAHAAN/LEMBAGA LAIN *MANAGEMENT POSITION AT OTHER COMPANIES/INSTITUTIONS*		
	SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS *AS A MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS*	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI *AS A MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS*	JABATAN LAINNYA *OTHER POSITIONS*
Rika Kiswardani (Komisaris) *Rika Kiswardani (Commissioner)*	X	X	Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Deputy for Palace Administration and Management
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*			
Haedar A. Karim (Direktur Utama) *Haedar A. Karim (President Director)*	X	X	X
Moeharmein Zein Chaniago (Direktur Pemasaran dan Pengembangan) *Moeharmein Zein Chaniago (Marketing and Development Director)*	X	X	X
Firmansyah (Direktur Produksi dan QHSE) *Firmansyah (Production and QHSE Director)*	X	X	X
Sri Haryanto (Direktur Keuangan dan SDM) *Sri Haryanto (Finance and Human Capital Director)*	X	X	X
V=ada x=tidak da			*V = affiliated X = unaffiliated*

Penjelasan terkait kepengurusan pada perusahaan/lembaga lain adalah sebagai berikut:

Meskipun kedua Komisaris di atas memiliki rangkap jabatan, Diangkatnya kedua Anggota Komisaris ini telah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Pemegang Saham.

Description of management position at other companies/institutions is as follows:

Although the Commissioner above has concurrent positions, the appointment of the Commissioner has been through a fit-and-proper test conducted by the Shareholders.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Di bawah ini disajikan kepemilikan saham Perusahaan sejumlah 5% atau lebih oleh Dewan Komisaris, baik kepemilikan saham di perusahaan publik lain maupun kepemilikan saham perusahaan. Transparansi kepemilikan saham sejumlah 5% atau lebih oleh Dewan Komisaris ini menjadi bagian dari upaya Persero untuk memberikan informasi terkait potensi benturan kepentingan.

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The following table describes the Company's share ownership of 5% or more by the Board of Commissioners, both share ownership in other public companies and share ownership in the Company. The transparency of share ownership of 5% or more by the Board of Commissioners is part of the Company's efforts to provide information regarding potential conflicts of interest.

NAMA DAN JABATAN *BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*	KEPEMILIKAN SAHAM *SHARE OWNERSHIP*	
	NINDYA KARYA	PERUSAHAAN LAIN>5% *OTHER COMPANIES >5%*
DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*		
Sugiyartanto (Komisaris Utama) *Sugiyartanto (President Commissioner)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Andar Perdana Widiastono (Komisaris) *Andar Perdana Widiastono (Commissioner)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Rika Kiswardani (Komisaris) *Rika Kiswardani (Commissioner)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

NAMA DAN JABATAN *BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS*	KEPEMILIKAN SAHAM *SHARE OWNERSHIP*	
	NINDYA KARYA	PERUSAHAAN LAIN>5% *OTHER COMPANIES >5%*
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*		
Haedar A. Karim (Direktur Utama) *Haedar A. Karim (President Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Moeharmein Zein Chaniago (Direktur Pemasaran dan Pengembangan) *Moeharmein Zein Chaniago (Marketing and Development Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Firmansyah (Direktur Produksi dan QHSE) *Firmansyah (Production and QHSE Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*
Sri Haryanto (Direktur Keuangan dan SDM) *Sri Haryanto (Finance and Human Capital Director)*	Nihil *Nil*	Nihil *Nil*

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Organ Komite Audit di bawah Dewan Komisaris memiliki peran sebagai organ pendukung yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas terkait pengawasan proses pelaporan akuntansi dan keuangan, audit laporan keuangan dan pengendalian *Internal* serta fungsi-fungsi audit lainnya. Susunan Komite Audit terdiri dari anggota Dewan Komisaris serta para profesional di bidang keuangan yang bertindak independen dan tidak memiliki afiliasi dalam bentuk apapun dengan perusahaan untuk menjaga integritasnya.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Agar tugas dan kewenangan Komite Audit Perusahaan berjalan secara profesional, indenpenden serta bebas intervensi, Perusahaan menetapkan Piagam Komite Audit yang disepakati dan ditandatangani secara bersama oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi pada 20 Oktober 2020.

Adapun ruang lingkup Piagam Komite Audit meliputi:

1. Struktur Organisasi
2. Persyaratan Profesional
3. Tugas-tugas Komite Audit
4. Wewenang Komite Audit
5. Tanggung Jawab dan Kewajiban Komite Audit
6. Penilaian Kinerja

SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF COMMISSIONERS

AUDIT COMMITTEE

As an organ under the Board of Commissioners, the Audit Committee has a role as a supporting organ in charge of assisting the Board of Commissioners in carrying out tasks related to the supervision of the accounting and financial reporting process, auditing financial statements and internal control as well as other audit functions. The composition of the Audit Committee consists of members of the Board of Commissioners as well as professionals in the financial sector who act independently and have no affiliation in any form with the company to maintain its integrity.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

In order for the duties and authorities of the Company's Audit Committee to run professionally, independently and free of intervention, the Company has established the Audit Committee Charter which was agreed and signed jointly by all members of Board of Commissioners and Board of Directors on 20 October 2020.

The scope of the Audit Committee Charter includes:

1. Organizational Structure
2. Professional Requirements
3. Duties of the Audit Committee
4. Authority of the Audit Committee
5. Responsibilities and Obligations of the Audit Committee
6. Performance Assessment

KETENTUAN DAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Ketentuan terkait organisasi Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Ketua dan Anggota Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak secara independen;
3. Komite Audit diketuai oleh 1 (satu) orang yang berasal dari Anggota Komisaris atau dari luar Perusahaan.
4. Anggota Komite Audit dapat berasal darianggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
5. Anggota Komite Audit dan Komite lain dapat berjumlah 2 (dua) orang yang bukan berasal dari anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
7. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
8. Apabila anggota Dewan Komisaris berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dan
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
6. Salah satu dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan memahami industri/bisnis Perseroan.

PROVISIONS AND INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee in carrying out its duties is under and directly responsible to the Board of Commissioners. The provisions related to the organization of the Audit Committee are as follows:

1. The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
2. The Chairman and Members of the Audit Committee are members of the Board of Commissioners who can act independently;
3. The Audit Committee is chaired by 1 (one) person who is a member of the Board of Commissioners or from outside the Company.
4. Members of the Audit Committee may come from members of the Board of Commissioners or from outside the Company.
5. Members of the Audit Committee and other Committees can be 2 (two) people who are not members of the Supervisory Board or from outside the Company.
6. The appointment and dismissal of members of the Audit Committee is reported to the GMS.
7. Members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners, resign automatically when their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.
8. If a member of the Board of Commissioners ceases to be a member of the Board of Commissioners, the Chairman of the Audit Committee must be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.

To be appointed as a member of the Audit Committee, the following requirements must be met:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/ inspection.
2. Do not have any personal interests/ relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to complete the task and
5. Other requirements stipulated in the Audit Committee Charter.
6. One of the members of the Audit Committee must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and understand the Company's industry/business.

KETENTUAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

TERM OF OFFICE FOR MEMBERS OF AUDIT COMMITTEE

The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the Company is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss them at any time.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT TAHUN 2020

Di tahun 2020 pergantian susunan Komite Audit. Dengan demikian, susunan Komite Audit per 31 Desember 2020:

STRUCTURE AND COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE IN 2020

In 2020 the composition of the Audit Committee changed. Thus, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2020 is as follows:

SUSUNAN KOMITE AUDIT PER 31 DESEMBER 2020

COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AS OF DECEMBER 31, 2020

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	DASAR PENGANGKATAN *BASIS OF APPOINTMENT*	MASA JABATAN *TERM OF OFFICE*
Andar Perdana Widiastono	Ketua/Komisaris *Head of Committee/ Commissioner*	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : SK-40/Kom/06/2020 *Decision Letter of Board of Commissioners No. SK-40/Kom/06/2020*	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris *The same as the term of office as a Commissioner*
Mamat Supangkat	Anggota *Member*	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) nomor: SK-40/Kom/06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Nindya Karya (Persero) *Decision Letter of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. SK-40/Kom/06/2020 concerning Appointment of Members of Audit Committee of PT Nindya Karya (Persero)*	2020-2021

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

PROFILE OF MEMBERS OF AUDIT COMMITTEE

KETUA KOMITE AUDIT/KOMISARIS *HEAD OF COMMITTEE/ COMMISSIONER*	Andar Perdana Widiastono

Profil Ketua Komite Andar Perdana Widiastono dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam laporan Tahunan ini

Profile of Andar Perdana Widiastono is available under the Profile of Board of Commissioners section in the Company Profile chapter of this Annual Report

ANGGOTA KOMITE AUDIT *MEMBER OF COMMITTEE*	Mamat Supangkat
PERIODE JABATAN *IN-OFFICE PERIOD*	2 Juni 2020, Periode-1 *June 2, 2020, First Period*
DATA PRIBADI *PERSONAL DATA*	Warga Negara Indonesia Usia: 57 tahun Kelahiran: Tasikmalaya, 21 November 1963 *Indonesian Citizen* *Age : 57 years old* *Birth : Tasikmalaya, November 21, 1963*
DOMISILI *DOMICILE*	Cimahi, Jawa Barat, Indonesia *Cimahi, West Java, Indonesia*
PENDIDIKAN *EDUCATION*	D3 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1985), S1 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma (1993), Pendidikan Profesi dari Ujian Negara Akuntasi (1997) *Diploma III in Accounting from State College of Accountancy (STAN) (1985), Bachelor's degree in Accounting from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma (1993), Professional Education from Ujian Negara Akuntasi (1997)*
SERTIFIKASI PROFESI *PROFESSIONAL CERTIFICATION*	ISO 31000 Series 1: ERM Fundamental, Certification EKAM of ERMAP - ERMCP

PENGALAMAN KERJA *WORK EXPERIENCE*	Memiliki pengalaman bekerja sebagai Auditor Penyelia di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1985-2003, Konsultan Keuangan, GCG dan Management Risiko tahun 2003-2006, Staf Komite Audit PT Krakatau Steel tahun 2003-2004. Dipercaya menjabat beberapa jabatan penting di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) antara lain Komite Audit tahun 2005-2006. Kepala Divisi *Internal* tahun 2006-2007, Ketua Team Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2008-2012, Sekretaris Perusahaan tahun 2008-2912, Ketua Team Pemilihan Mitra Strategis tahun 2010-2012, Kepala Divisi *Bussiness Development* tahun 2012-2013. Kemudia pernah menjabat sebagai Komite Management Resiko PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun 2016-2019, juga masih aktif sebagai Konsultan Properti, Konsultan Keuangan dan Investasi sejak tahun 2014. *His work experience includes serving as Supervisory Auditor at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1985-2003), Financial Consultant, GCG, and Risk Management (2003-2006), Audit Committee Staff at PT Krakatau Steel (2003-2004). He was trusted to hold several important positions at PT Jakarta Propertindo (Jakpro), including the Audit Committee (2005-2006), Head of Internal Division (2006-2007), Head of Procurement of Goods and Services Team (2008-2012), Corporate Secretary (2008-2012), Head of Strategic Partner Selection Team (2010-2012), Head of Business Development Division (2012-2013). Then, he served as the Risk Management Committee of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2016-2019). He has also been active as a Property Consultant and Finance and Investment Consultant since 2014.*

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah organ pendukung Perseroan yang dibentuk Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITY OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners established by the Company to assist in carrying out the supervisory function of the management of the Company.

TUGAS POKOK
MAIN DUTIES

URAIAN *DESCRIPTION*	ACUAN REGULASI *REGULATION REFERENCE*
Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. *Audit Committee works collectively and has the function to assist the Commissioners in performing their duties*	UU 19/2003 Pasal 70 (1) PP 45/2005/Pasal 71 (1) *Law 19/2003 Article 70 (1)* *PP 45/2005/ Article 71 (1)*
Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris. *Audit Committee is independent in carrying out its duties, reporting, and directly responsible to the Commissioners.*	SK 103/2002 Pasal 2 (2) *SK 103/2002 Article 2 (2)*
Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan di bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. *Audit Committee member must have good integrity and knowledge as well as sufficient work experience in supervision/audit sectors and other sectors that are deemed to be necessary so that it is able to carry out its function in an optimum manner.*	SK 103/2002 Pasal 5 *SK 103/2002 Article 5*
Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris. *Audit Committee is independent in carrying out its duties, reporting, and directly responsible to the Commissioners.*	PP 45/2005 Pasal 72 (b) *PP 45/2005 Article 72 (b)*
Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan di bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. *Audit Committee member must have good integrity and knowledge as well as sufficient work experience in supervision/audit sectors and other sectors that are deemed to be necessary so that it is able to carry out its function in an optimum manner.*	PP 45/2005 Pasal 72 (c) *PP 45/2005 Article 72 (c)*
Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI (Satuan Pengawasan Intern) maupun Auditor Eksternal. *Assessing the implementation of audit activities and result conducted by SPI (Internal Audit Unit) and External Auditor*	-
Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. *Providing recommendation on management control system improvement as well as its implementation*	-
Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). *Scope of duties, authority, and responsibilities of the Audit Committee will be described in detail in the Audit Committee Charter.*	-

Dewan Komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:

1. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan serta rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan manajemen dan Informasi lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan Perseroan.
4. Mengkaji kecukupan fungsi audit *Intern*al termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
5. Mengkaji di dalamnya perencanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Menilai penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta proses seleksi atau reseleksi Auditor Eksternal, terutama reseleksi Auditor Eksternal.
2. Melakukan penilaian pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal terutama berkaitan dengan ketaatan terhadap standar profesi.
3. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Auditor Eksternal tentang temuan audit dan tindak lanjutnya, jika dipandang perlu.
4. Melakukan penilaian atas pendapat Auditor Eksternal tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan kajian Direksi.
6. Peraturan perundang-undangan atas perjanjian/kontrak yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Untuk pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dapat melakukan penelitian ataupun penyelidikan terhadap masalah-masalah tertentu yang berpengaruh terhadap kinerja Perseroan atau dapat meminta bantuan Auditor *Intern*al atau Auditor Eksternal.
8. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala.
9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Perseroan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners may also assign other assignments to the Audit Committee, such as:

1. Reviewing on information about the Company as well as long-Term Plan of the Company (RJPP), Work Plan and Budget of the Company (RKAP), management report and other Information.
2. Reviewing on compliance of the Company to the laws and regulations in relation to the activities of the Company.
3. Reviewing on complaints related to the Company
4. Reviewing the adequacy of internal audit function including the number of auditor, annual work plan and assignment that have been implemented.
5. Reviewing the external audit planning including audit planning and the number of auditors.

AUTHORITY OF AUDIT COMMITTEE

1. Assessing the preparation of Terms of reference (Tor) and the selection or reselection process of External Auditor, particularly the External Auditor reselection.
2. Conducting audit assessment by the External Auditor, especially with regard to adherence to professional standards.
3. Conducting discussion of audit result with External Auditor on results of the audit findings and its follow-up, if deemed necessary.
4. Conducting assessment on the External Auditor opinion about quality and accounting principles implemented in financial reporting.
5. Providing input to the Board of Commissioners as study materials of the Board of Directors.
6. Assessing compliance with the laws and regulations on agreements/contracts requiring approval of the Board of Commissioners.
7. In executing its duties, the Audit Committee may conduct study or investigation on specific issues that affect the Company's performance or may request the assistance of the Internal Auditor or External Auditor.
8. Providing input to the Board of Commissioners regarding the formulation and improvement of the Audit Committee Charter on a regular basis.
9. Carrying out other duties related to the supervision of the Company assigned by the Board of Commissioners.

10. Komite Audit memiliki kewenangan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap personel, keuangan, dokumen, aset perusahaan, informasi terkait lainnya dan seluruh operasional sesuai dengan tugas yang diberikan Dewan Komsiaris.

10. Audit Committee has full access and unlimited authority on personnel, finance, document, assets of the company, other relevant information and all operations in accordance with the duties assigned by the Board of Commissioners.

HUBUNGAN KERJA

Komite Audit dalam melakukan tugasnya dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Auditor *Intern*al maupun dengan Direksi, staf, dan unit-unit kerja di bawahnya dan/atau meminta laporan khusus baik dari Auditor *Intern*al maupun pejabat yang berwenang.

WORK RELATIONS

In performing its duties, the Audit Committee communicates directly with the Internal Auditor and the Board of Directors, staff, and work units under them and/or request special report from Internal Auditor and authorized officials.

TRANSPARANSI INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Mengacu pada fungsi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki syarat independensi dan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam bentuk keuangan maupun kekeluargaan, maka ketentuan tersebut juga berlaku pada komposisi yang ada dalam Komite Audit sebagai salah satu organ pendukung di bawah Dewan Komsaris. Sebagai bentuk pengungkapan, Independesi Komite Audit dijelaskan pada tabel di bawah ini:

TRANSPARENCY OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS' INDEPENDENCY

Referring to the Board of Commissioners' function as an organ of supervision consisting of parties that hold the independency and have no affiliation of finance or family, these provisions also apply to the composition of Audit Committee as one of the supporting organs under the Board of Commissioners. As a form of disclosure, the Audit Committee independency is described in the table below:

ASPEK INDEPENDENSI *INDEPENDENCY ASPECT*	ANDAR PERDANA WIDIASTONO (KETUA/KOMISARIS) *(HEAD/COMMISSIONER)*	MAMAT SUPANGKAT
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi *Having financial affiliation with the Board of Commissioners and Board of Directors*	X	X
Memiliki hubungan kepengurusan di Nindya Karya, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi *Having management affiliation in Nindya Karya, subsidiaries and affiliated companies*	X	X
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Nindya Karya *Having a share ownership affiliation in Nindya Karya*	X	X
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Audit *Having family affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow members of Audit Committee*	X	X
Menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, Pemerintah Daerah *Serving as administrator of political parties, officials, Regional Government*	X	X

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Risalah rapat Komite Audit disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit melakukan 12 kali rapat Internal dan menghadiri 12 kali rapat bersama Dewan Komisaris, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Audit Committee holds a meeting at least equal to the provisions of the Board of Commissioners meeting stipulated in the Articles of Association. Minutes of Audit Committee meetings are submitted in writing to the Board of Commissioners.

In 2020, the Audit Committee conducted 12 internal meeting and attended 12 joint meetings with the Board of Commissioners. The minutes of meeting and recapitulation of attendance of the Audit Committee are described below:

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah rapat komite audit tercatat sebanyak 12 kali dengan uraian sebagai berikut:

MINUTES AND ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS

As of December, 31th 2020 the number of audit commitee meetings as many as 12 times with the following table:

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE AUDIT PADA RAPAT

RECAPITULATION OF ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS IN MEETINGS

KOMITE AUDIT *AUDIT COMMITTEE*	JUMLAH WAJIB RAPAT *TOTAL MEETINGS*	JUMLAH KEHADIRAN *TOTAL ATTENDANCE*	JUMLAH TIDAK HADIR *TOTAL ABSENCE*	% KEHADIRAN *% ATTENDANCE*
Andar Perdana Widiastono	12	12	-	100%
Mamat Supangkat	12	12	-	100%
RATA-RATA *AVERAGE*	**12**	**12**	**-**	**100%**

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Agar Komite Audit terus memperbaharui pengetahuannya akan industri konstruksi dan bisnis Nindya Karya, Perseroan memberikan program peningkatan kompetensi berupa seminar, workshop, atau kegiatan lainnya. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan Tahunan ini.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company provides competency development programs for the Audit Committee in updating its knowledge of Nindya Karya's construction and business industries, in form of seminars, workshops, or other activities. The competency development program followed by the Audit Committee throughout 2019, is presented in the Company Profile chapter in this Annual report.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Dasar persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit ditetapkan oleh RUPS, berdasarkan Keputusan No. SK-40/Kom/06/2020, tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Nindya Karya (Persero).

Komponen remunerasi Komite Audit per bulan terdiri dari honorarium sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-40/Kom/06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Nindya Karya (Persero). Berdasarkan keputusan tersebut, honorarium Anggota Komite Audit sebesar 20% dari gaji Direktur Utama.

REMUNERATION POLICY

The basis of Audit Committee's remuneration provision is determined by the GMS, based on the Decision No. SK-40/Kom/06/2020 on Appointment of Audit Committee Members of PT Nindya Karya (Persero).

The Audit Committee's monthly remuneration component consists of honorarium as stipulated in the Decision of Board of Commissioners No. SK-40/Kom/06/2020 on Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Nindya Karya (Persero). Based on the decision, the honorarium of Audit Committee member is 20% of President Director's salary.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT TAHUN 2020

Program kerja Komite Audit tahun 2020 disusun terdiri dari 5 (lima) kegiatan utama, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

BRIEF REPORT ON IMPLEMENTATION OF DUTIES OF AUDIT COMMITTEE IN 2020

The Audit Committee's work program in 2020 Audit Committee was prepared from 5 (five) main activities, as seen below:

- Peningkatan efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas internal auditor.
  Increasing effectiveness and quality of internal auditor's duty implementation.
- Pemantauan pelaksanaan GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012.
  Monitoring GCG implementation accordance with the SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2012
- Pemantauan penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dalam kegiatan.
  Monitoring the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) in activities.
- Monitoring pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi eksternal dan internal auditor.
  Monitoring the implementation of follow up accordingto recomendations from external auditor and internal auditor.
- Pelaksanaan penugasan khusus lainnya dari Dewan Komisaris.
  Other special assignments from the Board of Commisioners

Dari ke-5 kegiatan utama tersebut, Komite Audit melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas *Internal* Auditor:
   - Evaluasi instrumen pengendalian SPI
   - Evaluasi standar dan pedoman audit
   - Evaluasi implementasi pedoman audit
   - Penilaian efektivitas audit oleh spi
   - Pembahasan metode dan teknik audit
2. Pemantauan pelaksanaan GCG sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara *juncto* Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara :
   - Penilaian pedoman GCG
   - Evaluasi hasil *assessment*
   - Pemantauan rekomendasi hasil *assessment*
   - Pelaporan hasil pemantauan
3. Pemantauan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam kegiatan:
   - Penilaian pedoman ERM
   - Pemantauan pelaksanaan ERM
   - Kajian persetujuan Dewan Komisaris
   - Pelaporan hasil pemantauan ERM
4. *Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut sesuai rekomendasi eksternal dan *Internal* auditor:
   - Inventarisasi temuan hasil audit
   - Evaluasi tindak lanjut
   - Pembahasan tindak lanjut
   - Pelaporan tindak lanjut Saide
5. Pelaksanaan penugasan khusus lainnya dari Dewan Komisaris:

Of the five main activities, the Audit Committee has carried out the following:

1. Increasing the effectiveness and quality of the implementation of the Internal Auditor's duties:
   - Evaluation of Internal Audit's control instruments;
   - Evaluation of audit standards and guidelines;
   - Evaluation of implementation of audit guidelines;
   - Assessment of audit effectiveness by Internal Audit;
   - Discussion of audit methods and techniques.
2. Monitoring the implementation of GCG in accordance with the Regulation of State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises No. Per-09/MBU/2012 concerning Amendment to Regulation of State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
   - Code of GCG assessment;
   - Evaluation of assessment results;
   - Monitoring the recommendations of the assessment results;
   - Monitoring results reporting.
3. Monitoring the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) in the following activities:
   - ERM guideline assessment;
   - Monitoring the implementation of ERM;
   - Review of the approval of the Board of Commissioners;
   - ERM monitoring results reporting.
4. Monitoring the follow-up implementation according to the recommendations of the external and internal auditors:
   - Inventory of audit findings;
   - Follow-up evaluation;
   - Follow-up discussion;
   - Saide follow-up reporting.
5. Implementation of other special assignments from the Board of Commissioners:

- RUPS laporan Keuangan (*Audited*) tahun buku 2019
- Rapat Gabungan
- Rapat *Internal* Komite Audit
- Rapat dengan Dewan Komisaris
- Rapat pembahasan hal khusus
- Kunjungan ke lapangan

- GMS for Financial Statements (Audited) for the 2019 fiscal year;
- Joint meeting;
- Internal Audit Committee meeting;
- Meeting with the Board of Commissioners;
- Meeting to discuss special matters;
- Field visit.

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Komite Audit yang dimiliki Perseroan, kinerja Komite Audit dan masing-masing Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris di akhir tahun. Penilaian kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit dilakukan secara *self assessment* dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. metode penilaian dimaksud dilakukan berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam program kinerja, yang mencakup 5 (lima) aspek penilaian, yaitu peningkatan tugas Auditor *Internal*; pemantauan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; pemantauan penerapan *Enterprises Risk Management* (ERM); *monitoring* Tindak lanjut Temuan; serta tugas lain dari Dewan Komisaris.

AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE EVALUATION AND ASSESSMENT

As stipulated in the Company's Audit Committee Charter, the performance of the Audit Committee and each Audit Committee will be evaluated by the Board of Commissioners at the end of the year. Performance appraisal of the Audit Committee and each member of the Audit Committee is carried out by self-assessment using the assessment method determined by the Board of Commissioners. the assessment method is carried out based on the performance targets set in the performance program, which includes 5 (five) aspects of the assessment, namely increasing the duties of the Internal Auditor; monitoring the implementation of Good Corporate Governance; monitoring the implementation of Enterprises Risk Management (ERM); Monitoring Follow-up Findings; as well as other duties of the Board of Commissioners.

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I. nomor: S-254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 Hal: *Talent* & Succession Managemen Direksi BUMN diminta kepada Direksi BUMN agar segera membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).

Komisaris PT Nindya Karya (Persero) menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nindya Karya (Persero).

Selanjutnya Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) nomor : KEP-24/KOM/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nindya Karya (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

1. Sugiyartanto sebagai Ketua
2. Rika Kiswardani sebagai Sekretaris
3. Zahirwan Marza sebagai Anggota

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

Through a letter from the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020 concerning Talent and Succession Management of Board of Director of SOE, it is requested that the Board of Directors of the Company to immediately establish a Nomination and Remuneration Committee.

The Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) stipulates the Decision of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 concerning the Nomination and Remuneration Committee

Furthermore, the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) establishes the Nomination and Remuneration Committee based on the Decision of Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) No. KEP-24/KOM/04/2020 dated April 20, 2020 regarding the Nomination and Remuneration Committee of PT Nindya Karya (Persero), with the following composition:

1. Sugiyartanto as Head of Committee
2. Rika Kiswardani as Secretary
3. Zahirwan Marza as Member

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI:

1. Menerima *Talent Classification Meeting* yang diusulkan oleh *Talent Committee* Direksi;
2. Melakukan *Talent Classification* Metting atas hasil *Talent* Calssification *Meeting* melalui surat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Komisaris;
3. Mengusulkan kepada Menteri BUMN Up. Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi atas hasil *Talent Classification Meeting* melalui surat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditandtangani oleh sekurang-kuranganya Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ;
6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
7. Menyediakan *talent pool* berupa data dan profil calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN REMUNERASI:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

1. Accept the Talent Classification Meeting proposed by the Talent Committee of the Board of Directors;
2. Conduct Talent Classification Meeting on the results of the Talent Classification Meeting through a letter from the Board of Commissioners/Supervisory Board signed by at least the Commissioners;
3. Propose to the Minister of SOEs, attn.: Deputy for Human Resources, Technology and Information on the results of the Talent Classification Meeting through a letter from the Board of Commissioners/Supervisory Board signed by at least the Commissioners;
4. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;
5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
6. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
7. Provide a talent pool in the form of data and profiles of prospective members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

RELATED TO REMUNERATION POLICY

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration structure, policies on remuneration, and the amount of remuneration.
2. Assist the Board of Commissioners in conducting performance evaluation in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI: PROSEDUR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN ULANG DIREKSI

Pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dan pemilihan ulang Direksi Perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi terdiri dari:

PERSYARATAN

1. Persyaratan formal Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Persyaratan materiil

   Persyaratan materiil Direksi yaitu:
   a. Keahlian;
   b. Integritas;
   c. Kepemimpinan;
   d. Pengalaman;
   e. Jujur;
   f. Perilaku yang baik; dan
   g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

SUMBER BAKAL CALON

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, *Talent*a BUMN, *Talent*a Kementerian BUMN dan sumber lain.

SUCCESSION POLICY OF BOARD OF DIRECTORS: APPOINTMENT, DISMISSAL, AND REAPPOINTMENT PROCEDURES

The implementation of appointment, dismissal and reappointment of Board of Directors of the Company is regulated in the regulation of Minister of SOEs No. PER-03/MBU/02/2015 on the requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of the SOE Board of Directors' members. In the regulation it is stated that the mechanism for the appointment and dismissal of the Board of Directors consists of:

REQUIREMENTS

1. Formal Requirements: The Company's Director is an individual who is capable of performing legal acts, except within 5 (five) years prior to the appointment such individual has:
   a. Been declared bankrupt;
   b. Become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board who is found guilty of causing an SOE and/or the Company to be declared bankrupt;
   c. Been sentenced for committing a crime which is detrimental to the state's finances, SOE, the Company, and/or related to the financial sector.
2. Material Requirements:

   Board of Directors' material requirements are:
   a. Expertise;
   b. Integrity;
   c. leadership
   d. Experience;
   e. honesty;
   f. Good behavior; and
   g. High dedication to develop the company.

CANDIDATE SOURCES

The submission of candidates' names is based on the candidates' sources, which consist of former members of the SOE Board of Directors, Board of Commissioners, SOE Talents, Ministry of SOE Talents and from other sources.

PENJARINGAN

Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan formal dan Persyaratan lain dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK). UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

USULAN PENGANGKATAN

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan. Untuk penetapan, karena status Perseroan sebagai BUMN yang kepemilikan seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan melalui Keputusan Menteri.

PEMBERHENTIAN

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yaitu:

1. Alasan pemberhentian Direksi meliputi ketidak mampuan Direksi dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan serta mengundurkan diri.

2. Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Direksi yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Direksi yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita acara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Direksi yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan kedalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan.

SELECTION

The candidate selection is performed by the SOE minister, Secretary, Technical Deputy and/or Deputy that seeks candidates from various sources. All candidates shall be administered by the Deputy.

FIT AND PROPER TEST

The prospective candidates who will be appointed to be a member of the Board of Directors is a person who has been declared as qualifying the formal requirements and other requirements and pass the Fit-and-Proper Test. The Fit-and-Proper Test on prospective candidates shall be conducted by a professional institution appointed by the minister.

APPOINTMENT PROPOSAL

Candidates who receive "recommended" mark from the assessor may be appointed as members of the Board of Directors. Due to the Company's status as an SOE of which share is owned by the state, the stipulation of the members shall be conducted by the Minister's Decree.

DISMISSAL

The rules on the dismissal mechanism, as stated in Decision letter of SOE No. PER-03/MBU/02/2015 on the requirements and Procedures to Appoint and Dismiss the members of SOE Board of Directors are:

1. Reasons for Dismissal; the reasons for dismissing the Board of Directors include: the Board of Directors' inability to fulfill its duty, violation of the Articles of Association and regulations, involvement in actions that may harm the Company and the state, involvement in actions that violate the ethics, guilty verdict issued by the court and resignation.

2. Methods of Dismissal; the methods of dismissal are performed through evaluation by the Deputy to the Board of Directors, followed by advices submission to be stipulated by the Minister of SOE. Prior to stipulation and evaluation, the Company shall first provide information to the Board of Directors for the Board of Commissioners to provide self-defense. The self-defense shall be submitted in both written and oral forms (for oral form, a note for submission method must be included) within 14 days at maximum, effective after the related Board of Commissioners receives information of dismissal to the Deputy. After the self-defense statement has been submitted, the minutes of defense must be submitted in the GMS to be decided upon.

Proses pemberhentian Direksi dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Direksi pengganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

PEMILIHAN ULANG

Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN, dapat dilakukan tanpa UKK, apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya yang antara lain didasarkan pada pencapaian target kinerja Perusahaan, kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak (*track record*). Penyajian hasil penilaian dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perusahaan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang dan pemberhentian Direksi. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku wakil pemerintah di dalam Perseroan, maka fungsi Nominasi dan Remunerasi yang Perusahaan ditiadakan.

Dari 4 (empat) Direksi Perusahaan, 3 (tiga) di antaranya merupakan pejabat yang pernah berkarier di Perusahaan dan berasal dari Internal Perusahaan. hal ini menunjukkan skema suksesi Direksi Perusahaan yang memberikan kesempatan terbuka bagi karyawan *Intern*al Perusahaan sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya."

INFORMASI TENTANG ORGAN/KOMITE LAINNYA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Selain Komite Audit seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan tidak memiliki organ dan/atau komite lainnya yang mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam operasional Perseroan dan menjadi penghubung utama (*liaison officer*) antara Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perseroan. Untuk itu, Sekretaris

The dismissal of the Board of Directors is conducted simultaneously with the appointment of the new Board of Directors. The dismissal is effective since its stipulation in the minister's Decree or the GMS.

REAPPOINTMENT

The reappointment procedure of the Board of Directors for the same position in an SOE may be performed without the implementation of UKK, especially if the Board of Directors has been assessed to be capable of performing accordingly throughout the tenure period. This assessment is based on the performance target achievement, teamwork, integrity and track record. The assessment results may be presented as qualitative narrative.

With its status as an SOE with share ownership by the Government, the Company shall comply with the established procedures as stated in the regulation of SOE Minister No. PER-02/MBU/02/2015 in respect of the appointment, reappointment and dismissal of the Board of Directors. As such matters are provisions issued by the SOE ministry as government representatives within the Company, the Company's Nomination and remuneration functions are eliminated.

"Of the 4 (four) Directors of the Company, 3 (three) of them are officials with a career in the Company and from the Company's internal. This shows the succession scheme of the Company's Directors which provides open opportunities for the Company's internal employees in accordance with their competence and capacity."

INFORMATION ON OTHER ORGANS/ COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Aside from the Audit Committee, which as been described above, the Company has no other organ/committee that supports the supervisory duty of Board of Commissioners.

SUPPORTING ORGANS OF BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is an important part of the Company's operations and serves as the main liaison officer between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, while acting as the Company's representatives in dealing with regulators, other institutions, or associations related to the Company. For this reason, the

Perusahaan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan fungsinya.

Corporate Secretary must have experience and knowledge that supports the implementation of their functions.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

PARTY APPOINTING AND DISMISSING CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary reports directly to the President Director.

PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN DASAR PENGANGKATAN

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0002/DIRUT/KPTS/KDS/01/2017 tanggal 03 Januari 2021 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi PT Nindya Karya (Persero).

CORPORATE SECRETARY AND BASIS OF APPOINTMENT

Based on the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0002/DIRUT/KPTS/KDS/01/2017 dated January 3, 2021 regarding the Dismissal and Appointment of Officials for Changes in the Organizational Structure of PT Nindya Karya (Persero).

ARISTA FEBRI ERIYAWAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN
MENJABAT SEJAK 3 JANUARI 2017
CORPORATE SECRETARY
SERVING SINCE JANUARY 3, 2017

DATA DIRI *PERSONAL DATA*	Warga Negara Indonesia Usia 36 tahun Kelahiran Semarang, 3 Februari 1984 *Indonesian Citizen* *36 years old* *Born in Semarang on February 3, 1984*
DOMISILI *DOMICILE*	Bekasi, Jawa Barat, Indonesi *Bekasi, West Java*
PENDIDIKAN *EDUCATION*	Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang (2005) *Bachelor's degree in Accounting from Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang (2005)*
BERGABUNG DI NINDYA KARYA *JOINED NINDYA KARYA ON*	1 April 2006 *April 1, 2006*
PENGALAMAN KERJA *WORK EXPERIENCE*	Memulai karier di Perseroan dan pernah menduduki beberapa jabatan strategis yaitu sebagai Staf Keuangan (2006- 2008); Staf Akuntansi (2008); Staf Keuangan (2012); Koordinator Akuntansi, Divisi III (2013); Pj manager Keuangan & SDM, Divisi I (2014); PJ manager Keuangan dan SDM, Wilayah vII (2016); Pj Sekretaris Perusahaan (2017). *Started his career in the Company and has served in several stra- tegic position, namely Finance Staff (2006-2008); Accounting Staff (2008); Finance Staff (2012); Accounting Coordinator of Division III (2013); Acting Financial & Human Capital Manager of Division I (2014); Acting Financial and Human Capital Manager of Region VII (2016); Acting Corporate Secretary (2017)*

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada satu tingkat di bawah Direksi yang membawahi Bagian Hukum, Bagian Humas & Kesekretariatan dan Bagian Umum, serta bagian PKBl. Dengan adanya Sekretaris Perusahaan, diharapkan dapat membantu Direksi dalam menjalankan pengelolaan informasi Perusahaan dan memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

POSITION AND ORGANIZATION OF CORPORATE SECRETARY

Structurally, the Corporate Secretary is one level below the Board of Directors in charge of the Legal Division, the Public Relations and Secretariat Division, and the General Affairs Division, as well as the PKBl Division. With the presence of a Corporate Secretary, it is hoped that it can assist the Board of Directors in managing the Company's information and ensuring that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang PerubahanStruktur Organisasi Perusahaan PT Nindya Karya (Persero), sebagai berikut:

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined based on the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2017 dated January 3, 2017 concerning Changes in the Organizational Structure of PT Nindya Karya (Persero), as follows:

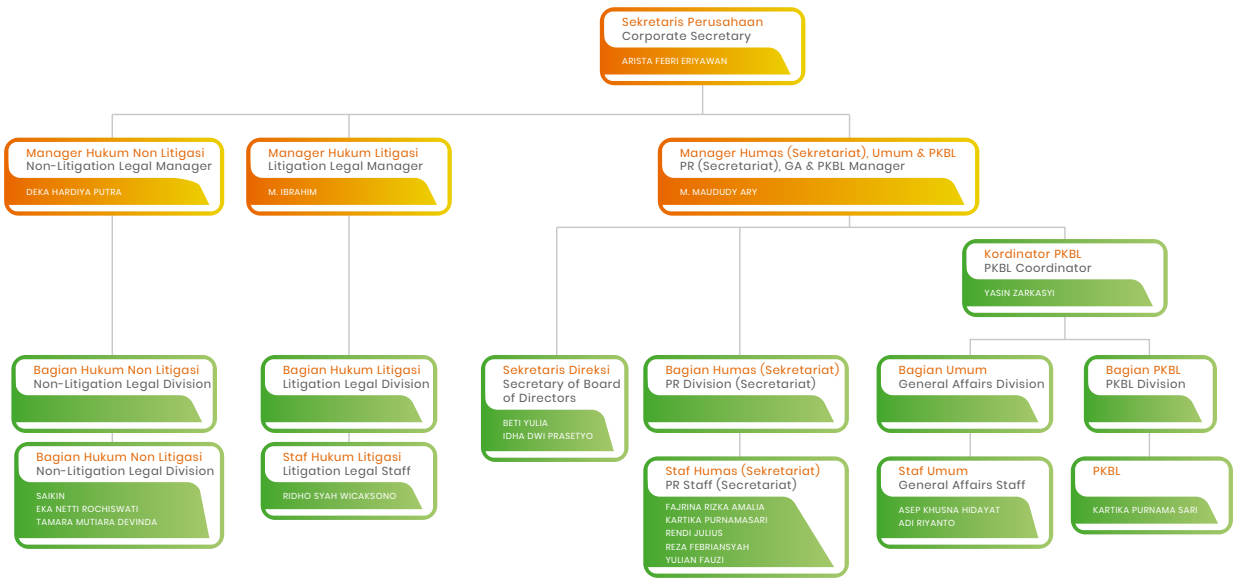

hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 18 orang.

As of the end of 2020, total employees within the Corporate Secretary unit of the Company reached 18 employees.

FUNGSI/JABATAN *FUNCTION/POSITION*	**NAMA** *NAME*
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*	Arista Febri Eriyawan
Manager Sekretariat, Umum, Humas & PKBL *Secretariat, GA, PR & PKBL Manager*	M. Maududy Ary
Manager Legal Litigasi *Litigation Legal Manager*	M. Ibrahim
Manager Legal Non Litigasi *Non-Litigation Legal*	Deka Hardiya Putra
Koordinator PKBL dan Umum *GA and PKBL Coordinator*	Yasin Zarkasyi
Sekretaris Direksi *Secretary of Board of Directors*	Beti Yulia Harwintari Idha Dwi Prasetyo
Staf PKBL *PKBL Staff*	Kartika Purnamasari
Staf Humas dan Sekretariat *Secretariat & PR Staff*	Fajrina Rizka Awalia Rendi Julias Reza Febriansyah Yulian Fauzi
Staf Umum *GA Staff*	Asep Khusna Hidayat Adi Rianto
Staf Lega Litigasi *Legal Litigation Staff*	Ridho Syach Wicaksono
Staf Legal Non Litigasi *Legal Non Litigation Staff*	Eka Netti Rochiswarti Saikin Tamara Mutiara Devinda
JUMLAH *TOTAL*	**18 ORANG** *18 EMPLOYEES*

PEDOMAN KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai salah satu organ pendukung Perseroan, Sekretaris Perusahaan dibekali dengan pedoman kerja yang tercantum dalam CoCG yang substansinya mengacu pada perangkat regulasi serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0815/DIRUT/KPTS/KDS/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Uraian Jabatan Di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero).

1. Tugas Umum Sekretaris Perusahaan
   a. Penatausahaan serta penyimpanan dokumen perusahaan;
   b. Penyusunan risalah rapat Direksi;
   c. Melakukan persiapan terhadap rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
   d. Mensosialisasikan penerapan prinsip-prinsip GCG
   e. Pemberian informasi berkaitan dengan tugas Sekretaris Perusahaan kepada Direksi;
   f. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
   g. Melaksanakan kegiatan tata persuratan dan kearsipan;
   h. Melakukan usaha-usaha memperlancar kegiatan administrasi;
   i. Melaksanakan sistem pengawasan keamanan dan kerahasiaan data perusahaan;
   j. Melakukan persiapan dan pelaksanaan rapat Direksi;
   k. Melakukan pelaksanaan penyusunan jadwal kegiatan serta kebutuhan yang diperlukan Direksi;
   l. Pelaksanaan kegiatan protokoler Direksi;
   m. Menyusun pengajuan izin investasi yang memerlukan izin dari Dewan Komisaris/ Pemegang Saham.

CORPORATE SECRETARY WORK GUIDELINES

As one of the Company's supporting organs, the Corporate Secretary is prepared with work guidelines stipulated in CoCG which in its substance refers to prevailing regulation and laws for limited liability Company as well as State-owned Enterprises (SOE).

FUNCTIONS, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Based on the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0815/DIRUT/KPTS/KDS/08/2019 dated August 30, 2019 regarding the Determination of Position within PT Nindya Karya (Persero), the functions and duties of Corporate Secretary are as follows:

1. General Duties of Corporate Secretary
   a. Administration and storage of the company's documents;
   b. Recording of minutes of the Board of Directors meeting;
   c. Preparation of the Board of Commissioners meeting and GMS;
   d. Dissemination of GCG principles implementation;
   e. Provision of information related to Corporate Secretary duties to the Board of Directors;
   f. Provision of information service to the public relating to the condition of the Company;
   g. Implementation of correspondences and archiving activities;
   h. Implementation of efforts to facilitate administration activities;
   i. Implementation of security and company's data confidentiality supervision system;
   j. Preparation and implementation of the Board of Directors meeting;
   k. Preparation of activity schedule as well as necessities required by the Board of Directors;
   l. Implementation of Board of Directors protocol activities;
   m. Prepare an investment permit application that requires permission from the Board of Commissioners/Shareholders.

2. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas terselenggaranya tindak lanjut dari:
   a. Setiap keputusan yang telah diambil oleh pihak manajemen,
   b. Pengelolaan informasi Perusahaan yang diperlukan oleh *Stakeholders*;
   c. Pencatatan setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta PIC (*Person in Charge*) nya;
   d. Pemantauan dan pengecekan atas tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan manajemen;
   e. Pendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan manajemen kepada PIC terkait.
3. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas tersedianya informasi untuk kebutuhan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, dengan:
   a. Pengarah kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyajian informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan program perusahaan;
   b. Penyusunan sistem informasi;
   c. Pengumpul dan pengompilasi informasi dari semua Departemen, Satuan Cabang dan Unit Usaha;
   d. Pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyajian informasi mengenai perusahaan dan pelaksanaan program perusahaan secara rutin;
   e. Penyediaan informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan; dan
   f. Pengarah penyelenggaraan, penyimpanan dan pengamanan informasi.
4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan di bidang hukum dalam rangka pengamanan harta dan kegiatan Perseroan, dengan:
   a. Mengarahkan kegiatan pelayanan hukum dalam pembuatan kontrak, Surat Keputusan, perasuransian dan peraturan-peraturan perusahaan;
   b. Penyelesaian masalah hukum di luar dan di dalam pengadilan;
   c. Penelaahan dan pendokumentasian produk-produk hukum dari dalam maupun dari luar Perusahaan;

2. Corporate Secretary is responsible for implementation of the follow-up on:
   a. Every decision taken by the management,
   b. Information management of the Company required by Stakeholders;
   c. Recording of any decision generated in decision making forums as well as the PIC (Person in Charge);
   d. Monitoring and checking on stages of progress of management decision result implementation;
   e. Encouraging follow-up implementation on the management decision to related PIC.
3. Corporate Secretary is responsible to the availability of information for the needs of the management for decision making, by:
   a. Directing the activities of preparing work plan and budget in the sector of information collection, processing, evaluation and presentation on planning and implementation of the company's program;
   b. Preparing information system;
   c. Collecting and compiling information from all Departments, Branch Units, and Business Units;
   d. Collecting, processing, evaluating and presenting information on planning and program implementation of the company regularly;
   e. Providing information to the management for decision making;
   f. Directing information organization, storage and security.
4. Corporate Secretary is responsible for the implementation of services in the legal sector for security of assets and activities of the Company, by:
   a. Directing legal service activities in drafting of contracts, Decrees, insurances and regulations of the Company;
   b. Settlement of legal issues outside and inside of the court;
   c. Reviewing and documenting legal products from the internal or external of the Company;

d. Pengadministrasian dokumen kontrak, baik di Kantor Pusat, Wilayah, Divisi, Cabang-Cabang maupun di Proyek-Proyek.

e. Pengkoordinasian seluruh arsip perusahaan di bidang hukum dan peraturan baik *ekstern* maupun *Intern*, untuk pelayanan perusahaan serta untuk menaati perundang-undangan yang berlaku;

f. Pengurusan hak dan pengamannya mengenai inventaris, dokumen dan *asset* tetap Perusahaan.

5. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan kehumasan dalam rangka peningkatakan Citra Perusahaan, dengan:

a. Perencanaan kegiatan kehumasan dalam rangka mencapai Citra Perusahaan yang diinginkan;

b. Pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan Citra Perusahaan baik melalui berbagai piranti promosi, media massa maupun kegiatan lain (olah raga, rekreasi, kesenian dan sebagainya);

c. Perwakilan perusahaan untuk memberikan keterangan kepada masyarakat;

d. Menyiapkan bahan-bahan di bidang kehumasan yang diperlukan oleh Direksi;

6. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan umum/ kerumahtanggaan, penyediaan/pengadaan keperluan kantor, termasuk investasi dan distribusinya.

a. Perawatan harta dan fasilitas milik Perseroan;

b. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas;

c. Pengiriman surat-surat dan barang dinas Perseroan;

d. Terselenggaranya perjalanan dinas personel kantor;

e. Pengarahan pengumpulan untuk keperluan instansi pemerintah/Departemen atau masyarakat luas;

f. Pengkoordinasian semua pengelolaan dan pengembangan kepustakaan.

d. Administrating Contract documents, both in head office, region, Divisions, Branch offices, and Projects;

e. Coordinating all archives of the company in legal sector as well as external and internal regulations, for the service of the company as well as to comply with prevailing laws and regulations;

f. Managing rights and their security on inventory, document and fixed assets of the Company.

5. Corporate Secretary is responsible for the implementation of Public relation activities in order to improve Corporate Image, by:

a. Planning public relations activities in order to achieve the desired Corporate Image;

b. Coordinating activities related to Corporate Image improvement through various promotional tools, mass media and other activities (sport, recreation, arts and so on);

c. Representing the company in providing information to the public;

d. Preparing materials in public relation sector required by the Board of Directors;

6. Corporate Secretary is responsible for the implementation of general/household activities, office supplies procurement/ provision, including investment and its distribution.

a. Maintenance of the Company's assets and facilities;

b. Implementation of official vehicles maintenance;

c. Delivery of the Company's official letters and goods;

d. Implementation of official travel of the office's personnel;

e. Directing the collection of information for the needs of government agencies/ departments or general public;

f. Coordination of all documents management and development.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perseroan memiliki kebijakan terkait program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Perusahaan, khususnya pada beberapa bidang yang dapat memberikan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Tentang program peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The company has policies related to competency development program for the Corporate Secretary, especially in several sectors that may increase the competence of Corporate Secretary in implementing its duties and functions. Corporate Secretary's Competency Development Programs throughout 2020, are presented in the Company Profile chapter in this Annual report.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Humas dan Sekretariat

   Bagian humas & Sekretariat merupakan bagian dari tugas Sekretariat Perusahaan yang bertugas untuk mendukung kegiatan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dengan dalam hal humas, kesekretariatan, umum dan PKBL.

   Humas adalah usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara perusahaan dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan Perusahaan dapat dipengaruhi oleh kegiatan Humas atau *Public relations* (PR). Kegiatan rutin humas adalah sebagai berikut:

   a. Mengikuti Pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dan PUPR.

   b. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh forum humas BUMN antara lain: Porseni BUMN, Kegiatan HUT BUMN bersama, seminar.

   c. Mengikuti sponsor iklan maupun golf.

   d. Mengikuti *Annual Report Award* (ARA).

   e. Mengadakan acara dalam Ulang Tahun Perusahaan

Program yang telah dilaksanakan oleh humas adalah:

   a. Bekerja sama dengan konsultan membuat mars Nindya Karya

   b. Menerbitkan buku Panduan Pedoman logo dan Atribut Perusahaan

   c. Membuat *Video Profile* dan *Company Profile*

   d. Membuat *Annual Report* dan *Sustainable Report* Tahun 2019

Program yang sedang dilaksanakan oleh humas adalah:

BRIEF REPORT ON IMPLEMENTATION OF DUTIES OF CORPORATE SECRETARY IN 2020

The implementation of Corporate Secretary's duties and responsibilities throughout 2019 are as follows:

1. Public relations and Secretariat

   Public relations and Secretariat section is part of the Corporate Secretary's duties to support the Company's activities in carrying out its operations in terms of public relations, secretarial, general affairs, and PKBL.

   Public relations (PR) is an effort to build and maintain good and beneficial reputation, image and communication between the Company and the community. Company's success or failure can be influenced by PR activities. The regular activities of the Company's PR are as follows:

   a. Joining exhibition organized by the SOE ministry and PUPR;

   b. Joining activities held by the SOE Public relations forum, among others: SOE Porseni, SOEs Joint Activities, seminars;

   c. Taking part in advertising and golf sponsors;

   d. Joining Annual report Award (ARA);

   e. Holding an event on the Company's Anniversary.

Programs implemented by PR are:

   a. Cooperating with consultants to create march of Nindya Karya

   b. Publishing Guidelines for Company logo and Attributes

   c. Creating video Profile and Company Profile

   d. Preparing 2019 Annual Report and Sustainable Report

Programs being carried out by PR are:

a. Membangun *brand image* Perusahaan dengan mengaktifkan media sosial (facebook, Instagram, Twitter) dan aktif menulis berita setiap kegiatan Perusahaan baik di portal BUMN, situs web dan iNindya.

b. Membangun kerja sama dengan wartawan di berbagai media massa baik *online* maupun majalah/koran.

c. Pembaharuan situs web Perusahaan

d. Membuat majalah *Interna*l Perusahaan

Sekretariat merupakan satuan organisasi/bagian yang melakukan rangkaian kegiatan penataan administrasi terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar.

Kegiatan rutin dilaksanakan oleh Sekretariat adalah:

a. Mendokumentasi Berita Acara rapat Direksi dan menindaklanjutinya.

b. Membuat Berita Acara rapat/ Notulensi

c. Mengadakan rakernas.

d. Mengadakan *Video Conference*.

e. Mengadakan rapat rutin Direksi.

f. Mengumpulkan data dan dokumen pendukung untuk terselenggaranya rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris.

Program yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat adalah:

a. Menerbitkan buku Panduan E-Sekper

b. Mermpermudah permintaan Surat masuk dan Surat Keluar dengan Program E-Sekper

c. Menerbitkan Pedoman Tata Persuratan

d. Pedoman Protokoler

Program yang sedang dilaksanakan oleh Sekretariat adalah:

a. Pembaharuan Pedoman Tata Persuratan

b. Pembenahan Dokumen Arsip Kantor Pusat

c. Penerapan NAS (*Network Attached Storage*) Sekretariat Perusahaan

a. Building the Company's brand image by activating social media (Facebook, Instagram, Twitter) and actively writing news on each of the Company's activities both at SOE portals, websites and iNindya.

b. Building cooperation with journalists in various mass media both online and in magazines/newspapers.

c. Updating the Company's website

d. Preparing a Corporate Internal magazine

Secretariat is an organization unit/section performing a series of administrative structuring activities on office work and other assistance which are carried out as supporting activities so that organizational goals are achieved efficiently.

Regular activities carried out by the Secretariat are:

a. Documenting minutes of Board of Directors' meetings and follow up

b. Generating minutes of meetings

c. Holding a rakernas (National Work Meeting)

d. Holding a video Conference.

e. Holding a regular meeting of Board of Directors.

f. Collecting data and supporting documents for the implementation of a Joint meeting with the Board of Commissioners.

Programs implemented by the Secretariat are:

a. Publishing the E-Corporate Secretary Guidebook

b. Facilitating requests for incoming and outgoing letters with the E-Corporate Secretary Program

c. Issuing Guidelines for Correspondences Governance

d. Protocol Guidelines

Programs being implemented by the Secretariat are:

a. Renewal on Guidelines of Correspondences Governance

b. Improvement of head office Archive Documents

c. Implementation of NAS (Network Attached Storage) of the Corporate Secretariat

2. Umum

   Bagian Umum merupakan bagian dari yang bertugas untuk mendukung Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dengan mengurusi segala urusan rumah tangga Perusahaan. Kegiatan bagian Umum meliputi pengelolaan kendaraan dinas, pengadaan ATK, peralatan kantor dan lain-lain, rumah tangga, serta administrasi umum dan kas kecil.

3. Program Kemitraan dan Bina lingkungan

   Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan bentuk kepedulian Perseroan kepada lingkungan dan usaha kecil khususnya dan memberdayakan masyarakat serta lingkungan disekitarnya. Disepanjang tahun 2020, Perseroan telah menyalurkan dana Program Kemitraan kepada 9 (sembilan) Mitra Binaan yang tersebar di 4 (empat) wilayah. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 Perseroan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada 12 (dua belas) Mitra Binaan yang tersebar di 4 (empat) wilayah. Untuk penyaluran dana Program Bina Lingkungan tahun 2020 tersebar di 9 (Sembilan) wilayah dengan realisasi dana tersalurkan mencapai Rp1.999.315.360,- atau meningkat hingga 99,94% terhadap realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp999.964.900,-.

4. Hukum

   Bagian hukum merupakan bagian dari tugas Sekretariat Perusahaan yang mempunyai tugas antara lain:

   a. Menyelengarakan konsultasi hukum, pendapat hukum dan pelayanan hukum terhadap kegiatan Perseroan.

   b. Menyelenggarakan kegiatan Tata Kelola Perusahaan.

   c. Melakukan pembaruan kekinian dan kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.

   d. Membantu menyiapkan administrasi di bidang hukum.

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka menciptakan kualitas kinerja unggul, Sekretaris Perusahaan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai media dalam melakukan pengukuran efektivitas dan ketercapaian target kinerja. Selain KPI, organ Sekretaris Perusahaan juga menjadi salah satu objek dalam *assessmen* GCG Perusahaan. Dengan adanya media pengukuran tersebut, kinerja organ

2. General Affairs (GA)

   General Affairs Section is part of the duty to support the Company in carrying out its operations by taking care of all the Company's household affairs. The activities of General Affairs include management of official vehicles, procurement of stationery, office equipment and others, households, as well as general administration and petty cash

3. Partnership and Community Development Program

   The Partnership and Community Development Program is a form of the Company's concern for the environment and small businesses in particular and empowers the community and the surrounding environment. Throughout 2020, the Company has distributed Partnership Program funds to 9 (nine) fostered partners spread across 4 (four) regions. This showed an decrease compared to 2019 in which the Company distributed Partnership Program funds to 12 (twelve) fostered partners spread across 4 (four) regions. The distribution of funds for the 2020 Community Development Program is spread over 9 (nine) regions. Regions with the realization of finds distribution reached Rp1,999,315,360,-, an increase of 99,94% compared to the realization of the previous year of Rp999,964,900,-.

4. Legal

   Legal section is part of Corporate Secretariat duties including:

   a. holding legal consultations, opinions and services on the Company's activities.

   b. organizing Corporate Governance activities.

   c. Conducting current updates and review of laws and regulations relating to the Company's activities.

   d. helping the preparation of legal administration

PERFORMANCE ASSESSMENT OF CORPORATE SECRETARY

In order to create a superior performance quality, the Corporate Secretary has a Key Performance Indicator (KPI) as a medium in measuring the effectiveness and achievement of performance targets. In addition to KPI, the Corporate Secretary's organ is also one of the objects in the assessment of the Company's GCG. With the measurement media, the performance of the Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan akan senantiasa terpantau dan terevaluasi sehingga menciptakan kinerja keberlanjutan di masa depan.

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sebagai pemenuhan atas prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Perusahaan, Perusahaan memiliki organ Satuan Pengawas *Intern* (SPI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi.

Organ ini memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan dalam rangka membantu Direksi dalam melakukan tugas- tugas pengendalian prosedur, perundangan, peraturan perusahaan, manajemen dan dapat terciptanya 3E, yaitu efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelesaian setiap pekerjaan serta terciptanya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang baik, sehingga terjadi kesatuan yang kuat untuk bersaing dan bertahan. pengawasan, pencegahan, mitigasi serta penanganan atas segala bentuk praktik- praktik penyimpangan yang terjadi.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala SPI diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN DASAR PENGANGKATAN

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0097/DIRUT/KPTS/KDS/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat Di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero).

organ will always be monitored and evaluated so as to create sustainability performance in the future.

INTERNAL AUDIT UNIT

As fulfillment on accountability and responsibility principles in the management, the Company has the Internal Audit Unit (SPI) that directly answers to the Board of Directors.

This organ has a function to conduct activities in order to assist the Board of Directors in carrying out control duties of procedures, laws, company's regulations, management, and creation of 3E, namely effective, efficient, and economical in completing each work and creating good corporate culture, resulting in strong unity to compete and survive. Supervision, prevention, mitigation as well as handling any deviation on practices.

PARTY APPOINTING AND DISMISSING HEAD OF INTERNAL AUDIT

The Head of Internal Audit is appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Head of Internal Audit reports directly to the President Director.

INTERNAL AUDIT UNIT AND BASIS OF APPOINTMENT

Based on the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0097/DIRUT/KPTS/KDS/01/2019 dated January 22, 2019 regarding the Dismissal and Appointment of Officials within PT Nindya Karya (Persero).

RUSLIADI **KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN** **MENJABAT SEJAK 2019-2020** *HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT* *HAS BEEN SERVING SINCE 2019*	
DATA PRIBADI *PERSONAL DATA*	Warga Negara Indonesia Usia 39 tahun Kelahiran Bogor, 5 November 1981 *Indonesian Citizen* *39 years old* *Born in Bogor on November 5, 1970*
DOMISILI *DOMICILE*	Depok, Jawa Barat, Indonesia *Depok, West Java, Indonesia*
PENDIDIKAN *EDUCATION*	Sarjana Ekonomi Akuntansi, UPN Veteran Jakarta (2003) dan S2 Manajemen Konsentrasi Inovasi Strategik Bisnis dan Ekonomi, Universitas Prasetia Mulya Jakarta (2019). *Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting, from UPN Veteran Jakarta (2003) and Master's degree in Management, majoring in Strategic Innovation for Business and Economy, from Universitas Prasetiya Mulya Jakarta (2019)*

SERTIFIKASI PROFESI *PROFESSIONAL CERTIFICATION*	Profesi Internal Auditor (PIA) (2019), Seminar Nasional dan Pengukuhan Professional Internal Auditor (PIA) (2019), Pelatihan Kepala SPI (2019), CBM Strategic Financial Management (2016). *Professional Internal Auditor (PIA) (2019), National Seminar and Inauguration of Professional Internal Auditor (PIA) (2019), Internal Audit Head Training (2019), CBM Strategic Financial Management (2016).*
BERGABUNG DI NINDYA KARYA *JOINED NINDYA KARYA ON*	1 September 2004 *September 1, 2004*
PENGALAMAN KERJA *WORK EXPERIENCE*	Mengawali karier di PT Nindya Karya (Persero) sebagai Staf Akuntansi dan Keuangan (2004-2010), Pj Manager Keuangan dan SDM (2011), Manager Keuangan dan SDM Wil III (2012-2015), Pj. Kepala Departemen Keuangan (2016-2017), Kepala Departemen Keuangan (2018), Kepala SPI (2019- Sekarang). *Started his career at PT Nindya Karya (Persero) as Accounting and Finance Staff (2004-2010), Act. Finance and HC Manager (2011), Finance and HC Manager Region III (2012-2015), Act. Head of Finance Department (2016-2017), Head of Finance Department (2018), Head of Internal Audit (2019 up to present)*

Kepala SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0815/DIRUT/KPTS/KDS/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Uraian Jabatan Di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan penyusunan strategi audit
2. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan *audit execution* di lingkungan Perseroan (kantor, proyek gudang bangunan, bengkel, dll) termasuk melakukan *entry* dan *exit meeting*
3. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan *advisory service* terkait kecukupan pengendalian dan permasalahan lainnya untuk seluruh fungsi di Perseroan
4. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh proses pendampingan audit eksternal
5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPN) kepada KPK dan Kementerian BUMN
6. Melaporkan kinerja SMAP ke Direksi/ Dewan Pengarah

The Head of Internal Audit has duties and responsibilities as stipulated in the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0815/DIRUT/KPTS/KDS/08/2019 dated August 30, 2019 regarding the Determination of Position within PT Nindya Karya (Persero).

1. Directing, monitoring, and evaluating the audit strategy preparation activities.
2. Directing, monitoring, and evaluating all audit execution activities in the company environment (offices, building warehouse projects, workshops, etc.) including conducting entry and exit meetings.
3. Directing, monitoring, and evaluating advisory service activities related to the adequacy of controls and other issues for all functions in the company.
4. Directing, monitoring, and evaluating the entire process of external audit assistance.
5. Evaluating and coordinating activities related to the Company Officials' Wealth Report (LHKPN) to the KPK and the Ministry of SOEs.
6. Reporting the performance of SMAP to the Board of Directors/Steering Committee.

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Secara alur koordinasi, SPI berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama dan jajaran Direksi lainnya. organ ini dipimpin oleh seorang Kepala yang keberadaannya satu tingkat di bawah Direksi dan membawahi auditor-auditor. Dalam tugasnya SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertindak sebagai mitra kerja Komite Audit (Dewan Komisaris) dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. SPI juga diberi kewenangan seluas-luasnya oleh Direktur Utama untuk mengumpulkan data, fakta dan informasi, baik secara lisan, tertulis dan kondisi riil lapangan serta berkewajiban menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan

POSITION AND ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT UNIT

In terms of coordination flow, the Internal Audit directly coordinates with the President Director and other Directors. This organ is chaired by a Head whose position is one level below the Board of Directors and oversees auditors. In its duties, the Internal Audit directly answers to the President Director and acts as a working partner of the Audit Committee (the Board of Commissioners) in carrying out its audit function. The Internal Audit is also granted the extensive authorization by the President Director to collect data, facts, and information, either orally, in writing and real condition on the site and has the duty to submit report on audit result to the President Director

kepada Komite Audit (Dewan Komisaris). Posisi SPI dalam struktur organisasi digambarkan dalam bagan berikut:

and submits the copy to the Audit Committee (the Board of Commissioners). Position of Internal Audit in organization structure is described in the following chart:

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI SATUAN PENGAWAS INTERNAL
POSITION AND ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT UNIT

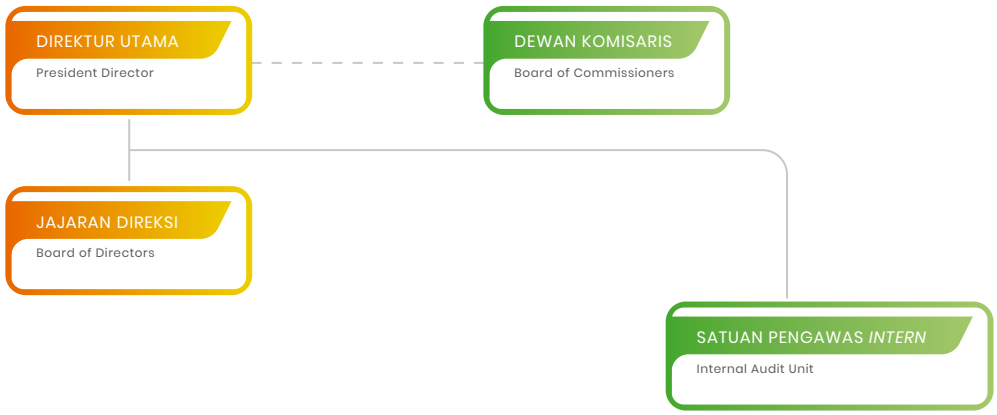

Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia kepada perusahaan dan tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, jujur, obyektif, dipercaya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan bersikap independen serta terus melakukan aktivitas pengawasan melalui kegiatan audit operasional yang dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan perusahaan termasuk proyek yang sedang dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi perbaikan untuk tercapainya tujuan Perusahaan.

The Internal Audit Unit has a high commitment to the profession, is loyal to the company and is not involved in unlawful acts, is honest, objective, trusted, is responsible for carrying out its duties and is independent and continues to carry out supervisory activities through operational audit activities carried out on work units within the company, including projects that are being implemented, by providing recommendations for improvement to achieve the Company's goals.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0097/DIRUT/KPTS/KDS/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pembebasan & Pengangkatan Pejabat-Pejabat Di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero) menetapkan Rusliadi sebagai Kepala SPI PT Nindya Karya (Persero).

Based on the Decision of Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0097/DIRUT/KPTS/KDS/01/2019 dated January 22, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Officials within PT Nindya Karya (Persero),the Company appoints Rusliadi as the Head of internal Audit of PT Nindya Karya (Persero).

Hingga akhir tahun 2020, SPI memiliki 7 (tujuh) karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Until the end of 2020, the Internal Audit has 7 (seven) auditors with details on the placement and implementation of tasks as follows:

JABATAN *POSITION*	**NAMA** *NAME*
Kepala Satuan Pengawasan *Intern*al *Head of Internal Audit Unit*	Rusliadi
Auditor	Khairul Fitri Aryadi Sapta Seno Susanto Cut Raisa Redy Mulyana Setriady
Staf *Staff*	Widyawati Utami
JUMLAH *TOTAL*	**7 ORANG** *7 AUDITORS*

SERTIFIKASI PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan SPI hingga akhir tahun 2020.

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

Professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, particularly related to regulatory compliance and industry developments. The following states the professional certifications held by Internal Audit members until the end of 2020.

SERTIFIKASI *CERTIFICATION*	JUMLAH KARYAWAN *TOTAL EMPLOYEES*
Dasar-Dasar Audit *Audit Basics*	6
Audit Operasional *Operational Audit*	4
Komunikasi dan Psikologi *Communication and Psychology Audit*	3
Audit Kecurangan *Fraud Audit*	3
Pengelolaan Tugas-Tugas Audit *Management of Audit Duties*	3
Profesional *Internal* Auditor (PIA) *Internal Audit Professional*	5
JUMLAH *TOTAL*	**24**

Jumlah karyawan SPI yang memiliki sertifikasi profesi profesi sebanyak 4 (empat) orang atau 100% jumlah keseluruhan karyawan SPI. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan SPI, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The number of Internal Auditors with professional certification is 4 (four) people or 100% of the total number of the Company's auditors. The Company is committed to increasing the level of professional certification for Internal Auditors, both for those who already have professional certification and those who do not.

PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pola Organisasi dan Pedoman Kerja bagi SPI diatur dalam *Audit Charter* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan surat keputusan No. 154/DIRUT/KPTS/SPI/02/2013 pada tanggal 28 Februari 2013 dan telah direvisi pada tanggal 16 Februari 2016. Piagam Audit SPI berisi ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin hasil pemeriksaan yang bermutu agar SPI dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik.

Audit Charter dipublikasikan ke seluruh Unit Kerja untuk terjalin kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan Perseroan.

CHARTER OF INTERNAL AUDIT UNIT

Organization pattern and Work Guidelines of the Company's Internal Audit Unit are regulated in the Charter of Internal Audit Unit established by the Board of Directors and Board of Commissioners through the Decision No. 154/DIRUT/KPTS/SPI/02/2013 on February 28, 2013 and revised on February 15, 2016. The Internal Audit Charter contains provisions to assure the quality of audit results so that SPI may carry out its function properly.

The Internal Audit Charter is published to all Work Units to establish good cooperation in realizing the Company's objectives.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG SPI

Tugas dan tanggung jawab SPI sebagaimana tercantum dalam Piagam SPI adalah:

1. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berikut anggarannya

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT UNIT

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit according to Audit Charter include:

1. Preparing the Annual Audit Work Program (RKAT) along with the budget.

2. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai PKAT atas tugas dan persetujuan Direktur Utama, dengan cara:

   a. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian *intern* dan manajemen risiko.

   b. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur serta operasi Perseroan pada unit kerja baik Kantor Pusat, Wilayah maupun Divisi.

   c. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan.

   d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:

      i. Administrasi dan keuangan

      ii. Operasional dan pemasaran SDM dan organisasi·

      iii. Kegiatan perusahaan lainnya

   e. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

   f. Memantau tindakan turun tangan dari objek Audit atas Permintaan Tindak lanjut Direktur Utama sampai dengan seluruh rekomendasi dinyatakan selesai/*closed*.

   g. Meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan.

   h. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lain terkait dengan fungsi pengawasan.

   i. Menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan SPI kepada Komisaris melalui Komite Audit.

   j. Melaksanakan tugas khusus dari Direktur Utama terkait dengan fungsi SPI.

   k. Mendokumentasikan seluruh catatan mutu kegiatan SPI.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI TAHUN 2020

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SPI tahun 2020 meliputi antara lain:

a. Audit Keuangan, Operasional dan Sistem Anak Perusahaan

2. Conducting routine audit in accordance with PKAT based on duties and approval of the President Director, by means of:

   a. Evaluating the effectiveness of the internal control and risk management implementation.

   b. Analyzing and evaluating systems and procedures as well as the Company's operations on the work units, either in Head Office, Region or Divisions.

   c. Evaluating the effectiveness and efficiency of utilized resources.

   d. Supervising and auditing activities conducted in the field of:

      i. Administration and finance

      ii. Operations and Marketing Human Capital and organization

      iii. Other activities of the company.

   e. Assessing and ensuring that the activities of each work unit of the company have been carried out according to the established objectives of the Company.

   f. Monitoring intervention action of Audit Object on Follow-Up Request of the President Director until the recommendation is declared as completed/closed.

   g. Improving auditor competence through education and training.

   h. Providing objective opinions, inputs, and consideration as well as consulting service to the management and other work unit related to supervisory function.

   i. Submitting report on the result of SPI activities to the Commissioners through the Audit Committee.

   j. Carrying out special duties from the President Director related to the function of SPI.

   k. Documenting all notes on the quality of SPI activities.

BRIEF REPORT ON IMPLEMENTATION OF DUTIES OF INTERNAL AUDIT UNIT IN 2020

The 2020 Annual Audit Work Program (PKAT) of the Internal Audit Unit were as follows:

a. Financial, Operational and System Audit of Subsidiaries;

b. Audit Keuangan, Operasional dan Sistem pada 5 (Lima) Kantor

c. Wilayah, 2 (Dua) Divisi dan 1 (Satu) Unit Penunjang Produksi.

d. Audit Sistem Terintegrasi 9 (sembilan) Departemen Kantor

e. Pusat dan Sekretariat Perusahaan.

f. Audit Keuangan, Operasional Dan Sistem Proyek JO/KSO.

Rencana pelaksanaan audit selama 101 hari, dilanjutkan dengan penyusunan laporan, mengikuti pelatihan serta sebagai *Counterpart* auditor eksternal selama bulan Januari-februari dan November-Desember 2020.

Audit Sistem dan Prosedur di Kantor Pusat dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Audit ini juga untuk menilai apakah sistem dan prosedur Perusahaan masih relevan atau memerlukan penyempurnaan dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.

Audit Keuangan, operasional dan Sistem di Wilayah/Divisi serta Unit Penunjang Produksi dilaksanakan untuk menilai kewajaran penyajian dan penilaian akun yang tersaji dalam laporan keuangan wilayah/divisi serta memastikan sistem Perusahaan masih relevan atau memerlukan penyempurnaan dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan di Wilayah/Divisi. Audit ini dilaksanakan sebagai antisipasi perbaikan "*early warning system*" sebelum pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik (KAP). lingkup periode yang diaudit yaitu untuk laporan keuangan per 31 Desember 2020.

Audit Ventura Bersama dilaksanakan untuk menilai ketaatan terhadap VB *Agreement*, kewajaran penyajian dan penilaian akun yang tersaji dalam laporan keuangan Ventura Bersama, serta memastikan sistem dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dibuat dan dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan SPI dalam rangka *Counterpart* atas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal yaitu melakukan pendampingan selama pelaksanaan audit termasuk menjadi mediator dalam pengumpulan dan distribusi data/dokumen yang dibutuhkan selama audit, melakukan pendampingan dalam kunjungan lapangan baik ke proyek maupun kantor Wilayah/Divisi, mengikuti pembicaraan akhir (*Closing Meeting*) dengan auditor di wilayah/divisi dan kantor pusat, serta *monitoring* tanggapan dan tindak lanjut dari wilayah/ divisi terkait temuan hasil audit.

b. Financial, Operational and System Audit in 5 (Five) Offices;

c. Region, 2 (Two) Divisions and 1 (One) Production Support Unit;

d. Integrated System Audit 9 (nine) Office Departments;

e. Corporate Center and Secretariat;

f. Financial, Operational and System Audit for JO/KSO Projects.

Plans for audit implementation for 101 days, followed by preparing reports, attending training as well as external auditor Counterpart during January-February and November-December 2020.

System and Procedure Audits at the Head Office are carried out to assess the implementation of systems and procedures established by the Company, so as to achieve efficiency and effectiveness of operational activities. This audit is also to assess whether the Company's systems and procedures are still relevant or require improvement in order to achieve the Company's objectives.

Financial, operational and system audits in the regions/divisions as well as production support units are carried out to assess the fairness of the presentation and valuation of accounts presented in the regional/divisional financial statements and to ensure that the company's systems are still relevant or require improvement in order to achieve the company's goals in the region/ division This audit was carried out in anticipation of improving the "early warning system" prior to the audit of the Public Accounting Firm (KAP). The scope of the audited period is for financial statements as of December, 31 2020.

The Joint Venture Audit is carried out to assess compliance with the VB Agreement, the fairness of the presentation and assessment of the accounts presented in the Joint Venture financial statements, as well as to ensure that the system and Standard Operating Procedures (SOP) have been developed and implemented properly.

Internal Audit activities in the context of Counterpart on audit implementation by external auditors are providing assistance during the audit including being a mediator in the collection and distribution of data/documents needed during the audit, providing assistance in field visits to both projects and Regional/Division offices, participating in final discussions (Closing Meeting) with auditors in regions/divisions and head office, as well as monitoring responses and follow-up actions from regions/divisions related to audit findings.

Selama tahun 2020, SPI melaksanakan *Counterpart* Auditor Eksternal yaitu *Counterpart* Audit KAP bulan Januari–Februari dan November–Desember dan *Counterpart* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memonitoring Tindak Lanjut temuan BPK, yang dilakukan mulai bulan Januari-Desember.

Bulan Januari–Februari 2020 melaksanakan *Counterpart* Audit KAP atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan bulan November–Desember 2020 melaksanakan *Counterpart* Audit KAP atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020. Rincian realisasi pelaksanaan audit dan penerbitan LHA terhadap PKAT dapat dilihat pada lampiran XII.

INFORMASI TENTANG ORGAN/KOMITE LAINNYA DI BAWAH DIREKSI

Secara keorganisasian, Direksi tidak memiliki organ dan/atau komite lainnya selain Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan *Intern*. Namun demikian, Direksi memiliki berbagai fungsi pendukung sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan, seperti pengelolaan risiko.

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK

Akuntan publik merupakan organ eksternal Perseroan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

1. Audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.

2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian *intern*, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip

During 2020, SPI carried out the External Auditor Counterpart, namely the KAP Audit Counterpart in January-February and November-December and the Supreme Audit Agency Counterpart (BPK) to monitor the Follow-up to BPK findings, which was carried out from January - December.

January-February 2020 carried out Counterpart Audit KAP on Consolidated Financial Statements for the Year Ended December 31, 2020 and in November-December 2020 conducted Counterpart Audit KAP on Consolidated Financial Statements for the Year Ended December 31, 2020. Details of realization of audit and issuance LHA on PKAT can be seen in attachment XII.

INFORMATION ON OTHER ORGANS/COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Organizationally, the Board of Directors has no other organ and/or committee aside from the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit. However, the Board of Directors has various supporting functions as part of the management of the Company, such as risk management.

EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

Public accountant is the Company's external organ that serves to provide opinions regarding the suitability of presentation of the Company's financial statements to the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

COMPLIANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD OF INDONESIA (SAK)

Management is responsible for the presentation of the Company's financial statements and compliance with the applicable SAK in Indonesia stipulated by the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI).

EXTERNAL AUDIT PROCEDURES AND AUDIT STANDARDS

1. Audits of the Company's financial statements are carried out in accordance with the professional standards of Public Accountants which cover all audit procedures that are deemed necessary in accordance with the circumstances.

2. Audit includes assessment and evaluation of the internal control system, as well as examination, on the basis of assessment, evidence supporting the numbers and disclosures in the financial statements. The audit will also include assessing the accounting principles used and

akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.

4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidak beresan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.

5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.

2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada pemegang saham dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

4. Usulan tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.

5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.

3. As part of the audit process, the Public Accountant Office (KAP) also conducts question and answer to management regarding management statements presented in the financial statements.

4. Audit contains an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If this is the case, KAP will convey to management.

5. Management approved the KAP inspection paper on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.

Audit is carried out based on Public Accountant Professional Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Republic of Indonesia Government, then the audit will be carried out based on the State Finance Auditing Standard (SPKN) issued by the Audit Board of Indonesia (BPK).

MECHANISM FOR APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANTS

Stages of KAP appointment mechanism:

1. Board of Commissioners through the Audit Committee conducts the process of appointment an external Auditor candidate by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process.

2. Board of Commissioners may reappoint an external auditor based on the results of an evaluation of the external auditor performance to conduct financial statements audit.

3. Board of Commissioners submits the nomination to shareholders and the amount of honorarium/compensation services proposed for the external auditor.

4. The proposal can be submitted through a separate letter which is part of the Board of Commissioners' response letter on the Company's annual performance.

5. Board of Commissioners evaluates the performance of external auditors through the Audit Committee in accordance with applicable provisions and standards.

6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

6. For the process of appointment and/ or reappointment on prospective external auditors carried out by the GMS, the Board of Commissioners is sufficient to authorize the GMS to determine the auditor.

MEKANISME PENUNJUKAN HINGGA PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK
MECHANISM OF APPOINTMENT UP TO DETERMINATION OF PUBLIC ACCOUNTANTS

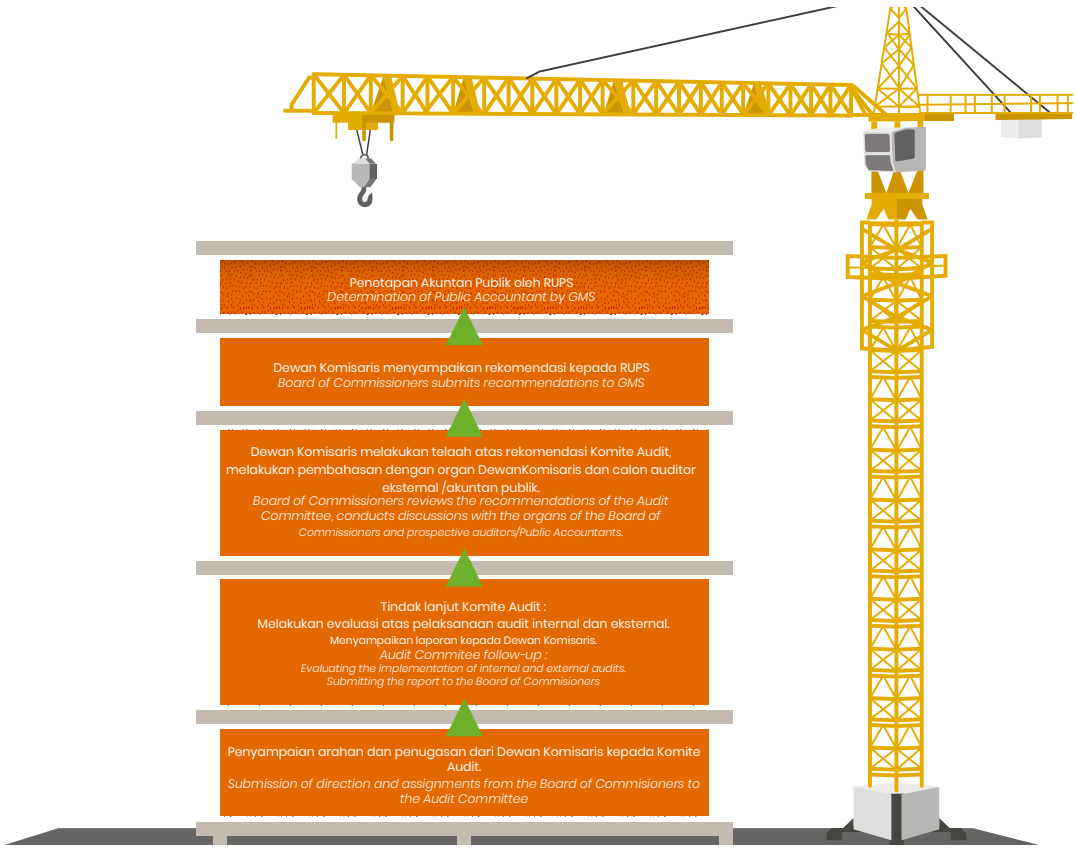

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2020

Untuk pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020, Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Nindya Karya (Persero) telah memutuskan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

PUBLIC ACCOUNTANT FOR 2020

For the implementation of the Audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Report on the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2020 Fiscal Year, the Company based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Nindya Karya (Persero) has decided to appoint Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2020
PUBLIC ACCOUNTANT FOR 2020

KANTOR AKUNTAN PUBLIK *PUBLIC ACCOUNTING FIRM*	Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan
AKUNTAN *ACCOUNTANT*	Benny Andria
TAHUN AUDIT *AUDIT YEAR*	2020
PERIODE PENUGASAN *ASSIGNMENT PERIOD*	Januari-Juli 2021 *January to July 2021*

JASA *SERVICE RENDERED*	• Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2020 • Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengendalian *Intern*al tahun buku 2020 • Audit Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2020 • Audit atas Laporan Keuangan PKBL Tahun buku 2020 • *General audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 Fiscal Year* • *Audit of compliance with laws and regulations and internal control for the 2020 Fiscal Year* • *Audit of Performance Evaluation Report for the 2020 Fiscal Year* • *Audit of PKBL Financial Statements for the 2020 Fiscal Year*
JASA LAINNYA *OTHER SERVICES*	Tidak ada *None*

Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perseroan. Dalam pelaksanaan audit independen, Perseroan berkewajiban memberikan akses yang tidak terbatas bagi Auditor KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan RSM AAJ untuk menjalankan seluruh prosedur audit yang harus dilakukan sesuai standar profesi akuntan publik yang berlaku yang meliputi tidak terbatas pada wawancara dengan pihak pejabat dan staff Perseroan, observasi fisik aset, konfirmasi kepada pihak ketiga, verifikasi dokumen, akses terhadap data dan sistem informasi, *review* notulensi rapat, *review* kontrak-kontrak penting dan sebagainya.

Public Accountants must be free from the influence of the Board of Commissioners, Board of Directors and interested parties in the Company. In conducting independent audits, the Company is obliged to provide unlimited access for the Auditors of KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM) to carry out all audit procedures in accordance with the applicable professional accounting standards which include not limited to interviews with company officials and staff, physical observation of assets, confirmation to third parties, document verification, access to data and information systems, review of meeting minutes, review of important contracts and so on.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2015 hingga 2020 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS OF THE COMPANY

For the importance of transparency, the following table states the Company's Public Accountant for its Financial Statements of 6 (six) consecutive years, i.e., for the 2015 to 2020 fiscal years:

TAHUN *YEAR*	**AKUNTAN** *ACCOUNTANT*	**KANTOR AKUNTAN PUBLIK** *PUBLIC ACCOUNTING FIRM*	**RUANG LINGKUP JASA** *SCOPE OF SERVICE*	**OPINI** *OPINION*
2020 2019 2018	Benny Andria	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)	Peraturan perundang-undangan tertentu dan engendalian *Intern*al berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia *Auditing compliance with certain regulations and internal controlling based on the State Financial Audit Standard issued by BPK and Auditing Standard Statement No. 62 (Section 801) stipulated by Institute of Indonesian Public Accountant.*	Wajar dalam semua hal yang material *Fair in all material respects*
2017 2016 2015	Saptoto Agustomo	Amir Abadi Jusuf (RSM)	Peraturan perundang-undangan tertentu dan engendalian *Intern*al berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia *Auditing compliance with certain regulations and internal controlling based on the State Financial Audit Standard issued by BPK and Auditing Standard Statement No. 62 (Section 801) stipulated by Institute of Indonesian Public Accountant.*	Wajar dalam semua hal yang material *Fair in all material respects*

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Penerapan Manajemen Risiko di Nindya Karya telah mengacu pada ISO 31000:2018 tentang Pedoman Manajemen Risiko yang sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan terukur.

Di tahun 2020 dilakukan pengembangan pedoman dan prosedur manajemen risiko dan terbentuknya PIC Manajemen Risiko. Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dilakukan kembali pengembangan Pedoman, perubahan dan penambahan prosedur.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan telah dimuat dalam Pedoman Sistem Manajemen. Substansi yang termuat dalam pedoman tersebut meliputi:

1. Prinsip-Prinsip Umum Manajemen Risiko

   Kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi dalam penerapan manajemen risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

   a. Komitmen Pimpinan

      Pimpinan Perseroan berkomitmen dan terlibat aktif dalam penerapan manajemen risiko dengan membangun dan memelihara lingkungan *Internal* di mana semua insan perusahaan dapat sepenuhnya terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan, termasuk tujuan manajemen risiko.

   b. Keterlibatan Seluruh Insan Perseroan

      Seluruh insan perusahaan terlibat aktif dalam penerapan manajemen risiko sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

   c. Adanya Pendekatan yang Sistematis, Terstruktur, dan Tepat Waktu

      Pendekatan sistematis, terstruktur, dan tepat waktu dilaksanakan untuk penerapan manajemen risiko yang hasilnya secara berkesinambungan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten, dapat dibandingkan, serta andal.

   d. Integrasi

      Penerapan manajemen risiko diintegrasikan kedalam proses bisnis perusahaan, kedalam proses pengambilan keputusan bisnis oleh manajemen, dan ke dalam nilai dan budaya perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko di Nindya Karya telah mengacu pada ISO 31000:2018 tentang Pedoman Manajemen Risiko yang sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan terukur.

In 2020, there has been a development on Guidelines and Procedures of Risk Management and Formation of PIC on Risk Management. In line with regulation of the State Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012 on the implementation of Good Corporate Governance, there has been a re-development of Guidelines, changes and addition of Procedures.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The Risk Management System adopted by the Company is contained in the Management System Manual. Substances contained in the guidelines include:

1. General Principles of Risk Management

   The basic rules that must be complied with in the implementation of the Company's risk management are as follows:

   a. Leader's Commitment

      The Company's leaders are committed and actively involved in the implementation of risk management by establishing and maintaining an internal environment in which all human beings can be fully engaged in achieving corporate objectives, including risk management objectives.

   b. Involvement of the Company's Employees

      All employees are actively involved in the implementation of risk management in accordance with their respective powers and responsibilities.

   c. The Implementation of Systematic, Structured and Timely Approach

      A systematic, structured, and timely approach is implemented for the implementation of risk management that results in a continuous contribution to consistent, comparable, and reliable efficiency and results.

   d. Integration

      The implementation of risk management is integrated into the Company's business processes, into the management decision-making process, and into the Company's values and culture.

e. Tanggung Jawab Berjenjang

Pertimbangan dan tanggung jawab atas risiko selalu melekat dan menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan pada semua jenjang manajemen perusahaan.

f. Komprehensivitas

Penerapan manajemen risiko mencakup seluruh kegiatan operasi perusahaan, di mana prinsip portofolio diterapkan dalam strategi mitigasi risiko.

g. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Dalam penerapan manajemen risiko, manajemen tetap memperhitungkan perimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang kemungkinan diperoleh.

h. Keyakinan Memadai, Bukan Keyakinan Mutlak

Adanya kesadaran penuh dari seluruh insan perusahaan bahwa manajemen risiko hanya dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) dan bukan keyakinan mutlak (*absolute assurance*).

i. Penyempurnaan Berkesinambungan

Rancangan dan penerapan manajemen risiko selalu disempurnakan sesuai kebutuhan perusahaan melalui peningkatan kompetensi dan perbaikan sistem manajemen risiko.

2. Proses Manajemen Risiko

Proses yang dilaksanakan dalam penerapan manajemen risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu "siklus" yang dijabarkan dalam tujuh tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu Perseroan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Perseroan dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadikan Perseroan memiliki struktur bisnis yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

Proses manajemen risiko meliputi:

a. Komunikasi dan Konsultasi,

b. Penetapan Konteks,

c. *Assesmen* Risiko (identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko)

d. Penanganan Risiko, dan

e. Pemantauan dan Penelaahan.

Bagan proses manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

e. Tiered Responsibilities

The consideration and responsibility regarding risks are fundamental and shall be an integral part during decision-making process in all management levels.

f. Comprehensiveness

Risk management implementation covers all operational activities, in which portfolio principle is implemented in risk mitigation strategy.

g. Balance of Cost and Benefit

In risk management implementation, the management must calculate the balance between expenditure and benefits gained.

h. Reasonable Assurance, Not Absolute Assurance

The acknowledgment from the employees that risk management only provides reasonable assurance and not absolute assurance.

i. Sustainable Improvement

The design and implementation of risk management is always perfected according to the Company's needs through competency improvement and improvement of risk management system.

2. Risk Management Process

The process carried out in the implementation of risk management takes place continuously in a "cycle" described in seven stages that must be managed well in order to help the company to evaluate its strengths and weaknesses. In doing so, the Company may survive and develop in various situations and conditions. In addition, such process will strengthen the Company's business structure in facing every challenge.

The Risk Management process includes:

a. Communication and consultation,

b. Context setting,

c. Risk assessment (risk identification, risk analysis and risk evaluation),

d. Risk management, and

e. Monitoring and review.

The chart of risk management process is as follows:

a. Komunikasi dan Konsultasi

Persepsi terhadap risiko dapat bervariasi karena perbedaan nilai, kebutuhan, asumsi, konsep, dan perhatian *stakeholder* sehubungan dengan risiko atau *issue* yang didiskusikan. *Stakeholder* membuat pertimbangan terhadap akseptabilitas suatu risiko berdasarkan persepsi mereka terhadap risiko. *Stakeholder* memiliki konsekuensi signifikan terhadap keputusan yang diambil, maka sangat penting untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan persepsi mereka terhadap risiko dan manfaatnya serta memahami dan mendalami alasan-alasan yang melandasi persepsi mereka.

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses penting pada setiap tahapan manajemen risiko. Pada setiap awal tahapan perlu disusun rencana komunikasi dengan *stakeholder* baik *Internal* maupun eksternal. rencana tersebut harus mengarah pada isu-isu yang berkaitan dengan risiko itu sendiri maupun proses untuk mengelolanya.

Komunikasi dan konsultasi adalah dialog dua arah antara pengambil keputusan dengan *stakeholder Internal* dan eksternal yang tepat pada setiap tahapan dari proses manajemen risiko dan proses secara keseluruhan yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi yang sama dan kesepakatan penanganan risiko, serta untuk

a. Communication and Consultation

Perceptions of risk may vary due to differences in stakeholder values, needs, assumptions, concepts, and concerns with respect to the risks or issues discussed. The stakeholder makes consideration of the acceptability of a risk based on their perception of risk. Stakeholder has significant consequences for decisions, it is important to identify and document his/her perceptions of the risks and benefits and to understand and explore the reasons underlying such perceptions.

Communication and consultation is an important process at every stage of risk management. At the beginning of each stage a communication plan with stakeholders, both internally and externally, should be developed. The plan should lead to issues relating to the risk itself as well as the process to manage it.

Communication and consultation is a two-way dialogue between decision makers with appropriate internal and external stakeholders at each stage of the overall risk management process and process aimed at achieving the same perceptions and risk management agreements, and ensuring that those responsible for implementing risk

meyakinkan bahwa penanggung jawab pengimplementasian manajemen risiko dan pihak-pihak lain yang berkepentingan memahami dasar pengambilan keputusan dan mengapa tindakan- tindakan tertentu diperlukan.

b. Penetapan Konteks

Tahapan ini dilakukan untuk mendefinisikan variabel-variabel *Internal* dan eksternal yang akan diperhitungkan dalam mengelola risiko serta mengatur ruang lingkup dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya. Konteks harus mencakup variabel *Internal* dan eksternal yang relevan dengan organisasi yang diperlukan sebagai pedoman bagi keputusan dalam kajian manajemen risiko yang lebih rinci terutama menyangkut keterkaitannya dengan lingkup suatu proses manajemen risiko.

Kegiatan penetapan konteks terdiri dari:

i. Penetapan Konteks Eksternal, meliputi pemahaman lingkup budaya, politik, hukum, peraturan, teknologi, keuangan, ekonomi, alam, pesaing, *Issue-Issue* yang berdampak pada tujuan organisasi, persepsi dan nilai- nilai para *stakeholder*. hasil dari penetapan konteks eksternal ini adalah daftar potensi risiko eksternal untuk mengidentifikasi risiko-risiko eksternal.

ii. Penetapan konteks internal, meliputi pemahaman:

- Kebijakan, Tujuan dan Strategi organisasi:
- Kapabilitas Sumber Daya;
- Pengetahuan (Proses Bisnis) di lingkungan *Internal* organisasi;
- Sistem informasi dan proses pengambilan keputusan;
- Struktur organisasi dan Pemangku Kepentingan *Internal*;
- Persepsi, Nilai-nilai dan Budaya organisasi. Hasil dari penerapatan konteks *Internal* ini adalah daftar potensi risiko *Internal* untuk mengidentifikasi risiko-risiko *Internal*.

c. Penetapan konteks manajemen risiko, meliputi:

i. Penentuan Tanggung jawab pada proses manajemen risiko;

management and Other interested parties understand the basis for decision-making and why certain actions are required.

b. Context Determination

This stage is done to define the internal and external variables that will be taken into account in managing the risk and set the scope and risk criteria for the next process. Contexts should include internal and external variables relevant to the organization required as a guide for decisions in a more detailed risk management assessment, especially with respect to the scope of a risk management process.

The context setting activity consists of:

i. The establishment of the External Context, including the understanding of the cultural, political, legal, regulatory, technological, financial, economic, natural, competitiveness, issues-issues that impact the organizational goals, perceptions and values of stakeholders. The outcome of this External Context Determination shall become a List of External Risk Potential to identify external risks.

ii. Stipulation of Internal Context, including the understanding on:

- Policy, Purpose and Organizational Strategy;
- Resources Capability;
- Knowledge (Business process) within Internal Organization;
- Information System and Decision-Making Process;
- Organization Structure and Internal Stakeholders;
- Perception, Values and Organizational Culture. The results of internal context implementation shall become a list of potential internal risks to identify.

c. Risk Management Context Determination, covering:

i. Determining responsibility for risk management processes;

ii. Penentuan lingkup serta kedalaman dan keluasan aktivitas manajemen risiko yang mencakup proses, fungsi, proyek, produk, jasa atau asset;

iii. Penentuan hubungan antara suatu proyek atau aktivitas tertentu dengan proyek atau aktivitas organisasi;

iv. Penentuan metodologi penilaian risiko;

v. Penentuan cara evaluasi pengelolaan risiko;

vi. Identifikasi dan spesifikasi keputusan yang harus diambil;

vii. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Hasil dari penetapan konteks manajemen risiko ini adalah rencana pelaksanaan identifikasi risiko.

d. Pengembangan Kriteria risiko, meliputi penentuan:

i. Kriteria Tingkat Kemungkinan;

ii. Kriteria Tingkat Akibat

iii. matriks Tingkat risiko.

ii. Determining the scope and depth and breadth of risk management activities that include processes, functions, projects, products, services or assets;

iii. Determining the relationship between a particular project or activity with a project or organizational activity;

iv. Determination of risk assessment methodology

v. Determining how risk management is evaluated;

vi. Identification and specification of decisions to be taken;

vii. Identifying required resources. The results of the risk management context implementation shall become a Risk Identification Implementation Plan.

d. Development of Risk Criteria, including the stipulation of:

i. Possibility Level Criteria;

ii. Impact Level Criteria;

iii. Risk Level Matrix.

KRITERIA TINGKAT KEMUNGKINAN

POSSIBILITY INDEX CRITERIA

KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO *PROBABILITY OF RISK*		**ASPEK KEWAJIBAN** *OBLIGATION ASPECT*	**ASPEK MUTU, K3, LINGKUNGAN** *QUALITY, OHS, AND ENVIRONMENT ASPECT*
A	Hampir Pasti *Almost certain*	Ada peraturan, kemungkinannya bisa menghentikan atau ditutup operasinya sehingga dituntut secara hukum *There are rules, the operation may be stopped or closed, hence prosecuted*	Kemungkinan terjadinya sangat besar/ Selalu terjadi/ frekuensi Kemungkinan terjadi bisa setiap hari, terjadi secara kontinyu *The likelihood of occurrence is very large/always occurs/ frequency of possibility of occurring every day, occurs continuously*
B	Kemungkinan besar terjadi *Most likely to occur*	Kasus pelanggaran berat (Campur tangan pemerintah untuk menghentikan/ menutup operasi atau kemungkinan dituntut secara hukum) , Pelanggaran hukum berat *Cases of gross violation (Government intervention to stop/close operations or possibly prosecuted), violations of severe law*	Kemungkinan terjadinya besar /Selalu terjadi/ frekuensi Kemungkinan terjadi bisa > 1 kali per hari, terjadi secara kontinyu *Most likely to occur/always occurring/frequency Possible occurrence can be > 1 time per day, occurs continuously*
C	Kadang-kadang *Sometimes*	Ada regulasi/peraturan perusahaan dan masih melanggar *There are regulations/ company regulations and still violate*	Kemungkinan terjadinya sedang/ frekuensi Kemungkinan terjadi bisa ≥ 1 kali seminggu, terjadi secara kontinyu *Possibility of occurrence/Frequency possible occurrence can be ≥ 1 times a week, occur continuously*
D	Mungkin terjadi *May occur*	Ada regulasi/peraturan perusahaan dan memenuhi peraturan *There are regulations/ company regulations and comply with regulations*	Kemungkinan terjadi kecil/ frekuensi Kemungkinan terjadi bisa ≥ 1 bulan sekali, tidak kontinyu *Possible occurrence of small/frequency possibility of occurring ≥ once a month, not continuous*
E	Jarang terjadi *Rarely occur*	Tidak ada regulasi/peraturan perusahaan yang mengatur *No regulatory company regulations*	Kemungkinan terjadinya hampir tidak pernah ada/ Kemungkinan terjadi bisa ≥ 1 tahun sekali, tidak kontinyu *The possibility of almost never occurring/the possibility of occurrence can be ≥ once a year, not continuous*

KRITERIA TINGKAT DAMPAK

IMPACT LEVEL CRITERIA

DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN PEMASARAN *IMPACT ON ACHIEVEMENT*		ASPEK MUTU (NILAI KERUGIAN) *QUALITY ASPECT (LOSS VALUE)*		
		PEMASARAN *MARKETING*	**PRODUKSI** *PRODUCTION*	**SDM** *HUMAN CAPITAL*
1	Tidak Signifikan *Insignificant*	Perolehan Kontrak berhasil *Successful contract acquisition*	BK/PU = 90% (normal), keterlambatan = tidak ada keterlambatan *BK/PU = 90% (normal),* *delay = no delay*	Terpenuhinya evaluasi ***person grade***, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 100% *Fulfillment of person grade evaluation, fulfillment of core manpower of project, and improvement of Human Capital system = 100%*
2	Minor *Minor*	Perolehan Kontrak berhasil, laba berkurang antara 10% s/d 12% (Incl. PPh) *Successful contract acquisition, profit decreases between 10% to 12% (incl. Income Tax)*	BK/PU = 93%, ***progress*** terlambat = 5% *BK/PU = 93%,* *delay progress = 5%*	Terpenuhinya evaluasi ***person grade***, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 90% *Fulfillment of person grade evaluation, fulfillment of core manpower of project, and improvement of Human Capital system = 90%*
3	Moderat *Moderate*	Perolehan Kontrak berhasil, laba berkurang antara 7% s/d 10% (Incl. PPh) *Successful contract acquisition, profit decreases between 7% to 10% (incl. Income Tax)*	BK/PU = 96%, ***progress*** terlambat = 10% *BK/PU = 96%,* *delay progress = 10%*	Terpenuhinya evaluasi ***person grade***, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 80% *Fulfillment of person grade evaluation, fulfillment of core manpower of project, and improvement of Human Capital system = 80%*
4	Parah *Severe*	Perolehan Kontrak berhasil, laba berkurang di bawah 7% (Incl.PPh) *Successful contract acquisition, profit decreases below 7% (incl. Income Tax)*	BK/PU = 100%, ***progress*** terlambat = 15% *BK/PU = 100%,* *delay progress = 15%*	Terpenuhinya evaluasi ***person grade***, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM = 70% *Fulfillment of person grade evaluation, fulfillment of core manpower of project, and improvement of Human Capital system = 70%*
5	Sangat Parah *Very Severe*	Gagal Perolehan kontrak *Failed contract acquisition*	BK/PU >100%, ***progress*** terlambat > 15% *BK/PU > 100%,* *delay progress > 15%*	Terpenuhinya evaluasi ***person grade***, Pemenuhan tenaga inti proyek terpenuhinya, dan Penyempurnaan sistem SDM <70% *Fulfillment of person grade evaluation, fulfillment of core manpower of project, and improvement of Human Capital system < 70%*

DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN KEUANGAN *IMPACT ON ACHIEVEMENT*		ASPEK MUTU (NILAI KERUGIAN) *QUALITY ASPECT (LOSS VALUE)*		
		KEUANGAN *FINANCE*	**AKUNTANSI** *ACCOUNTING*	**PROYEK** **PROJECT**
1	Tidak Signifikan *Insignificant*	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU = 2,65 % dan bunga bank terhadap PU = 1,48 % *General and administrative expenses to PU = 2.65% and bank interest to PU = 1.48%*	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham setiap tanggal 10 bulan berikutnya, restitusi PPN cair minimal 80 % dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 3 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 100 % *Completion of financial statements to shareholders is every 10th date of the following month, VAT restitution is disbursed minimum 80% of restitution proposed to KPP, and fulfillment of data for tender 3 days after letter of request is received = 100%*	Sangat rendah, toleransi sangat tinggi *Very Low, very high tolerance*
2	Minor *Minor*	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU = 2,66% - 3% dan bunga bank terhadap PU = 1,49% - 2,2 % *General and administrative expenses to PU = 2.65%-3% and bank interest to PU = 1.49%-2.2%*	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham ≤ tanggal 15 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 75% dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 4 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 85% *Completion of financial statements to shareholders is ≤ 15th date of the following month, VAT restitution is disbursed minimum 75% of restitution proposed to KPP, and fulfillment of data for tender 4 days after letter of request is received = 85%*	Rendah, Toleransi senilai 0 < Deviasi < 1%, Kinerja cukup, dan pemberitaan negatif namun tidak mengakibatkan penurunan kepercayaan ***stakeholder***/ Tidak terlalu mempengaruhi sasaran perusahaan *Low, tolerance is 0 < deviation < 1%, adequate performance, and negative reporting but does not decrease stakeholders' trust/ relatively insignificant influence on the Company's target*

DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN KEUANGAN *IMPACT ON ACHIEVEMENT*		ASPEK MUTU (NILAI KERUGIAN) *QUALITY ASPECT (LOSS VALUE)*		
		KEUANGAN *FINANCE*	**AKUNTANSI** *ACCOUNTING*	**PROYEK** **PROJECT**
3	Moderate *Moderate*	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU = 4% dan bunga bank terhadap PU = 3% *General and administrative expenses to PU = 4% and bank interest to PU = 3%*	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham ≤ tanggal 20 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 70 % dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 5 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 75 % *Completion of financial statements to shareholders is ≤ 20th date of the following month, VAT restitution is disbursed minimum 70% of restitution proposed to KPP, and fulfillment of data for tender 5 days after letter of request is received = 75%*	Sedang, Toleransi senilai 1 < Deviasi < 2%, Penyimpangan Kecil terhadap sasaran yang dapat diabaikan (yang mudah diperbaiki kembali)/ Mempengaruhi beberapa sasaran *Medium, tolerance is 1 < deviation < 2%, slight deviation to target that can be ignored (easily fixed)/affect several targets*
4	Parah *Severe*	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU > 4 % dan bunga bank terhadap PU > 3% *General and administrative expenses to PU > 4% and bank interest to PU > 3%*	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham ≤ tanggal 25 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 65% dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 6 hari kerja setelah surat permintaan diterima = 65% *Completion of financial statements to shareholders is ≤ 25th date of the following month, VAT restitution is disbursed minimum 65% of restitution proposed to KPP, and fulfillment of data for tender 6 days after letter of request is received = 65%*	Tinggi, Toleransi senilai = 2%, Kinerja buruk, dan pemberitaan negatif yang dapat mempengengaruhi kepercayaan sebagian besar dari ***stakeholder***/ Sasaransasaran penting tidak dapat tercapai *High, Tolerance = 2%, bad performance, and negative reporting that may affect the trust of most of stakeholders/key targets cannot be achieved*
5	Sangat Parah *Very Severe*	Nilai biaya umum dan administrasi (BUA) terhadap PU > 4 % dan bunga bank terhadap PU > 3% *General and administrative expenses to PU > 4% and bank interest to PU > 3%*	Penyelesaian laporan keuangan ke Pemegang Saham > tanggal 25 bulan berikutnya, Restitusi PPN cair minimal 65 % dari restitusi yang diajukan ke KPP, dan Pemenuhan data untuk tender 7 hari kerja setelah surat permintaan diterima < 50% *Completion of financial statements to shareholders is > 25th date of the following month, VAT restitution is disbursed minimum 65% of restitution proposed to KPP, and fulfillment of data for tender 7 days after letter of request is received < 50%*	Sangat Tinggi, Toleransi ≥ 2%, Kinerja sangat buruk, dan pemberitaan negatif yang dapat menghilangkan kepercayaan dari ***stakeholder***/ Semua sasaran tidak dapat tercapai *Very high, tolerance ≥ 2%, very bad performance, and negative reporting that may eliminate trust of stakeholders/all targets cannot be achieved*

DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN *IMPACT ON ACHIEVEMENT*		ASPEK K3 *OHS ASPECT*	ASPEK LINGKUNGAN *ENVIRONMENT ASPECT*
1	Tidak Signifikan *Insignificant*	*Nearmiss* (hampir celaka) *Near-miss*	Tidak ada pencemaran, Tidak ada penipisan sumberdaya alam, Kerusakan/ pencemaran dapat langsung dipulihkan pada saat itu juga *Pollution with small quantity, depletion of natural resources with small consumption, damage/pollution can be recovered directly within 1 week at maximum*
2	Minor *Minor*	Terjadi kecelakaan yang membutuhkan pemulihan ***first aid*** *There is an accident that requires first aid*	Pencemaran dengan kuantitas kecil. Penipisan SDA dengan konsumsi kecil. Kerusakan atau pencemaran dapat langsung dipulihkan dalam waktu maksimal 1 minggu *Pollution with medium quantity, depletion of natural resources with medium consumption, damage/pollution is medium, recovery time is 1 to 4 weeks*
3	Moderat *Moderate*	Terjadi kecelakaan yang menyebabkan cidera, memerlukan perawatan di rumah sakit berdampak LTI *There is an accident that causes injury, requires treatment in hospital, resulting in LTI*	Pencemaran dengan kuantitas sedang. Penipisan SDA dengan konsumsi sedang. Kerusakan atau pencemaran sedang.Waktu pemulihan 1 - 4 minggu *Pollution with large quantity, depletion of natural resources with large consumption, large damage and threaten life, recovery time is 1 to 6 months*
4	Parah *Severe*	Terjadi kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen *There is an accident that causes permanent disability*	Pencemaran dengan kuantitas besar. Penipisan SDA dengan konsumsi besar. Kerusakan besar dan mengancam kehidupan. Waktu Pemulihan 1 - 6 bulan *Pollution may cause natural resources to be non-renewable, damage may threaten the existence of life, recovery time is very long, more than 6 months or years.*
5	Sangat Parah *Very Severe*	***Critical*** *Fatality*	Pencemaran dapat mengakibatkan SDA tidak dapat diperbaharui kembali. Kerusakan dapat mengancam eksistensi kehidupan. Waktu pemulihan sangat panjang, lebih dari 6 bulan atau bertahun-tahun *There is no pollution, no depletion of natural resources, damage/pollution can be recovered directly and immediately*

MATRIKS TINGKAT RISIKO

RISK LEVEL MATRIX

			DAMPAK *IMPACT*				
	AS/NZS 4360:1999		**TIDAK SIGNIFIKAN** *INSIGNIFICANT*	**MINOR** *MINOR*	**MODERAT** *MODERATE*	**PARAH** *SEVERE*	**SANGAT PARAH** *VERY SEVERE*
			1 0% - 20%	**2** 21% - 40%	**3** 41%-60%	**4** 61%-80%	**5** 81%-100%
PROBABILITAS	Hampir pasti *Almost certain*	A 81% - 100%	H	H	E	E	E
	Kemungkinan besar terjadi *Most likely to happen*	B 61% - 80%	M	H	H	E	E
	Kadang-kadang *Sometimes*	C 41% - 60%	L	M	H	E	E
	Mungkin terjadi *Sometimes*	D 21% - 40%	L	L	M	H	E
	Jarang terjadi *Rarely to happen*	E 0% - 20%	L	L	M	H	H

Dampak Terhadap Pencapaian

a. Tidak signifikan
b. *Minor*
c. Moderat
d. Parah
e. Sangat Parah

Impact on Achievement:

a. Insignificant
b. Minor
c. Moderate
d. Severe
e. Very severe

Kemungkinan Terjadinya Risiko

a. Hampir pasti
b. Kemungkinan besar terjadi
c. Kadang- kadang
d. Mungkin terjadi
e. Jarang terjadi

Risk Probability

a. Almost certain
b. Most likely to occur
c. Sometimes
d. May occur
e. Rarely occur

LEVEL RISIKO *RISK LEVEL*	**PRIORITAS** *PRIORITY*	**AKTIVITAS MANAJEMEN** *MANAGEMENT ACTIVITY*
Extreme	1	Risiko Ekstrim. Sangat mendesak, perlu penanganan segera dari ToP manajemen. Dalam Unit Kerja/Bisnis/ Proyek, penanganan masalah dipimpin oleh top manajemen yang didukung oleh rencana yang terperinci *Extreme Risk. Very urgent, need immediate handling from top management in the work unit/business unit/ project, problem handling is led by top management supported by detailed plans*
	2	Risiko Ekstrim. Sangat mendesak, perlu penanganan segera dari ToP manajemen. Dalam Unit Kerja/Bisnis, penanganan masalah dilakukan oleh Kepala Departemen/***General Manager*** dan ***Manager*** terkait. Dalam Proyek, penanganan masalah dilakukan oleh ***General Manager*** dan ***Project Manager*** terkait. *Extreme Risk. Very urgent, need immediate handling from top management. In the work unit/business unit, problem handling is carried out by the related Head of Department/General Manager and Manager. In the project, problem handling is carried out by the related General Manager and Project Manager.*
High	3	Risiko Tinggi. Perlu perhatian ***top*** manajemen. Dalam Unit Kerja/Bisnis, penanganan masalah dilakukan oleh ***Manager*** terkait. Dalam Proyek, penanganan masalah dilakukan oleh ***Project Manager*** dan ***Supervisor*** terkait *High risk. Need top management attention. In the work unit/business unit, problem handling is carried out by the related Manager. In the project, problem handling is carried out by the related Project Manager and Supervisor*
Medium	4	Risiko Sedang. Tanggung jawab manajemen perlu diperjelas. Perhatian dan penanganan masalah dilakukan oleh pemilik proses *Medium Risk. Management's responsibilities need to be clarified. Attention and problem handling are carried out by the process owner.*

LEVEL RISIKO *RISK LEVEL*	PRIORITAS *PRIORITY*	AKTIVITAS MANAJEMEN *MANAGEMENT ACTIVITY*
Low	5	Risiko rendah. Perlu diatur rutinitasnya menggunakan prosedur yang ada. Dilakukan perhatian dan monitor oleh pemilik proses *Low risk. It is necessary to set the routine using existing procedures. Attention and monitoring by the process owner*

3. Penilaian risiko

a. Identifikasi Risiko

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa risiko, penyebabnya serta konsekuensi potensialnya. Tujuan tahapan ini adalah untuk menghasilkan suatu daftar risiko yang komprehensif berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dapat meningkatkan, menghalangi, mengurangi, atau menunda pencapaian tujuan. Penting juga untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kegagalan memanfaatkan peluang. Identifikasi komprehensif sangat kritis karena risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini tidak akan dianalisis lebih lanjut.

Identifikasi komprehensif dilakukan dengan menggunakan proses sistematis dan terstruktur, mencakup semua risiko, baik risiko yang berada dalam kendali perusahaan maupun risiko yang di luar kendali perusahaan. Risiko yang berada dalam kendali perusahaan dapat diidentifikasi dengan pendekatan rantai nilai (*value chain*) atausalingketerkaitanantartiap proses/aktivitas/fungsi. Sedangkan risiko yang berada diluar kendali perusahaan diidentifikasi dengan pendekatan kerangka analisis operasi. Perusahaan menerapkan perangkat dan teknik identifikasi yang cocok dengan tujuan dan kapabilitasnya terhadap risiko yang dihadapi.

Pada intinya, langkah identifikasi risiko dilakukan untuk menggali dan menemukan jawaban terhadap dua pertanyaan: "apa yang dapat terjadi yang memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan?" dan "mengapa dan bagaimana hal itu terjadi?"

Informasi yang relevan dan terkini sangat penting dalam mengidentifikasi risiko. Semua unit kerja perusahaan harus dilibatkan dalam mengidentifikasi risiko. Proses identifikasi risiko menghasilkan suatu peristiwa yang mungkin terjadi, juga menaksir penyebab yang mungkin dan konsekuensi yang dapat timbul. Semua penyebab yang penting harus diperhitungkan.

3. Risk Evaluation

a. Risk Identification

This step is done by identifying the risk event, its cause and its potential consequences. The purpose of this stage is to generate a comprehensive list of risks based on events that may increase, hinder, reduce, or delay the achievement of objectives. It is also important to identify risks associated with the failure to take advantage of opportunities. Comprehensive identification is very critical because risks that are not identified at this stage will not be further analyzed.

Comprehensive identification is carried out using a systematic and structured process, covering all risks, whether the risks are in the control of the company or the risks that are beyond the control of the company. Risks under the control of a company can be identified by a value chain approach or the interrelations between each process/activity/function. While the risks that are beyond the control of the company are identified with the framework of Operational analysis approach. The Company implements identification tools and techniques that match the objectives and capabilities of the risks.

In essence, the risk identification step is done to explore and find answers to two questions: "what may happen that affects the achievement of company goals?" And "why and how did that happen?"

Relevant and up-to-date information is critical in identifying risks. All Company Work Units should be involved in identifying risks. The risk identification process generates a possible event, as well as assesses possible causes and possible consequences. All important causes must be taken into account.

b. Analisis Risiko

Analisis risiko menjadi dasar untuk kegiatan evaluasi risiko serta keputusan penanganan risiko, strategi yang diperlukan dan metode penanganan risiko yang paling tepat. Analisis risiko melibatkan pertimbangan mengenai penyebab dan sumber risiko, konsekuensi positif dan negatif, serta kemungkinan konsekuensi tersebut dapat timbul. Risiko di analisis dengan mengkombinasikan estimasi terhadap konsekuensi dan *likelihood*, serta sifat-sifat lain dari risiko. Suatu peristiwa risiko dapat memiliki berbagai konsekuensi dan dapat memengaruhi berbagai tujuan. Pengendalian yang ada dan efektivitasnya juga harus diperhitungkan. Cara menentukan tingkat kemungkinan (*likelihood*) dan akibat (konsekuensi) serta pengkombinasian *likelihood* dan konsekuensi untuk memperoleh suatu tingkatan (level) risiko dapat bervariasi tergantung pada tipe risiko dan informasi yang tersedia. Penentuan tingkat risiko harus konsisten sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Analisis risiko dapat berupa Analisis kualitatif, semi kuantitatif, kuantitatif atau kombinasi di antaranya, tergantung pada informasi risiko dan data yang tersedia. Analisis kuantitatif memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan analisis semi-kuantitatif dan kualitatif. Praktiknya, analisis kualitatif sering digunakan pertama kali untuk mendapatkan indikasi umum mengenai level risiko. Selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif yang lebih spesifik.

Jenis-jenis analisis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

i. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif menggunakan istilah atau skala deskriptif untuk menggambarkan besaran konsekuensi yang potensial dan tingkat kemungkinan (*likelihood*) jika peristiwa risiko terjadi.

Analisis kualitatif yang digunakan:

- Sebagai suatu aktivitas penyaringan awal untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang memerlukan Analisis yang lebih rinci;
- Ketika level risiko tidak memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih detail karena faktor waktu dan sumber daya; atau

b. Risk Analysis

Risk analysis provides the basis for risk evaluation activities and risk management decisions, required strategies and the most appropriate risk management methods. Risk analysis involves consideration of the causes and sources of risks, their positive and negative consequences, and their possible consequences. Risks are in Analysis by combining estimates of consequences and likelihood, as well as other properties of risk. An event of risk can have various consequences and may affect a variety of purposes. Existing control and effectiveness must also be taken into account. The method to determine the likelihood and consequences and combinations of likelihood and the consequences for obtaining a level of risk may vary depending on the type of risk and information available. The determination of the risk level should be consistent with the established criteria.

Risk analysis can be qualitative, semi-quantitative, quantitative or in any combination of them, depending on the risk information and available data. Quantitative analysis has a higher complexity and costs greater than semi-quantitative and qualitative analysis. In practice, qualitative analysis is often used first to get a general indication of the level of risk. Furthermore, a more specific quantitative analysis shall be conducted.

The types of risk analysis are as follows:

i. Qualitative Analysis

Qualitative analysis uses descriptive terms or scale to illustrate the magnitude of potential consequences and likelihood if risk events occur.

Qualitative analysis is used:

- As an initial screening activity to identify risks requiring more detailed analysis;
- When the risk level does not allow for more detailed analysis due to time and resource factors; or

- Ketika data numerik tidak memadai untuk tujuan Analisis kuantitatif.

ii. Analisis Semi Kuantitatif

Analisis risiko semi kuantitatif mengambil satu langkah lebih jauh dibanding Analisis kualitatif yaitu dengan pemberian atribut nilai atau pengali kepada besaran *likelihood* dan konsekuensi. Angka yang dialokasikan kepada masing-masing uraian tidak harus mengandung hubungan yang akurat dengan besaran aktual dari konsekuensi dan *likelihood*. Nilai yang digunakan untuk menggambarkan konsekuensi mencerminkan besaran relatif dan bukan besaran atau ukuran absolut. Sedangkan nilai yang digunakan untuk besaran *likelihood* adalah nilai-nilai subyektif dan variabel sesuai kondisi peristiwa risiko yang dianalisis. Tujuannya untuk memperoleh prioritisasi yang lebih detail dari padi yang biasanya diperoleh dalam analisis kualitatif.

Kadang-kadang *likelihood* terdiri dari dua elemen, yaitu frekuensi eksposur dan probabilitas atas suatu kejadian/ peristiwa risiko. Frekuensi eksposur adalah luasnya area di mana sumber risiko terdapat, sedangkan probabilitas adalah kemungkinan kesempatan sumber risiko terjadi. Perhatian harus dipusatkan ketika terjadi situasi di mana hubungan antara kedua elemen tidak sepenuhnya independen, misalnya terdapat hubungan yang kuatantara frekuensi eksposur dengan probabilitas.

iii. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif menggunakan nilai angka (tidak menggunakan skala deskriptif seperti digunakan dalam Analisis kualitatif dan semi kuantitatif), baik untuk konsekuensi maupun *liketihood*, dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang tersedia. Kualitas analisis tergantung pada akurasi dan kelengkapan nilai numerik yang digunakan. Konsekuensi dapat diestimasi dengan pembuatan *model outcome* dari suatu atau beberapa peristiwa, atau dengan ekstrapolasi hasil kajian eksperimen atau data masa lalu. Konsekuensi dapat dinyatakan dalam satuan moneter (mata uang), kriteria teknik (satuan pengukuran) atau manusia (kematian/cedera) atau

- When numerical data is inadequate for the purpose of Quantitative Analysis.

ii. Semi Quantitative Analysis

Semi-quantitative risk analysis takes one step further than qualitative analysis that is by assigning value or multiplier attributes to likelihood quantities and consequences. The numbers allocated to each description do not necessarily contain an accurate relationship to the actual magnitude of the consequences and likelihood. The value used to describe the consequences reflects the relative magnitudes and not the amount or size of the absolute. While the values used for the amount of likelihood are subjective values and variables according to the risk event conditions are analyzed. The aim is to obtain a more detailed prioritization of the rice normally.

Sometimes likelihood consists of two elements, namely the frequency of exposure and the probability of an event /risk event. Frequency of exposure is the extent of the area where the source of risk exists, while the probability is the possibility of a risk source opportunity occurring. Attention should be centered in situations where the relationship between the two elements is not fully independent, for example there is a strong relationship between the frequency of exposure and probability.

iii. Quantitative Analysis

Quantitative analysis uses numerical scores (not using descriptive scales as used in qualitative and semi-quantitative analysis), both for consequences and for tiling, by using data from various available sources. Quality Analysis depends on the accuracy and completeness of the numerical values used. Consequences can be estimated by modeling the outcomes of a particular event or by extrapolating the results of the experimental or past data. Consequences can be expressed in monetary units (currency), technical criteria (unit of measurement) or human (death/injury) or other criteria. In some cases, it takes more than one numerical value to determine the consequences

kriteria lainnya. Dalam beberapa kasus, diperlukan lebih dari satu nilai numerik untuk menentukan konsekuensi pada waktu, tempat, kelompok atau situasi yang berbeda. Pada akhir tahapan alisis risiko ini diharapkan diperoleh:

- Besaran tiap-tiap risiko *(level of single risk)*
- Peta Risiko.

c. Evaluasi risiko

Evaluasi risiko merupakan pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Dalam evaluasi risiko, level risiko dan kriteria risiko harus diperbandingkan dengan menggunakan basis yang sama. Evaluasi kualitatif mencakup pembandingan level risiko kualitatif terhadap kriteria kualitatif, dan evaluasiku antitatif mencakup pembandingan level risiko numerik terhadap kriteria yang dapat dinyatakan dalam angka tertentu, seperti kematian, frekuensi atau nilai uang. Demikian juga perbandingan level risiko semi kuantitatif.

Hasil dari Evaluasi Risiko adalah:

i. Daftar risiko yang dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk pengambilan tindakan lebih lanjut.

ii. Prioritas risiko.

Jika risiko-risiko masuk dalam kategori rendah atau risiko yang dapat diterima, maka risiko-risiko tersebut diterima dengan atau tanpa perlakuan/ penanganan lebih lanjut. Tetapi jika risiko-risiko adalah menengah atau tinggi, maka harus diambil tindakan perlakuan lebih lanjut. Keputusan penanganan risiko harus dibuat sesuai dengan persyaratan hukum, peraturan, dan persyaratan lainnya.

4. Penanganan risiko

Penanganan risiko adalah proses pengembangan, pemilihan dan pengimplementasian pengendalian risiko. Penanganan risiko dapat berupa:

a. Menghindari risiko dengan menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko;

b. Mengambil peluang dari aktivitas yang berisiko;

c. Memindahkan sumber risiko;

d. Mengubah sifat dan besaran *liketihood*;

at different times, places, groups or situations. By the end of the risk analysis, these results are expected to be gathered:

- Level of single risk
- Risk map

c. Risk Evaluation

Risk evaluation is a comparison between the risk levels found during the analysis process with predetermined risk criteria. In risk evaluation, risk levels and risk criteria must be compared using the same basis. Qualitative evaluation involves comparing qualitative risk levels to qualitative criteria, and quantitative evaluation includes comparing numerical risk levels against criteria that can be expressed in certain numbers, such as death, frequency or value for money. Similarly, the ratio of semi-quantitative risk level.

The results of risk evaluation are:

i. List of acceptable and unacceptable risks for further follow-up.

i. Risk priority.

If the risks fall into low categories or acceptable risks, they are accepted with or without further treatment. However, if the risks are at medium or high level, further treatment should be taken. Risk management decisions must be made in accordance with the requirements of law, regulation, and other requirements.

4. Risk Handling

Risk handling is the development, selection and implementation process of risk handling. Risk handling can be implemented as:

a. Avoiding risks by cancelling activities that cause risks;

b. Obtaining opportunity from risky activities;

c. Relocating risk sources;

d. Changing likelihood nature and value;

e. Mengubah konsekuensi;

f. Mentransfer risiko misalanya dengan asuransi;

g. Menerima risiko.

Penanganan risiko yang berhubungan dengan akibat (konsekuensi) negatif seringkali disebut juga mitigasi risiko, eliminasi risiko, pencegahan risiko, pengurangan risiko, penekanan risiko dan koreksi risiko.

Penanganan risiko meliputi identifikasi opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi, menyiapkan rencana penanganan risiko, dan implementasi rencana penanganan risiko. Opsi penanganan risiko dapat berupa menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan risiko, mencari peluang dengan memutuskan untuk melakukan aktivitas yang akan menghasilkan atau meningkatkan risiko, menghilangkan sumber risiko, mengurangi *likelihood*, mengurangi konsekuensi, memindahkan atau membagi risiko, dan menerima risiko. Jika pilihan penanganan risiko berdampak pada risiko di bagian lain perusahaan, maka bagian yang terkena dampak penanganan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika sumber daya untuk penanganan risiko terbatas, maka rencana penanganan harus jelas dengan memprioritaskan penanganan risiko yang perlu didahulukan.

Perusahaan harus menyadari sifat dan lingkup sisa risiko (*residual risk*) setelah penanganan risiko. Sisa risiko residual harus didokumentasikan, menjadi subjek pemantauan, penelahaan, dan jika diperlukan dilakukan penanganan lebih lanjut.

5. Pemantauan dan Penelaahan

Pemantauan dan penelaahan risiko merupakan suatu bagian terencana dari proses manajemen risiko. Tanggung jawab terhadap kegiatan ini harus ditentukan dengan jelas. Proses pemantauan dan penelaahan risiko mencakup segala aspek proses manajemen risiko dengan tujuan:

a. Analisis dan pembelajaran dari peristiwa, perubahan dan tren risiko;

b. Mendeteksi perubahan dalam konteks eksternal dan *Internal* perusahaan termasuk perubahan pada risiko itu sendiri yang dapat menuntut adanya revisi atau penanganan dan prioritas risiko;

c. Memastikan bahwa proses pengendalian dan cara penanganan risiko efektif, baik dari segi desain maupun operasi;

e. Changing the consequence;

f. Transferring risks, such as with insurance;

g. Accepting risks.

The process of handling risks related with negative consequences is often called as risk mitigation, risk elimination, risk prevention, risk reduction, risk suppression and risk correction.

Risk handling includes identifying options for addressing risks, estimating options, preparing risk management plans, and implementing risk management plans. Risk management options can take the form of risk aversion by deciding not to engage in risk-generating activities, finding opportunities by deciding to engage in activities that will generate or increase risks, eliminate sources of risk, reduce likelihood, reduce consequences, relocate the risks, and accept risks. If risk management options impact risk in other parts of the company, then the affected sections of the handling must be involved in decision making. If resources for risk management are limited, then the handling plan should be clear by prioritizing risk handling that takes precedence.

The Company must realize the nature and scope of residual risk after the handling. The residual risk must be documented and used as monitoring and assessment subject for further follow-up if necessary.

5. Monitoring and Assessment

Risk monitoring and assessment is a planned part of the risk management process. The responsibility for this activity should be clearly defined. The process of risk monitoring and assessment covers all aspects of the risk management process with the objectives of:

a. Analysis and study from events, changes and risk trend;

b. Detect any change in the Company's internal and external contexts, including changes in the risk itself that requires revision or handling and risk priority;

c. Ensure that the control process and the method in handling risk are effective, both in terms of design and operations;

d. Mengidentifikasi risiko-risiko baru.

Pemantauan dan penelahaan yang dilakukan secara periodik sangat penting untuk meyakinkan bahwa rencana manajemen masih tetap relevan dan hasil pemantauan dan penelaahan telah dicatat, serta dilaporkan secara *Intern*al atau eksternal sesuai kebutuhan, sebagai bahan masukan untuk tinjauan terhadap kerangka manajemen risiko.

JENIS-JENIS RISIKO PERUSAHAAN

1. Risiko Persaingan Usaha dan Pemasaran

   Jenis risiko ini merupakan risiko yang dihadapi perusahaan terkait daya saing dalam melakukan persaingan usaha yang menyebabkan kinerja pemasaran tidak berjalan dengan baik.

2. Risiko Pembayaran

   Tertundanya atau tidak dibayarnya biaya proyek oleh pemberi kerja merupakan jenis risiko yang disebabkan adanya penundaan pembayaran dan/atau tidak dibayarnya jasa atau penjualan dari pihak Pemberi Kerja/ Konsumen yang disebabkan oleh berbagai faktor dan berakibat pada timbulnya kerugian dari Perseroan.

3. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar mata Uang

   Merupakan salah satu jenis risiko yang disebabkan adanya fluktuasi nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada pembelian bahan baku produksi atau perubahan nilai transaksi terhadap suatu pekerjaan yang berakibat pada pembengkakan biaya produksi.

4. Risiko Ketidakpastian/Kenaikan harga

   Sama halnya dengan risiko fluktuasi nilai tukar, risiko ketidakpastian/kenaikan harga disebabkan adanya ketidakpastian atas harga bahan baku pokok yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang berakibat pada pembengkakan biaya produksi.

5. Risiko adanya Perubahan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa

   Pasal 89 ayat (2a) – Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

6. Risiko Kurangnya Tenaga Kerja Inti Proyek

   Jenis risiko ini disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja inti perusahaan dengan jumlah proyek yang dikerjakan.

d. Identify new risks.

Periodical monitoring and assessment are important to ensure that the management plan is still relevant and the results are properly recorded and reported internally and externally as advices for review on risk management framework.

TYPES OF RISK OF THE COMPANY

1. Business Competition and Marketing Risk

   This type of risk is a risk faced by the Company related to competitiveness in conducting business competition that causes the performance of marketing is not running properly.

2. Payment Risk

   The delay or non-payment of project cost by the Procuring Entity A type of risk caused by the delay of payment and/or nonpayment of services or sales from the Employer/ Consumer caused by various factors and result in loss of the Company.

3. Currency Fluctuation Risk

   A type of risk caused by fluctuations in currency exchange rates that affect the purchase of production raw materials or changes in the value of transactions on a job that result in the swelling of production cost.

4. Price Uncertainty/Price Risk

   Similar to the risk of exchange rate fluctuations, the risk of uncertainty/price increase is due to uncertainty over the price of basic raw materials originating outside and within the country resulting in swelling of production costs.

5. Risk from the Amendment of Goods and Services

   Procurement Regulation Article 89 paragraph (2a) – Payment for Construction Worker, which is conducted with similar value of the assigned job.

6. Risk of Lack of Main Project Employees

   This type of risk is due to the imbalance of the number of main employees with the total assigned projects

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

RISIKO-RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN UPAYA PENGELOLAANNYA

MAIN RISKS FACED BY THE COMPANY AND THE MANAGEMENT EFFORTS

RISIKO *RISK*	UPAYA PENGELOLAAN RISIKO *RISK MANAGEMENT EFFORT*
Risiko Pembayaran, tertundanya ataupun tidak dibayarnya biaya proyek oleh Pemberi Kerja *(Owner)* *Payment Risk, delay or unpaid project cost by Owner*	Mencantumkan klausul kontrak: - menghentikan pekerjaan senilai sisa uang muka s/d termin dibayar. - memutus kontrak secara sepihak. Hanya melaksanakan pekerjaan sesuai termin yang diperjanjikan. *Include contract clauses: - Stopping the work equivalent with the rest of the down payment until paid term. - Terminating the contract unilaterally.* *Only conducting work based on the agreed term.*
Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang *Risk of fluctuating currency rate*	Melakukan ***Hedging*** dengan memperhitungkan ***cost*** dan benefitnya. *Hedging by estimating cost and benefits.*
Risiko Ketidakpastian/ kenaikan harga *Risk of Price Uncertainty/Hike*	Melakukan kontrak payung pembelian material strategis dan berskala besar. Mengikat calon mitra kerja dengan kontrak atas Proyek yang telah didapat. Memperhitungkan perkiraan inflasi saat melakukan penawaran. Mencantumkan klausul eskalasi pada Kontrak Jangka Panjang (***Multy years Contract***) *Conducting Framework Contract for the purchase of strategic and big scale materials.* *Binding work partner candidates with a contract for the acquired Project.* *Estimating inflation during bidding session.* *Stating escalation clauses on Multi Years Contract.*
Risiko adanya Perubahan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 89 ayat (2a) – Pembayaran untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang *Risk on Changing of Procurement Regulation Article 89 paragraph (2a) – Payment for Construction Work shall have the same value as the conducted work*	Memperhitungkan ***waste*** saat melakukan penawaran, khususnya untuk pekerjaan konstruksi di bawah permukaan tanah. Koordinasi dengan Pihak Pemberi Tugas dan Konsultan Perencana untuk justifikasi, jika kondisirealita di lapangan sangat berbeda dengan disain yang diberikan. *Estimating waste during bidding, especially for underground construction work.* *Coordinating with Task Assigning Party and Planning Consultant for justification if the real condition different from the given design.*
Risiko Kurangnya Tenaga Kerja Inti Proyek *Risk of Lack of Core Project Manpower*	Merekrut tenaga kerja proyek profesional/pengalaman. Melakukan peningkatan kompetensi dengan menjalankan program pendidikan dan pelatihan pada Nindya ***Learning Center.*** *Recruiting professional/experienced project employees.* *Conducting competence development by running an education and training program at the Nindya Learning Center*

EVALUASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko tersebut di atas akan selalu dimonitor dan dievaluasi dengan memperhatikan dinamika kegiatan usaha dan peraturan-peraturan terkait, termasuk memetakan risiko-risiko yang mungkin belum teridentifikasi.

Melalui penerapan sistem manajemen risiko dalam kegiatan operasional, perusahaan memperoleh keakuratan dalam mengidentifikasi risiko industri, keuangan, serta lainnya. Perusahaan juga mampu menjadikan budaya pengelolaan risiko sebagai bagian dari budaya pegawai.

Manajemen risiko telah mewarnai dan berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penguatan penerapan GCG di perusahaan. Sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan mampu meminimalisir

EVALUATION ON RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The above risks will always be monitored and evaluated by taking into accounts the dynamics of related business activities and regulations, including mapping unidentified risks.

Through implementation of risk management system in operational activity, the Company gains accuracy in identifying industrial, financial and other risks. The Company is also able to make risk management culture as part of employee culture.

Risk management has created and given positive contribution in the process of planning, decision making, and strengthening of GCG implementation in the company. The applied risk management system is able to minimize and or push down

dan atau menekan kemungkinan risiko yang akan terjadi. hal ini terlihat dari efektivitas atas kualitas, kuantitas, dan waktu yang tercapai.

Evaluasi implementasi manajemen risiko dilakukan melalui *monitoring* dan *review* risiko. melalui *monitoring* dan *review* risiko, diketahui efektivitas dari rencana pengendalian dan rencana pengendalian lainnya yang akan dilakukan pada periode mendatang. melalui hasil *review* dan memperhatikan perkembangan bisnis serta kebutuhan bisnis di masa mendatang, implementasi manajemen risiko yang saat ini telah dijalankan akan disempurnakan dengan membangun sistem manajemen risiko yang mengacu kepada *framework* atau kerangka kerja CoSo.

Sedangkan evaluasi risiko dilakukan melalui pengelompokkan risiko berdasarkan level risikonya. Pengelompokkan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah peta/profil risiko sehingga terlihat risiko yang mana yang lebih tinggi dibandingkan risiko lain.

risk possibility. This may be identified from the effectiveness on achieved quality, quantity, and time.

The evaluation on implementation of risk management is conducted through risk monitoring and review. Through risk monitoring and review, the effectiveness may be identified from controlling plan and other plans that will be conducted in the future period. Through review result and business development observation as well as future business needs, the current risk management implementation will be enhanced by developing Risk Management System that refers to COSO framework.

Meanwhile, the Risk Evaluation is conducted through risk grouping based on risk level. Such grouping is included into a risk map/profile in order to see which risk that is higher than the other risks.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan tersebut dan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan dan meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis, perusahaan mengupayakan pengembangan Sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan CoSo (*Committee of Sponsoring organizations of threadway Commissions*).

Sistem Pengendalian *Intern*al mencakup:

1. Lingkungan pengendalian *Intern*al dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengolahan risiko usaha
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi;
5. *Monitoring* yang secara operasional dijabarkan lebih lanjut kedalam berbagai kebijakan berupa pedoman, petunjuk operasional maupun instruksi kerja.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian Internal, perusahaan membentuk Unit Audit Internal sebagai pelaksana yang

In order to implement the regulations and increase accountability of each decision and improve transparency and accuracy of business transactions recording, the Company pursues the development of internal control system using COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commissions).

The Internal Control System includes:

1. Internal control environment in the disciplined and structured company;
2. Studies and management of business risks;
3. Control activity;
4. Information and communication system;
5. Monitoring, which is operationally further elaborated into various policies in form of Manual, Operational Guidelines, as well as Work Instruction.

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

To evaluate the implementation of internal control system, the Company has established an Internal Audit Unit to carry out this function. In addition, the Company has formed a special

disebut Satuan Pengawasan *Intern*. Di samping itu perusahaan membentuk Tim Audit Internal khusus untuk menilai keefektifan penerapan sistem terintegrasi. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian Internal menjadi salah satu dasar evaluasi manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian Internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

Berikut tahapan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian *intern* Perseroan:

1. SPI melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian *intern* Perseroan;
2. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada Komisaris;
3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal;
4. Komisaris memberikan penilaian dan masuk terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit dan ruang lingkup audit;
5. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan Tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan Evaluasi adalah:

1. Memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian pernyataan mengenai efektivitas pengendalian *intern* untuk selanjutnya memberikan keyakinan kepada *stakeholder* lain bahwa penerapan Sistem pengendalian *intern* perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkanya itu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, dan efisien/efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Perusahaan di masa yang akan datang (*Areas of Improvement*).

Internal Audit Team to assess the effectiveness of integrated implementation system. Evaluation result on internal control system implementation becomes one of basic management evaluations toward effectiveness of internal control system to determine systems or policies' revision and improvement that enable the management to run company operating activities in a more effective way.

The following are evaluation stages on effectiveness of internal management implementation:

1. The Internal Audit conducts an evaluation on the effectiveness of internal control implementation.
2. Board of Directors follows up audit report conducted by the Internal Audit as well as External Auditor and reports development of the follow-up to the Commissioner.
3. Commissioner monitors follow up development on the audit report of the Internal Audit as well as External Auditor.
4. Commissioner gives assessment and feedbacks on the Internal Audit and External's audit report that includes report materials, audit targets and scope of the audit.
5. Commissioner oversees and monitors compliance of the Board of Directors and management team in implementing legislation.

The aim and purpose of the evaluation are:

1. Ensuring the Board of Directors in provision of assertions on internal control effectiveness, thereby ensure other stakeholders that the implementation of Internal Control System has been sufficient to achieve the desired objectives, namely compliance with applied regulations and laws, availability of correct financial and management information, complete and timely, and efficiency/effectiveness of the Company's business activities.
2. Giving recommendation to the Board of Directors on the improvement on implementation of company internal control system in the future (areas of improvement).

SEKILAS TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT A GLANCE

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari *Internal* seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi usaha dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a place for the Company to build relationships that grow together with stakeholders, both internally, such as management and employees, as well as externally, such as communities around business locations and consumers. Regarding the implementation of CSR, the Company divides it into 4 (four) aspects.

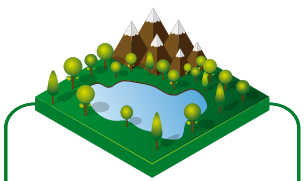

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup

Corporate Social Responsibility related to the environment

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja

Corporate Social Responsibility related to manpower and occupational health and safety

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility related to social and community development

Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada produk/konsumen

Corporate Social Responsibility related to product/consumer responsibility

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM

LITIGATION AND LEGAL CASES

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut,

- Piutang kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (selanjutnya disebut "Bank Kalbar") sebesar Rp Rp909.587.542,- yang dikarenakan Bank Kalbar tidak memenuhi kewajibannya yakni mencairkan Bank Garansi meskipun berdasarkan fakta dan dokumen yang ada PT Jayasinga Muda telah dalam keadaan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang dalam Perjanjian Subkontrak. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Bank Garansi yang telah diterbitkan oleh Bank Kalbar, maka sudah menjadi kewajiban bagi Bank Kalbar untuk mencairkan Bank Garansi

LEGAL CASES

Legal cases faced by the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board Directors throughout 2020 are as follows,

- Receivables to PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (hereinafter referred to as "Bank Kalbar") amounting to Rp909,587,542, which was due to Bank Kalbar not fulfilling its obligation to withdraw the Bank Guarantee even though based on the facts and existing documents PT Jayasinga Muda was in a state of default by not completing the work in accordance with the time period specified in the Subcontract Agreement. Therefore, based on the provisions in the Bank Guarantee issued by Bank Kalbar, it had become the obligation for Bank Kalbar to withdraw the Bank Guarantee; however, until PT Nindya Karya (Persero),

tersebut, namun demikian hingga PT Nindya Karya (Persero) melalui kuasa hukumnya memberikan surat teguran (Somasi), tidak ada itikad baik dari Bank Kalbar untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, PT Nindya Karya (Persero) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sintang dengan register perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Stg. Dalam Putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Bank Kalbar, sehingga gugatan yang diajukan tidak diterima. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut, PT Nindya Karya (Persero) mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Adapun putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut pada pokoknya memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang terdahulu. Berdasarkan berbagai pertimbangan, pada tanggal 1 Maret 2021 PT Nindya Karya (Persero) melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung RI.

through its legal counsel, delivered a letter of warning (somasi), there was no good faith from Bank Kalbar to fulfill its obligations.

With regard to the above, PT Nindya Karya (Persero), through its legal counsel, filed a lawsuit at the Sintang District Court with case registration No. 7/Pdt.G/2020/PN Stg. In their decision, the Panel of Judges at the Sintang District Court stated that they accepted the exception submitted by Bank Kalbar, so that the lawsuit filed was not accepted. Against the decision of the Sintang District Court, PT Nindya Karya (Persero) filed an appeal at the West Kalimantan High Court. The decision from the High Court basically decided to strengthen the previous Sintang District Court decision. Based on various considerations, on March 1, 2021, PT Nindya Karya (Persero) through its legal counsel filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

SANKSI ADMINISTRASI

Di sepanjang tahun 2020 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait baik kepada Perseroan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2020, there has been no administrative sanction imposed by the relevant authorities, either on the Company or the members of Board of Commissioners and Board of Directors.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Perseroan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan maupun kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

SIGNIFICANT CASES OUTSIDE THE LEGAL ASPECT

The Company did not find any significant cases outside of the legal aspects involving the Company and members of Board of Commissioners and Board of Directors.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN: TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI

ACCESS TO COMPANY'S INFORMATION AND DATA: INFORMATION TRANSPARENCY GOVERNANCE

Implementasi terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan Perseroan, Perseroan menyediakan akses informasi data perusahaan dengan jenis informasi dan media yang beragam.

The implementation of transparency principle in the Company's management, the Company provides access to corporate data information with diverse types of information and media.

MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

Media informasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk dapat diakses oleh publik adalah:

INFORMATION SUBMISSION MEDIA

Information media owned by the Company to be accessible to the public are:

JENIS MEDIA *TYPE OF MEDIA*	AKSES *ACCESS*
Situs *Website*	www.nindyakarya.co.id
Portal	
Media Sosial *Social Media*	Twitter : @nindyakarya Facebook : PT NindyaKarya(Persero) Instagram : @nindyakarya
Contact Center	(021) 8093276

Sebagai portal utama akses informasi Perseroan, *website* Perseroan menyajikan beragam materi terkini tentang kegiatan usaha yang dijalankan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Adapun penyajian informasi dalam *website* www.nindyakarya.co.id yaitu:

As the main portal to access the Company's information, the Company's website presents a variety of up-to-date materials on business activities conducted in Indonesian and English. Information presented on the Company's website at www.nindyakarya.co.id is as follows:

KATEGORI *CATEGORY*	MENU FILE *FILE MENU*	KETERANGAN *DESCRIPTION*
Beranda *Home*	Menyajikan informasi aktual Perusahaan dan halaman muka dalam pencarian kategori lainnya *Presents the Company's actual information and home page in other category search.*	
Profil Perusahaan *About the Company*	• *Company* • SPI • *Code of Conduct* • GCG • *Careers* • *Company* • *Internal Audit* • *Code of Conduct* • *GCG* • *Careers*	Menyajikan informasi lengkap Perusahaan dan informasi lainnya seperti regulasi, prinsip dan sistem tata kelola dengan tambahan portal karier. *Presents complete Company information and other information, such as regulations, principles and governance systems with the addition of a career portal.*
Info Bisnis Perusahaan *Company Business*	• Referensi Proyek • Kebijakan Sistem Manajemen • Lokasi Kantor • Sumber Daya • Kolom Inovasi • Informasi Lain • SK Pengelola Informasi Publik • *Project Reference* • *Management System Policy* • *Office Location* • *Resources* • *Innovation Column* • *Other Information* • *SK Public Information Manager*	Menyajikan informasi terkait kapasitas dan kapabilitas bisnis Perusahaan *Presents information related to the Company's business capacity and capability*
PKBL *PKBL*	CSR	Informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Tanggung jawab *Information regarding activities related to social responsibilities*
Berita & Kegiatan *News and Activity*	Informasi tentang kegiatan Perusahaan secara umum. *Information related to Company's activities in general*	
Karir *Career*	Informasi Rekrutment Perusahaan yang dapat diikuti oleh public sesuai persyaratan yang dibutuhkan *Company's Recruitment Information that can be followed by the public according to the requirements needed*	
Hubungi Kami *Contact Us*	Informasi terkait akses atau kontak Perusahaan *Information related to access and contact center of the Company*	
Area Pelanggan *Customer Area*	Akses Khusus kepada Para Pelanggan untuk mengetahui Perkembangan Perusahaan *Special Access for Customers to find out about Company's Development*	
Zona Unduhan *Download Zone*	Informasi Publik yang dapat di akses, seperti ***Company Profile***, Logo, Majalah, Laporan Audited, ***Annual Report***, ***Sustainability*** Report, lain-lain. *Public information that can be accessed, such as company profiles, logos, magazines, audited reports, annual reports, sustainability reports, etc.*	
e-Procurement	Informasi tata cara dan persyaratan menjadi mitra/pemasok/rekanan Perusahaan *Information on procedures and requirements to become partners/suppliers of the Company*	

KORESPONDENSI

Perseroan melakukan berbagai korespondensi kepada beragam pihak melalui Sekretaris Perusahaan. Berikut disampaikan korespondensi yang dilakukan Perusahaan kepada regulator dan pemegang saham di tahun 2020.

1. Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) nomor: S-220/MBU/03/2021 dan nomor : KEP-PS 3A/PPA/0321 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penetapan Batas Nilai dan Jangka Waktu Aksi Korporasi PT Nindya Karya (Persero).
2. Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) nomor: S-16/MBU/01/2020 dan KEP-PS 04/PPA/0120 tanggal 20 Januari 2020 Perihal Perubahan Anggaran Dasar.
3. Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) nomor: S-23/MBU/01/2021 dan KEP-PS1/PPA/0121 tanggal 15 Januari 2021 Hal Persetujuan atas Pembentukan Perusahaan Patungan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Investasi dan Pengelolaan Unit Produksi SPAM Cilacap.

CORRESPONDENCE

The Company conducts a number of correspondences to various parties through the Corporate Secretary. The following is the correspondence made by the Company to regulators and shareholders in 2020.

1. Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. S-220/MBU/03/2021 and No. KEP-PS 3A/PPA/0321 dated March 26, 2021 regarding Determination of Value Limits and Period of Corporate Actions of PT Nindya Karya (Persero).
2. Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. S-16/MBU/01/2020 and No. KEP-PS 04/PPA/0120 dated January 20, 2020 regarding Amendment to the Articles of Association.
3. Resolution of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) No. S-23/MBU/01/2021 and No. KEP-PS1/PPA/0121 dated January 15, 2021 Regarding Approval for the Establishment of a Joint Venture Company Implementing Investment Cooperation and Management of Cilacap SPAM Production Unit

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

Agar visi, misi dan nilai inti serta budaya Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang bersifat artikulatif serta memiliki mekanisme *reward & punishment*. Perseroan telah menyusun Kode Etik atau *Code of Conduct* yang berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh insan Nindya Karya dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode Etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam perusahaan.

In order to ensure the actualization of vision, mission, core values, and corporate culture within the Company, it is necessary to establish a tool that is articulate and has a reward and punishment mechanism. To that end, the Company has compiled a Code of Conduct that serves as a standard behavior guide for all Nindya Karya's personnel in interacting with internal and external parties. The Company's Code of Conduct is introduced to all levels within the Company.

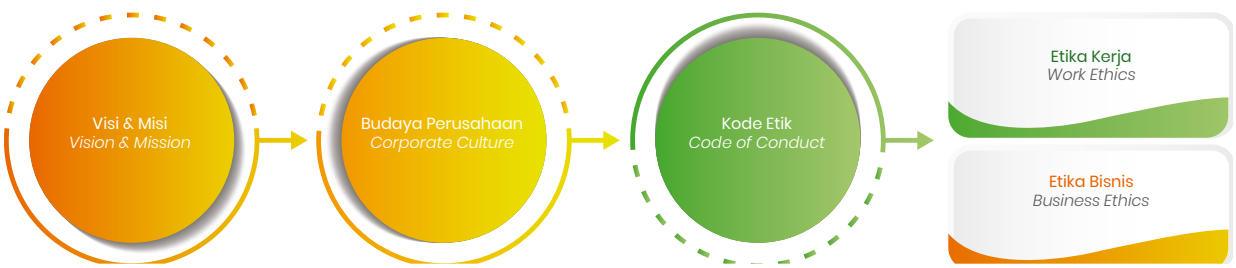

PENETAPAN KODE ETIK DAN PEMBERLAKUAN BAGI SELURUH INSAN NINDYA KARYA

Kode Etik perusahaan sebagaimana yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor:

DETERMINATION OF CODE OF CONDUCT AND ENFORCEMENT FOR ALL PERSONNEL OF NINDYA KARYA

The Company's Code of Conduct, as validated in the Joint Decision of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 and No. 107/

0494/DIRUT/KPTS/SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) memuat pernyataan, ditujukan dan berlaku bagi seluruh insan Nindya Karya tanpa terkecuali.

Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) PT Nindya Karya (Persero), contains a statement that is intended and applicable to all Nindya Karya's personnel without exception.

ISI POKOK-POKOK KODE ETIK

ETIKA KERJA

RUANG LINGKUP ETIKA KERJA

Kinerja dan citra perusahaan sebagai faktor yang memengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis perusahaan sangat berkaitan dengan perilaku seluruh insan perusahaan. Untuk mewujudkan kinerja ekselen dan citra yang baik diperlukan etika kerja yang mengatur hubungan antar individu baik di dalam maupun di luar perusahaan.

NILAI-NILAI UTAMA BUDAYA (CORE VALUES)

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan *(Stakeholders)*, maka seluruh Insan NINDYA memiliki nilai-nilai utama budaya (*Core Values*) sebagai berikut:

CONTENTS OF CODE OF CONDUCT

WORK ETHICS

SCOPE OF WORK ETHICS

Performance and corporate image as factors that influence and determine the smooth running of the Company's business and its continuity are closely related to the behavior of all Company's personnel. To realize excellent performance and a good image, it is necessary to have a work ethic that regulates relationships between individuals, both inside and outside the company.

CORE VALUES

In order to realize the Company's commitment to stakeholders, all NINDYA personnel have the following core values:

AKHLAK

A AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given

K KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continuously learning and developing capabilities

H HARMONIS
Saling peduli dan menghargai perbedaan
Care for each other and value differences

L LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Have dedication and prioritize the interests of the nation and the state

A ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change

K KOLABORATIF
Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic cooperation

ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan sikap dasar perusahaan dalam berbisnis dengan semua *Stakeholders*. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan serta menciptakan nilai tambah (*value creation*) bagi perusahaan dan *Stakeholders*.

1. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Etika hubungan kepada Pemegang Saham adalah:

a. Senantiasa berusaha meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai Pemegang Saham (*Shareholder Value*), seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan dan kepentingan lain.

b. Menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang bisnis guna meningkatkan kemajuan perusahaan.

c. Menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

d. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f. Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;

g. Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. HUBUNGAN DENGAN REKANAN/PEMASOK BARANG DAN JASA

Etika hubungan kepada rekanan/pemasok barang dan jasa adalah:

BUSINESS ETHICS

Business ethics is a company's basic skills in conducting business with the Stakeholders. The Company is committed to relentless development of a long-term and beneficial relationship in order to increase the value creation for the Company and the Stakeholders

1. RELATIONSHIP WITH THE SHAREHOLDER

The relationship ethics with shareholders is as follows:

a. Always strive to optimally and sustainably increase Shareholder Value, such as profit levels, growth rates and other interests.

b. Create and develop business opportunities to improve the company's progress.

c. Make every effort to apply the principles of Good Corporate Governance.

d. Ensure that every shareholder obtains his rights in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, all decisions taken legally in the GMS and the applicable laws and regulations.

e. Provide complete and accurate material information about the Company to each Shareholder in accordance with the applicable laws and regulations.

f. Not take any actions to seek personal gain and other parties by using Company information that is not in the public interest or which may cause a conflict of interest.

g. Always ensure that material information about the company is always provided honestly, on time and regularly to Shareholders in accordance with the prevailing laws and regulations.

2. RELATIONSHIP WITH PARTNERS/ SUPPLIERS OF GOODS AND SERVICES

The relationship ethics with partners/ suppliers of goods and services is as follows:

a. Memelihara komunikasi yang baik dengan pemasok atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perseroan.

b. Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemasok atau rekanan.

c. Bersikap jujur dan adil serta beretika dalam berbisnis dengan pemasok atau rekanan.

d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Memilih calon pemasok atau rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi dan catatan kerja/ prestasi *(track record)* yang baik.

f. Menghindari bisnis dengan pemasok atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

g. Membuat perjanjian/kontrak secara tertulis dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian.

3. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN

Etika hubungan dengan karyawan adalah:

a. Menghargai karyawan sebagai aset perusahaan yang bermartabat tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik, gender dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten.

b. Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi dan pengembangan karier secara adil/wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kompensasi dan hak karyawan diberikan berdasarkan kinerja serta sesuai ketentuan yang berlaku

c. Menciptakan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi kepada seluruh karyawan tanpa membedakan senioritas, *gender*, suku, ras, agama dan golongan.

d. Menyediakan tempat, sarana kerja yang layak dan memelihara lingkungan secara harmonis.

a. Maintain good communication skills with supplier or partner as strategic partners and ensure the availability of good stocks and services that is required for the company operation.

b. Give equal treatment with supplier or partners.

c. Be fair and honest with good manner in conducting business with suppliers and partners.

d. Conduct procurement of goods and services transparently in line with applicable regulations.

e. Appoint supplier or partners that have good reputations, competence and good track record.

f. Avoid conducting business with suppliers or partners that have conflict of interest with government official or other companies that have strong indications of corruption, collusion and nepotism.

g. Create agreement/contract in writing that executes the rights and obligations of each parties in line with such agreement.

3. RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES

The relationship ethics with employees is as follows:

a. Respect staff as company assets that have dignity despite their races, skin color, physics, religion, gender and ages, which the capacities always enhanced through education and consistent training.

b. Apply recruitment system and career development with fair and consistent based on competence that is required by the Company. Compensation and staff right was given based on the productivity and certain applicable provisions.

c. Create equal opportunity in obtaining job and promotion to all employees without differentiating seniority, gender, ethnicity, race, religion, and groups.

d. Provide favorable work facilities, place and maintaining the environment harmoniously.

e. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.

f. Selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi termasuk memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang disabilitas. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan.

g. Menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan, rencana dan kemajuan perusahaan kepada karyawan.

h. Menjaga kebebasan karyawan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada perusahaan tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan cara yang beretika dan sesuai dengan peraturan.

i. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan perusahaan.

j. Menghormati dan menjaga kerahasiaan catatan maupun informasi pribadi karyawan.

k. Kompensasi dan hak karyawan diberikan berdasarkan kinerja serta sesuai ketentuan yang berlaku.

4. HUBUNGAN DENGAN PEMBERI TUGAS/ PEIANGGAN

Etika hubungan kepada pemberi tugas/ pelanggan adalah:

a. Menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis.

b. Menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik serta penyerahan tepat waktu sesuai kontrak kepada pelanggan.

c. Mengutamakan sikap jujur dan beretika dalam berbisnis dengan pelanggan.

d. Memperhatikan keluhan dan masukan dari pelanggan serta memberikan tanggapan sesegera mungkin.

e. Melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha yang memiliki reputasi yang baik.

e. Provide work environment which is free from all pressures (harassment) which may occurs as the result of different character and traditional background.

f. Always uphold work equality, including restriction of discrimination and giving equal treatment to disable employees. The Company provides equal and fair opportunity and treatment to every employee.

g. Provide relevant information on policy, plan, and progress of the Company to employees.

h. Ensure freedom of employees to deliver opinions and aspirations to the Company on policy and company practices with ethics and in accordance with the regulations.

i. Provide rewards to excelled employees and imposing sanctions to employees who neglect their duties or violate the Company's regulations.

j. Respect and keep the confidentiality of personal information and records of employees.

k. Provide compensation and ensure that the rights of the employees are granted based on performance in accordance with the applicable regulations.

4. RELATIONSHIP WITH EMPLOYERS/CUSTOMERS

The relationship ethics with employers/ customers is as follows:

a. Assign customers as strategic partners.

b. Deliver products and services with good quality in time in line with contract to the customers.

c. Prioritize honest and good ethic in business with customers.

d. Take into account the complaints and inputs from customers, as well as giving response immediately.

e. Conduct clear business agreement that benefits both parties in written form with partners that have good reputations.

f. Menjaga kualitas hubungan dan tidak melakukan kerja sama yang dapat merugikan perusahaan, pelanggan maupun masyarakat.

g. Menyediakan layanan pengaduan bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi.

h. Melaksanakan promosi yang berkesinambungan secara sehat, wajar *(fair)*, jujur, mudah dipahami serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

5. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT SEKITAR, MITRA BINAAN DAN IINGKUNGAN

Etika hubungan kepada masyarakat sekitar, Mitra Binaan dan lingkungan adalah:

a. Menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan masyarakat sekitar dan memperhatikan adat istiadat serta aspek sosial masyarakat sekitar.

b. Menerima dan memanfaatkan tenaga kerja sekitar operasional perusahaan tanpa mengabaikan kualifikasi yang dibutuhkan.

c. Proses kegiatan pembangunan dilakukan tanpa memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar dengan implementasi metode yang aman dan ramah lingkungan.

d. Mengalokasikan dana untuk pengembangan mitra binaan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mitra binaan dengan membuat rekaman dan sistem pelaporan.

e. Memperhatikan dan memberikan kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan sesuai kemampuan perusahaan.

f. Menyalurkan pinjaman pada industri kecil dan koperasi (kemitraan) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan keputusan RUPS.

g. Melalui PKBL memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan yang berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan sarana umum serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang dialokasikan oleh RUPS.

h. Memberikan informasi-informasi relevan yang diperlukan masyarakat sekitar pekerjaan mengenai dampak selama pelaksanaan pekerjaan.

f. Control the relationship quality and does not conduct agreement that may disadvantage the company, customers, or the people.

g. Provide complaint channels for customers that are easily accessible and without discrimination.

h. Carry out promotional activities in a sustainable, fair, honest, and understandable manner, that is easily acceptable in accordance with public norms.

5. RELATIONSHIP WITH THE COMMUNITY, FOSTERED PARTNERS, AND THE ENVIRONMENT

The relationship ethics with community, fostered partners and the environment is as follows:

a. Ensure conducive and harmonious relation with the societies and acknowledge the traditional norms and social aspects of the society.

b. Receive and use workforce around the Company without disregarding the required qualifications.

c. Process of building creation is conducted without generating negative impact to societies by implementing safe and environmentally friendly method.

d. Allocate funds, develop partners and the environment in line with applicable regulations also conduct evaluation with partners by create record notes and reporting system.

e. Take into account and give social contributions to society around the Company in line with the Company's ability.

f. Deliver loan to small industry and partners through partnership program and natural preservation in line with GMS decision.

g. Through natural preservation, give assistance to the society as social responsibility of the company in form of natural disaster aid, educational aid, training, health assistance and religious assistance in line with budget allocation that has been established by GMS.

h. Give relevant information that is required by the society related with effect of company working implementation.

i. Peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan.

j. Menghindari segala perkataan, Tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar hukum agama, ras dan golongan.

k. Senantiasa menjaga lingkunan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

6. HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Etika hubungan kepada pemerintah adalah:

a. Mematuhi dan mendukung peraturan perundang- undangan yang terkait dengan operasi perusahaan, termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

b. Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya.

c. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis.

d. Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang beretika dengan pemerintah, sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat diantisipasi dengan baik demi kemajuan dan kelangsungan Perseroan.

e. Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator.

f. Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan regulator, legislator dan instansi terkait lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

g. Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi.

i. Acknowledge and care towards social and economic problems that occurred in the environment.

j. Avoid all statements or actions that can be interpreted as discriminatory to religion, race, and group.

k. Always conserve the environment by minimizing adverse impact on the environment and maintain ecosystem balance while carrying out community empowerment for the sake of sustainable development.

6. RELATIONSHIP WITH THE GOVERNMENT

The relationship ethics with the government is as follows:

a. Obey and support the laws and regulations related to Company's operations, including compliance with tax payment, retributions, employment, preservation and environmental issues.

b. Assist both national and special region program especially in technology, education, social, economy and culture.

c. Does not always utilize good relationship with the government to enhance business opportunities obtained unlawfully.

d. Always communicate and ensure good relationship that have good ethic with the government, hence, every government policies can always be anticipated for the interest and good performance of the company.

e. Avoid the practice of corruption, collusion and nepotism (KKN) in dealing with the Government/Regulator.

f. Foster healthy, harmonious and constructive relationships with regulators, legislators, and other relevant agencies from both the Central Government and Regional Governments.

g. Always comply with the prevailing laws and regulations.

h. Avoid misuse of partnership relationships, among others, by providing meals and gifts for personal gain.

7. HUBUNGAN DENGAN KREDITUR DAN BANK

Etika hubungan kepada Kreditur dan Bank adalah:

a. Melakukan pinjaman dengan kreditur yang resmi dan memiliki reputasi baik, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

b. Mematuhi kewajiban sesuai perjanjian.

c. Menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal.

d. Mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya.

e. Menuangkan kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.

f. Memberikan informasi yang *actual* dan prospektif kepada calon kreditur dan bank.

8. HUBUNGAN DENGAN PESAING

Etika hubungan dengan pesaing adalah:

a. Memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika, sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

b. Menjadikan pesaing sebagai pembanding (*benchmark*) guna meningkatkan kinerja Perseroan.

c. Menghormati keberadaan seluruh pesaing dan menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati.

9. HUBUNGAN DENGAN AUDITOR

Etika hubungan dengan Auditor adalah:

a. Menjamin kebebasan auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan kode etik.

b. Menetapkan penunjukan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Membuat perikatan penugasan audit dengan auditor eksternal secara tertulis.

d. Memperhatikan serta melaksanakan rekomendasi dan saran yang diberikan auditor.

10. HUBUNGAN DENGAN SERIKAT PEKERJA

Etika hubungan dengan Serikat Pekerja adalah:

7. RELATIONSHIP WITH THE CREDITOR AND BANK

The relationship ethics with creditors and banks is as follows:

a. Conduct loan with legitimate creditor and have good reputation also does not have conflict of interest with the company.

b. Obey obligation in line with agreement.

c. Ensure every relation with proper and legal collateral.

d. Control loan effectively in line with its functions.

e. Write agreement in written documents based on good intentions that is beneficial.

f. Give actual and prospective information to prospective creditor and bank.

8. RELATIONSHIP WITH COMPETITORS

The relationship ethics with competitors is as follows:

a. Ensure a healthy and ethical competition level, in line with company rules and the regulations.

b. Have competitors as a benchmark to enhance the company performance.

c. Respect every competitor and ensuring good relation by mutual respect.

9. RELATIONSHIP WITH AUDITOR

The relationship ethics with auditor is as follows:

a. Ensure auditor freedom in exercising their duties in line with standard of profession and ethical code of conducts.

b. Uphold appointment of external auditor in line with applicable provisions.

c. Create auditor obligation with external auditor in written form.

d. Ensure and implement recommendation and inputs given by auditor

10. RELATIONSHIP WITH LABOR ASSOCIATION

The relationship ethics with labor association is as follows:

a. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perseroan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

b. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi Serikat Pekerja yang ada hubungannya dengan kepentingan karyawan dan perusahaan.

c. Tidak melayani perwakilan atau pihak yang mengatasnamakan Serikat Pekerja yang melakukan aktivitas untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan.

d. Memberikan informasi yang relevan tentang kebijakan dan aktivitas perusahaan secara terbuka kepada Serikat Pekerja yang sepenuhnya untuk kemajuan Perseroan.

11. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Etika hubungan dengan Anak Perusahaan adalah:

a. Memastikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) juga dilaksanakan degnan konsisten di tingkat anak Perusahaan

b. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya

c. Setiap hubungan dengan Anak Perusahaan dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan

12. HUBUNGAN DENGAN MITRA USAHA

Etika hubungan dengan Mitra Usaha adalah:

a. Menghindari Kerjasama dengan mitra usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis

b. Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan dalam bekerja sama dengan mitra usaha

c. Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak

d. Mitra Usaha wajib mematuhi semua ketentuan *Internal* yang berlaku di Perusahaan

a. Place labor association as the main partner of the company in order to reach dynamic and harmonious industrial relations.

b. Take into account the labor association's aspiration that has relations with employees and company interest.

c. Serve no representatives or any other parties that use the labor association to conduct personal activity or contradict with the law and obedience of norm.

d. Give relevant information on Company's policies and activities publicly to labor association for the interest of the Company.

11. RELATIONSHIP WITH SUBSIDIARIES

The relationship ethics with subsidiaries is as follows:

a. Ensure that Good Corporate Governance (GCG) is also implemented consistently at the subsidiary level.

b. Always maintain good relations with subsidiaries in an effort to build synergies and improve the image of the Company and its business groups.

c. Every relationship with the subsidiaries is carried out within the framework of a fair and mutually beneficial business relationship.

12. RELATIONSHIP WITH BUSINESS PARTNER

The relationship ethics with business partners is as follows:

a. Avoid cooperation with business partners that carry out unethical business practices.

b. Always maintain good, equal, transparent, and mutually beneficial relationships in cooperating with business partners.

c. Always fulfill the respective rights and obligations in accordance with the contract.

d. Business Partners must comply with all applicable internal regulations in the Company.

e. Mengedepankan asas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan sinergi terbaik pada perusahaan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

13. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA

Etika hubungan dengan Media Massa adalah:

a. Senantiasa berusaha memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha perusahaan

b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya

c. Memperlakukan media massa sebagai mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam kerangka membangun citra perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik.

14. KOMITMEN ATAS HAL-HAL KHUSUS

Pengelolaan catatan, dokumen, liformasi dan penyusunan laporan catatan, dokumen, informasi dan penyusunan laporan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu setiap insan Perseroan:

a. Wajib memelihara dan melindungi catatan, dokumen dan informasi dari penggunaan di luar kepentingan perusahaan.

b. Dilarang memalsukan catatan, dokumen dan informasi perusahaan.

c. Harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk penggunaan/ penyebaran dan pemusnahan catatan, dokumen dan informasi.

d. Karena kedudukan dan profesinya tidak dibenarkan menggunakan catatan, dokumen dan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan perusahaan dan *stakeholders* lainnya.

e. Hanya memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Prioritize the principle of benefit by choosing business partners that provide the best synergy to the Company and are free from corruption, collusion, and nepotism (KKN) practices.

13. RELATIONSHIP WITH MASS MEDIA

The relationship ethics with mass media is as follows:

a. Always strive to provide correct, relevant, balanced and educative information to the public in understanding the Company's business.

b. Receive and follow up on constructive criticism submitted through the mass media while taking into account the risk and cost aspects.

c. Treat the mass media as business partners to convey information about the Company openly and responsibly within the framework of building a positive corporate image while respecting the journalistic code of ethics.

14. COMMITMENT FOR SPECIAL CIRCUMSTANCES

Management of notes, documents, information and creation of report must be held responsibly, accurately, and timely. Furthermore, all Company's employees:

a. Are obliged to control and protect notes, documents, and information from users outside of the company interest.

b. Are prohibited from falsifying notes, documents, and Company's information.

c. Are required to get agreement from competent official to use/spread and dismiss notes, documents and information.

d. Are not justified to use notes, documents and information from the Company, due to their position and profession, for personal interest that can give disadvantages to the Company and other stakeholders.

e. Can only provide data that can be held responsible.

f. Record data and create report based on competent sources, verification of such information and can be held responsible.

g. Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, jelas, tepat isi dan tepat waktu, serta relevan untuk proses pengambilan keputusan.

h. Tidak menyembunyikan data dan dokumen Perseroan, baik ketika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas/jabatannya.

i. Tidak membiarkan catatan yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum.

j. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perseroan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu- waktu oleh semua pihak yang berkepentingan.

k. Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan *Intern*al Perseroan.

l. Melindungi informasi rahasia, bukan hanya insan NINDYA yang masih aktif bekerja tetapi juga berlaku bagi insan NINDYA yang sudah tidak bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

m. Pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas insan NINDYA yang dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus.

n. Penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan informasi perusahaan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk perusahaan.

o. kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk: tujuan perusahaan, penagihan piutang perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, tujuan hukum persidangan atas kasus pidana, tujuan pengadilan dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya, pertukaran informasi antar perusahaan, permintaan tertulis tentang persetujuan yang diberikan oleh *Stakeholders* kepada perusahaan.

15. PENGAMANAN HARTA PERUSAHAAN

Tanggung jawab pengamanan harta perusahaan merupakan kewajiban setiap insan perusahaan, untuk itu setiap insan perusahaan:

a. Menjaga, melindungi, memelihara dan menggunakan harta benda perusahaan dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai ketentuan.

g. Give report in accurate, complete, concise, shorts and in time related with such relevance in decision-making process.

h. Hide no data, and company documents either when held positions or after pension.

i. Shall not let any false notes or transactions that breach the law.

j. Keep every documents, report and files from the company in order, hence it could be easy to be found and used in the future by every interest parties.

k. Conduct report documentation in line with company internal policies

l. Protect confidential information, not only NINDYA personnel who are still actively working but also applies to NINDYA personnel who have not worked for a certain time in accordance with applicable laws and regulations.

m. Make arrangements regarding the authority and scope of duties of NINDYA personnel who can access the required Company information, either general or specific.

n. Provide explanations regarding the disclosure or use of confidential company information in the form of speech or writing to or by any party, whether individuals, companies, associations, or other legal entities, can only be made by officials appointed by the Company.

o. This obligation to maintain confidentiality is excluded for: Company purposes, collection of Company receivables that have been delegated to the State Receivables and Auction Agency/State Receivable Affairs Committee, legal purposes of trial in criminal cases, court purposes in cases between the Company and its business partners, exchange of information between companies. , a written request for approval given by the Stakeholders to the Company.

15. SECURING COMPANY ASSETS

The responsibility in securing company asset was obligation from every company individuals, for that reason, every individual is obliged to:

a. Protect, preserve, and use company assets in line with company regulations.

b. Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta perusahaan untuk kepentingan di luar kepentingan Perusahaan.

c. Menjaga dan menghargai hak milik intelektual *(intellectual property rights)* yang dimiliki dan digunakan Perusahaan.

d. Menjaga rahasia-rahasia Perusahaan yang meliputi: desain, dokumen atau informasi sensitif yang merupakan milik perusahaan.

e. Tidak dibenarkan dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak harta benda perusahaan.

16. BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) didefinisikan sebagai situasi atau kondisi dimana Insan NINDYA yang karena jabatan/ posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil keputusan tersebut bagi perusahaan.

Setiap Insan NINDYA berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan perusahaan, untuk itu:

a. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apapun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

b. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluargan, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan

c. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris, Komite Audit dan Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan dari kegiatan BUMN yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai Anggota Komisaris, Komite Audit dan Anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS/ Pemilik Modal

d. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan mengenai benturan kepentingan, sehingga dapat bertindak secara *independent* dalam arti tidak mempunya

b. Does not use and exploit company asset outside of company interest.

c. Protect and respect intellectual property rights that is owned and used by the Company.

d. Keep company secrets including: design, documents or sensitive information's that is owned by the company.

e. Does not justified due to such reason destroy company assets.

16. CONFLICT OF INTEREST

Conflict of Interest is defined as a situation or condition in which NINDYA Personnel who, because of their position/position, have the potential to be misused either intentionally or unintentionally for other interests so as to affect the quality of their decisions and the performance of the results of these decisions for the Company.

Every NINDYA Personnel is obliged to put the interests of the Company first and avoid conflicts of interest in various forms with the Company, for that:

a. Not allowed to hold any concurrent positions outside the Company which may cause a conflict of business interest with the Company, except in relation to employee cooperatives as regulated in the laws and regulations

b. It is not allowed to conduct business ties personally or involve family, with other parties that may cause a conflict of business interest with the Company

c. Members of the Board of Commissioners/ Board of Commissioners, Audit Committee and Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest and taking advantage of the activities of the BUMN they manage other than salaries and facilities as members of the commissioners, Audit Committees and Members of the Board of Directors, which are determined by the GMS/Capital Owners

d. Members of the Board of Commissioners/ Board of Commissioners and Members of the Board of Directors are required to make a statement regarding the conflict of interest, so that they can act independently

kepentingnan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis

in the sense that they have no interests that can interfere with their ability to carry out their duties independently and critically.

e. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan dan perseroan lain, termasuk setiap perubahannya

e. Members of the Board of Commissioners/ Board of Commissioners and Members of the Board of Directors are required to report to the Company regarding their share ownership and or their families in the Company and other companies, including any changes thereto

f. Apabila Insan NINDYA yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut

f. If NINDYA Personnel with potential and/or already in a Conflict of Interest situation are PROHIBITED to continue activities/carry out duties and responsibilities related to the Conflict of Interest situation. Henceforth, the person concerned may resign from his/her duties with the potential for a Conflict of Interest or decide not to be involved in the decision-making process related to activities that contain a Conflict of Interest as referred to, unless with certain considerations that solely for the benefit of the Company, the Board of Directors may ask the person concerned to continue to carry out his duties and responsibilities in these activities.

g. Perangkapan jabatan yang berpotensi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) oleh Insan NINDYA dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut

g. Multiple positions with the potential for a Conflict of Interest (Conflict of Interest) by NINDYA Personnel are possible as long as there are Company policies and regulations governing this matter.

h. Insan NINDYA yang berpotensi dan atau telah berada dalam benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung

h. NINDYA personnel who have the potential and/or are already in a Conflict of Interest are required to make a Statement Letter of Potential Conflict of Interest with respect to the said Condition to their immediate superior.

i. Insan NINDYA juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

i. NINDYA personnel are also required to make a Statement of Potential Conflict of Interest if they have a blood relationship in the nuclear family relationship with members of the Board of Directors and/or members of the Company's Board of Commissioners.

17. KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dalam arti luas yakni meliputi uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,

17. GRATIFICATION CONTROL COMMITMENT

Gratification is the giving and/or receiving of gifts/souvenirs in a broad sense which includes money, goods, rebates, interest-free loan commissions, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities, whether carried out domestically.

baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Insan NINDYA (Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan) terkait dengan jabatan, wewenang dan tugasnya di Perusahaan.

Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) dalam mengendalikan Gratifikasi dituangkan di dalam Kebijakan Gratifikasi:

a. DILARANG memberikan dan/atau menawarkan dan/atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada dan/atau dari pelanggan dan/atau Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, mempengaruhi independensi, objektifitas maupun profesionalitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerimaan barang yang cepat kadaluarsa (missal: makanan dan minuman) wajib segera diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.

c. Apabila Insan NINDYA (Persero) terpaksa dan/atau tidak terhindarkan menerima Gratifikasi Ilegal, maka wajib segera melaporkan penerimaan tersebut kepada atasan langsung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan.

d. Bagi atasan yang menerima laporan Gratifikasi Ilegal agar segera berkoordinasi dengan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk direkapitulasi kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan.

e. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kebijakan Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan

18. AKTIVITAS POLITIK DAN SOSIAL

a. Tidak memanfaatkan nama, asset, dan potensi perusahaan untuk tujuan politik tertentu

b. Tidak mengatasnamakan perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama perusahaan kepada Partai Politik manapun

as well as abroad, using electronic means or without electronic means carried out by NINDYA Personnel (Board of Commissioners, Directors and employees) related to their positions, authorities and duties in the Company.

The commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) in controlling Gratification is stated in the Gratification Policy:

a. It is PROHIBITED to give and/or offer and/or receive, directly or indirectly, anything of value to and/or from customers and/or Civil Servants and/or State Administrators to influence or in return for what they have done and other matters that may cause a conflict of interest, affect independence, objectivity and professionalism, in accordance with the provisions of laws and regulations.

b. Receipt of goods that expire quickly (eg food and beverages) must be immediately submitted to Social Institutions by submitting proof of delivery to the Gratification Control Unit (UPG) Team no later than 14 (fourteen) days after the date of receipt.

c. If NINDYA personnel are forced and/or unavoidable to accept Illegal Gratification, then they must immediately report the receipt to their immediate supervisor no later than 7 (seven) days from the date of receipt.

d. For superiors who receive Illegal Gratification reports, immediately coordinate with the Gratification Control Unit (UPG) Team for recapitulation and then report to the Corruption Eradication Commission (KPK) no later than 30 (thirty) days from the date of receipt.

e. Violation of the provisions in this Gratification Policy will be subject to sanctions in accordance with the applicable provisions and regulations in the Company

18. POLITICAL AND SOCIAL ACTIVITIES

a. Not take advantage of the Company's name, assets, and potential for certain political purposes

b. Not use the name of the Company or contribute on behalf of the Company to any Political Party

c. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun

d. Melakukan setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan social diluar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan

e. Mengajukan pengunduruan diri dari Perusahaan, apabila menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di Perusahaan

f. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan perusahaan

g. Tidak menggunakan atribut partai politik atau organisasi social kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan.

19. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA

a. Patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten.

b. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan.

c. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiappermasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.

d. Tidak melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perseroan.

20. MENGHINDARI TERJADINYA KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI *(INSIDER TRADING)*

Insan Nindya Karya yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual atau menahan saham Perseroan.

c. Not make any understanding, engagement, statement either directly or indirectly which can show that the Company has an attachment to any political party

d. Carry out every activity to channel political aspirations and social activities outside of working hours and do not use Company attributes

e. Submit resignation from the Company if holding a position in a political party or political activity that will interfere with his duties at the Company

f. Not carry out political activities either directly or indirectly within the company

g. Not use the attributes of political parties or social organizations affiliated with political parties in the Company's work environment.

19. OBEDIENCE WITH THE LAW, REGULATIONS AND OTHER PROVISION

a. Obedience towards applicable law regulations and implement it consistently.

b. Avoiding every act and behavior that may breach law and norms.

c. Prioritizing settlement of dispute through forum discussion in every issues and if such decision does not reached, process of law will be mandatory applicable to be respected.

d. Does not conduct agreement that is against the law or other parties that may disadvantages the company.

20. AVOIDING CONFLICT OF INTEREST (INSIDER TRADING)

PT Nindya Karya (Persero) individuals that have access to material information does not allowed to abuse it authority and work by revealing material information that may affect investor decision. Material information was material that has not yet published broadly and could encourage someone to buy, sell or hold company stocks.

21. KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Setiap Insan NINDYA maupun anak Perusahaannya yang telah memenuhi kriteria sebagai karyawan yang wajib melaporkan LHKPN harus melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai sikap patuh dan Tindakan untuk menjauhkan persepsi negative terhadap Perusahaan. Ketentuan tentang LHKPN di atur dalam Surat Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero).

22. ANTI SUAP DAN DONASI

a. Insan NINDYA harus tunduk pada Undang-Undang anti penyuapan (anti korupsi) dan tidak diperbolehkan untuk meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau membayar suap

b. Antisuap merupakan kebijakan untuk menjadikan Perusahaan sebagai suatu Perusahaan Antisuap dalam arti tidak melakukan praktik suap dalam menjalankan usaha

c. Anti suap merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud untuk meningkatkan kesadaran Insan NINDYA agar tidak melakukan korupsi dan menyelamatkan uang dan asset Negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan system

d. Pemberian/penerimaan donasi dalam bentuk penghargaan, sumbangan social, peristiwa bencana, abntuan kemanusiaan, Pendidikan, organisasi.

23. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

a. Pelaksanaan *Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh insan Perseroan. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka insan NINDYA wajib melaporkannya kepada:*

- Tim Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Tim GCG)
- Atasan Langusng
- Tim Pemantau Pelaksanaan *Whistle Blowing Sistem* (WBS)
- Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

21. OBLIGATION OF STATE ADMINISTRATOR WEALTH REPORT (LHKPN)

Every NINDYA Personnel and its subsidiaries who have met the criteria as employees who are required to report LHKPN must implement these provisions as mandated by the applicable laws and regulations, as an attitude of obedience and action to distance negative perceptions of the Company. Provisions regarding LHKPN are regulated in the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero).

22. ANTI-BRIBERY AND DONATIONS

a. NINDYA personnel must comply with the anti-bribery (anti-corruption) law and are not allowed to request, accept, offer, promise or pay bribes

b. Anti-bribery is a policy to make the Company an Anti-bribery Company in the sense of not engaging in bribery practices in running the business

c. Anti-bribery is a policy to prevent and eliminate opportunities for corruption to develop. Prevention is intended to increase awareness of NINDYA personnel so that they do not commit corruption and save money and state assets. Opportunities for the development of corruption can be eliminated by making improvements to the system

d. 4.Giving/receiving donations in the form of awards, social donations, disaster events, humanitarian assistance, education, organizations.

23. CODE OF CONDUCT VIOLATION REPORTING MECHANISM

a. Implementation of the Code of Conduct is a commitment and responsibility of all Company personnel. If there is a deviation or violation, then NINDYA personnel must report it to:

- Monitoring Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Team)
- Direct Boss
- Monitoring Team for Whistle Blowing System (WBS) Implementation
- Gratification Control Unit (UPG) Team

b. Pengungkapan harus dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

c. Perseroan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perseroan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

d. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat. Khusus untuk pelaporan pelanggaran melalui *Whistle Blowing System*, pelapor dapat membuat pelaporan menggungakan nama anonim, namun demikian untuk memudahan tindak lanjut pelaporan disarankan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas.

e. Pelaporan pelanggaran disertai dengan bukti pendukung yang relevan

f. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor

g. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku

h. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Disclosure must be in good faith and not a personal complaint against a certain company policy (grievance) or based on bad will/slander.

c. The Company is obliged to follow up on reports that have the potential to be materially detrimental and may damage the Company's image, among others caused by irregularities, manipulation and so on.

d. The reporter is obliged to state his/her identity clearly in the report made. Specifically for reporting violations through the Whistle Blowing System, the reporter can make a report using an anonymous name, however, to facilitate follow-up reporting, it is recommended to clearly state the identity of the reporter.

e. Reports of violations are accompanied by relevant supporting evidence

f. The recipient of the report must keep the identity of the reporter confidential

g. The company is obliged to follow up on every report received in accordance with applicable procedures and mechanisms

h. The company will also provide legal protection in accordance with the applicable laws and regulations.

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Kode Etik ini berlaku untuk seluruh jajaran Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan *Code of Conduct* ini diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SCOPE OF CODE OF CONDUCT

This Code of Conduct applies to the entire components of Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company. This Code of Conduct is announced to be understood and implemented properly.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Penyebaran dan Sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh karyawan dilakukan dengan kewajiban membaca pedoman yang telah ditetapkan dan membuat pernyataan kepatuhan bahwa telah membaca dan memahaminya serta untuk selanjutnya diimplementasikan dengan dikoordinir oleh Sekretariat Perusahaan.

Sebagai wujud kepatuhan dan integritas sekaligus sebagai implementasi dari komitmen terhadap pelaksanaan Pedoman *Code of Conduct* ini, maka menjadi kewajiban individu untuk menandatangani pernyataan kepatuhan dan integritas atas pedoman ini.

CODE OF CONDUCT DISSEMINATION

Dissemination and Socialization of Code of Conduct to all workers are conducted with obligation to read guidelines already stipulated and make a statement of Compliance that that they have read and understood it and for further implemented under coordination of Corporate Secretary.

As a form of compliance and integrity as well as the implementation of commitments to the implementation of the Code of Conduct Guidelines, it is the duty of individuals to sign a statement of compliance and integrity on the guideline.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pemberian sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan oleh Pemegang Saham.
3. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.
4. Apabila mitra kerja atau *(Stakeholders)* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Di sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan Nindya Karya.

PAKTA INTEGRITAS

Seluruh insan Nindya Karya senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada Kode Etik dan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan atas kepahaman substansi aturan yang tersaji di dalam Kode Etik Perusahaan yang ditandatangani oleh masing-masing individu serta bertanggung jawab atas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dalam meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan telah melakukan beberapa upaya pencegahan meliputi:

1. Infomasi ketentuan etika kerja dan etika bisnis seluruh insan Nindya Karya agar terhindar dari prilaku penyimpangan khususnya tindak pidana korupsi dalam kode etik Perusahaan yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor : 0494/DIRUT/SEKPER/11/2020 dan 107/Kom/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero).
2. Ketentuan mengenai kebijakan gratifikasi yang menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang disahkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

SANCTIONS FOR VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

1. Sanctions for violations of the Code of Conduct committed by employees are given by the Board of Directors or authorized officials in accordance with applicable regulations.
2. The sanctions for violations committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be decided by the Shareholders.
3. Sanctions are given after real evidence is found of a violation of this guideline.
4. If a work partner or other stakeholder commits a violation, the provisions as stated in the contract will be imposed. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

TOTAL VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

Throughout 2020, there has been no violation of the Code of Conduct performed by Nindya Karya employees.

INTEGRITY PACT

All Nindya Karya's people always maintain integrity in carrying out business activities based on the Code of Conduct and applicable regulations. The commitment is set forth in the form of a statement regarding the understanding of the substance of the rules presented in the Company's Code of Conduct signed by each individual and responsible for any form of violation committed.

ANTI-CORRUPTION POLICY

In minimizing the potential for criminal acts of corruption in carrying out business activities, the Company has taken several preventive measures including:

1. Information on the provisions of Work Ethics and business ethics for all Nindya Karya employees to avoid deviant behavior, especially corruption in the Company's Code of Ethics which was ratified in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) number: 0494/DIRUT/SEKPER/ 11/2020 and 107/Kom/11/2020 dated November 16, 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero).
2. Provisions regarding the gratification policy that raises the potential for criminal acts of corruption to be ratified in Law no. 20 of 2001 Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Keputusan Kesepakatan Penerapan Pedoman Gratifikasi Perusahaan Pada tanggal 15 September 2020 yang telah disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/Kom/09/2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) dengan memberlakukan Pedoman Penanganan Gratifikasi Revisi 0.2

Eradication of Criminal Acts of Corruption and Company Regulations as stated in the Decision on the Agreement to Implement Corporate Gratification Guidelines on September 15, 2020 which has been ratified in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Nindya Karya (Persero)) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/Kom/09/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) by enforcing the Guidelines for Handling Gratification Revision 0.2

PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK DAN KETERLIBATAN PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN POLITIK

Sikap perusahaan terhadap aktivitas sosial dan politik tercantum dalam pedoman *Code of Conduct* Perseroan yang berisi:

1. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan potensi Perseroan untuk tujuan politik tertentu.
2. Tidak mengatasnamakan Perseroan atau memberikan konstribusi atas nama Perseroan kepada partai politik.
3. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidakl angsung yang dapat menunjukan bahwa Perseroan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
4. Melakukan setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik dan kegiatan sosial di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perseroan.
5. Mengajukan pengunduran diri dari Perseroan, apabila menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang mengganggu tugasnya di Perseroan.
6. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perseroan.
7. Tidak menggunakan atribut partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perseroan.

FULFILLMENT OF POLITICAL RIGHTS AND COMPANY INVOLVEMENT IN POLITICAL ACTIVITIES

The Company's attitude towards social and political activities is stated in the Company's Code of Conduct guidelines which contain:

1. Not take advantage of the Company's name, assets, and potential for certain political purposes
2. Not use the name of the Company or contribute on behalf of the Company to any Political Party
3. Not make any understanding, engagement, statement either directly or indirectly which can show that the Company has an attachment to any political party
4. Carry out every activity to channel political aspirations and social activities outside of working hours and do not use Company attributes
5. Submit resignation from the Company if holding a position in a political party or political activity that will interfere with his duties at the Company
6. Not carry out political activities either directly or indirectly within the company
7. Not use the attributes of political parties or social organizations affiliated with political parties in the Company's work environment.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATON COTROL

DEFINISI DAN LATAR BELAKANG

Perseroan mendefinisikan gratifikasi sebagai sebuah kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/ cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan oleh insan Perseroan terkait dengan wewenang/ jabatannya di perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme insan perusahaan.

Perseroan menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak dapat dihindarkan hubungan dan interaksi antara para pihak, baik secara *Intern*al maupun eksternal, untuk menjalin kerja sama dan hubungan harmonis dan berkesinambungan. Dalam kerja sama tersebut, tidak dapat terhindarkan pula kemungkinan adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. oleh karenanya, guna menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, Perusahaan mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya.

Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang banyak berinteraksi dengan pihak luar tentunya tidak dapat dihindarkan atas potensipotensi pemberian atau memberi gratifikasi. meskipun perusahaan telah membentuk kode etik yang memuat tata hubungan yang patut dengan pihak eksternal, perusahaan kembali memperkuat serta merinci aturan atas kegiatan gratifikasi ke dalam Kebijakan Gratifikasi yang terkandung dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) nomor: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 dan 87/kom/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Nindya Karya (Persero) dengan memberlakukan buku Pedoman Penanganan Gratifikasi Revisi 0.2.

Di dalam aturan tersebut tercantum berbagai materi yang mengatur hal-hal terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya.

Perseroan memiliki kebijakan yang ketat atas kegiatan gratifikasi dalam hal melakukan kegiatan tersebut atau menerima pemberian gratifikasi dengan alasan apapun. Aturan mengenai gratifikasi tertuang dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

DEFINITION AND BACKGROUND

The Company defines gratification as an activity of giving and/or receiving gifts/souvenirs and entertainment, whether received domestically or abroad, which is carried out by the Company's personnel in relation to their authority/position in the Company, so that it can create a conflict of interest that affects independence, objectivity and professionalism of the Company's personnel.

The Company realizes that in the implementation of business activities, relationships and interactions between parties, both internally and externally, are unavoidable to establish harmonious and sustainable cooperation and relationships. In this cooperation, the possibility of giving gratuities from one party to another is also unavoidable. Therefore, in order to maintain business relationships with stakeholders, the Company regulates matters related to gratuities and the procedures or reporting mechanisms.

The implementation of the Company's business activities that interact a lot with outside parties cannot be avoided due to the potential for giving or giving gratuities. Although the Company has established a Code of Ethics which contains proper relations with external parties, the Company has again strengthened and detailed the rules for gratification activities into the Gratification Policy contained in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Nindya Karya (Persero) number: 0489/DIRUT/KPTS/SEKPER/09/2020 and 87/kom/09/2020 dated 15 September 2020 regarding Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of PT Nindya Karya (Persero) by enforcing the Revision 0.2 Gratification Handling Guidelines book.

The regulation contains various materials that regulate matters related to gratification and the procedures or reporting mechanisms.

The Company has a strict policy on gratification activities in terms of carrying out such activities or receiving gratuities for any reason. The rules regarding gratification are contained in Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and Decree of the Secretary of

Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 parameter 12 tentang gratifikasi. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa setiap insan Nindya Karya dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengendalikan gratifikasi antara lain sebagai berikut:

a. Penolakan Gratifikasi

   Insan NINDYA apabila ditawarkan /diberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengn ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara yang santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada pihak pemberi dan WAJIB MELAPORKAN PENOLAKAN atas Gratifikasi tersebut, kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Perusahaan atau Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Insan NINDYA yang bersangkutan juga dapat meminta kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk membantu menjelaskan mengenai pedoman ini sebagai bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan /memberikan gratifikasi.

b. Pemberian Gratifikasi

   Semua Insan NINDYA DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung menjanjikan dan/atau memberikan gratifikasi kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing PT Nindya Karya (Persero) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan'atau tidak melakukan suatu hal berkaitan degnan kedudukan/jabatannya.

c. Penerimaan Gratifikasi

   Semua Insan NINDYA yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti), DILARANG untuk menerima atau meminta baik secar alangsung atau tidak lansung Gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing PT Nindya Karya (Persero), yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibernarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi Insan NINDYA untuk melakukan dan/atau tidak melakukan

the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 Indicator 5. The company implements a gratification control program in accordance with applicable regulations about gratuities. In the Rules it is stated that every Nindya Karya employee is prohibited from receiving gratification in any form. Every receipt of gratuity that is considered a bribe must be reported to the Corruption Eradication Commission (KPK).

The commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors in controlling gratuities has the following basic principles:

a. Gratification Rejection

   NINDYA personnel, if offered/given gratuities that are not in accordance with the provisions set forth in this Guideline, are obliged to REFUSE in a polite manner to the said offer/gift, by providing an explanation of these policies and rules to the giver and MUST REPORT THE REJECTION of the Gratification, to the Corporate Gratification Control Unit or the Corruption Eradication Commission's Gratification Control Unit. The NINDYA personnel concerned can also ask the Gratification Control Unit to help explain this Guideline as a form of socialization to parties offering/giving gratuities.

b. Giving Gratification

   All NINDYA Personnel are PROHIBITED either directly or indirectly promising and/or giving Gratification to any party who has a business relationship or competitor of PT Nindya Karya (Persero) which aims to obtain information, or something that is not justified by the applicable laws and regulations. , or to influence the said party to do and or not to do something related to his position/position.

c. Gratification Receipt

   All NINDYA Personnel who because of their positions and/or family members (nuclear family), are PROHIBITED to accept or request either directly or indirectly Gratificatio n from any party who has a business relationship or competitor of PT NINDAY AKRYA (Persero), which aims to obtain information, or something that is not justified by the applicable laws and regulations, or to influence NINDYA Personnel to do and/or not to do something related to their position/position, and to

suatu hal berkaitan dengan kedudukan/ jabatnnya, serta menerima apapun dari pihak lain yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan Undang-undang dan peraturan perusahaan yang berlaku.

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai pedoman bagi Insan NINDYA untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi di perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Insan NINDYA dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifiikasi di perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Memberikan arah dan acuan bagi pegawai Insan NINDYA mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

Gratifikasi dalam kedinasan adalah pemberian gratifikasi kepada pegawai perusahaan dalam melaksanakan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil perusahaan.

KLASIFIKASI GRATIFIKASI

1. Gratifikasi yang dianggap suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap/gratifikasi illegal apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan NINDYA di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan NINDYA.

b. Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja keapda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal penerimaan Gratifikasi

Beberapa jenis Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Uang atau setara uang yang diberikan kepada Insan NINDYA sebagai ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegaitan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan NINDYA yang bersangkutan.

accept anything from other parties that deviates from the provisions of the law and applicable company regulations.

PURPOSES, OBJECTIVES, AND BENEFITS

1. As a guideline for NINDYA Personnel to understand, prevent and overcome gratification in the Company.
2. As a guideline for NINDYA Personnel in taking a firm attitude towards gratification in the Company to realize good Company management.
3. Realizing Company management that is free from all forms of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).
4. Provide direction and reference for NINDYA personnel regarding the importance of compliance with reporting gratifications for the protection of themselves and their families from the opportunity to be charged with bribery.

Gratification in service is the granting of Gratification to Company employees in carrying out the services assigned to them as representatives of the Company.

CLASSIFICATION OF GRATIFICATION

1. Gratification that is considered as bribes

A Gratification will turn into a criminal act of bribery/illegal gratification if it fulfills the following elements:

a. The gratification is related to the authority/ position of NINDYA Personnel in the Company, so that it may cause a conflict of interest that affects the independence, objectivity, and professionalism of NINDYA Personnel.

b. The gratuity is not reported within 30 (thirty) working days to the Corruption Eradication Commission (KPK) from the date of receipt of the gratuity.

Several types of Gratification will turn into a criminal act of bribery if they meet the following criteria:

a. Money or the equivalent of money given to NINDYA personnel as a thank you from other parties, in connection with the selection or completion of a job or other activity in the context of carrying out the duties and positions of the relevant NINDYA Personnel.

b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebaga itanda terima kasih yang diterima Insan NINDYA dari pihak lain terkait dengan prose pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau proses persetujuan atau pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut.

c. Pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan kenaikan pangkat dan jabatan baru Insan NINDYA yang biasanya dilakukan sebagai tanda perkenalan.

d. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan NINDYA yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum

e. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/persentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan NINDYA yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum

f. Makanan, minuman dan hiburan yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan NINDYA yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan

g. Memberikan fasilitas transportasi, akomodadi, uang atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan NINDYA yang bersangkutan di Perusahaan pihak lain, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukkan langsung atau undangan dari pihak lain.

h. Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkati dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan NINDYA di perusahaan pihak lain, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan NINDYA tersebut.

i. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan NINDYA oleh pihak lain pada saat melakukan pemeriksanaan kerja pihak lain oleh tim yang ditugaskan oleh PT Nindya Karya (Persero)

j. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/ atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olah raga, voucher hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan NINDYA di perusahaan pihak

b. Unofficial gifts in the form of money or cash equivalent as a token of gratitude received by NINDYA Personnel from other parties related to the process of examining the feasibility of the work or the process of approval or monitoring of the work of the other party

c. Giving in any form from other parties in connection with promotions and new positions of NINDYA Personnel which is usually done as a sign of introduction.

d. Loans from Banks or other Financial Institutions received due to personal relationships, position and authority of the relevant NINDYA Personnel and are not applicable to the general public

e. Opportunities or benefits including the amount/percentage of special interest or commercial discounts received by the NINDYA Personnel concerned and do not apply to the general public

f. Food, drinks and entertainment provided specifically, due to the position or authority of the NINDYA Personnel concerned, which is carried out outside and not related to official duties

g. Providing transportation facilities, accommodation, money or money equivalent in connection with the implementation of the duties and obligations of the NINDYA Personnel concerned in other party companies, which are carried out based on direct appointments or invitations from other parties.

h. The provision of entertainment, tour packages, vouchers, which are carried out in connection with the implementation of the duties and obligations of NINDYA Personnel in the Company of other parties, which are irrelevant or have nothing to do with the purpose of the assignment of the NINDYA Personnel.

i. Meals, accommodation and other facilities provided to NINDYA Personnel by other parties when conducting inspections of the work of other parties by a team assigned by PT Nindya Karya (Persero)

j. Accommodation, facilities, equipment and/or vouchers including but not limited to airline tickets, hotel vouchers, sports, entertainment vouchers carried out in connection with the implementation of the duties and obligations of NINDYA Personnel

lain yang tidak relevan/tidak beruhubungan dengan maksud penugasan Insan NINDYA tersebut.

k. Pemberikan fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan NINDYA yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh pihak lain yang dilakukan pada saat pelaksanan tugas dan kewajiban penugasannya.

l. Pemberian kepada Insan NINDYA, sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, kelulusan, khitanan dan lainnya, yang diberikan oleh Pihak lain, dengan nilai materiilnya dalam mata uang rupiah melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

m. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/ catering dari pihak lain pada saat Insan NINDYA yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan penikahan, ulang tahun dan kelulusan, khitanan dan lainnya

n. Pemberian bingkusan/parsel dalam bentuk apapun kepada Insan NINDYA dari Pihak Lain sehubungan dengan Perayaan hari raya keagamaan.

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai Suap harus ditolak, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan NINDYA yang bersangkutan untuk menolaknya.

2. Gratifikasi dalam kedinasan

Gratifikasi dalam kedinasan adalah pemberian gratifikasi keapda Insan NINDYA dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai Wakil Perusahaan.

Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan NINDYA yang bersangkutan di Perusahaan pihak lain dimana Insan NINDYA tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukkan dan penugasan resmi dari Perusahaan.

b. Barang dalam bentuk apapun yang diterima dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diadakan oleh pihak lain dimana keikutsertaan Insan NINDYA yang bersangkutan kegiatan tersebut didasarkan

in the Company of other parties that are irrelevant/unrelated to the purpose of the assignment of the Personnel. the NINDYA.

k. The provision of free medical expenses facilities when the NINDYA Personnel concerned goes to a hospital which is carried out by another party when carrying out their duties and assignments.

l. l. Giving to NINDYA Personnel, in connection with a celebration, including but not limited to birthday celebrations, weddings, graduations, circumcisions and others, given by other Parties, with a material value in rupiah currency exceeding Rp. 1,000,000 (one million rupiah)

m. Providing facilities in the form of catering/ catering services from other parties when the NINDYA Personnel concerned hold celebrations, including but not limited to celebrations of weddings, birthdays and graduations, circumcisions and others

n. n.Giving gifts/parcels in any form to NINDYA Personnel from Other Parties in connection with the celebration of religious holidays.

Every Gratification which according to these Guidelines is considered a Bribery must be rejected, unless the situation at that time does not allow the NINDYA Personnel concerned to refuse it.

2. Gratification in service

Gratification in service is the giving of gratuities to NINDYA Personnel in carrying out the services assigned to them as Company Representatives.

Some examples of Gratification in service include but are not limited to:

a. Facilities in any form, including but not limited to banquets, transportation and accommodation both in the form of money and/or cash equivalents, which are provided to support the implementation of the duties of the NINDYA Personnel concerned in other party companies where the NINDYA Personnel are assigned based on appointment and assignment official from the Company.

b. Goods in any form received from the committee of seminars, workshops, training held by other parties where the participation of the NINDYA Personnel concerned, the activity is based on official

pada penunjukkan dan penugasan resmi Perusahaan, seperti seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata, *goody bag*

c. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan NINDYA dari Pihak lain pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, symposium dan rapat kerja

d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/*Reward* pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yan dilakukan dalam tugas kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak lain;

e. Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan NINDYA yang diberikan oleh Badan Usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (Contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Insan NINDYA yang bersangkutan

f. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesame Insan NINDYA dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan

g. Uang dan/atau setara uang , dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan oleh pihak lain kepada insan NINDYA karena telah menjadi pemateri dalam salah satu acara/*event* dalam pelaksanaan tugas kedinasan

h. Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak lain kepada Insan NINDYA dalam pelaksanaan tugas kedinasan

Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:

a. Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang WAJIB DITOLAK

b. Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) WAJIB DITOLAK;

c. Pemberian gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori gratifikasi yang dianggap suap, DAPAT DITERIMA;

company appointments and assignments, such as seminar kits, certificates, plaques/souvenirs, goody bags

c. Meals, accommodation and other facilities received by NINDYA Personnel from other Parties when carrying out official activities including but not limited to seminars, congresses, symposiums and work meetings

d. Any gift in any form that is accepted as a gift/reward in an open contest/competition activity carried out in an official task organized by another party;

e. Discounts and/or facilities that apply specifically to NINDYA Personnel provided by Business Entities such as restaurants, hotels, transportation services (for example: airplane tickets) in the context of carrying out official duties enjoyed by the NINDYA Personnel concerned.

f. Goods in any form, food and drinks, both given and/or received, originating from fellow NINDYA personnel in carrying out official duties which according to logical thinking are generally unnatural and/or excessive.

g. Money and/or money equivalents, in this case including but not limited to checks or vouchers, given by Lian Party to NINDYA personnel because they have become presenters in one of the events/events in carrying out official duties

h. Money and/or the equivalent of money as a substitute for transportation costs given by other parties to NINDYA Personnel in carrying out official duties

The treatment of Gratification in this service is as follows:

a. Every grant of gratuity in the form of money and/or money equivalent MUST BE REJECTED

b. The granting of gratuities in the form of non-money and/or cash equivalents whose value exceeds Rp. 1.000.000,- (one million rupiahs) MUST BE REJECTED;

c. Granting of Gratifications in the form of non-money and/or cash equivalents whose value does not exceed Rp. 1,000,000 (one million rupiah) and is not included in the category of Gratification which is considered a bribe, CAN BE ACCEPTABLE;

d. Setiap tindakan gratifikasi dalam kedinasan WAJIB DILAPORKAN pada UPG Perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan atau penolakan gratifikasi terjadi.

3. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

Terhadap perolehan Gratifikasi sebagaimana kriteria di bawah, maka Insan NINDYA dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi kepada UPG NINDYA maupun KPK, yaitu:

a. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi:

- Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu , besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

- Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan dan paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutase jabatan, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 satu) tahun dari pemberi yang sama;

- Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai

d. Every Gratification Act in official service MUST BE REPORTED to the Company's UPG no later than 7 (seven) working days after the receipt or rejection of Gratification occurs.

3. Gratifications that are not required to be reported

With regard to obtaining Gratification as per the criteria below, NINDYA Personnel can receive and enjoy it without being required to make a Gratification report to UPG NINDYA or the KPK, namely:

a. Gratifications that are not required to be reported based on the Corruption Eradication Commission Gratification Control Guidelines:

- Description in the family, namely grandfather/grandmother, father/mother/in-law, husband/wife, child/son-in-law, adopted child/legal guardian, grandchildren, besan, uncle/aunt, brother/sister/in-law, cousin and nephew, as long as there is no conflict of interest;

- Gifts (signs of love) in the form of money or goods that have a selling value in organizing weddings, births, aqiqah, baptism, circumcision, and cutting teeth, or other traditional/religious ceremonies with a limit of value per giver in each event of a maximum of Rp1,000,000 (one million Rupiah)

- Giving related to the calamity or disaster experienced by the recipient, father/mother/in-law, husband/wife, or child who receives Gratification as long as there is no conflict of interest, and meets fairness or propriety and a maximum of Rp. 1.000.000,- (one million rupiah);

- Giving to fellow employees in the context of farewell, retirement, transfer of positions, promotions, and birthdays that are not in the form of money or not in the form of cash equivalent of a maximum of Rp. 300,000,- (three hundred thousand rupiahs) within 1 9one) year from the same giver;

- Gifts to fellow co-workers that are not in the form of money or other means of exchange, and are not related to work, at a maximum of Rp200,000

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama

(two hundred thousand Rupiah) for each gift per person, with a total gift of not exceeding Rp1,000,000 (one million Rupiah) in 1 (one) year from the same provider

- Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- Giving in the form of dishes or servings that are generally accepted;
- Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- Academic or non-academic achievements which are followed by self-funding such as championships, competitions or competitions not related to service;
- Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- Profit or interest from fund placement, investment or private share ownership which is generally accepted;
- Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- Benefits from cooperatives, personnel organizations or similar organizations based on generally accepted membership;
- Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- Seminar kit in the form of a set of modules and stationery as well as certificates obtained from official activities such as meetings, seminars, workshops, conferences, training or other similar activities generally accepted;
- Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- The prize is not in the form of money or other means of exchange, which is intended as a means of promotion or socialization, as long as it does not have a conflict of interest and is generally accepted;
- Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- Prizes, appreciations or awards from championships, competitions or competitions that are followed at their own expense and not related to official service;
- Hadiah langsung/undian, diskon/ rabat, *voucher, point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- Direct prizes/raffles, discounts/ rebates, vouchers, point rewards, or souvenirs that are generally accepted and not related to work;
- Penerimaan hadiah atau tungajan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- Receipt of gifts or allowances in the form of money or goods related to the improvement of work performance given by the Government in accordance with the prevailing laws and regulations, or;
- Diperoleh dari kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban dari pejabat/ pegawai, sepanjang tidak memiliki
- Obtained from compensation or honorarium for professions outside of official activities, which are not related to the duties and obligations of the official/employee, as long as

konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan

there is no conflict of interest and does not violate the regulations/code of ethics of the employee/officer concerned

b. Contoh bentuk lain gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan pada angka 3 huruf a. 15) yang diterima oleh Insan NINDYA berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan NINDYA yang bersangkutan meraih prestasi tertentu adalah sebagai berikut:

b. Examples of other forms of Gratification that are not required to be reported in number 3 letter a. 15) received by NNDYA Personnel based on a valid agreement or because the relevant NINDYA Personnel has achieved certain achievements are as follows:

- Gaji/penghasilan dan pendapatan sah lainnya diterima Insan NINDYA dari perusahaan;
- Salary/income and other legitimate income received by NINDYA Personnel from the Company;

- Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan NINDYA;
- Supporting facilities, facilities and infrastructure at work, including but not limited to clothing, shoes, work equipment, official vehicles and others provided by the Company to NINDYA Personnel;

- Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh Badan Usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Insan NINDYA yang bersangkutan;
- Discounts that apply to the general public given by the Business Entity, in this case including but not limited to restaurants, hotels, transportation service providers (airfare), where the owner of the business entity does not have a work/official relationship with the NINDYA Personnel concerned;

- Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan NINDYA atas penempatan dana pribadinya;
- Profits from the placement of funds and the purchase of shares applicable to the general public, which are obtained by NINDYA Personnel for the placement of their personal funds;

- Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan NINDYA dan keluarganya;
- Income derived from the legitimate business of NINDYA Personnel and their families;

- Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh Insan NINDYA di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas;
- Awards given due to academic or non-academic achievements obtained by NINDYA personnel outside of a series of activities or official relations;

- Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan/atau diperoleh karena adanya kerja sama resmi antara pihak lain dengan perusahaan;
- Opportunities or benefits including special interest rates or commercial discounts which also apply to the general public and/or obtained due to official cooperation between other parties and the company;

- Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan NINDYA dalam kegiata nresmi yang diadakan pihak lain;
- Pinjaman dari bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerja sama resmi dengan perusahaan;
- Pemberian kepada Insan NINDYA yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara perusahaan dengan pihak lain;
- Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh insan NINDYA di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas Perusahaan;
- Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada pihak lain secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan NINDYA;
- Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari dan kepada sesama Insan NINDYA;
- Hadiah *doorprice* yang diperoleh Insan NINDYA dalam kegiatan, event atau *gathering* yang diselenggarakan perusahaan.

4. Batasan Pemberian Gratifikasi

a. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya;

b. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan perusahaan dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada perusahaan yang tidak menjadi hak perusahaan secara hukum;

c. Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher*, cek dan giro) kecuali dalam

- Food and/or drinks served at banquets, obtained in connection with the participation of NINDYA Personnel in official activities held by other parties;
- Loans from banks and/or other financial institutions that also apply to the general public or are obtained due to an official collaboration with the Company;
- Giving to NINDYA Personnel based on a contract or official agreement between the company and other parties;
- Profits from sweepstakes, programs or contests that are conducted openly to the general public that are obtained by NINDYA personnel outside the series of activities or official relations of the Company;
- Retirement or other benefits derived from participation on the other side on an ongoing basis in relation to the welfare program of NINDYA Personnel;
- Giving or receiving food and beverages in large quantities and/or in the form of catering/catering services originating from and to fellow NINDYA personnel;
- Door-prize obtained by NINDYA personnel in activities, events or gatherings organized by the Company.

4. Limitation of Gratification

a. The giving of gifts/souvenirs and entertainment has been planned, budgeted and the implementation has been approved by the official in accordance with his authorization;

b. The provision of gifts/souvenirs and entertainment is intended to support the interests of the company and does not aim to bribe third parties to be willing to give something to the company that is not legally entitled to the company;

c. The gifts/souvenirs and entertainment provided are not in the form of money and/or cash equivalents (including but not limited to vouchers, checks and current accounts)

rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

d. Pemberian gratifikasi berupa Hadiah/ cinderamata dan/atau jamuan makan dan atau hiburan, DIPERBOLEHKAN sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membian hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada perusahaan yang tidak menjadi hak perusahaan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegaitan oleh raga, tiket pertunjukkan kesenian, buku, rekaman music dan sebagainya;

e. Pemberian gratifikasi berupa hadiah/ cinderamata dan/atau jamuan makan dan/ atau hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam bentuk uang tunai (*cash payment*);

f. Pemberian Gratifikasi berupa hadiah/ cinderamata dan/atau jamuan makan dan/ atau Hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam bentuk-bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum;

g. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) kecuali dalam rangka *event*, promosi, *sponsorship* atau *customer gathering* atau *gathering stakeholder* lainnya yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

h. Pemberian gratifikasi berupa hadiah/ cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi perusahaan, wajib mencantumkan logo perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo perusahaan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan);

i. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

j. Pemberian honorarium rapat kepada pihak ketiga, DIPERBOLEHKAN sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada perusahaan atas undangan resmi dari perusahaan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut telah diatur dalam peratruan perusahaan;

except for the purpose of providing sponsorship funds which are accompanied by other supporting documents;

d. Giving Gratification in the form of Gifts/souvenirs and/or meals and or entertainment, is ALLOWED as long as the gift is intended to foster good relations within limits that are in accordance with reasonableness and pay attention to equal relations, mutual respect and do not aim to bribe the parties concerned. to give something to the company that is not legally entitled to the company. Examples of such gifts include banquets, physical activities, tickets for art shows, books, recorded music and so on;

e. Giving Gratification in the form of Gifts/Souvenirs and/or meals and/or entertainment is NOT ALLOWED in the form of cash (cash payment);

f. Giving Gratification in the form of Gifts/Souvenirs and/or meals and/or Entertainment is NOT ALLOWED in forms that violate decency and law;

g. The gift/souvenirs and entertainment referred to have a value not exceeding Rp1,000,000,- (one million Rupiah) except in the context of events, promotions, sponsorships or customer gatherings or other stakeholder gatherings which are accompanied by other supporting documents;

h. Giving Gratification in the form of Gifts/ Souvenirs in the form of goods intended for company promotion, must include the company logo which is an integral part of the goods in question (the company logo on the goods cannot be removed);

i. The giving of gifts/souvenirs and/ or entertainment is not carried out continuously to one party, provided that the said gift is given a maximum of 1 (one) time, within a period of 1 (one) year;

j. Provision of meeting honorarium to third parties is ALLOWED as an appreciation for the contribution of ideas and expertise that has been given to the Company at an official invitation from the Company, as long as the criteria and the amount of the honorarium have been regulated in company regulations;

k. Pemberian gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan NINDYA menghadiri acara pernikahan, hitanan, kelahiran, atau musibah dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per orang untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya;

k. Giving Gratification in the form of goods/money/money equivalent, is ALLOWED, in the event that NINDYA Personnel attend a wedding, funeral, birth, or accident with a maximum value of Rp1,000,000 (one million Rupiah) per person for each event, as long as the gift does not intend to influence the recipient, to do and/'; or not to do anything related to his position/position;

l. Jamuan makan dapat dilakukan, selama nilainya memenuhi kewajaran, dilakukan di tempat umum yang terhormat, serta dengan tetap menjaga citra positif perusahaan

l. Meals can be held, as long as the value is reasonable, in a respectable public place, and while maintaining a positive image of the Company.

5. Batasan Penerimaan Gratifikasi

5. Limitation of Acceptance of Gratification

a. Penerimaan gratifikasi berupa hadiah/cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:

a. Acceptance of Gratification in the form of Gifts/Souvenirs that includes the logo/name of the giving company, with the following Restrictions that must be met:

- Logo, nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan, dan diberikan setara kepada seluruh peserta acara/kegiatan;
- Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tingi, seperti buku, compact disc dan sebagainya;
- Hadiah/cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum;
- Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)

- The logo, the name of the company/party that provides the objects in question are an integral part of the policy/promotion of the providing company and are common objects as a form of company promotion, and are given equally to all participants of the event/activity;
- Objects that do not have a high financial value, such as books, compact discs and so on;
- The gift/souvenir is not an object that violates decency and law;
- The value of the gift/souvenir in question does not exceed the value of Rp1,000,000,- (one million Rupiah)

b. Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama pihak ketiga pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/event/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan sponsorship dimana Insan NINDYA yang bersangkutan hadir mewakili perusahaan. Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada atasan langsung Insan NINDYA dan berkoordinasi dengan UPG NINDYA;

b. Gifts/Souvenirs that do not include the logo/name of the Third Party Giver, which are given in an official activity/event/event and/or in the context of promotion and sponsorship where the NINDYA Personnel concerned is present to represent the Company. The receipt of this gift/souvenir must be reported to the direct supervisor of NINDYA Personnel and in coordination with UPG NINDYA;

c. Penerimaan honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga DIPERBOLEHKAN, sebagai

c. Acceptance of honorarium as a speaker, resource person officially invited by a Third Party is ALLOWED, as an appreciation for the

apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan NINDYA untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/ jabatannya;

contribution of thoughts and expertise that has been given, as long as the gift does not intend to influence NINDYA Personnel to do and/or not do something related to their position his position;

d. Penerimaan barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan NINDYA menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran atau terkait dengan musibah, dengan nilai penerimaan maksimum sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang untuk setiap acara, sepanjang tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan NINDYA, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/ jabatannya.

d. Receipt of goods/money/money equivalent, is ALLOWED, in the event that NINDYA Personnel organizes a wedding, circumcision, birth or related to an accident, with a maximum acceptance value of Rp 1,000,000 (one million rupiah) per person for each event, as long as does not intend to influence NINDYA Personnel, to do and/or not to do anything related to their position/ position.

e. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan NINDYA tidak dapat menghindar untuk menerima gratifikasi dari pihak ketiga dan/atau pada posisi dimana gratifikasi tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan NINDYA tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila pengembalian tersebut tidak mungkin diakukan (antara lain karena alamat pengirim yang tidak jelas), maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada UPG secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam pedoman ini.

e. In certain conditions, where NINDYA Personnel cannot avoid receiving Gratification from a Third Party and/or in a position where the Gratuity is already in a place that was entrusted to or through another person without the knowledge of the NINDYA Personnel, then the person concerned must return it. If the return is not possible (among other things because the return address is not clear), then the person concerned must immediately report to UPG in writing according to the mechanism regulated in this Guideline.

f. Insan NINDYA apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan yang tidak sesuai atau dilarang dalam ketentuan pedoman ini, hendaknya melakukan penolakan dengan cara santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada pihak ketiga.

f. If NINDYA personnel are asked to provide Gifts/Souvenirs and Entertainment that are not in accordance with or prohibited by the provisions of this Code, they should politely refuse the request by providing an explanation of these policies and rules to third parties.

MEKANISME PELAPORAN

Apabila terdapat penerimaan hadiah/ cinderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perseroan, maka Insan NINDYA wajib melaporkan hal tersebut melalui:

Unit Pengendalian Gratifikasi

a. Pelaporan melalui UPG yang dilakukan oleh Insan NINDYA yang menerima Gratifikasi wajib disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi oleh Insan NINDYA, dengan menggunakan *form* pelaporan sebagaimana diatur dalam pedoman ini:

REPORTING MECHANISM

If there is a receipt of gifts/souvenirs and/ or entertainment beyond the limits set by the Company, then NINDYA Personnel are required to report the matter through:

Gratification Control Unit

a. Reports through UPG conducted by NINDYA Personnel who receive Gratification must be submitted no later than 7 (seven) working days from the date of receipt of Gratification by NINDYA Personnel, using the reporting form as regulated in this Guideline:

b. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (contoh: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga sosial dengan menyampaikan bukti tanda terima dari Lembaga sosial tersebut kepada UPG;

c. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (contoh: emas, uang dan lainnya), wajib disimpan terlebih dahulu di UPG lingkungan kerja Insan NINDYA yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada UPG;

d. UPG membuat rekapitulasi penerimaan gratifikasi, serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pelaporan gratifikasi oleh UPG secara lengkap;

e. Setelah disampaikannya rekapitulasi penerimaan gratifikasi oleh UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka untuk proses penentuan atas status kepemilikan penerimaan gratifikasi tersebut, Perusahaan akan mengikuti mekanisme/prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PENCEGAHAN GRATIFIKASI

1. Pemberian Gratifikasi

Dalam pelaksanaannya semua Insan NINDYA:

a. Dilarang untuk menjanjikan, menawarkan atau memberikan gratifikasi kepada pihak ketiga yang dapat menimbulkan dugaan adanya kondisi Benturan Kepentingan;

b. Dilarang memberi gratifikasi kepada atasan atau pejabat instansi lain dengan maksud tertentu yang dapa mempengaruhi pengambilan keputusan (menyuap);

c. Dilarang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing, rekanan/mitra kerja kecuali sesuai aturan yang berlaku;

d. Dilarang mengijinkan mitra kerja/pihak ketiga memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya untuk kepentingan Insan NINDYA;

e. Dilarang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

b. For receipts which are goods that expire quickly (eg food and drinks), they can be submitted to the social institution by submitting proof of receipt from the social institution to the UPG;

c. For receipts which are goods that do not expire quickly (eg gold, money, etc.), must be stored in the UPG of the working environment of the NINDYA personnel concerned, until the ownership status of the receipt is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) by submitting proof of storage receipt to UPG;

d. UPG makes a recapitulation of Gratification receipts, and reports it to the Corruption Eradication Commission (KPK) no later than 7 (seven) working days from the date of receipt of a complete Gratification report by UPG;

e. After submitting the recapitulation of Gratification receipts by UPG to the Corruption Eradication Commission (KPK), then for the process of determining the ownership status of the Gratification receipts, the Company will follow the mechanism/procedure established by the Corruption Eradication Commission (KPK).

GRATIFICATION PREVENTION

1. Giving Gratification

In its implementation, all NINDYA Personnel:

a. Are prohibited to promise, offer or give Gratification to Third Parties which may give rise to allegations of a Conflict of Interest condition;

b. Are prohibited to give gratuities to superiors or other agency officials with a specific purpose that can influence decision making (bribery);

c. Are prohibited to give Gratification in any form to Business Partners, providers of goods and services as well as competing companies, partners/work partners except in accordance with applicable regulations;

d. Are prohibited to allow Work Partners / Third Parties to provide Gratification in any form to other parties for the benefit of Inan NINDYA;

e. Are forbidden to give gratuities in any form on religious holidays;

f. Dilarang memberi bantuan menggunakan dana/fasilitas perusahaan untuk dan atas nama pribadi;

g. Dilarang memberi gratifikasi yang bertentangan dengan kaidah agama dan norma kesusilaan;

h. Dilarang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun milik perusahaan tanpa dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penerima Gratifikasi

Dalam pelaksanaannya semua Insan NINDYA:

a. Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja, Penyedia barang dan jasa serta perushaaan pesaing, rekanan/mitra kerja;

b. Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun pada hari raya keagaman;

c. Dilarang mengijinkan mitra kerja/pihak ketiga memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Insan NINDYA;

d. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dana atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

e. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/ jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

IMPLEMENTASI

Untuk memastikan bahwa pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan NINDYA dan pihak lain, maka ditugaskan kepada Insan NINDYA untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/ penerimaan Gratifikasi pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Nindya Karya (Persero), dengan merujuk pada pedoman ini;

2. Fungsi unit pengendalian gratifikasi PT Nindya Karya (Persero) ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan NINDYA, pihak lain dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya pedoman ini di lingkungan PT Nindya Karya (Persero);

f. Are prohibited to provide assistance using Company funds/facilities for and on behalf of individuals;

g. Are forbidden to give gratuities that are contrary to religious norms and moral norms;

h. Are forbidden to give Gratification in any form belonging to the Company without documents that cannot be accounted for.

2. Gratification Recipients

In its implementation, all NINDYA Personnel:

a. Are prohibited to accept Gratification in any form from Business Partners, Providers of goods and services as well as competing companies, partners/Partners;

b. Are forbidden to accept Gratification in any form on religious holidays;

c. Are prohibited to allow Partners/Third Parties to provide Gratification in any form to NINDYA Personnel;

d. Are forbidden to receive refunds and other personal benefits that exceed the funds or are not entitled to them from the hotel or any other party in the context of official service or other matters that may cause a potential Conflict of Interest;

e. Are prohibited to be discriminatory, unfair to win the goods/services provider of certain partners/Partners with the intention of receiving compensation for services for personal, family or group interests.

IMPLEMENTATION

To ensure that this Manual is known by all NINDYA Personnel and other Parties, it is assigned to NINDYA Personnel to do the following:

1. Mention the prohibition on giving/accepting Gratification on every announcement in the process of procurement of goods/services within PT Nindya Karya (Persero), with reference to this Guideline;

2. The function of the Gratification Control Unit of PT Nindya Karya (Persero) is assigned to continuously provide information to all NINDYA Personnel, other parties and other parties regarding the implementation of this Guideline within PT Nindya Karya (Persero);

3. Fungsi *Procurement* di PT Nindya Karya (Persero) ditugaskan untuk menyampaikan pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan PT Nindya Karya (Persero), dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta *stakeholder* lainnya;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi pedoman ini;
5. Unit pengendalian gratifikasi PT Nindya Karya (Persero) ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direksi mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan gratifikasi.

3. The Procurement function at PT Nindya Karya (Persero) is assigned to deliver this Guideline to all relevant parties in the supply chain within PT Nindya Karya (Persero), in this case including but not limited to goods/service providers, agents, distributors and customers and other stakeholders;
4. Provide clear information to any party who wishes to know the contents of this Code;
5. Gratification Control Unit PT Nindya Karya (Persero) is tasked with monitoring the implementation of this guideline and providing periodic reports every 1 (one) year to the Board of Directors regarding its implementation, including reports that have been received related to the Gratification.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2020, tidak terdapat adanya pemberian dari pihak luar yang dianggap gratifikasi.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Violation of the provisions of this Code will be subject to sanctions applicable in the Company and potentially subject to criminal acts of bribery in accordance with the applicable laws and regulations.

In 2020, there were no gifts from outside parties that were considered as gratification.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

POLICY ON GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

PRINSIP DAN KEBIJAKAN

Kegiatan usaha Perseroan yang bergerak dalam industri jasa konstruksi tidak terlepas dari kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung kinerja usaha. Kegiatan pengadaan barang dan jasa senantiasa dikelola dengan baik dengan mempersiapkan infrastruktur unit kerja yang bertugas dalam menjalankan dan mengawasi aktivitas tersebut. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan prinsip GCG di setiap aspek, mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala lKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan pengadaan harus dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku serta dikerjakan secara disiplin. hal tersebut dilakukan Perseroan untuk meminimalisasi terjadinya risiko-risiko

PRINCIPLE AND POLICY

The business activities of the Company engaged in the construction services industry is inseparable from the need for procurement of goods and services in support of business performance. Goods and services procurement activities are always well managed by preparing the work unit infrastructure in charge of running and supervising the activity. As a form of commitment to the implementation of GCG principles in every aspect, the procurement mechanism of goods and services conducted by the Company refers to the Presidential Regulation (PERPRES) Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services Jo. Regulation of the Government Procurement Policy Agency (LKPP) Number 7 to 19 of 2018 concerning Guidelines for Planning for Government Procurement of Goods / Services.

Procurement activities should be carried out with applicable procedures and done in a disciplined manner. This is done by the Company to minimize the occurrence of fraud risks in the process that

fraud dalam proses yang dapat mencederai implementasi GCG di lingkungan Perusahaan seperti praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN

Tata cara pengadaan barang dan jasa di Perseroan yaitu:

1. Adanya pengajuan dari proyek ke divisi/ wilayah;
2. Sebelum proses dilanjutkan, *Manager* Proyek, *General Manager, Deputy General Manager* Wilayah/ Divisi memberikan disposisi kepada SEM/*Manager Procurement* untuk melakukan identifikasi dan meninjau ketepatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan risiko;
3. Untuk pengadaan di kantor pusat ditetapkan adanya: kontrak payung, atas persetujuan Direksi.
4. Meminta penawaran minimal dari 3 (tiga) calon rekanan, diutamakan yang ada di dalam DRT (Daftar Rekanan Terseleksi);
5. Melakukan klarifikasi dan negosiasi menggunakan form perbandingan penawaran harga barang dan jasa;
   a. Spesifikasi teknis/mutu
   b. Waktu pelaksanaan & pengadaan
   c. Garansi masa pemeliharaan
   d. Harga penawaran
   e. Untuk subkon/*supplier* wajib melampirkan pengalaman kerja 3 tahun terakhir sesuai bidang yang ditawarkan dan sumber daya yang memadai serta peduli terhadap K3 (OHS)
   f. Cara pembayarannya.
   g. Untuk rekanan yang belum terdaftar dalam DRT, diimbau untuk menjadi rekanan terseleksi dengan meminta/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
   h. Untuk rekanan khusus, Institusi Negara/ Pemerintah seperti PIN, TELKOM, TNI, POLRI, PERTAMINA dan sejenisnya tidak perlu menyertakan data kecuali anak usahanya.
6. Sebelum menetapkan pemenang, rekanan yang akan ditunjuk sebegai pemenang harus dipastikan telah masuk DRT dengan nilai total 60 (enam puluh) atau cukup, untuk rekanan subkon diutamakan yang punya pengalaman kerja 3 tahun terakhir berturut-turut dan telah di konfirmasi kebenarannya.;

could hurt the implementation of GCG within the Company such as Corruption, Collusion and Nepotism practices and unfair business competition.

PROCUREMENT PROCEDURES AND METHODS

Procedures for procurement of goods and services in the Company are as follows:

1. There is a submission from the project to the Division/Region;
2. Before proceeding, the Project Manager, General Manager, Regional Deputy General Manager/Division gives a disposition to the Procurement SEM/ Manager to identify and review the accuracy of the procurement of goods and services based on risk;
3. For procurement at Head Office, it is determined: Framework Contract, on approval of the Board of Directors
4. Requesting for bid from minimum 3 (three) partner candidates, prioritizing those in DRT (Selected Partner List);
5. Carrying out clarification and negotiation using bid comparison form:
   a. Technical/Quality Specification;
   b. Time of Implementation & Procurement;
   c. Maintenance Period Guarantee;
   d. Bid Price;
   e. Subcontractor/Supplier shall attach work experience in the last 3 years according the offered field and adequate resources as well as being aware of K3 (OHS);
   f. Method of payment;
   g. Partners who are not listed in DRT are encouraged to become selected partners by requesting/ fulfilling the requirements;
   h. Special partners, such as Government/State Institution, for instance PLN, TELKOM, TNI, POLRI, PERTAMINA, and so on are not required to provide data, except their subsidiaries;
6. Before determining the winner, the partner that will be appointed as winner must be ensured to be in DRT with total value of 60 (sixty) or adequate, subcontractor partners with work experience in the last 3 consecutive years and confirmed are prioritized

7. Sebelum melakukan penandatanganan order/ SPK/ kontrak untuk rencana penggunaan SKBDN dan SCF dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Wilayah/divisi mengajukan permohonan izin untuk penggunaan SKBDN/SCF dan mengusulkan rekanan yang akan ditunjuk dengan penawaran terbaik ke Direksi, tembusan ke Kepala Departemen Produksi dan Kepala Departemen Keuangan untuk dilakukan evaluasi.

   b. Mendapatkan persetujuan/penolakan dari Kepala Departemen Produksi minimal 5 (lima) hari kerja dari tanggal penerimaan pengajuan lengkap dan benar.

   c. Menyampaikan hasil keputusan Kepala Departemen Produksi ke wilayah/divisi untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen penerbitan secepatnya.

   d. Untuk SCF dilanjutkan ke prosedur akseptasi SCF oleh Direketur Keuangan & SDM.

8. Untuk kontrak payung, persetujuan Direksi paling lama 4 (empat) hari kerja dari tanggal pengajuan dengan lengkap dan benar oleh Kepala Departemen Produksi.

9. Penandatanganan kontrak/order.

10. Memberitahukan secara tertulis rekanan pemenang dengan mencantumkan harga satuan serta catatan lainnya kepada seluruh penawar paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kontrak atau *purchase order* (PO).

11. Melakukan penilaian atas kinerja rekanan secara periodik di akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dan setelah selesai penyerahan barang/pekerjaan.

12. Memasukkan penilaian rekanan ke dalam form evaluasi rekanan dan hasil penilaiannya diinput di SIM pengadaan.

13. Sebagian langkah prosedur di atas sudah menggunakan SIM pengadaan.

14. Menyimpan catatan mutu.

7. Before signing the Order/SPK/contract for the plan of the use of SKBDN/SCF, the following is required:

   a. Region/Division proposes license if the use of SKBDN/SCF and proposal from partners who will be appointed with the best bid to the Board of Directors with copy to Head of Production Department and Head of Finance Department to be evaluated.

   b. Obtaining approval/rejection from Head of Production Department for minimum 5 (five) working days from the date of proposal receipt.

   c. Submitting the decision of the Head of Production Department to each Region/ Division to prepare publication document as soon as possible.

   d. Proceeding the SCF to procedure for SCF acceptance by the Finance and Human Capital Director.

8. For framework contract, the Board of Directors' approval is at most 4 (four) working days from the proposal date by the Head of Production Department.

9. Signing of tender contract

10. Notify in writing to the winner partner by including unit price and other notes to other bidders who were not chosen at least 3 (three) days from order or contract date.

11. Periodically assessing the performance of partner after work submission selection.

12. Including the data of result of assessment to partner evaluation form and Procurement SIM.

13. The procedural step above uses procurement SIM

14. Keeping the quality record.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan system pengendalian *fraud* dan *Good Corporate Governance* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka pelu dirumuskan kebijakan *Whistleblowing System* secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan PT Nindya Karya (Persero) dan pihak eksternal perusahaan untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh Insan NINDYA di dalam perusahaan.

PT Nindya Karya (Persero) memiliki komitmen untuk menjalankan perusahaan secara professional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai utama budaya (*core values*) yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang disebut juga dengan AKHLAK dan slogan :"*Toward the excellent*"

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, PT Nindya Karya (Persero) mendorong partisipasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan PT Nindya Karya (Persero) serta pihak eksternal perusahaan untuk memanfaatkan jalur penyelesaian *Interna*l dalam pelaporan pelanggaran di lingkungan perusahaan serta memertimbangkan secara seksama sebelum memutuskan untuk melakukan pemanfaatan jalur eksternal.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, PT Nindya Karya (Persero) menyediakan sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat *independent* dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor.

LANDASAN PENYUSUNAN

1. Keinginan perusahaan untuk terus menegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lingkungan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi

2. Sebagai komitmen perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab

BACKGROUND

In order to increase the effectiveness of the implementation of the fraud control system and Good Corporate Governance with an emphasis on disclosure of complaints (reports), it is necessary to formulate a Whistleblowing System policy that is clear, easy to understand, and can be implemented effectively in order to provide encouragement and awareness to PT NINDYA KARYA employees (Persero) and external parties of the company to report acts of fraud, violations of the law, company regulations, code of ethics, and conflicts of interest committed by Nindya Personnel within the Company.

PT Nindya Karya (Persero) is committed to running the Company in a professional manner based on Corporate Behavior in accordance with the main cultural values (core values), namely amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif which is also known as AKHLAK and the slogan: "Toward the Excellent".

In order to maintain and improve the reputation and image of the company, PT Nindya Karya (Persero) encourages the participation of the Board of Commissioners, Directors and employees of PT Nindya Karya (Persero) as well as external parties of the company to take advantage of the internal settlement line in reporting violations within the Company and consider carefully before decided to make use of the external route.

To realize the foregoing, PT Nindya Karya (Persero) provides a means of reporting violations that are independent and confidential and has a whistleblower protection mechanism.

FOUNDATION

1. The desire to continue to uphold the principles of Good Corporate Governance throughout the Company, especially those related to integrity and transparency

2. As the Company's commitment to provide a medium for the enforcement of the principles of Good Corporate Governance, thus creating a clean and responsible work situation

3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di perusahaan

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman
2. Tersedianya kesempatan untuk menangani maslah pelangaaran secara *Intern*al terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat eksternal atau *public*
3. Timbulnya keenganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT Nindya Karya (Persero) dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Sistem pelaporan pelanggaran digunakan apabila pengaduan/penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

Lingkup pengaduan /penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh sistem pelaporan pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan perusahaan, meliputi sebagai berikut:

- Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentignan lain di luar perusahaan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan
- Gratifikasi
- Pencurian
- Korupsi
- Suap

3. As one of the powerful tools in preventing and detecting potential violations in the Company

PURPOSES, OBJECTIVES, AND BENEFITS

1. Availability of ways to deliver important and critical information for the Company to those who must immediately handle it safely
2. Availability of opportunities to deal with violations internally first, before expanding into external or public violations
3. The emergence of reluctance to commit violations (supervision by all parties).

DEFINITION AND SCOPES

The Violation Reporting System is a system that manages complaints/disclosures regarding unlawful behavior, unethical/undue acts in a confidential, anonymous and independent manner that is used to optimize the participation of the Board of Commissioners, Directors and Employees of PT Nindya Karya (Persero) and other parties. others in disclosing violations that occur within the company. The violation reporting system is used if the complaint/disclosure is deemed ineffective to be channeled through formal channels (through the direct supervisor or related function).

The scopes of complaints/disclosures that will be followed up by the violation reporting system are actions that can harm the Company, including the following:

- Deviations from the prevailing laws and regulations;
- Misuse of position for other purposes outside the Company;
- Extortion;
- Cheats;
- Conflict of interest;
- Gratification;
- Theft;
- Corruption;
- Bribery;

PRINSIP DASAR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) pengaduan /penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus;
2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
3. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama,tempat atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut
4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi;
5. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran;
6. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain;
7. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya;
8. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk//fitnah untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan/penyingkapan, maka pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/ handphone/facsimile/email.

BASIC PRINCIPLES OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. The reported violation shall include the amount of the loss (if it can be determined). 1 (one) complaint/disclosure should only be for 1 (one) violation so that the handling can be more focused.
2. The parties involved, namely who should be responsible for the violation, including the witnesses and the parties who benefited or were harmed by the violation.
3. The location of the violation, which includes the name, place or function of the occurrence of the violation.
4. Time of violation, namely the period of violation in the form of days, weeks, months, years or certain dates at the time the violation occurred.
5. The way the violation occurred and whether there is supporting evidence that the violation has occurred.
6. Whether the violation has been reported to other parties.
7. Whether the violation has occurred before.
8. Reporting must be based on good faith and not be a personal complaint or based on bad intentions/slander to speed up and facilitate the follow-up process for complaints/ disclosures, so the reporter is encouraged to provide information regarding personal data, which at least contains the address/telephone number/mobile/facsimile/email.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN KERAHASIAAN

1. Identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun;
3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan tersebut;

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS AND CONFIDENTIALITY ISSUE

1. The identity of the whistleblower and the contents of the report submitted are guaranteed to be confidential by the Company
2. The Company guarantees the protection of the whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation to any party;
3. The protection of the whistleblower also applies to the parties conducting the investigation as well as the parties providing information related to the complaint/disclosure;

4. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme;
5. Insan NINDYA yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.

KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan/penyingkapan pelanggaran terlebih dahulu akan di *review* dan dikonfirmasi laporannya oleh ketua tim WBS
2. Ketua tim WBS menginstruksikan anggota tim WBS untuk menganalisa dan memverifikasi atas laporan tersebut, untuk kemudian dilaporkan kembali kepada ketua Tim WBS;
3. Ketua tim WBS melaporkan Analisa dan verifikasi laporan yang masuk ke Direksi untuk di proses sesuai aturan yang berlaku di perusahaan;
4. Pengaduan/penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh tim *reward* & *punishment* akan ditindaklanjuti oleh Direksi;
5. Pengaduan/penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris;
6. Pengaduan/penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisari akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

APRESIASI BAGI PELAPOR

Setiap pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan peusahaan berhak mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan

SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYALAHGUNAKAN SISTEM PELAPORAN

Pelanggaran pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

4. In carrying out the follow-up process on each complaint/disclosure, it is obligatory to prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence and professionalism;
5. NINDYA personnel who violate the confidentiality principle will be given severe sanctions in accordance with applicable regulations in the Company.

REPORT HANDLING AUTHORITY

1. Complaints/Disclosure of violations will first be reviewed and the report confirmed by the WBS Team leader
2. The WBS Team Leader instructs the WBS team members to analyze and verify the report, and then report back to the WBS Team leader;
3. The WBS Team Leader reports Analysis and verification of incoming reports to the Board of Directors to be processed according to the applicable regulations in the Company;
4. Complaints/disclosure of violations related to and or committed by the Reward & Punishment Team will be followed up by the Board of Directors;
5. Complaints/disclosure of violations related to and or committed by the Board of Directors will be followed up by the Board of Commissioners;
6. Complaints/disclosure of violations related to and or committed by the Board of Commissioners will be followed up by the Board of Directors.

APPRECIATION FOR WHISTLEBLOWERS

Every whistleblower who has been instrumental in helping efforts to prevent violations that can harm the Company is entitled to an award in accordance with the provisions and regulations that apply in the Company.

SANCTIONS FOR WHISTLEBLOWERS WHO ABUSE THE REPORTING SYSTEM

Whistleblower who submits a report in the form of slander or false report will receive sanctions and will not receive a guarantee of confidentiality or protection for the whistleblower. Sanctions are imposed in accordance with the applicable provisions and regulations in the Company.

SARANA/MEDIA PELAPORAN

Pelapor menyampaikan pengaduan/ penyingkapan pelanggaran kepada tim WBS melalui sarana yang telah disediakan perusahaan, jika diketahui adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Insan NINDYA, ke alamat *website*: wbs.nindyakarya.co.od sesuai prosedur bidang Satuan Pengawasan *Intern* nomor: P-NK-SPI-01-1 tanggal 1 November 2019 dengan nama prosedur "*Whistle Blowing System* (WBS)" yang dapat diakses melalui aplikasi WBS atau *website* perusahaan.

PROSEDUR PENGELOLAAN

Prosedur pengelolaan:

1. Pelapor hendaknya menyebut identitas pihak pelapor. Kerahasiaan identitas pelapor dilindungi perusahaan. Laporan yang disampaikan disertai dengan dokumen pendukungnya yang berupa:

   a. Scan dokumen / foto/gambar lainnya;

   b. Rekaman video/audio

   Laporan dapat disampaikan pada aplikasi *mobile* WBS & PG atau melalui *website* WBS kepada Tim WBS. Laporan dugaan pelanggaran harus memenuhi aspek 4W1H (*What, Where, When,Who,dan How*), apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, tim WBS dapat melakukan klarifikasi kepada pelapor.

2. Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan secara anonim. Penyampaian laporan secara anonim, tetap akan diterima, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu mejadi perhatian. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan palenggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi anonimitas laporan, perusahaan memastkan bahwa kebijakan perlindungan pelapor, kerahasiaan pelapor dan jaminan keamanan betul-betul dapat teralksanan dan disrasakan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi Karyawan PT Nindya Karya (Persero) serta pihak eksternal perusahaan.

3. Tim WBS sebagai penanggung jawab memberikan analisa dan verifikasi atas laporan indikasi/dugaan pelanggaran.

4. Atas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, maka tim WBS akan menyampaikan laporan indikasi /dugaan pelanggaran tersebut kepada Direksi dengan proses sebagai berikut:

WHISTLEBLOWING MEDIA/FACILITIES

The whistleblower submits a complaint/disclosure of violations to the WBS Team through the facilities provided by the company, if it is known that there are indications of fraud committed by NINDYA Personnel, to the website address: wbs.nindyakarya.co.od in accordance with the Internal Audit Unit procedure number: P-NK- SPI-01-1 dated November 1, 2019 with the procedure name "Whistle Blowing System (WBS)" which can be accessed through the WBS Application or the company website.

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT PROCEDURES

Management Procedure:

1. The reporter should state the identity of the reporting party. The confidentiality of the identity of the reporter is protected by the Company. The submitted report is accompanied by supporting documents in the form of:

   a. Scan documents / photos / other images;

   b. Video/audio recording.

   Reports can be submitted on the WBS & PG mobile application or through the WBS website to the WBS Team. Reports of alleged violations must meet the 4W1H (What, Where, When, Who, and How) aspects. If the report does not meet these elements, the WBS Team can provide clarification to the whistleblower.

2. Whistleblowing can be done anonymously. Anonymous submission of reports will still be accepted, but there are some things that need to be considered. This will cause difficulties in communicating, confirming or clarifying in order to follow up on the handling of the violation report. Therefore, to reduce the anonymity of the report, the company ensures that the whistleblower protection policy, whistleblower confidentiality and security guarantee can truly be implemented and felt by the entire board of commissioners, the employee directors of PT Nindya Karya (Persero) and external parties of the company.

3. The WBS team as the person in charge of providing analysis and verification of reports on indications/alleged violations.

4. For potential violations committed by employees, the WBS Team will submit a report on the indication/alleged violation to the board of directors with the following process:

a. Direksi melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan/rekomendasi kepada tim WBS untuk membentuk tim investigasi;

b. Tim Investigasi melakukan audit investigasi sesuai dengan prosedur *Whistleblowing System* dan melaporkan hasil audit investigasi kepada tim WBS;

c. Tim WBS menyampaikan laporan hasil audit investigasi kepada Direksi;

d. Direksi melakukan pembahasan laporan audit investigasi;

e. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran terbukti,1) Direksi menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada tim *reward & punishment* untuk diproses lebih lanjut;2) Tim *reward & punishment* menyampaikan laporan pengenaan sanksi kepada tim WBS untuk didokumentasikan

f. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran tidak terbukti, tim WBS membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen arsip

5. Atas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Direksi, maka proses audit dilakukan investigasi lebih lanjut, tim WBS akan menyampaikan laporan indikasi/ dugaan pelanggaran tersebut kepada Dewan Komisaris sesuai mekanisme yang berlaku pada Kementerian BUMN dengan proses sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk menunjuk tim investigasi yang anggotanya terdiri dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;

b. Tim investigasi melakukan audit investigasi seuai peraturan yang berlaku dan melaporkan hasil audit investigasi kepada Kementerian BUMN;

c. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran terbukti, 1) Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk memberikan/ menetapkan sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi, 2) tim investigasi meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada tim WBS untuk didokumentasikan.

a. The Board of Directors discusses and provides approval/recommendation to the WBS Team to form an Investigation Team;

b. The Investigation Team conducts an investigative audit in accordance with the Whistleblowing System procedure and reports the results of the investigative audit to the WBS Team;

c. The WBS team submits a report on the results of the Investigation audit to the Board of Directors;

d. The Board of Directors discusses the investigative audit report;

e. If the results of the investigation state that the violation is proven, 1) the Board of Directors submits recommendations for the imposition of sanctions to the Reward & punishment team for further processing; 2) The Reward & punishment team submits a report on the imposition of sanctions to the WBS Team to be documented;

f. If the results of the investigative audit state that the violation is not proven, the WBS team prepares and submits a notification letter to the Whistleblower that the violation is not proven and is considered completed and keeps archival documents.

5. For potential violations committed by the Board of Directors, the audit process will be further investigated, the WBS Team will submit a report on indications/alleged violations to the Board of Commissioners according to the mechanism applicable to the Ministry of SOEs with the following process:

a. The Board of Commissioners conducts discussions to appoint an Investigation Team whose members consist of the Board of Commissioners and Shareholders;

b. The Investigation Team conducts an investigative audit in accordance with applicable regulations and reports the results of the investigative audit to the Ministry of SOEs;

c. If the results of the investigation state that the violation is proven, 1) the Board of Commissioners conducts discussions to give/stipulate sanctions and submit a notification letter for the imposition of sanctions, 2) The investigation team forwards the notification letter on imposition of sanctions to the WBS team for documentation;

d. Jika hasil audit invetigasi menyatakan bahwa pelanggaran tidak terbukti,1) tim investigasi meneruskan hasil audit investigasi kepada tim WBS,2) tim WBS membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen arsip.

6. Atas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh organ Dewan Komisaris, maka tim WBS akan menyampaikan laporan indikasi/dugaan pelanggaran tersebut kepada Direksi dan atau Pemegang Saham dengan proses sebagai berikut:

   a. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk menunjuk tim investigasi yang anggotany terdiri dari Direksi, tim WBS dan Pemegang Saham;

   b. Tim investigasi melakukan audit investigasi sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan hasil audit investigasi kepada Dewan Komisaris;

   c. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran terbukti, 1) Dewan Komisaris melakukan pembahwasan untuk memberikan/menetapkan sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi. 2) tim Invetigasi meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada tim WBS untuk didokumentasikan.

   d. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran tidak terbukti, 1). tim investigasi meneruskan hasil audit investigasi kepada tim WBS.2) tim WBS membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor bahwa pelanggaraan tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen arsip.

7. Seluruh proses evaluasi atas pengaduan/ penyingkapan wajib dibuatkan berita acara dan seluruh proses sistem pelaporan pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* agar dapat dipertanggungjawabkan.

SANKSI

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan

d. If the results of the investigative audit state that the violation is not proven, 1) The investigation team will forward the results of the investigative audit to the WBS Team, 2) the WBS Team shall prepare and deliver a notification letter to the Whistleblower that the violation has not been proven and is considered completed and keeps archival documents.

6. For potential violations committed by the organs of the Board of Commissioners, the WBS Team will submit a report on indications/ alleged violations to the board of directors and or shareholders with the following process:

   a. The Board of Commissioners conducts discussions to appoint an Investigation Team whose members consist of the Board of Directors, WBS Team and Shareholders;

   b. The Investigation Team conducts an investigative audit in accordance with applicable regulations and reports the results of the investigative audit to the Board of Commissioners;

   c. If the results of the investigation state that the violation is proven, 1) the Board of Commissioners conducts a discussion to provide/stipulate sanctions and submit a notification letter for the imposition of sanctions. 2) The Investigation Team forwards the notification letter on the imposition of sanctions to the WBS Team for documentation;

   d. If the results of the investigative audit state that the violation is not proven, 1). The investigation team forwards the results of the investigative audit to the WBS Team. 2) The WBS Team prepares and submits a notification letter to the Whistleblower that the violation is not proven and is considered complete and keeps archival documents.

7. The entire process of evaluating complaints/ disclosures must be made into an Official Report and the entire process of reporting system violations must be properly and reliably documented so that they can be accounted for.

SANCTIONS

The form of sanctions against the reported party who has been proven to have committed a violation will be determined in accordance with the applicable provisions and regulations in the Company

.

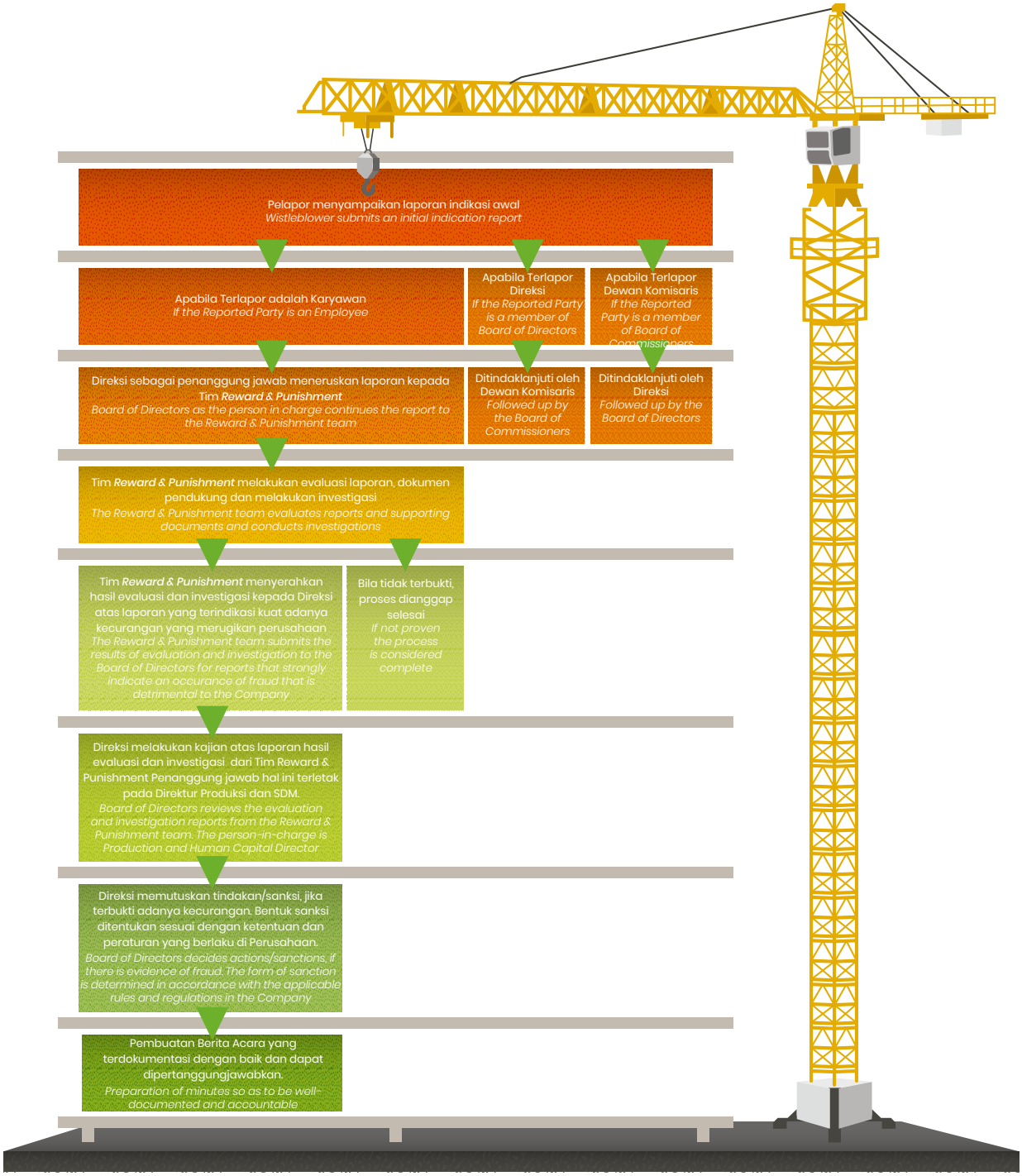

LAPORAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2020

Selama tahun 2020 tidak terdapat laporan yang masuk melalui sistem pelaporan pelanggaran yang dimiliki Perseroan.

REPORT RECEIVED THROUGH WBS IN 2020

During 2020, there has been no report received through the Company's whistleblowing system.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai entitas BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Republik Indonesia, perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan *Intern*al adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

BASIC PRINCIPLES OF STATE OFFICIALS WEALTH REPORTS

As an SOE entity owned by the State through the Government of the Republic of Indonesia, the Company is required to comply with binding laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and acts of internal irregularities is the obligation to report the assets of state officials (LHKPN).

LHKPN is a list of all state officials' assets as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Officials' Wealth Reports. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the KPK to carry out steps or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. In addition, Law no. 28 of 1999 concerning State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism, mandates that every official is obliged to report and announce his assets before and after taking office and is willing to have his wealth checked before and after taking office. In Law no. 28 of 1999 article 2 (7) along with its explanation, it is explained that other officials who have strategic functions in relation to state officials include the Board of Commissioners, Directors, and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to create a State Official who adheres to the general principles of state officials free from practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other despicable acts. Every State Official is required to report their wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled out honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyze, evaluate, and assess the entire amount, type and value of the assets reported, correctly, quickly, accurately, and responsibly.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Dalam menerapkan LHKPN, Perseroan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baikpada BUMN, dan perubahannya.
5. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

LEGAL BASIS AND REGULATIONS IN IMPLEMENTING LHKPN IN THE COMPANY

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases for the perspective of implementing LHKPN within the Company, including:

1. Law no. 28 of 1999 concerning State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law no. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission
3. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) Number 02 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Assets.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, and its amendments.
5. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation.

PELAKSANAAN LHKPN DI LINGKUP PERUSAHAAN

Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan LHKPN yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. 1465/DIRUT/KPTS/SEKPER/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan dan Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Nindya Karya (Persero) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di lingkungan PT Nindya Karya (Persero).

Berdasarkan peraturan tersebut, pihak di lingkup Perseroan yang wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Unit pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkup Perseroan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengawasan *Intern* (SPI) sebagai admin instansi pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat

IMPLEMENTATION OF LHKPN WITHIN THE COMPANY

The Company already has guidelines for the implementation of LHKPN which have been ratified through the Decree of the Board of Directors No. 1465/DIRUT/KPTS/SEKPER/10/2017 dated October 5, 2017 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports for Company Officials and the Establishment of the Management Unit for State Administrators Wealth Reports (LHKPN) within PT Nindya Karya (Persero) regarding Obligations for Submission of Official Wealth Reports Company within PT Nindya Karya (Persero).

Based on these regulations, the parties within the scope of the Company who are required to submit LHKPN to the KPK are as follows:

1. Board of Commissioners
2. Board of Directors
3. Officer 1 (one) level below the Board of Directors

The LHKPN implementation management unit within the Company is carried out by the Head of the Internal Control Unit (SPI) as the admin of the agency managing the Asset Report of Company

Perusahaan di lingkungan PT Nindya Karya (Persero) dan Manager Operasional Departemen Sumber Daya Manusia sebagai Admin Unit Kerja

Agar pelaksanaan LHKPN menjadi kesadaran pihak di lingkup perusahaan yang terkait wajib lapor, Perseroan melakukan sosialisasi pengisian e-LHKPN pada 02 November 2020 di Gedung Nindya.

Officials within PT Nindya Karya (Persero) and the Operational Manager of the Human Resources Department as the Work Unit Admin.

In order for the implementation of the LHKPN to become an awareness of the parties in the scope of the company that are required to report, the Company conducted a socialization of filling out the e-LHKPN on November 2, 2020 at the Nindya Building.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2020

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan wajib lapor per 31 Desember 2020

LHKPN TRANSPARENCY OF COMPANY'S OFFICIALS IN 2020

Below is conveyed the transparency of the submission of LHKPN, the Company's officials are obliged to report per December, 31 2020

PENGUNGKAPAN PENYAMPAIAN LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2020

DISCLOSURE OF SUBMISSION OF LHKPN FOR COMPANY'S OFFICIALS IN 2020

PEJABAT WAJIB LHKPN *OFFICIALS REQUIRED TO SUBMIT LHKPN*	JUMLAH WAJIB LAPOR *TOTAL OFFICIALS*	TELAH MELAPORKAN *HAS REPORTED*	
		JUMLAH *TOTAL*	%
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	4	4	100%
Direksi *Board of Directors*	4	4	100%
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi *Officials 1 (one) level below the Board of Directors*	18	18	100%
JUMLAH *TOTAL*	**26**	**26**	**100%**

KEPATUHAN *COMPLIANCE*

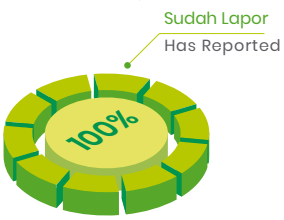

SUDAH LAPOR *HAS REPORTED*	WAJIB LAPOR *REPORTING OFFICIALS*
26	26
100%	100%

KETEPATAN *ACCURACY*

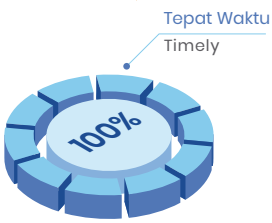

TEPAT WAKTU *TIMELY*	SUDAH LAPOR *HAS REPORTED*
26	26
100%	100%

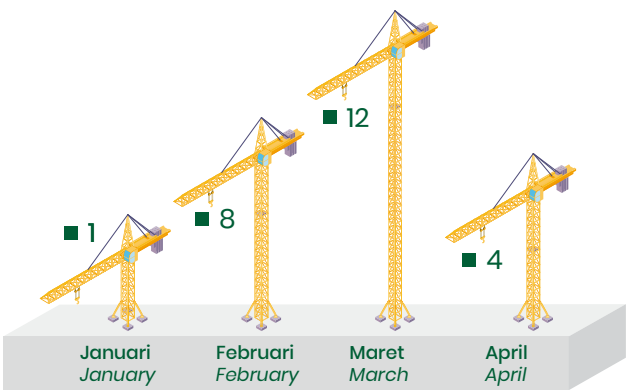

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Penyesuaian terhadap perkembangan dunia bisnis terus dilakukan oleh Perseroan. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan usaha yang dijalankan senantiasa berpedoman pada regulasi yang berlaku mengikuti perkembangan dalam industri konstruksi serta menciptakan daya saing yang tinggi di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 untuk Dewan Komisaris dan PER-03/MBU/02/2015 untuk Direksi yang menyatakan bahwa sumber calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berasal dari berbagai institusi berikut dengan ketentuan-ketentuannya.

Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan memberikan kesempatan kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

The Company continues to make adjustments to the development of the business world. it is intended that the business activities carried out are always guided by the applicable regulations following developments in the construction industry and create high competitiveness in the midst of increasingly competitive business competition. In order to achieve these aims and objectives, the Company has policies related to the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors as stated in the Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 for the Board of Commissioners and PER-03/MBU/02/2015 for the Board of Directors which states that the source of candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors can come from various institutions along with their provisions.

The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by considering the needs and complexity of the Company. The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the knowledge, expertise, professional experience, background to support the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company provides opportunities for everyone; therefore, nominations for candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors are reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, religion or the source of the initial recommendation.

TABEL INFORMASI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TABLE OF INFORMATION ON DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

NAMA *NAME*	**JABATAN** *POSITION*	**KEWARGANEGARAAN** *NATIONALITY*	**USIA** *AGE*	***GENDER***	**PENDIDIKAN** *EDUCATION*	**KEAHLIAN** *EXPERTISE*
DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS*						
Sugiyartanto	Komisaris Utama *President Commissioner*	Indonesia	59 Tahun *59 years old*	Laki-laki *Male*	S1/D4 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Tahun 1987, S2 Master of Sciences Bidang Transportation Universitas Gadjah Mada Tahun 2001. *Bachelor's degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University (1987) and Master of Science degree in Transportation from Gadjah Mada University (2001)*	Teknik Sipil dan Transportasi *Civil Engineering and Transportation*

NAMA *NAME*	JABATAN *POSITION*	KEWARGANEGARAAN *NATIONALITY*	USIA *AGE*	*GENDER*	PENDIDIKAN *EDUCATION*	KEAHLIAN *EXPERTISE*
Rika Kiswardani	Komisaris *Commissioner*	Indonesia	52 Tahun *52 years old*	Perempuan *Female*	S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada di Tahun 1993, dan memperoleh gelar S2 tahun 2000, Policy and Administration, Flinders University of South Australia. *Bachelor's degree in State Administration Science from the Faculty of Social and Political Science of Gadjah Mada University (1993) and Master's degree in Policy and Administration from Flinders University of South Australia (2000)*	Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Publik *State Administration and Public Policy*
DIREKSI *BOARD OF DIRECTORS*						
Haedar A. Karim	Direktur Utama *President Director*	Indonesia	61 Tahun *61 years old*	Laki-laki *Male*	Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1985) *Bachelor of Engineering, majoring in Civil Engineering from Universitas Hasanuddin, Makassar (1985)*	Konstruksi, Pemasaran dan Pengembangan Usaha . *Construction, Marketing, and Business Development*
Moeharmin Zein Chaniago	Direktur Pemasaran dan Pengembangan *Marketing and Development Director*	Indonesia	55 Tahun *55 years old*	Laki-laki *Male*	Insinyur pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996) dan Master of Construction and Engineering Management dari Griffith University Australia (2004). *Bachelor's degree in Engineering from Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1996) and Master's degree in Construction and Engineering Management from Griffith University Australia (2004)*	Teknik Sipil *Civil Engineering*
Firmansyah	Direktur Produksi dan QHSE *QHSE Production and QHSE Director*	Indonesia	52 Tahun *52 years old*	Laki-laki *Male*	Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Amir Hamzah, Medan (2003). *Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Amir Hamzah, Medan (2003)*	Konstruksi, Engineering dan QHSE *Construction, Engineering, and QHSE*

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

TRANSPARENCY ON BAD GOVERNANCE PRACTICES

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan atas aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan.

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTING THE ENVIRONMENT

In 2020, there were no reports of company activities that polluted the environment.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai entitas usaha yang bergerak di wilayah Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk perpajakan. Komitmen perpajakan yang dilakukan

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

As a business entity operating in the territory of Indonesia, the Company is committed to complying with all applicable regulations, including taxation. The tax commitment made by the Company is

Perseroan juga menjadi bagian dari kontribusi Perusahaan terhadap negara. Di sepanjang tahun 2020, Perseroan telah menyetorkan pajak sebesar Rp633,42 miliar, menurun bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 965,35 miliar. Pajak ini mencakup pajak di Pusat dan pajak proyek di Daerah.

also part of the Company's contribution to the country. Throughout 2020, the Company has paid taxes amounting to Rp633.41 billion, a decrease from 2019 wich was recorded at Rp965.35 billion. This tax includes taxes at the Center and project taxes at the Regions.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTASI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam laporan tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

INCONSISTENCY IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The entire presentation of information in this Annual report, particularly related to financial performance and other matters, refers to the Financial statements for the years ended December 31, 2020 and December 31, 2019 which have been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki kasus terkait buruh dan karyawan.

CASES RELATED TO LABOR AND EMPLOYEES

In 2020, the Company did not have any cases related to workers and employees.

PENGUNGKAPAN SEGMEN OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Hingga akhir tahun 2020, laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan belum menerapkan PSAK 5 tentang segmen operasi. Perusahaan bukanlah entitas usaha yang menerbitkan sahamnya kepada publik dan berstatus perusahaan terbuka (Tbk.), dengan demikian tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan segmen operasi pada laporan Keuangannya.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENTS

Until the end of 2020, the Company's Consolidated Financial Statements have not implemented PSAK 5 regarding Operating Segments. The Company is not a business entity that issues its shares to the public and has the status of a public company (Tbk.), thus it has no obligation to apply operating segments to its financial statements.

KESESUAIAN LAPORAN TAHUNAN *HARDCOPY* DAN *SOFTCOPY*

Perseroan menjamin bahwa isi laporan tahunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* telah sesuai dan tidak terdapat adanya perbedaan.

COMPATIBILITY OF HARDCOPY AND SOFTCOPY OF ANNUAL REPORTS

The Company guarantees that the contents of the Annual report in the form of hardcopy and softcopy are appropriate and there are no differences.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pertamina Gheotermal Energy Ulubelu, Lampung

SOSIAL

JARINGAN LISTRIK BANDARA SOETTA, CENGKARENG
POWER STATION SOETTA AIRPORT, CENGKARENG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SEBUAH KOMITMEN BERKELANJUTAN

Dengan diterbitkannya resolusi mengenai Tujuan Pembangunan Keberlanjutan atau lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada 21 Oktober 2015 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berisikan tentang ambisi bersama pembangunan negara-negara lintas pemerintahan hingga tahun 2030. Di dalam SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Salah satu konsep berkelanjutan yang jamak dirujuk adalah pembangunan kinerja usaha yang bersandar pada *triple bottom line*. Dalam konsep tersebut, terdapat 3 (tiga) dimensi utama yang berperan sebagai indikator terciptanya kinerja berkelanjutan yaitu *profit*, *people* dan *planet*. Guna mencapai kinerja usaha yang berkelanjutan, setiap entitas usaha harus mampu menyeimbangkan ketiga dimensi tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis untuk kemudian diimplementasikan dengan baik.

Perseroan berkomitmen untuk menyukseskan resolusi tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Terlebih Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga terus mendorong pencapaian SDGs yang disederhanakan ke dalam 4 pilar utama, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan salah satunya diwujudkan dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui program CSR Perseroan berupaya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Baik di sekitar lingkungan Perseroan beroperasi, maupun di wilayah lain di seluruh Indonesia.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pemenuhan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dan program sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

On October 21, 2015, the United Nations (UN) issued a resolution on Sustainable Development Goals (SDGs) containing the shared ambition for sustainable development of the world's countries across governments until 2030. The SDGs consist of 17 goals and 169 measurable achievements in a deadline set by the United Nations as the world's development agenda for the benefit of humans and the Earth.

One of the sustainable concepts that is often referred to is the development of business performance that relies on the triple bottom line. In this concept, there are 3 (three) main dimensions that act as indicators for the creation of sustainable performance, namely profit, people, and planet. In order to achieve sustainable business performance, every business entity must be able to balance these three dimensions and integrate them into their business strategy to be implemented properly.

The Company is committed to the success of this resolution in accordance with its capacity. Moreover, the National Development Planning Agency (Bappenas) also continues to push for the achievement of the SDGs, which have been simplified into 4 main pillars, namely the Social Development Pillar, the Economic Development Pillar, the Environmental Development Pillar, and the Legal and Governance Development Pillar.

One of the Company's commitments to support sustainable development is manifested in the Corporate Social Responsibility (CSR) program. Through the CSR program, the Company strives to provide the maximum benefit to stakeholders, especially the community, both in the vicinity of the Company's operations, as well as in other areas throughout Indonesia.

As a State-Owned Enterprise (BUMN), the Company also has an obligation to implement the Partnership and Community Development Program (PKBL). The fulfillment of these responsibilities is carried out in various activities and programs as part of the implementation of GCG.

Dalam pelaksanaannya, program CSR dan PKBL yang dijalankan Perseroan diarahkan sesuai dengan SDGs. Perseroan berkeyakinan, perubahan positif yang dibuat dalam masyarakat akan mempunyai dampak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perseroan memiliki komitmen untuk dapat mewujudkan pertumbuhan usaha yang baik dan pada saat yang bersamaan juga memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

In practice, the CSR and PKBL programs run by the Company are directed in accordance with the SDGs. The Company believes that positive changes made in society will have a sustainable impact on future generations. The Company has a commitment to be able to realize good business growth and at the same time also make a positive contribution to the environment and social community.

UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PASAL 74 AYAT (1)

"Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran".

Organisasi *Internasional* untuk Standarisasi (*International Organization for Standardization*/ ISO), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbauan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku secara Internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

LAW NO. 40 OF 2007 REGARDING LIMITED LIABILITY COMPANIES

ARTICLE 74 PARAGRAPH (1)

"Companies engaging in the field of natural resources must implement Social and Environmental Responsibilities budgeted and calculated as company costs for which implementation is carried out by observing decency and fairness."

The International Organization for Standardization (ISO), the world's industry and commercial standard-setting body, has released ISO 26000 on Guidance on Social Responsibility. Although it is not mandatory and is merely an appeal, this ISO provides patterns and modules that apply internationally about how CSR can be developed in the dimensions of an organization. In Indonesia, ISO 26000 has been ratified by the Government in 2010 and made the National Standard (SNI) in 2012.

SUBJEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN ISO 26000

CORE SUBJECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY ISO 26000

7 SUBJEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

7 CORE SUBJECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

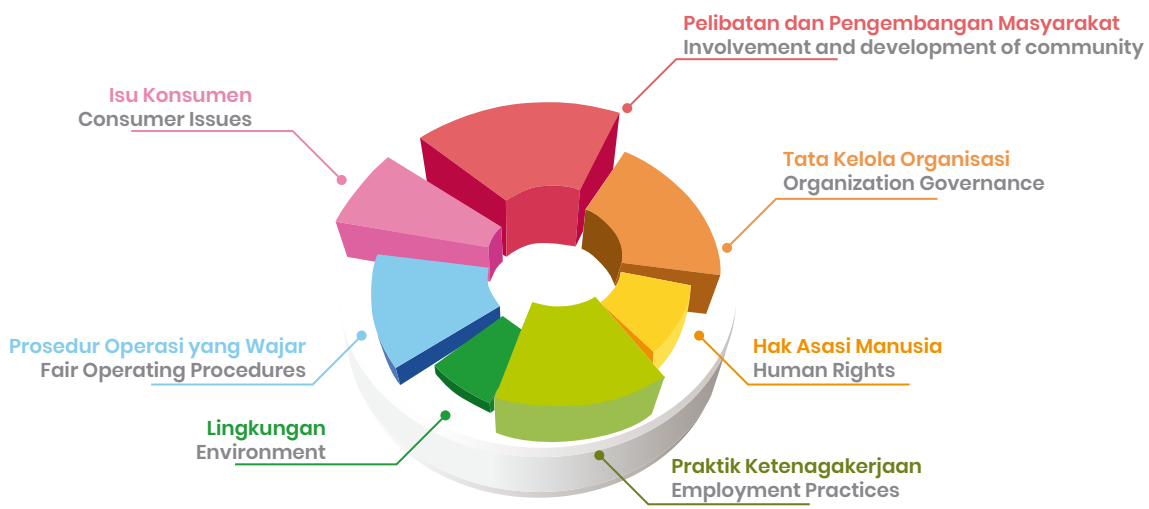

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL NINDYA KARYA

SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND GOVERNANCE OF NINDYA KARYA

PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN KOMITMEN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Melalui referomasi bisnis yang dilakukan Perseroan di tahun 2014 silam, Perseroan mulai melakukan pembenahan-pembenahan yang diperlukan salah satunya mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dari pedoman-pedoman yang berlaku. Perusahaan sendiri, melakukan pendekatan yang berbeda dalam menciptakan kinerja usaha yang berkelanjutan dengan merancang program-program yang lebih strategis dan terintegrasi. Untuk itu, dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan, aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan tidak bersandar hanya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropi semata namun memperkaya persepsi distribusi nilai ekonomi.

Presepsi ini dibangun dengan mempertimbangkan kondisi Internal Perseroan yang beberapa tahun ke belakang memasuki fase restrukturisasi bisnis yang berimplikasi pada *retained earning* yang masih belum optimal. Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi komitmen kami untuk dapat memenuhi pembangunan usaha berkelanjutan. Seiring dengan upaya perbaikan di Internal, kami menggagas pemahaman bahwa kontribusi perusahaan dalam kaitannya dengan aspek sosial dan lingkungan dapat dilihat dari bagaimana proyek-proyek yang kami jalankan ramah terhadap lingkungan, membawa manfaat bagi masyarakat secara luas serta terhindar dari konflik-konflik sosial yang timbul mulai dari pra, pembangunan dan pasca pembangunan suatu proyek.

Selain itu, sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN. Terkait hal tersebut, Perseroan senantiasa berperan aktif untuk mendorong terbentuknya perekonomian rakyat yang kuat melalui pemberian bantuan pinjaman permodalan yang bernilai tambah. Aspek yang menjadi nilai tambah berupa keikutsertaan perusahaan dengan kompetensi yang dimilikinya untuk memberikan pembinaan bagi penerima program. Dampak yang diharapkan adalah, berkembangnya kualitas usaha yang dijalankan oleh penerima program.

CSR IMPLEMENTATION PRINCIPLES, POLICIES, AND COMMITMENT

Through the Company's business reforms in the past 2014, the Company began to make necessary improvements, one of which was preparing the infrastructure needed in order to adopt the concept of sustainable development from the applicable guidelines. The Company takes a different approach in creating sustainable business performance by designing more strategic and integrated programs. For this reason, in carrying out sustainable development programs, the social and environmental responsibility activities carried out do not rely solely on philanthropic activities, but also on the enrichment of the economic value distribution perception.

This perception is built by considering the Company's internal conditions which in the past few years has entered business restructuring phase implied in unoptimal retained earnings. However, this does not hinder our commitment to sustainable business development. Along with internal improvement efforts, we have initiated the understanding that the Company's contribution in the social and environmental aspects can be seen from the fact that our projects are eco-friendly, beneficial to the community at large, and able to avoid social conflicts arising from preconstruction and post-construction of a project.

As part of a State-Owned Enterprise (BUMN), the Company has an obligation to run the Partnership and Community Development Program (PKBL) mandated by the SOEs Ministry. In this regard, the Company continues to play an active role in encouraging the formation of a strong people's economy through the provision of value-added capital loans. The added value aspect is the Company's participation with its competencies to provide guidance for program recipients. The expected impact is the program recipients' business growth.

KESEIMBANGAN DALAM BISNIS PERUSAHAAN YANG BERKELANJUTAN
BALANCE OF THE COMPANY'S SUSTAINABLE BUSINESS

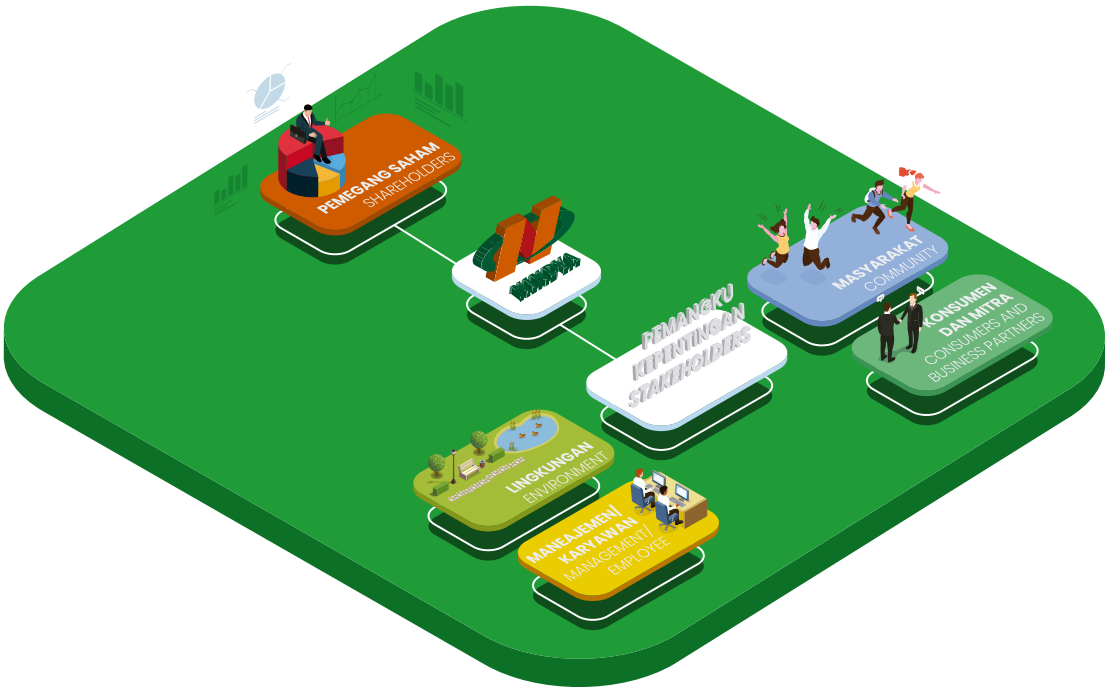

DASAR HUKUM PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai Perseroan terbatas yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dasar pelaksanaan program CSR di Indonesia berlandaskan pada beberapa aspek hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut:
    i. Pasal 2: salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
    ii. Pasal 88: BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

LEGAL BASIS OF CSR IMPLEMENTATION

As a Limited Liability Company owned by the Republic of Indonesia, legal grounds for Corporate Social Responsibility implementation in Indonesia is as follows:

1. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety.
2. Law No. 23 of 1992 on Health.
3. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.
4. Law No. 13 of 2003 on Manpower.
5. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs), as follows:
    i. Article 2: one of the aims and objectives of the SOE establishment is to actively provide guidance and assistance to economically powerless entrepreneurs, cooperatives and the community.
    ii. Article 88: SOEs can set aside a portion of their net income for the purpose of fostering small businesses/cooperatives as well as fostering communities around SOEs.

6. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
8. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
11. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
12. Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
13. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
15. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
17. Peraturan Menteri Negara BUMN No. per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
18. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 09/MBU/07/2015.
19. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Selain peraturan dan perundang-undangan, penerapan program CSR oleh Perusahaan juga mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). ISO yang telah diratifkasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2013 ini memberikan 7 (tujuh) subyek inti dalam pengelolaan CSR, yaitu:

1. Tata kelola organisasi yang baik
2. Penegakan Hak Asasi Manusia

6. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
7. Law No. 25 of 2007 on Investment.
8. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.
9. Law No. 36 of 2009 on Health.
10. Law No. 13 of 2011 on Handling of the Poor.
11. Law No. 24 of 2011 on Social Insurance Implementing Agency.
12. Law No. 2 of 2017 on Construction Services.
13. Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits.
14. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies.
15. Government Regulation No. 50 of 2012 on Implementation of Occupational Safety and Health Management System.
16. Manpower Ministerial Regulation No. 05/Men/1996 on Occupational Safety and Health Management System (SMK3).
17. SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
18. SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/07/2017 on on Second Amendment to SOE Ministerial Regulation No. PER 09/MBU/07/2015.
19. SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 on Third Amendment to SOE Ministerial Regulation No. PER 09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

In addition to the above laws and regulations, CSR program implementation by the Company also refers to ISO 26000 on Guidance on Social Responsibility. The ISO ratified by the Government in 2010 and made as the National Standard (SNI) in 2013 provides 7 (seven) core subjects in the management of CSR, namely:

1. Good organization governance
2. Enforcement of human rights

3. Praktik ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
4. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan
5. Prosedur operasi yang wajar
6. Tanggung jawab terhadap konsumen
7. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Tujuan dan sasaran penerapan Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perseroan mengacu kepada peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; dan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang diatur dengan Keputusan Menteri.

Untuk itu, Perseroan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dengan 2 (dua) tujuan, yaitu Program Kemitraan (PK) sebagai program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri yang sumber dananya dari dana bergulir (*revolving*) ; dan Program Bina Lingkungan (BL) sebagai program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN.

DAMPAK YANG MUNCUL DARI KEGIATAN PERUSAHAAN DAN PIHAK-PIHAK YANG TERDAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Berikut penjelasan tentang dampak yang muncul dari kegiatan perusahaan dan pihak-pihak yang terdampak dari kegiatan perusahaan.

3. Humane and fair employment practices
4. Impact of company activities on the Environment
5. Reasonable operating procedures
6. Responsibility to consumers
7. Involvement in community development

OBJECTIVES OF CSR IMPLEMENTATION

The objectives of Corporate Social Responsibility implementation by the Company refer to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-07/MBU/05/2015 regarding Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs. The regulation mentions that one of the aims and objectives of SOE establishment is to actively provide guidance and assistance to weak economic entrepreneurs, cooperatives and communities; and SOEs can set aside a portion of their net profits for the purpose of fostering small businesses/cooperatives as well as fostering communities around the SOEs as regulated by a Ministerial Decree.

To that end, the Company implements Social Responsibility program with 2 (two) objectives, namely the Partnership Program as a program to improve the ability of small businesses to be resilient and independent whose source of funds can come from a portion of SOE profit, and the Community Development Program as an empowerment program for community social conditions by SOEs whose sources of funds can come from a portion of SOE profit.

IMPACT ARISING FROM COMPANY'S ACTIVITIES AND PARTIES AFFECTED BY COMPANY'S ACTIVITIES

The following are the impacts arising from the Company's activities and the parties affected.

PEMANGKU KEPENTINGAN *STAKEHOLDERS*	DAMPAK *IMPACT*			
	KINERJA PERUSAHAAN *COMPANY'S PERFORMANCE*	LINGKUNGAN *ENVIRONMENT*	SOSIAL KEMASYARAKATAN *SOCIAL COMMUNITY*	EKONOMI (LANGSUNG/TIDAK LANGSUNG) *ECONOMY (DIRECT/ INDIRECT)*
Pemerintah Republik indonesia selaku regulator *Government of Republic of Indonesia as the Regulator*	V	V	V	V
Pemegang Saham *Shareholders*	V	V	V	V
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	V	V	V	V
Pemberi Kerja/Pelanggan *Project Owners/Customers*	V	V	V	V
Karyawan *Employees*	V	V	V	V
Masyarakat Di Sekitar Lokasi Kegiatan Usaha *Community Nearby the Locations of Business Activities*	V	V	V	V
Masyarakat secara Luas *Public in General*	V	V	V	V

PERENCANAAN HINGGA EVALUASI PROGRAM

Perseroan belum melakukan pemetaan sosial maupun *due dilligent* terkait dampak operasi dan usaha yang dijalankan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Namun, Perseroan memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang dilengkapi dengan proses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Pemegang Saham. RKA PKBL berisi sasaran dan rencana kerja terkait penyaluran dana bagi Program Kemitraan yang tepat sasaran. pelaksanaan RKA dapat dilakukan baik oleh perusahaan sendiri maupun sinergi dengan BUMN lainnya.

PROGRAM PLANNING AND EVALUATION

The Company has not conducted social mapping or due diligence related to the impact of operations and business carried out by the Company to stakeholders. However, the Company has a Partnership and Community Development Program (PKBL) as the implementation of Corporate Social Responsibility which is complemented by the process of ratifying the Work Plan and Budget (RKA) by shareholders. The PKBL RKA contains targets and work plans related to the distribution of funds for the Partnership Program that is right on target. The RKA implementation can be carried out both by the Company itself and in synergy with other SOEs.

ORGANISASI, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA

Kegiatan CSR merupakan bagian integral dari aktivitas di Perseroan, sehingga pengambilan keputusan bisnis dan aktivitas yang dilakukan tidak hanya untuk tujuan peningkatan profitabilitas semata, melainkan juga untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

ORGANIZATION, PARTY-IN-CHARGE, AND MANAGER

CSR activities are an integral part of activities in the Company; thus, business decision making and activities carried out are not only for the purpose of increasing profitability, but also to maximize value for shareholders, employees, consumers, suppliers, society, government and other stakeholders.

BAGAN ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CHART OF ASPECTS OF CSR

	ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *ASPECTS OF CSR*	PENANGGUNG JAWAB DI LINGKUNGAN NINDYA KARYA *PARTY-IN-CHARGE WITHIN NINDYA KARYA*
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*	Lingkungan *Environment*	Bagian PKBL, Kantor Wilayah, dan Divisi, serta Proyek *PKBL Unit, Regional Offices, Divisions, and Projects*
	Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja *Manpower and Occupational Health and Safety Practice*	Department QHSE, Kantor Wilayah dan Divisi serta Proyek *HSE Department, Regional Offices, Divisions, and Projects*
	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan *Social and Community Development*	Bagian PKBL *PKBL Unit*
	Tanggung Jawab Konsumen dan Produk/Jasa serta Mitra Kerja *Responsibility to Consumers, Products/Services and Business Partners*	Departement Produksi *Production Department*

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Program Kemitraan dan Bina LIngkungan (PKBL) secara khusus dilaksanakan guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat khususnya pada tataran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat berkembang lebih baik. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas usaha yang memiliki nilai ekonomi dan garda terdepan pembangunan ekonomi bangsa, memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan baik materil maupun non materil dalam mewujudkan rencana tersebut. Selain dalam hal dukungan bagi perekonomian masyarakat, program PKBL juga memiliki aspek pelestarian lingkungan di mana Perseroan bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan menghindari terjadinya hal-hal yang dapat mencemari atau merusak lingkungan khususnya di sekitar area usaha perusahaan.

Landasan atas pelaksanaan PKBL berpedoman dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Kementrian BUMN) No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Kegiatan PKBL Perseroan dikelola oleh unit tersendiri, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0096/DIRUT/KPTS/KDS/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan PT Nindya Karya (Persero).

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Partnership and Community Development Program (PKBL) is specifically implemented to promote the community's economy, in particular at the level of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to develop better. State Owned Enterprises (SOEs) as business entities that have economic value as well as the frontline of the nation's economic development, have an obligation to provide both material and non-material assistance in realizing the plan. In addition to support the community's economy, the PKBL program also has environmental preservation aspect where the Company is responsible for maintaining environmental balance by avoiding things that can pollute or damage the environment, especially around the Company's business areas.

PKBL implementation refers to the SOE Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020, on Third Amendment to the SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

The Company's PKBL activities are managed by a separate unit, based on the Decision of Board of Directors No. 0096/DIRUT/KPTS/KDS/01/2019 dated January 22, 2019 on Determination of Organization Structure of PT Nindya Karya (Persero).

STRUKTUR ORGANISASI PKBL
PKBL ORGANIZATION STRUCTURE

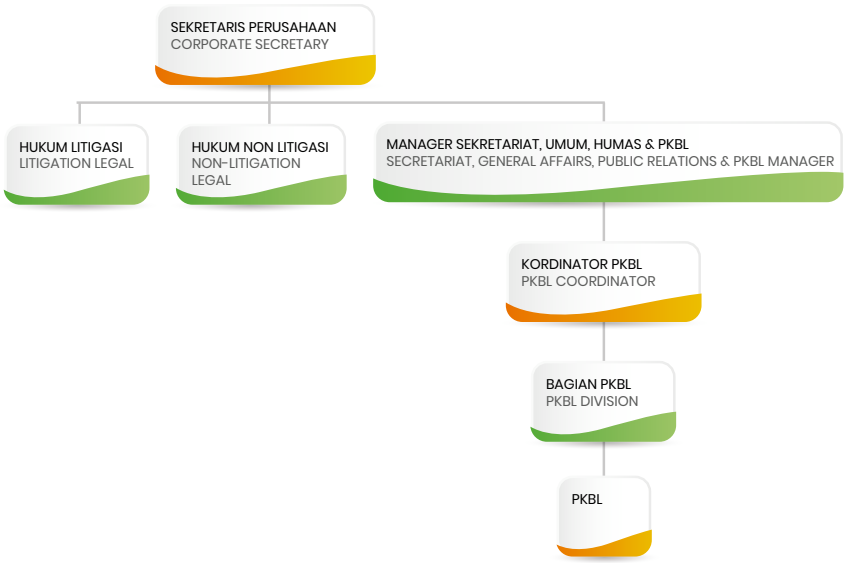

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Terhadap program dan kegiatan CSR di sepanjang tahun 2020, berikut disampaikan pembiayaan dan anggaran yang ditetapkan Perseroan di awal tahun 2020, dan realisasinya di akhir tahun 2020.

CSR FINANCING AND BUDGET

The following are the financing and budget set by the Company in early 2020 for CSR programs and activities throughout the year, and the realization at the end of 2020.

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	REALISASI 2020 (RP –RIBU) REALIZATION IN 2020 *(RP THOUSAND)*	RKA 2020 (RP-RIBU) *(RP THOUSAND)*	PENCAPAIAN (%) *ACHIEVEMENT*
A	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) *Partnership and Community Development Program*			
1	Program Kemitraan *Partnership Program*	655.000.000	951.865.000	68,81%
2	Program Bina Lingkungan dan BUMN Hadir Untuk Negeri *Community Development Program*	1.999.315.360	2.000.000.000	99,97%
B	Program *Corporate Social Responsibility* *Corporate Social Responsibility Program*	-	-	-

PT Nindya Karya (Persero) tidak menganggarkan dan menyalurkan dana CSR pada tahun 2020.

PT Nindya Karya (Persero) did not allocate and distribute CSR funds in 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS FULFILLMENT

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam ISO 26000 tentang

Human Rights are inherent, irrevocable, universal, inseparable and interdependent rights, which are related to the 2nd principle of Pancasila, namely Fair and Civilized Humanity. In ISO 26000 regarding Guidelines on Social Responsibility, human rights

panduan Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup hal-hak terkait analisa dampak keputusan dan kegiatan, situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Perseroan memiliki pedoman perilaku etika sebagai Kode etik atau *Code of Conduct* yang memberikan landasan bagi seluruh insan Nindya Karya dalam berperilaku dan berhubungan baik dengan pihak Internal maupun pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Pedoman ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0167/DIRUT-I/KPTS/SEKPER/03/2016 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/Kom/SK/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang penerapan *Good Corporate Governance* PT Nindya Karya (Persero) serta Kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Penerapan Perilaku Etika (revisi 0.6) tanggal 15 Maret 2016.

Melalui penerapan Kode Etik ini, Perseroan menuangkan Hak Asasi Manusia seperti yang termaktub diatas sebagai bagian yang tak lepas dari standar etika bisnis yang dikembangkan di lingkup Perusahaan.

include matters relating to the analysis of decisions and activities impact, risk situations related to human rights, avoiding conspiracy, handling complaints, discrimination and marginalized groups, civil and political rights; economic, social and cultural rights; and basic principles and rights at work.

The Company has in place Code of Conduct that provides a foundation for all Nindya Karya employees in behaving and interacting with internal and external stakeholders of the Company. This guideline has been ratified through the Decision of Board of Directors No. 0167/DIRUT-I/KPTS/SEKPER/03/2016 and Decision of Board of Commissioners No. 23/Kom/SK/03/2016 dated March 15, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance in PT Nindya Karya (Persero) as well as the Board of Commissioners and Board of Directors' Joint Agreement on the Implementation of Ethical Behavior (Revised 0.6) dated March 15, 2016.

Through the implementation of this Code of Conduct, the Company specifies the aforementioned Human Rights as an inseparable part of the business ethics standards developed in the Company.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perseroan sesuai dengan etika usaha. Perseroan memiliki Kode etik (*Code of Conduct*) sebagai komitmen yang terdiri etika kerja dan etika bisnis yang membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku agar memiliki dasar terkait etika usaha. Pedoman etika kerja merupakan pedoman yang mengatur hubungan antar individu baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sedangkan etika bisnis merupakan sikap dasar Perseroan dalam berbisnis dengan semua pemangku kepentingan. Perseroan memiliki komitmen untuk secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan serta menciptakan nilai tambah (*value creation*) bagi perusahaan dan *Stakeholders*.

Di samping itu, konsep operasi yang adil juga tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0167/DIRUT-I/KPTS/SEKPER/03/2016 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/Kom/SK/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* PT Nindya Karya (Persero). Pedoman ini menjadi acuan penting bagi Perseroan untuk dapat menerapkan proses kerja

Fair operations emphasize the importance of managing the Company in accordance with business ethics. The Company has in place the Code of Conduct as a commitment consisting of work ethics and business ethics that form and direct behavior suitability to have a basis for operations. Work ethic guidelines regulate relationships between individuals both inside and outside the company. While business ethics is the Company's basic attitude in doing business with all stakeholders. The Company is committed to sustainably building long-term and mutually beneficial relationships and creating added value for the Company and stakeholders.

In addition, the concept of fair operation is also contained in the Code of Good Corporate Governance enacted through the Decision of Board of Directors No. 0167/DIRUT-I/KPTS/ SEKPER/03/2016 and the Decision of Board of Commissioners No. 23/Kom/SK/03/2016 dated March 15, 2016 on Implementation of Good Corporate Governance in PT Nindya Karya (Persero). This guideline is an important reference for the Company to implement

yang berorientasi pada operasi yang adil, yang diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan berbasis harmonisasi dengan pemangku kepentingan.

work processes that are oriented towards fair operations, which are expected to create a sustainable growth based on harmonization with stakeholders.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENT

RUMUSAN, KOMITMEN, DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Seiring dengan pertumbuhan operasi dan bisnis yang dicapai Perseroan, secara undang-undang, Perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan program CSR di luar pelaksanaan kegiatan PKBL. Menyadari manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup bagi pertumbuhan kinerja berkelanjutan, Perseroan telah meng*Intern*alisasi hal tersebut dalam bentuk komitmen yang tertuang dalam Kebijakan PT Nindya Karya (Persero) tentang Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan, prosedur HSE No. P-NK-HSE-14 tentang penanganan limbah, dan sertifikat ISO 14001:2015.

Terkait dengan penggunaan material ramah lingkungan, Perseroan secara terintegrasi telah menjalankan hal tersebut sebagaimana yang menjadi program dalam kegiatan PKBL. Bentuk komitmen penggunaan material ramah lingkungan adalah dengan pemenuhan kriteria *Go Green Construction* pada tiap-tiap proyek yang dikerjakan. Perusahaan memiliki sertifikasi tersebut dan diperoleh perjanjian sertifikasi *Greenship* yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2017.

CSR FORMULATION, COMMITMENT, AND POLICIES IN RELATION TO THE ENVIRONMENT

In line with the operational and business growth achieved by the Company, by law, the Company has an obligation to conduct CSR program outside PKBL activities. Recognizing the benefits of implementing environmental responsibilities for sustainable performance growth, the Company has internalized this in the form of commitments contained in PT Nindya Karya (Persero)'s Policy on Occupational Health, Safety, and Environment, HSE procedure No. P-NK-HSE-14 concerning waste handling, and ISO 14001:2015 certificate.

With regard to the use of eco-friendly materials, the Company has implemented this in an integrated manner as a program in PKBL activities. The form of commitment to the use of eco-friendly materials is to fulfill the Go Green Construction criteria for each project undertaken. The Company has the certification and obtained a Greenship certification agreement signed on January 24, 2017.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT OPERASI DAN BISNIS PERUSAHAAN

Dari aktivitas kegiatan bisnis Perseroan, dampak risiko lingkungan berpotensi muncul di proyek yaitu, limbah material proyek, kebisingan, polusi udara, dan perubahan kontur tanah. Namun risiko tersebut telah dimitigasi dengan baik melalui penanganan limbah, penggunaan alat ramah

ENVIRONMENTAL IMPACTS AND RISKS RELATED TO COMPANY OPERATIONS AND BUSINESS

From the company's business activities, the impact of environmental risks has the potential to emerge in the project, namely, project material waste, noise, air pollution, and changes in land contours. However, this risk has been mitigated properly through waste management, the use

lingkungan dan pemasangan pengaman sesuai standar keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja agar para pekerja, masyarakat sekitar serta lingkungan tetap terjaga.

RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA REALISASNYA DI SEPANJANG TAHUN 2020

Sejalan dengan upaya Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya dilakukan dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan untuk menciptakan proses kerja yang ramah lingkungan dan mencegah pencemaran. untuk itu, Perseroan memiliki Sistem Manajemen Mutu, K-3 dan Lingkungan yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan lingkungan di perusahaan.

Di tahun 2020, Perseroan akan sistem manajemen terintegrasi tersebut sesuai ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sosialisasi sistem manajemen terintegrasi di unit kerja/proyek akan menjadi agenda bagi pengelolaan lingkungan khususnya di lokasi proyek yang memiliki dampak lingkungan yang langsung terasa oleh sekitar.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi Terkait Lingkungan

   Sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi berbagai peraturan yang berkait dengan lingkungan. Komitemen ini dibangun karena Perseroan meyakini bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi Perseroan, tapi juga memiliki sumbangsih dalam konservasi lingkungan secara global.

   Komitmen Perseroan terhadap konservasi lingkungan membawa hasil dengan tidak adanya denda atau sanksi yang dijatuhkan kepada Nindya Karya akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup.

of environmentally friendly equipment and the installation of safety according to occupational safety, safety and health standards so that workers, surrounding communities and the environment are maintained.

ACTIVITY PLANS, TARGETS, AND REALIZATION IN 2020

In line with its efforts to realize vision and mission, the Company has implemented Environmental Management System to create eco-friendly and pollution preventing work processes. To that end, the Company has in place Integrated System of Quality Management, OHS, and Environment in order to fulfill the requirements of Quality, Occupational Health and Safety, and Environmental standards in the Company.

In 2020, the Company had integrated the management system according to ISO 9001:2015 on Quality Management System, ISO 14001:2015 on Environmental Management System, and OHSAS 18001:2007 on Occupational Health and Safety Management System. The dissemination of the integrated management system in the work units/ projects will be an agenda for environmental management, especially in the project location that has immediate environmental impact on the surrounding areas.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CARRIED OUT

1. Compliance with Regulations Related to Environment

   As a responsible business actor, the Company is committed to comply with various regulations relating to the environment. This commitment was built because the Company believes that concerning for the environment not only benefits the Company, but also contributes to environmental conservation globally.

   The Company's commitment to environmental conservation has resulted in the absence of fines or sanctions imposed on Nindya Karya due to non-compliance with environmental laws and regulations.

2. Penggunaan Material dan Energi yang Ramah Lingkungan

Material merupakan bahan-bahan/materi-materi dasar yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk dapat memroses material menjadi bahan bernilai guna, Perusahaan menggunakan energi tertentu. Perusahaan memiliki kebijakan terkait penggunaan material dan energi yang efisien serta berorientasi pada dampak lingkungan.

Sebagai pelaku usaha di bidang konstruksi, Perseroan menggunakan berbagai sumber daya alam atau material tak terbarukan yaitu pasir, batu belah, semen, dan besi beton. Sedangkan sumber daya alam atau material terbarukan yang digunakan antara lain berupa kayu. Volume penggunaan material sangat dipengaruhi oleh jumlah proyek yang ditangani Perusahaan. Per 31 Desember 2020, volume atau berat total material yang dipakai Perseroan berdasarkan data dari Wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2. Use of Eco-Friendly Materials and Energy

Materials are the basic utilities in the activities conducted. The Company uses certain energy to process materials to be valuable. The company has policies related to the use of materials and energy that are efficient and oriented to environmental impacts.

As a business actor in the construction sector, the Company uses various natural resources or non-renewable materials, namely sand, split stone, cement, and concrete iron. While natural resources or renewable materials used include wood. The volume of material use is strongly influenced by the number of projects handled by the Company. As of December 31, 2018, the total volume or weight of the material used by the Company based on data from Regions 1, 2, 4 and 5 can be seen in the table below.

URAIAN *DESCRIPTION*	SATUAN *UNIT*	*VOLUME*	
		2020	2019
MATERIAL TERBARUKAN *RENEWABLE MATERIAL*			
Besi Beton *Concrete Iron*	Ton	27.946	32.5
Semen *Cement*	Ton	47.944	50
MATERIAL TIDAK TERBARUKAN *NON-RENEWABLE MATERIAL*			
Tanah Merah *Laterite*	m^3	147.201	172.545
Agregat *Aggregate*	m^3	386.513	150

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dalam penggunaan bahan baku material, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk memperhatikan aspek dan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Untuk mendapatkan material berupa agregat halus, agregat kasar dan tanah timbunan misalnya, maka lokasi pengambilannya harus sudah memenuhi syarat-syarat mengenai analisa mengenai dampak lingkungan, serta memiliki izin IUP (Izin Usaha Produksi). Selain itu, lokasi tersebut juga tidak berada di area atau wilayah yang berdekatan dengan kawasan lindung atau dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.

As a form of concern for the environment, in the use of raw materials, the Company makes every effort to pay attention to the environmental aspects and impacts in accordance with the regulations issued by the Government. To obtain material in the form of fine aggregate, coarse aggregate and land of embankment, for example, the location of extraction must have fulfilled the requirements regarding the analysis of environmental impacts, and has an Mining Business License ("IUP") Operation Production. In addition, the location is also not in an area that is adjacent to a protected zone or with high biodiversity value.

PEDOMAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU MATERIAL

GUIDENCE FOR USING RAW MATERIALS

JENIS MATERIAL *MATERIAL TYPE*	PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI *REQUIREMENT*
Agregat (Batu Pecah, Batu Belah, Pasir) *Aggregate (Broken Stone, Split Stone, Sand)*	Memiliki surat izin usaha pertambangan – Operasi Produksi *Has Mining Business License ("IUP") Operation Production*

JENIS MATERIAL *MATERIAL TYPE*	PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI *REQUIREMENT*
Tanah Timbunan *Landfills*	Memiliki surat izin pertambangan – Operasu Produksi *Has Mining Business License ("IUP") Operation Production*
Kayu *Wood*	Memiliki surat izin usaha perkayuan *Have Business Permit for Timber Forest Products*
Besi Beton *Concrete Iron*	Sertifikat SNI, Millsheet, Hasil Test Lembaga Independent *SNI Certificate, Millsheet, Test Results from Independent Institution*

Untuk penggunaan energi, Perseroan menggunakan sumber energi utama berupa listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Penggunaan listrik bersumber dari PT PLN (Persero), dan Perseroan menyiapkan genset sebagai alternatif jika pasokan listrik dari PLN padam. Energi listrik digunakan dalam operasional kantor, seperti penerangan, menghidupkan piranti elektronik penunjang kerja, dan lain-lain. Sementara itu, bahan bakar minyak yang dipakai adalah bensin (Pertamax/ Pertalite/Premium) dan Solar untuk bahan bakar kendaraan operasional dan genset.

Perseroan menyadari bahwa ketersediaan listrik maupun BBM semakin terbatas, dan masuk kategori sumber energi tak terbarukan. Jika tidak bijaksana dalam menggunakan, misalnya berperilaku boros, maka pasokan tersebut akan lebih cepat habis. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penghematan listrik dan BBM, baik untuk operasional di kantor maupun di lokasi proyek.

Langkah penghematan listrik di operasional kantor maupun di lokasi proyek, antara lain, dilakukan dengan sosialisasi penghematan energi, himbauan untuk mematikan lampu dan piranti listrik (komputer, AC, televisi, kipas angin, dan lain-lain) apabila sudah tidak digunakan, dan sebagainya. Selain itu, Perseroan juga memperbanyak panel kaca pada ruangan perkantoran sehingga pada siang hari bisa memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penerangan. Upaya yang lain adalah mengganti lampu TL (*Fluorescent Lamp*) dengan lampu LED (*Light Emitting Diode*) yang lebih hemat energi. Sedangkan upaya penghematan bahan bakar minyak dilakukan, antara lain, dengan mengurangi perjalanan dinas dan mengganti rapat tatap muka dengan telekonferensi.

Seluruh energi yang dikonsumsi Perseroan berasal dari energi tidak terbarukan yang dihitung berdasarkan tagihan Kwh meter dari PLN untuk konsumsi listrik, dan satuan liter yang diperoleh dari Wilayah 1, 2, 4, dan 5 yang mencatat pengeluaran bahan bakar minyak, baik untuk kendaraan operasional maupun genset. Total konsumsi energi yang digunakan oleh Nindya Karya selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

For energy use, the Company uses the main energy source in the form of electricity and petroleum (BBM). The use of electricity sourced from PT PLN (Persero), and the Company prepares power generators as an alternative if the electricity supply from PLN goes out. Electrical energy is used in office operations, such as lighting, turning on work supporting electronic devices, and others. Meanwhile, the petroleum used is gasoline (Pertamax/ Pertalite/Premium) and diesel fuel for fueling operational vehicles and generators.

The Company realizes that the availability of electricity and fuel is increasingly limited, and is included in the category of non-renewable energy sources. If it is not wisely used, for instance a wasteful behavior, the supply will run out faster. Therefore, the Company is committed to save electricity and fuel, both for operations at the office and project sites.

The steps to save electricity in office operations and project sites, among others, are carried out by socializing energy savings, appealing to turn off lights and electrical devices (computers, air conditioners, televisions, fans, etc.) if they are not in use, and so on. In addition, the Company also increases glass panels in office spaces so that in the daytime sunlight can be used as a source of lighting. Another effort is to replace the TL lamp (Fluorescent Lamp) with LED (Light Emitting Diode) lamps that are more energy efficient. While efforts to save petroleum are carried out by, among others, reducing official travel and replacing face-to-face meetings with teleconferencing.

All energy consumed by the Company comes from nonrenewable energy calculated based on Kwh meter bills from PLN for electricity consumption, and liter units obtained from Regions 1, 2, 4 and 5 which record petroleum expenditure, both for operational vehicles and generators. Nindya Karya's total energy consumption in 2020 can be seen in the table below.

TABEL VOLUME KONSUMSI ENERGI DALAM ORGANISASI

TABLE OF ENERGY CONSUMPTION VOLUME WITHIN THE ORGANIZATION

KONSUMSI ENERGI *ENERGY CONSUMPTION*	SATUAN *UNIT*	2020	2019
Listrik *Electricity*	kWh	1.085.732.662	1.067.637
BBM *Fuel*	liter	258.105	996

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan energi pada tahun 2020 naik/turun dibandingkan tahun 2019. Kenaikan penggunaan energi disebabkan oleh bertambahnya ruangan, SDM dan kegiatan bisnis.

Based on the table above, energy use in 2020 increased compared to 2019. The increase in energy use was caused by the increase in work spaces, human resources and business activities.

3. Penggunaan Air

3. Water Consumption

Penggunaan air yang efisien harus menjadi komitmen bagi pelaku usaha. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang cukup pesat telah memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk dapat ikut bertumbuh. Penggunaan air secara masal yang tidak terkelola dengan baik akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup.

Efficient consumption of water should become a commitment for business players. Indonesia's rapid economic growth has provided opportunities for businesses to grow. The massive, improperly managed use of water will have a negative impact on the environment.

Untuk memenuhi kebutuhan air yang besar, Perseroan memanfaatkan air PDAM dan air tanah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Wilayah 1, 2, 4, dan 5, volume pengambilan air berdasarkan sumbernya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

To fulfill the need for a large quantity of water, the Company utilizes PDAM water and ground water. Based on data obtained from Region 1,2,4,5, the volume of water withdrawn based on sources as of December 31, 2020 is as follows:

URAIAN *DESCRIPTION*	SATUAN *UNIT*	2020	2019
Air PDAM *PDAM Water*	m^3	4.313	10.961

Standar dan metodologi yang digunakan dalam menghitung pemakaian air adalah:

- Sumber air PDAM : perhitungan konsumsi air (m^3) berdasarkan besarnya tagihan PDAM tiap bulan.
- Sumber air sumur: perhitungan konsumsi air (m^3) dilakukan dengan cara membaca langsung dari alat *flowmeter* yang ada pada tiap mesin pompa. Pencatatan angka yang tertera pada alat *flowmeter* sesuai dengan jumlah air yang terpakai setiap bulan.

Perseroan menyadari bahwa air PDAM maupun air tanah ketersediaannya semakin menipis. Bahan baku air yang diolah PDAM semakin buruk kualitasnya karena tercemar sedangkan penggunaan air tanah kian terbatas karena semakin banyak orang atau perusahaan yang mengambilnya. Oleh karena itu, Nindya Karya berkomitmen untuk melakukan efisiensi penggunaan air. Kebijakan yang dilakukan

Standards and methodologies used in calculating water use are:

- PDAM water source: calculation of water consumption (m^3) based on the amount of PDAM bills every month.
- Ground water source: calculation of water consumption (m^3) is done by reading directly the flowmeter on each pump engine. Record the numbers listed on the flowmeter according to the amount of water used every month.

The Company realizes that PDAM water and ground water have been increasingly depleting. Quality of raw water processed by PDAM is getting worse due to pollution, while the use of ground water is increasingly limited for being withdrawn by more people or companies. Therefore, Nindya Karya is committed to make efficiency in the use of water. The policies carried out include issuing appeals to use

antara lain mengeluarkan himbauan penggunaan air secara bijaksana (hemat), dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap instalasi air sehingga bisa dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atau kebocoran.

4. Pengelolaan Limbah

Dalam kegiatan konstruksi yang dilakukan Perusahaan, limbah yang muncul sebagai sisa- sisa dari kegiatan operasi mencakup limbah B3 dan non B3 perusahaan, cair maupun padat. Pengolahan limbah yang dijalankan Perusahaan telah mengacu pada kerangka ISO 14001:2015 terkait dengan *Environmental Management Systems-Requirements with Guidance For Use*. Selama penanganan tumpahan, catatan harus dibuat dengan memperhatikan perihal:

i. Lokasi proyek dan lokasi tumpahan
ii. Tipe material dan jumlah yang terlepas
iii. Orang yang hadir, termasuk mencakup karyawan Perseroan, *sub-contractor*, masyarakat, wartawan, dan sebagainya.
iv. Tindakan penanganan, dengan waktu pelaksanaan
v. Pembacaan alat pemantau udara
vi. APD yang dipakai oleh personel yang menangani
vii. Berbagai paparan atau gejala dilaporkan
viii. Berbagai macam informasi mungkin bisa digunakan kemudian untuk memeriksa dampak tumpahan atau evaluasi tindakan penanganan.

Setelah penanganan tumpahan lengkap, catatan harus ditinjau secara khusus untuk tujuan evaluasi penanganan. Tindakan koreksi harus ditujukan dalam memenuhi pelaksanaan Program Pengendalian Bahaya. Catatan-catatan yang dihasilkan didalam hubungannya terhadap program ini harus dipelihara sesuai dengan pengendalian rekaman mutu.

Di bawah ini alur kerja penanganan pembersihan tumpahan B3 dan tumpahan limbah B3:

the water wisely (saving), and periodically checking water installations so that repairs can be carried out in the event of damage or leakage.

4. Waste Treatment

In the construction activities carried out by the Company, waste that appears as remnants from operating activities includes B3 and non B3 waste, liquid or solid. The waste management carried out by the Company refers to the ISO 14001:2015 related to Environmental Management Systems-Requirements with Guidance for Use. During handling of spills, records must be made with regard to the subject:

i. Project location and spill location
ii. Material type and amount released
iii. People present, including Company employees, subcontractors, community, journalists, and so on.
iv. The handling action, with the time of implementation
v. Reading of the air monitor
vi. PPE used by the personnel in charge
vii. Various exposures or symptoms reported
viii. Various types of information that may be used later to examine the impact of spills or evaluation of handling measures.

After a complete handling of spills, records must be specifically reviewed for the purpose of evaluating the handling. Corrective actions must be aimed at fulfilling the implementation of the Danger Control Program. Records generated in relation to this program must be maintained in accordance with quality record control.

Below is the workflow for cleaning the spills of B3 and non-B3 waste:

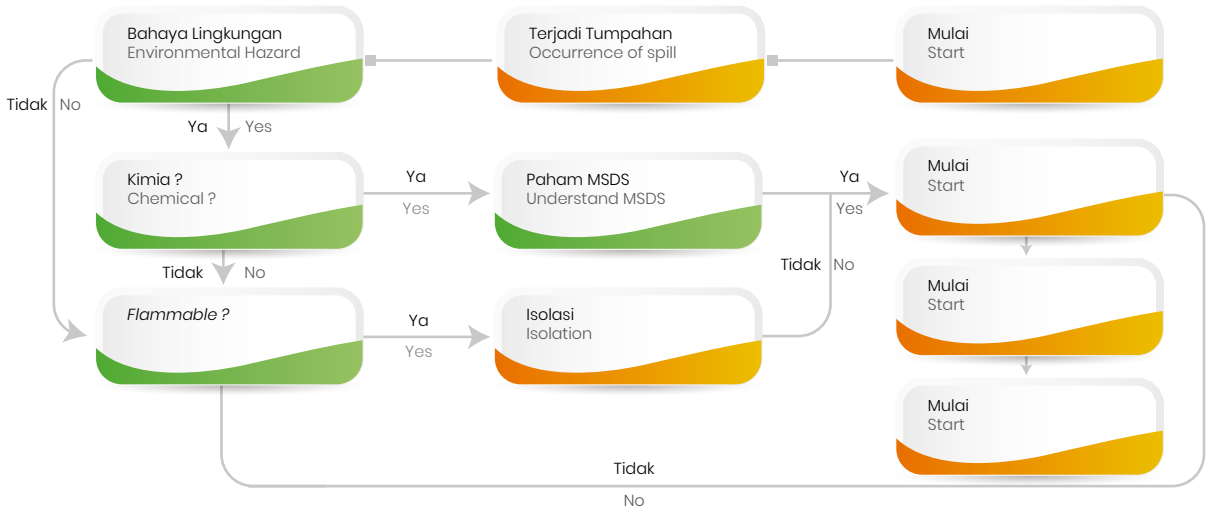

Selain penanganan tumpahan, Nindya Karya juga menghasilkan air limbah, limbah padat dan limbah B3. Di Kantor Pusat misalnya, air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan mandi cuci dialirkan ke saluran kawasan dan limbah cair kakus dikelola dengan septik tank secara *anaerob*. Sesuai SK Gub. No. 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Propinsi DKI Jakarta mensyaratkan bahwa air limbah domestik tidak boleh diresapkan dalam tanah karena dapat mencemari air tanah sehingga harus diolah terlebih dahulu untuk dapat dibuang ke saluran air permukaan.

Perusahaan secara berkala melakukan pengujian terhadap air limbah yang dibuang ke saluran air permukaan. Dengan demikian dapat diketahui kualitas air limbah sebelum dibuang ke saluran air permukaan.

In addition to handling spills, Nindya Karya also produces wastewater, solid waste and B3 waste. In the Head Office, for example, domestic wastewater from washing-bath activities is flowed to the area channels and latrine wastewater is managed by septic tanks anaerobically. As per Governor's Decree No. 122 Year 2005 on Domestic Wastewater Management in the DKI Jakarta Province requires that domestic wastewater should not be absorbed by the soil because it may contaminate ground water, it must be processed in advance to be able to be discharged into surface waterways.

The Company periodically tests wastewater discharged into surface waterways. Thus the quality of wastewater can be known before being discharged into surface waterways.

TABEL UJI LIMBAH DOMESTIK PEMBUANGAN AIR CILIWUNG TAHUN 2020

DOMESTIC WASTE TEST FOR CILIWUNG DISPOSAL IN 2019

NO	PARAMETER	SATUAN *UNIT*	HASIL UJI *TEST RESULT*	KADAR MAKSIMUM *MAXIMUM LEVEL*	SPESIFIKASI METODE *METHOD SPECIFICATIONS*
1	pH	-	6,59	6-9	APHA Section 4500 H* 23rd Ed 2017
2	BOD	mg/l	41	30	IKM/7.2.81//MB (BOD Oxydirect)
3	COD	mg/l	132,8	100	SNI 6989.73:2009 SNI 6889.2:2009
4	TSS	mg/l	15,3	30	APHA Section 2540 D 23rd Ed 2017
5	Minyak dan Lemak *Oil and Fat*	mg/l	<0,7912	5	APHA Section 5520 Oil & Grease-F, 23rd Ed 2017
6	Amoniak *Ammonia*	mg/l	19,8	10	APHA Section 4500 NH_3 B and F, 23rd Ed 2017
7	Total Coliform	Jumlah/100 ml *Total/100 ml*	7350	3000	IKM/7.2.37/MB

NO	PARAMETER	SATUAN *UNIT*	HASIL UJI *TEST RESULT*	KADAR MAKSIMUM *MAXIMUM LEVEL*	SPESIFIKASI METODE *METHOD SPECIFICATIONS*
1	pH	-	7,81	6-9	APHA Section 4500 H* 23rd Ed 2017
2	BOD	mg/l	19	30	IKM/7.2.81//MB (BOD Oxydirect)
3	COD	mg/l	59,2	100	SNI 6989.73:2009 SNI 6889.2:2009
4	TSS	mg/l	203,1	30	APHA Section 2540 D 23rd Ed 2017
5	Minyak dan Lemak	mg/l	<0,7912	5	APHA Section 5520 Oil & Grease-F, 23rd Ed 2017
6	Amoniak	mg/l	7,59	10	APHA Section 4500 NH_3 B and F, 23rd Ed 2017
7	Total Coliform	Jumlah/100 ml	0	3000	IKM/7.2.37/MB

Untuk pengelolaan limbah padat domestik, menurut data dari Divisi Properti, Kantor Pusat Nindya Karya menghasilkan timbunan sampah sekitar 1,5 meter kubik per hari. Sampah tersebut berasal dari aktivitas karyawan dan tamu serta kantin. Penanganan sampah dilakukan oleh petugas *cleaning service* dari setiap lantai dan ditempatkan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang berada di belakang area gedung operasional. Penanganan sampah padat sudah dilakukan pemisahan antara sampah anorganik dan organik. TPS berupa bangunan terpisah dari Gedung Nindya Karya. Sampah di TPS selanjutnya dikerjasamakan dengan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur dengan frekuensi pengangkutan dua kali sepekan.

Adapun pengelolaan limbah B3 di Kantor Pusat, antara lain, berupa lampu TL bekas, lampu ulir bekas, baterai bekas, Perusahaan mengumpulkan limbah tersebut di dekat lokasi TPS domestik. Selanjutnya, limbah tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berizin. Jenis limbah B3 berupa lampu TL rata-rata sebulan sebanyak 16 buah, sedangkan lampu PLS sebanyak 9 buah.

For the management of domestic solid waste, according to the data from the Property Division, Nindya Karya Head Office produces around 1.5 cubic meters of waste per day. The garbage comes from the activities of employees and guests and the canteen. Waste handling is carried out by cleaning service officers from each floor and placed in a Temporary Waste Shelter (TPS) which is behind the operational building area. Solid waste handling has been carried out the separation between inorganic and organic waste. TPS is a separate building from the Nindya Karya Building. The garbage at the temporary waste shelter is then cooperated with the East Jakarta Sanitation Department, with a frequency of transportation twice a week.

The management of B3 waste at the Head Office, among others, is in the form of used TL lights, used screw lights, used batteries, the Company collects the waste near the location of domestic TPS. Furthermore, the waste is cooperated with licensed third parties. The types of B3 waste in the form of TL lights averaged of 16 units a month, while PLS lamps were 9 units.

PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Bagi masyarakat atau pemangku kepentingan yang memiliki permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasi yang dijalankan Perseroan dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada proyek dan/atau Kantor Wilayah sebagai perwakilan perusahaan yang berada di lokasi proyek. Perseroan juga membuka kemungkinan penyampaian pengaduan maupun keluhan melalui Kantor Pusat.

COMPLAINTS ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS

For the community or stakeholders who have environmental problems arising from operations carried out by the Company, they can submit complaints or complaints to the project and/or Regional Office as a representative of the Company located at the project site. The company also opens the possibility of submitting complaints and complaints through the Head Office.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

AWARDS AND CERTIFICATES IN THE FIELD OF ENVIRONMENT

NO	JENIS SERTIFIKAT *TYPE OF CERTIFICATE*	TANGGAL DIKELUARKANNYA *ISSUANCE DATE*	MASA BERLAKU HINGGA *VALIDITY PERIOD*	DIKELUARKAN OLEH *ISSUED BY*
1	Sertifikasi SMK3 PP NO.50 TAHUN 2012 *OHS Management System Certification* *PP No. 50 of 2012*	14 Juli 2017 *July 14, 2021*	-	Sucofindo

BIAYA DAN/ATAU INVESTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN

Seluruh biaya dan/atau investasi terkait pengelolaan aspek lingkungan seperti perizinan maupun pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. Sebagai pelaksana pekerjaan proyek, prosedur tetap terkait lingkungan yang diberlakukan di lingkup perusahaan terintegrasi dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

CSR COSTS AND/ OR INVESTMENT IN ENVIRONMENTAL ASPECT

All costs and/or investments related to the management of environmental aspects such as licensing and environmental management are the responsibility of the Customers. As the executor of project works, environmental related procedures applied in the scope of the Company are integrated in the Occupational Health and Safety aspect.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

RUMUSAN, KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Hubungan industrial yang baik antara Perseroan dengan seluruh karyawan merupakan kunci dalam menunjang pencapaian berbagai target Perseroan. Implementasi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan

CSR FORMULATION, COMMITMENT, AND POLICIES IN RELATION TO MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Good industrial relations between the Company and all employees are key in supporting the achievement of the Company's various targets. The implementation of Corporate Social Responsibility policies related to employment, occupational health and safety practices is

kerja adalah tanggung jawab Perusahaan terhadap karyawan sebagai pemangku kepentingan *Intern*al, yang meliputi praktik terbaik atas pengelolaan ketenagakerjaan, apresiasi dan remunerasi serta jaminan kesehatan bagi karyawan, serta persamaan hak dan kesempatan kerja.

Bagi Perseroan, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang mendalam guna menjaga keberadaan bisnis Perseroan dalam bidang konstruksi. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap K3 terdiri dari kesetaraan di tempat kerja, praktik kesehatan dan keselamatan kerja, serta sistem manajemen mutu K3 dan lingkungan. Hal tersebut juga disesuaikan dengan regulasi terkait K3 yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Perseroan secara khusus diatur dalam Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SM-K3L). Pedoman tersebut telah ditinjau dan disahkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan No. 496/DIRUT-I/KDRST/07/2015 tanggal 6 Juli 2015. Pedoman tersebut memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi:

1. Organ pengelola K3L;
2. Standar dan pemenuhan aspek kesehatan pegawai;
3. Standar pemeliharaan peralatan operasional dan pendukung operasional kerja;
4. Pelatihan keselamatan kerja dan mitigasi risiko terhadap kecelakaan kerja melalui kegiatan identifikasi bahaya kecelakaan;
5. Penyediaan alat perlindungan diri;
6. Analisis kecelakan kerja dan statistik;
7. Prosedur tanggap darurat;
8. Sistem izin kerja; dan
9. Program manajemen keselamatan sub kontraktor.
10. Standar dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk perhatian yang besar, Perseroan memiliki unit khusus di bidang Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) yang secara khusus memiliki tugas dalam melakukan pemantauan, pencegahan, pengukuran dan penanggulangan atas potensi risiko kecelakaan kerja. Bagan struktur organ K3L Kantor Pusat sampai dengan Wilayah dan Divisi adalah sebagai berikut:

the Company's responsibility to employees as internal stakeholders, which includes best practices for labor management, appreciation and remuneration and health insurance for employees, as well as equal rights and employment opportunities.

For the Company, occupational health and safety has a deep role in maintaining the Company's business presence in the construction sector. The form of the Company's responsibility for OHS consists of equality in the workplace, occupational health and safety practices as well as quality management system of OHS and Environment. It is also adjusted to the applicable OHS regulations, namely Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Health and Safety.

Guidelines for implementing occupational health and safety in the Company are specifically regulated in OHSE Management System Guidelines (SM -K3L). These guidelines have been reviewed and approved by the President Director through Decision Letter No. 496/DIRUT-I/KDRST/07/2015 dated July 6, 2015. The guidelines include the Standard Operating Procedure (SOP) which includes:

1. OHSE (K3L) management organs;
2. Standards and fulfillment of employee health aspects;
3. Standard maintenance of operational equipment and work operational support;
4. Occupational safety training and risk mitigation for occupational accidents through accident hazard identification activities;
5. Provision of self-protection equipment;
6. Work accidents analysis and statistics;
7. Emergency response procedures;
8. Work permit system; and
9. Sub-contractor safety management program.
10. Standards and compliance with laws and regulations.

As a form of its great attention, the Company has a special unit in Occupational Health and Safety (OHS) specifically tasked to monitor, prevent, measure and mitigate occupational accident risk potential. OHSE Structure at the Head Office up to the Regional Offices and Divisions is as follows:

STRUKTUR ORGAN PENGELOLA K3L

OHSE MANAGING ORGAN STRUCTURE

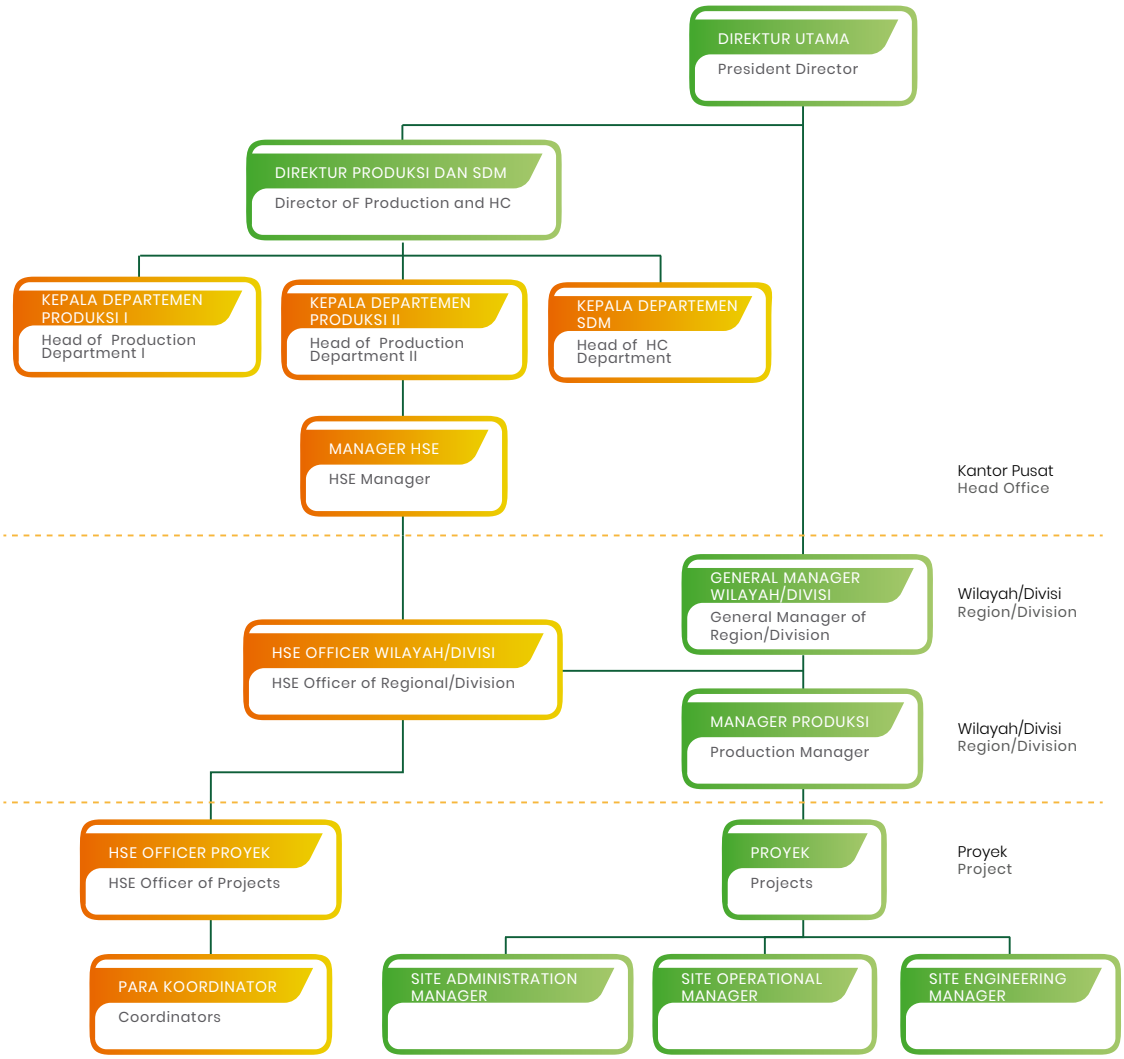

RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA REALISASINYA DI SEPANJANG TAHUN 2020

Tahun 2020, Perseroan menekankan K3 sebagai fokus dalam pengembangan bisnis jasa konstruksi yang dijalankan. Perseroan akan menerapkan K3 sebagai pengendalian mutu dalam pelaksanaan proyek. Beberapa program dan agenda sebagai rencana penerapan K3 adalah:

1. Sosialisasi SM-MK3L di unit kerja/proyek.
2. Peningkatan komitmen implementasi HSE sesuai Manual Book.
3. Pelatihan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta SMK3 PP 50 Tahun 2012.

ACTIVITY PLANS, TARGETS, AND REALIZATION IN 2020

In 2020, the Company emphasized OSH as the focus in developing the construction services business being carried out. The Company will implement OSH as a quality control in project implementation. Some programs and agendas as plans for OSH implementation are as follows:

1. Dissemination of SM - MK3L in work units/ projects.
2. Enhancement of commitment to HSE implementation according to the Manual Book.
3. Training on ISO 9001:2015 on Quality Management Systems, ISO 14001: 2015 on Environmental Management System, and OHSAS 18001:2007 on Occupational Health and Safety Management System

PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN

KESETARAAN GENDER, KESEMPATAN KERJA YANG SAMA, DAN PENGEMBANGAN KARIER

Salah satu aspek yang mendasar yang dipenuhi Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan adalah pemenuhan atas kesetaraan dan kesempatan kerja. Perseroan senantiasa menjalankan aspek kesetaraan dan kesempatan kerja sesuai pada kepantasan yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Perseroan tidak melihat pemenuhan kesetaraan dan kesempatan dengan latar belakang gender maupun SARA . Beberapa bentuk implementasi lainnya oleh perusahaan dalam merepresentasikan prinsip kesetaraan, antara lain diwujudkan melalui:

1. Pemberian imbal jasa pekerja yang sesuai dengan jenjang karier, tanggung jawab serta kompetensi.
2. Kesempatan yang sama bagi karyawan dalam mengembangkan kariernya.
3. Kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi jabatan.

Perseroan membuka seluas-luasnya bagi insan Nindya Karya yang berprestasi tanpa memandang latar belakang gender ataupun Suku, Agama, dan Ras (SARA). Di tahun 2020, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 666 orang, yang terdiri dari 531 orang karyawan laki-laki dan 135 orang karyawan perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterbukaan Perseroan terhadap rekrutmen karyawan tanpa memandang gender.

PROGRAMS AND ACTIVITIES RELATED TO MANPOWER

GENDER EQUALITY, FAIR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES, AND CAREER DEVELOPMENT

The Company always carries out equality and employment opportunities as fundamental aspects in accordance with the applicable regulations. The Company considers fulfillment of equality and opportunity regardless of gender and racial backgrounds. Some other forms of equality principle implementation by the Company are as follows:

1. Providing employee benefits in accordance with career paths, responsibilities and competencies.
2. Equal opportunities for employees to develop their careers
3. Opportunity to get training in order to develop job competencies.

The Company opens as wide as possible for the Nindya Karya's outperforming personnel regardless of their gender or ethnicity, religion and race (SARA) background. In 2020, the Company's total employees reached 666 employees, consisting of 531 male employees and 135 female employees. This composition shows the Company's openness to employee recruitment regardless of gender.

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN (ORANG)
EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

JENIS KELAMIN *GENDER*	JUMLAH KARYAWAN *TOTAL EMPLOYEES*		KENAIKAN/PENURUNAN *INCREASE/DECREASE*	
	2020	2019	JUMLAH *TOTAL*	PEERSENTASE *PERCENTAGE*
Laki-laki *Male*	531	774	(243)	(31,40%)
Perempuan *Female*	135	205	(70)	(34,15%)
JUMLAH *TOTAL*	**666**	**979**	**(313)**	**(31,97%)**

Perseroan memberikan hak kepada pekerja perempuan berupa hak dasar pekerja, hak kesempatan pengembangan karier dalam perusahaan. Selain itu perusahaan juga memberikan hak-hak perempuan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

The Company gives the rights to female employees in the form of basic rights of employees, the right to career development opportunities in the Company. In addition, the Company also provides women rights in accordance with the Manpower Law.

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Keberhasilan dan kemajuan Perseroan merupakan hasil kerja bersama antara harapan Pemegang Saham, bentuk penasihat dan penyeimbang *performance* dari Dewan Komisaris dan pengelola yang diwakili oleh Manajemen dengan dukungan utama oleh Insan Nindya Karya. Oleh karena itu, Perseroan terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan guna meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Pemenuhan kesejahteraan karyawan Perseroan berupa gaji dan upah di tahun 2020 sebesar Rp666 miliar, meningkat 461,65% dibandingkan jumlah gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan tahun 2019 sebesar Rp118,35 miliar.

FULFILLMENT OF EMPLOYEE WELFARE RIGHTS

The Company's success and progress is the result of joint efforts between the Shareholders' expectations, advisory function and performance balance of the Board of Commissioners, company management function represented by the Management with the main support from Nindya Karya's people. Therefore, the Company continues to be committed to promoting employee welfare in order to increase employees' motivation and loyalty to the Company.

Fulfillment of the welfare of the Company's employees in the form of salaries and wages in 2020 was Rp666 billion, an increase of 461.65% compared to the amount of salaries and wages given to employees in 2019 amounting to Rp118.35 billion.

GAJI DAN UPAH

SALARY AND WAGE

URAIAN *DESCRIPTION*	JUMLAH KARYAWAN *TOTAL EMPLOYEES*		KENAIKAN/PENURUNAN *INCREASE/DECREASE*	
	2020	2019	JUMLAH *TOTAL*	PEERSENTASE *PERCENTAGE*
Gaji dan Upah *Salary and Wage*	666	118.58	547,42	461,65%

Pemenuhan kesejahteraan yang dibayarkan Perseroan kepada karyawan di atas menunjukkan komitmen Perseroan untuk dapat tumbuh bersama karyawan sejalan dengan kegiatan usaha dan nilai ekonomi Perseroan yang mengalami perkembangan setiap tahun.

Sebagai bagian dari transparansi informasi, berikut disampaikan rasio gaji/remunerasi tertinggi dan terendah per bulan yang menggambarkan jenjang gaji/remunerasi yang diberlakukan Perseroan.

The fulfillment of welfare paid by the Company to the employees above shows the Company's commitment to be able to grow with employees

in line with the business activities and economic value of the Company that develops every year.

As part of the transparency of information, the following is the highest and lowest salary/remuneration ratio per month that describes the salary/remuneration level applied by the Company.

APRESIASI

Setiap karyawan Perseroan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan penghargaan dari Perseroan atas dasar prestasi dan kinerja tanpa adanya diskriminasi. Penghargaan karyawan tersebut antara lain penghargaan Dwi Windu, Tri Windu, Tri Dasawarsa, serta penghargaan Kinerja Karyawan.

APPRECIATION

Every employee of the Company has the same opportunity to get an award from the Company on the basis of achievement and performance without discrimination. The employee awards include Dwi Windu (16 years of service), Tri Windu (24 years of service), and Tri Dasawarsa (30 years of service) awards, and Employee Performance awards.

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDUSIF

Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi karyawan untuk membentuk komunitas dengan kegiatan di luar waktu kerja. Berbagai komunitas yang aktif mencakup kegiatan olahraga seperti yoga; kegiatan hobi seperti Nindya Gowes, Paduan Suara, dan Nindya Rider; dan kegiatan keagamaan seperti Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) Komisariat PT Nindya Karya (Persero). Adanya komunitas di luar waktu kegiatan kerja diharapkan mampu membentuk hubungan non struktural di antara karyawan, yang pada akhirnya akan menciptakan pembentukan lingkungan kerja yang kondusif.

ESTABLISHMENT OF CONDUCIVE WORK ENVIRONMENT

The Company provides the widest opportunity for employees to form community groups with activities outside the working hours. The active community groups include sports activities such as yoga; hobby activities such as “Nindya Gowes”, Choir and Nindya Rider; and religious activities such as “Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) Komisariat” of PT Nindya Karya (Persero). The existence of community groups outside of work activities is expected to form non-structural relationships among employees, which in turn will create a conducive working environment.

TURNOVER KARYAWAN

Rasio *turnover* karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perseroan. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perseroan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Perhitungan rasio *turnover* adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE TURNOVER

The employee turnover ratio shows productivity from the Company’s performance. In addition, the employee turnover rate is also a reflection of the Company’s culture and work system which can be an indicator of the Company’s success in creating a conducive work environment.

Turnover Ratio calculation is as follows:

TURNOVER KARYAWAN
EMPLOYEE TURNOVER

PENYEBAB *CAUSE*	2020	2019
Pensiun alami *Regular retirement*	4	14
Pensiun dini *Early retirement*	0	2
Meninggal *Pass away*	3	1
Mengundurkan diri *Resignation*	54	21
Diberhentikan karena melakukan pelanggaran *Dismissed for committing a violation*	0	4
Jumlah karyawan yang keluar *Total employees quitting*	466	94
Jumlah karyawan yang masuk *Total employees recruited*	156	105
Jumlah karyawan di awal tahun *Total employees at the beginning of the year*	979	997
Jumlah karyawan di akhir tahun *Total employees at the end of the year*	666	979
Persentase Turnover *Turnover percentage*	56,66%	9,51%

Rasio turnover pada tahun 2020 memperhitungkan karyawan masuk, karyawan keluar, dan jumlah karyawan entitas anak, PT Nindya Beton; sejalan dengan kebijakan konsolidasi SDM entitas anak ke tingkat Perusahaan sebagai induk.

The turnover ratio in 2020 was calculated by taking into account employee entry, outgoing employees, and the number of employees of the subsidiary PT Nindya Beton; in line with the policy to consolidate HR of the subsidiary to the Company's level as the parent entity.

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL: SERIKAT PEKERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan, menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja. Terwujudnya hubungan yang berkeadilan dan komunikasi yang hangat antara Pemegang Saham yang diwakili oleh Manajemen dengan Pekerja merupakan aset terpenting bagi Perusahaan dan menjadi hubungan prioritas dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

Perseroan membangun hubungan industrial melalui jaminan keberadaan serikat pekerja di lingkungan kerja Perseroan sebagai bagian dari hak berserikat karyawan. Serikat pekerja di lingkungan Perseroan bernama Serikat Pekerja Nindya Karya yang berdiri sejak 17 Maret 1999. Seluruh karyawan yang bekerja di Perseroan beserta entitas dan unit usahanya yang dengan sekaligus telah menjadi anggota serta memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam AD/ART Serikat Pekerja Nindya Karya. Dengan demikian jumlah anggota Serikat Pekerja Nindya Karya berbanding lurus dengan jumlah karyawan Perseroan, atau dengan persentase 100%.

FREEDOM OF ASSOCIATION AND GATHERING: LABOR UNIONS AND INDUSTRIAL RELATIONS

Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety, and Collective Labor Agreement (PKB) between management and labor union, becomes a reference for all labor policies to ensure compliance with applicable laws and minimize the occurrence of violations of human rights in work relations. The realization of a fair relationship and warm communication between Shareholders represented by Management and Workers is the most important asset for the Company and becomes a priority relationship in achieving the Company's vision and mission.

The Company builds industrial relations through guaranteeing the existence of unions in the Company's work environment as part of the labor union rights. The labor union in the Company is called Serikat Pekerja Nindya Karya (Nindya Karya Workers Union) which was established on March 17, 1999. All employees who work at the Company and their entities and business units are automatically at the same time become members and fulfill all the requirements specified in the Articles of Association and Bylaws of Serikat Pekerja Nindya Karya. Thus, the number of members of Serikat Pekerja Nindya Karya is directly proportional to the number of Company employees, or with a percentage of 100%.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Seluruh karyawan Perseroan dilindungi oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang ditandatangani oleh pihak Manajemen dan Perhimpunan Pegawai. PKB mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. PKB diperbarui melalui perundingan dan disepakati bersama setiap 2 (dua) tahun sekali. PKB tersebut telah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan melalui

COLLECTIVE LABOR AGREEMENT

All employees of the Company are protected by the Collective Labor Agreement (PKB), which is signed by the Management and the Labor Union. PKB covers the rights and obligations of each party. PKB is renewed through negotiations and agreed upon every 2 (two) years. The PKB has been registered in the Manpower Ministry through the Decision of Director General for Industrial Relations

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.280/PHIJSK-PK/ PKB/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Nindya Karya (Persero) dengan Serikat Pekerja Nindya Karya (SPNK) periode 2019-2021.

PKB Perusahaan mengatur hal-hal di antaranya:

1. Penerimaan dan pengangkatan karyawan
2. Hari kerja dan jam kerja
3. Kewajiban dan hak karyawan
4. Perawatan dan pengobatan
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja
7. Pembinaan dan pengembangan serta peningkatan karier karyawan
8. Penghargaan karyawan
9. Penyelesaian masalah dan keluh kesah
10. Pemutusan hubungan kerja dan pembebasan tugas Karyawan

Development and Workers' Social Security No. KEP.280/PHIJSK-PK/PKB/XII/2019 dated December 31, 2019 concerning Registration of Collective Labor Agreement between PT Nindya Karya (Persero) and Serikat Pekerja Nindya Karya (SPNK) for the 2019-2021 period.

The Company's PKB regulates:

1. Acceptance and appointment of employees
2. Working days and hours
3. Employee obligations and rights
4. Care and treatment
5. Occupational Health and Safety
6. Social security and labor welfare
7. Fostering and developing as well as improving employee careers
8. Employee recognition
9. Problem solving and complaints
10. Termination of employment and release of duties

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Agar suasana kerja yang kondusif dapat tercipta, Perseroan melakukan survei keterikatan dan kepuasan karyawan untuk dapat memetakan harapan karyawan saat bekerja di bawah sistem yang diberlakukan.

Survei keterikatan dan kepuasan karyawan dilakukan dengan mengadaptasi alat ukur *Employee Engagement berdasar Gallup Theory* dan beberapa perihal tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan *Internal*. Indikator keterikatan dibagi dalam 30 item pertanyaan, 20 item pertanyaan mengukur kepuasan karyawan. Total item pernyataan yang digunakan dalam survei ini adalah 50 item. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner survei ini adalah skala interval 5 *point Likert* scale meliputi:

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

In order to create a conducive working atmosphere, the Company conducts employee loyalty and satisfaction survey with a view to map employee expectations while working under the implemented system.

The employee loyalty and satisfaction survey is carried out by adapting the measurement of Employee Loyalty based on Gallup Theory and some additional subjects tailored to internal needs. Attachment indicators are divided into 30 question items, 20 question items to measure employee satisfaction. The number of statement items used in this survey is 50 items. The measurement scale used in this survey questionnaire is the interval scale of 5-point Likert scale including:

DERAJAT KETERIKATAN/KEPUASAN *LEVEL OF ENGAGEMENT/SATISFACTION*	NILAI INTERVAL *INTERVAL SCORE*
Engaged	255 Orang (75%)
Not Engaged	79 Orang (24%)
Disengaged	5 Orang (1%)

Keterikatan karyawan terhadap Perseroan didefinisikan menjadi 13 aspek yang representatif mengukur hal tersebut. Ketigabelas aspek tersebut di antaranya adalah:

Employee attachment to the Company is defined into 13 aspects representative to measure the engagement. These aspects are:

ASPEK KETERIKATAN KARYAWAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT ASPECT*	JUMLAH *TOTAL*
Umpan Balik *Feedback*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Kesempatan Berkembang *Development opportunity*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Kerjasama *Cooperation*	4 Butir Penyataan *4 statements*
Keseimbangan Kerja *Work balance*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Kesetaraan *Equality*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Misi & Tujuan *Mission and objectives*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Keinginan Dihargai *Desire for appreciation*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Kompensasi *Compensation*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Tempat Kerja & Sumber Daya *Workplace and resources*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Kinerja & Akuntablitas *Performance and accountability*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Komunikasi *Communication*	3 Butir Penyataan *3 statements*
Persepsi Individu *Individual Perception*	3 Butir Penyataan *3 statements*
JUMLAH *TOTAL*	**37 BUTIR PENYATAAN** *37 STATEMENTS*

Hasil survei keterikatan dan kepuasan karyawan di tahun 2020 diuraikan sebagai berikut ini.

The results of the employee engagement and satisfaction survey in 2020 are described as follows:

RATA-RATA KESELURUHAN TERKAIT KETERIKATAN KARYAWAN

EMPLOYEE ENGAGEMENT IN AVERAGE

RATA-RATA KESELURUHAN TERKAIT KETERIKATAN KARYAWAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT IN AVERAGE*	KARYAWAN *EMPLOYEE*
Umpan Balik *Feedback*	3,8
Kesempatan Berkembang *Development opportunity*	3,4
Kerjasama *Cooperation*	4,0
Keseimbangan Kerja *Work balance*	4,0
Kesetaraan *Equality*	3,9
Misi & Tujuan *Mission and objectives*	4,1
Keinginan Dihargai *Desire for appreciation*	3,7
Kompensasi *Compensation*	3,1
Tempat Kerja & Sumber Daya *Workplace and resources*	3,9

RATA-RATA KESELURUHAN TERKAIT KETERIKATAN KARYAWAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT IN AVERAGE*	KARYAWAN *EMPLOYEE*
Kinerja & Akuntablitas *Performance and accountability*	3,9
Komunikasi *Communication*	3,9
Persepsi Individu *Individual Perception*	4,1
RATA-RATA *AVERAGE*	**3,8**

Berdasarkan data keseluruhan yang terdapat pada diagram Keterikatan Karyawan terhadap Perseroan tahun 2020 didapati total nilai rata-rata sebesar 3,8 Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan karyawan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap Perseroan. Terutama pada aspek Misi & Tujuan mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,1 hal ini menunjukan bahwa karyawan merasa harus bersatupadu mewujudkan misi dan tujuan bersama demi kemajuan Perseroan. Selain itu pada aspek Kompensasi mendapatkan nilai rata-rata terendah sebesar 3,1 hal ini menunjukan bahwa karyawan memiliki keterikatan yang cukup terhadap Perseroan, karena karyawan merasa cukup dalam menerima gaji untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta merasa gaji yang diterima cukup kompetitif dibandingkan perusahaan lain dengan posisi yang sama.

Based on overall data contained in the diagram of Employee Engagement in 2020, it was found that the total average value was 3,8 This shows that in overall the employees have a high loyalty to the Company. Especially in the aspect of mission and objectives which reaches the highest average value of 4,1 this shows that employees feel they have to work together to realize the common mission and goals for the betterment of the Company. In addition, the Compensation aspect gets the lowest average value of 3,1 this shows that employees have sufficient loyalty to the company, because employees feel sufficient in receiving salary to meet their daily needs, and feel that the salary received is fairly competitive compared to other companies with the same position.

RATA-RATA KESELURUHAN TERKAIT KETERIKATAN KARYAWAN
EMPLOYEE ENGAGEMENT IN AVERAGE

RATA-RATA KESELURUHAN TERKAIT KETERIKATAN KARYAWAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT IN AVERAGE*	JUMLAH *TOTAL*
Kepuasan Terhadap Pekerjaan *Satisfaction to profession*	3,9
Kepuasan Terhada Gaji/Upah *Satisfaction to salary/wage*	3,0
Kepuasan Terhadap Supervisi Atasan *Satisfaction to Well-being Allowance*	3,9
Kepuasan Terhadap Rekan Kerja *Satisfaction to Work Environment*	4,0
Kepuasan Terhadap Kesempatan Promosi *Satisfaction to Supervision*	3,1

Berdasarkan data keseluruhan yang terdapat pada diagram Kepuasan Karyawan terhadap Perusahaan tahun 2020 didapati total nilai rata-rata sebesar 3,58 Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan karyawan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap Perseroan. Terutama pada aspek gaji/upah yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,0 hal ini menunjukan bahwa karyawan merasa puas dengan Perseroan yang memberikan imbal hasil yang memadai, fasilitas kerja yang memadai serta Perseroan juga menciptakan tempat kerja yang nyaman dan sehat.

Based on overall data contained in the diagram of Employee Satisfaction above, in 2020, it was found that the total average value was 3.58 This shows that overall the employees have high satisfaction with the Company. Especially in the aspect of salary/wage that gets the highest average value of 4.0, this shows that the employees are satisfied with the company that provides adequate returns, satisfactory work facilities and the Company also creates a comfortable and healthy workplace.

Selain itu pada aspek gaji/upah menunjukan bahwa karyawan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap gaji/upah yang diterimanya, karena karyawan merasa perusahaan telah memberikan gaji/upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah memenuhi janji kenaikan gaji/upah yang telah disepakati serta karyawan merasa cukup atas gaji/upah yang diberikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

In addition, the salary/wage aspect gets the employees feel the Company has provided salary/wage in accordance with applicable regulations, has fulfilled the promise of an agreed salary/wage increase and the employee feels sufficient for the salary/wages that the Company provides to fulfill their family's needs.

PROGRAM DAN KEGIATAN TERKAIT KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PEMBENTUKAN P2K3

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, perusahaan membentuk panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan organisasi ini mengacu kepada peraturan Menteri tenaga Kerja No. PER.04/MeN/1987 tentang panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata Cara penunjukan ahli Keselamatan Kerja. P2K3 merupakan badan pembantu yang merupakan wadah kerja sama antara perusahaan dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan struktur P2K3 setelah adanya perubahan struktur *Intern*al organisasi pada Agustus 2019, setelah SK Struktur P2K3 No. 875 Tahun 2017 (dikeluarkan pada 26 April 2017) digantikan dengan SK Struktur P2K3 No. 2519 Tahun 2018 yang disahkan pada 17 September 2018 oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta (Sri Haryati) dan berlaku sampai 17 September 2021.

Pembentukan struktur P2K3 Perusahaan di tingkat Pusat diketuai oleh Direktur Produksi dan HSE dan diwakili oleh Kepala Departemen HSE dan Manager Pengendalian HSE sebagai Sekretaris P2K3, telah memiliki sertifikat Ahli K3 Umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI . Struktur P2K3 melibatkan seluruh pejabat di tingkat Kepala Departemen, General Manager, Manager HSE, dan *Officer* HSE.

SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN LINGKUNGAN

Perseroan telah menyiapkan standar Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan standar Mutu ISO 9001:2015, dan SMK3 PP No. 50

PROGRAMS AND ACTIVITIES RELATED TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ESTABLISHMENT OF P2K3

As a business entity committed to compliance with occupational health and safety norms as well as applicable laws and regulations in Indonesia, the Company establishes an Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3). The formation of this organization refers to Regulation of Manpower Minister No. PER.04/MEN/1987 concerning the Occupational Health and Safety Supervisory Committee and the Procedure for Appointment of Occupational Safety Experts. P2K3 is an auxiliary body which is a forum for joint effort between the Company and employees to develop the implementation of occupational health and safety.

In 2020, the Company changed the structure of P2K3 after a change in the organization's internal structure in August 2019, SK P2K3 Structure No. 875/2017 (issued on April 26, 2017) was replaced with SK P2K3 Structure No. 2519 of 2018 which was ratified on September 17, 2018 by the Act. Head of DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office (Sri Haryati) and is valid until September 17, 2021.

The establishment of the Company's P2K3 structure at the Central level is chaired by Production and HSE Director and represented by HSE Department Head and HSE Control Manager as Secretary of P2K3, having a General OHS Expert certificate issued by the Indonesia Manpower Ministry. P2K3 structure involves all officials at the Head of Department level, General Manager, HSE Manager, and HSE Officer.

QUALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

The Company has prepared Quality, Occupational Health & Safety and Environmental standards that are integrated with the Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 9001:2008 Quality standards, and SMK3 PP

Th.2012, ISO 14001:2015 serta Sistem Manajemen Lingkungan dengan Standar ISO 14001:2015. Selain itu, Perseroan juga memiliki sertifikat atas penerapan SM-Mutu yang terintegrasi dengan SMK3 dan ISO 45001:2018 dan Lingkungan ISO 14001 telah diberikan oleh badan Sertifikasi kepada Perseroan untuk ruang lingkup Kantor Pusat dan seluruh Divisi, dan terus menerus di-*review* baik secara *Internal* & oleh eksternal/Badan Sertifikasi secara berkesinambungan serta dilakukan pembaruan.

No. 50 Th.2012, ISO 14001:2008 and Environmental Management System with ISO 14001:2015 Standards. In addition, the Company also has certificates for the implementation of Quality Management System that is integrated with SMK3 and ISO 45001:2018 and ISO 14001 Environment given by the Certification body to the Company for the scope of Head Office and the entire Division, and is reviewed, both internally and externally or by a certification body, on an ongoing basis and renewal.

SERTIFIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Karyawan yang bertugas di bidang K3 telah mengikuti program-program sertifkasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan badan sertifkasi lainnya. Para karyawan K3 tersebut melakukan pengawasan, inspeksi, dan edukasi setiap hari kepada karyawan lainnya.

CERTIFICATIONS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

Employees in charge of OHS have participated in certification programs from the Republic of Indonesia Manpower Ministry and other certification bodies. The OHS employees conduct supervision, inspection, and education every day to other employees.

SERTIFIKASI MUTU

QUALITY CERTIFICATION

NO	NAMA *NAME*	UNIT KERJA *WORK UNIT*	JENIS *TYPE*	*MODUL*	PENYELENGGARA *ORGANIZER*
1	Achmad Romel Arazi	Departemen QHSE *QHSE Department*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting
2	Agung Nugroho	Wilayah II *Region II*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting
3	Arga Santoso	Wilayah II *Region II*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting
4	Bunga Natalia Hutauruk	Departemen QHSE *QHSE Department*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting
5	Dhia Darin Silfi Mutia	Wilayah I *Region I*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting
6	Pradana Sahid Akbar	Wilayah III *Region III*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting
7	Kartika Hari Purnomo	Wilayah IV *Region IV*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting
8	Enzo Cahya Augusiandono	Wilayah V *Region V*	Quality Assurance	Online Training - Managing Quality Assurance For Business Excellence	Phytagoras Training & Consulting

KONTROL PERUSAHAAN TERHADAP SUB-KONTRAKTOR DAN PEMASOK TERKAIT PERSYARATAN K3

Perseroan memiliki kebijakan khusus bagi subkontraktor dan pemasok terkait persyaratan dan standarisasi K3 atas pekerjaan/produk dan jasa yang diberikan oleh setiap sub-kontraktor

COMPANY CONTROL OVER SUB-CONTRACTORS AND SUPPLIERS RELATED TO OHS REQUIREMENTS

The Company has a special policy for subcontractors and suppliers regarding K3 requirements and standardization of work/products and services provided by each sub-contractor and supplier.

dan pemasok. Sesuai Surat Edaran Direktur Produksi dan HSE No. 0155/DPH/SE/KDEH/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengendalian Subkontraktor, Supplier, dan Penyedia Tenaga Kerja di Proyek, Perusahaan memastikan seluruh sub-kontraktor dan pemasok untuk:

1. Memastikan komitmen terhadap K3.
2. Sosialisasi tentang syarat kompetensi personel dan kelayakan alat.
3. Melaksanakan seleksi untuk memastikan bahwa kompetensi personel subkon, supplier dan penyedia tenaga kerja telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perseroan yang berkaitan dengan K3.
4. Melakukan seleksi untuk memastikan bahwa alat-alat kerja yang digunakan memiliki SILO dan dioperasikan oleh operator yang memiliki SIO yang masih berlaku.

SARANA KESELAMATAN KERJA DAN PENGELOLAAN K3

Terkait dengan bentuk tanggung jawab dalam hal keselamatan, Perseroan menyediakan peralatan keselamatan baik yang dapat diaplikasikan secara langsung pada masing-masing karyawan maupun yang diaplikasikan secara umum. Selain itu Perseroan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keselamatan lainnya mulai dari pelatihan terhadap situasi tanggap darurat maupun proses inspeksi dan pemataun guna memitigasi risiko yang ada. Adapun penyelenggaraan program keselamatan kerja Perseroan terdiri dari:

In accordance with the Circular of Director of Production and HSE No. 0155/DPH/SE/KDEH/02/2018 dated February 28, 2018 concerning the Control of Subcontractors, Suppliers and Providers of Manpower in the Project, the Company ensures all sub-contractors and suppliers for:

1. Ensuring commitment to OHS.
2. Conducting socialization of personnel competency requirements and tool feasibility.
3. Carrying out a selection to ensure that the competencies of sub-personnel, suppliers and labor providers are in accordance with what is required by Company regulations relating to OHS.
4. Carrying out a selection to ensure that the work tools used have SILO and are operated by operators who have a valid SIO.

WORK SAFETY AND MANAGEMENT TOOLS

Related to the responsibility in terms of safety, the Company provides safety equipment both that can be applied directly to each employee and that is applied in general. In addition, the Company also carries out other safety-related activities ranging from training on emergency response situations as well as inspection and monitoring processes to mitigate existing risks. The implementation of the Company's work safety program consists of:

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	KETERANGAN *INFORMATION*
INSTALASI SISTEM ALARM *ALARM SYSTEM INSTALLATION*		
1	Panel Kontrol *Control Panel*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
2	*Announciator*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
3	*Fire Detector*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
4	Tombol Manual *Manual Button*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
5	Bel Alarm *Alarm Bell*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
6	*Exit Lamp*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	KETERANGAN *INFORMATION*
PERALATAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN *FIRE-FIGHTING EQUIPMENT*		
1	Alat/Instalasi Pemadam Api Otomaris (Sprinkler) *Tool / Installation of Automatic Fire Extinguisher (Sprinkler)*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
2	Alat Pemadam Api RIngan (APAR) *Light Fire Extinguisher (APAR)*	Tersedia di setiap lantai di gedung Nindya Karya dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at every floor in Nindya Building, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
3	Masker *Mask*	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at Nindya Building for mitigation of emergency situation, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
4	Kacamata Pelindung *Protective Glasses*	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at Nindya Building for mitigation of emergency situation, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
5	*Hydrant*	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at Nindya Building for mitigation of emergency situation, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
6	Kursi Roda *Wheelchair*	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at Nindya Building for mitigation of emergency situation, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
7	Tandu *Stretcher*	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at Nindya Building for mitigation of emergency situation, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
8	Tabung Oksigen *Oxygen tube*	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at Nindya Building for mitigation of emergency situation, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*
9	Baju Tahan Api *Fireproof clothes*	Tersedia di gedung Nindya Karya untuk mitigasi keadaan darurat dan dikelola, diinspeksi, dan dilakukan perawatan oleh Divisi Properti *Available at Nindya Building for mitigation of emergency situation, and is managed, inspected, and maintained by the Property Division*

Terpenuhinya keamanan kerja dimulai dari aspek awal suatu pekerjaan seperti kemanan material yang telah teruji, pemenuhan perangkat-perangkat pendukung serta pemenuhan standar yang ada melalui kegiatan inspeksi yang dilaksanakan secara berkala. Dengan terpenuhinya aspek tersebut, Perseroan dapat meminimalisasi terjadinya tingkat kecelakaan kerja yang berasal dari material atau objek fisik dari suatu produk konstruksi.

The fulfillment of job security starts from the initial aspects of a job such as proven material security, compliance with supporting devices and compliance with existing standards through periodic inspection activities. With the fulfillment of these aspects, the Company can minimize the occurrence of work accident rates originating from material or physical objects of a construction product.

SOSIALISASI K3

Perseroan secara khusus memberikan perhatian terhadap sosialisasi K3, baik bagi *Intern*al maupun eksternal. Berikut disampaikan Prosedur Tetap terkait *Safety Induction* maupun media sosialisasi K3

OHS SOCIALIZATION

The company specifically pays attention to OSH socialization, both internal and external. The following is conveyed the Permanent Procedure related to Safety Induction and OHS socialization media.

PELATIHAN K3

Selain sosialisasi, Perseroan memberikan pelatihan K3 kepada karyawan dengan tujuan meningkatkan kesadaran seluruh insan Nindya Karya terkait K3 saat melaksanakan tugasnya. Berikut pelatihan K3 yang diberikan di sepanjang tahun 2020.

OHS TRAINING

In addition to socialization, the Company provides OHS training for employees with the aim of increasing the awareness of all Nindya Karya's personnel related to K3 when carrying out their duties. The following OHS training is given throughout 2020.

URAIAN PELATIHAN *TRAINING DESCRIPTION*	JUMLAH PESERTA *TOTAL PARTICIPANTS*
Integrated Internal Audit ISO 45001-14001	40
Operator K3 Migas BNSP	19
Kebakaran Kelas D Kemnaker	25
Pelatihan & Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi	3
Workshop Pengukuran & Peningkatan Budaya K3	11

KECELAKAAN KERJA

Di sepanjang tahun 2020, Perseroan mencatat terjadi sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) kecelakaan kerja.

Dalam mengukur tingkat kecelakaan kerja, Perseroan menggunakan 3 (tiga) variabel pengukuran, yaitu Fatality atau kecelakaan kerja yang berujung pada kecelakaan fatal yang berakibat meninggal dunianya pekerja; *Severity Rate* (SR) yaitu indikator banyaknya jumlah kehilangan hari kerja akibat kecelakaan kerja untuk per-1.000.000 jam kerja orang; dan *Frequency Rate* (FR) sebagai indikator pengukuran banyaknya jumlah insiden per-1.000.000 jam kerja orang. Berikut disampaikan realisasi SR, FR dan *Fatality* tahun 2020 dibandingkan target.

WORK ACCIDENT

Throughout 2020, the Company recorded 337 (three hundred thirty seven) work accidents.

In measuring work accident rates, the Company uses 3 (three) measurement variables, namely fatality or work accidents which result in fatal accidents resulting in the death of the worker's life; Severity Rate (SR), which is an indicator of the number of working days lost due to work accidents for 1,000,000 work hours per person; and Frequency Rate (FR) as an indicator of the number of incidents per 1,000,000 work hours per person. Next is the realization of SR, FR and Fatality in 2019 compared to the target.

URAIAN *DESCRIPTION*	REALISASI 2020 *REALIZATION IN 2020*	TARGET 2020 2020 TARGET	TANDA *MARK*
Safety Rate (SR)	0,00	< 250	Tercapai *Achieved*
Freequency Rate (FR)	0,516	< 2,0	Tercapai *Achieved*
Fatality	0	0	Tercapai *Achieved*

FASILITAS DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KARYAWAN

Perseroan memberikan fasilitas dan jaminan kesehatan kerja melalui beberapa program dan kegiatan, yaitu:

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

FACILITIES AND HEALTH INSURANCE FOR EMPLOYEES

The Company provides facilities and health insurance work through several programs and activities, namely:

1. BPJS Healthcare
2. BPJS Employment

3. Asuransi Jiwa
4. Klinik di Kantor Pusat & Wilayah
5. Klinik di Proyek
6. *Medical Check Up* 1 kali setahun

3. Life insurance
4. Clinic at Head Office and Regional Offices
5. Clinics in the project
6. Medical check-up once a year

PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sesuai dengan Prosedur Tetap yang dimiliki, perusahaan memiliki mekanisme bagi karyawan untuk dapat menyampaikan keluhan maupun pengaduan terkait pelaksanaan K3 yang diatur dalam pedoman komunikasi, konsultasi dan partisipasi HSE nomor: P-NK-HSE-07-10.

Perseroan juga memiliki Prosedur Tetap terkait penghentian pekerjaan oleh karyawan atas pekerjaan yang memiliki risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, kecelakaan lingkungan, maupun penyakit yang timbul akibat kerja yang diatur dalam pedoman nomor: P-NK-HSE-07-3.

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pengaduan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

COMPLAINTS ABOUT MANPOWER AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ISSUES

In accordance with its Fixed Procedure, the Company has a mechanism for employees to be able to submit complaints related to OHS implementation, which is stipulated in the HSE communication, consultation, and participation guidelines No. P-NK-HSE-07-10.

The company also has a Fixed Procedure regarding the termination of work by employees for work that has risks that can cause work accidents, environmental accidents, or diseases that arise due to work, which is stipulated in guidelines No. P-NK-HSE-07-3.

During 2020, there has been no incoming complaint related to Occupational Health and Safety issue.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI DI BIDANG K3

Berikut disampaikan sertifikasi K3 yang dimiliki Perseroan, dan penghargaan atas pemenuhan K3 yang diterima oleh Perseroan di sepanjang tahun 2020.

AWARDS AND CERTIFICATIONS IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The following are the OHS certifications owned by the Company, and awards for the fulfillment of OHS received by the Company throughout 2020.

JENIS SERTIFIKAT K3 YANG MASIH BERLAKU

VALID OHS CERTIFICATES

NO	JENIS SERTIFIKAT *TYPE OF CERTIFICATE*	TANGGAL DIKELUARKANNYA SERTIFIKAT *ISSUANCE DATE*	MASA BERLAKU *VALIDITY PERIOD*	DIKELUARKAN OLEH *ISSUED BY*
1	SNI ISO 14001 : 2015	20 April 2020	3 Tahun *3 Years*	Sucofindo
2	ISO 45001 : 2018	06 Mei 2019	3 Tahun *3 Years*	Sucofindo
3	SMK3 PP 50 / 2012	17 September 2020	3 Tahun *3 Years*	Kementerian Ketenagakerjaaan RI *Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia*

SERTIFKAT K3 LAINNYA

OTHERS OHS CERTIFICATES

NO	WILAYAH *AREA*	NAMA PENGHARGAAN *NAME OF CERTIFICATE*	DISERAHKAN OLEH *ISSUED BY*	TANGGAL *ISSUANCE DATE*
1	Nindya Karya Kantor Pusat *Nindya Karya Head Office*	Penghargaan Kecelakaan Nihil *Zero Accident Award*	Menteri Ketenagakerjaan RI *Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*	17 September 2020 *September 17, 2020*
2	Nindya Karya Divisi EPC *Nindya Karya EPC Division*	Penghargaan Kecelakaan Nihil *Zero Accident Award*	Menteri Ketenagakerjaan RI *Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*	17 September 2020 *September 17, 2020*
3	Nindya Karya Wilayah 1 *Nindya Karya Region 1*	Penghargaan Kecelakaan Nihil *Zero Accident Award*	Menteri Ketenagakerjaan RI *Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*	17 September 2020 *September 17, 2020*
4	Nindya Karya Wilayah 2 *Nindya Karya Region 2*	Penghargaan Kecelakaan Nihil *Zero Accident Award*	Menteri Ketenagakerjaan RI *Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*	17 September 2020 *September 17, 2020*
5	Nindya Karya Wilayah 4 *Nindya Karya Region 4*	Penghargaan Kecelakaan Nihil *Zero Accident Award*	Menteri Ketenagakerjaan RI *Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*	17 September 2020 *September 17, 2020*
6	Nindya Karya Wilayah 5 *Nindya Karya Region 5*	Penghargaan Kecelakaan Nihil *Zero Accident Award*	Menteri Ketenagakerjaan RI *Minister of Manpower of the Republic of Indonesia*	17 September 2020 *September 17, 2020*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO PRODUCTS/ SERVICES, CONSUMERS, AND BUSINESS PARTNERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PRODUK/JASA SERTA PELANGGAN DAN MITRA KERJA

Setiap produk dan jasa konstruksi harus memenuhi aspek keamanan sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. pemenuhan atas aspek keselamatan sendiri telah menjadi komitmen awal perusahaan sesuai porsinya sebagai penyedia jasa.

"Konsumen memiliki hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang. Di samping kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, komitmen Nindya Karya atas tanggung jawab terhadap konsumen merupakan bagian dari perwujudan pertumbuhan yang berkelanjutan"

CSR COMMITMENT AND POLICY REGARDING PRODUCTS/SERVICES, CONSUMERS, AND BUSINESS PARTNERS

Each construction product and service must meet the safety aspects as required in Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services. Fulfillment of the safety aspect itself has become the initial commitment of the Company in accordance with its portion as a service provider.

"Consumers have rights that are regulated by law. Aside from compliance with laws and regulations, Nindya Karya's commitment to consumer responsibility is part of the realization of sustainable growth"

Selain itu, tanggung jawab Perusahaan terhadap produk dan/atau jasa juga bergantung pada hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra kerja. Baik distributor maupun pemasok/vendor/*supplier* atau kreditur memiliki peran yang cukup besar dalam mempermudah kegiatan Perseroan, khususnya dalam menghadirkan produk dan/atau jasa yang berkualitas.

In addition, the Company's responsibility for products and/or services also depends on a good and mutually beneficial relationship with partners. Distributors and suppliers/vendors or creditors have a significant role in facilitating the Company's activities, especially in presenting quality products and/or services.

RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA REALISASINYA DI SEPANJANG TAHUN 2020

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Perseroan merencanakan pembentukan Unit Pelayanan Keluhan Pelanggan di bawah Departemen Produksi.

ACTIVITY PLANS, TARGETS, AND REALIZATION IN 2020

In order to improve service to customers, the Company plans to establish a Customer Complaints Service Unit under the Production Department.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DAN JASA

Perusahaan memiliki kebijakan pengendalian kualitas produk yang telah disahkan melalui Dokumen Prosedur No. P-NK-MUTU-05 tentang Prosedur Umum Tindakan Pencegahan, Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai dan Perbaikan dengan Formulir PTPP yang telah berlaku sejak 1 Juni 2016. Penerapan dokumen prosedural ini bertujuan untuk:

1. Memastikan tindakan pencegahan atas ketidaksesuaian yang mungkin akan terjadi sehingga dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien pada produk/jasa, proses, dan Sistem Manajemen Mutu, K3 & Lingkungan.
2. Memberikan penjelasan tentang proses pelaksanaan pengendalian produk yang tidak sesuai untuk menjamin keefektifan tindakan yang diambil.
3. Memberikan penjelasan tentang proses pelaksanaan pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjamin keefektifannya penerapannya dan menghindari terjadinya pengulangan ketidaksesuaian yang sama. Keberadaan dokumen prosedural ini diharapkan mampu memberikan cara dan metode tindakan pencegahan ketidaksesuaian yang mungkin akan terjadi di lingkungan perusahaan yang

PROGRAMS AND ACTIVITIES CARRIED OUT AND THEIR IMPACTS

QUALITY CONTROL OF PRODUCTS AND SERVICES

The Company has a product quality control policy that has been validated through Procedure Document No. P-NK-MUTU-05 regarding General Procedures for Preventive Measures, Controlling Non-Compliant Products, and Repairing with PTPP Forms which have been in force since June 1, 2016. The application of this procedural document aims to:

1. Ensure preventive actions for nonconformities that might occur so that they can be planned and implemented in an effective and efficient manner in products/services, processes, and the Quality Management System, K3 & Environment.
2. Provide an explanation of the process of implementing product controls that are not appropriate to guarantee the effectiveness of the actions taken.
3. Provide an explanation of the implementation process of corrective actions to ensure the effectiveness of their implementation and avoid repetition of the same discrepancy. The existence of this procedural document is expected to be able to provide ways and methods of preventing non-conformities that might occur in the Company's environment relating to MK3L products and services,

berkaitan dengan produk dan jasa, proses serta Sistem Manajemen MK3L. Dokumen prosedural ini berlaku untuk sistem mutu yang diterapkan di Kantor Pusat, Wilayah/Divisi dan Proyek serta pemasokannya.

processes and Management Systems. This procedural document applies to the Quality System implemented at Headquarters, Regions/ Divisions and Projects as well as its supply.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Agar Perseroan memahami keinginan pengguna jasa, Perseroan melakukan survei kepuasan pelanggan. Survei ini juga menjadi bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai Surat Edaran Menteri BUMN RI No. S-08/S.MBU/2013 tanggl 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam KPI tersebut, kepuasan pelanggan dihitung berdasarkan Jumlah Referensi yang didapatkan dari kuesioner Kepuasan Pelanggan yang Positif dibagi Jumlah Proyek. Hasil survei kepuasan pelanggan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perbaikan terus menerus, seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

In order for the Company to understand the desires of service users, the Company conducted a customer satisfaction survey. This survey is also part of the Key Performance Indicator (KPI) in accordance with the Circular of the Minister of SOEs No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013 concerning Submission of KPI Determination Guidelines and Superior Performance Assessment Criteria in State-Owned Enterprises. In the KPI, customer satisfaction is calculated based on the Reference Number obtained from the Positive Customer Satisfaction questionnaire divided by the Number of Projects. The results of customer satisfaction surveys over the past 5 (five) years show continuous improvement, as can be seen in the graph below.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN (2016-2020)
CUSTOMER SATISFACTION SURVEY (2016-2020)

TAHUN *YEAR*	SURVEI KEPUASAN PELANGGAN (%) *CUSTOMER SATISFACTION SURVEY (%)*
2016	78,85
2017	87,78
2018	89,45
2019	89,68
2020	89,85

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA PEMASOK/SUPPLIER/VENDOR

Dalam membangun hubungan yang mutual dengan mitra kerja pemasok, Perseroan menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa serta evaluasi rekanan sebagai bagian dari pengukuran kepuasan pemasok sekaligus bagian dari evaluasi bagi perusahaan. Kebijakan ini tertuang dalam Dokumen Prosedural No. P-NK-PROC-01 tentang *Procurement* Pengadaan Barang/ Jasa dan Evaluasi Rekanan yang telah berlaku sejak 1 Februari 2018. Dokumen ini memberikan penjelasan tentang proses & tata laksana pengadaan barang dan jasa serta penilaiannya atas kinerja rekanan yang ditunjuk. Prosedur ini diterapkan di lingkup Perseroan untuk Proyek, Wilayah/Divisi serta Kantor Pusat.

MANAGEMENT OF RELATIONSHIP WITH SUPPLIER/ VENDOR BUSINESS PARTNERS

In building mutual relationships with supplier partners, the Company implements goods and services procurement policies and partner evaluations as part of measuring supplier satisfaction as well as part of evaluating the Company. This policy is stated in Procedural Document No. P-NK-PROC-01 regarding Procurement of Goods/Services Procurement and Evaluation of Partners that has been in effect since February 1, 2018. This document provides an explanation of the processes and procedures for procurement of goods and services as well as an evaluation of the performance of designated partners. This procedure is applied in the scope of the Company for Projects, Regions/ Divisions and Head Office.

PENGADUAN TERKAIT LAYANAN SERTA PRODUK PERUSAHAAN DAN PENANGANANNYA

Kebijakan mutu Perseroan juga diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan bagi pelanggan untuk mengajukan pengaduan terkait layanan serta produk Perseroan dan penanganannya. Mekanisme ini tertuang dalam Dokumen Prosedural No. P-NK-MUTU-02 tentang Prosedur Umum Penanganan Keluhan Pelanggan Bidang Konstruksi yang diberlakukan sejak 1 Juni 2016. Pengaduan dapat diajukan melalui Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah Perusahaan.

COMPLAINTS RELATED TO COMPANY'S SERVICES AND PRODUCTS AND COMPLAINT HANDLING

The Company's quality policy is also realized through a mechanism that allows customers to submit complaints related to the Company's services and products and their handling. This mechanism is contained in Procedural Document No. P-NK-MUTU-02 regarding General Procedures for Handling Customer Complaints in the Construction Sector which took effect on June 1, 2016. Complaints can be submitted through the Headquarters and Regional Offices of the Company.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI DI BIDANG JAMINAN MUTU DAN LAYANAN KONSUMEN

Penghargaan di bidang jaminan mutu dan layanan konsumen di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

AWARDS AND CERTIFICATIONS IN THE FIELD OF QUALITY ASSURANCE AND CONSUMER SERVICES

Awards in the field of quality assurance and customer service in 2020 can be seen in the table below.

NO	JENIS SERTIFIKAT *TYPE OF CERTIFICATE*	TANGGAL DIKELUARKAN SERTIFIKASI *ISSUANCE DATE*	MASA BERLAKU *VALIDITY PERIOD*	DIEKELUARKAN OLEH *ISSUED BY*
1	Sistem Manajemen Mutu (*Understanding and Implementing* ISO 9001:2015) *Quality Management System (Understanding and Implementing ISO 9001:2015)*	12 November 2020 *November 12, 2020*	2020	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) dan BRI

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Sebagai perusahaan BUMN yang dimiliki Negara Republik Indonesia, Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. per-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara BUMN No. per-09/MBU/07/2015 tentang program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL). Untuk tujuan ini, Perseroan telah menyalurkan dana dari pemerintah dan menyelenggarakan PKBL sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap pembangunan keberlanjutan. Perseroan meyakini, upaya CSR melalui PKBL dapat meningkatkan rasa

As an SOE company owned by the Republic of Indonesia, the Company is required to carry out social and environmental responsibilities as stipulated in the Decree of the Minister of BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 dated 5 July 2017 concerning Amendment to SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program (PKBL). For this purpose, the Company has channeled funds from the government and organized PKBL as part of the Company's commitment to sustainable development. The Company believes that CSR efforts through PKBL can increase the

memiliki seluruh pemangku kepentingan sehingga eksistensi Perseroan berdampak jangka panjang melalui meningkatnya tingkat kepercayaan, terciptanya keharmonisan serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan yang berimplikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong pada kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha perusahaan secara berkelanjutan.

Program PKBL memiliki maksud untuk membantu tugas Pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya kepedulian sosial di lingkungan BUMN dengan berpartisipasi aktif untuk memberikan pembinaan kepada Usaha Kecil berupa bantuan modal usaha, promosi produk dan pelatihan/pendidikan melalui program kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dan program bina lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai dari PKBL adalah tercapainya pengelolaan, penyaluran, dan penggunaan dana PKBL oleh BUMN secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan PKBL Perseroan mengacu pada:

1. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
2. Surat edaran Menteri Negara BUMN No. Se-02/ MBU/ Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. Surat Keputusan Menteri BUMN No. per-02/ MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. per-09/ MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
4. Pedoman Pelaksanaan PKBL Perusahaan No. KEP.63/DIR/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Perseroan memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan dana PKBL serta CSR dalam rangka pelaksanaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu unit PKBL.

RENCANA DAN TARGET KEGIATAN SERTA REALISASINYA DI SEPANJANG TAHUN 2020

Sejalan dengan upaya Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya dilakukan dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan

sense of ownership of all stakeholders so that the Company's existence has a long-term impact through increasing the level of trust, creating harmony and enhancing the Company's image and reputation which has implications for the creation of added value that encourages the smooth stability and sustainable growth of the Company's business.

The PKBL program aims to assist the Government's tasks in promoting community economic activity and growth and the creation of social care within the SOE environment through active participation to provide guidance to Small Businesses in the form of venture capital assistance, product promotion and training/education through partnership programs and community social empowerment and environmental development programs. The target to be achieved from PKBL is the achievement of management, distribution, and use of PKBL funds by BUMN in the right amount, on time, and on target.

The Company's PKBL implementation refers to:

1. Decision of the Minister of SOEs No. KEP.100/ MBU/2002 concerning SOE Health Level Assessment.
2. Circular of the Minister of SOEs No. SE-02/MBU/ Wk/2012 dated February 23, 2012 concerning Establishment of Accounting Guidelines for Partnership and Community Development Programs.
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/ MBU/07/2017 dated July 5, 2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program.
4. Guidelines for the Implementation of the Company's PKBL No. KEP.63/DIR/VII/2017 dated July 14, 2017.

As explained above, the Company has a special unit that handles the management of PKBL funds and CSR in the context of implementing Corporate Social Responsibility, namely the PKBL unit.

ACTIVITY PLANS, TARGETS, AND REALIZATION IN 2020

In line with the Company's efforts to realize its vision and mission, the Compay strives to implement an Environmental Management System to create

untuk menciptakan proses kerja yang ramah lingkungan dan mencegah pencemaran. untuk itu, Perseroan memiliki Sistem Manajemen Mutu, K-3 dan Lingkungan yang terintegrasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan lingkungan di perusahaan.

Di tahun 2020, Perseroan akan sistem manajemen terintegrasi tersebut sesuai ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001: 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, serta ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sosialisasi sistem manajemen terintegrasi di unit kerja/proyek akan menjadi agenda bagi pengelolaan lingkungan khususnya di lokasi proyek yang memiliki dampak lingkungan yang langsung terasa oleh sekitar.

environmentally-friendly work processes and prevent pollution. For this reason, the Company has an integrated Quality, OHS, and Environmental Management System in order to fulfill the requirements of Quality Standards, Occupational Health and Safety, and the environment in the Company.

In 2020, the Company implemented this integrated management system in accordance with ISO 9001:2015 on Quality Management System, ISO 14001:2015 on Environmental Management System, and ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety Management System. The socialization of the integrated management system in the work unit/project was the agenda for environmental management, especially in project locations having an immediate environmental impact to the surrounding community/environment

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAKNYA

PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR LOKASI USAHA

Perseroan memberikan prioritas pengisian karyawan baru dengan menggunakan metode rekrutmen dan seleksi yang dapat mengefisienkan waktu, mengoptimalkan pencarian karyawan yang berkompeten dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Kesempatan kerja bagi masayarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan selalu diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. disamping itu, penggunaan tenaga kerja lokal akan menciptakan efsiensi biaya dan pengelolaan SDM perusahaan yang efektif.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Salah satu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CARRIED OUT AND THEIR IMPACTS

ABSORPTION OF LOCAL WORKERS AND EMPOWERMENT OF COMMUNITIES AROUND BUSINESS LOCATIONS

The Company gives priority to filling new employees by using recruitment and selection methods that can make time efficient, optimize the search for competent employees and use of local workforce. Employment opportunities for communities around the Company's work area are always provided as an effort to increase employment opportunities for local communities. In addition, the use of local labor will create cost efficiency and effective management of the Company's HR.

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

One of the implementation of Corporate Social Responsibility towards social development is carried out through the Partnership and Community Development Program (PKBL) as stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020, which was last amended by Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Environmental Development Program for State-Owned Enterprises.

Program ini bertujuan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, baik melalui Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan. Sumber dana pelaksanaan PKBL adalah sebagai berikut:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 1% (satu persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
2. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dari Program Kemitraan.
3. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan.
4. Sumber lain yang sah.
5. Sisa dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana berikutnya.

This program aims to have a direct impact on the community, both through the Partnership Program and the Community Development Program. The sources of funds for implementing PKBL are as follows:

1. Allowance for net profit after tax as determined in the GMS/Minister of ratification of the Annual Report of the Guiding SOE of a maximum of 1% (one percent) of the profit after tax in the previous fiscal year.
2. Loan/margin/profit sharing administration services from the Partnership Program.
3. Deposit and/or current account interest proceeds from the Partnership Program and Community Development Program funds Placed environment.
4. Other legal sources.
5. The remaining funding for the Partnership Program and the Community Development Program the previous financial year will be the source next fund.

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP PENUH)	2019 (RP PENUH)
1	Saldo Awal *Beginning balance*	57.948.188	76.284.758
2	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan *Fostered partner loan returns*	625.122.858	699.672.839
3	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman *Loan administration services income*	27.187.364	2.984.489
4	Hasil Jasa Giro/Pendapatan Lain *Proceeds from Giro/Otehrs Income*	1.026.683	813.478.188

Program Kemitraan (PK) merupakan program yang memiliki fokus kerja dalam aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman dana kemitraan untuk modal kerja dan investasi serta bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran (promosi/pameran), dan lain-lain. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga menjadi usaha yang unggul dan mandiri serta mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja baru. Melalui Program Kemitraan, Perusahaan proaktif dalam membantu Pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat.

Realisasi dana tersalurkan untuk Program Kemitraan pada tahun 2020 mencapai Rp655.000.000 atau 81,88 terhadap Rencana Kerja Anggaran yang sebesar Rp800.000.000.

The partnership program is a program that has a work focus on aspects of community empowerment and economic improvement through the provision of partnership funding for working capital and investment as well as coaching assistance in the form of business management training assistance, marketing assistance (promotion/exhibition), and others. This program aims to improve the competence of small and medium businesses (SMEs) so that they become superior and independent businesses and are able to create jobs and absorb new workers. Through the partnership program, the Company is proactive in helping the Government realize the welfare of the community by developing and empowering the potential of the community.

Funds disbursed for Partnership Program in 2020 reached Rp655,000,000 million or 81.88% of the determined Work and Budget Plan of Rp800,000,000.

PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN BERDASARKAN SEKTOR USAHA DAN JUMLAH MITRA BINAAN

DISBURSEMENT OF PARTNERSHIP PROGRAM FUNDS BY BUSINESS SECTORS AND TOTAL FOSTERED PARTNERS

SEKTOR USAHA *BUSINESS SECTOR*	2020		2019	
	MITRA BINAAN	JUMLAH DANA YANG DISALURKAN	MITRA BINAAN	JUMLAH DANA YANG DISALURKAN
Sektor Perdagangan *Trading*	3 Mitra Binaan	200.000.000	5 Mitra Binaan	205.000.000
Sektor Jasa *Service*	3 Mitra Binaan	155.000.000	3 Mitra Binaan	235.000.000
Sektor Peternakan *Animal Husbandry*	-	-	1 Mitra Binaan	100.000.000
Sektor Industri *Industry*	3 Mitra Binaan	300.000.000	3 Mitra Binaan	215.000.000
JUMLAH *TOTAL*	**9 MITRA BINAAN**	**655.000.000**	**12 MITRA BINAAN**	**755.00.000**

PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN BERDASARKAN WILAYAH DAN JUMLAH MITRA BINAAN

DISBURSEMENT OF PARTNERSHIP PROGRAM FUNDS BY REGIONS AND TOTAL FOSTERED PARTNERS

WILAYAH PENYALURAN *DISBURSEMENT REGION*	JUMLAH DANA YANG DISALURKAN	
	2020 (RP PENUH)	2019 (RP PENUH)
DKI Jakarta	355.000.000	285.000.000
Jawa Barat *West Java*	100.000.000	295.000.000
Banten	100.000.000	-
Jawa Timur *East Java*	100.000.000	75.000.000
Jawa Tengah *Central Java*	-	100.000.000
JUMLAH *TOTAL*	**655.000.000**	**755.000.000**

Dana Program Kemitraan berasal dari akumulasi penyisihan laba perusahaan tahun 1993 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp1.737.021.968 yang telah direalisasikan secara bergulir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp655.000.000 kepada 9 (Sembilan) Mitra Binaan. Dari dana yang tersedia yaitu angsuran pinjaman, jasa pinjaman dan hasil jasa giro akan dialokasikan penggunaannya untuk pinjaman modal kerja kepada Mitra Binaan.

Di tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan beberapa pelatihan/pembinaan untuk Mitra Binaan, walau lokasi Mitra Binaan yang tersebar di beberapa wilayah berbeda dan usaha Mitra Binaan yang beragam, pembinaan tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Pembinaan dilaksanakan secara serentak atau bersama-sama dengan seluruh mitra binaan dari seluruh wilayah Indonesia melalui *Virtual Conference*.

Adapun beberapa pembinaan mitra yang telah dilaksanakan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Partnership Program Funds are derived from the company's accumulated profit allowance from 1993 to 2014, amounting to Rp1,737,021,968, which has been realized on a rolling basis until December 31, 2020, amounting to Rp655,000,000, to 9 (nine) fostered partners. From the available funds, namely loan installments, loan services, and the proceeds from current accounts, their use will be allocated for working capital loans to fostered partners.

In 2020, the Company carried out several training/coaching activities for the fostered partners; even though the locations of the fostered partners are spread over several different areas and the businesses of the fostered partners are diverse, the coaching was successfully and properly carried out. Coaching was carried out simultaneously with all fostered partners from all regions of Indonesia through virtual conferences.

Some of the coaching for fostered partner carried out in 2020 are as follows:

1. Pelatihan *Digital Marketing* agar dapat meningkatkan perolehan pasar.
2. Pelatihan Pemanfaatan *E-Commerce (Elektronik Commerce)* agar dapat meningkatkan produktifitas usaha dengan menjaring konsumen lebih luas secara online.

1. Digital Marketing training in order to increase market acquisition.
2. Training on the utilization of E-Commerce (Electronic Commerce) in order to increase business productivity by attracting wider consumers online.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf kelayakan hidup masyarakat sehingga tercipta keadilan dan pemerataan pembangunan. Program Bina Lingkungan disalurkan melalui 7 (tujuh) sektor yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sektor pendidikan dan pelatihan.
2. Sektor sarana dan prasarana umum.
3. Sektor bencana alam.
4. Sektor pelestarian alam
5. Sektor sarana ibadah
6. Sektor peningkatan kesehatan
7. Sektor sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan.

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan tahun 2020 tersebar di 9 (Sembilan) wilayah dengan realisasi dana tersalurkan mencapai Rp1.999.315.360, meningkat hingga 99,94% terhadap realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp999.964.900.

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

The Community Development Program is a program to empower the social conditions of the community with the aim of assisting the government in improving the standard of living of the people so as to create justice and equitable development. The Community Development Program is distributed through 7 (seven) sectors that can have a direct impact on the lives of the Indonesian people, namely:

1. Educational sector.
2. Public facilities sector.
3. The natural disaster sector
4. Nature conservation sector.
5. religious facilities sector.
6. Health development sector
7. Poverty Reduction Sector

The distribution of Community Development Program in 2020 is spread in 9 (nine) regions with the realization of funds disbursed reaching Rp1,999,315,360, an increase of 99.94% compared to the realization in 2019 which amounted to Rp999,960,900.

PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN BERDASARKAN SEKTOR BANTUAN
DISBURSEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS BY SECTOR

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LLINGKUNGAN *DISBURSEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS*				
		2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) MITRA BINAAN *INCREASE (DECREASE IN) FOSTERED PARTNERS*		
		DANA YANG DISALURKAN *DISBURSED FUND*	DANA YANG DISALURKAN *DISBURSED FUND*	JUMLAH *TOTAL*	PERSENTASE *PERCENTAGE*	DATA *MARK*
1	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	196.145.000	289.997.900	(93.852.900)	(32,36%)	Turun
2	Bantuan Sarana dan Prasarana Umum	624.827.838	172.467.000	452.360.838	262,29%	Naik
3	Bantuan Korban Bencana Alam	654.883.426	87.500.000	567.383.426	648,44%	Naik

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LLINGKUNGAN *DISBURSEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS*				
		2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) MITRA BINAAN *INCREASE (DECREASE IN) FOSTERED PARTNERS*		
		DANA YANG DISALURKAN *DISBURSED FUND*	DANA YANG DISALURKAN *DISBURSED FUND*	JUMLAH *TOTAL*	PERSENTASE *PERCENTAGE*	DATA *MARK*
4	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	29.900.000	-	29.900.000	0,00%	Naik
5	Bantuan Sarana Ibadah	24.950.000	450.000.000	(225.050.000)	(50,01%)	Turun
6	Bantuan Peningkatan Kesehatan	86.609.096	-	86.609.096	0,00%	Naik
7	Bantuan Pelestarian Alam	182.000.000	-	182.000.000	0,00%	Naik
JUMLAH *TOTAL*		**1.999.315.360**	**999.964.900**	**999.350.460**	**99,94%**	**NAIK**

PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN BERDASARKAN WILAYAH

DISBURSEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM FUNDS BY REGION

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN				
		2020	2019	KENAIKAN (PENURUNAN) MITRA BINAAN *INCREASE (DECREASE IN) FOSTERED PARTNERS*		
		DANA YANG DISALURKAN *DISBURSED FUND*	DANA YANG DISALURKAN *DISBURSED FUND*	JUMLAH *TOTAL*	PERSENTASE *PERCENTAGE*	DATA *MARK*
1	DKI Jakarta	685.860.058	29.997.000	655.863.058	2186,43%	Naik
2	Banten	35.000.000	87.500.000	(52.500.000)	(60,00%)	Turun
3	Jawa Barat *West Java*	693.357.838	172.467.000	523.890.838	303,76%	Naik
4	Jawa Timur *North Java*	127.500.000	-	127.500.000	0,00%	Naik
5	Sumatera Barat *West Sumatra*	-	-	-	0,00%	Naik
6	Sumatera Utara *North Sumatra*	25.197.000	-	25.197.000	0,00%	Naik
7	Jambi	31.390.000	-	31.390.000	0,00%	Naik
8	Kalimantan Timur *North Kalimantan*	24.750.540	-	24.750.540	0,00%	Naik
9	Nusa Tenggara Timur *North Nusa Tenggara*	282.000.000	-	282.000.000	0,00%	Naik
10	Nusa Tenggara Barat *West Nusa Tenggara*	-	-	-	0,00%	Naik
7	Sulawesi Utara *North Sulawesi*	-	450.000.000	(450.000.000)	(100%)	Turun
8	Sulawesi Selatan *South Sulawesi*	91.259.924	260.000.000	(168.740.076)	(64,90%)	Turun
JUMLAH *TOTAL*		**999.964.900**				

NINDYA PEDULI

Perseroan juga berupaya untuk mewujudkan kegiatan Nindya Peduli yang dilaksanakan secara mandiri maupun bersinergi. Di tahun 2020, program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. Program "Nindya Peduli" Pengadaan masker dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 dan menghadapi *New Normal*. Kegiatan ini adalah salah satu program penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) dan dalam rangka menghadapi New Normal dengan melaksanakan program pembagian masker kepada seluruh karyawan. Adapun sumber dana pada pelaksanaan kegiatan ini berasal dari alokasi Tunjangan Hari Raya (THR) Dewan Komisaris dan Direksi PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: S-255/MBU/04/2020 tentang Tunjangan Hari Raya Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Tahun 2020

2. Program "Nindya Peduli" Khitanan Massal dalam rangka HUT PT Nindya Karya (Persero) ke-60 Tahun 2020. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, Perseroan melaksanakan kegiatan khitanan yatim untuk anak-anak. Kegiatan ini masuk dalam rangkaian HUT PT Nindya Karya (Persero). Peserta khitanan sebanyak 60 orang. Khitanan dilaksanakan di Gedung Nindya, Jakarta Timur.

3. Program "Nindya Peduli" Donor Darah dalam rangka HUT PT Nindya Karya (Persero) ke-60 Tahun 2020. Sebagai bentuk pengabdian perusahaan, selain mengadakan Khitanan Massal Perseroan juga mengadakan kegiatan Aksi Donor Darah yang bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah RSUP Fatmawati. Peserta Donor Darah berjumlah 150 pendonor yang berasal dari Karyawan dan Karyawati PT Nindya Karya (Persero) Kantor Pusat, UPP, Divisi EPC, Divisi Properti, Wilayah II dan Nindya Beton.

NINDYA PEDULI

The Company also strives to realize Nindya Peduli activities that are carried out independently or in synergy. In 2020, this program were implemented through several activities, namely:

1. The "Nindya Peduli" Program for procurement of masks in the context of controlling the spread of Covid-19 and facing the New Normal. This activity was one of the programs to handle the spread of Corona Virus Disease 19 (COVID-19) and in order to face the New Normal by implementing a mask distribution program to all employees. The source of funds for the implementation of this activity was derived from the allocation of Religious Holiday Allowances (THR) for the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) based on the Decision of Minister of SOEs No. S-255/MBU/04/2020 concerning Holiday Allowances for Directors and Board of Commissioners of SOEs in 2020

2. The "Nindya Peduli" Program for Mass Circumcision in the context of the 60th Anniversary of PT Nindya Karya (Persero) 2020. As a form of responsibility to the community, the Company carried out circumcision activities for orphans. This activity was part of the series of the anniversary of PT Nindya Karya (Persero). The circumcision participants were 60 people and the event was held at Nindya Building, East Jakarta.

3. The "Nindya Peduli" Blood Donation Program in the context of the 60th Anniversary of PT Nindya Karya (Persero) 2020. As a form of company service, apart from holding a Mass Circumcision, the Company also held a Blood Donation Action in collaboration with the Blood Transfusion Unit of Fatmawati Hospital. There were 150 blood donors participating in the blood donation program, i.e., from the employees of PT Nindya Karya (Persero) Head Office, UPP, EPC Division, Property Division, Region II, and Nindya Beton.

BIAYA DAN/ATAU INVESTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PEMBERDAYAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Jumlah penyaluran program Tanggung Jawab Sosial pada aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CSR COSTS AND/OR INVESTMENT IN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Total distribution of CSR programs in the social and community development field can be seen in the following table.

NO	URAIAN *DESCRIPTION*	2020 (RP PENUH) *(FULL AMOUNT OF RUPIAH)*
1	Program Kemitraan *Partnership Program*	655.000.000
2	Program Bina Lingkungan *Community Development Program*	1.999.315.360
3	Program Corporate Social Responsibility *CSR Program*	-
JUMLAH *TOTAL*		**2.654.315360**

PT NINDYA KARYA (Persero) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PT NINDYA KARYA (Persero) AND SUBSIDIARY

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019

GEDUNG NINDYA Jl. Letjend. Haryono MT Kav. 22 Jakarta - 13630
Phone: 021 - 8093276 | Fax : 021 - 8093105
E-mail: nindyakarya@nindyakarya.co.id | Website: www.nindyakarya.co.id

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY

Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019

Daftar Isi | **Halaman/** ***Page*** | ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi — ***Directors Statement Letter***

Laporan Auditor Indenden — ***Auditor's Independent Report***

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

PT NINDYA KARYA (Persero)

▪ GENERAL CONTRACTOR ▪ EPC ▪ INVESTMENT

NINDYA

PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
PT NINDYA KARYA (Persero) DAN ENTITAS ANAK

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019
PT NINDYA KARYA (Persero) AND SUBSIDIARY

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned*:

1.	Nama/ *Name*	: **Haedar A. Karim**
	Alamat Kantor/ *Office Address*	: Jl. Letjend. Haryono MT Kav. 22, Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur
	Alamat Domisili sesuai KTP/ *Domicile as stated in ID Card*	: Pondok Hijau Permai Blok B2/15 RT. 001 RW. 025 Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi
	Jabatan/ *Title*	: **Direktur Utama/ *President Director***
2.	Nama/ *Name*	: **Sri Haryanto**
	Alamat Kantor/ *Office Address*	: Jl. Letjend. Haryono MT Kav. 22, Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur
	Alamat Domisili sesuai KTP/ *Domicile as stated in ID Card*	: KP Tengah No. 41 RT. 007 RW. 001, Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur
	Jabatan/ *Title*	: **Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia/ *Director of Finance & Human Resources***

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;*
2. *The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;*
4. *The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit information or facts;*
5. *We are responsible for the Company's internal control system within the company and its subsidiary.*

This statement letter has been made truthfully.

Jakarta, 1 Juli 2021/ *Jakarta, July 1, 2021*

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Keuangan & SDM/ *Director of Finance & HR*
HAEDAR A. KARIM	**SRI HARYANTO**

Toward The Excellent

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00833/2.1030/AU.1/03/0181-3/1/VII/2021

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Nindya Karya (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nindya Karya (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nindya Karya (Persero) ("the Company") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nindya Karya (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nindya Karya (Persero) and its subsidiary as of December 31, 2020 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan suatu hal
Kami membawa perhatian ke Catatan 2.c, atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan dan entitas anak menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan. Penerapan PSAK tersebut dilakukan secara retrospektif dengan mengakui dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 sebagai penyesuaian saldo awal dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Emphasis of matters
We draw attention to Note 2.c, to the accompanying consolidated financial statements which explains that effective January 1, 2020, the Company and its subsidiary implemented the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 71: Financial Instruments. The adoption of this PSAK was implemented retrospectively by recognizing the cummulative effect on the date of initial implementation beginning January 1, 2020 as an adjustment to the opening balance and did not restate the comparative information.

Kami juga membawa perhatian pada Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan dan entitas anak. Catatan tersebut telah mengungkapkan rencana yang disusun PT Nindya Karya (Persero) dan entitas anaknya untuk menghadapi kondisi tersebut. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan suatu ketidakpastian yang dapat memberikan dampak material di masa mendatang. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut diatas.

We also draw attention to Note 48 to the consolidated financial statements which describes impact of the Covid-19 pandemic on the business and operations of the Company and its subsidiary. The note has disclosed the plans of PT Nindya Karya (Persero) and its subsidiary to face these conditions. However, there is a possible uncertainty that gives material effect in the future. The accompanying consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the uncertainty.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal Lain

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. R/019.AAT/bna/2021 dan No. R/020.AAT/bna/2021 tanggal 19 Februari 2021.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other matters

We also have tested on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The reports of compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management, separately in our reports No. R/019.AAT/bna/2021 and No. R/020.AAT/bna/2021 dated February 19, 2021, respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Benny Andria
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181/
Public Accountant License Number: AP.0181

Jakarta, 19 Februari 2021 kecuali untuk Catatan 47 yang bertanggal 01 Juli 2021/
February 19, 2021, except for Note 47, dated July 01, 2021

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2020 Rp	2019 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	3,42	245,873,000,967	508,064,440,458	*Cash and Cash Equivalents*
Investasi Jangka Pendek	4	200,000,000,000	200,000,000,000	*Short-Term Investment*
Piutang Usaha	5			*Accounts Receivable*
Pihak Berelasi	43	111,354,019,908	99,490,645,888	*Related Parties*
Pihak Ketiga		23,230,964,787	178,884,942,378	*Third Parties*
Piutang Retensi	6			*Retention Receivables*
Pihak Berelasi	43	42,186,046,668	68,982,798,330	*Related Parties*
Pihak Ketiga		108,825,876,417	101,138,447,124	*Third Parties*
Piutang Ventura Bersama	7	306,081,905,753	296,622,978,182	*Joint Venture Receivables*
Piutang Lain-lain	8	30,252,447,386	22,254,029,316	*Other Receivables*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	9			*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	43	530,686,106,849	394,036,772,241	*Related Parties*
Pihak Ketiga		1,800,538,118,882	2,024,068,552,606	*Third Parties*
Persediaan	10	146,770,076,152	167,784,770,415	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	11.a	571,480,250,288	696,419,967,771	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	12	67,563,789,008	58,688,400,580	*Advances*
Beban Dibayar di Muka	13	27,756,086,769	11,714,931,359	*Prepaid Expenses*
Beban Ditangguhkan	14	8,646,790,057	2,227,972,920	*Deferred Expenses*
Jumlah Aset Lancar		4,221,245,479,891	4,830,379,649,568	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi pada Ventura Bersama	15	242,398,321,371	206,733,169,282	*Investment in Joint Ventures*
Investasi Jangka Panjang Lainnya	16	4,028,388,000	1,591,681,000	*Other Long-Term Investment*
Properti Investasi	17	432,231,232,001	383,321,559,574	*Investment Properties*
Aset Pajak Tangguhan	11.e	3,736,851,047	1,646,537,946	*Deferred Tax Assets*
Aset Tetap	18	561,071,224,431	610,976,156,990	*Property, Plant and Equipment*
Aset Hak Guna		--	--	*Right-of-Use-Assets*
Aset Takberwujud	19	83,177,503	202,006,783	*Intangible Assets*
Proyek Dalam Pelaksanaan		2,952,837,473	6,303,548,020	*Project on Progress*
Aset Lain-lain	20	19,070,221,609	35,167,754,195	*Other Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,265,572,253,435	1,245,942,413,790	*Total Non-Current Assets*
JUMLAH ASET		**5,486,817,733,326**	**6,076,322,063,358**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ 2020 Rp	31 Desember/ 2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman Bank dan Non - bank	22			*Bank and Non - Bank Loans*
Pihak Berelasi	43	369,686,180,200	125,000,000,000	*Related Parties*
Pihak Ketiga		217,400,000,000	145,000,000,000	*Third Parties*
Utang Usaha	21			*Accounts Payable*
Pihak Berelasi	43	18,281,501,853	36,343,485,197	*Related Parties*
Pihak Ketiga		1,440,402,931,064	1,707,893,321,416	*Third Parties*
Liabilitas Sewa	23	162,418,015	--	*Lease Liabilities*
Uang Muka Pemberi Kerja	24			*Advances from Customers*
Pihak Berelasi	43	13,587,752,023	10,371,757,345	*Related Parties*
Pihak Ketiga		151,523,661,522	253,758,421,420	*Third Parties*
Surat Utang Jangka Menengah	31	--	300,000,000,000	*Medium Term Notes*
Utang Pajak	11. b	13,208,280,876	42,509,860,594	*Taxes Payable*
Utang Ventura Bersama	25	20,172,844,332	18,444,735,497	*Joint Venture Payables*
Pendapatan Diterima di Muka	26	6,342,118,310	8,080,393,243	*Unearned Revenues*
Utang Bruto	27	929,472,278,511	1,342,936,307,413	*Gross Amount Payables*
Beban Akrual	28	17,905,647,827	26,290,161,876	*Accruals*
Utang Lain-lain	29	5,022,626,834	6,750,606,963	*Other Payables*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3,203,168,241,367	4,023,379,050,964	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman Bank dan Non Bank - Pihak Berelasi	43	442,376,313,289	175,000,000,000	*Bank and Non - Bank Loans - Related Parties*
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	30			*Long-Term Contract Advances*
Pihak Berelasi	43	23,299,581,400	35,965,454,540	*Related Parties*
Pihak Ketiga		289,307,562,671	140,062,911,740	*Third Parties*
Liabilitas Imbalan Pascakerja	32	10,591,133,993	15,277,867,367	*Post-Employment Benefit Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		765,574,591,353	366,306,233,647	*Total Non-Current Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**3,968,742,832,720**	**4,389,685,284,611**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Seri A Dwi Warna dan Rp84.882 per saham Seri B				*Capital Stock - Rp1,000,000 par Value per Share of Seri A Dwi Warna and Rp84,882 per Share of Seri B*
Modal Dasar – 7.738.000 saham yang terdiri dari 238.000 Saham Seri A Dwi Warna dan 7.500.000 Saham Seri B				*Authorized Capital - 7,738,000 shares consist of 238,000 Shares of Seri A Dwi Warna and 7,500,000 Shares of Seri B*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.950.000 saham yang terdiri dari 59.500 Saham Seri A Dwi Warna dan 5.890.500 Saham Seri B	33.a	559,497,421,000	559,497,421,000	*Subscribed and Paid Up Capital - 5,950,000 Shares consist of 59,500 Shares of Seri A Dwi Warna and 5,890,500 Shares of Seri B*
Saldo Laba:				*Retained Earnings:*
Ditentukan Penggunaannya		113,608,743,613	113,608,743,613	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya		497,334,104,366	630,584,368,537	*Unappropriated*
Penghasilan Komprehensif Lain				*Other Comprehensive Income*
Surplus Revaluasi Aset Tetap	18	336,685,860,847	356,142,880,847	*Property, Plant and Equipment Surplus Revaluation*
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		1,507,126,129,826	1,659,833,413,997	*Total Equity Attributable to Owners of the Parent*
Kepentingan Nonpengendali	47	10,948,770,780	26,803,364,750	*Non-Controlling Interest*
JUMLAH EKUITAS		**1,518,074,900,606**	**1,686,636,778,747**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**5,486,817,733,326**	**6,076,322,063,358**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan Usaha	34	3,616,483,176,454	5,783,502,046,376	*Revenues*
Beban Pokok Pendapatan	35	(3,299,318,745,634)	(5,158,969,516,897)	*Cost of Revenues*
Laba Bruto		**317,164,430,820**	**624,532,529,479**	***Gross Profits***
Beban Pemasaran	37	(11,009,075,979)	(14,238,605,491)	*Marketing Expenses*
Beban Administrasi dan Umum	37	(192,814,206,909)	(204,944,707,036)	*General and Administrative Expenses*
Kerugian Penurunan Nilai		(15,809,061,100)	(36,424,961,610)	*Impairment Losses*
Beban Pajak Penghasilan Final	39	(101,709,351,783)	(159,199,021,990)	*Final Income Tax Expenses*
Beban Keuangan		(89,111,850,810)	(86,032,034,949)	*Finance Charges*
Bagian Laba Ventura Bersama	36	91,341,841,495	64,776,828,460	*Share in Profit of Joint Ventures*
Penghasilan (Beban) Lainnya	38	52,048,545,643	31,617,233,660	*Other Income (Expenses)*
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan		**50,101,271,377**	**220,087,260,523**	***Profit Before Income Tax Expenses***
Beban Pajak Penghasilan	11.c	7,279,332,627	4,214,118,026	***Income Tax Expenses***
Laba Bersih Tahun Berjalan		**42,821,938,750**	**215,873,142,497**	***Profit for The Year***
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				***Item that Will Not Be Reclassified to Profit or Loss***
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pasti	32	4,332,916,805	(5,984,152,455)	*Actuarial Gain (Loss) from Defined Benefit Liabilities*
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		**47,154,855,555**	**209,888,990,042**	***Total Comprehensive Income for The Year***
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada				***Profit for The Year Attributable to***
Pemilik Entitas Induk		50,895,518,834	223,784,182,449	*Owners of The Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	46	(8,073,580,084)	(7,911,039,952)	*Non-Controlling Interest*
Jumlah		**42,821,938,750**	**215,873,142,497**	***Total***
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada				***Comprehensive Income for The Year Attributable to***
Pemilik Entitas Induk		55,275,483,224	217,789,629,672	*Owners of The Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	46	(8,120,627,669)	(7,900,639,630)	*Non-Controlling Interest*
Jumlah		**47,154,855,555**	**209,888,990,042**	***Total***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Equity Attributable to Owner of the Parent*					Kepentingan Non Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
		Modal Saham / Share Capital Rp	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ *Property Plant and Equipment Revaluation Surplus* Rp	Saldo Laba/ *Retained Earnings* Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Saldo Laba/ *Retained Earnings* Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated *)* Rp	*Jumlah / Total* Rp	Rp	Rp	
Saldo tanggal 1 Januari 2019		**559,497,421,000**	**420,776,380,847**	**5,000,000,000**	**509,707,954,153**	**1,494,981,756,000**	**17,063,874,379**	**1,512,045,630,380**	***Balance as of January 1, 2019***
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	223,784,182,449	223,784,182,449	(7,911,039,952)	215,873,142,497	*Profit for the Year*
Cadangan Laba	33.c	--	--	108,608,743,613	(108,608,743,613)	–	--	--	*Appropriated of Retained Earnings*
Dividen yang Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk		--	--	--	(35,297,841,675)	(35,297,841,675)	--	(35,297,841,675)	*Dividends Attributed to Owner of the Parent*
Penyesuaian Saldo Kepentingan Non Pengendali		--	--	--	(17,640,130,000)	(17,640,130,000)	17,640,130,000	--	*Adjustment to Non Controlling Interest Balance*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		--	--	--	(5,994,552,778)	(5,994,552,778)	10,400,323	(5,984,152,455)	*Other Comprehensive Income (Losses) for The Year*
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap		--	(64,633,500,000)	--	64,633,500,000	–	--	--	*Reclassification of Property Plant and Equipment Revaluation Surplus*
Saldo tanggal 31 Desember 2019		**559,497,421,000**	**356,142,880,847**	**113,608,743,613**	**630,584,368,536**	**1,659,833,413,996**	**26,803,364,751**	**1,686,636,778,747**	***Balance as of December 31, 2019***
Dampak Penerapan Awal PSAK Baru	2.c	--	--	--	(207,982,767,395)	(207,982,767,395)	(7,733,966,301)	(215,716,733,696)	*Impact on Initial Implementation of New PSAK*
Saldo tanggal 1 Januari 2020		559,497,421,000	356,142,880,847	113,608,743,613	422,601,601,142	1,451,850,646,602	19,069,398,450	1,470,920,045,051	***Balance as of January 1, 2020***
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	50,895,518,834	50,895,518,834	(8,073,580,084)	42,821,938,750	*Profit for the Year*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		--	--	--	4,379,964,391	4,379,964,391	(47,047,585)	4,332,916,805	*Other Comprehensive Income (Losses) for The Year*
Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap	18	--	(19,457,020,000)	--	19,457,020,000	–	--	--	*Reclassification of Property Plant and Equipment Revaluation Surplus*
Saldo tanggal 31 Desember 2020		**559,497,421,000**	**336,685,860,847**	**113,608,743,613**	**497,334,104,366**	**1,507,126,129,826**	**10,948,770,780**	**1,518,074,900,606**	***Balance as of December 31, 2020***

**)* Saldo laba termasuk keuntungan (kerugian) aktuarial dari program imbalan pasti

**)Retained earnings includes actuarial gain (loss) arising from defined benefit plan*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NINDYA KARYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2020 Rp	2019 Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows From Operating Activities***
Penerimaan Kas dari Pelanggan		4,177,293,439,124	5,530,222,966,530	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(4,376,989,934,744)	(5,008,314,141,601)	*Cash Paid to Suppliers and Third Parties*
Pembayaran Kas kepada Karyawan		(199,923,835,976)	(242,806,099,523)	*Cash Paid to Employees*
Penerimaan Bunga Giro dan Deposito		14,227,497,511	6,607,317,781	*Cash Received from Interest and Time Deposits*
Pembayaran Beban Bunga Pinjaman		(93,778,198,691)	(87,115,781,825)	*Payments for Financial Charges*
Pembayaran Pajak Penghasilan		(104,099,601,913)	(165,802,003,234)	*Income Tax Payments*
Kas Bersih Diperoleh dari				***Net Cash Provided by***
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(583,270,634,689)**	**32,792,258,128**	***(Used in) Operating Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows From Investing Activities***
Penjualan Aset Tetap		--	1,288,500,000	*Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment*
Pembelian Aset Tetap		(208,072,730)	(33,600,282,677)	*Acquisition of Property, Plant, and Equipment*
Penambahan Properti Investasi		--	(2,483,950,001)	*Acquisition of Investment Properties*
Penerimaan Pencairan Laba Ventura Bersama		55,676,689,406	8,569,150,050	*Cash Received from Share of the Profit of Joint Venture*
Penambahan Aset Dalam Penyelesaian	18	(16,407,884,733)	(1,124,405,689)	*Acquisition of Assets in Progress*
Penambahan Investasi Jangka Panjang Lainnya		(2,436,707,000)	(369,205,200)	*Additional of Other Long-Term Investment*
Kas Bersih Diperoleh dari				***Net Cash Provided by***
(Digunakan untuk) untuk Aktivitas Investasi		**36,624,024,943**	**(27,720,193,517)**	***(Used in) Operating Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				***Cash Flows From Financing Activities***
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah	32	(300,000,000,000)	--	*Cash Payments for Medium Term Notes*
Penerimaan Pinjaman Bank dan Non-Bank	22	4,791,658,637,848	8,671,668,590,102	*Cash Receipts from Bank and Non-Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank dan Non-Bank	22	(4,207,196,144,359)	(8,671,668,590,102)	*Cash Payments for Bank and Non-Bank Loans*
Pembayaran Dividen Tunai	34.b	--	(35,297,841,675)	*Cash Dividend Payments*
Kas Bersih Diperoleh dari				***Net Cash Provided by***
(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**284,462,493,489**	**(35,297,841,675)**	***(Used in) Financing Activities***
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas		**(262,184,116,257)**	**(30,225,777,064)**	***Net Decrease on Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		508,064,440,458	538,290,217,522	***Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year***
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		**245,880,324,201**	**508,064,440,458**	***Cash and Cash Equivalents at End of Year***
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				***Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents***
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas		245,880,324,201	508,064,440,458	*Amount as reported in statement of cash flow*
Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas	3	(7,323,234)	--	*Allowance for Impairment Losses of cash and cash equivalent*
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan		**245,873,000,967**	**508,064,440,458**	***Amount as reported in statement of financial position***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

1. Umum / *1. General*

1.a. Pendirian dan Informasi Umum / *1.a. Establishment and General Information*

PT Nindya Karya (Persero) ("Perusahaan") didirikan sebagai pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Persero sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1972, *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 tentang penetapan modal PT Nindya Karya (Persero) tanggal 3 Maret 1973. Sebelumnya Perusahaan merupakan sebuah perusahaan jasa konstruksi Belanda bernama NV Nederlands Annenings Maatschappy (NEDAM) yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara seperti yang tercantum dalam PP 59/1961.

PT Nindya Karya (Persero) ("the Company") was established as a transfer manifestation from Nindya Karya State Company became Limited Liability Entity as the Government Regulation Number 11 of 1972, in conjunction with the Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. Kep-91/MK/IV/3/1973 regarding the capital determination of PT Nindya Karya (Persero) on March 3, 1973. Previously, the Company was a Netherlands construction company called NV Nederlands Annenings Maatschappy (NEDAM) that has been nationalized became State Owned Company as stated in PP 59/1961.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, dan terakhir berdasarkan Akta No. 68 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Khairina S.H., Notaris di Jakarta.

The Company Articles of Association has been amended for several times, and most recently by Deed No. 68 dated January 31, 2020 of Khairina S.H., Notary in Jakarta.

Ruang lingkup bidang usaha Perusahaan meliputi jasa konstruksi yang terdiri dari konstruksi sipil, mekanikal elektrikal termasuk jaringannya, radio, telekomunikasi dan instrumentasi perbaikan / pemeliharaan / renovasi bangunan; perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; layanan jasa konsultan manajemen dan rekayasa industri; *building management*; pabrikasi bahan komponen bangunan, komponen dan peralatan konstruksi, barang logam, kayu, karet dan plastik; agro industri; keagenan bahan bangunan dan konstruksi; keagenan penjualan ruangan perkantoran dan hunian (*condominium*); perdagangan umum; penyewaan peralatan komunikasi; pengelolaan kawasan; *system development*; jasa bidang teknologi informasi; peningkatan bidang jasa konstruksi; pengembang.

The scope of the Company's business areas includes construction services consisting of civil construction, electrical and mechanical including its network, radio, telecommunications and instrumentation repairment / maintenance / renovation of building; planning and supervising of construction works; consulting management services and industrial engineering services; building management; manufacturing of building component materials, construction's components and equipments, metal goods, wood, rubber and plastic; agro industry; building's material and construction agency; sales agency of office and residential space (condominium); general trading; communication equipment rental; area management; system development; information technology services; increasing construction services; developer.

Perusahaan ini mulai berdiri sejak tanggal 15 Maret 1973 dan memperoleh status badan hukum sejak 20 Agustus 1973.

The Company was founded on March 15, 1973 and obtained legal status since August 20, 1973.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Letjend. Haryono MT Kav. 22 Jakarta 13630.

The Company is domiciled in Jakarta, with head office located at Jl. Letjend. Haryono MT Kav. 22 Jakarta 13630.

1.b. Organisasi / *1.b. Organization*

Struktur Organisasi / ***Organization Structure***

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan

According to Decision of Company's Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders regarding Termination, Job's Nomenclature Change and Appointment

Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris dan Direktur Perusahaan berdasarkan surat No. SK-137/MPBU/08/2015, KEP-PS 05/PPA/0815, SK-217/MBU/07/2018, KEP-PS 5/PPA/0718 tanggal 24 Juli 2018, No. SK-282/MBU/10/2018 dan SK-65/PPA/2018 tanggal 31 Oktober 2018, pembagian tugas dan wewenang anggota - anggota Direksi ditetapkan Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: SK-060/KOM/07/2016 Tanggal 13 Juli 2016 menetapkan 4 (empat) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur.

Members of the Board of Commissioner and Directors of the Company based on No. SK-137/MPBU/08/2015, KEP-PS 05/PPA/0815, SK-217/MBU/07/2018, KEP-PS 5/PPA/0718 dated July 24, 2018, No. SK-282/MBU/10/2018 dan SK-65/PPA/2018 dated October 31, 2018, the roles and responsibilities of the Director members are set according to Director's Decree Number: SK-060/KOM/07/2016 dated July 13, 2016 determine 4 (four) members of the Directors, they were a President Director and 3 (three) Directors.

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengalihan Penugasan Sdr. Haedar A. Karim semula sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan menjadi Direktur Utama Perusahaan, dan juga mengangkat Moeharmein Zein Chaniago sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham PT Nindya Karya Nomor: SK-26/MBU/01/2020 dan Kep-PS 03/PPA/0120 tanggal 22 Januari 2020.

The Board of Commissioners, Directors and Employees

According to the Decision of the Company's Shareholders Outside the General Meeting on Transfer of Assignment Br. Haedar A. Karim originally as Director of Marketing and Development Director regarding the Dismissal and Appointment of the President Director and also nominate Moeharmein Zein Chaniago as of Marketing and Development of Director the Company Decree's shareholders Nindya Work Number: 26/MBU/01/2020 dan Kep-PS 03/PPA/0120 on January 22, 2020.

Susunan Dewan Komisaris PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya (Persero) Nomor : SK-308/MBU/12/2018 dan SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Nindya Karya juncto Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya Nomor: SK-205/MBU/09/2019 dan KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Nindya Karya, juncto Keputusan Para Pemegang Saham PT Nindya Karya Nomor: SK-6/MBU/01/2020 dan Nomor KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

The composition of the Board of Commissioners of PT Nindya Karya (Persero) based on the Decree of the Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) Number: SK-308 / MBU / 12/2018 and SK-78 / PPA / 1218 dated December 26 2018 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners PT Nindya Karya in conjunction with the Decision of the Shareholders of PT Nindya Karya Number: SK-205 / MBU / 09/2019 and KEP-PS 06 / PPA / 0919 dated September 13, 2019 concerning Dismissal and Appointment President Commissioner of PT Nindya Karya, in conjunction with the Decree of the Shareholders of PT Nindya Karya Number: SK-6 / MBU / 01/2020 and Number KEP-PS 01 / PPA / 0120 dated January 6, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's Board of Commissioners and Directors Structure as of December 31, 2020 and December 31, 2019 are as follows:

31 Desember / *December 31, 2020*		
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Sugiyartanto	*President Commissioner*
Komisaris	Rika Kiswardani	*Commissioner*
Komisaris	Andar Perdana Widiastono	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Haedar A. Karim	*President Director*
Direktur Keuangan dan SDM	Sri Haryanto	*Director of Finance and Human Resources*
Direktur Produksi dan *Health Safety and Environment*	Firmansyah	*Director of Production and Health Safety and Environment*
Direktur Pemasaran dan Pengembangan	Moeharmein Zein Chaniago	*Director of Marketing and Development*

31 Desember / *December 31, 2019*		
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Sugiyartanto	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Zahirwan Marza	*Independent Commissioner*
Komisaris	Iwanshah Wibisono	*Commissioner*
Komisaris	Andar Perdana Widiastono	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Pelaksana Tugas Direktur Utama	Haedar A. Karim	*Acting President Director*
Direktur Keuangan dan SDM	Sri Haryanto	*Director of Finance and Human Resources*
Direktur Produksi dan *Health Safety and Environment*	Firmansyah	*Director of Production and Health Safety and Environment*
Direktur Pemasaran dan Pengembangan	Haedar A. Karim	*Director of Marketing and Development*

Wilayah Kerja

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Nomor 0493/DIRUT/KPTS/KDS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi perusahaan PT Nindya Karya (Persero), struktur organisasi perusahaan berbasis Unit Bisnis. Unit Bisnis mempunyai fungsi pemasaran sampai dengan fungsi produksi, yang di bagi sebanyak 5 (lima) Wilayah, 2 (Divisi), 1 (satu) Unit Penunjang Produksi, sebagai berikut :

Working Areas

According to the Director's Decree Number: 0493/DIRUT/KPTS/KDS/08/2018 on August 10, 2018 about the Organizational Structure of PT Nindya Karya (Persero), the organizational structure was based on Business Unit. The Business Unit has marketing function up to the production function which are divided into 5 (five) Regions, 2 (two) Divisions, 1 (one) Production Supporting Unit, as follows :

Wilayah Operasional/ ***Operating Region***	**Wilayah Operasi/** ***Working Areas***	**Kedudukan/** ***Domicile***
Wilayah I /	DI Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung/	Medan
Region I	*DI Aceh, North Sumatra, Riau, Riau Islands, West Sumatra, Jambi, Bengkulu, South Sumatra, Bangka Belitung Islands, Lampung*	
Wilayah II /	Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat/	Jakarta
Region II	*Central Java, DI Yogyakarta, East Java, DKI Jakarta, Banten, West Java*	
Wilayah III /	Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur/	Balikpapan
Region III	*West Kalimantan, North Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan*	
Wilayah IV /	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Luar Negeri - Timor Leste/	Denpasar
Region IV	*Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara and Overseas - Timor Leste*	

Wilayah Operasional/ ***Operating Region***	**Wilayah Operasi/** ***Working Areas***	**Kedudukan/** ***Domicile***
Wilayah V / *Region V*	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua & Papua Barat/ *North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, West Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Maluku, North Maluku, Papua & West Papua*	Makassar
Divisi EPC/ *EPC Division*	Wilayah Operasi Seluruh Indonesia/ *Work Area covers Whole Indonesia*	Jakarta
Divisi Properti/ *Property Division*	Wilayah Operasi Seluruh Indonesia/ *Work Area covers Whole Indonesia*	Jakarta
Unit Penunjang Produksi/ *Production Supporting Unit*	Wilayah Operasi Seluruh Indonesia/ *Work Area covers Whole Indonesia*	Jakarta

Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.380.159.323 dan Rp2.705.014.286, sedangkan jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Direksi pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp6.105.838.579 dan Rp4.252.500.000.

Total of remuneration received by the Board of Commissioners for 2020 and 2019 are amounted to Rp2,380,159,323 and by Rp2,705,014,286, respectively while remuneration received by Directors for 2020 and 2019 are amounted to Rp6,105,838,579 and Rp4,252,500,000, respectively.

Jumlah Karyawan Perusahaan pada 31 Desember 2020 da 31 Desember 2019 masing-masing 666 dan 979 orang (tidak diaudit).

Total of the Company's employees on Desember 31, 2020 and December 31, 2019 are 666 and 979 persons (unaudited), respectively.

1.c. Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

1.c. Audit Committee

The composition of Company's Audit Committee as of 2020 and are as follows:

	31 Desember/ ***December 31, 2020*** **Rp**	**31 Desember/** ***December 31, 2019*** **Rp**	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Andar Perdana W.	Iwanshah Wibisono	*Chairman*
Anggota	Mamat Supangkat	Tumpal Pakpahan	*Member*

Andar Perdana Widiastono diangkat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK-06/Kom/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan.

Andar Perdana Widiastono was appointed as Chairman of the Audit Committee of the Board of Commissioners pursuant to Decree No. SK-06/Kom/01/2020 dated January 6, 2020 on dismissal and appointment of the Chairman of the Audit Committee of the Company.

Mamat Supangkat diangkat sebagai Anggota komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK-40/Kom/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan.

Mamat Supangkat was appointed as a Member of the Audit committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number: SK-40 / Kom / 06/2020 dated June 2, 2020 concerning Dismissal and Appointment of member the Audit Committee of the Company.

1.d. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas PT Nindya Beton ("PT NB"), entitas anak, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51%.

PT Nindya Beton didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 19 Februari 2013 dari Khairina S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-10206.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013.

Ruang lingkup bidang usaha PT NB meliputi: industri beton pracetak, industri *readymix*, dan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dan pabrikasi, yaitu:
- Sistem pabrikasi beton pracetak;
- Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
- Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
- Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
- Dan usaha lainnya yang berkaitan.

Total aset PT NB pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp194.717.195.498 dan Rp185.794.854.494. Total pendapatan PT NB untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp155.795.727.275 dan Rp223.895.254.944.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

1.d. Subsidiary Structure

The Company has control over PT Nindya Beton ("PT NB"), a subsidiary with the percentage of ownership of 51%.

PT Nindya Beton was established based on Notarial Deed No. 33 dated February 19, 2013 from Khairina S.H., the Notary and Land Deed Officer in Jakarta and has received the validation from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in decree No. AHU-10206.AH.01.01 by 2013 dated March 4, 2013.

The scope of PT NB business includes: concrete precast industry, readymix industry, and other related businesses and manufacturing, such as:
- *Precast concrete manufacturing system;*
- *Building materials and components manufacturing;*
- *Components and construction equipments;*
- *Metal, wood, rubber, and plastic manufacturing;*
- *And others related businesses.*

Total assets of PT NB as of December 31, 2020 and December, 31 2019 amounting to Rp194,717,195,498 dan Rp185,794,854,494 respectively. Total revenues of PT NB for the years ended December 31, 2020 and December, 31 2019 amounting to Rp155,795,727,275 and Rp223,895,254,944, respectively.

The Company and subsidiary hereinafter will be referred as "the Group".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan / *2. Significant Accounting Policies*

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the return given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are presented by using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen 2017): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standards, amendments of standards and interpretation of standard issued by DSAK – IAI' and is effectively applied for the period starting on or after January 1, 2020, namely:

- *PSAK 15 (Amendment 2017): Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures;*
- *PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts;*
- *PSAK 71: Financial Instruments;*
- *PSAK 71 (Amendment 2017): Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation;*
- *PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers;*
- *PSAK 73: Leases;*
- *ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;*

- PSAK 1 (Amandemen 2019): Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan;
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Material;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa

- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan
PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

- *PSAK 1 (Amendment 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;*
- *PSAK 1 (Improvement 2019): Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting;*
- *PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Polices, Changes in Accounting Estimates and Errors;*
- *PSAK 102 (Amendment 2019): Accounting for Murabahah;*
- *ISAK 101: Revenue Recognition on Deffered Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;*
- *ISAK 102: Impairment of Murabahah Receivable.*
- *ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Property Plant and Equipment and PSAK 73: Leases*
- *PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting; and*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform*

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Group accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

PSAK 71: Financial Instruments
PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, Group choose to applies retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Berdasarkan hasil kajian Grup terhadap dua kriteria dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan laba rugi sesuai PSAK 71.

Based on the results of the Group's review of the two criteria in determining the classification of financial assets, there is a change in classification and measurement of long-term investments classified as available for sale and measured using the cost method under PSAK 55 are changed to the classification of financial assets at fair value through profit and loss in accordance with PSAK 71.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perusahaan pada awal penerapan PSAK 71.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets have an impact on the carrying value of the Company's financial assets at the beginning of the implementation of PSAK 71.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

The following is a table of the carrying values of financial assets based on the provisions of PSAK 55 and PSAK 71, as well as adjustments to retained earnings on the initial application date of January 1, 2020

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019/ *As previously reported as of December 31, 2019* Rp	Penyesuaian Awal Penerapan PSAK 71/ *Adjustment on Initial Implementation of PSAK 71* Rp	Disesuaikan pada 1 Januari 2020/ *Adjusted as as of January 1, 2020* Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	508,064,440,458	(5,880,574)	508,058,559,884	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang usaha	278,375,588,266	(33,942,067,795)	244,433,520,471	*Accounts Receivable*
Piutang retensi	170,121,245,454	(27,773,022,606)	142,348,222,848	*Retention Receivables*
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	296,622,978,182	(77,838,947,490)	218,784,030,692	*Construction Joint Venture Receivables*
Piutang Lain-lain	22,254,029,316	(100,985,073)	22,153,044,243	*Other Receivables*
Tagihan bruto kepada Pemberi Kerja	2,418,105,324,847	(50,959,046,817)	2,367,146,278,030	*Gross Amount Due from Customers*
Aset Pajak Tangguhan (Penyisihan Penurunan Nilai)	--	3,945,901,174	3,945,901,174	*Deferred Tax Asset (Allowance for Impairment Losses)*
Jumlah	**3,693,543,606,523**	**(186,674,049,180)**	**3,502,923,656,169**	***Total***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset lain-lain (Kas yang dibatasi penggunaannya)	29,042,684,515	(29,042,684,515)	--	*Other Assets (Restricted Funds)*
Jumlah Aset	**29,042,684,515**	**(29,042,684,515)**	**--**	***Total Assets***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
EKUITAS				***EQUITY***
Saldo Laba Perusahaan	744,193,112,148	(207,982,767,395)	536,210,344,754	*Retained Earnings*
Kepentingan Non Pengendali	26,803,364,751	(7,733,966,301)	19,069,398,450	*Non - Controlling Interest*
Jumlah	**770,996,476,899**	**(215,716,733,696)**	**555,279,743,204**	***Total***

PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Grup menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers"
PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Group applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Based on the review that Groups has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

PSAK 73: Sewa
PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Grup juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut):

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;

PSAK 73: Leases
PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Group as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The Group has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Group's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019

At the initial implementation date, the Group also adopted the following practical policies:

- *Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics:*

- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;

Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap PSAK 73, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

- *Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of 1 January 2020;*

Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.

Based on the review that the Group has conducted on PSAK 73, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

2.d. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan yang tersedia untuk dijual.

2.d. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent measurement of financial assets accounting treatment before January 1, 2020

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
a. pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
b. pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
c. pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

a. those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

b. those that upon initial recognition designated as available for sale; or

c. those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual ("AFS")

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Grup mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang tidak tercatat di pasar aktif dengan menggunakan teknik penilaian berdasarkan asumsi yang wajar. Dalam keadaan tertentu dimana kisaran estimasi nilai wajar yang realistis cukup signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara wajar, maka grup mengukur nilai wajar instrumen AFS tersebut pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Perlakuan Akuntansi Sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

iii. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

The Group measures the fair value of non-listed equity instruments by applying valuation techniques based on reasonable assumptions. In the limited case where the range of reasonable fair value measurements is significantly wide and the probabilities of the various estimates cannot be reasonably assessed, the Group records such AFS instruments at cost less impairment.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Group's rights to receive the dividends are established.

Accounting Treatment Since January 1, 2020

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (”FVTOCI”)
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs
Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:
1) The objective of the Company's business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and

2) The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:
1) The objective of business model to hold the financial assets is to collect contractual cash flows and to sell the assets; and

2) The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are

Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Impairment of Financial Assets

Accounting treatment before January 1, 2020

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:
- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan;
- terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:
- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization;*
- *observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup dan entitas anak atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group and its subsidiaries' past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of

piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Accounting treatment since January 1, 2020

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Aset keuangan yang berupa investasi pada instrumen ekuitas tidak dilakukan penurunan nilai.

The Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts. Financial asset in form of investment in equity instrument is not impaired.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. Nilai waktu uang; dan
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Time value of money; and
iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with 'investment grade' according to external

menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat *"investment grade"* berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh

Derecognition of Financial Assets
The Group derecognize a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when they transfer the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continue to control the transferred asset, the Group recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts they may have to pay. If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continue

risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

to recognize the financial asset and also recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the assets carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is reclassified to profit or loss.

Saat penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of a financial asset other than in its entirety (e.g., when the Group retain an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocate the previous carrying amount of the financial asset between the part they continue to recognize under continuing involvement and the part they no longer recognize on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

Accounting treatment before January 1, 2020

The Group shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

If the result on change of intention, Group ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for–sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Accounting treatment since January 1, 2020

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost

diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through profit or loss into fair value through other comprehensive income, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Klasifikasi Sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Company and its subsidiaries are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen Ekuitas
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Equity Instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak terutama terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka Panjang.

Pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka panjang pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Financial Liabilities
The Company and its subsidiaries' financial liabilities mainly consist short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables, and long-term payables

Short-term loans, account payables, accrued expenses, other payables, and long-term payables are initially measured at fair value, net of transaction costs and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognized on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings using the effective interest rate method.

After initial recognition, if the carrying amount is different from the nominal value caused by the premium or discount, then the difference is amortized on straight-line basis over the period of the sukuk ijara.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries derecognize financial liabilities, if and only if the Company and its subsidiaries' obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability
A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)
ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)
iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.e. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

2.e. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiary as described in Note 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

A subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group's financial statements consist of the operating results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the noncontrolling interests having a deficit balance. The Group presents noncontrolling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the ownership of the parent entity in the subsidiary that do not result in loss of control is accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, the remaining interest in entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss are recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Perusahaan mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Perusahaan menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Company attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Company presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian, maka Perusahaan:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendalian pada entitas anak terdahulu Ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendalian);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

If the Company loses control, the Company:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
(b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
(e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal posisi keuangan. Selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai laba (rugi) selisih kurs tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.f. Transactions and Balances in Foreign Currency

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the prevailing rate at the time of transactions.

At the date of the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the exchange prevailing middle rates of Bank Indonesia at such date. The resulting exchange differences is recorded as gain (loss) on foreign exchange for the year.

As of December 30, 2020 and December 31, 2019 the exchange rates used are as rate follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
	Rp	**Rp**	
Dollar Amerika Serikat (USD)	14,105	13,901	*United States Dollar (USD)*
Euro	17,330	15,589	*Euro*

2.g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1; atau
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf 1 memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2.g. Transactions with Related Parties

Related parties is person or entity that is related to the reporting entity.

1) A person or close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
2) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   iii. Both entities are joint ventures from the same third party;
   iv. One entity is a joint venture of the third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   vi. The entity was controlled or jointly controlled by a person identified in number 1; or
   vii. A person identified in 1 has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

viii. The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE'e Ministry as a shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.h. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.h. Retention Receivables

Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.i. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

2.i. Gross amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Gross amount due from customer is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing statement of financial position date.

2.j. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are the costs which have been paid but will be charged in the future over the periods benefits using straight-line method.

2.k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.k. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the First In First Out (FIFO) method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any impairment of inventories will be recognized to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net property value, is property as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.l. Aset Real Estat

Aset Real Estat terdiri dari tanah belum dikembangkan, bangunan dan tanah sedang dikembangkan, bangunan dan tanah yang siap untuk dijual, bangunan dalam konstruksi, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman, jika ada. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke tanah siap untuk dijual.

2.l. Real Estate Assets

Real estate assets, which consist of land not yet developed, land under development, buildings and land ready for sale, buildings under construction, are inventories stated at cost or net realizable value whichever is lower.

The cost of land not yet developed consists of pre-development costs and land acquisition cost. The cost of the land not yet developed is transferred to the land under development account when the development of the land has started.

The cost of land under development consists of cost of land not yet developed, direct and indirect costs related to the development of real estate assets and borrowing costs, if any. The cost of land under development is transferred to the buildings under construction account when the development is completed or transferred to the land available for sale.

2.m. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.m. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activity require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classified joint arrangement as joint venture which represents the joint arrangement which the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and records for that investment using the equity method.

2.n. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa aset, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

2.n. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment properties are recognized as asset, if only, it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment properties, initially, shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group choose to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

The fair value of investment properties is based on a valuation by an independent appraiser who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;
b. Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;
c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and
d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.o. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

2.o. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, property, plant and equipment, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated allowance for impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of property, plant and equipment starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	2-20	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	2-8	*Machineries and Equipment*
Kendaraan	2-5	*Vehicles*
Inventaris Kantor	2-4	*Office Equipments*
Inventaris Mess	2-4	*Dormitory Inventories*

Grup memilih menggunakan model revaluasi untuk tanah yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, yakni nilai wajar pada tanggal revaluasi.

The Group choose to use revaluation model for land whose fair value can be measured reliably, being its fair value at the date of the revaluation.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase is property in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously in profit or loss.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease is property in profit or loss. However, the decrease is property in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease property in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Revaluations is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai

Self-constructed property, plant and equipment are presented as part of the property plant and equipment under "Asset in Settlement" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets

bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan/siap digunakan & disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective property plant and equipment items at the time the asset is completed or ready for use and is depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of a property, plant and equipment is derecognized on disposal or has no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss from derecognition (determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.p.Sewa

2.p. *Leases*

Perlakuan Akuntansi Sebelum 1 Januari 2020
Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Accounting Treatment Before January 1, 2020
Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Grup sebagai penyewa
Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai utang sewa pembiayaan.

The Group as lessee
Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statement of financial position as a finance lease obligation.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

Perlakuan Akuntansi Sejak 1 Januari 2020

Accounting Treatment Since January 1, 2020

Grup sebagai Penyewa

The Group as Lessee

Pada tanggal insepsi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah salama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

(a) hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian; dan
(b) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
    (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
    (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

(a) the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and
(b) the right to direct the use of the identified asset, only if either:
    (i) the Group has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or
    (ii) the relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:

- Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
- Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

- *the Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or*
- *the Group designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.*

At the commencement date, the Group shall measure the right-of-use asset at cost, which includes the amount of the initial measurement of the lease liability, any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received, any initial direct costs incurred by the Group, and an estimate of costs to be incurred by the Group in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories.

After the commencement date, the Group measures the right-of-use asset by applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa dengan:

a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

a. increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
b. reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
c. remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Lease liability is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika utang sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognize right-ofuse assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Perusahaan sebagai pesewa

Perusahaan melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan beberapa kapal.

The Company as lessor

The Company enters into lease agreements as a lessor with respect to some of vessels.

Sewa di mana Perusahaan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases for which the Company is a lessor are classified as operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a operating leases.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan sebagai jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

2.q. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan biaya atas perolehan piranti lunak komputer yang tidak terintegrasi dengan piranti keras dikapitalisasi berdasarkan biaya terjadinya untuk mendapatkan dan menyiapkan piranti lunak sampai siap digunakan; diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya, yaitu tiga tahun.

2.q. Intangible Asset

Intangible aset is the costs associated with the acquisition of computer software which is not integrated with related hardware are capitalised based on costs incurred to acquire and prepare the software until ready to use. These costs are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives, which is three years.

2.r. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.r. Impairment of Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an allowance for impairment losses and is recognized immediately in profit or loss.

An allowance for impairment losses recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last allowance for impairment losses was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an allowance for impairment losses.

2.s. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari :

a) pengakuan awal *goodwill*; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba

2.s. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from :

a) the initial recognition of goodwill; or
b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless

dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan aset pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a) grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara aset untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a) the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b) the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:

   i. the same taxable entity; or
   ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup :
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group :
a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and

b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.t. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto-kan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu & keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program & setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

2.t. Employee Benefit

Short-term Employee Benefits

Shor-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 (“Law 13/2003”).

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity’s informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Pesangon
Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

(a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
(b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Termination Benefits
The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:
(a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
(b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Jasa Konstruksi
Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian). Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

2.u. Revenues and Expenses Recognition

Accounting Treatment before January, 1 2020
Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Tax (VAT).

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Construction Services
Contract revenue and contract costs associated with the property contract is recognized as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method). Construction percentage of completion is determined based on surveys of work performed.

When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be approved as an expense immediately.

Contract revenue comprised of the initial amount of revenue agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that they will results in revenue and they are capable of being reliably measured.

Untuk kontrak yang mendapatkan eskalasi harga, akan diakui sebagai pendapatan pada saat persetujuan dari pemberi kerja diterbitkan dan diakui 90% bila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. 1130/DIRUT/KPTS-/SEKPER/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

For contracts subject to price escalation, will be recognized revenue upon approval of the owner and 90% when it has received approval from the Financial and Development Audit Agency (BPK) in the form of the Audit Report (LHA) as stipulated in Decree No.1130/DIRUT/KPTS-/SEKPER/ 07/2017 dated July 17, 2017

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak, dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract cost comprised of costs that relate directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, and such other costs that are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract.

Penjualan Barang
Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Sale of Goods
Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group' warehouse at the request of the customer, when an invoices was issued.

Pendapatan Sewa
Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Rental Income
Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun Pendapatan yang Diterima dimuka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Rental income received in advance are recorded as Unearned Revenue and recognized as income regularly over the rental periods.

Pendapatan dari Penjualan Aset Real Estat
Pendapatan dari penjualan rumah, rumah toko, dan bangunan sejenis lainnya beserta tanah kavlingnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
- proses penjualan telah selesai;
- harga jual akan tertagih;
- tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah

Revenue from Sale of Real Estate Assets
Revenue from sale of houses, shop houses and other similar buildings and land plots are recognized on full accrual method if all of the following criteria are met:
- *the sales process has been completed;*
- *the selling price will be collectible;*
- *the seller's bill will not be subordinated in the future to any other loan that the buyer will obtain; and the seller has transferred the risks and rewards of ownership of the building unit to the buyer through a transaction which substantially is the sale and the seller is no longer obligated*

penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Pendapatan dari penjualan bangunan komersil berupa apartemen atau bangunan komersil lainnya, yang pembangunannya dilaksanakan lebih dari satu tahun diakui menggunakan metode persentase penyelesaian, yang apabila syarat berikut terpenuhi:

- proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu pondasi bangunan telah selesai terpenuhi;
- jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; dan
- jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

Pendapatan penjualan kavling tanah matang dan kavling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:

- jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
- harga jual akan tertagih;
- tagihan penjual tidak bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli;
- proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kaveling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kaveling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasiitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- hanya kaveling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kaveling tanah tersebut.

Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

or significantly involved with the building unit.

Revenue from sale of commercial building consisting of apartments or another commercial buildings, which are constructed more than one year recognized using the percentage of completion method, if all the following criterias are met:

- *the construction process has surpassed the initial phase, which is the foundation of the building has been completed;*
- *total payments of the buyer equal or exceed 20% of the agreed sales price and no refund could be made by the buyer, and*
- *total revenues and costs can be reasonably estimated.*

Revenue from sale of mature land and land without building, shall be recognized using the full accrual method, if all the following criterias are meet:

- *total payments of the buyer equal or exceed 20% of the agreed sales price and no refund could be made by the buyer;*
- *the selling price will be collectible;*
- *the receivable will not be subordinated to other loans, which will be obtained by the buyer;*
- *the process of land development has been completed, that the seller has no obligation to develop the land sold, such as the obligation to improve the land or obligation to build the basic facilities promised by or obliged by the seller, in accordance with the binding sale and purchase agreement or related regulations; and*
- *only land are sold, without obligating the seller to be involved in the construction of the building above such land.*

If all of the above conditions are not fulfilled, all money received from customers is recorded as an advance from the customer using the deposit method, until all requirements are met.

Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
   b. Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
   c. Kontrak memiliki substansi komersial; dan
   d. Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Pendapatan Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada hasil survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Accounting treatment since January 1, 2020

An entity shall account for a contract with a customer only when all of the following criteria are met:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
   a. The contract has been agreed by the parties involved in the contract;
   b. The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;
   c. The contract has commercial substance; and
   d. It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

Construction Revenue

Revenues related to construction contracts are contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the surveys results of work performed.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be realiably measured.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Penjualan Barang
Pendapatan dari penjualan barang diakui pada suatu waktu tertentu saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Penjualan Aset Real Estat
Pendapatan dari penjualan aset real estat diakui pada suatu waktu tertentu saat pengendalian atas aset telah berpindah kepada pelanggan, yaitu saat terjadi penyerahan aset kepada pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognised as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognised as current year expenses in profit or loss.

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognised as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognised as nonproject expenses (operating expenses).

Sale of Goods
Revenue from the sale of goods is recognised at a point in time when the control of goods has been transferred to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group' warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Sale of Real Estate Assets
Revenue from the sale of real esate assets is recognised at a point in time when the control of asset has been transferred to the customer, ie upon of handover of asset to buyer

Expenses are recognised as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

2.v. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat aset maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan.

2.v. Provision

A provision is recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances.

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengantian tidak boleh melebihi provisi.

Where some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.w. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

2.w. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the financial statements are prepared.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Assumptions and situation about the future development, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the year, disclosed below.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Persentase Penyelesaian

Grup mengakui pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi dan proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan kebijakan Akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2u. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase peyelesaian) dan dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Group mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis. Pendapatan dari proyek diungkapkan dalam Catatan 35 dan beban dari proyek diungkapkan dalam Catatan 36.

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material oleh perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat peralatan berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Grup melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud disajikan pada Catatan 18 dan 20.

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Accounting Estimates and Assumptions

Percentage of Completion

The Group recognize revenues and cost of revenue from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Stage of completion is measured based on the accounting policies described in Note 2u. Important assumption which required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluate them based on past experience and with the assistance of specialist. Revenue from the project are disclosed in Note 35 and expenses from the project are disclosed in Note 36.

Estimated Useful Lives

Group conducts periodic reviews of the economic useful lives of Property Plant and Equipment and intangible assets based on factors such as the condition of technical and technological developments in the future. Future operating results will be materially affected by the estimation changes caused by changes in factors mentioned above.

Group performs periodic review over the useful life of the equipment based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of Group property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments The carrying amount of Property Plant and Equipment and intangible assets are disclosed in Notes 18 and 20.

The determination of Group's post-employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuari dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 32.

Management believe that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. Detailed information has been disclosed on Note 32.

Nilai Wajar Properti Investasi dan Aset Tetap Tanah

Nilai wajar properti investasi dan tanah bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi. Jumlah tercatat properti investasi disajikan pada Catatan 17.

Fair Value of Investment Property and Land

The Group's fair value of investment property and land depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculation of such amounts. The Group believe that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its investment property. The carrying amount has been disclosed on Note 17.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai untuk instrumen keuangan telah diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian Kredit Ekspektasian pada instrumen keuangan diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar pelanggan di masa lalu dan analisis posisi keuangan pelanggan saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari pelanggan, kondisi ekonomi umum industri di mana pelanggan beroperasi. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari 36 bulan karena pengalaman historis mengindikasikan bahwa instrumen keuangan tersebut umumnya tidak dapat dipulihkan.

Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

Allowance for impairment losses for financial instruments has been measured at an amount equal to lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since its initial recognition. The Expected Credit Loss on financial instruments are estimated using a provision matrix refer to past default history of the customers and an analysis of the customers current financial position, and adjusted for specific factors to the customers, general economic conditions of the industry in which the customers operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables over 36 months past due because historical experience has indicated that financial instruments aren't generally recoverable.

Instrumen keuangan dihapuskan ketika terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa pelanggan dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis.

Financial instrument is written off when there is information indicating that the customers is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

3. Kas dan Setara Kas / *3. Cash and Cash Equivalents*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Kas	510,690,552	680,835,672	***Cash***
Bank			***Banks***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	194,320,984,679	132,100,431,001	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22,460,859,322	95,332,864,538	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,015,197,157	1,041,186,076	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Lain - lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	709,849,689	486,831,115	*Others (each below Rp 500 Million)*
Sub Jumlah	218,506,890,847	228,961,312,730	*Sub Total*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	15,182,887,000	--	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	5,494,450,855	235,809	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3,125,240,980	140,703,543	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	736,681,426	668,223,492	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank DKI	125,931,709	3,755,071,995	*PT Bank DKI*
Lain - lain (masing - masing dibawah Rp 500 juta)	497,550,832	1,658,057,217	*Others (each below Rp 500 Million)*
Sub Jumlah	25,162,742,802	6,222,292,056	*Sub Total*
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(7,323,234)	--	*Allowance for Impairment Losses*
Sub Jumlah Bank - Bersih	243,662,310,415	235,183,604,786	*Sub Total Banks - Net*
Deposito Berjangka			***Time Deposits***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,700,000,000	1,700,000,000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	100,000,000,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	500,000,000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	1,700,000,000	102,200,000,000	*Sub Total*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	170,000,000,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Sub Jumlah	--	170,000,000,000	*Sub Total*
Sub Jumlah Deposito	1,700,000,000	272,200,000,000	*Sub Total Deposits*
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	**245,873,000,967**	**508,064,440,458**	***Total Cash and Cash Equivalent - Net***
Tingkat Suku Bunga Kontraktual Deposito per Tahun	3.50%	4.25% - 7.75%	*Contractual Annual Interest Rates of Time Deposits*
Jangka Waktu	1 bulan / *month*	1 bulan / *month*	*Terms Deposit*

Mutasi penyisihan penurunan nilai kas dan setara kas sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of cash and cash equivalent is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Saldo Awal Tahun	--	--	*Beginning Balance of The Year*
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	5,880,574	--	*Adjustment on Initial Implementation PSAK 71*
Penambahan Tahun Berjalan	1,442,660	--	*Addition in The Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**7,323,234**	**--**	***Ending Balance of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai atas saldo bank dan deposito berjangka telah memadai.

Management considered that allowances for impairment losess of bank balance and time deposits is sufficient.

4. Investasi Jangka Pendek / *4. Short-Term Investment*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Surat Utang PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	200,000,000,000	200,000,000,000	*Promissory Note PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*

Investasi jangka pendek Perusahaan merupakan surat utang yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), entitas induk, berdasarkan Surat Utang No.S6596/PPA/PD/1219 pada tanggal 16 Desember 2019 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan telah diperpanjang dengan Surat Utang No. SU-1/PPA/0121 pada tanggal 1 Januari 2021 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Suku bunga dari surat utang adalah 3% pertahun.

The Company's short term investment is a bond issued by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)(PPA), parent entity, based on Secured Promissory Notes No.S6596/PPA/PD/1219 on December 16, 2019 for a period of 1 (one) year from January 1, 2020 to December 31, 2020 and have been extended based on Secured Promisorry Notes No. SU-1/PPA/0121 on January 1, 2021, for a period of 1 (one) year from January 1, 2021 to December 31, 2021. Interest rate of promissory note is 3% per year.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai atas saldo investasi jangka pendek sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2020.

Manajement believe that allowance for impairment losess for short term investment is nil as at December 31, 2020.

5. Piutang Usaha / *5. Accounts Receivable*

Semua saldo piutang usaha Grup didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

All the Groups' account receivable is denominated in Rupiah.

Rincian saldo piutang pihak berelasi dan pihak ketiga sebagai berikut :

The details of accounts receivable to the related parties and third parties are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Pertamina (Persero)	30,402,660,829	--	*PT Pertamina (Persero)*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	14,353,522,644	--	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
PT Hakaaston	13,828,083,374	4,775,827,250	*PT Hakaaston*
PT Angkasa Pura II (Persero)	11,338,965,052	29,035,867,331	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Angkasa Pura I (Persero)	8,926,375,820	25,753,111,020	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Krakatau Steel Engineering	7,018,170,678	6,829,907,251	*PT Krakatau Steel Engineering*
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	3,732,563,613	--	*PT Pertamina Exploration and Production*
Ventura Bersama Nindya - Surya	2,543,390,100	6,089,386,131	*JV Nindya - Surya*
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1,869,048,000	1,869,048,000	*PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)*
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	1,467,355,000	--	*PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)*
PT Hutama Karya Infrastruktur	--	11,525,279,026	*PT Hutama Karya Infrastruktur*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	--	3,059,257,430	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Ventura Bersama Nindya - Bina Nusa Lestari	--	2,723,095,682	*JV Nindya - Bina Nusa Lestari*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	27,615,471,707	12,408,538,036	*Others (each below Rp 1 Billion)*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	123,095,606,817	104,069,317,157	*Sub Total Related Parties*
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(11,741,586,909)	(4,578,671,269)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Sub Jumlah Pihak Berelasi - Bersih	**111,354,019,908**	**99,490,645,888**	***Sub Total Related Parties - Net***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Chrystal Garden	18,267,403,290	18,267,403,290	*PT Chrystal Garden*
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13,302,256,674	18,604,015,167	*The Ministry of Public Work and Public Housing*
PT Sarana Sirkuitindo Utama	10,223,367,526	10,223,367,526	*PT Sarana Sirkuitindo Utama*
PT KNE Global Persada	10,043,811,490	10,043,811,490	*PT KNE Global Persada*
PT Sinergi Solusi Utama	4,848,145,264	4,848,145,264	*PT Sinergi Solusi Utama*
PT Buana Risma	2,749,428,235	2,749,428,235	*PT Buana Risma*
Ventura Bersama PP-KPS	2,412,818,649	6,478,804,988	*Ventura Bersama PP-KPS*
PT Saras Square	2,142,539,000	2,142,539,000	*PT Saras Square*
PT Fatimah Azzahra	1,785,465,586	2,488,029,344	*PT Fatimah Azzahra*
PT Altra Excis Investama	1,765,478,924	1,765,478,924	*PT Altra Excis Investama*
Kementerian Perhubungan	1,693,556,774	2,817,598,567	*The Ministry of Transportation*
PT Wirakarsa Konstruksi	1,276,405,000	1,276,405,000	*PT Wirakarsa Konstruksi*
Kementerian Pemuda dan Olahraga	--	100,114,210,023	*Ministry of Youth and Sports*
Politeknik Kesehatan Bangka Belitung	--	11,652,567,588	*Bangka Belitung Health Polytechnic*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	33,711,213,556	44,359,070,626	*Others (each below Rp 1 Billion)*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	104,221,889,968	237,830,875,032	*Sub Total Third Parties*
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(80,990,925,181)	(58,945,932,654)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Sub Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	**23,230,964,787**	**178,884,942,378**	***Sub Total Third Parties - Net***
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**134,584,984,695**	**278,375,588,266**	***Total Accounts Receivable - Net***

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (bulan) sebagai berikut:

Total accounts receivable by aging (months) are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
< 12 Bulan	116,707,079,801	113,114,501,619	*< 12 Months*
> 12 - 24 Bulan	20,521,661,371	152,250,150,300	*> 12 - 24 Months*
> 24 Bulan	90,088,755,613	76,535,540,270	*> 24 Months*
Jumlah	227,317,496,785	341,900,192,189	***Total***
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(92,732,512,090)	(63,524,603,923)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Bersih	**134,584,984,695**	**278,375,588,266**	***Total - Net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of receivables is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Saldo Awal Tahun	(63,524,603,923)	(74,035,677,033)	*Balance at Beginning of The Year*
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	(33,942,067,795)	--	*Adjustment on Initial Implementation PSAK 71*
Penambahan Tahun Berjalan	(8,951,949,059)	(1,841,009,145)	*Addition in The Current Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	13,686,108,688	12,352,082,254	*Recovery in The Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**(92,732,512,090)**	**(63,524,603,923)**	***Balance at End of The Year***

Piutang usaha PT Angkasa Pura I (Persero) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Catatan 22.2).

Accounts receivable of PT Angkasa Pura I (Persero) were used as collateral to borrowings from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Note 22.2).

Piutang usaha PT Pertamina (Persero) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Bank Mandiri (Persero) (Catatan 22.4 dan 22.7).

Accounts receivable of PT Pertamina (Persero) were used as collateral to borrowings from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten and PT Bank Mandiri (Persero) (Notes 22.4 and 22.7).

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impaiment losses of receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible receivables in the future.

6. Piutang Retensi / *6. Retention Receivables*

Rincian saldo piutang retensi pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

The details of retention receivables to the related parties and third parties are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Angkasa Pura II (Persero)	28,704,830,729	26,854,409,934	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Krakatau Steel Engineering	7,047,737,085	6,334,303,824	*PT Krakatau Steel Engineering*
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	4,355,590,908	4,355,590,908	*PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)*
Perum Perumnas	3,484,770,691	3,484,770,691	*Perum Perumnas*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,562,701,108	2,562,701,108	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Magnesium Gosari Internasional	2,561,818,181	2,561,818,181	*PT Magnesium Gosari Internasional*
PT Hutama Karya (Persero)	1,845,758,970	1,845,758,970	*PT Hutama Karya (Persero)*
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	1,386,536,565	1,386,536,565	*JV Nindya - Dewa Ruci*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	8,749,120,366	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
Ventura Bersama Nindya - Surya	--	7,757,664,490	*JV Nindya - Surya*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	1,769,854,781	5,652,824,401	*Others (each below Rp 1 Billion)*
Sub Jumlah	53,719,599,018	71,545,499,438	*Sub Total*
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(11,533,552,350)	(2,562,701,108)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**42,186,046,668**	**68,982,798,330**	***Sub Total Related Parties***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	106,114,195,224	53,644,484,443	*The Ministry of Public Work and Public Housing*
PT Sinergi Solusi Utama	10,376,663,040	10,376,663,040	*PT Sinergi Solusi Utama*
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	4,943,073,624	4,943,073,624	*West Pesisir District Government*
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	4,109,770,350	--	*Public Works and Spatial Planning Office West Sumatera*
Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4,077,292,936	4,077,292,936	*Kotabaru District Government*
Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,883,035,717	3,883,035,717	*The Ministry of Youth and Sports*
PT Karya Unggulan	3,528,110,765	3,528,110,765	*PT Karya Unggulan*
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	2,603,152,867	1,302,429,727	*Dharmasraya District Government*
PT Mandiri Karya Cipta Indah	2,125,987,499	2,125,987,499	*PT Mandiri Karya Cipta Indah*
PT Royal Residen	1,539,770,958	1,539,770,958	*PT Royal Residen*
PT Maju Santosa Cemerlang	1,227,631,725	1,227,631,725	*PT Maju Santosa Cemerlang*
Pemerintah Kabupaten Sikka	--	31,407,223,828	*Sikka District Government*
PT Maleo	--	1,848,555,014	*PT Maleo*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	2,657,906,480	3,201,286,407	*Others (each below Rp 1 Billion)*
Sub Jumlah	147,186,591,185	123,105,545,683	*Sub Total*
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(38,360,714,768)	(21,967,098,559)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	**108,825,876,417**	**101,138,447,124**	***Sub Total Third Parties***
Jumlah Piutang Retensi - Bersih	**151,011,923,085**	**170,121,245,454**	***Total Retention Receivables - Net***

Jumlah piutang retensi berdasarkan umur (bulan) sebagai berikut:

Total retention receivables by aging (months) are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
< 12 Bulan	123,707,989,259	163,264,657,379	*< 12 Months*
> 12 - 24 Bulan	36,348,061,674	13,938,511,980	*> 12 - 24 Months*
> 24 Bulan	40,850,139,270	17,447,875,762	*> 24 Months*
Jumlah	200,906,190,203	194,651,045,121	*Total*
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(49,894,267,118)	(24,529,799,667)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah - Bersih	**151,011,923,085**	**170,121,245,454**	***Total - Net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of retention receivables is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Saldo Awal Tahun	(24,529,799,667)	(27,531,947,243)	*Beginning Balance of the Year*
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	(27,773,022,606)	--	*Adjustment on Initial Implementation PSAK 71*
Penambahan Tahun Berjalan	(713,433,261)	--	*Addition in the Current Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	3,121,988,416	3,002,147,576	*Recovery in the Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**(49,894,267,118)**	**(24,529,799,667)**	***Ending Balance of the Year***

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan Kerugian penurunan nilai piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses of retention receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible retention receivables in the future.

7. Piutang Ventura Bersama / *7. Joint Venture Receivables*

Merupakan piutang kepada ventura bersama (JV) untuk pembelian material, biaya bank, *overhead*, dan lain-lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ventura bersama.

Represents receivable from the Joint Venture (JV) to purchase the material, bank fees, overhead, and others for the of joint venture purposes.

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan	70,740,605,086	31,762,739,396	*Joint Venture Nindya - Pembangunan Perumahan*
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	48,643,435,947	40,872,747,231	*Joint Venture Nindya - Adhi Karya*
Ventura Bersama Nindya - Sacna	40,044,993,581	34,649,454,189	*Joint Venture Nindya - Sacna*
Ventura Bersama Nindya - Sarana	28,334,385,233	14,414,689,933	*Joint Venture Nindya - Sarana*
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangunnusa	21,124,429,912	--	*Joint Venture Nindya - Bahagia Bangunnusa*
Ventura Bersama Nindya - PT Bunga Raya Lestari	17,026,914,200	--	*Joint Venture Nindya - PT Bunga Raya Lestari*
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	15,772,115,335	88,676,775	*Joint Venture Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya*
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	15,600,212,104	5,706,195,111	*Joint Venture Nindya - Citra - Kharisma*
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja	13,033,365,579	8,683,602,593	*Joint Venture Nindya - Gerbang Saranabaja*
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	27,738,111,850	39,205,009,308	*Joint Venture Nindya - Bumi Karsa*
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	8,839,813,594	683,792,070	*Joint Venture Nindya - Resis Mangku Buana*
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	8,767,574,812	18,795,402,570	*Joint Venture Nindya - MCC - Wika - Waskita*
Ventura Bersama Nindya - Waskita - Jaya Purnama	19,644,517,840	19,883,991,299	*Joint Venture Nindya - Waskita - Jaya Purnama*
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	6,892,181,083	6,892,181,083	*Joint Venture Nindya - Cipuga*
Ventura Bersama Nindya - Inti	1,650,000,000	2,782,669,750	*Joint Venture Nindya - Inti*
Ventura Bersama Nindya - Adhi - Abipraya	1,571,349,130	--	*Joint Venture Adhi - Nindya - Abipraya*
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	13,023,430,651	13,176,781,658	*Joint Venture Nindya - Dewa Ruci*
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan - Hutama Karya	7,708,657,692	7,708,657,692	*Joint Venture Nindya - Pembangunan Perumahan - Hutama Karya*
Ventura Bersama Nindya - Catur Perkasa	--	4,613,097,963	*Joint Venture Nindya - Catur Perkasa*
Ventura Bersama Nindya - Brantas	4,531,300,864	4,531,300,864	*Joint Venture Nindya - Brantas*
Ventura Bersama Nindya - Surya	162,421,048	3,275,463,004	*Joint Venture Nindya - Surya*
Ventura Bersama Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	9,384,133,284	38,896,525,693	*Others (each below Rp 1 Billion)*
Jumlah	380,233,948,824	296,622,978,182	*Total*
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(74,152,043,071)	--	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Ventura Bersama - Bersih	**306,081,905,753**	**296,622,978,182**	***Total Joint Venture Receivables - Net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang kepada ventura bersama (JV) sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses of receivable from the Joint Venture (JV) receivable is as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Saldo Awal Tahun	--	--	*Beginning Balance of the Year*
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	(77,838,947,490)	--	*Adjustment on Initial Implementation PSAK 71*
Penambahan Tahun Berjalan	(6,614,972,661)	--	*Addition in the Current Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	10,301,877,080	--	*Recovery in the Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**(74,152,043,071)**	**--**	***Ending Balance of the Year***

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Ventura Bersama cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang ventura bersama.

Management considered that allowance for impairment losses of joint venture recivable is sufficient to cover possible losses on uncollectible joint venture receivables.

8. Piutang Lain-lain / *8. Other Receivables*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Asuransi ASEI Indonesia (Persero)	6,271,479,315	--	*PT Asuransi ASEI Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	6,000,000,000	--	*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT BRI Asuransi Indonesia	4,180,986,210		*PT BRI Asuransi Indonesia*
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	--	--	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Lain-Lain- Pihak Berelasi - Bersih	16,452,465,525	--	*Total Other Receivables - Related Parties - Net*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Manunggal Muara Palma	39,239,364,416	39,239,364,416	*PT Manunggal Muara Palma*
PT Asuransi Purna Arthanugraha	5,226,232,762	--	*PT Asuransi Purna Arthanugraha*
PT Asuransi Bosowa Indonesia	5,226,232,762	--	*PT Asuransi Bosowa Indonesia*
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,692,706,104	10,914,536,597	*The Ministry of Public Work and Public Housing*
PT Asuransi Binagriya Upakara	1,438,802,056	2,877,678,208	*PT Asuransi Binagriya Upakara*
PT Sadang Terminal Square	--	9,847,000,000	*PT Sadang Terminal Square*
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	316,956,202	2,571,814,511	*Others (Each below Rp 1 Bilion)*
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(39,340,312,441)	(43,196,364,416)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Lain-Lain- Pihak Ketiga -Bersih	13,799,981,862	22,254,029,316	*Total Other Receivables - Third Parties - Net*
Jumlah Bersih Piutang Lain-lain - Bersih	**30,252,447,386**	**22,254,029,316**	***Total Other Receivables - Net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :

Movement in the allowance for impairment losses are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Saldo Awal Tahun	(43,196,364,416)	(43,196,364,416)	*Beginning Balance of the Year*
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	(100,985,073)	--	*Adjustment on Initial Implementation PSAK 71*
Penambahan Tahun Berjalan	(61,485,398)	--	*Addition in the Current Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	4,018,522,446	--	*Recovery in the Current Year*
Saldo Akhir Tahun	**(39,340,312,441)**	**(43,196,364,416)**	***Ending Balance of the Year***

1. Piutang dari PT Manunggal Muara Palma (MMP) merupakan tagihan atas proyek pabrik kelapa sawit (PKS) sebesar Rp94.272.200.000 dan USD2,911,798.84 (termasuk PPN) yang dihentikan karena MMP tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Badan Arbritase Nasional Indonesia (BANI) (Catatan 45).
2. Piutang dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), entitas induk, merupakan piutang bunga atas Surat Utang PPA (Catatan 4)
3. Piutang dari PT Asuransi ASEI (Persero) merupakan piutang klaim asuransi atas Proyek Bendungan Temef sesuai dengan Surat Klaim Polis No. PE010051800000300 dengan porsi pembayaran dibagi kepada beberapa perusahaan asuransi.

1. Receivables from PT Manunggal Muara Palma (MMP) represents receivables for the palm oil mill project (PKS) amounting to Rp94,272,200,000 and USD2,911,798.84 (including VAT) which were terminated because MMP did not fulfill payment obligations in accordance with the agreements made by Indonesian National Arbritase Agency (BANI) (Note 45).
2. Receivables from PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), the parent entity, represent interest short term investment on PPA (Note 4)
3. Receivables from PT Asuransi ASEI represents insurance claim receivable of Temef Dam Project in accordance with Policy Claim Letter No. PE010051800000300 with payment portion shares by several insurance company.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian nilai piutang lain-lain cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management considered that derecognize other recivable is sufficient to cover possible losses on uncollectible other receivables.

9. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja / *9. Gross Amount Due from Customers*

Rincian saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut :

The details of gross amount due from customer are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Biaya Konstruksi	3,260,842,400,524	5,123,960,149,634	*Constructions Costs*
Laba yang diakui	(2,291,746,626,029)	(3,772,330,184,180)	*Recognized profit*
Sub Jumlah	969,095,774,495	1,351,629,965,454	*Sub Total*
Penagihan	1,413,087,498,053	1,066,475,359,393	*Progress billing*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	2,382,183,272,548	2,418,105,324,847	*Due from customer*
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(50,959,046,817)	--	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja - Bersih	**2,331,224,225,731**	**2,418,105,324,847**	***Total Gross Amount Due from Customer - Net***

Rincian saldo tagihan bruto pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Detail of gross amount due from customers as follow:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Angkasa Pura I (Persero)	150,118,178,103	69,742,899,163	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Angkasa Pura II (Persero)	104,457,940,150	153,841,053,535	*PT Angkasa Pura II (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	148,306,769,101	42,273,237,569	*PT Pertamina (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	38,417,918,591	--	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	25,249,519,264	--	*PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)*
PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)	22,791,261,653	--	*PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)*
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	14,535,578,816	--	*PT Pertamina Exploration and Production*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	11,468,535,452	88,134,436,342	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	9,210,955,519	5,000,000,000	*PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)*
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	3,600,000,000	--	*PT Pembangunan Perumahan (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2,529,450,200	27,910,813,025	*PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)*
PT Krakatau Engineering	--	7,134,332,607	*PT Krakatau Engineering*
Sub Jumlah Pihak Berelasi	**530,686,106,849**	**394,036,772,241**	***Sub Total Related Parties***

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,577,325,519,309	1,690,307,828,086	*The Ministry of Public Work and Public Housing*
Kementerian Pemuda dan Olahraga	86,394,873,087	74,360,782,864	*The Ministry of Youth and Sports*
PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia	50,061,818,182	--	*PT Polowijo Gosari Pupuk Indonesia*
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	32,109,807,360	9,823,877,596	*Dharmasraya District Government*
Bank Indonesia	29,562,272,725	59,512,779,588	*Bank Indonesia*
Kementerian Perhubungan	25,755,029,022	3,032,491,828	*The Ministry of Transportation*
Pemerintah Daerah Kota Makassar	6,033,445,532	--	*Local Government of Makassar City*
Universitas Islam Negeri Raden Fatah	--	67,272,303,342	*Raden Fatah State Islamic University*
RSUD Wates	--	50,527,322,870	*RSUD Wates*
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	41,691,903,315	41,691,903,315	*West Coast District Government*
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	--	1,117,000,000	*Public Works and Spatial Planning Office Banjarbaru*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	2,562,497,167	26,422,263,117	*Others (Each below Rp 1 Billion)*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	**1,851,497,165,699**	**2,024,068,552,606**	***Sub Total Third Parties***
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	**(50,959,046,817)**	**--**	***Less: Allowance for Impairment Losses***
Total Tagihan Bruto	**2,331,224,225,731**	**2,418,105,324,847**	***Total Gross Amount Due from Customers***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai kepada tagihan bruto kepada pemberi kerja sebagai berikut:

Movement in the amount of the allowance for impairment losses on gross amount due to customers are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Saldo Awal Tahun	--	--	*Beginning Balance of the Year*
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	(50,959,046,817)	--	*Adjustment on Initial Implementation PSAK 71*
Saldo Akhir Tahun	**(50,959,046,817)**	**--**	*Ending Balance of the Year*

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan bruto cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto.

Management considered that allowance for impairment losses of gross amount due to customer is sufficient to cover possible losses on uncollectible gross amount due to customers.

10. Persediaan / *10. Inventories*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Persediaan Jasa Konstruksi			***Construction Inventory***
Material Bahan Baku Konstruksi	116,733,882,050	144,701,528,334	*Material Construction Supplies*
Beton Pracetak	4,395,837,983	5,858,365,601	*Precast Concrete*
Suku Cadang	298,163,890	418,495,965	*Spare Parts*
Sub Jumlah Persediaan Jasa Konstruksi	**121,427,883,923**	**150,978,389,900**	***Sub Total Inventory of Construction***
Aset Real Estat			***Real Estate Assets***
Tanah Sedang Dikembangkan	12,553,516,080	3,065,678,970	*Land Under Development*
Bangunan Dalam Konstruksi	7,625,070,287	5,611,954,895	*Building Under Construction*
Bangunan dan Tanah Siap Jual	5,163,605,862	8,128,746,650	*Building and Land Ready for Sale*
Jumlah Aset Real Estat	**25,342,192,229**	**16,806,380,515**	***Sub Total Real Estate Assets***
Jumlah	**146,770,076,152**	**167,784,770,415**	***Total***

Persediaan merupakan material bahan baku konstruksi berupa perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Perusahaan.

The inventories are the material construction supplies such as project's supplies that are still available in the project's warehouse of the Company.

Tanah sedang dikembangkan yaitu tanah yang berlokasi di Jalan Mustofa Bandung, Maros Makassar, Mataram, Bontosungu dan Cilangkap.

Land underdevelopment located at Jalan Mustofa at Bandung, land at Maros Makassar, Mataram, Bontosungu and Cilangkap.

Bangunan dalam konstruksi yaitu Kavling Badak di Semarang dan Perumahan Permata Gowa yang berlokasi di Jalan Ardio Syam, Gowa, Makassar, dan Perumahan Cilangkap

Buildings under construction include the Kavling Badak in Semarang and the Permata Gowa Housing located on Jalan Ardio Syam, Gowa, Makassar, and Cilangkap Residence.

Bangunan dan tanah siap jual yaitu Ruko Pabaeng-baeng yang berlokasi di Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng dan di Gowa, Makassar dan Perumahan Cilangkap

Building and land for sale, namely Ruko Pabaeng-baeng located at Jalan Sultan Alaudin Pabaeng-baeng and Gowa, Makassar and Cilangkap Residence.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan manajemen perusahaan berkayakinan bahwa tidak diperlukan pernyisihan atas penurunan nilai persediaan dan tidak ada penghapusan persediaan yang rusak atau usang.

Based on the review of the condition of the inventory, the company management believes that there is no need for provision for decline in inventory value and there is no write-off for damaged or obsolete inventory.

11. Perpajakan / *11. Taxation*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Perusahaan			*Company*
Pajak Pertambahan Nilai	563,104,828,030	693,759,166,930	*Value-Added Tax*
PPh Penghasilan Final	992,601,784	1,019,388,380	*Final Income Tax*
	564,097,429,814	694,778,555,310	
Entitas Anak			*Subsidiary*
Pajak Pertambahan Nilai	5,816,215,987	--	*Value-Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 22	1,566,604,487	1,641,412,461	*Income Tax Article 22*
	7,382,820,474	1,641,412,461	
Jumlah	**571,480,250,288**	**696,419,967,771**	***Total***

Pada tahun 2020 Perusahaan telah menerima surat ketetapan lebih bayar pajak dan tidak mengajukan banding dengan rincian sebagai berikut:

In 2020, The Company has received tax assesment letter and did not proposed appeal with the details are as follows:

No. / *No.*	Tahun / *Years*	Entitas/ *Entity*	Jenis Surat / *Tax Letters*	Nomor Surat / *Tax Letters No.*	Tanggal Surat / *Date Issued*	Periode / *Period*	Jumlah *Total*
1	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00013/407/19/093/20*	*07-Dec-20*	*Jan-19*	*24,426,776,005*
2	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00014/407/19/093/20*	*07-Dec-20*	*Feb-19*	*15,841,644,507*
3	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00015/407/19/093/20*	*07-Dec-20*	*Mar-19*	*19,913,441,902*
4	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00039/407/19/093/20*	*23-Dec-20*	*Apr-19*	*16,725,916,495*
5	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00040/407/19/093/20*	*23-Dec-20*	*May-19*	*12,288,351,563*
6	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00041/407/19/093/20*	*23-Dec-20*	*Jun-19*	*10,913,229,192*
7	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00043/407/19/093/20*	*30-Dec-20*	*Jul-19*	*15,675,963,249*
8	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00044/407/19/093/20*	*30-Dec-20*	*Aug-19*	*21,123,914,598*
9	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00045/407/19/093/20*	*30-Dec-20*	*Sep-19*	*16,594,998,132*
10	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00046/407/19/093/20*	*30-Dec-20*	*Oct-19*	*23,570,662,534*
11	2020	PT NK	Lebih Bayar PPN / *Overpayment Tax Return VAT*	*00047/407/19/093/20*	*30-Dec-20*	*Nov-19*	*22,082,546,568*
							199,157,444,745

Pada bulan Januari dan Februari 2021, Perusahaan telah menerima pencairan restitusi pajak tersebut diatas sebesar Rp198.969.000.000.

On January and February 2021, the Company have received tax refunds amounting to Rp198,969,000,000.

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Perusahaan			*Company*
Pajak Pertambahan Nilai	--	29,842,020,541	*Value-Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 21	1,398,486,488	1,616,544,516	*Income Tax Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 22	3,429,891,243	1,863,293,169	*Income Tax Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	710,112,267	1,012,604,069	*Income Tax Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	20,245,585	53,571,688	*Income Tax Article 25*
Pajak Penghasilan Final	6,090,570,945	3,976,269,833	*Final Income Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 29	1,363,380,642	1,800,703,783	*Income Tax Article 29*
Pajak Hotel	155,291,276	--	*Hotel Taxation*
	13,167,978,446	**40,165,007,599**	
Entitas Anak			*Subsidiary*
Pajak Pertambahan Nilai	--	2,332,279,305	*Value-added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 21	1,933,350	--	*Income Tax Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 23	13,688,553	5,784,687	*Income Tax Article 23*
Pajak Penghasilan Final	24,680,527	6,789,003	*Final Income Tax*
	40,302,430	**2,344,852,995**	
Jumlah	**13,208,280,876**	**42,509,860,594**	***Total***

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan / *c. Income Tax Expense (Benefit)*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Perusahaan			*Company*
Beban Pajak Kini	5,396,663,265	3,465,000,000	*Current Tax Expense*
Entitas Anak			*Subsidiary*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	1,942,373,665	749,118,026	*Deffered Tax Expense (Benefit)*
Penyesuaian Tarif Pajak	(59,704,303)	--	*Tax rate adjustment*
Jumlah	**7,279,332,627**	**4,214,118,026**	***Total***

d. Pajak Kini / *d.Current Tax*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Laba Sebelum Pajak Laporan Laba Rugi Konsolidasian	50,101,271,377	220,087,260,523	*Profit Before Income Tax According To Consolidated Statement of Profit or Loss*
Rugi (Laba) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	14,594,024,689	15,395,861,468	*Losses (Income) Before Tax of Subsidiary*
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final	(40,165,008,497)	(221,623,121,991)	*Portion of Income Accounted for Final Income Tax*
Bagian Laba Penghasilan Non Final Entitas Induk	24,530,287,568	13,860,000,000	*Profit Before Tax of Parent Entity*
Beban Pajak Kini			*Income Tax Expenses*
22% x 2020 : Rp 24.530.287.568	5,396,663,265	--	*22% x 2020 : Rp 24,530,287,568*
25% x 2019 : Rp 13.860.000.000	--	3,465,000,000	*25% x 2019 : Rp 13,860,000,000*
Jumlah Beban Pajak Kini	**5,396,663,265**	**3,465,000,000**	***Total Current Tax Expenses***
Dikurangi			*Less :*
Kredit Pajak PPh 22	--	350,866,544	*Prepaid Tax Art 22*
Kredit Pajak PPh 23	3,653,812,839	1,046,568,765	*Prepaid Tax Art 23*
Kredit Pajak PPh 25	379,469,784	617,727,452	*Prepaid Tax Art 25*
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**1,363,380,642**	**1,800,703,783**	***Under Payment Income Tax***

e. Aset Pajak Tangguhan / *e. Deferred Tax Asset*

	2020						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dampak Penerapan Awal PSAK 71/ *Impact of Initial Implementation PSAK 71*	Dampak Penyesuaian Tarif Pajak Terhadap Laba Tahun Berjalan/ *Impact on Tax Rate Adjustment on Income for The Year*	Penyesuaian Tarif Pajak Terhadap Ekuitas dan Pendapatan Komprehensif Lain/ *Impact on Tax Rate Adjustment on Equity and Other Comprehensive Income*	(Dibebankan)/ Dikreditkan ke Laba Tahun Berjalan/ *(Charged)/Credited to Income for the year*	Dikreditkan ke Ekuitas Pendapatan Komprehensif Lain/ *Credited to Equity from Other Comprehensive Income*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Entitas Anak / *Subsidiary*							
Aset Tetap / *Property, Plant and Equipment*	1,560,492,444	--	(78,024,622)	--	(738,553,671)	--	743,914,151
Imbalan Pascakerja / *Post-Employment Benefit Liabilities*	86,045,502	--	(4,302,275)	--	--	27,081,289	108,824,516
Aset Hak Guna / *Right-of-Use Asset*	--	--	--	--	31,989,576	--	31,989,576
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for Impairment Losses*	--	3,945,901,174	142,031,200	--	(1,235,809,570)	--	2,852,122,804
Jumlah / *Total*	**1,646,537,946**	**3,945,901,174**	**59,704,303**	**--**	**(1,942,373,665)**	**27,081,289**	**3,736,851,047**

	2019						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dampak Penerapan PSAK 71/ *Impact of Initial Implementation PSAK 71*	Penyesuaian Tarif Pajak Terhadap Laba Tahun Berjalan/ *Impact on Tax Rate Adjustment on Income for The Year*	(Dibebankan) /Dikreditkan ke Laba Tahun Berjalan/ *(Charged)/ Credited to Income for the year*	Penyesuaian / *Adjustment*	Dikreditkan ke Ekuitas dari Pendapatan Komprehensif Lain/ *Credited to Equity from Other Comprehensive Income*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Entitas Anak / *Subsidiary*							
Aset Tetap / *Property, Plant and Equipment*	2,395,655,973	--	--	(835,163,529)	--	--	1,560,492,444
Imbalan Pascakerja / *Post-Employment Benefit Liabilities*	--	--	--	41,630,574	51,489,978	(7,075,050)	86,045,502
Jumlah / *Total*	**2,395,655,973**	**--**	**--**	**(793,532,955)**	**51,489,978**	**(7,075,050)**	**1,646,537,946**

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dengan jumlah yang dihitung dengan menerapkan tarif pajak efektif terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the amount of tax expense and the amount calculated by applying an effective tax rate to profit before tax according to the income statement is as follow:

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Laba Sebelum Pajak Laporan Laba Rugi Konsolidasian	50,101,271,376	220,087,260,523	*Profit Before Income Tax According To Consolidated Statement of Profit or Loss*
Rugi (Laba) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	14,594,024,689	15,395,861,468	*Losses (Income) Before Tax of Subsidiary*
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan Pajak Penghasilan Final	(40,165,008,496)	(221,623,121,991)	*Portion of Income Accounted for Final Income Tax*
Bagian Laba Penghasilan Non Final Entitas Induk	24,530,287,568	13,860,000,000	*Profit Before Tax of Parent Entity*
Tarif Pajak yang Berlaku	5,396,663,265	3,465,000,000	*Applicable Tax Rate*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan - Entitas Anak	1,942,373,665	749,118,026	*Income Tax Expense (Benefit) - Subsidiary*
Penyesuaian Tarif Pajak	(59,704,303)	--	*Tax rate adjustment*
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	**7,279,332,627**	**4,214,118,026**	*Income Tax Expenses - Net*

Perusahaan tidak menghitung aset pajak tangguhan yang berasal dari liabilitas imbalan pascakerja, aset tetap dan penyisihan penurunan nilai karena berkeyakinan aset pajak tangguhan yang muncul tidak memiliki dampak signifikan.

The Company does not calculate deferred tax assets originating from post employment benefit, property, plant and equipment and allowance for impairment losses because the deferred tax assets that appear do not have a significant effect.

12. Uang Muka / *12. Advances*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Uang Muka Subkontraktor	27,211,890,827	30,171,342,539	*Advances to Subcontractors*
Uang Muka Pemasok	26,133,034,780	15,462,115,962	*Advances to Suppliers*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	14,218,863,401	13,054,942,079	*Others (Each below Rp 1 Billion)*
Jumlah	**67,563,789,008**	**58,688,400,580**	***Total***

Uang muka subkontraktor diberikan untuk modal kerja rekanan, ketika hasil pekerjaan subkontraktor telah mencapai kemajuan tertentu uang muka akan langsung menjadi beban proyek.

Advances to Subcontractors are provided for working capital of partners, when the results of the work of sub-contractors have achieved certain progress, the advance will be directly charged to the project expenses.

Uang muka pemasok akan menjadi beban ketika barang yang dipesan diterima dan langsung menjadi beban proyek.

Supplier advance will be charged to expense when the ordered goods are received and directly charged to the project.

13. Beban Dibayar di Muka / *13. Prepaid Expenses*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Biaya Pelaksanaan Proyek	17,559,073,599	6,697,307,273	*Project Implementation Cost*
Asuransi	4,468,857,154	2,236,271,075	*Insurance*
Sewa Rumah/Kantor	1,270,714,713	364,928,593	*Rent Office/Direksi Keet*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	4,457,441,303	2,416,424,418	*Others (Each below Rp 1 Billion)*
Jumlah	**27,756,086,769**	**11,714,931,359**	***Total***

Biaya pelaksanaan proyek merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pabrik dan proyek yang belum dapat diperhitungkan dengan pendapatan usaha karena berita acara penyerahan barang belum ditandatangani.

For Project Implementation costs represent costs incurred for the purpose of a for project and factory needs that can not be accounted with revenues because minutes of goods handover have not been signed.

14. Beban Ditangguhkan / *14. Deferred Expenses*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Proyek Pantai Malalayang	6,029,702,702	--	*Proyek Pantai Malalayang*
Lain-Lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	2,617,087,355	2,227,972,920	*Others (Each below Rp 1 Bilion)*
Jumlah	**8,646,790,057**	**2,227,972,920**	***Total***

Beban ditangguhkan merupakan suatu aktivitas dari kegiatan untuk memperoleh suatu proyek baru atau pekerjaan-pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

Deferred expenses represent an activity to acquire new project or project works that are being carried out until the date of the financial statements.

15. Investasi pada Ventura Bersama / *15. Investment in Joint Ventures*

Nama Ventura Bersama / *Name of Joint Venture*	Proyek / *Project*	Persentase/ *Percentage*	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Bendungan Sadawarna	60%	48,793,265,804	23,378,632,545
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Bendungan Meninting	73%	24,705,105,535	20,649,997,547
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Cisumdawu	8.7%	20,750,170,944	22,322,555,314
Ventura Bersama Nindya - Bahagia bangunnusa	Bendungan Tiusuntuk	65%	20,491,154,386	--
Ventura Bersama Nindya - PT Modern Widya Tehnical	Fasilitas Sisi Udara Bandara Nabire Baru I	60%	11,668,915,482	--
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Bendungan Bomberay	70%	11,351,826,632	6,419,303,238
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Kalimati	60%	10,299,145,517	12,525,917,475
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Bau-Bau	70%	10,237,024,345	1,519,445,935
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	Irigasi Doplang	70%	6,139,765,660	10,892,542,070
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	Waduk Bendo	33%	8,128,119,659	--
Ventura Bersama Nindya - Paesa - Adhi Karya - Panrisau	Pembangunan Jl.Depapre	35%	7,169,011,266	7,169,011,266
Ventura Bersama Nindya - Passokkorang	Jalan Tompe-Dalam kota Palu	70%	7,043,598,028	350,000,000
Ventura Bersama Nindya - Surya	Irigasi Lematang	70%	5,679,729,674	14,619,437,242
Ventura Bersama Nindya - PT Rapi Tirta Treatmindo	SPAM Kalidendeng KAP.150 liter/detik	70%	5,133,046,638	--
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Jalan Rianiate	60%	4,897,921,217	4,897,921,217
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Bendungan Tanju Mila	60%	3,936,893,419	7,536,893,419
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Tol Solo - Kertosono	31%	3,823,209,117	3,823,209,117
Ventura Bersama Nindya - PT Bumi Agung Annusa	Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok - Mandalika	70%	3,731,011,299	--
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Sei Wampu	45%	3,150,882,638	5,130,882,638
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	Jalur Main Line I KA Manggarai-Jatinegara	60%	3,151,320,121	1,874,672,026
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja	Tangki Balck Produck RU IV Cilacap	76%	3,028,872,046	3,238,387,479
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	Pantai Marore	60%	2,854,128,002	2,910,000,002
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	Takengon - Uning	75%	2,610,613,645	2,610,613,645
Ventura Bersama Nindya - Inti	Ipal Aceh	60%	2,478,881,152	4,278,881,152
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Sukodono	70%	1,521,569,360	7,100,000,000
Ventura Bersama Nindya - Andesmont	Rembele Tahap II	70%	1,854,768,595	1,854,768,595
Ventura Bersama Nindya - Kencana	Irigasi Batang Anai Tahap 2	70%	1,737,963,752	2,612,346,843
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Sungai Ciliwung	40%	1,300,190,644	1,300,190,644
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Pembangunan Universitas Jember	45%	--	8,260,105,025
Ventura Bersama Nindya - Jaya Konstruksi	Tol Trans. Marga Jateng	60%	--	9,281,916,750
Ventura Bersama Nindya - Wijaya Karya	Bendungan Logung	40%	--	6,881,953,538
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	BKT Semarang	60%	--	2,938,302,133
Ventura Bersama Nindya - Barata	Bendungan Cieunteung	75%	--	1,387,900,751
Ventura Bersama Nindya - PP - Hutama Karya	Jembatan Holtekam	15%	--	1,124,448,811
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)			4,730,216,794	7,842,932,865
Jumlah/ *Total*			**242,398,321,371**	**206,733,169,282**

Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

The summarized financial information below represents amounts shown in joint venture's financial statements with the details belows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Aset Lancar	3,106,580,152,682	1,963,783,470,050	*Current Asset*
Aset Tidak Lancar	81,279,360,376	135,791,446,693	*Non-Current Asset*
Liabilitas Jangka Pendek	2,139,907,333,518	983,182,658,648	*Current Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang	275,802,689,920	359,444,213,551	*Non-Current Liabilities*
Pendapatan Usaha	1,575,543,116,338	2,112,734,416,828	*Revenue*
Laba Bersih Tahun Berjalan	147,512,457,434	250,779,578,463	*Net Income*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	*Other Comprehensive Income of The Year*
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	147,864,469,776	250,779,578,463	*Comprehensive Income of The Year*

Mutasi investasi pada ventura Bersama adalah sebagai berikut:

Changes in investment in joint ventures are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Nilai tercatat awal tahun	206,733,169,282	206,137,317,081	*Carrying amount at beginning of year*
Mutasi Investasi - bersih	(55,676,689,406)	(64,180,976,259)	*Investment movements - net*
Bagian Laba Ventura Bersama	91,341,841,495	64,776,828,460	*Share in profit of joint ventures*
Nilai tercatat akhir tahun	**242,398,321,371**	**206,733,169,282**	*Carrying amount at the end of year*

16. Investasi Jangka Panjang Lainnya / *16. Other Long Term Investment*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	4,028,388,000	1,591,681,000	*PT Jasamarga Kunciran Cengkareng*

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya adalah melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran - Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng is a company which its business activity is concession of Kunciran-Cengkareng Toll Road, which include funding, technical planning, construction implementation, operation and maintenance of the Toll Road, as well as other business activities in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2020 Perusahaan melakukan tambahan setoran modal kepada PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng sebesar Rp2.436.707.000, sehingga per 31 Desember 2020 nilai investasi Perusahaan menjadi Rp4.028.388.000 dengan persentase kepemilikan sebesar 0.32%.

In the period January to December 2020, the Company paid an additional capital deposit to PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng amounting to Rp2,436,707,000, therefore as of December 31, 2020 the Company's investment value was Rp4,028,338,000 with ownership percentage of 0,32%.

Aset ini dikelompokkan ke dalam aset yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi.

These assets are classified as fair value through profit or loss.

Manajemen berpendapat bahwa perubahan atas nilai wajar saldo investasi jangka panjang lainnya tidak material per tanggal 31 Desember 2020.

Management considered that the change in fair value on other long-term investment balances are immaterial as of December 31, 2020.

17. Properti Investasi / *17. Investment Properties*

	31 Desember / *December 31, 2020*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Addition* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Pemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	136,786,163,601	--	--	29,150,020,000	165,936,183,601	*Land*
Bangunan	101,527,465,601	--	--	--	101,527,465,601	*Building*
Jumlah	238,313,629,202	--	--	29,150,020,000	267,463,649,202	***Total***
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar	145,007,930,372	19,759,652,427	--	--	164,767,582,799	***Accumulated Changes in Fair Value***
Nilai Tercatat	**383,321,559,574**				**432,231,232,001**	***Carrying Value***

	31 Desember / *December 31, 2019*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Addition* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Pemilikan Langsung						***Direct Ownership***
Tanah	96,336,813,600	2,483,950,001	--	37,965,400,000	136,786,163,601	*Land*
Bangunan	101,527,465,601	--	--	--	101,527,465,601	*Building*
Jumlah	197,864,279,201	2,483,950,001	--	37,965,400,000	238,313,629,202	***Total***
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar	114,575,436,400	30,432,493,972	--	--	145,007,930,372	***Accumulated Changes in Fair Value***
Nilai Tercatat	**312,439,715,601**				**383,321,559,574**	***Carrying Value***

Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap berupa tanah ke properti investasi atas tanah yang terletak di Jl. PH Mustofa, Bandung dan tanah yang terletak di Jl. Rancabolang, sebesar Rp29.150.020.000 dengan nilai (Catatan 18).

The Company reclassified their fixed asset into investments properties, i.e land which located in Jl. PH Mustofa, Bandung and land which located in Jl. Rancabolang, Surabaya amounting to Rp 29,150,020,000 (Note 18).

Properti Investasi merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Bajak V Medan (tanah) dengan luas tanah 9.363 m^2; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian Sidoarjo (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 10.440 m2; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (tanah) dengan luas tanah 4.572 m2; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.828 m^2; Jl Majapahit Nomor 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan kota Mataram (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 5.977 m^2; Jl. Bontosunggu nomor 22 Makassar dengan luas tanah 1.559 m^2; dan Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan dengan luas tanah 1.057 m^2; Jl. Bridgend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan kota

Investment Properties are the land and buildings located at Jl. Bajak V Medan (land) with area of 9,363 sqm; Jl. Raya Trosobo KM. 23 Kel. Sidorejo, Krian, Sidoarjo (land and building) with area of 10,440 sqm; Jl. Poros Dusun Patene Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Makassar (land) with area of 4,572 sqm; Jl. Madrasah II/3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur (land and building) with area of 5,828 sqm Jl Majapahit Number 36, kel. Ampenan, Kec. Ampenan city of Mataram (land and buildings) with a land area of 5,977 sqm; Jl. Bontosunggu number 22 Makassar with a land area of 1,559 sqm; and Jl. Cendana III, Taman Sakti, Ampenan with a land area of 1,057 sqm; Jl. Bridgend Sudiarto No.496 Kel Pedurungan Lor, Kec Pedurungan, city of Semarang (land and buildings) with a land area of 3,768 sqm;

Semarang (tanah dan bangunan) dengan luas tanah 3.768m^2;Jl. Mustofa no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan luas 1.338 m^2; Tanah di Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Kota Bandung dengan luas 2.720 m^2.

Jl. Mustofa no 67 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung 1,338 sqm; Land in Jl. Gedebage no 173, Cisaranten Kidul, Kota Bandung dengan luas 2,720 sqm.

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut:

Rental revenue earned and direct operating expenses from investment properties on consolidated profit and loss are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
	Rp	**Rp**	
Pendapatan Sewa	9,044,080,389	14,739,130,160	*Rental Income*
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang Menghasilkan Penghasilan Sewa	7,485,439,567	10,672,088,539	*Direct Operating Cost Arises from the Rental Generated Investment Properties*

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 diestimasi berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan laporan tertanggal 31 Desember 2020.

The fair value of investment properties as of December 31, 2020 is estimating based on market value method based on valuation report dated on 31 December 2020.

Hierarki nilai wajar Tingkat 2 dari properti investasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dihitung berdasarkan hasil penilaian pendekatan berikut ini:

The Level 2 fair value hierarchy of investment properties for land and buildings that are rented is calculated using following approaches:

- Pendekatan Pendapatan
  Input yang paling signifikan dalam pendekatan ini adalah asumsi-asumsi digunakan dalam perhitungan tingkat kapitalisasi seperti tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan.

- *Income Approach*
  The most significant input in this valuation approach is the estimated cost that used in capitalized rate for disconto and growth rate.

- Pendekatan Biaya
  Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Biaya pengganti baru disesuaikan dengan estimasi penyusutan dengan mempertimbangkan tingkat umur ekonomis, kemunduran fisik dan keusangan.

- *Cost Approach*
  The most significant input in this valuation approach is the estimated cost of the new reproduction or replacement. The replacement costs are adjusted for estimated depreciation by considering the rate of economic age, physical deterioration and obsolescence

Properti investasi berupa tanah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 22).

Investment property of land were used as collateral to borrowings (Note 22).

18. Aset Tetap / *18. Property, Plant and Equipment*

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Surplus Revaluasi/ *Revaluation Surplus* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Biaya Perolehan/Revaluasian:							***Acquisition Cost / Revaluated:***
Pemilikan Langsung							***Direct Ownership***
Tanah	409,271,258,192	--	--	(29,150,020,000)	--	380,121,238,192	*Land*
Bangunan	103,590,211,921	--	--	29,681,557,487	--	133,271,769,408	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	189,132,310,280	208,072,730	--	--	--	189,340,383,010	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	8,921,989,573	--	--	--	--	8,921,989,573	*Vehicles*
Inventaris Kantor	13,601,725,118	--	--	--	--	13,601,725,118	*Office Inventories*
Inventaris Mess	9,586,000	--	--	--	--	9,586,000	*Dormitory Inventories*
Aset dalam Penyelesaian	20,878,978,873	16,407,884,733	--	(29,681,557,487)	--	7,605,306,119	*Asset in settlement*
Jumlah	**745,406,059,957**	**16,615,957,463**	**--**	**(29,150,020,000)**	**--**	**732,871,997,420**	***Total***
Akumulasi Penyusutan:							***Accumulated Depreciation:***
Pemilikan Langsung							***Direct Ownership***
Bangunan	35,825,538,024	9,439,742,249	--	--	--	45,265,280,273	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	83,036,069,566	25,586,698,405	--	--	--	108,622,767,971	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	5,325,989,565	939,013,926	--	--	--	6,265,003,491	*Vehicles*
Inventaris Kantor	10,232,719,819	1,405,415,442	--	--	--	11,638,135,261	*Office Inventories*
Inventaris Mess	9,585,993	--	--	--	--	9,585,993	*Dormitory Inventories*
Jumlah	**134,429,902,967**	**37,370,870,022**	**--**	**--**	**--**	**171,800,772,989**	***Total***
Nilai Tercatat	**610,976,156,990**					**561,071,224,431**	***Carrying Value***

	31 Desember / *December 31, 2019*						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Surplus Revaluasi/ *Revaluation Surplus* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Biaya Perolehan/Revaluasian:							***Acquisition Cost / Revaluated:***
Pemilikan Langsung							***Direct Ownership***
Tanah	447,236,658,192	--	--	(37,965,400,000)	--	409,271,258,192	*Land*
Bangunan	95,536,502,554	--	--	8,053,709,367	--	103,590,211,921	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	161,554,844,580	48,785,467,835	21,208,002,135	--	--	189,132,310,280	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	15,479,752,412	389,202,979	6,946,965,818	--	--	8,921,989,573	*Vehicles*
Inventaris Kantor	11,973,183,468	1,628,541,650	--	--	--	13,601,725,118	*Office Inventories*
Inventaris Mess	9,586,000	--	--	--	--	9,586,000	*Dormitory Inventories*
Aset dalam Penyelesaian	8,212,623,681	20,889,659,909	169,595,350	(8,053,709,367)	--	20,878,978,873	*Asset in settlement*
Jumlah	**740,003,150,887**	**71,692,872,373**	**28,324,563,303**	**(37,965,400,000)**	**--**	**745,406,059,957**	***Total***
Akumulasi Penyusutan:							***Accumulated Depreciation:***
Pemilikan Langsung							***Direct Ownership***
Bangunan	27,939,422,519	7,886,115,505	--	--	--	35,825,538,024	*Buildings*
Mesin dan Peralatan	81,789,479,430	22,365,033,157	21,118,443,021	--	--	83,036,069,566	*Machinery and Equipments*
Kendaraan	11,342,519,841	715,569,052	6,732,099,328	--	--	5,325,989,565	*Vehicles*
Inventaris Kantor	8,372,571,392	1,860,148,427	--	--	--	10,232,719,819	*Office Inventories*
Inventaris Mess	9,585,993	--	--	--	--	9,585,993	*Dormitory Inventories*
Jumlah	**129,453,579,175**	**32,826,866,141**	**27,850,542,349**	**--**	**--**	**134,429,902,967**	***Total***
Jumlah Tercatat	**610,549,571,712**					**610,976,156,990**	***Carrying Value***

Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap berupa tanah ke properti investasi atas tanah yang terletak di Jl. PH Mustofa, Bandung dan tanah yang terletak di Jl. Rancabolang, sebesar Rp29.150.020.000 dengan nilai (Catatan 17).

The Company reclassified their fixed asset int investments properties, i.e land which located in Jl. PH Mustofa, Bandung and land which located in Jl. Rancabolang, Surabaya amounting to Rp 29,150,020,000 (Note 17).

Aset tetap berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 22).

Fixed asset, such as land and building, are used as collateral for bank loans in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 22).

Bangunan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp133.271.769.408 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, dan PT Asuransi Jasa Tania.

Building and vehicle are insured with of coverage value amounting to Rp133,271,769,408 against the risk of fire accident and others to PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Bintang, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, PT Asuransi Jasindo, and PT Asuransi Jasa Tania.

Beban Penyusutan dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban administrasi dan umum dengan rincian sebagai berikut:

Depreciation expenses allocated to cost of revenues and general and administrative expenses, with the details are as follows

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 35)	25,847,460,101	23,730,568,046	*Cost of Revenue (Note 35)*
Beban Administrasi dan Umum (Catatan 37)	11,523,409,921	9,096,298,095	*General and Administrative Expense (Note 37)*
Jumlah	**37,370,870,022**	**32,826,866,141**	***Total***

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

In Based on Management review, there are no events or changes in circumstances indicating impairment of fixed asset, the Management does not provide allowance for impairment of property plant and equipment as of December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively.

19. Aset Takberwujud - Perangkat Lunak / *19. Intangible Assets - Software*

Beban amortisasi diakui dalam beban umum dan administrasi.

Amortization expense is recognized in general and administration expense.

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Biaya Perolehan	1,430,380,000	1,430,380,000	*Acquisition Cost*
Akumulasi Amortisasi	1,347,202,497	1,228,373,217	*Accumulated Amortization*
Jumlah	**83,177,503**	**202,006,783**	***Total***

Beban amortisasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp118.829.280 dan Rp266.261.551.

Amortization expense as of December 31, 2020 and 2019 is amounting to Rp118,829,280 and Rp266,261,551, respectively.

20. Aset Lain-lain / *20. Other Assets*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Aset yang Diambilalih	12,445,151,929	--	*Foreclosed Assets*
Tanah yang Sedang Dikembangkan	6,092,209,680	6,092,209,680	*Under Developed Land*
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Catatan 46.3)	--	29,042,684,515	*Restricted Fund (Note 46.3)*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 milyar)	532,860,000	32,860,000	*Others (each below Rp1 Billion)*
Jumlah	**19,070,221,609**	**35,167,754,195**	***Total***

Aset yang diambilalih adalah aset yang diperoleh atas pelunasan kewajiban pihak ketiga dengan berdasarkan Memo Dinas dari Sekretaris Perusahaan no 1489/MD/SEKPER/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang penyelesaian Kewajiban PT Fatimah Azzahra dan PT Sadang Terminal Square sebesar Rp12.445.151.929.

Foreclosed assets are assets obtained for the settlement of third party liabilities based on the Service Memo from the Corporate Secretary no.1489 / MD / SEKPER / 12/2020 dated 23 December 2020 regarding the settlement of obligations of PT Fatimah Azzahra and PT Sadang Terminal Square amounting to Rp12,445,151,929.

21. Utang Usaha / *21. Accounts Payable*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Utang Pemasok	708,150,550,350	873,181,209,358	*Supplier Payable*
Utang Subkontraktor	750,533,882,567	871,055,597,255	*Sub Contractor Payable*
Jumlah	**1,458,684,432,917**	**1,744,236,806,613**	***Total***

Dengan rincian berdasarkan sifat transaksi adalah sebagai berikut :

The details based on nature of the transaction are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
Utang Pemasok	16,162,189,051	34,546,482,735	*Supplier Payable*
Utang Subkontraktor	2,119,312,802	1,797,002,462	*Sub Contractor Payable*
Jumlah Pihak Berelasi	**18,281,501,853**	**36,343,485,197**	***Total Related Parties***
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
Utang Pemasok	691,988,361,299	838,634,726,623	*Supplier Payable*
Utang Subkontraktor	748,414,569,765	869,258,594,793	*Subcontractor Payable*
Jumlah Pihak Ketiga	**1,440,402,931,064**	**1,707,893,321,416**	***Total Third Parties***
Jumlah Utang Usaha	**1,458,684,432,917**	**1,744,236,806,613**	***Total Account Payable***

Utang usaha adalah utang kepada pemasok dan utang kepada subkontraktor. Utang kepada pemasok adalah utang yang terjadi atas pengadaan bahan-bahan proyek kepada *leveransir/supplier*, sedangkan utang kepada subkontraktor adalah utang yang terjadi atas pengadaan jasa borongan atau upah pekerja lepas di proyek.

Account payable represents payable to the supplier and the sub-contractor. Debt to supplier is debt that occurred in the procurement of project materials to the leveransir/supplier, Otherwise debt to sub-contractor is payable that occurred in the wholesale services procurement or freelance workers' wages in the project.

22. Pinjaman Bank dan Non - Bank / *22. Bank and Non - Bank Loans*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Liabilitas Jangka Pendek			***Short-Term Liability***
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	188,200,000,000	100,000,000,000	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	166,500,000,000	25,000,000,000	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT PPA Finance	14,986,180,200	--	*PT PPA Finance*
Jumlah Pihak Berelasi	**369,686,180,200**	**125,000,000,000**	***Total Related Parties***
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	217,400,000,000	110,000,000,000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	--	35,000,000,000	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Jumlah Pihak Ketiga	**217,400,000,000**	**145,000,000,000**	***Total Third Parties***
Pinjaman Bank dan Nonbank Jangka Pendek	**587,086,180,200**	**270,000,000,000**	***Short-Term Bank and Nonbank Loan***
Liabilitas Jangka Panjang			***Long-Term Liability***
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	359,818,000,000	145,000,000,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	66,000,000,000	30,000,000,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT PPA Finance	16,558,313,289	--	*PT PPA Finance*
Jumlah Pihak Berelasi	**442,376,313,289**	**175,000,000,000**	***Total Related Parties***
Pinjaman Bank dan Non Bank Jangka Panjang	**442,376,313,289**	**175,000,000,000**	***Long-Term Bank and Non Bank Loan***
Jumlah Pinjaman Bank dan Nonbank	**1,029,462,493,489**	**445,000,000,000**	***Total Bank and Nonbank Loan***

1. **PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)**
   1) Berdasarkan surat yang diterbitkan No. S-366/SMI/DPI/0620 tanggal 20 Juni 2020, Perusahaan mendapatkan kredit modal kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) melalui fasilitas pembiayaan Modal Kerja *Revolving* fasilitas Pembiayaan dan Perjanjian Pembiayaan.
      a. Pagu kredit sebesar Rp200.000.000.000 (total fasilitas pembiayaan);
      b. Tingkat suku bunga sebesar 9%
      c. Keperluan modal kerja untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai berikut:
         - Proyek Bendungan Temef berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/SNVT / PEM-BEND- NT.II/ DSE.I /89 /XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
         - Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket – II) di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03-AS/ KONT/SNVT PB NT I/904/2018 tanggal 31 Desember 2018;
         - Proyek Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk (Paket I) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03/KONT/SNVT PB NT I/38/2020 tanggal 23 Januari 2020;

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
   1) Based on the credit agreement No. S366/SMI/DPI/0620 dated June 20, 2020, the Company obtained working capital loans from PT Sarana Multi infrastructure (Persero) (PT SMI) through a Revolving Working Capital Financing Facility agreement and Financing Facilities.
      a. Maximum credit limit amounting to Rp200,000,000,000 (total financing facilities);
      b. Interest rate is amounting at 9%
      c. Working capital purposes are to carry out the construction of infrastructure project are as follow:
         - *Temef Dam Project is located in Timor Tengah Selatan Regency, Nusa Tenggara Timur Province, based on unit price contract agreement No. HK.02.03 / SNVT / PEM-BEND-NT.II / DSE.I / 89 / XII / 2017 dated December 22, 2017;*
         - *Beringin Sila Dam Project (Package - II) in Sumbawa Regency, Nusa Tenggara Barat Province, based on Unit price. Contract Agreement. No HK.02.03-US / KONT / SNVT PB NT I / 904/2018 dated December 31, 2018 ;*
         - *Tiu Suntuk Dam Project (Package - II) in West Sumbawa Regency, Nusa Tenggara Barat Province, based on Unit Price No. Contracts Agreement. HK.02.03 / KONT / SNVT PB NT I /38/2020 date on January 23, 2020;*

- Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA KM. 4+200 s.d. KM.6+800 dan Pembangunan BH.37 dan penataan Emplasemen stasiun Batu Tulis Antara Batu Tulis – Ciomas Lintas Bogor – Sukabumi, berdasarkan Surat Perjanjian No. PL.107/8/JGBC.01/ PPK-BSP/BTP-JABAR/VIII-20 tanggal 18 Agustus 2020;
- Proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana APBN dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 dan Surat OJK No. S-7/D.05/2019 tanggal 12 Februari 2019;

d. Jangka waktu: 12 bulan sejak 28 Juni 2020 s/d 27 Juni 2021;

e. Jaminan berupa jaminan yang sesuai dengan persyaratkan dari kreditur dalam fasilitas pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
   - Tanah dan bangunan SHGB No. 366/Harjosari II atas Nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 5.170 m2 yang terletak di Jl. Sisingamaraja Kel. Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 18);
   - Tanah dan bangunan SHGB No. 118/Harjosari II atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.442 m2 yang terletak di Jl. Kampung/Lorong IX Kel. Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Catatan 18);
   - Tanah dan bangunan SHGB No. 20019/Losari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 966 m^2 yang terletak di Jl. Lamadukelleng No. 28 Kel. Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Catatan 18);
   - Tanah dan bangunan SHGB no. 601/Suarami atas nama perusahaan dengan luas tanah sebesar. 1.619 m^2 yang terletak di Kel Sukarami, Kec, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Catatan 18).
   - Tanah dan bangunan SHGB No. 22/Neglasari atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.085 m^2 yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 18);

- *Double track development Project. 4 + 200 until KM.6 + 800 and Construction of BH.37 and Employment Arrangement station Between - Ciomas Lintas Bogor - Sukabumi, based on Letter of Agreement No. PL.107/8/JGBC.01/ PPK-BSP/BTP-JABAR/VIII-20 Agustus 18, 2020 on dated August 18, 2020;*
- *Other infrastructure project funded by APBN and each sector are in accordance with Minister of Finance Regulation No. 100 / PMK.010 / 2009 dated May 27, 2009 and Letter of Financial Services Authority No. S-48 / D.05 / 2015 April 30 2015 and OJK Letter No. S-7 / D.05 / 2019 February 12, 2019;*

d. Period: 12 months starting from June 28, 2020 to June 27, 2021;

e. Collateral in the form of guarantees in accordance with the requirements of creditors in this financing facilities, including but not limited to:
   - *The land and building with SHGB No. 366/Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 5,170 m^2 located on Jl. Sisingamaraja Kel. Hardjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara (Note 18);*
   - *The land and building with SHGB No. 118/Harjosari II registered under the name of Company with a land area of 1,442 m2 located on Jl. Kampung/Hallway IX Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Medan, North Sumatera (Note 18);*
   - *The Land and building with SHGB No 20019/Losari registered under the name of Company with a land area of 966 m2 located on Jl. Lamadukelleng no. 28, Kec. Losari, Kel Ujung Pandang, Makassar North Sulawesi (note 18).*
   - *The land and building with SHGB No. 601/Sukarami registered under the name of Company with a land area of 1,619 m^2 located in Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Palembang, South Sumatera (Note 18);*
   - *The land and building with SHGB No. 22/Neglasari registered under the name of Company with a land area of 1,085 m^2 located on Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 67 Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 18);*

- Tanah dan bangunan SHGB no. 23/Neglasari atas nama perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.085 m^2 yang terletak di Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat (Catatan 18);
- Tanah dan bangunan SHGB no. 00023/Besusu Tengah atas nama PT Nindya Karya (Persero) dengan luas tanah sebesar 1.548 m^2 yang terletak di Kel.Basusu Tengah Kec. Palu Timur, Sulawesi Tengah (Catatan 18).
- Tanah dan bangunan SHGB no 18/Besusu atas nama perusahan dengan luas tanah sebesar 2.016 m^2 yang terletak di Kel. Basusu Tnegah Kec. Palu Timur, Sulawesi tengah (Catatan 18);
- Tanah dan bangunan SHGB No.00022/Besusu Tengah atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.078 m2 yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kab. Dongkala, Sulawesi Tengah (Catatan 18);
- Tanah dan bangunan SHGB No. 25/Besusu atas nama Perusahaan dengan luas tanah sebesar 1.169 m^2 yang terletak di Kel. Basusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah (Catatan 18);
- Tagihan/piutang (sisa termin) atas proyek yang dibiayai dan akan dilakukan pengikatan awal secara fidusia minimal sebesar 150% dari total fasilitas pembiayaan. Selanjutnya nilai tagihan /piutang (sisa termin) dijaga minimal 150% dari outstanding fasilitas pembiayaan;
- Pembayaran utang pokok fasilitas pembiayaan ini dilakukan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian kontrak antara Debitur dengan pemberi kerja atau pemilik proyek infrastruktur *(bouwheer)* atau berakhirnya jangka waktu fasilitas pembiayaan.

- *The land and building with SHGB no.23/Neglasari registered under the name f Company with a land area of 1,085 m2 located on Jl. Penghulu H.Hasan Mustofa No. 65A Kec. Cibeunying Kaler, Bandung, West Java (Note 18).*
- *The land and building with SHGB No. 00023/ Central Besusu registered under the name of PT Nindya Karya (Persero) with a land area of 1,548 m^2 located in Kel. Central Basusu Kec. East Palu, Central Sulawesi (Note 18);*
- *The land and building ownership proven by SHGB No. 18/Besusu registered under the name of Company with a land area of 2,016 m^2 located in Basusu Central Palu districts, Central Sulawesi (Note 18);*
- *The land and building with SHGB No. 00022/Besusu Central registered under the name of Company with a land area of 1,078 m^2 located in Basusu tengah East Palu Districts, Central Sulawesi (Note 18);*
- *The land and building with SHGB No. 17/Besusu registered under the name of Company with a land area of 1,169 m^2 located in Kel. Centre Basusu Palu Timur Districts, Central Sulawesi (Note 18);*
- *Billing/accounts receivable (the remainder of the term) for a project that was financed and will be conducted early in a binding fiduciary minimum of 150% of the total financing facility. For futher invoice/receivable (the remainder of the term) is kept for a minimum of 150% of the outstanding financing facility;*
- *Principal of payment financing facility is conducted no more than due date of the contractual agreements between the debtor and the owner of the infrastructure projects or the end of period financing facility.*

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp 100.000.000.000. Total pencairan pinjaman untuk tahun 2020 sebesar Rp145.000.000.000. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2020 sebesar Rp56.800.000.000. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp188.200.000.000.

The beginning balance in 2020 was Rp100,000,000,000. The total loan disbursement for the year 2020 was Rp145,000,000,000. The total loan repayment from for the year 2020 amounted is Rp56,800,000,000. The balance as of December 31, 2020 was Rp188,200,000,000.

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berdasarkan surat persetujuan kredit No. BMN/SP3/14/2020 dan No. 005/PJMN/SP3/06/2020 tanggal 04 Juni 2020, Perusahaan, memperoleh kredit modal kerja dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), antara lain:

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Based on the credit agreement letter No. BMN/SP3/14/2020 and 005/PJMN/SP3/06/2020 date June 4, 2020, the Company, obtained working capital credit from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), such as:

1) Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor
   a. Pagu kredit Rp400.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga sebesar 9,30%
   c. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait/menunjang perdagangan internasional (ekspor);
   d. Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2021;
   e. Jaminan berupa:
      - Piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh LPEI minimal 125% dari total pagu kredit (Catatan 5);
      - Tanah dan bangunan diatas SHGB No. 19 yang berlokasi di Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp 1.918.000.000 (Catatan 18);
      - Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 352 yang berlokasi di Jl. Ciung Wanara No. 1 Kabupaten Badung, Bali atas nama Perusahaan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp4.862.000.000 (Catatan 18);
      - Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 3 dan SHGB No. 4 yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Bali atas nama perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp11.563.000.000 (Catatan 18);
      - Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 65 dan SHGB No. 75 yang berlokasi di Jl. Majapahit No.36, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp10.133.000.000 (Catatan 18);
      - Tanah dan bangunan di atas SHGB No. 356 yang berlokasi di Jl. Parikesit No. 10, Kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp999.000.000 (Catatan 18);
      - Tanah di atas SHGB No. 1347 yang berlokasi di Jl. Cisait, Kelurahan Walantaka, Kragilan, Serang, Banten (Catatan 18).

1) Financing facility of Working Capital Export Credit
   a. Maximum credit limit is amounting to Rp400,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.30%
   c. The purpose of usage is for overseas or domestic projects, which related to projects that support international trade (export);
   d. The period is for 1 (one) year, starting June 9, 2020 until June 9, 2021;
   e. Collaterals:
      - *Accounts receivable over a contract that was financed and/or guaranteed by LPEI minimum 125% from the credit limit (Note 5);*
      - *Land and building on SHGB No. 19 located at Jl. Padma No. 6 Kotamadya Denpasar, Bali registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp1,918,000,000 (Note 18);*
      - *The land and building on SHGB No. 352, located at Jl. Ciung Wanara no.1 Bandung registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp4,862,000,000 (Note 18);*
      - *The land and building on SHGB No. 3 and SHGB No. 4 located on Jl. Hayam Wuruk No. 129-A Sumerta Kelod Village, Denpasar Timur, Bali registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp11,563,000,000 (Note 18);*
      - *The land and building on SHGB No. 65 and SHGB No. 75 located at Jl. Majapahit No. 36, Ampenan Selatan Village, Mataram, Nusa Tenggara Barat, registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp10,133,000,000 (Note 18);*
      - *The land and building on SHGB no.356, located at Jl. Parikesit no.10, Cakranegara Barat Village, Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, registered under the name of Company with first mortgage rating I amounting to Rp999,000,000 (Note 18);*
      - *The Land on SHGB No. 1347, located at Jl. Cisait, Walantaka Village, Kragilan, Serang, Banten (Note 18).*

2) Fasilitas Penerbitan dan/atau Pembiayaan LC/SKBDN
   a. Pagu kredit sebesar Rp250.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga 9,30%
   c. Tujuan penggunaan untuk proyek luar negeri ataupun proyek dalam negeri yang terkait / menunjang perdagangan internasional (ekspor);
   d. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2020 s/d 9 Juni 2021;
   e. Jaminan : piutang atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Indonesia Eximbank minimal sebesar 125% dari total plafond kredit.

3) Fasilitas Penjaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
   a. Pagu kredit sebesar Rp150.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga 9,30%
   c. Tujuan penggunaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang menunjang kegiatan ekspor;
   d. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 9 Juni 2020 sampai dengan 9 Juni 2021;

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp25.000.000.000. Total pencairan pinjaman untuk tahun 2020 sebesar Rp286.500.000.000. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2020 sebesar Rp145.000.000.000. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp166.500.000.000.

3. PT PPA Finance

Berdasarkan Surat No. S-931/PPAF-Dir/XII-2019 tanggal 12 Desember 2019, PT Nindya Beton mendapatkan kredit modal kerja dari PT PPA Finance perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan Anjak Piutang.

1) Jaminan :
   Anjak Piutang
   - Invoice dan *atau* dokumen lainnya yang dilampirkan sebagai syarat penagihan kepada konsumen sesuai dengan dokumen persyaratan penagihan yang disebutkan dalam Perjanjian antara PT Nindya Beton dengan konsumen;
   - Cek/bilyet giro dari rekening operasional PT Nindya Beton sebagai jaminan pembayaran factoring pada saat jatuh tempo;

2. LC/SKBDN Publishing and/or Financing Facilities
   a. Maximum credit limit is amounting to Rp250,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.30%
   c. The Purpose of usage is for the overseas or domestic projects, which related to projects that support international trade (export);
   d. The period is for 1 (one) year starting June 9, 2020 until June 9, 2021;
   e. Guarantees: accounts receivable for contracts that was financed and / or guaranteed by Indonesia Eximbank at a minimum of 125% of the total credit limit.

3) Indonesian Export Financing Agency Guarantee Facility
   a. Maximum credit limit is amounting to Rp 150,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.30%
   c. The Purpose of usage is for infrastructure projects undertaken in both domestic and foreign, which support export activities;
   d. The period of 1 (one) year, starting on June 9, 2020 until June 9, 2021.

The balance at the beginning of 2020 was Rp25,000,000,000. The total loan disbursement for the year 2020 was Rp286.500.000.000. The total loan repayment for the year 2020 amounted Rp145,000,000,000. The balance as of December 31, 2020 is Rp166,500,000,000.

3. PT PPA Finance

Based on Letter No. S-931/PPAF-Dir/XII-2019 dated December 12, 2019, PT Nindya Beton obtained a working capital loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing factoring.

1) Collaterals :
   Factoring
   - *Invoice and other documents are presented as billing requirements according to the documents which were mentioned in engagement between PT Nindya Beton with the customer;*
   - *Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton as factoring payment guarantees at due time;*

Factoring with recourse
a. Pagu Rp15.000.000.000;
b. Jangka waktu plafond 12 bulan sejak Penandatangan Perjanjian Plafond, bersifat *revolving*;
c. Konsumen :
1) PT Nindya Karya (Persero)
2) PT Waskita Karya, Tbk (Persero)
3) PT Cakra Kencana Indah
4) PT Kadi International
5) KSO – PT Bina Usaha Lestari – PT Nindya Karya (Persero)
6) KSO – PT Pembangunan Perumahan, Tbk (Persero) – PT Nindya Karya (Persero)
7) CV Assri Jaya Abadi
8) CV Bunga Agung Perkasa
d. Pembiayaan *factoring* maksimal 80% x nilai tagihan/ invoice di luar pajak.
e. Tingkat bunga sebesar 15% p.a
f. Jangka waktu/ tenor maksimum 180 Hari Kalender
g. Provisi 0,5% p.a dari total plafond Pembayaran, dibayar satu kali pada saat pencairan pembiayaan pertama

Berdasarkan surat perpanjangan fasilitas pinjaman nomor 063/PPAF-DIR/II-2021 tanggal 5 Februari 2021 dijelaskan bahwa, entitas anak telah melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 21 Juli 2021.

Saldo awal tahun 2020 sebesar nihil. Total pencairan pinjaman periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp14.986.180.200. Total pelunasan pinjaman periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar nihil. Saldo pada 31 Desember sebesar Rp14.986.180.200.

Factoring with recourse
a. Maximum limit Rp15,000,000,000;
b. 12 months of plafond term since the signing of the plafond engagement revolving;
c. Consumer ;
1) PT Nindya Karya (Persero)
2) PT Waskita Karya, Tbk (Persero)
3) PT Cakra Kencana Indah
4) PT Kadi International
5) VB PT Bina Usaha Lestari – PT Nindya Karya (Persero)
6) VB – PT Pembangunan Perumahan, Tbk (Persero) – PT Nindya Karya (Persero)
7) CV Assri Jaya Abadi
8) CV Bunga Agung Perkasa
d. Factoring finance maximal 80% x bill value/ invoice exclude tax.
e. Discount rate at 15% p.a
f. term/ tenor maximum 180 days calendar.
g. Provision 0.5% p.a from total payment plafond, paid once at the first released.

Based on the loan facility extension letter number 063 / PPAF-DIR / II-2021 dated February 5, 2021, it is explained that, the subsidiary has extended the loan period until July 21, 2021.

The initial balance of 2020 is nill. The total loan disbursement from January until December 2020 is Rp14,986,180,200. The total loan repayment January until December 2020 amounting is nill. The balance on December 31, 2020 is Rp14,986,180,200.

4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Berdasarkan Surat Penawaran Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Nindya Karya (Persero) No. 141/KKO-KO2/SPPK/2020 tanggal 23 Maret 2020, Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebagai berikut:
a. Jenis fasilitas kredit yaitu Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) *Standby Loan switchable* fasilitas *non cash loan*. Fasilitas KKMK *standby loan switchable* fasilitas *Non Cash Loan* dengan sifat *Revolving* dengan proyek yang berbeda. Sifat fasilitas *Non Cash Loan* II adalah *Uncomitted, Advised, Revolving*.

4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Based on the Letter of Offer for Extension of Credit Facility PT Nindya Karya (Persero) No. 141/KKO-KO2/SPPK / 2020 dated on March 23, 2020, the Company obtained a loan from PT Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk (BJB Bank), as follows:
a. Type of credit facility is Working Capital Credit Constructions facility Standby Loan switchable non cash loan. The KKMK standby loan switchable facility is a Non Cash Loan facility with a Revolving nature with different projects. The nature of the Non Cash Loan II facility is uncomitted, Advised, Revolving.

b. Tujuan: Modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN. Fasilitas *Non Cash Loan* dapat digunakan sebagai sarana disposisi untuk transaksi seperti SKBDN, L/C, Bank Garansi, *Supply Chain Financing* (SCF), dan *Hedging*.
c. Tingkat suku bunga sebesar 9,25%
d. Pagu kredit sebesar Rp700.000.000.000, dengan rincian Fasilitas *Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000.000.000, yang dapat ditarik untuk pembiayaan proyek sedangkan Fasilitas *Non Cash Loan* maksimum sebesar Rp350.000.000.000.
e. Jangka Waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit sebelumnya 11 April 2020 sampai dengan 11 April 2021.
f. Jaminan:
Piutang proyek diikat secara fidusia sebesar 125% dari plafon kredit.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp110.000.000.000. Total pencairan pinjaman untuk tahun 2020 sebesar Rp330.500.000.000. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2020 sebesar Rp223.100.000.000. Saldo pada 31 Desember sebesar Rp217.400.000.000.

b. Purposes: Working capital of construction and procurement services for the project which the funds originate from APBN/APBD/SOE. disposition for such transactions, such as SKBDN, L/C, Bank Bond, Supply Chain Financing (SCF) and Hedging.
c. Interest rate at 9.25%
d. Maximum credit limit is amounting to Rp700,000,000,000, with the details maximum of Cash Loan Facility is Rp350,000,000,000, which could be drawn for project financing, while the maximum of Non-Cash Loan Facility is Rp350,000,000,000.
e. Time Period
12 months since the previous credit's due date on April 11, 2020 until April 11, 2021.

f. Collaterals:
Project receivables are tied in fiduciary terms of 125% of the maximum credit limit.

The beginning balance of 2020 is Rp110,000,000,000. The total loan disbursement for the year 2020 is Rp330,500,000,000. The total loan repayment for the year 2020 is amounting to Rp223,100,000,000. The balance on December 31, 2020 to Rp217,400,000,000.

5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Berdasarkan surat No. BIN/2.1/024/R tanggal 22 Januari 2020, Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

KMK Transaksional
a. Pagu kredit sebesar Rp375.000.000.000;

b. Tingkat suku bunga 9,25%
c. Jangka Waktu:
- Pagu kredit: 12 bulan sejak jatuh tempo fasilitas yaitu sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 20 Januari 2021. Sesuai dengan surat No. BIN/2.1/024/R tanggal 22 Januari 2020, fasilitas pinjaman telah diperpanjang sampai 20 Januari 2021.
- Realisasi Kredit: Maksimal sesuai dengan jangka waktu proyek dalam kontrak.

KMK *Revolving*
a. Pagu kredit sebesar Rp50.000.000.000;

b. Jangka Waktu: 12 bulan sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 20 Januari 2021.

5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Based on letter No. BIN/2.1/024/R dated January 22, 2020, the Company obtained a extension of credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, with the details are as follows:

KMK Transactional
a. Maximum credit limit is amounting to Rp375,000,000,000;
b. Interest rate at 9.25%
c. Period :
- *Maximum limit: 12 months since maturity of the facility starting January 21, 2020 until January 20, 2021. Based on the letter No. BIN/2.1/024/R dated January 22, 2020, the loan facility has been extended until January 20, 2021.*
- *Credit realization: Maximum realization in accordance with the duration of the project in the contract.*

KMK Revolving
a. Maximum limit is amounting to Rp50.000.000.000;
b. Period: 12 months starting January 21, 2020 until January 20, 2021.

c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja untuk keperluan operasional perusahaan.

Non Cash Loan

a. Pagu kredit sebesar Rp2.675.000.000.000

b. Tingkat suku sebesar 9,25%
c. Jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 20 Januari 2021. Sesuai dengan surat No. BIN/2.1/024/R tanggal 22 Januari 2020, fasilitas pinjaman diperpanjang sampai 20 Januari 2021.
d. Jaminan dikaitkan jaminan KMK *revolving*.

Jaminan

- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Brigjend Sudiarto No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Jateng di atas SHGB No. 2 dan SHGB No. 111 atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Tengah No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, kotamadya Surabaya, Jawa Timur dengan SHGB No. 721 dan SHGB No. 725 atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Tanah/bangunan di Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung dengan SHGB No. 05 atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Tanah di Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara dengan SHGB No. 546 atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur di atas SHGB No. 2 atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Tanah/bangunan rumah tinggal serta gudang terletak di Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sul-Sel di atas SHGB No. 20005/Manuruki (d/h 4197/Mangasa) atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Tanah/bangunan rumah tinggal di Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 798/Gurabesi (d/h No. 508/Gurabesi) atas nama Perusahaan (Catatan 18);
- Tanah/bangunan kantor serta gudang di Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya di atas SHGB No. 599 atas nama Perusahaan (Catatan 18);

c. The purpose: additional working capital for the company operating necesities.

Non cash loan

a. Maximum credit limit amounting to Rp2,675,000,000,000;
b. Interest rate at 9.25%
c. The period is 12 months since January 21, 2020 until January 20, 2021. Based on the letter No. BIN/2.1/024/R dated January 22, 2020, the loan facility has been extended until January 20, 2021.
d. Collateral is related with KMK revolving.

Collaterals

- *Land/office building and warehouse on Jl. Pedurungan No. 496 Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Semarang, Java Tengah on SHGB No. 2 and SHGB No. 111 registered under the name of the Company (Note 18);*
- *Land/residential house on Jl. Tenggilis No. 4, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, East Java with SHGB No. 721 and SHGB No. 725 registered under the name of the Company (Note 18);*
- *Land/building on Jl. Wolter Monginsidi No. 159, Kel. Gulak Galik, Kec. North Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung with SHGB No. 05 registered under the name of the Company (Note 18);*
- *Land in Gg. Wongso, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Medan, Sumatra Utara with SHGB No. 546 registered under the name of the Company (Note 18);*
- *Land/office building and warehouse on Jl. Raya Trosobo KM 25 Ds. Krian, Sidorejo, Sidoarjo, East Java, on SHGB No. 2 registered under the name of the Company (Note 18);*
- *Land/building of house and warehouse located on Jl. Bonto Sunggu No. 22 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan on SHGB No. 20005/Manuruki (formerly 4197/Mangasa) registered under the name of the Company (Note 18);*
- *Land/residential house on Jl. Pembangunan I Kel. Gurabesi Kec. North of Jayapura, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 798/Gurabesi (formerly No. 508/Gurabesi) registered under the name of the Company (Note 18);*
- *Land/office building and warehouse on Jl. Nindya Karya No. 9 Kel. Gurabesi Jayapura Utara, Jayapura, Irian Jaya, on SHGB No. 599 registered under the name of the Company (Note 18);*

- Tanah/bangunan gedung kantor pusat di Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur di atas SHGB No.36 atas nama Perusahaan (Catatan 18).

2) Berdasarkan Surat No. BIN/2.3/108/R tanggal 10 Mei 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut:
   a. Pagu kredit sebesar Rp 175.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga sebesar 9,25%
   c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket 1 (MYC);
   d. Jangka Waktu: 45 bulan terhitung sejak perjanjian kredit ;
   e. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

3) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/105/R tanggal 13 April 2020, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut:
   a. Pagu kredit sebesar Rp 123.818.000.000;
   b. Tingkat suku bunga 9,25%;
   c. Tujuan penggunaan: tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Batang Asai Paket I Kabupaten Sorolangun (MYC);
   d. Jangka waktu: 21 bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit;
   e. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

4) Berdasarkan Surat No. BIN/2.1/188/R tanggal 02 Juni 2020 Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:
   a. Pagu kredit sebesar Rp 156.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga 9,25%
   c. Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja Proyek Pembangunan Spilway Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek (MYC);
   d. Jangka Waktu: 19 bulan terhitung sejak Perjanjian Kredit ;
   e. Jaminan: Piutang atas proyek yang dibiayai akan diikat *cessie* dan dikaitkan dengan fasilitas berjalan.

- *Land/main office building on Jl. Letjend. Haryono MT Kav.22, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, East Jakarta, on SHGB No. 36 registered under the name of the Company (Note 18).*

2) Based on the letter No. BIN/2.3/108/R dated May 10, 2019, the Company obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. are as follows
   a. Maximum limit amounting to Rp 175,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.25%
   c. The purpose: additional working capital for The Rukoh Dam of Pidie Dictrict Package at 1 (MYC) Project;
   d. Period: 45 months starting from the credit facility is signed;
   e. Collateral: Accounts receivable of financed projects is tied with cessie and associated with current facilities.

3) Based on the letter No. BIN/2.1/105/R dated April 13th, 2020, the Company, obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. are as follows:
   a. Maximum credit limit is amounting to Rp123,818,000,000;
   b. Interest rate at 9.25%;
   c. The purpose: additional working capital for The Irrigation DI project. Batang Asai Districts of Sorolangun Package 1 (MYC);
   d. Period: 21 months starting From the Credit Facility is signed;
   e. Collateral: Accounts receivable of financed projects is tied with cessie and associated with current facilities.

4) Based on the letter No. BIN/2.1/188/R dated June 2, 2020, the Company obtained Transactional KMK Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, as follows:
   a. Maximum limit amounting to Rp156,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.25%
   c. The purpose: additional working capital for The Tugu Spilway Dam of Trenggalek Districts (MYC) Project;
   d. Period: 19 months starting from the Credit Facility is signed;
   e. Collateral : accounts receivable of financed projects is tied with cessie and is associated with current facilities.

Saldo pada awal tahun 2020 sebesar Rp145.000.000.000. Total pencairan pinjaman untuk tahun 2020 sebesar Rp3.939.744.793.620. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2020 sebesar Rp3.724.926.793.620. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp359.818.000.000.

Balance at the beginning of 2020 is Rp 145,000,000,000. The total loan disbursement for the year 2020 was Rp3,939,744,793,620. Total loan repayments for the year 2020 amounted to Rp3,724,926,793,620. The balance as of December 31, 2020 is Rp359,818,000,000.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa Batasan untuk mempertahan batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut :
• Rasio lancar minimum 1 kali;
• *Debt Equity Ratio* maksimal 5 kali; dan
• Rasio *Debt Service Coverage* minimum 100%

The Company required to comply with some restrictions to maintain financial ratios as follows :

• *Current ratio minimum 1 time;*
• *Debt Equity Ratio maximum 5 times; and*
• *Debt Service Ratio minimum 100%*

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan melakukan perpanjangan fasilitas kredit berdasarkan surat No. BIN/2.1/023 yang menjelaskan jangka waktu berakhirnya pinjaman pada tanggal 20 Januari 2022.

On January 20, 2021, the Company is in the process of extending the credit facility based on letter No. BIN / 2.1 / 023, which describes the expiration period of the loan on January 20, 2022.

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK. 062/2019 tanggal 02 September 2019 dan Surat No. CBG.CB2/SCD.SPPK.058/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas KMK Transaksional dan Tambahan Limit Fasilitas Non Cash Loan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

1) Fasilitas kredit modal kerja
   a. Pagu kredit sebesar Rp300.000.000.000;

   b. Tingkat suku bunga 9,5%;
   c. Tujuan penggunaan: tambahan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan proyek jasa Konstruksi sesuai dengan SPK/Kontrak;

   d. Jangka waktu: sejak penandatangan perjanjian kredit sampai dengan 25 Agustus 2022;

   e. Jaminan:
      - Piutang usaha dan/atau piutang retensi dan/atau piutang ventura bersama dan/atau tagihan bruto serta stock persediaan barang diikat *fiducia* (Catatan 5 dan 10);
      - Sebidang tanah dan bangunan SHGB No.414/Cipinang Cempedak, seluas 5.828 m2,terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama PT Nindya Karya (Catatan 18);
      - Dua bidang tanah dan bangunan SHGB No. 1689 dan 1690, seluas 159 m^2 dan 100 m^2 di Komp. Sudirman Business Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru atas nama Perusahaan (Catatan 18).

***6.** PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

Based on the letter No. CBG.CB2/SCD.SPPK. 062/2019 dated September 2, 2019 and No. CBG.CB2/SCD.SPPK.058/2019 dated August 21, 2019. The Company obtained additional transactional KMK from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, with the details are as follows:

1) Working capital credit facility
   a. Maximum limit amounting to Rp300,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.5%;
   c. Purpose of use: additional working capital to support the implementation of construction services projects in accordance with the SPK/Contract;
   d. Duration: since the signing of the addendum to the credit agreement until August 25, 2022;
   e. Collaterals:
      - *Account receivable and / or retention receivable and / or receivable from joint ventures and /or gross amount due from customers and stock inventory fiduciary bound (Notes 5 and 10);*
      - *Land and building SHGB No.414/Cipinang Cempedak, with a land area 5,828 sqm, located at Cipinang Cempedak, Jatinegara districts, East Jakarta registered under the name of PT Nindya Karya (Notes 18);*
      - *Two land and building SHGB No.1689 and 1690, with a land area 159 sqm and 100 sqm, located at Sudirman Bussines Center Kav. 1 & 2, Desa Simpang Tiga, Pekanbaru registered under the name of Company (Note 18).*

2) *Non Cash Loan*
   a. Pagu kredit sebesar Rp1.100.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga 9,5%;
   c. Jangka Waktu: sejak penandatanganan Perjanjian Kredit s.d. 25 Agustus 2021;
   d. Jaminan dikaitkan dengan jaminan KMK.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp30.000.000.000. Total pencairan pinjaman untuk tahun 2020 sebesar Rp75.000.000.000 Total pelunasan pinjaman periode tahun 2020 sebesar Rp39.000.000.000. Saldo pada 31 Desember 2020 sebesar Rp66.000.000.000.

2) Non Cash Loan
   a. Maximum limit amounting to Rp1,100,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.5%;
   c. Period: since the signing of credit add until August 25, 2021;
   d. Collateral is related with KMK revolving collateral.

The beginning balance of 2020 is Rp30,000,000,000. The total loan disbursement for the year 2020 was Rp75,000,000,000 Total repayment of loans for the year 2020 amounting to Rp39,000,000,000. The balance on December 31, 2020 is Rp66,000,000,000.

7. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Surat No. 305/IBD/EXT/20 tanggal 6 Oktober 2020. Perusahaan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

1) Fasilitas Pinjaman *Money Market;*
   a. Pagu kredit sebesar Rp100.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga 9,25%;
   c. Tujuan penggunaan: modal kerja umum;
   d. Jangka Waktu: sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
   e. Jaminan: Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
2) Fasilitas Pembukaan SKBDN/ Bank Garansi
   a. Pagu kredit sebesar Rp150.000.000.000;
   b. Tingkat suku bunga 9,25%;
   c. Tujuan penggunaan: Merealisasi pembelian bahan baku, bahan pendukung produksi dan suku cadang;
   d. Jangka Waktu: sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
   e. Jaminan : Fidusia atas kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari Pokok Pinjaman.
3) Fasilitas Transaksi Valuta Asing
   a. Pagu kredit sebesar USD2,000,000;
   b. Tingkat suku bunga 9,25%;
   c. Tujuan penggunaan: Memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung-nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional;
   d. Jangka waktu sampai dengan 7 Oktober 2021.

7. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on Letter No. 305/IBD/EXT/20 dated October 6, 2020. The Company obtained faicilities are as follows:

1) Money Market Loan Facility;
   a. Maximum credit limit is amounting to Rp100,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.25%;
   c. The purpose: general working capital;
   d. Period: until July 7, 2021;
   e. Collateral: Fiduciary of an existing project contract with a value of at least 100% of Principal.
2) SKBDN Facility/Bank Guarantee Facility
   a. Maximum credit limit is amounting to Rp150,000,000,000;
   b. Interest rate at 9.25%;
   c. The purpose: Realizing the purchase of raw materials, production support and spare parts;
   d. Period: until July 7, 2021;
   e. Collateral : Fiduciary on existing project contracts with a minimum value of 100% of the Loan Principal.
3) Foreign Exchange Transaction Facility:
   a. Maximum credit limit is amounting to USD2,000,000;
   b. Interest rate at 9.25%;
   c. The purpose: operational transaction for foreign exchange to fulfill the foreign exchange transaction needs and hedging which arising from the operational activities;
   d. Period: until October 7, 2021.

Saldo awal tahun 2020 sebesar Rp35.000.000.000.Total pencairan pinjaman Untuk tahun 2020 sebesar nihil. Total pelunasan pinjaman periode tahun 2020 sebesar Rp35.000.000.000. Saldo pada 31 Desember sebesar nihil.

The beginning balance of 2020 is Rp35,000,000,000. The total loan disbursement for the year 2020 is nill. The total loan repayment for the year 2020 amounting is Rp35,000,000,000. The balance on December 31, 2020 is nill.

8. PT PPA Finance

1. Berdasarkan Surat No. S-158/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 17 Maret 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal penawaran fasilitas pembiayaan :

Jaminan ;
- Jaminan Pembiayaan
  Fidusia kendaraan atau alat berat yang menjadi objek pembiayaan PPAF senilai 117,65% dari jumlah pembiayaan.
- Jaminan Pembayaran
  Cek/ Bilyet Giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton;

Pembiayaan
a. Barang modal yang dibiayai;
   - 2 (dua) unit Wheel Loader Merk XCMG LW300KN + AC
   - 1 (satu) unit Comaco Wet Mix Concreate Batching Plant 90 m3/h Full Automation
   - 1 (satu) unit Truck Weight Scale Cap.60 Ton

b. Supplier/ Dealer PT Gaya Makmur Perkasa dan PT Sicoma Indo Perkasa
c. Nilai Perolehan Barang Modal sebesar Rp3.696.000.000,
d. Jumlah Pembiayaan sebesar Rp 3.141.600.000,
e. Uang Muka sebesar Rp554.400.000,
f. Tenor pembiayaan maksimum 48 bulan
g. Angsuran sebesar Rp87.434.000 (untuk seluruh unit barang modal yang dibiayai)
h. Tingkat Bunga 15%

2. Berdasarkan surat No. S-142/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 16 Maret 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan.

Jaminan
a. Jaminan Pembiayaan
   Fidusia kendaraan atau alat berat yang menjadi objek pembiayaan PT PPA Finance senilai 117,65% dari jumlah pembiayaan
b. Jaminan
   Cek/ Bilyet giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton

8. PT PPA Finance

1. Based on Letter No. S-158/PPAF-Dir/III-2020 dated March 17, 2020. PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing :

Collaterals;
- *Financing Collateral*
  Vehicle fiduciary or heavy equipment which is the object of financing PPAF amount to 117,65% from amount of financing.
- *Payment Collaterals*
  Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton;

Financing
a. Financial capital of goods
   - *2 (two) unit Wheel Loader brand of XCMGLW300KN + AC;*
   - *1 (one) unit Comaco Wet Mix Concrete Batching Plant 90 m3/h Full Automation*
   - *1 (one) unit Truck Weight Scale Cap.60 Ton;*

b. Supplier PT Gaya Makmur Perkasa and PT Sicoma Indo Perkasa;
c. Acquisition value of capital goods amount to Rp3,696,000,000,
d. Total financing amount to Rp3,141,600,000,
e. Down payment amount to Rp554,400,000,
f. Term payment maximum 48 month
g.Payment of installments amount to Rp87,434,000 (for all unit capital of goods).
h. Interest rate at 15%

2. Based on letter No. S-142/PPAF-Dir/III-2020 dated March 16, 2020, PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing

Collaterals
a. Financing Collaterals
   Vehicle fiduciary or heavy equipment which is the object of financing PT PPA Finance amount to 117.65% from amount of financing;
b. Collaterals
   Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton

Pembiayaan
- Barang modal yang Dibiayai 10 unit truck mixer Merek Sany
- *Supplier/ Dealer* PT Sany Makmur Perkasa
- Nilai Perolehan Barang Modal Rp 9.335.000.000.
- Jumlah Pembiayaan Rp7.934.750.000,
- Uang Muka Rp1.400.250.000,
- Tenor pembiayaan maksimum 48 bulan
- Pembayaran angsuran Rp220.831.000 (untuk 10 unit kendaraan)
- Tingkat Bunga 15%

3. Berdasarkan Surat No. S-562/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 09 Juli 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan.

   Jaminan
   a. Jaminan Pembiayaan
      Fidusia kendaraan atau alat berat yang menjadi objek pembiayaan PT PPA Finance senilai 117,65% dari jumlah pembiayaan;

   b. Jaminan
      Cek/ Bilyet Giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton

   Pembiayaan
   - Barang Modal yang Dibiayai adalah 5 Unit Truck Mixer Merek Sany
   - *Supplier* PT Sany Makmur Perkasa
   - Nilai Perolehan Barang Modal Rp4.615.000.000
   - Jumlah Pembiayaan Rp3.922.750.000
   - Uang Muka Rp692.250.000
   - Tenor Pembiayaan Maksimum 48 bulan
   - Angsuran Rp109.174.000 (untuk 5 unit kendaraan).
   - Tingkat Bunga 15%

4. Berdasarkan Surat No. S-562/PPAF-Dir/III-2020 tanggal 09 Juli 2020, PT Nindya Beton mendapatkan kredit pengadaan alat dari PT PPA Finance perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan
   Jaminan
   a. Jaminan Pembiayaan
      Fidusia kendaraan atau alat berat yang menjadi objek pembiayaan PPAF senilai 117,65% dari jumlah pembiayaan
   b. Jaminan Pembayaran
      Cek/ Bilyet Giro yang diterbitkan dari rekening operasional PT Nindya Beton

Financing
- *Financial capital of goods are 10 unit sany mixer truck*
- *Supplier PT Sany Makmur Perkasa*
- *Acquisition value of capital goods amount to Rp9,335,000,000.*
- *Total financing amount to Rp7,934,750,000,*
- *Down payment amount to Rp1,400,250,000,*
- *Term payment maximum 48 months*
- *Payment of installments amount to Rp220,831,000 (for 10 unit vehicles)*
- *Interest rate at 15%*

3. Based on Letter No. S-562/PPAF-DIR/III- dated July 09, 2020, PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing.

Collaterals
a. Financing Collaterals
Vehicle fiduciary or heavy equipment which is the object of financing PT PPA Finance amount to 117.65% from amount of financing;
b. Collaterals
Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton

Financing:
- *Financial capital of goods are 5 unit sany mixer truck*
- *Supplier PT Sany Makmur Perkasa*
- *Acquisition value of capital goods amount to Rp4,615,000,000*
- *Total financing amount to Rp3,922,750,000*
- *Down payment amount to Rp692,250,000*
- *Term of payment maximum 48 months*
- *Payment of installments amount to Rp109,174,000 (5 unit vehicles)*
- *Interest rate at 15%*

4.Based on Letter No. S-562/PPAF-Dir/III-2020 dated July 09, 2020, PT Nindya Beton obtained procurement of tools loan from PT PPA Finance regarding offering facilities of financing.
Collaterals
a. Financing Collaterals
Vehicle fiduciary or heavy equipment which is the object of financing PPAF amount to 117.65% from amount of financing;
b. Payment Collaterals
Cheque from the operational account statement PT Nindya Beton

Pembiayaan

- Barang Modal yang Dibiayai adalah 5 Unit Truck Mixer Merek Sany
- *Supplier/ Dealer* PT Sany Makmur Perkasa
- Nilai perolehan barang modal Rp4.615.000.000
- Jumlah Pembiayaan Rp Rp3.295.681.816
- Uang muka Rp692.250.000
- Tenor pembiayaan maksimum 48 bulan
- Angsuran Rp109.174.000 (untuk 5 unit kendaraan).
- Tingkat Bunga 15%

Financing

- *Financial capital of goods are 5 unit sany mixer truck*
- *Supplier PT Sany Makmur Perkasa*
- *Acquisition value of capital goods amount to Rp4,615,000,000*
- *Total financing amount to Rp3,295,681,816*
- *Down payment amount to Rp692,250,000*
- *Term of payment maximum 48 months*
- *Payment of installments amount to Rp109,174,000 (5 unit vehicles)*
- *Interest rate at 15%*

23. Liabilitas Sewa / *23. Lease Liabilities*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Jangka Pendek	162,418,015	--	*Current Liabilities*
Jangka Panjang	--	--	*Non-Current Liabilities*
Jumlah	**162,418,015**	**--**	***Total***

Liabilitas sewa merupakan kewajiban atas pembayaran sewa kendaraan operasional entitas anak.

Lease liabilities is liability of operational vehicle of subsidiary.

24. Uang Muka Pemberi Kerja / *24. Advances from Customers*

Akun ini merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi. Uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan kemajuan pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan kemajuan lapangan.

This account represents cash advance for project execution that is received from employer in accordance to the contract on construction. The cash advance will be compensated with the progress of the work and the termin of payment in accordance with the progress of the field.

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Wilayah I Medan	37,152,885,288	60,694,664,844	*Region I Medan*
Wilayah II Jakarta	48,985,785,656	10,371,757,345	*Region II Jakarta*
Wilayah III Balikpapan	--	22,187,353,769	*Region III Balikpapan*
Wilayah V Makassar	78,972,742,601	151,192,811,535	*Region V Makassar*
Divisi EPC	--	19,683,591,272	*EPC Division*
Jumlah	**165,111,413,545**	**264,130,178,765**	***Total***

Rincian berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut :

The details based on the customer as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	8,745,745,454	--	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
Ventura Bersama Nindya - PT PPA	4,122,006,569	4,122,006,569	*Joint Venture Nindya - PT PPA*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	--	6,249,750,776	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	720,000,000	--	*Others (each below Rp 1 Bilion)*
Jumlah Pihak Berelasi	**13,587,752,023**	**10,371,757,345**	***Total Related Parties***
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	82,555,011,354	122,183,195,980	*The Ministry of Public Works and Public Housing*
Kementerian Pemuda dan Olahraga	25,770,598,172	47,927,505,482	*Ministry of Youth and Sports*
Dinas Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	12,855,794,176	--	*North Sulawesi Provincial Settlement Infrastructure Office*
Kementerian Perhubungan	9,088,578,307	19,683,591,272	*Ministry of Transportation*
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Dharm	6,864,149,500	10,766,318,920	*Public Works and Spatial Planning Office of Dharmasraya Regency*
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	6,803,652,112	6,803,652,112	*Pesisir Barat District Government*
Bank Indonesia	3,627,272,728	23,577,272,728	*Bank Indonesia*
PT Bhanda Graha Reksa (Persero)	2,532,974,586	--	*PT Bhanda Graha Reksa (Persero)*
PT Karya Unggulan Gemilang	1,310,263,471	1,310,263,471	*PT Karya Unggulan Gemilang*
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjai	--	11,765,964,000	*Public Works and Spatial Planning Office of Banjarbaru Regency*
Universitas Islam Negeri Raden Fatah	--	7,240,416,850	*Raden Fatah State Islamic University*
PT Maleo	--	2,500,240,605	*PT Maleo*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	115,367,116	--	*Others (Each below Rp 1 Billion)*
Jumlah Pihak Ketiga	**151,523,661,522**	**253,758,421,420**	***Total Third Parties***
Jumlah Uang Muka Pemberi Kerja	**165,111,413,545**	**264,130,178,765**	***Total Advances From Customers***

25.Utang Ventura Bersama / *25. Joint Venture Payables*

Rincian utang ventura bersama adalah sebagai berikut :

The details of the joint venture's payable are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Ventura Bersama Nindya - Pembangunan Perumahan	18,114,286,232	1,580,879,111	*JV Nindya - Pembangunan Perumahan*
Ventura Bersama Nindya - Waskita - Jaya Purnama	1,400,000,000	1,400,000,000	*JV Nindya - Waskita - Jaya Purnama*
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	658,558,100	7,637,145,291	*JV Nindya - Bumi Karsa*
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	--	6,073,590,291	*JV Nindya - Karya Sarana*
Ventura Bersama Nindya - Sejahtera	--	1,753,120,804	*JV Nindya - Sejahtera*
Jumlah	**20,172,844,332**	**18,444,735,497**	***Total***

Utang ventura bersama merupakan utang penyertaan modal ke ventura bersama yang belum dibayarkan oleh Perusahaan.

Joint venture payables is equity participation payables to joint ventures that has not yet been paid by the Company.

26. Pendapatan Diterima di Muka / *26. Unearned Revenues*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Retail Readymix	5,468,523,471	4,158,981,475	*Retail Readymix*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	449,178,000	898,356,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Duta Solusi	170,215,151	--	*PT Duta Solusi*
Proyek Jaringan Gas Depok-Bekasi	--	1,666,282,035	*Depok-Bekasi Gas Networking Project*
Proyek Gedung Poltek Pariwisata Tahap III	--	691,106,287	*Tourism Polytechnic Building Project Phase III*
PT Telekomunikasi Selular Tbk	--	231,673,000	*PT Telekomunikasi Selular Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 Juta)	254,201,688	433,994,446	*Others (Each below Rp 100 Milion)*
Jumlah	**6,342,118,310**	**8,080,393,243**	***Total***

27. Utang Bruto / *27. Gross Amount Payables*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Wilayah I	210,227,584,838	179,762,784,780	*Region I*
Wilayah II	143,216,507,321	208,075,899,934	*Region II*
Wilayah III	109,524,864,831	81,508,969,198	*Region III*
Wilayah IV	161,286,372,705	385,082,034,223	*Region IV*
Wilayah V	130,719,369,100	381,984,556,757	*Region V*
Divisi EPC	106,084,634,837	59,224,002,508	*EPC Division*
Divisi Properti	813,321,874	5,657,129,099	*Division of Property*
Unit Penunjang Produksi	3,361,706,200	573,637,107	*Production Supporting Unit*
PT Nindya Beton	59,890,880,791	36,603,892,945	*PT Nindya Beton*
Kantor Pusat	4,347,036,014	4,463,400,862	*Head Office*
Jumlah	**929,472,278,511**	**1,342,936,307,413**	***Total***

Utang bruto merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Gross amount payables represent amount outstanding from third parties or project workers regarding to the field work.

28. Beban Akrual / *28. Accrued Expenses*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Jasa Produksi	9,750,000,000	12,500,000,000	*Production Service*
Tantiem	5,377,925,000	7,627,925,000	*Tantiem*
Bunga Pinjaman Bank	1,400,760,069	795,444,444	*Interest on Bank Loans*
Konsultan	1,376,962,758	450,542,432	*Consultant*
Bunga *Medium Term Notes*	--	4,916,250,000	*Interest on Medium Term Notes*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	--	450,542,432	*Others (Each below Rp 1 Billion)*
Jumlah	**17,905,647,827**	**26,290,161,876**	***Total***

29. Utang Lain-lain / *29. Other Payables*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Utang Lain - lain Proyek Divisi	2,571,412,627	3,523,225,475	*Other Payables of Division Project*
Jaminan Sewa Gedung	1,361,256,679	1,839,010,475	*Building Rental Guarantee*
Utang Astek	787,855,706	455,336,177	*Payable to the Labor Insurance*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 Juta)	302,101,822	272,387,268	*Others (Each below Rp 500 Milion)*
Jumlah	**5,022,626,834**	**6,750,606,962**	***Total***

30. Uang Muka Kontrak Jangka Panjang / *30. Long-Term Contract Advances*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Pupuk Kalimantan Timur	12,236,920,000	14,150,000,000	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	11,062,661,400	--	*PT Pertamina Exploration and Production*
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	--	21,815,454,540	*PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)*
Jumlah Pihak Berelasi	**23,299,581,400**	**35,965,454,540**	***Total Related Parties***
Pihak Ketiga:			***Third Parties:***
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	276,008,965,353	140,062,911,740	*The Ministry of Public Work and Public Housing*
Kementerian Perhubungan	13,298,597,318	--	*The Ministry of Transportation*
Jumlah Pihak Ketiga	**289,307,562,671**	**140,062,911,740**	***Total Third Parties***
Jumlah Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	**312,607,144,071**	**176,028,366,280**	***Total Long-Term Contract Advances***

31. Surat Utang Jangka Menengah / *31. Medium Term Notes*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Surat Utang Jangka Menengah			***Medium Term Notes***
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	--	300,000,000,000	*Current Portion*
Bagian Jangka Panjang	--	--	*Long Term Portion*
Jumlah Surat Utang Jangka Menengah	--	300,000,000,000	***Total Medium Term Notes***

Pada tanggal 28 Juli 2017, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan nilai Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Bunga surat utang jangka menengah adalah 10,35% per tahun. Jaminan berupa aset lancar perusahaan sebesar 120% dari nilai surat utang menengah yang diterbitkan. Jangka waktu jatuh tempo surat utang jangka menengah adalah tanggal 28 Juli 2020 dan dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2020.

On July 28, 2017 the Company issued Medium Term Notes amounting to Rp300,000,000,000 for 3 (three) years. Interest on Medium Term Notes is 10.35% per year. Collateral is the Company's current assets amounting to 120% of the value of medium term notes issued. The due date of the medium-term notes is July 28, 2020 and payment date on July 24, 2020.

Atas penerbitan MTN tersebut, bertindak selaku *Arranger* adalah PT BNI Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan untuk kepentingan dan atas nama pemegang MTN adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On the issuance of the MTN, PT BNI Sekuritas is acting as Arranger, while The Monitoring and Collateral Agent on behalf of MTN holders is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan dan tambahan modal kerja.

The fund would be used for business expanding and additional working capital.

Pada tanggal 24 Juli 2020 Perusahaan telah melakukan pelunasan atas Surat Utang Jangka Menengah.

On July 24. 2020 The Company has fully paid the Medium Term Notes.

32. Liabilitas Imbalan Pascakerja / *32. Post-Employment Benefits Liabilities*

Perusahaan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

The Company has recorded liabilities of employee benefits in accordance with constitution Act No. 13 year 2003 on regarding to matter pertaining to man power, using the actuarial technique within the framework of the implementation of Indonesia PSAK No.24 (Revised 2013) of Employee Benefits.

Perhitungan beban dan liabilitas aktuaria dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaris Muh Imam Basuki dan Rekan dalam laporannya tanggal 18 Februari 2021. Adapun asumsi aktuaria dan metode perhitungan yang dipergunakan sebagai berikut:

The calculation of actuarial expenses and liabilities is carried out by the Actuarial Consultant Office of Muh Imam Basuki and Partners in their report dated February 18, 2021. The actuarial assumptions and calculation methods are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	31 Desember/ *December 31, 2019*	
Dasar Perhitungan			***Calculation Basis***
Tingkat diskonto	7.3% - 7.4% per tahun/ *per annum*	8.5% per tahun/ *per annum*	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	3% - 8% per tahun/ *per annum*	3% per tahun/ *per annum*	*Salary increase rate*
Usia pensiun	55 tahun/ *years*		*Retirement age*
Tabel mortalita	Table Mortalita Indonesia (TMI) III 2011/ *Indonesia Mortality Table (TMI) III 2011*		*Mortality table*

Pendanaan untuk program imbalan pascakerja pensiun karyawan tetap per 31 Desember 2020 terbagi menjadi dua yaitu sebanyak 195 orang diikutsertakan pada DPNK (Dana Pensiun Nindya Karya) dan 180 orang diikutsertakan ke dalam DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Bank BNI.

Funding for pension benefit program) of permanent employees as of December 31, 2020 is devided into two, as many 195 people were included in DPNK (Dana Pensiun Nindya Karya) and 180 individuals were included in the DPLK Bank BNI.

Rincian beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The details of expense and employee benefits liability in the statement of financial position as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Biaya Jasa Kini	2,321,712,906	3,514,289,057	*Current Service Cost*
Beban Bunga	3,245,268,281	3,187,142,958	*Interest Expense*
Hasil Aset Program yang Diharapkan	(1,675,079,948)	(1,808,563,407)	*Expected Results of Plan Assets*
Jumlah Beban Imbalan Kerja	**3,891,901,238**	**4,892,868,608**	***Employee Benefit Expenses***
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	32,021,750,490	38,224,168,030	*Present Value of Defined Benefit Obligation*
Nilai Wajar Aset Program	(21,430,616,497)	(22,946,300,663)	*Fair Value of Plan Assets*
Liabilitas Imbalan Kerja	**10,591,133,993**	**15,277,867,367**	***Employee Benefit Liabilities***

Mutasi nilai kini kewajiban manfaat pasti adalah sebagai berikut:

Movement in the present value obligation are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Saldo Awal	38,224,168,030	37,515,183,972	*Beginning Balance*
Biaya Jasa Kini	2,321,712,906	3,867,186,089	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	3,245,268,281	3,187,142,958	*Interest Cost*
Imbalan Yang Dibayarkan	(3,060,463,440)	(8,438,364,821)	*Benefit Paid*
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial Bersih	(8,708,935,286)	2,093,019,832	*Net Actuarial (Gain) Loss*
Saldo Akhir Nilai Kewajiban Manfaat Pasti	**32,021,750,490**	**38,224,168,030**	***Ending Balance of Present Value Obligation***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement of the fair value of asset program are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Nilai Wajar Aset Program - Awal	22,946,300,663	21,277,216,556	*Opening fair value of plan assets*
Hasil Aset Program yang Diharapkan	1,675,079,947	1,808,563,407	*Expected Results of Plan Assets*
Kontribusi Pemberi Kerja dan Karyawan	1,530,545,749	7,603,587,843	*Contributions from the Employer and Employee*
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Aset Program	(1,842,081,725)	(3,884,057,573)	*Actuarial Gain (Loss) on Assets Programs*
Pembayaran Manfaat	(2,879,228,137)	(3,859,009,570)	*Benefits Payment*
Jumlah	**21,430,616,497**	**22,946,300,663**	***Jumlah***

Mutasi liabilitas di laporan keuangan Perusahaan sebagai berikut :

Mutations of liabilities in the statement of financial positions as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	15,277,867,367	16,237,967,416	*Beginning Balance of Liabilities*
Beban Imbalan Kerja	3,891,901,238	4,892,868,608	*Employee Benefit Expenses*
Pembayaran Imbalan Kerja	(3,060,463,440)	(4,579,355,250)	*Benefit Payment*
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lainnya	(4,305,835,516)	5,977,077,405	*Other Comprehensive Loss (Income)*
Iuran Dana Pensiun	(1,212,335,655)	(7,250,690,812)	*Dues Pension Fund*
Liabilitas pada Akhir Tahun	**10,591,133,993**	**15,277,867,367**	***Ending Balance of Liabilities***

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk
A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined liabilities are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occuring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	
Sensitivitas (-1%) terhadap Tingkat Bunga		***Sensitivity (-1%) to Interest Rate***
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	5,799,137,415	*Present Value of Defined Benefit Obligation*
Biaya Jasa Kini	837,170,874	*Current Service Cost*
Sensitivitas (+1%) terhadap Tingkat Bunga		***Sensitivity (+1%) to Interest Rate***
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	4,059,583,650	*Present Value of Defined Benefit Obligation*
Biaya Jasa Kini	658,972,874	*Current Service Cost*

	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Sensitivitas (-1%) terhadap Tingkat Bunga		***Sensitivity (-1%) to Interest Rate***
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	41,920,893,632	*Present Value of Defined Benefit Obligation*
Biaya Jasa Kini	3,894,626,545	*Current Service Cost*
Sensitivitas (+1%) terhadap Tingkat Bunga		***Sensitivity (+1%) to Interest Rate***
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Pasti	35,049,524,114	*Present Value of Defined Benefit Obligation*
Biaya Jasa Kini	3,213,935,376	*Current Service Cost*

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual charge in the defined benefits oblgations as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligations has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating thes defined benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

33. Modal Saham / *33. Share Capital*

a. Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 59.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar, dan atas modal yang ditempatkan dan disetor penuh tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Notaris Khairina S.H., No. 39 tanggal 14 September 2012 menerangkan bahwa komposisi kepemilikan saham Perusahaan menjadi: Negara Republik Indonesia sebanyak 59.500 saham Seri A Dwi Warna atau senilai Rp59.500.000.000, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebanyak 5.890.500 saham Seri B atau senilai Rp499.997.421.000. Secara persentase kepemilikan saham Perusahaan menjadi Negara Republik Indonesia sebesar 1% dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebesar 99%.

a. Subscribed and Fully Paid Up Capital

Subscribed and Fully paid up capital as of December 31, 2010 amounted to 59,500 shares and each share has a par value of Rp1,000,000, and the capital is paid fully and is placed entirely taken part by the Government of the Republic of Indonesia.

Based on Notary Deed No. 39 Khairina S.H., dated September 14, 2012 explained that the composition of the Company's shares ownership became: the Republic of Indonesia amounted to 59,500 shares series A Dwi Warna or amounting to Rp59,500,000,000, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) amounted to 5,890,500 series B shares or amounting to Rp499,997,421,000. The percentage ownership of the shares of the Company into the Republic of Indonesia is 1% and PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) is 99%.

Pada tanggal 14 September 2012, PT Perusahaan Pengelola Aset telah menyetorkan modalnya sebesar Rp499.997.421.000.

On September 14, 2012, PT Perusahaan Pengelola Aset paid the capital amounting to Rp499,997,421,000.

Rincian susunan modal Perusahaan adalah sebagai berikut :

The details of the composition of the Company's capital are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Modal Dasar	874,615,000,000	874,615,000,000	*Authorized Capital*
Modal Saham Dalam Portepel	(315,117,579,000)	(315,117,579,000)	*Capital Share in Portfolio*
Jumlah Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	**559,497,421,000**	**559,497,421,000**	***Total Subscribed and Paid Up Capital***

b. Dividen

Menurut Risalah RUPS Tahunan PT Nindya Karya (Persero) Nomor: 26 pada hari Senin, 27 Mei 2019 menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp35.297.841.674 Nilai tersebut dibagikan untuk pemegang saham, PT PPA (Persero) dan Pemerintah Republik Indonesia, masing-masing sebesar Rp34.944.863.257 dan Rp352.978.417

b. Dividend

According to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Nindya Karya (Persero) Number: 26 on Monday, May 27, 2019, the payment of dividends amounted to Rp35,297,841,671. The value was distributed to shareholders, PT PPA (Persero) and the Government of the Republic of Indonesia, respectively Rp34,944,863,257 and Rp352,978,417, respectively.

c. Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

Saldo cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp113.608.743.613.

Perusahaan membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. Undang-undang tersebut mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

c. Appropriated Retained Earnings

The general reserve balance for the December 31, 2019 period is Rp113,608,743,613.

The Company provided appropriation togeneral reserve in accordance with the Law No.40 year 2007 concerning to Limited Company. The law requires companies in Indonesia to provide a general reserve at least 20% of the issued and fully paid capital.

34. Pendapatan Usaha / *34. Revenues*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *Desember 31, 2019* Rp	
Pendapatan Konstruksi			*Construction Income*
Pihak Berelasi	843,547,540,859	1,190,216,918,370	*Related Parties*
Pihak Ketiga	2,623,664,110,802	4,405,005,394,790	*Third Parties*
Eskalasi / Klaim	28,999,689,243	1,384,211,652	*Escalation / Claim*
Pendapatan Manufaktur	96,548,544,393	160,028,835,432	*Manufacturing Income*
Pendapatan Properti	17,486,566,157	17,975,429,468	*Property Income*
Pendapatan Sewa Alat	6,236,725,000	8,891,256,664	*Equipment Rental Income*
Jumlah	**3,616,483,176,454**	**5,783,502,046,376**	***Total***

35. Beban Pokok Pendapatan / *35. Cost of Revenues*

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan sektor usaha sebagai berikut :

The Details of cost of revenue based on the business sector are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *Desember 31, 2019* Rp	
Beban Pokok Pendapatan Konstruksi	3,147,366,065,581	4,961,046,444,000	*Cost of Construction Revenue*
Beban Pokok Pendapatan Manufaktur	113,476,334,943	162,913,705,635	*Cost of Manufacture Revenue*
Beban Pokok Pendapatan Sewa Alat	22,284,176,939	21,025,013,895	*Cost of Equipment Rental Revenue*
Beban Pokok Pendapatan Properti	16,192,168,170	13,984,353,367	*Cost of Property Revenue*
Jumlah	**3,299,318,745,634**	**5,158,969,516,897**	***Total***

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan jenis beban sebagai berikut :

The details of cost of goods sold based on type of cost are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *Desember 31, 2019* Rp	
Bahan Baku	1,207,242,833,446	2,304,534,757,796	*Raw Materials*
Subkontraktor	1,129,402,067,274	1,263,696,174,839	*Subcontractors*
Overhead Proyek	346,307,839,641	446,678,688,959	*Project Overhead*
Upah	339,059,177,055	614,831,859,310	*Wages*
Peralatan	229,239,950,684	475,372,428,584	*Equipments*
Penyusutan Aset Tetap (Catatan18)	25,847,460,101	23,730,568,046	*Property and Equipment Depreciation (Note 18)*
Biaya Pinjaman	19,661,287,057	27,493,597,615	*Financial Charges*
Pemeliharaan, Listrik dan Air	2,558,130,377	2,631,441,748	*Maintenance, Electricity and Water*
Jumlah	**3,299,318,745,634**	**5,158,969,516,897**	***Total***

36. Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama / *36. Share of the Profit (Loss) of Joint Ventures*

Rincian bagian laba (rugi) ventura bersama sebagai berikut :

The details of cost of share of the profit (loss) as follows :

	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ *Desember 31, 2019* Rp	
Nindya - Adhi Karya	25,414,633,259	24,770,623,410	*Nindya - Adhi Karya*
Nindya - Bahagia bangunnusa	20,491,154,386	--	*Nindya - Bahagia bangunnusa*
Nindya - Modern WT	11,668,915,482	--	*Nindya - Modern WT*
Nindya - Bangun Bejana Baja	8,717,578,410	1,519,445,935	*Nindya - Bangun Bejana Baja*
Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	8,128,119,659	4,960,728,020	*Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya*
Nindya - Passokkorang	6,693,615,528	350,000,000	*Nindya - Passokkorang*
Nindya - Tirta	5,133,046,638	--	*Nindya - Tirta*
Nindya - Waskita - Jaya Purnama	4,932,523,394	6,419,303,238	*Nindya - Waskita - Jaya Purnama*
Nindya - Sacna	4,055,107,988	20,649,997,547	*Nindya - Sacna*
Nindya - Rudy Jaya	3,888,024,545	22,510,208,442	*Nindya - Rudy Jaya*
Nindya - Surya	3,880,000,000	61,919,817	*Nindya - Surya*
Nindya - Bumi Agung	3,731,011,299	--	*Nindya - Bumi Agung*
Nindya - MCC - Wika - Waskita	3,427,615,630	10,131,328,467	*Nindya - MCC - Wika - Waskita*
Nindya - Hutama Karya	2,871,648,808	11,741,147,001	*Nindya - Hutama Karya*
Nindya - Thamrin - Dwifarita	1,276,648,095	1,874,672,026	*Nindya - Thamrin - Dwifarita*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1 Milyar)	1,361,913,005	(14,564,772,923)	*Others (Each below Rp 1 Billion)*
Jumlah	**91,341,841,495**	**64,776,828,460**	***Total***

37. Beban Pemasaran dan Beban Administrasi dan Umum / *37. Marketing Expenses and General and Administrative Expense*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *Desember 31, 2019* Rp	
Beban Pemasaran	11,009,075,979	14,238,605,491	*Marketing Expenses*
Beban Administrasi dan Umum:			*General and Administrative Expenses:*
Beban Pegawai	115,724,874,220	119,201,311,455	*Employee Expenses*
Beban Insentif	14,368,455,752	20,181,649,318	*Incentive Expenses*
Beban Gedung/Kantor	15,884,665,780	20,336,949,403	*Building/Office Expenses*
Beban Pengembangan	7,573,462,780	8,305,428,359	*Development Expenses*
Beban Perjalanan Dinas	10,674,447,295	9,362,559,646	*Official Travel Expenses*
Beban Umum	16,946,061,881	18,194,249,209	*General Expenses*
Beban Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 18 & 19)	11,642,239,201	9,362,559,646	*Depreciation and Amortization Expenses (Notes 18 & 19)*
Jumlah Beban Administrasi Umum	192,814,206,909	204,944,707,036	*Total General and Administrative Expenses*
Jumlah Beban Pemasaran dan Administrasi dan Umum	**203,823,282,888**	**219,183,312,527**	***Total Marketing Expenses and General and Administrative Expenses***

38. Penghasilan (Beban) Lainnya / *38. Other Income (Expenses)*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *Desember 31, 2019* Rp	
Pendapatan Lainnya :			***Other Income :***
Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	14,227,497,511	12,418,665,155	*Interest Income and Current Account*
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	19,759,652,427	30,432,493,972	*Difference from Investment Property Revaluation*
Pemulihan Piutang	25,548,807,064	44,862,131	*Recovery of Receivables*
Penerimaan atas Proyek Selesai	20,718,831,028	23,604,946,575	*Receipt from Finished Project*
Penerimaan atas Pekerjaan Tambah Ventura Bersama	58,628,025	--	*Receipt from Additional Work of Joint Venture*
Selisih Kas/Bank dan Kurs	43,914,788	26,129,766	*Difference Value Expense in Exchange Rate*
Lain-lain	2,866,914,388	963,488,067	*Others*
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	1,107,840,430	*Gain on Sale of Property, Plant and Equipment*
Jumlah Pendapatan Lainnya	83,224,245,231	68,598,426,096	*Total Other Income*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *Desember 31, 2019* Rp	
Beban Lainnya :			***Other Expenses :***
Beban atas Proyek Selesai	25,593,053,546	30,732,146,591	*Expense on Finished Project*
Administrasi Bank	1,909,896,188	1,244,039,206	*Bank Administration*
Beban Pajak	1,093,230,664	3,405,523,052	*Tax Expenses*
Lain-lain	2,579,519,190	1,599,483,587	*Others*
Jumlah Beban Lainnya	31,175,699,588	36,981,192,436	*Total Other Expenses*
Jumlah Penghasilan (Beban) Lainnya - Bersih	**52,048,545,643**	**31,617,233,660**	***Total Other Income (Expense) - Net***

Pendapatan bunga dan jasa giro merupakan hasil dari penerimaan bunga rekening koran dan bunga proyek Poltekkes Bangka Belitung, bunga investasi jangka pendek dan bunga deposito berjangka.

Interest income and giro services are the result of overdraft interest revenue, short-term investments and interest rate time deposit.

39. Beban Pajak Penghasilan Final / *39. Final Income Tax Expenses*

Rincian beban pajak penghasilan final sebagai berikut :

The details of final income tax expenses as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Jasa Konstruksi			*Construction*
Pendapatan Jasa Konstruksi	3,496,211,340,904	5,571,735,258,801	*Construction Income*
Pendapatan Jasa Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak	115,038,574,022	274,053,646,568	*Construction Non-taxable Income*
Jumlah Pendapatan Jasa Konstruksi	3,381,172,766,882	5,297,681,612,233	*Construction Total Income*
Non Jasa Konstruksi			*Non-construction*
Pendapatan Jasa Non Konstruksi	120,271,835,550	186,895,521,564	*Construction Income*
Pendapatan Jasa Non Konstruksi Tidak Dikenakan Pajak Final	111,627,743,570	183,236,442,444	*Non-Construction Non-Final taxable Income*
Jumlah Pendapatan Non Jasa Konstruksi	8,644,091,980	3,659,079,120	*Construction Total Income*
Ditambah (Dikurangi):			*Added (Less):*
Penambahan Beda Waktu Pengenaan Pajak	--	--	*Addition of Time Difference of Tax*
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena pajak	3,381,172,766,882	5,297,681,612,233	*Construction Taxable Income*
Pendapatan Non Jasa Konstruksi Kena Pajak	8,644,091,980	3,659,079,120	*Non-construction Taxable Income*
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak	3,389,816,858,862	5,301,340,691,353	*Total Taxable Income*
Beban Pajak Final Konstruksi			*Constructions Final Tax Expenses*
3% x 2020 : Rp 3.381.172.766.882	101,435,183,006	--	*3% x 2020 : Rp3,381,172,766,882*
3% x 2019 : Rp5.297.681.612.233	--	158,930,448,367	*3% x 2019 : RpRp5,297,681,612,233*
Beban Pajak Final Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan			*Land and Building Rental Final Tax Expenses*
10% x 2020 : Rp774.219.700	77,421,970	--	*10% x 2020 : Rp774,219,700*
10% x 2019 : Rp2.361.288.600	--	236,128,860	*10% x 2019 : Rp2,361,288,600*
Beban Pajak Final atas Penjualan Properti			*Non Constructions Final Tax Expenses*
2.5% x 2020 : Rp7.869.872.280	196,746,807	--	*2.5% x 2020 : Rp7,869,872,280*
2.5% x 2019 : Rp1.297.790.520	--	32,444,763	*2.5% x 2019 : Rp1,297,790,520*
Jumlah Beban Pajak Final	**101,709,351,783**	**159,199,021,990**	***Total Final Income Tax Expenses***

40. Aset Moneter Dalam Mata Uang Asing / *40. Monetary Assets in Foreign Currency*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup mempunyai aset moneter dalam mata uang asing sebagai berikut :

On December 31, 2020 and 2019, the Group has monetary assets denominated in foreign currencies as follows :

	31 Desember / *December 31, 2020*		31 Desember / *December 31, 2019*		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency* USD	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency* USD	Ekuivalen/ *Equivalent* Rp	
Bank					*Cash in Banks*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,887.91	54,838,990	3,947.91	54,879,917	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1,000.00	14,105,005	--	--	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Jumlah	**4,887.91**	**68,943,995**	**3,947.91**	**54,879,917**	***Total***

41. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Manajemen Permodalan / *41. Financial Instrument, Financial Risk and Capital Management*

Instrumen Keuangan / *Financial Instrument*

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi			***Financial Assets Measured at Amortized Cost***
Kas dan Setara Kas	245,873,000,967	508,064,440,458	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha - Bersih			*Accounts Receivable - Net*
Pihak Berelasi	111,354,019,908	105,969,450,876	*Related Parties*
Pihak Ketiga	23,230,964,787	172,406,137,390	*Third Parties*
Piutang Retensi - Bersih			*Retention Receivables - Net*
Pihak Berelasi	42,186,046,668	68,982,798,330	*Related Parties*
Pihak Ketiga	108,825,876,417	101,138,447,124	*Third Parties*
Piutang Ventura Bersama Konstruksi	306,081,905,753	296,622,978,182	*Joint Venture Receivables*
Piutang Lain - lain - Bersih	30,252,447,386	22,254,029,316	*Other Receivables*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja			*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	530,686,106,849	394,036,772,241	*Related Parties*
Pihak Ketiga	1,800,538,118,882	2,024,068,552,606	*Third Parties*
Investasi Jangka Pendek	200,000,000,000	200,000,000,000	*Short-Term Investment*
Aset Lain-lain	--	29,042,684,515	*Other Assets*
Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba-Rugi (FVTPL)			***Financial Assets at Fair Value Through Profit of Loss (FVTPL)***
Investasi Jangka Panjang Lainnya	4,028,388,000	1,591,681,000	*Other Long-Term Investment*
Jumlah Aset Keuangan	**3,403,056,875,617**	**3,924,177,972,038**	***Total Financial Assets***
Liabilitas pada harga perolehan diamortisasi			***Liabilites at amortized cost***
Pinjaman Bank dan Non - bank			*Bank and Non - Bank Loans*
Pihak Berelasi	369,686,180,200	125,000,000,000	*Related Parties*
Pihak Ketiga	217,400,000,000	145,000,000,000	*Third Parties*
Utang Usaha			*Account Payables*
Pihak Berelasi	18,281,501,853	36,343,485,197	*Related Parties*
Pihak Ketiga	1,440,402,931,064	1,707,893,321,416	*Third Parties*
Utang Ventura Bersama	20,172,844,332	18,444,735,497	*Joint Venture Payables*
Utang Bruto kepada Pihak Ketiga	929,472,278,511	1,342,936,307,413	*Gross Amount Payables*
Beban Akrual	17,905,647,827	26,290,161,876	*Accruals*
Utang Lain-lain	5,022,626,834	6,750,606,963	*Other Payables*
Surat Utang Jangka Menengah	--	300,000,000,000	*Medium Term Notes*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**3,018,344,010,621**	**3,708,658,618,362**	***Total Financial Liabilities***

Kebijakan Manajemen Risiko

Tujuan Perusahaan secara umum adalah menciptakan nilai bagi para pemegang saham melalui maksimalisasi laba dengan tetap berlandaskan pada praktik-praktik pengelolaan bisnis yang sehat. Dalam kenyataannya banyak ketidakpastian yang menyelimuti praktik dunia bisnis, baik ketidakpastian yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan. Ketidakpastian ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif dari ketidakpastian dapat menjadi peluang dan pengaruh negatif dapat menjadi risiko.

Risk Management Policies

The purpose of the Company in general is to create value for the shareholders through maximization of existing fixed income based on good corporate governances. In fact, a lot of uncertainty surrounding the world's business practices, both the uncertainty occurred from the internal and external environment of the company. This uncertainty can be a positive or negative influence. Positive influence from uncertainty could be an opportunity and negative influence could be a risk.

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko bunga, risiko kredit dan risiko nilai tukar, risiko likuiditas dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik.

The main risks of Group financial instrument are interest credit risk, credit risk and foreign currency exchange risk, liquidity risk, and risk of changes in government policy, economic and social-political conditions.

Pengkajian Direksi dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

The asessment of Directors and approved policies for managing each of these risks could explained as follows :

a. Risiko Bunga

Grup menyadari bahwa salah satu risiko yang melekat adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan tingkat bunga. Eksposur risiko bunga berupa kesulitan likuiditas keuangan dalam memenuhi pinjaman bank dan pinjaman lainnya. Guna meminimalisasi risiko tersebut, Grup melakukan diversifikasi sumber dana murah melalui peningkatan profil Grup.

a. Interest Risk

The Group realized that one of the inherent risk is the risk of fluctuations in the value of a financial instrument due to changes in interest rates. Interest risk exposure forms financial liquidity difficulties in fulfil bank loans and other loans. In order to minimize those risks, the Group diversified sources of cheap funds through improvements in Group profile.

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
	Rp	**Rp**	
Pinjaman dengan suku bunga mengambang	1,029,462,493,489	445,000,000,000	*Loan with floating interest rate*
Jumlah	**1,029,462,493,489**	**445,000,000,000**	***Total***

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain tetap:

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income before tax with all other variables constant:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	**31 Desember/ *December 31, 2019***	
	Rp	**Rp**	
Naik 100 bps	10,294,624,935	4,450,000,000	*Increase 100 bps*
Turun 100 bps	(10,294,624,935)	(4,450,000,000)	*Decrease 100 bps*
Jumlah	**(10,294,624,935)**	**(4,450,000,000)**	***Total***

b. Risiko Kredit
Risiko kredit diidentifikasi sebagai kegagalan owner memenuhi kewajiban kontraktualnya. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko ini adalah piutang usaha, piutang ventura bersama, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja dan uang muka subkontrak. Grup mengelola risiko ini dengan menerima sebagian tertentu melalui keseimbangan arus kas proyek dan penyisihan atas piutang yang cukup.

Grup meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana. Eksposur maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana di ungkapkan pada Catatan 3, 5 dan 6. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

b. Credit Risk
Credit risk is identified as the owner's company inability to meet the contractual obligations. Group's financial instruments that have potential for these risks are accounts receivable, joint venture receivable, receivable retention, gross amount due to customer and cash advance subcontractor. Group manages those risks by receiving specific part through project cash flow balances and sufficient allowance of receivables.

Group minimize credit risks financial assets such as cash and cash equivalent by maintaining minimum cash balance and select qualified bank for the placement of funds. The maximum exposure to the credit risk is represented by the carrying amount as shown in Notes 3, 5 and 6. There is no significant concentration of credit risk.

c. Risiko Nilai Tukar
Belum ada risiko nilai tukar yang secara langsung dapat diidentifikasi ke dalam instrumen keuangan Grup. Grup mengelola risiko ini dengan memindahkan risiko tersebut ke subkontraktor.

c. Exchange Rate Risk
There is no exchange rate risk that identified directly in the Group financial instruments, Group manages this risk by moving the risk to the subcontractor.

d. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Grup dalam memenuhi liabilitas keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Grup diharapkan dapat membayar seluruh liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Grup harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Berikut ini merupakan liabilitas keuangan non-derivatif berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;

d.Liquidity Risk
Liquidit y risk is the risk in which the position of cash flows show short - term revenues is not sufficient to cover short term expenses.

Liquidity risk exposure is in form of Group difficulty in meeting financial obligations that must be paid with cash or other financial assets. The Group is expected to pay all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, then the Group must generate sufficient cash inflows.

The following is a non - derivative financial liabilities based on residual maturity value that is not discounted for the years ended on December 31, 2020 and 2019;

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ *Weighted average effective interest rate* %	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 tahun sampai dengan 2 tahun / *1 year to 2 years*	Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 year*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2020						***31 December 2020***
Aset						***Assets***
Tanpa Bunga						*Non - interest bearing*
Kas dan Setara Kas	--	510,690,552	--	--	510,690,552	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha						*Accounts Receivable*
Pihak Berelasi	--	111,354,019,908	--	--	111,354,019,908	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	23,230,964,787	--	--	23,230,964,787	*Third Parties*
Piutang Retensi						*Retention Receivables*
Pihak Berelasi	--	42,186,046,668	--	--	42,186,046,668	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	108,825,876,417	--	--	108,825,876,417	*Third Parties*
Piutang Ventura Bersama	--	306,081,905,753	--	--	306,081,905,753	*Joint Venture Receivables*
Piutang Lain-lain	--	30,252,447,386	--	--	30,252,447,386	*Other Receivables*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja						*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	--	530,686,106,849	--	--	530,686,106,849	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	1,800,538,118,882	--	--	1,800,538,118,882	*Third Parties*
Instrumen suku bunga variabel						*Variable interest rate instruments*
Kas di bank	1% - 2.75%	243,669,633,649	--	--	243,669,633,649	*Cash in Bank*
Instrumen suku bunga tetap						*Fixed Interest Rate intruments*
Investasi Jangka Pendek	3%	200,000,000,000	--	--	200,000,000,000	*Short-Term Investment*
Deposito Berjangka	3.50%	1,700,000,000	--	--	1,700,000,000	*Time Deposits*
Jumlah		**3,399,035,810,851**	--	--	**3,399,035,810,851**	***Total***
Liabilitas						***Liabilities***
Tanpa Bunga						*Non - interest bearing*
Utang Usaha						*Accounts Payable*
Pihak Berelasi	--	18,281,501,853			18,281,501,853	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	1,440,402,931,064			1,440,402,931,064	*Third Parties*
Utang Ventura Bersama	--	20,172,844,332	--	--	20,172,844,332	*Joint Venture Payables*
Utang Bruto	--	929,472,278,511	--	--	929,472,278,511	*Gross Amount Payables*
Beban Akrual	--	17,905,647,827	--	--	17,905,647,827	*Accruals*
Utang Lain-lain	--	5,022,626,834	--	--	5,022,626,834	*Other Payables*
Instrumen suku bunga variabel						*Variable interest rate instruments*
Pinjaman Bank dan Non - bank						*Bank and Non - Bank Loans*
Pihak Berelasi	9% - 9.50%	369,686,180,200	442,376,313,289	--	812,062,493,489	*Related Parties*
Pihak Ketiga	9% - 9.50%	217,400,000,000	--	--	217,400,000,000	*Third Parties*
Jumlah		**3,018,344,010,621**	**442,376,313,289**	**--**	**3,460,720,323,910**	***Total***

	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ *Weighted average effective interest rate* %	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 tahun sampai dengan 2 tahun / *1 year to 2 years*	Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 year*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2019						***31 December 2019***
Aset						***Assets***
Tanpa Bunga						*Non - interest bearing*
Utang Usaha	--	125,000,000,000	--	--	125,000,000,000	*Cash*
Piutang Usaha						*Accounts Receivable*
Pihak Berelasi	--	99,490,645,888	--	--	99,490,645,888	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	178,884,942,378	--	--	178,884,942,378	*Third Parties*
Piutang Retensi						*Retention Receivables*
Pihak Berelasi	--	68,982,798,330	--	--	68,982,798,330	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	101,138,447,124	--	--	101,138,447,124	*Third Parties*
Piutang Ventura Bersama	--	296,622,978,182	--	--	296,622,978,182	*Joint Venture Receivables*
Piutang Lain-lain	--	22,254,029,316	--	--	22,254,029,316	*Other Receivables*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja						*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	--	394,036,772,241	--	--	394,036,772,241	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	2,024,068,552,606	--	--	2,024,068,552,606	*Third Parties*
Instrumen suku bunga variabel						
Kas di bank	1% - 2.75%	235,183,604,786	--	--	235,183,604,786	*Cash in Bank*
Instrumen suku bunga tetap						*Fixed Interest Rate intruments*
Investasi Jangka Pendek	3%	200,000,000,000	--	--	200,000,000,000	*Short-Term Investment*
Deposito Berjangka	4.25% - 7.75%	272,200,000,000	--	--	272,200,000,000	*Time Deposits*
Jumlah		**4,017,862,770,851**	--	--	**4,017,862,770,851**	***Total***
Liabilitas						***Liabilities***
Tanpa Bunga						*Non - interest bearing*
Utang Usaha						*Accounts Payable*
Pihak Berelasi	--	36,343,485,197			36,343,485,197	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	1,707,893,321,416			1,707,893,321,416	*Third Parties*
Utang Ventura Bersama	--	18,444,735,497	--	--	18,444,735,497	*Joint Venture Payables*
Utang Bruto	--	1,342,936,307,413	--	--	1,342,936,307,413	*Gross Amount Payables*
Beban Akrual	--	26,290,161,876	--	--	26,290,161,876	*Accruals*
Utang Lain-lain	--	6,750,606,963	--	--	6,750,606,963	*Other Payables*
Instrumen suku bunga variabel						*Variable interest rate instruments*
Pinjaman Bank dan Non - bank						*Bank and Non - Bank Loans*
Pihak Berelasi	8.5% - 9.75%	125,000,000,000	175,000,000,000	--	300,000,000,000	*Related Parties*
Pihak Ketiga	8.5% - 9.75%	145,000,000,000	--	--	145,000,000,000	*Third Parties*
Instrumen suku bunga tetap						*Fixed Interest Rate intruments*
Surat Utang Jangka Menengah	10.35%	300,000,000,000	--	--	300,000,000,000	*Medium Term Notes*
Jumlah		**3,708,658,618,362**	**175,000,000,000**	**--**	**3,883,658,618,362**	***Total***

e. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik
Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistematik dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Grup menurun.

e. The Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Political Conditions.
Government policies that affect economic and monetary, uncondusive social and political conditions will result in declining investment and development. This condition can make current projects and upcoming projects postponed. The nature of this risk is systematic which can negatively influence all related variables, thus makes the performance of the Group would decline.

Manajemen Permodalan
Tujuan dari Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Capital Management
The purpose of the Group in managing capital is to safeguard the entity's ability to sustain its going concern, so that the entity could keep delivering results for shareholders and benefits for other stakeholders, and providing adequate returns to shareholders by determining the price of the products and services commensurate with the level of risk.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Grup memonitor dengan dasar rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai berikut : utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. strategi Grup adalah mempertahankan rasio utang terhadap modal pada batas bawah dari kisaran 2,00 sampai dengan 4,00. Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

The Group defines specific amount of capital is appropriate with the risk. The Group manages the capital structure and makes adjustment while paying attention to changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets. Consistent with other companies in the industry, the Group monitors on the basis of debt to capital ratio. This ratio is calculated as follows : net payable is divided by adjusted capital. The net of debt is total debt (as the amount in the financial position report) less cash and cash equivalents. During 2019, the Group's strategy is to maintain the debt to capital ratio at the lower limit, in range from 2.00 up to 4.00. The debt to adjusted capital ratio as of December 31, 2020 and December 31, 2019 are as follows :

	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Manajemen Permodalan			***Capital Management***
Total Liabilitas	3,968,742,832,720	4,389,685,284,611	*Total Liability*
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	245,873,000,967	508,064,440,458	*Less: Cash and Cash Equivalent*
Utang Neto	3,722,869,831,752	3,881,620,844,153	*Net Debt*
Total Ekuitas	1,518,074,900,606	1,686,636,778,747	*Total Equity*
Rasio Utang terhadap Modal	**2.45**	**2.30**	***Debt to Equity Ratio***

42. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi / *42. Nature and Transactions of Related Parties*

Berikut ini adalah entitas berelasi dengan Pemerintah yang merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah :

The followings are the Government-related entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government :

Pihak Berelasi / ***Related Parties***	**Sifat Hubungan /** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi /** ***Nature of Transaction***
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / *Placement of Current Account, Bank and Non Bank Loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / *Placement of Current Account, Bank and Non Bank Loans*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Giro, Pinjaman Bank dan Non Bank / *Placement of Current Account, Bank and Non Bank Loans*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Giro dan Penempatan Deposito / *Placement of Current Account and Placement of deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk / *Controlled by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*	Penempatan Giro / *Placement of Current Account*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penempatan Giro / *Placement of Current Account*
Perum LPPNPI (Airnav Indonesia)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
Perum Perumnas	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Angkasa Pura II (Persero)	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Barata Indonesia (Persero)	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Brantas Abipraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Bukit Asam Tbk	Dikendalikan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) / *Controlled by PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	**Sifat Hubungan /** *Nature of Relationship*	**Jenis Transaksi /** *Nature of Transaction*
PT Hakaaston	*Dikendalikan oleh PT Hutama Karya (Persero) / Controlled by PT Hutama Karya (Persero)*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Hutama Karya Infrastruktur	*Dikendalikan oleh PT Hutama Karya (Persero) / Controlled by PT Hutama Karya (Persero)*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Istaka Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	*Dikendalikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk / Controlled by PT Jasa Marga (Persero) Tbk*	Investasi Jangka Panjang Lainnya / *Other Long Term Investment*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) / *Controlled by PT Pertamina (Persero)*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pertamina Geothermal Energy	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) / *Controlled by PT Pertamina (Persero)*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi	Dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero) / *Controlled by PT Pertamina (Persero)*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*

Pihak Berelasi / ***Related Parties***	**Sifat Hubungan /** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi /** ***Nature of Transaction***
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	*Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Entitas Induk / O*wners of The Parent*
PT PPA Finance	Dikendalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) / *Controlled by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*	Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa / *Right of Use Assets and Lease Liabilities*
PT PTPN IV (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Pupuk Kalimantan Timur	Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) / *Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Semen Padang	Dikendalikan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk / *Controlled by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Survai Udara Penas (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Waskita Beton Tbk	Dikendalikan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
PT Yodya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat / *Controlled by the Central Government of the Republic Indonesia*	Penagihan atas Jasa Konstruksi / *Billing of Construction Service*
Ventura Bersama Nindya - Sejahtera	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Adhi Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	**Sifat Hubungan /** *Nature of Relationship*	**Jenis Transaksi /** *Nature of Transaction*
Ventura Bersama Nindya - Bahagia Bangunnusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Bangun Bejana Baja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Barata	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Bina Nusa Lestari	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Brantas	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Bumi Karsa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Cipuga	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Citra - Kharisma	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Dewa Ruci	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Gerbang Saranabaja	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Hutama Karya - Wijaya Karya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Inti	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Jaya Konstruksi	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Karya Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Kencana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Leo Tunggal Mandiri	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*

Pihak Berelasi / *Related Parties*	**Sifat Hubungan /** *Nature of Relationship*	**Jenis Transaksi /** *Nature of Transaction*
Ventura Bersama Nindya - MCC - Wika - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Modern Widya Tehnical	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Passokkorang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - PP	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - PPA	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Rudy Jaya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Sacna	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Sarana	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Surya	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Waskita - Jaya Purnama	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Wijaya - Waskita	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Waskita Jaya Purnama	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Rapi Tirta Treatmindo	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Tamiang	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Andesmont	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*
Ventura Bersama Nindya - Bumi Agung Annusa	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama / *Investment in Associates and Joint Ventures*	Investasi pada Ventura Bersama / *Investment in Joint Ventures*

43. Standar dan Interpretasi Telah diterbitkan Tapi Belum diterapkan

43. Standards and Interpretations Issued Note Yet Adopted

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2020.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is:

- *PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Covid-19 related Rent Concessions.*

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows :

- *PSAK 112: Accounting for Endowments;*
- *PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;*
- *PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;*
- *PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.*

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks; and*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs*

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted is:

- *PSAK 74: Insurance Contract*

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

44. Perikatan dan Perjanjian / *44. Commitments and Agreements*

Informasi penting yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Important information relating to the contracts and agreements until December 31, 2020 are as follows :

No.	Nama Proyek/ *Name of Projects*	Nilai Kontrak/ Contract Value *(Rp)*	Pemberi Kerja/ *Owner*	Masa Pelaksanaan/ Contract Period Mulai/ *Started*	Selesai/ *Ended*
1	Proyek Pembangunan Bendungan Napungete *Napungete Dam Project*	849,939,499,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	7 Desember 2016 *December 7, 2016*	16 Desember 2020 *December 16, 2020*
2	Proyek Pembangunan Bendungan Pamukulu *Pamukulu Dam Project*	811,425,631,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	15 November 2017 *November 15, 2017*	20 Desember 2021 *December 20, 2021*
3	Proyek Pembangunan Bendungan Karalloe Tahap II *Karaloe Package II Dam Project*	657,864,000,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	25 Mei 2018 *May 25, 2018*	25 Januari 2021 *January, 25 2021*
4	Proyek Pembangunan Bendungan Kuwil *Kuwil Dam Project*	640,341,000,065	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	26 Juli 2016 *July 26, 2016*	07 Agustus 2020 *August 07, 2020*
5	Proyek Pembangunan Bendungan Tigadihaji *Tigadihaji Dam Project*	629,946,666,667	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	16 Oktober 2018 *October 16, 2018*	19 September 2024 *September 19, 2024*
6	Proyek Pengembangan Pipa CY-III (Lomanis - Rewulu) *Design and Development CY- III Pipe (Lomanis - Rewulu) Project*	616,951,979,799	PT Pertamina (Persero) *PT Pertamina (Persero)*	18 Juni 2019 *June 18, 2019*	18 Maret 2022 *March 18, 2022*
7	Proyek Pembangunan Bendungan Tugu Trenggalek *Tugu Trenggalek Dam Project*	518,400,000,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	27 Desember 2018 *December 27, 2018*	13 Desember 2021 *December 13, 2021*
8	Proyek Pembangunan Bendungan Temef *Temef Dam Project*	506,145,751,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	22 Desember 2017 *December 22, 2017*	13 April 2022 *April 13, 2022*
9	Proyek Pembangunan Bendungan Bringin Sila *Bringin Sila Dam Project*	446,773,533,800	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	31 Desember 2018 *December 31, 2018*	07 Juni 2023 *June, 07 2023*
10	Proyek Pembangunan Design & Build Container Yard Teluk Lamong *Design & Build Container Yard Lamong Bay*	399,949,999,900	PT Pelindo III (Persero) *PT Pelindo III (Persero)*	10 April 2018 *April 10, 2018*	29 Maret 2020 *March 29, 2020*
11	Proyek Jembatan Kabupaten Asmat (MYC) *Bridge at Asmat Regency (MYC) Project*	277,409,090,000	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* *The Ministry of Public Work and Housing*	11 November 2020 *November 11, 2020*	September 20, 2022 *September 20, 2022*
12	Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Asai *Irigation of D.I Batang Asai Project*	224,003,619,587	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *The Ministry of Public Work and Housing*	20 Juli 2020 *July 20, 2020*	18 Desember 2021 *December 18, 2021*
13	Proyek Perluasan Terminal dan Fasilitas Penunjangnya di Bandara Lombok *Project for Expansion of Terminals and Supporting Facilities at Lombok Airport*	220,779,206,560	PT Angkasa Pura I (Persero) *PT Angkasa Pura I (Persero)*	10 Februari 2020 *February 10, 2020*	8 Februari 2021 *February 8, 2021*

45. Perkara Hukum / *45. Legal Cases*

Perusahaan sedang menghadapi beberapa perkara hukum baik dalam proses mengajukan gugatan maupun yang saat ini sedang menunggu putusan pengadilan atau kasasi. Perusahaan meyakini bahwa keputusan pengadilan atau kasasi dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perusahaan.

The Company is facing several legal cases both in the process of filing a lawsuit and currently waiting for a court verdict or cassation. The Company believes that the decision of the Court or Cassation in such cases will not bring material impacts on the financial condition and performance of the Company.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 perkara hukum yang sedang berjalan antara lain :

Up to December 31, 2020, legal cases in progress, are as follows :

1. Piutang kepada PT Buana Risma (PT BR) adalah sisa tagihan proyek kerjasama pembangunan perumahan Malaka Asri. PT BR sebagai konsultan

1. Accounts receivable to PT Buana Risma (PT BR) is remaining billing of Malacca Asri residential construction cooperation project. PT BR as the

manajemen proyek pembangunan serta membuat program pemasaran, akan tetapi PT BR telah melampaui batas kewenangannya dengan melakukan penjualan atas rumah dan menerima pembayaran langsung dari pembeli. Namun hasilnya tidak disetorkan kepada Perusahaan.

projects construction management consultant as well as the creator of marketing program has exceeded its limit by selling home and receive direct payment from the buyer. Meanwhile, the payment has not been received by the Company.

Berdasarkan kesepakatan PT BR mengakui memiliki utang kepada Perusahaan sebesar Rp3.082.631.548 termasuk bunga dan status penyelesaian tagihan saat ini adalah menunggu PT BR melakukan perhitungan kewajiban dan pelepasan hak tanggungan untuk aset yang yang akan diserahkan kepada Perusahaan. Perkara ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun).

Based on the deal, PT BR admits that it has debt to the Company as Rp 3,043,642,664 including interest. The current status of the bill is waiting PT BR to calculate liabilities and mortgage waiver for assets which shall be submitted to the company. These matters are handled by the Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun).

Pada tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang dalam perkara tersebut Grup sebagai Pihak Penggugat dan PT BR sebagai Tergugat. Putusan tersebut menyatakan gugatan Grup tidak diterima. Sehingga Grup mengajukan Banding.

On November 13, 2014 the District Court of South Jakarta has determined the verdict that contains Group accusation. The verdict stated that the Group lawsuit is not accepted. So that, Group decided to fill the appeal.

Kemudian pada tanggal 19 Juni 2015 terbit putusan Pengadilan Tinggi yang isinya menerima permohonan banding Grup dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga menyatakan PT BR telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap Grup dan menghukum PT BR untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.082.631.548.

Then, on June 19, 2015 the Pengadilan Tinggi declared the verdict which stated that the Pengadilan Tinggi had received the appeal of Group and issued cancelation of the South Jakarta District Court Verdict. The Supreme Court also stated that PT BR had done a default that caused losses to Group and punished PT BR to pay compensation as much as Rp 3,082,631,548.

Sesuai surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Permohonan Keterangan Incracht, disampaikan bahwa dalam perkara perdata antara Grup dan PT BR jika sampai dengan batas waktu yg ditentukan oleh Undang-undang para pihak (Penggugat & Tergugat) tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan PN Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto No.131/PDT/2015/PTDKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde).

Based on the letter from South Jakarta District Court Number: W10.U3/1656/HK.02/8/2016 dated August 30, 2016 about Inkracht Certification Request, stated that the civil case between Group and PT BR up to the time limit specified by Law, the parties (Prosecutor & Defendant) would not filled a legal action, then the Sentence of South Jakarta District Court No. No.171/Pdt.G/ 2014PN.Jkt.Sel juncto No.131/PDT/2015/PTDKI has a permanent legal course (inkrach van gewisjde).

Karena tidak ada upaya hukum lagi dari PT BR, dan sebagai tindak lanjut dari putusan PN Jakarta Selatan No.171/Pdt.G/2014PN.Jkt.Sel juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PTDKI telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde), Grup mengajukan permohonan eksekusi putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, Tanggal 23 Agustus

Due to no further legal remedies from PT BR, and as a follow up to the South Jakarta DC decision No. 171/Pdt.G/2014PN.Jkt Sel juncto HC Decision No.131/PDT/2015/PTDKI has legal force still (incracht van gewisjde), Group submitted an application for the execution of the verdict through the South Jakarta District Court. Then, on August 23, 2017, a Decision Letter on the Execution of

2017 telah diterbitkan Surat Penetapan Eksekusi Putusan dari Ketua Pengadilan Negeri. Melalui Penetapan Eksekusi Tersebut, PT BR dipanggil sebanyak 2 kali oleh PN Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Oktober Grup mengajukan permohonan sita dan eksekusi putusan perkara No. 171/PDT.G/2014/PN.JKT SEL juncto Putusan PT No.131/PDT/2015/PTDKI.	*Decisions has been issued from the Chair of the District Court. Through the Determination of Execution, PT BR was summoned twice by the South Jakarta DC. Then on October 10, Group submitted a petition for seizure and the execution of case decision No. 171/PDT.G/2014/PN.JKT SEL juncto HC Decision No.131/PDT/2015/ PTDKI.*
Pada tanggal 11 Juli 2018, adanya surat dari PN Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Hal : Menindaklanjuti Pengajuan Bukti Pendaftaran Blokir Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HDB) No. 555 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017.	*On July 11, 2018, there was a letter from the South Jakarta District Court to the Head of the West Bandung Regency Land Office, p. 555 and Certificate of Property (SHM) No. 1452, for Determination of Number: 42 / Eks.Pdt / 2017.*
Pada tanggal 30 Juli 2018, adanya Surat dari Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat kepada Ketua PN Jakarta Selatan perihal menindaklanjuti pengajuan bukti pendaftaran blokir terhadap Sertipikat HGB No. 555 dan Sertipikat SHM No. 1452, terhadap Penetapan Nomor: 42/Eks.Pdt/2017. Tanggal 21 Januari 2019 terbit pelaksanaan sita eksekusi.	*On July 30, 2018, there was a letter from the Ministry of Agrarian & Spatial Planning / BPN West Bandung Regency Land Office of West Java Province to the Chairperson of the South Jakarta District Court regarding the follow up on the submission of blocking registration evidence to the Certificate of HGB No. 555 and Certificate of SHM No. 1452, for Determination of Number: 42 / Eks.Pdt / 2017. January 21, 2019 the execution of seizure execution.*
Pada tanggal 22 April 2019 perusahaan telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi kepada Pengadilan Negeri.	*On April 22, 2019 the company has submitted an application for Execution Auction to the Pengadilan Negeri.*
Pada tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi oleh KJPP Dolly dan tim Lawyer untuk melakukan appraisal terhadap asetnya BR dalam rangka penentuan harga limit dari Pengadilan Negeri. pada tanggal 11 September 2019 telah dilakukan survey terhadap aset BR.	*On August 7, 2019 a location survey was conducted by KJPP Dolly and Tim Lawyer to conduct an appraisal of BR assets in the context of determining the price limit of the District Court. And on September 11, 2019, a survey of assets of BR.*
Pada tanggal 15 November 2019, KJPP Dolli Siregar & Rekan telah menyerahkan laporan final appraisal atas tanah kosong seluas 130 m2 dan bangunan seluas 39m2 dengan kesimpulan sebagai berikut : a. nilai pasar sebesar Rp 542.900.000 b. nilai likuidasi sebesar Rp 434.300.000	*On 15 November 2019, the KJPP Dolli Siregar & Partners has submitted a final appraisal report on vacant land measuring 130 m^2 and building area of 39 m^2 with the following conclusion :* *a. market value of Rp 542,900,000* *b. liquidation value of Rp 434,300,000*
Pada tanggal 6 Desember 2019, PT Nindya Karya telah menyerahkan hasil laporan penilaian appraisal atas tanah kosong dari KJPP Dolly & Siregar kepada kuasa hukum untuk selanjutnya diserahkan ke PN Bandung.	*On December 6, 2019, PT Nindya Karya has submitted the results of the assessment report on the appraisal of land left blank KJJP Dolly & Siregar to legal counsel to then submitted to the Bandung District Court.*

Pada tanggal 6 Februari 2020 telah diajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kantor Lelang Kabupaten Bandung. Dan Proses Lelang di jadwalkan pada 22 Juli 2020.

Pada tanggal 22 Juli 2020 telah di adakan lelang eksekusi namun belum ada peminatnya.

Sampai dengan diterbitkanya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan menunggu proses lelang.

2.Proyek Aston adalah proyek paket pekerjaan struktur dan general finishing Aston Mangga Dua Jakarta dengan PT Mandiri Karya Cipta Indah (PT MKCI) sebagai pemilik pekerjaan. Nilai proyek sebesar Rp52.000.000.000, proyek berakhir karena PT MKCI selalu menghindar untuk penetapan progress fisik pekerjaan termasuk menunda pembayaran sebagai akibat belum adanya kesepakatan progress. Tagihan yang diajukan sebesar Rp13.678.000.000 termasuk kenaikan harga (eskalasi) dan status penyelesaian tagihan pada 2013 adalah menunjuk Tim Jamdatun sebagai kuasa direksi perusahaan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dilakukan registrasi perkara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Grup tidak dapat diterima. Grup mengajukan upaya banding dan pada tanggal 23 April 2013 telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 20 Mei 2014 Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Grup mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan dari Kasasi tersebut antara lain menolak permohonan Kasasi Grup.

Pada tanggal 2 Oktober 2017 sesuai surat Direksi nomor: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 perihal Permohonan Pendapat Hukum, Grup bersurat kepada Jamdatun meminta pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet pada proyek Aston Mangga Dua. Sampai saat ini Jamdatun masih mengkaji pertimbangan hukum atas penghapusan piutang macet tersebut.Tanggal 3 Oktober 2019 telah dilakukan ekspose terhadap *Legal Opinion* (LO) untuk Nindya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

On February 6, 2020, a bid for execution was submitted to the Bandung Regency Auction Office. And the Auction Process is scheduled for July 22, 2020.

On July 22, 2020, an execution auction was held but there was no bid yet.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and waiting for auction process.

2. Aston Project is a structural work package project and general finishing for Aston Mangga Dua Jakarta with PT Mandiri Cipta Karya (PT MKC) as the owner of the project. The project which values for Rp52,000,000,000 had to be ended due to PT MKC always evading the establishment of physical work progress, included delaying payments as the result of the lack of progress agreement. The proposed bill of Rp13,678,000,000 including price increases (escalation) and the status of the settlement Bill in 2013 is pointing to the Jamdatun Team as the power of the directors of the company to file a lawsuit through the Pengadilan Negeri Central Jakarta and registration have been made through the Registrar of the Pengadilan Negeri in Central Jakarta. Then the Pengadilan Negeri Central Jakarta issued a ruling stating that the Group lawsuit was not acceptable. Group submitted an appeal attempt and on April 23, 2013, delivered a memory of the appeal to the High Court through the Pengadilan Negeri Central Jakarta. On May 20, 2014 the Central Jakarta High Court issued a ruling stating that the District Court's verdict was upheld. Group submitted a request for cassation at the Supreme Court. The decision of the Cassation, among others, rejected the application for the Cassation of Group.

On October 2, 2017 according to the Directors' letter number: 1676/DIRUT/SEKPER/10/2017 regarding the Request for Legal Opinion, Group corresponded to Jamdatun asking for legal considerations for the elimination of bad debts in the Aston Mangga Dua project. Until now, Jamdatun is still reviewing legal considerations for the elimination of bad debts. On October 3, 2019, an Legal Opnion was held for Nindya at the Deputy Attorney General for Civil and Administrative Affairs (Jamdatun).

Pada tanggal 29 Oktober 2019, melalui surat no. B-569/G/Gph.1/10/2019, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Pendapat Hukum (LO) atas permohonan pendapat hukum PT Nindya Karya pada perkara perdata, *Lawyer Opinion* tersebut pada intinya menyarankan untuk mengajukan kembali gugatan terhadap PT MKCI.

On October 29, 2019, through letter No.B-569/G/Gph.1/10/2019, Attorney General's Office of the Republic of Indonesia issued a Legal Opinion (LO) on the request for a legal opinion PT Nindya Karya on civil cases, the Opinion Lawyer in essence advised to resubmit the lawsuit against PT MKCI.

Pada tanggal 22 November 2019, LO *(Legal Opinion)* dari Retainer telah diterima Perusahaan, yang menyarankan perusahaan harus mengajukan gugatan ulang.

On November 22, 2019, the Legal Opinion (LO) of the retainer has been received Company, which the advice the company must be boils down to the rule of law should.

Pada tanggal 19 Juni 2020, hasil rapat dengan BOD dan NSR, bagian hukum diminta untuk membuat rekap progres dan pembayaran yang telah direalisasikan dan tambahan dokumen terkait guna analisa lebih lanjut oleh NSR terkait posisi hukum Nindya dalam kasus proyek Aston ini

On June 19, 2020, the results of a meeting with BOD and NSR, the legal department was asked to make a recap of progress and payment that had been realized and additional related documents for further analysis by NSR regarding Nindya's legal position in the Aston project case.

Pada tanggal 14 September 2020 NSR memberikan kajian antara lain Nindya dapat mengupayakan penyelesaian secara negoisasi dengan MKCI guna melakukan set off atau Nindya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusbukuan piutang *(write off)* proyek Aston Mangga Dua.

On September 14, 2020, NSR provided a study, among others, that Nindya could seek negotiations with MKCI to set off or Nindya could consider write-off the recivable of Aston Mangga Dua's Project receivables.

Sampai dengan diterbitkanya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses pertimbangan manajemen.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on management's considerations.

3. Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan proyek tahun Anggaran 2004-2011. Nilai total kontrak proyek sebesar Rp771.599.297.800 dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai pemilik pekerjaan. Dalam mengerjakan proyek tersebut Perusahaan menjalin kerjasama operasi dengan PT Tuah Sejati, dan membentuk perjanjian kerjasama dengan nama Nindya-Sejati Kerja Sama Operasi (KSO).

3. *Sabang Loading Dock Construction Project in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) is a project for 2004-2011 fiscal year. Total project's value amounting to Rp771,599,297,800 with Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) as the project owner. In the project implementation, The Company established joint operations with PT Tuah Sejati, and formed a joint venture as Nindya-Sejati Joint Operation (JO).*

Persentase nilai kepesertaan masing-masing perusahaan tersebut adalah PT Nindya Karya (Persero) sebesar 55% dan PT Tuah Sejati 45%. Laba yang dibukukan dari pembangunan Dermaga Bongkar Sabang Lanjutan porsi PT Nindya Karya (Persero) yaitu sebesar Rp44.681.053.100.
Pada tanggal 29 Oktober 2018, pihak berwenang telah melakukan penyitaan dokumen berupa prosedur pemasaran, operasi, dan satuan pengawas internal Perusahaan. Sampai 31 Maret 2020, perkara ini masih dalam proses hukum.

The share value percentage for each companies is PT Nindya Karya (Persero) amounted to 55% and PT Tuah Sejati 45%. Accounted operating income from the Sabang Loading Dock Construction Projects in the portion of PT Nindya Karya (Persero) which amounted to Rp 44,681,053,100.
On October 29, 2018, the authorities have confirscated documents in the form of marketing procedures, operations, and the Company's internal supervisory unit. Until March 31, 2020, this case still be in the legal process.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah melakukan penurunan nilai atas dana yang dibatasi penggunaannya.

Until December 31, 2020 the Company has make allowances for impairment losses of restricted fund.

4.Piutang kepada PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) adalah sisa tagihan kerjasama proyek Pada paket pekerjaan struktur dan arsitektur pembangunan Koja Trade Mall Di Jakarta Utara, MSC tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar 90,77 % dan pekerjaan tambah / kurang kepada PT Nindya Karya (Persero).

4.Receivables from PT Maju Sentosa Cemerlang (MSC) are the remaining project collaboration debts. In the Koja Trade Mall construction structure and architecture package in North Jakarta, MSC did not pay 90.77% for work performance and added / less work to PT Nindya Karya (Persero).

PT Nindya Karya (Pesero) Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan isi putusan Mengabulkan gugatan MSC untuk sebagaian. PT Nindya Karya (Persero) mengajukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan isi putusan Menyatakan MSC telah wanprestasi kepada PT Nindya Karya (Persero); Menghukum MSC untuk membayar kerugian kepada PT Nindya Karya (Persero) seluruhnya sebesar Rp 5.226.198.142. Putusan kasasi telah terbit, Pada tanggal 24 Oktober 2018 PT MSC minta waktu 2 minggu untuk menyiapkan usaha penyelesaian kewajiban MSC kepada PT Nindya Karya (Persero).

PT Nindya Karya (Persero) Submits a lawsuit through the South Jakarta District Court, with the contents of the decision Granting the MSC claim for part. PT Nindya Karya (Persero) submitted an appeal effort through the DKI Jakarta High Court, with the contents of the decision stating MSC had defaulted to PT Nindya Karya (Persero); Sentencing MSC to pay losses to PT Nindya Karya (Persero) for a total of Rp 5,226,198,142. The decision on cassation has been issued. On October 24, 2018, PT MSC requested 2 weeks to prepare an effort to settle MSC's obligations to PT Nindya Karya (Persero).

Pada tanggal 5 Agustus 2019 telah dilaksanakan survey lokasi aset MSC oleh KJPP Dolly dan Tim Kuasa Hukum.

On August 5, 2019, MSC's asset location survey was conducted by KJPP Dolly and the Legal Counsel Team.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 telah keluar hasil appraisal dari KJPP Dolly Siregar & Rekan atas aset yang terletak di Jalan Kramat Jaya Koja, Jakarta Utara.

On August 20, 2019, an appraisal result was issued by KJPP Dolly Siregar & Partners for assets located at Jalan Kramat Jaya Koja, North Jakarta.

Pada tanggal 20 Januari 2020, Nindya bersurat ke Toni Hendarto dan rekan perihal Permohonan Pendapat hukum terkait tindak lanjut dan upaya hukum yang dilakukan Nindya dengan dikeluarkannya penetapan PN Jakarta Utara. Dan Nindya telah bersurat kepada Kuasa Hukum untuk pengajuan KPKU.

On January 20, 2020, Nindya corresponded to Toni Hendarto and colleagues regarding the petition for legal opinions related to the follow-up and legal remedies carried out by Nindya with the issuance of the North Jakarta District Court. And Nindya has written to the Attorney General for filing KPKU.

Pada tanggal 23 Juni 2020 bagian hukum menyampaikan Kajian Pro Cons kasus koja untuk penanganan upaya hukum selanjutnya.

On June 23, 2020, the legal department submitted a Pro Cons Study on the Koja case for further handling of legal remedies.

Sampai dengan diterbitkanya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses kajian lanjutan.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment process.

5.PT Nindya Karya telah menyelesaikan Prestasi 94,76% kepada PT Fatimah Azzahra (FA) sehingga PT Fatimah Azzahra berkewajiban

5. PT Nindya Karya has completed the working progress 94.76% to PT Fatimah (FA) so then PT Fatimah Azzahra is obliged to carry out payments

melaksanakan pembayaran kepada NK sebesar Rp 17.457.355.385,- namun faktanya PT Fatimah Azzahra baru menyelesaikan kewajiban kepada NK sebesar Rp13.947.733.987.

to NK Rp 17,457,355,385 but in fact the new PT Fatimah Azzahra NK settle liabilities to Rp13,947,733,987.

Putusan BANI no. 861/VI/ARB-BANI/2016, tanggal 27 Maret 2017 yang memutuskan bahwa kewajiban PT Fatimah Azzahra kepada PT Nindya Karya adalah sebesar Rp 3.566.552.621 telah bersifat mengikat dan final.

BANI Decision no. 861 / VI / ARB-BANI / 2016, dated March 27, 2017 which decided that the obligation PT Fatimah to PT Nindya Karya is Rp 3,566,552,621 has to be final

Pada tanggal 29 Oktober 2019 Kejati Riau menyampaikan surat ke Nindya, Perihal Penyampaian Proposal Rencana Pembayaran dari PT Fatimah Azzahra, yg pada intinya PT FA bersedia membayar sisa pembayaran dalam bentuk penyerahan sebuah aset apartemen di daerah dago, bandung dan terhadap kekurangan sisa pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil dalam rentang waktu 3 tahun terhitung sejak januari 2020 sampai desember 2022.

On October 29, 2019 Attorney Lists deliver a letter to Nindya, Subject Submission of Proposals Payment Plan of PT Fatimah, who in essence PT FA are willing to pay the remainder of the payment in the form of delivery of an asset apartments in the area in Dago, Bandung and the shortage of the rest of the payment will be made by by installments within the period of 3 years commencing from January 2020 until December 2022.

Pada tanggal 8 Juni 2020 Nindya bersurat setuju akan mengambil unit dan *furnished* apartemen yang diajukan PT Fatimah Azzahra yang akan dikompensasikan sebagai bagian penyelesaian kewajiban PT Fatimah Azzahra kepada PT Nindya Karya (Persero).

On 8 June 2020 Nindya consented to take the apartment units and furnishings proposed by PT Fatimah Azzahra which would be compensated as part of the settlement of PT Fatimah Azzahra's obligations to PT Nindya Karya (Persero).

Pada tanggal 12 September 2020 Nindya dan FA menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Nomor 1 di hadapan Notaris Lili Lastari,S.H., M.Kn. di Pekanbaru, kemudian FA menyerahkan 36 Bank Giro sebagai pelaksanaan dari Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban.

On September 12, 2020 Nindya and FA signed the Debt Settlement Agreement Act No. 1 before Notary Lili Lastari, S.H., M.Kn. In Pekanbaru, the FA then handed over 36 Bank Giro as an implementation of the Debt Settlement Agreement Act

Sampai dengan diterbitkanya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam proses pengambilahan apartemen.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and process to execute the apartment.

6.PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS) tidak melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan Pembangunan Landasan Galangan DPS-Lamongan yang telah diselesaikan oleh PT Nindya Karya.

6. PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS) did not make payments for the performance of the DPS-Lamongan Shipyard Construction work which was completed by PT Nindya Karya.

PT Nindya Karya (Persero) bersurat ke DPS dengan nomor surat 112/NK-WIL.IV/KEU/04/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Percepatan Penyelesaian Outstanding DPS.

PT Nindya Karya (Persero) sent letter to DPS with the number of letter is 112 /NK-WIL.IV / KEU / 04/2016 dated 13 April 2016 regarding the Acceleration of DPS Outstanding Settlement.

PT Nindya Karya (Persero) bersurat ke DPS sesuai surat nomor: 304/NK-WIL.IV/KEU/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian *Outstanding*.

PT Nindya Karya (Persero) sent letter to DPS with the number of letter is 304 / NK-WIL.IV / KEU / 09/2016 on 14 September 2016 concerning the follow-up to Accelerate Completion of Outstanding.

DPS bersurat ke PT Nindya Karya nomor : 16/3501-12/DS/IV/N-Awn tanggal 30 Des 2016 perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian *Outstanding*. Disampaikan bahwa berkaitan dg nilai *outstanding* DPS sebesar Rp4.730.048.000,- akan dibahas dalam pertemuan pada minggu ke 2 bulan Januari 2017 dengan agenda acara Pembahasan Penyelesaian para pihak dalam bentuk sinergi BUMN seperti melakukan KSO, pengerjaan proyek bersama ataupun dengan cara lainnya untuk penyelesaiannya

DPS sent a letter to PT Nindya Karya number: 16 / 3501-12 / DS / IV / N-Awn Des 30th, 2016 concerning the Follow-Up to Accelerate Completion of Outstanding. Submitted that the outstanding amount related to DPS Rp 4,730,048,000 will be discussed during the week to 2 months in January 2017 with the agenda discussion of the Settlement of the parties in the form of synergy as do KSO, jointly working on projects or otherwise for its completion.

Adanya pertemuan dari pihak PT Nindya Karya dengan DPS pada tanggal 28 Mei 2018, dengan kesepakatan DPS memutuskan untuk melepaskan Aset Tanah dan Bangunannya yang berlokasi di Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya

A meeting of the PT Nindya Karya with DPS on May 28, 2018, with the agreement of DPS decided to release the Assets Land and building located at Jl. Irian Barat No. 19. Surabaya

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Direktur Utama DPS bersurat kepada Menteri BUMN RI. Sesuai surat nomor: 18/1958-8/DS/I/M-1 perihal Permohonan Persetujuan Ijin Pelepasan & Optimalisasi Aset Perusahaan.

On August 14, 2018, President Director of DPS sent a letter to the Minister of State Owned Enterprises RI. Corresponding letter number: 18 / 1958-8 / DS / I / M-1 regarding the Request Approval Waiver & Optimization Company Assets.

Pada tanggal 23 September 2019 PT Nindya Karya (Persero) telah bersurat kembali untuk penagihan kepada DPS sesuai surat nomor: 1689/DKS/SEKPER/09/2019 perihal: "Penyelesaian *Outstanding* PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero).

On September 23, 2019 PT Nindya Karya (Persero) has resent the letter to the billing to the DPS accordance with the letter number: 1689/DKS/SEKPER/09/2019regarding:"Completion of Outstanding PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero).

PT Nindya Karya bersurat ke Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN tanggal 11 Maret 2020 yang intinya setuju dengan usulan DPS pembayaran secara bertahap. Nindya telah menyerahkan konsep perjanjian penyelesaian kewajiban antara Nindya dan DPS kepada DPS tanggal 30 Maret 2020. Tanggal 5 Agustus 2020 telah Nindya kirimkan kembali koreksi konsep perjanjian penyelesaian kewajiban DPS. Dan Tanggal 9 Oktober 2020, Nindya telah menerima Perjanjian Penyelesaian Kewajiban yang telah di tanda tangani DPS.

PT Nindya Karya corresponded to the Deputy for Legal Affairs and Debt of the Ministry of BUMN on March 11, 2020, which basically agreed to the DPS proposal in stages. Nindya has submitted the concept of an obligation settlement agreement between NIndya and DPS to DPS on March 30, 2020. On August 5, 2020, Nindya sent back the corrections to the draft DPS debt settlement agreement. And on October 9, 2020, Nindya has received the Debt Settlement Agreement that has been signed by DPS.

Sampai dengan diterbitkanya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam pengkajian perjanjian penyelesaian kewajiban.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still on assesment for the settlement agreement.

7. PT Nindya Karya (Persero) dan PT Lampiri Djaya Abadi telah membentuk dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi nomor : 334/NKDI/TEKNIK/07/2013 tertanggal 2 Juli 2013 (NINDYA-LAMPIRI, JO) untuk Proyek Aceh Reconstruction Project (IP-545) – Road Sub Project Package No. I : Section Sp. Kraft-Batas

7. *PT Nindya Karya (Persero) and PT Lampiri Djaya Abadi has formed and signed a Joint Operation Agreement number: 334 / NKDI / ENGINEERING / 07/2013 dated July 2, 2013 (Nindya-Lampiri, JO) to project the Aceh Reconstruction Project (IP-545) - Road Sub Project Package No. I: Section Sp. Kraft-Border Central Aceh with a portion of membership*

Aceh Tengah dengan porsi kepesertaan PT Nindya Karya (Persero): 51% dan PT Lampiri Djaya Abadi : 49%.

PT Nindya Karya (Persero): 51% and PT Lampiri Djaya Abadi: 49%.

Pada tanggal 23 Agustus 2017, Kuasa Hukum PT Nindya Karya mengajukan permohonan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

On August 23, 2017, Attorney PT Nindya Karya apply to BANI (Indonesian National Board of Arbitration).

Pada tanggal 13 Juli 2018 dibacakan putusan BANI, antara lain sebagai berikut :
a. Lampiri dinyatakan telah wan prestasi
b. Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan dan membayar hutang sisa pencairan/pinjaman dana kepada Nindya sebesar Rp16.422.289.899
c. Lampiri diperintahkan untuk mengembalikan biaya BANI kepada PT Nindya Karya sebesar Rp279.531.000,- .

On July 13, 2018 Date of BANI verdict was read, as follows :
a. Lampiri declared wan achievement
b. Lampiri ordered to restore and pay the residual debt disbursement / loan funds to Nindya of Rp16,422,289,899

c. Lampiri ordered to refund the cost of the descendants of the PT Nindya Karya for Rp 279,531,000

Pada tanggal 12 November 2019, permohonan eksekusi telah diajukan permohonan oleh kuasa hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

On November 12, 2019, the application has been filed execution request by the attorney to the West Jakarta District Court.

Pada tanggal 10 Juni 2020,berdasarkan Pemberitahuan Putusan PT DKI Jakarta, yang amarnya berbunyi "Menguatkan Putusan PN Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2019 Nomor 79/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim".

On June 10, 2020, based on the willingness to Notify PT DKI Jakarta's Decision, the ruling reads "Strengthening the East Jakarta District Court Decision on May 21, 2019 Number 79/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim".

Sampai dengan diterbitkanya laporan keuangan konsolidasian ini, status perkara ini masih berlangsung dan sedang dalam tahap diskusi lanjutan atas eksekusi tersebut diatas.

Until the issued date of this consolidated financial statement, the status of the case still on going and still discuss for the execution request above.

8.Dalam Pekerjaan Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipanisasi transmisi serta distribusi primer, sekunder dan tersier berikut pekerjaan sipil untuk pendistribusian air bersih kota Bontang-Kaltim), dimana PT Nindya Karya Nindya masih memiliki tagihan sebesar Rp 2.600.000.000 kepada PT Altra Excis Investama tetapi hingga saat ini PT Altra masih belum merealisaikannya.

8. On Procurement and Installation of primary, secondary and tertiary transmission and distribution pipelines along with civil works for the distribution of clean water in the city of Bontang-East Kalimantan) Projects, where PT Nindya Karya Nindya still has a bill of Rp 2,600,000,000 to PT Altra Excis Investama but to date PT Altra still hasn't realized it.

Pada tanggal 26 Nopember 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Rekan selaku Kuasa Hukum Nindya mengirimkan Surat No : 7005.2611/TH.R/XI/2019 Perihal Somasi ke 1 (satu) kepada PT Altra.

On November 26, 2019, Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M. & Partners as Legal Counsel Nindya sent Letter No: 7005.2611 / TH.R / XI / 2019 Regarding the 1st (one) Somasi to PT Altra.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Kuasa hukum telah menyampaikan somasi ke-2 kepada Altra.

On March 26, 2020, the attorney has delivered the second summons to Altra.

Pada tanggal 14 Mei 2020 Altra telah menyampaikan tanggapan somasi dari kuasa hukum Nindya, dimana isinya Altra akan melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp1.200.000.000 selama 5 tahun dan sisanya melalui kerjasama usaha.

On May 14, 2020 Altra has submitted a summons response from Nindya's attorney, wherein Altra will make a payment in the amount of Rp1,200,000,000 billion in stages over 5 years and the rest through cooperation.

46. Kepentingan Nonpengendali / *46. Non-Controlling Interests*

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak :

Non-controlling interests in net assets of subsidiary :

	31 Desember / *December 31, 2020*					
	Kepemilikan/ *Ownership* %	Nilai Tercatat Awal Tahun/ *Carrying Amount Beginning Balance* Rp	Penyesuaian Penerapan Awal PSAK/ *Adjustment on Initial Implementation of PSAK* Rp	Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ *Comprehensive Income for the Year* Rp	Nilai Tercatat Akhir Periode/ *Carrying Amount Beginning Balance* Rp	
PT Nindya Beton	49	26,803,364,750	(7,733,966,301)	(8,120,627,669)	10,948,770,780	*PT Nindya Beton*
Saldo per 31 Desember 2020		**26,803,364,750**	**(7,733,966,301)**	**(8,120,627,669)**	**10,948,770,780**	***Balance as of December 31, 2020***

	31 Desember / *December 31, 2019*					
	Kepemilikan/ *Ownership* %	Nilai Tercatat Awal Tahun/ *Carrying Amount Beginning Balance* Rp	Penyesuaian/ *Adjustment* Rp	Laba Komprehensif Tahun Berjalan/ *Comprehensive Income for the Year* Rp	Nilai Tercatat Akhir Akhir Periode/ *Carrying Amount Beginning Balance* Rp	
PT Nindya Beton	49	17,063,874,379	17,640,130,000	(7,900,639,630)	26,803,364,750	*PT Nindya Beton*
Saldo per 31 Desember 2019		**17,063,874,379**	**17,640,130,000**	**(7,900,639,630)**	**26,803,364,750**	***Balance as of December 31, 2019***

47. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan / *47. Events After Reporting Period*

a. Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan
Berdasarkan Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) No. 001/DIRUT/KPTS/KDS/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 mengenai penetapan Struktur Organisasi perusahaan PT Nindya Karya (Persero).

a. Change in Company's Organization Structures
Based on the Decree of the Board of Directors of PT Nindya Karya (Persero) No. 001 / DIRUT / KPTS / KDS / 01/2021 dated January 5, 2021 regarding the determination of the Company Organization Structure PT Nindya Karya (Persero).

Adapun Perubahan Struktur Organisasi yang baru adalah sebagai berikut :

The new Organizational Structure Changes are as follows:

Unit Bisnis/ ***Business Unit***	**Wilayah Operasi/** ***Work Areas***	**Kedudukan/** ***Location***
Divisi Infrastruktur I/ *Infrastructure I Division*	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil non jalan dan jembatan seperti bendungan, bangunan air, pelabuhan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. *Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for the entire building project for the works of buildings, airports, area development, and others as well as selected investment and development projects.*	Jakarta
Divisi Infrastruktur II/ *Infrastructure II Division*	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infratruktur sipil jalan dan jembatan seperti jalan, jembatan, LRT, jalur kereta api, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. *Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for road and bridge civil infrastructure projects such as road, bridge, LRT, railway, and others as well as selected investment and development projects.*	Jakarta
Divisi Gedung/ *Building Division*	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek gedung, bandara, pengembangan kawasan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. *Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for the entire building project for the works of buildings, airports, area development, and others as well as selected investment and development projects.*	Jakarta

Unit Bisnis/ *Business Unit*	**Wilayah Operasi/** *Work Areas*	**Kedudukan/** *Location*
Divisi EPC/ *EPC Division*	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek EPC seperti *power plant* , *industrial plant* , *smelter,* transmisi-distribusi air, listrik, *oil* dan *gas,* dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan. *Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for EPC projects such as power plant, industrial plant, smelter, transmission-distribution of water, electricity, oil and gas, and others as well as selected investment and development projects.*	Jakarta
Divisi Properti/ *Property Division*	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk mengembangkan usaha properti dan *realty.* *The operational area covers all of Indonesia, domiciled in Jakarta by carrying out the Company's activities in the marketing to production sectors to develop property and realty businesses.*	Jakarta
Divisi Peralatan/ *Equipment Division*	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan jasa penyewaan peralatan proyek *The operational area covers all of Indonesia, domiciled in Jakarta by carrying out the Company's activities in the marketing sector to production for project equipment rental service work*	Jakarta

b. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Berdasarkan Akta No. 50 yang dibuat dihadapan Notaris Khairina, SH. Pada hari Selasa, 29 Juni 2021 atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan dijelaskan bahwa pemegang saham menyetujui untuk melakukan penyesuaian atas saldo laba yang ditentukan penggunaanya sebesar Rp223.784.182.449 menjadi saldo laba belum ditentukan penggunaanya, dengan rincian sebagai berikut:

b. Re-issuance of Consolidated Financial Statements

Based on the Notarial Deed No. 50 by Khairina,Sh. On Tuesday, June 29, 2021 at the Company's Annual General Meeting of Shareholders, it was explained that the shareholders has agreed to adjust the appropriated retained earnings amounted to Rp223,784,182,449 into unappropriated retained earnings, with the details are as follows:

	2020			
	Sebelum Penyajian Kembali / *Before Restated* Rp	Penyajian Kembali / *Restated* Rp	Setelah Penyajian Kembali / *After Restated* Rp	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				***Consolidated Statements of Financial Position***
Saldo Laba:				*Retained Earnings:*
Ditentukan Penggunaannya	337,392,926,062	(223,784,182,449)	113,608,743,613	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	273,549,921,917	223,784,182,449	497,334,104,366	*Unappropriated*
Jumlah	**610,942,847,979**	**--**	**610,942,847,979**	***Total***
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian				***Consolidated Statements of Changes in Equity***
Saldo Laba Ditentukan Penggunaanya	337,392,926,062	(223,784,182,449)	113,608,743,613	*Approriated Retained Earnings*
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaanya	273,549,921,917	223,784,182,449	497,334,104,366	*Unapproriated Retained Earnings*
Jumlah	**1,518,074,900,606**	**--**	**1,518,074,900,606**	***Total***

c. Perpanjangan Fasilitas Pinjaman Bank

Perusahaan telah menandatangani perjanjian perpanjangan fasilitas pinjaman dari beberapa bank sehubungan dengan pembiayaan modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.**
   Berdasarkan dokumen perjanjian No.245/KKO-KO2/2021 tanggal 5 April 2021 dijelaskan bahwa Perusahaan telah memperpanjang jangka waktu pinjaman dari tanggal 11 April 2021 sampai dengan 11 April 2022 atas pinjaman modal kerja *standby loan* sebesar Rp700.000.000.000 dan pinjaman *switchable non cash loan* dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp300.000.000.000.

2. **PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)**
   Berdasarkan dokumen perjanjian No.452/SMI/DPI/0621 tanggal 22 Juni 2021 dijelaskan bahwa Perusahaan telah memperpanjang jangka waktu pinjaman dari tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 27 Desember 2023 atas pinjaman modal kerja sebesar Rp200.000.000.000

3. **Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia**
   Berdasarkan dokumen perjanjian No.006/PJMN/SP3/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 dijelaskan bahwa Perusahaan telah memperpanjang jangka waktu pinjaman dari tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2022. Perusahaan memperpanjang beberapa jenis fasilitas pinjaman yang terdiri dari Kredit Modal Kerja sebesar Rp400.000.000.000 dengan maksimal kredit *Trade Finance – Pre Shipment Financing* untuk pembiayaan

c. The Extension of Bank Loan Facilities

The Company has signed agreements of loan facility extension from several banks related to working capital, with details as follows:

1. ***PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.***
   Based on the agreement document No.245/KKO-KO2/2021 dated April 5, 2021, it was explained that the Company has extended the loan's period start on April 11, 2021 to April 11, 2022 for stand by loan as working capital is amounted to Rp700,000,000,000,000 switchable non-cash loan with maximum credit limit is amounting to Rp300,000,000,000.

2. ***PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)***
   Based on the agreement document No.452/SMI/DPI/0621 dated June 22, 2021, it was explained that the Company has extended the loan's period from June 27, 2021 to December 27, 2023 for working capital amounting to Rp.200,000,000,000.

3. ***Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia***
   Based on the agreement document No.006/PJMN/SP3/06/2021 dated June 8, 2021, it was explained that the Company has extended the loan's period from June 9, 2021 to June 9, 2022. The Company extended several types of loan facilities consists of Credit of Working Capital amounting to Rp.400,000,000,000 with sub maximum credit of Trade Finance – Pre Shipment Financing for Trust Receipt (LC/SKBDN) financing amounting to Rp. 150,000,000,

Trust Receipt (LC/SKBDN) sebesar Rp150.000.000, KMKE *Trade Finance – Pre Shipment* atas dasar penerbitan *LC/SKBDN* sebesar Rp150.000.000.000, dan Pinjaman Indonesia Eximbank sebesar Rp150.000.000.000.

KMKE Trade Finance – Pre Shipment on the basis of issuance of LC/SKBDN of Rp. 150,000,000,000, Indonesia Eximbank Loan amounting to Rp150,000,000,000.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Tagihan Pajak

Perusahaan telah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar pada tanggal 18 Mei 2021 atas Pajak Pertambahan Dalam Negeri untuk masa Desember 2019 sebesar Rp15.651.426.891 dan Surat Tagihan Pajak atas kekurangan Pajak Final, Pajak Penghasilan 21, Pajak Penghasilan 22 dan Pajak Penghasilan 23 untuk masa pajak tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp107.087.150 yang diterima pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2021.

d. Over payment Tax Assesment Letter and Tax Collection Letter

The Company has received over payment tax assessment letter on May 18, 2021 for Value Added Tax – In for the period of December 2019 amounting to Rp15,651,426,891 and Tax Collection Letter for the underpayment of Final Tax, Income Tax 21, Income Tax 22 and Income Tax 23 for the tax year of 2019 and 2020 amounting to Rp107,087,150 that received in the February to June 2021.

48. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Bisnis

48. The Impact of COVID-19 on Business

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, telah terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kenaikan nilai tukar mata uang asing dan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi.

Secara langsung dan tidak langsung, dampak ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional Grup selama tahun 2020.

Adapun dampak dari pandemi COVID-19 sebagai berikut :

1. Pendapatan Group hanya tercapai 49% dari rencana awal.
2. Laba bersih Group hanya tercapai 17% dari rencana awal.
3. Adanya *refocusing* anggaran APBN terutama dari Kementerian PUPR dimana kebijakan pemerintah untuk fokus terhadap penyelesaian Pandemi sehingga anggaran untuk konstruksi dialihkan ke Kesehatan. Adanya *refocusing* anggaran ini tidak merubah jangka waktu pelaksanaan proyek, sehingga penyelesaian proyek tetap harus selesai tepat waktu, dan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap di lakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk performa Perusahaan.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, there has been a pandemic of the COVID-19 which has resulted in an increase in foreign currency exchange rates and decreased activities in the economic sector.

Directly and indirectly, this impact will certainly affect the Group's operational activities during 2020.

The impacts of the COVID-19 pandemic are as follows:

1. Revenue only reached 49% of the original budget.
2. Net profit only reached 17% of the original budget.
3. There is a refocusing of the APBN budget, especially from the Ministry of PUPR, where the government policy is to focus on solving the pandemic so that the budget for construction is diverted to Health. This budget refocusing does not change the project implementation period, so that project completion must still be completed on time, and for National Strategic Projects (PSN), the acceleration of work implementation is carried out as a form of Company's performance.

4. Tagihan Bruto yang cukup besar pada akhir tahun 2020 dimana rencana anggaran yang terkena *refocusing* baru akan dicairkan pada Triwulan 1 dan 2 Tahun 2021. Pinjaman kepada pihak perbankan dan pendanaan lainnya juga mengalami peningkatan seiring dengan percepatan penyelesaian pekerjaan PSN dan juga proyek lainnya dimana tidak ada perubahan atau addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan.
5. *Financing Debt* to EBITDA yang tinggi dikarenakan utang yang tinggi dibandingkan dengan *earning* Perusahaan yang terdampak COVID-19 dan adanya *refocusing* anggaran. Anggaran APBN Tahun 2020 untuk konstruksi yang dialokasikan untuk kesehatan juga mengakibatkan tertundanya tender pengadaan proyek yang semula sudah termatrix di tahun 2020 diundur ke triwulan 2 Tahun 2021 sehingga perolehan proyek atau kontrak pekerjaan Perusahaan tahun 2020 tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, manajemen melakukan langkah-langkah berikut untuk memitigasi risiko signifikan atas dampak pandemic COVID-19:

1. Melakukan efisiensi beban usaha (beban pemasaran, beban umum dan administrasi) sebesar kurang lebih 31% dari rencana awal.
2. Grup mulai memasuki proyek investasi mengingat sebagian besar dana APBN untuk konstruksi dialihkan ke Kesehatan.
3. Mempercepat proses pengajuan restitusi PPN.
4. Memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran ke suplier melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) menjadi 180 hari.
5. Mencari alternatif pendanaan selain dari perbankan untuk membiayai pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional (PSN) sehingga dapat selesai tepat waktu.

Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

4. Gross Amount bill at the end of 2020 where the budget plan that is subject to refocusing will only be disbursed in Q1 and Q2 of 2021. Loans to banks and other funding have also increased along with the acceleration of completion of PSN work and other projects where it is not there is a change or addendum to the contract extension to the implementation time.

5. High Financy Debt to EBITDA due to high debt compared to Company's earnings affected by COVID-19 and the budget refocusing. The 2020 State Budget budget for construction allocated for health also resulted in delays in the project procurement tender which was originally matrix in 2020 being postponed to Q2 of 2021 so that the acquisition of the 2020 project or work contract for The Company was not as planned.

Based on the analysis above, management is taking the following steps to mitigate the significant risk of the impact of the COVID-19 pandemic:

1. The efficiency of operating expenses (marketing expenses, general and administrative expenses) is approximately 31% of the original budget.
2. The Group has begun to enter into investment projects considering that most of the APBN funds for construction have been diverted to Health.
3. Speed up the process of submitting VAT refunds.
4. Extending the due date for payments to suppliers via SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) to 180 days.
5. Looking for alternative funding apart from banks to finance the work of national strategic projects (PSN) so that they can be completed on time.

The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

49. Transaksi Non Kas / *49. Non Cash Transaction*

Pada tahun 2019, Perusahaan dan Entitas Anak memiliki transaksi non kas sehubungan dengan penambahan aset tetap dan property investasi sebesar Rp38.092.589.696

On 2019, the Company and Subsidiaries have non cash transactions regarding acquisition of property, plant and equipments and investment properties is amounting to Rp38,092,589,696.

50. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan / *50. Reconciliation of Liabilities Arising From Financing Activities*

Tabel dibawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	1 Januari 2020 / *January 1, 2020*	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ *Financing Cash Flows*	Perubahan Transaksi NonKas/ *Non-Cash Changes*		31 Desember 2020 / *December 31, 2020*	
			Selisih Kurs/ *Foreign Exchange*	Nilai Wajar/ *Fair Value*		
Pinjaman Bank dan Non Bank	445,000,000,000	584,462,493,489	--	--	1,029,462,493,489	*Bank and Non-Bank Loans*
Surat Utang Jangka Menengah	300,000,000,000	(300,000,000,000)	--	--	--	*Medium Term Notes*

	1 Januari 2019 / *January 1, 2019*	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ *Financing Cash Flows*	Perubahan Transaksi NonKas/ *Non-Cash Changes*		31 Desember 2019 / December 31, 2019	
			Selisih Kurs/ *Foreign Exchange*	Nilai Wajar/ *Fair Value*		
Pinjaman Bank dan Non Bank	745,000,000	300,000,000	--	--	445,000,000,000	*Bank and Non-Bank Loans*
Surat Utang Jangka Menengah	300,000,000	(300,000,000)	--	--	300,000,000,000	*Medium Term Notes*

51. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian / *51. The Management's Responsibility on the Consolidated Financial Statements*

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 1 Juli 2021.

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statement. The consolidated financial statement were authorized for issue by the Directors on July 1, 2021.

NINDYA

PT. NINDYA KARYA (PERSERO)
General Contractor - EPC - Investment

Kantor Pusat :
Jl. Letjen. MT. Haryono
kav. 22 , Jakarta 13630

Online
Email : nindyakarya@nindyakarya.co.id
website : www.nindyakarya.com

Phone & Fax
Phone : +62 21 8093276
Fax : +62 21 8093105